



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA CILEGON TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Cilegon Tahun 2022 ini dapat disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Penyusunan dan penyampaian LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2022 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2022 merupakan representasi tertulis terhadap pencapaian kinerja dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cilegon dalam melaksanakan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang mana seluruhnya telah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun evaluasi hasil kinerja dalam LKPJ didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cilegon Tahun 2022 yang merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Sistematika dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun substansi dokumen LKPJ yang diatur terdiri dari visi, misi dan data umum daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah, kebijakan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Kami berharap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam dokumen LKPJ ini tergambarkan dengan baik dan digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon di masa mendatang, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

Cilegon, Maret 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
Bab 1: Pendahuluan.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.2.1 Visi Kota Cilegon	2
1.2.2 Misi Kota Cilegon Tahun 2021-2026.....	3
1.3 Data Umum Daerah.....	3
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	3
1.3.2 Data Kependudukan	4
1.3.3 Jumlah ASN (PNS dan PPPK)	7
1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	11
3.1.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	11
3.1.1.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	14
1) Pendapatan Asli Daerah	15
A.1 Hasil Pajak Daerah.....	17
A.2 Hasil Retribusi Daerah.....	19
A.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24
A.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	26
2) Pendapatan Transfer.....	30
B.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	32
B.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah.....	35
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	36
3.1.1.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	38
A. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	38
1. Intensifikasi Pajak Daerah.....	39
2. Intensifikasi Retribusi Daerah	39
3. Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah	41
4. Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41
B. Intensifikasi Pendapatan Transfer	42
1. Intensifikasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	42
2. Intensifikasi Pendapatan Transfer Antar Daerah	43
C. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2022	44
1. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	44
2. Ekstensifikasi Pendapatan Transfer.....	46
1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	46
3.1.1.1 TARGET DAN REALISASI BELANJA.....	47
A. Belanja Operasi.....	48
A.1 Belanja Pegawai.....	49
A.2 Belanja Barang dan Jasa	50
A.3 Belanja Hibah.....	52
A.4 Belanja Bantuan Sosial.....	53
B. Belanja Modal	54

B.1. Belanja Modal Tanah	55
B.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56
B.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57
B.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59
B.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60
C. Belanja Tidak Terduga	61
D. Belanja Daerah bersumber dana dari Bantuan Keuangan, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah	62
D.1 Belanja Daerah yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten	62
D.2 Belanja Daerah bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	63
D.3 Belanja Daerah bersumber dana dari Dana Insentif Daerah	65
1.3.6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	66
1.4 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah	69
1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69
1.4.2 Tingkat Kemiskinan	73
1.4.3 Ketenagakerjaan	76
1.4.4 Perekonomian	78
1.4.5 Perkembangan Investasi	81
1.4.6 Gini Ratio	82
1.4.7 Tingkat Inflasi	83
2.1 Perubahan Perwal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	85
2.2 Perubahan Perda APBD	86
2.2.1 Latar Belakang	86
2.2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	87
2.2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	88
2.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	88
2.2.5 Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2022	88
Bab 3: Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	90
3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90
3.1.1.1 Urusan Pendidikan	90
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN	90
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	90
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	118
3.1.1.2 Urusan Kesehatan	122
DINAS KESEHATAN, RSUD, UPTD PUSKESMAS, LABKESDA, P2KT DAN JAMKESMAS	122
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	122
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	263
3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN UPTD PERBENGKELAN, ALAT BERAT DAN LABORATORIUM	271
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	271
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	284
3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	317



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CILEGON	317
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	317
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	323
3.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	328
A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	328
A.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	328
A.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	333
B. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	335
B.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	335
B.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	341
C. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	345
C.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	345
C.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	350
3.1.1.6 Sosial	354
DINAS SOSIAL DAN UPTD DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	354
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	354
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	370
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	374
3.1.2.1 Tenaga Kerja	374
DINAS TENAGA KERJA DAN UPTD LATIHAN KERJA	374
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	374
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	380
3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	384
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.....	384
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	384
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	399
3.1.2.3 Pangan	404
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	404
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	404
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	409
3.1.2.4 Pertanahan.....	416
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CILEGON.....	416
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	416
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	418
3.1.2.5 Lingkungan Hidup	419
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I-IV, DAN UPTD TPSA	419
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	419
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	433
3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	446
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	446
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	446
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	454
3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	458
3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	459





DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD KELUARGA BERENCANA	459
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	459
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	474
3.1.2.9 Perhubungan.....	478
DINAS PERHUBUNGAN, UPTD PENGELOLAAN SARPRAS PERHUBUNGAN, UPTD PARKIR.....	478
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	478
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	485
3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika.....	490
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK.....	490
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	490
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	496
3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	506
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR.....	506
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	506
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	517
3.1.2.12 Penanaman Modal	528
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	528
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	528
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	534
3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.....	547
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, UPTD PEMUSATAN LATIHAN CABANG OLAHRAGA BINAAN	547
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	547
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	552
3.1.2.14 Statistik.....	558
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK.....	558
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	558
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	560
3.1.2.15 Persandian	563
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK.....	563
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	563
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	565
3.1.2.16 Kebudayaan.....	568
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	568
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	568
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	572
3.1.2.17 Perpustakaan	573
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	573
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	573
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	577
3.1.2.18 Kearsipan.....	580
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	580
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	580
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	583



3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	586
3.1.3.1	Kelautan dan Perikanan	586
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (UPTD BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU)	586
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	586
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	588
3.1.3.2	Pariwisata.....	591
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	591
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	591
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	592
3.1.3.3	Pertanian	594
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN, DAN UPT KAWASAN PERTANIAN TERPADU	594
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	594
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	603
3.1.3.4	Perdagangan.....	611
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	611
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	611
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	621
3.1.3.5	Perindustrian	632
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	632
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	632
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	636
3.1.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah.....	643
3.1.4.1	Sekretariat Daerah.....	643
	1. Bagian Pemerintahan	643
	2. Bagian Organisasi.....	647
	3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	649
	4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	652
	5. Bagian Administrasi Pembangunan	655
	6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	657
	7. Bagian Hukum dan HAM	658
	8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	661
	9. Bagian Umum.....	664
3.1.4.2	Sekretariat DPRD	674
	SEKRETARIAT DPRD	674
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	674
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	687
3.1.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689
3.1.5.1	Perencanaan.....	689
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	689
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	689
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	698
3.1.5.2	Keuangan	702
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, UPTD PAJAK WILAYAH I- IV.....	702



A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	702
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	722
3.1.5.3 Kepegawaian	735
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANNUSIA, UPTD	
DATA DAN INFORMASI PEGAWAI, SEKRETARIAT KORPRI	735
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	735
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	742
3.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan	746
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ...	746
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	746
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	748
3.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan	750
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	750
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	750
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	753
3.1.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintah Daerah	754
3.1.6.1 Pengawasan.....	754
INSPEKTORAT DAERAH.....	754
A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	754
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	757
3.1.7 Unsur Kewilayahan	762
1. KECAMATAN CILEGON	762
1.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	762
1.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	776
2. KECAMATAN CIWANDAN	778
2.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	778
2.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	794
3. KECAMATAN CIBEBER.....	798
3.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	798
3.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	818
4. KECAMATAN GROGOL	823
4.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	823
4.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	838
5. KECAMATAN PULOMERAK	844
5.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	844
5.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	859
6. KECAMATAN JOMBANG	861
6.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	861
6.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	875
7. KECAMATAN CITANGKIL	882
7.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	882
7.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	901
8. KECAMATAN PURWAKARTA	906
8.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	906
8.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program.....	922
3.1.8 Unsur Pemerintahan Umum.....	926





3.1.8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	926
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	926
	A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	926
	B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program	935
3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	940
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	947
3.4	Pencapaian 19 Program Prioritas & Janji Politis	1008
Bab 4 :	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan & Penugasan.....	1039
Bab 5 :	Penutup	1040
LAMPIRAN		1048



DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1a Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan 3

Tabel 1.3.2a Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022 5

Tabel 1.3.2b Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2022 7

Tabel 1.3.4a Jumlah aparatur negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2022 7

Tabel 1.3.4c Proporsi Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin di Kota Cilegon, 2022 8

Tabel 1.3.4b Jumlah ASN menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, Tahun 2022 9

Tabel 1.3.4c Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, 2022 9

Tabel 1.3.5.2a Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 15

Tabel 1.3.5.2b Rencana dan Realisasi PAD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 16

Tabel 1.3.5.2c Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022...18

Tabel 1.3.5.2d Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 21

Tabel 1.3.5.2e Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 25

Tabel 1.3.5.2e Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Berdasarkan BUMD) 25

Tabel 1.3.5.2f Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....27

Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 27

Tabel 1.3.5.2g Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 ..31

Tabel 1.3.5.2h Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 33

Tabel 1.3.5.2i Rencana dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kota Cilegon Tahun Anggaran 202235

Tabel 1.3.6.1a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 47

Tabel 1.3.6.1b Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Kota Cilegon Tahun 2022.....48

Tabel 1.3.6.1c Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 50

Tabel 1.3.6.1d Rencana dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Cilegon Tahun 2022.....51

Tabel 1.3.6.1e Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022.....53

Tabel 1.3.6.1f Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 202254

Tabel 1.3.6.1g Rencana dan Realisasi Belanja Modal Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 55

Tabel 1.3.6.1i Rencana dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Cilegon Tahun Anggaran 202256

Tabel 1.3.6.1j Rencana dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 57

Tabel 1.3.6.1k Rencana dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 58

Tabel 1.3.6.1l Rencana dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 59

Tabel 1.3.6.1m Rencana dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 60

Tabel 1.3.6.1n Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.....61

Tabel 1.3.6.1o Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2022 62

Tabel 1.3.6.1p Target dan Realisasi Kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 63

Tabel 1.31 Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 64

Tabel 1.3.6.1q Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana Dana Insentif Daerah Tahun 2022 65

Tabel 1.3.7a Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2022.....66

Tabel 1.3.7b Penyertaan Modal Kota Cilegon Tahun 2003-2022.....66

Tabel 1.3.6a Ringkasan Realisasi APBD Kota Cilegon Tahun 2022 68

Tabel 3.1.1.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan 90

Tabel 3.1.1.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan 122

Tabel 3.1.1.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271
Tabel 3.1.1.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	317
Tabel 3.1.1.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	328
Tabel 3.1.1.5b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	335
Tabel 3.1.1.5c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	345
Tabel 3.1.1.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial	354
Tabel 3.1.2.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Tenaga Kerja	374
Tabel 3.1.2.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA	384
Tabel 3.1.2.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pangan	404
Tabel 3.1.2.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan	416
Tabel 3.1.2.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup	419
Tabel 3.1.2.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	446
Tabel 3.1.2.7a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	458
Tabel 3.1.2.8a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	459
Tabel 3.1.2.9a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan	478
Tabel 3.1.2.10a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika	490
Tabel 3.1.2.11a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	506
Tabel 3.1.2.12a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal	528
Tabel 3.1.2.13a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga	547
Tabel 3.1.2.14a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik	558
Tabel 3.1.2.15a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian	563
Tabel 3.1.2.16a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan	568
Tabel 3.1.2.17a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan	573
Tabel 3.1.2.18a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan	580
Tabel 3.1.3.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan	586
Tabel 3.1.3.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata	591
Tabel 3.1.3.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata	594
Tabel 3.1.3.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan	611
Tabel 3.1.3.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perindustrian	632
Tabel 3.1.4.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	643
Tabel 3.1.4.1b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan RB)	647
Tabel 3.1.4.1c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	649
Tabel 3.1.4.1d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Pembangunan)	652
Tabel 3.1.4.1e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Sosial Kemasyarakatan)	655
Tabel 3.1.4.1f Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Program dan Keuangan)	657
Tabel 3.1.4.1g Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)	658



Tabel 3.1.4.1h Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) 661

Tabel 3.1.4.1i Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Umum) 664

Tabel 3.1.4.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat DPRD..... 674

Tabel 3.1.5.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan..... 689

Tabel 3.1.5.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Keuangan..... 702

Tabel 3.1.5.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian..... 735

Tabel 3.1.5.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan..... 746

Tabel 3.1.5.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penelitian dan Pengembangan 750

Tabel 3.1.6.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengawasan..... 754

Tabel 3.1.7.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Cilegon) 762

Tabel 3.1.7.1b. Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Ciwandan) 778

Tabel 3.1.7.1c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Cibeber) 798

Tabel 3.1.7.1d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Grogol).. 823

Tabel 3.1.7.1e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Pulomerak) 844

Tabel 3.1.7.1f Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Jombang) 861

Tabel 3.1.7.1g Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Citangkil) 882

Tabel 3.1.7.1h Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Purwakarta) 906

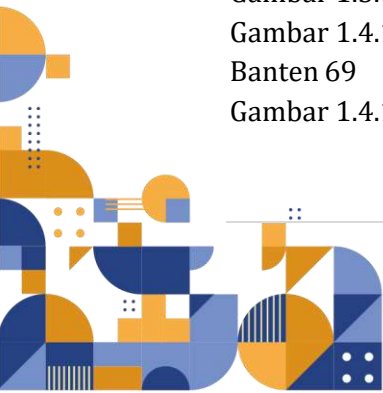
Tabel 3.1.8.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) 926





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1a Peta Kota Cilegon.....	4
Gambar 1.3.2.a Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022	5
Gambar 1.3.2c Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022.....	6
Gambar 1.3.2d Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022	7
Gambar 1.3.4a Jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2022.	8
Gambar 1.3.5.1a Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2018-2022	12
Gambar 1.3.5.1b Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018-2022	12
Gambar 1.3.5.1c Target dan Realisasi Pajak Daerah 2018-2022.....	13
Gambar 1.3.5.1d Kinerja Retribusi Daerah 2018-2022.....	14
Gambar 1.3.5.2a Grafik Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022	15
Gambar 1.3.5.2b Capaian PAD beserta Komponennya Tahun 2022.....	17
Gambar 1.3.5.2c Distribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	17
Gambar 1.3.5.2d Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah.....	19
Gambar 1.3.5.2e Distribusi Realisasi Pajak Daerah	19
Gambar 1.3.5.2f Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2022	22
Gambar 1.3.5.2g Capaian Komponen Retribusi Jasa Umum.....	23
Gambar 1.3.5.2h Capaian Komponen Retribusi Jasa Usaha.....	23
Gambar 1.3.5.2i Capaian Komponen Retribusi Perizinan Tertentu	24
Gambar 1.3.5.2j Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26
Gambar 1.3.5.2k Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah.....	29
Gambar 1.3.5.2l Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah	29
Gambar 1.3.5.2m Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30
Gambar 1.3.5.2n Capaian Komponen Pendapatan Transfer	32
Gambar 1.3.5.2o Capaian Komponen Dana Perimbangan.....	32
Gambar 1.3.5.2p Target & Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	34
Gambar 1.3.5.2q Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus 2022	35
Gambar 1.3.5.2r Target & Realisasi Komponen Pendapatan Bagi Hasil.....	36
Gambar 1.3.5.2t Diagram Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2022	37
Gambar 1.3.5.2u Diagram Persentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2022	38
Gambar 1.3.6.1a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	47
Gambar 1.3.6.1b Kinerja Belanja Daerah 2018 – 2022.....	48
Gambar 1.3.6.1c Rencana & Realisasi Belanja Operasi Kota Cilegon Tahun 2022.....	49
Gambar 1.3.6.1d Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Operasi.....	50
Gambar 1.3.6.1e Realisasi Komponen Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi.....	52
Gambar 1.3.6.1f Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	53
Gambar 1.3.6.1g Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun 2022.....	54
Gambar 1.3.6.1h Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	55
Gambar 1.3.6.1j Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Tanah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	56
Gambar 1.3.6.1k Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57
Gambar 1.3.6.1l Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58
Gambar 1.3.6.1m Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi...60	
Gambar 1.3.6.1n Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	61
Gambar 1.4.1a Pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten	69
Gambar 1.4.1a Grafik Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2017-2022	69





Gambar 1.4.1a Persentase pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten.....70

Gambar 1.4.1b Grafik Perkembangan dan % pertumbuhan IPM Kota Cilegon Tahun 2018-202270

Gambar 1.4.1l IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional.....72

Gambar 1.4.2a Tingkat Kemiskinan (%) dan Garis Kemiskinan Tahun 2018-2022 74

Gambar 1.4.2b Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2022 74

Gambar 1.4.2c Infografis Kondisi Kemiskinan Kota Cilegon Tahun 2022 75

Gambar 1.4.3a Piramida Penduduk Kota Cilegon 76

Gambar 1.4.3b Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon Tahun 2017-2022 76

Gambar 1.4.3c Perbandingan TPT di 8 Kab/Kota Prov Banten Tahun 2018 - 2022.....77

Gambar 1.4.3c TPT & Target RPJMD 2022 – 2026 (makin rendah makin baik).....77

Gambar 1.4.4b PDRB ADHB & ADHK Kota Cilegon Tahun 2017-2022.....78

Gambar 1.4.4a Laju PDRB ADHK Kota Cilegon Tahun 2022 78

Gambar 1.4.4a Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022.....79

Gambar 1.4.4c Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon Tahun 2017-202279

Gambar 1.4.4d Laju sektoral PDRB ADHK Tahun 2022 80

Gambar 1.4.5a Jumlah Penambahan Investasi dan lahu investasi PMA & PMDN tahun 2022 (dalam jutaan rupiah) 81

Gambar 1.4.5c Perbandingan Realisasi Investasi Kota Cilegon dengan Target RPJMD 2016-2021 (dalam trilyun rupiah) 82

Gambar 1.4.6a Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten.....83

Gambar 1.4.7a Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten 84





Bab 1: Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

1.1 Dasar Hukum

Dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2022 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

- 
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2022-2026.
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99)
 17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10)
 18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 8)
 19. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2022. (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 61)
 20. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2022. (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 71)

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi Kota Cilegon

Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026 merupakan perwujudan dari tahapan ke-4 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon. Merujuk kepada dokumen RPJPD kota Cilegon tahun 2005-2025 pada Periode keempat (2021-2026), arah kebijakan pencapaian visi difokuskan pada upaya optimalisasi daya saing keunggulan daerah melalui pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung lanjut keunggulan daerah, penguatan kompetensi SDM, serta ekspansi potensi perekonomian daerah berbasis industri, perdagangan, dan jasa. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka Visi kota Cilegon untuk RPJMD 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”**.

Adapun indikasi wujud pencapaian **sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021-2026** adalah Meningkatkan layanan pemerintahan; Meningkatkan kualitas pendidikan; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; kesejahteraan masyarakat yang merata; Meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

1.2.2 Misi Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Rumusan umum mengenai upaya-upaya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan visi dituangkan ke dalam uraian “misi”. Bertitik tolak dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 rumusan “misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut:

- 1. Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel;
- 2. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
- 3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
- 4. Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata;
- 5. Mewujudkan Masyarakat Berperadaban.

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Sebagai salah satu kota di Provinsi Banten, Kota Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001). Cilegon dikenal sebagai kota industri dan merupakan salah satu pusat perdagangan, pusat industri baja dan kimia di Pulau Jawa.

Secara geografis, Kota Cilegon berada di bagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur (BT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu (Kabupaten Serang)

Kota Cilegon memiliki luas wilayah ±16.259 Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilegon; Kecamatan Ciwandan; Kecamatan Pulomerak;Kecamatan Cibeber; Kecamatan Grogol; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan Citangkil; dan Kecamatan Jombang.

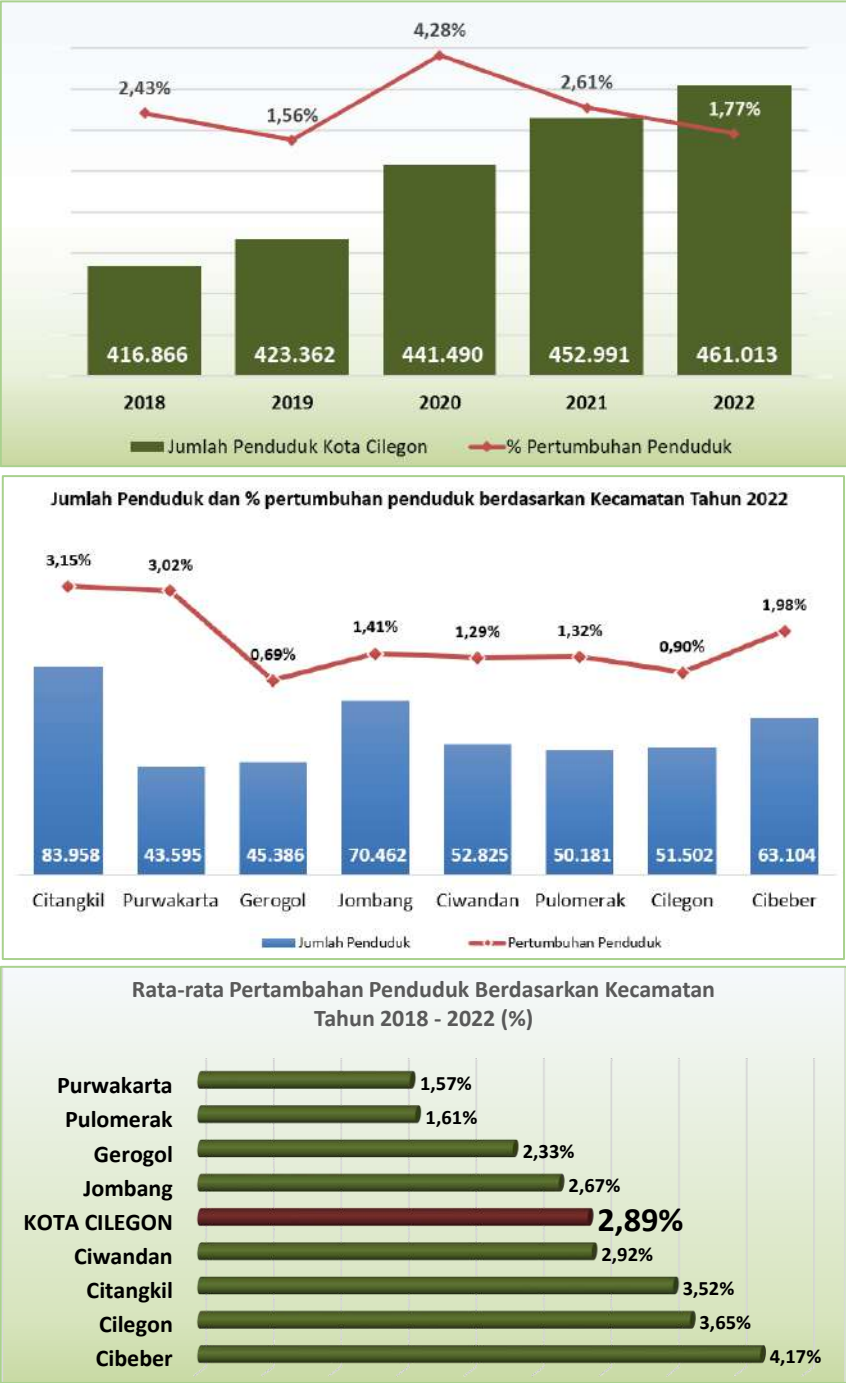
Tabel 1.3.1a Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
			Ha	%	
1	Ciwandan	Tegal Ratu	3.335,90	20,52%	6
2	Citangkil	Kebonsari	2.589,81	15,93%	7
3	Pulomerak	Tamansari	2.569,67	15,81%	4
4	Purwakarta	Purwakarta	1.659,95	10,21%	6
5	Grogol	Grogol	2.371,45	14,59%	4
6	Cilegon	Ciwaduk	821,04	5,05%	5
7	Jombang	Jombang Wetan	1.031,19	6,34%	5
8	Cibeber	Kalitimbang	1.879,54	11,56%	6
Kota Cilegon			16.258,53	100,00	43

Sumber : RTRW Kota Cilegon Tahun 2020-2040

Panjang pantai Kota Cilegon yang menghadap ke Selat Sunda bila diukur secara “lurus” adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km². **Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau**, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil,

Gambar 1.3.2.a Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022



Sumber : Bappedalitbang Kota Cilegon, (2022)

B. Tingkat Kepadatan Penduduk

Kota Cilegon memiliki luas sebesar 162,58 Km² dengan jumlah kecamatan sebanyak 8 kecamatan serta 43 kelurahan. Wilayah terluas di Kota Cilegon adalah Kecamatan Ciwandan dengan luas sebesar 33,36 Km² atau 20,5 % dari total luas wilayah Kota Cilegon. Kepadatan penduduk di Kota Cilegon meningkat dari 2.786 jiwa/km² di 2021 menjadi 2.836 jiwa/km² di Tahun 2022. Kepadatan Penduduk di delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan tingkat kepadatan 6.833 jiwa/km².

Tabel 1.3.2a Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Cibeber	18,80	61.174	3.255	63.104	3.357
2	Cilegon	8,21	49.990	6.089	51.502	6.273

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km²)	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
3	Pulomerak	25,70	49.838	1.939	50.181	1.953
4	Ciwandan	33,36	52.092	1.562	52.825	1.584
5	Jombang	10,31	69.567	6.746	70.462	6.833
6	Gerogol	23,71	44.794	1.889	45.386	1.914
7	Purwakarta	16,60	43.208	2.603	43.595	2.626
8	Citangkil	25,90	82.328	3.179	83.958	3.242
Kota Cilegon		162,59	452.991	2.786	461.013	2.836

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diolah

Perbandingan antara Jumlah Penduduk, Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.3.2c Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022

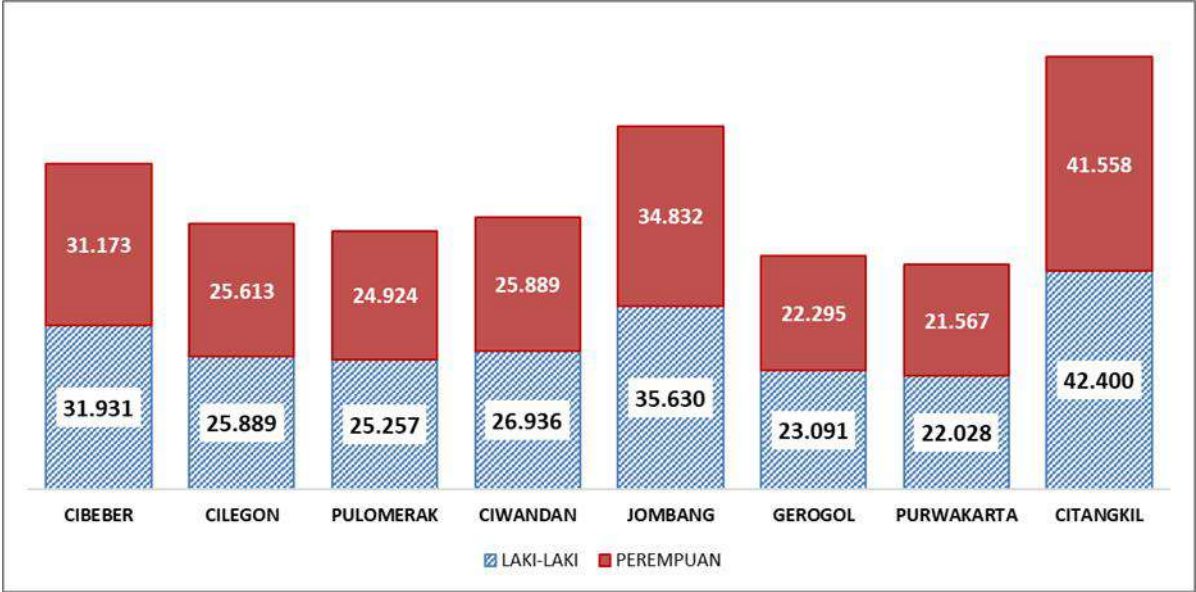


Sumber : Bappedalitbang Kota Cilegon, diolah

C. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 jumlah Penduduk di Kota Cilegon masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 233.162 jiwa dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 227.851 jiwa. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, *sex rasionya* pada tahun 2022 sebesar 102, menurun dibandingkan Sex Ratio 2021 yang sebesar 103. Nilai sex ratio yang melebihi 100 menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Cilegon lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio terbesar terdapat di Kecamatan Ciwandan dan Gerogol yakni sebesar 104, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut dan grafik berikut :

Gambar 1.3.2d Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022



Sumber : Disdukcapil Kota Cilegon, diolah

Tabel 1.3.2b Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2022

Kecamatan		Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Penduduk (Jiwa)			SEX RATIO (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Cibeber	15.705	3.021	18.726	31.931	31.173	63.104	102
2	Cilegon	13.083	2.674	15.757	25.889	25.613	51.502	101
3	Pulomerak	12.897	3.454	16.351	25.257	24.924	50.181	101
4	Ciwandan	13.471	2.582	16.053	26.936	25.889	52.825	104
5	Jombang	17.660	4.106	21.766	35.630	34.832	70.462	102
6	Gerogol	11.726	2.456	14.182	23.091	22.295	45.386	104
7	Purwakarta	11.292	2.236	13.528	22.028	21.567	43.595	102
8	Citangkil	20.899	4.147	25.046	42.400	41.558	83.958	102
KOTA CILEGON		116.733	24.676	141.409	233.162	227.851	461.013	102

Sumber : Disdukcapil Kota Cilegon, diolah

1.3.3 Jumlah ASN (PNS dan PPPK)

Kota Cilegon adalah daerah otonomi yang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai jabatan politis. Jabatan eksekutif tertinggi dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (walikota). Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kota Cilegon mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Cilegon No. 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

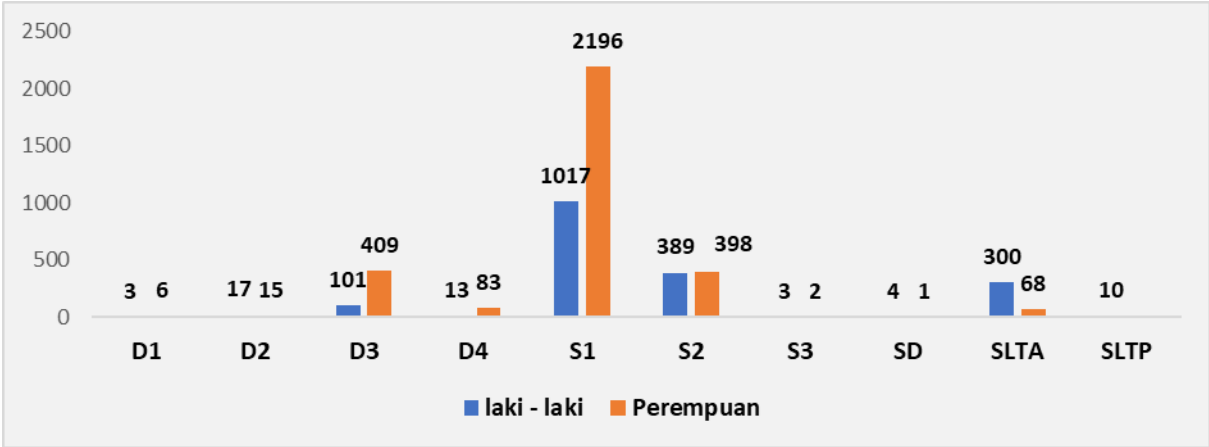
Tabel 1.3.4a Jumlah aparatur negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2022

Tingkat Pendidikan	PNS		Total PNS	PPPK		Total PPPK	Total ASN
	laki-laki	Perempuan		laki-laki	Perempuan		
D1	3	6	9				9
D2	17	15	32				32

D3	101	409	510				510
D4	13	83	96				96
S1	931	1925	2856	86	271	357	3213
S2	389	398	787				787
S3	3	2	5				5
SD	4	1	5				5
SLTA	300	68	368				368
SLTP	10		10				10
JUMLAH	1771	2907	4678	86	271	357	5035

Sumber : BKPSDM Kota Cilegon, diolah

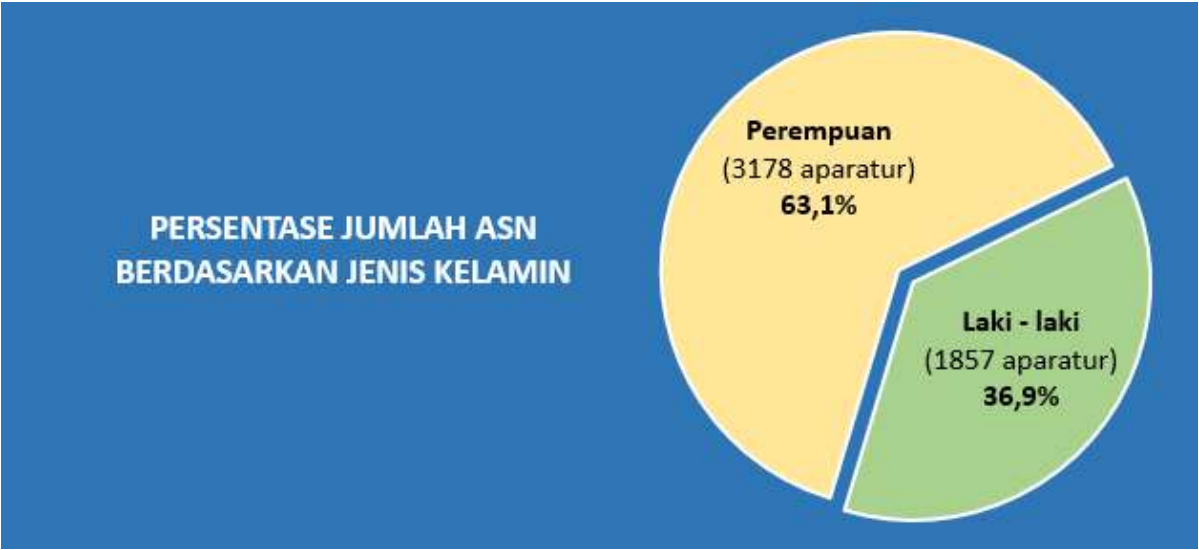
Gambar 1.3.4a Jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2022



Sumber : BKPP Kota Cilegon, 2022

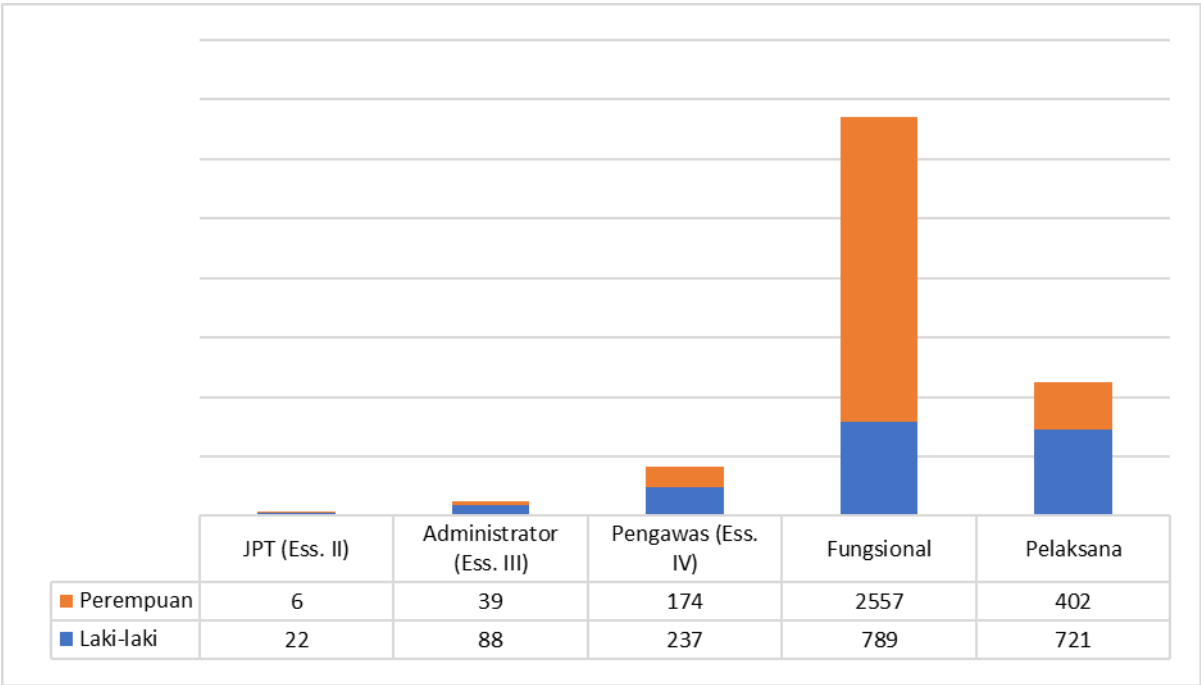
Seperti dapat terlihat pada grafik, Kota Cilegon memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didominasi oleh Perempuan, dari total 5.035 orang ASN di Kota Cilegon sebanyak 3.178 orang (63,1%) ASN perempuan dan sisanya sebanyak 1.857 orang (36,9%) merupakan ASN laki-laki. Apabila dilihat berdasarkan Pendidikan tertinggi, mayoritas ASN di Kota Cilegon berpendidikan S1 sebanyak 3.213 (63,8%).

Tabel 1.3.4c Proporsi Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin di Kota Cilegon, 2022



Sumber : BKPP Kota Cilegon, 2022

Tabel 1.3.4b Jumlah ASN menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, Tahun 2022



Sumber : BKPP Kota Cilegon, 2022

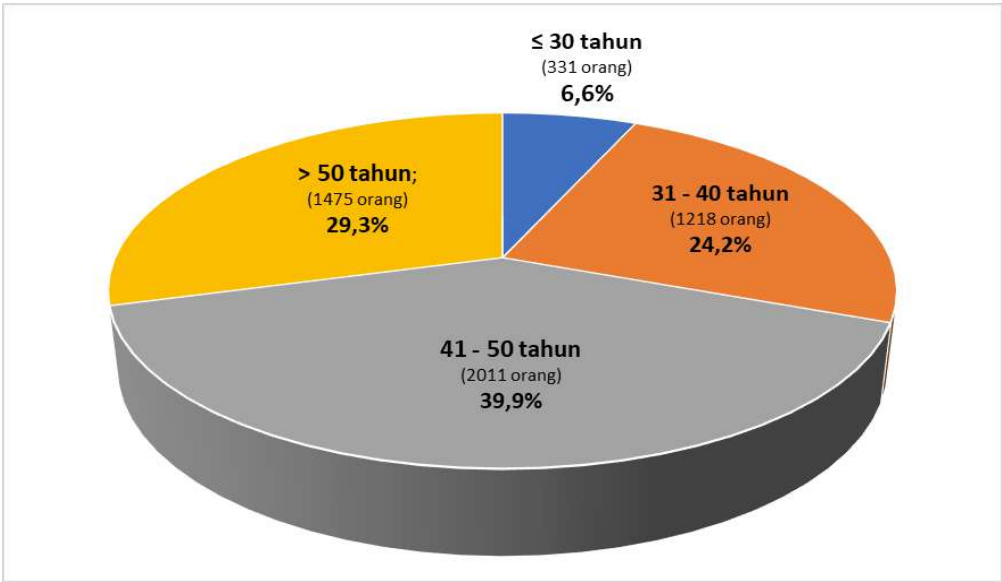
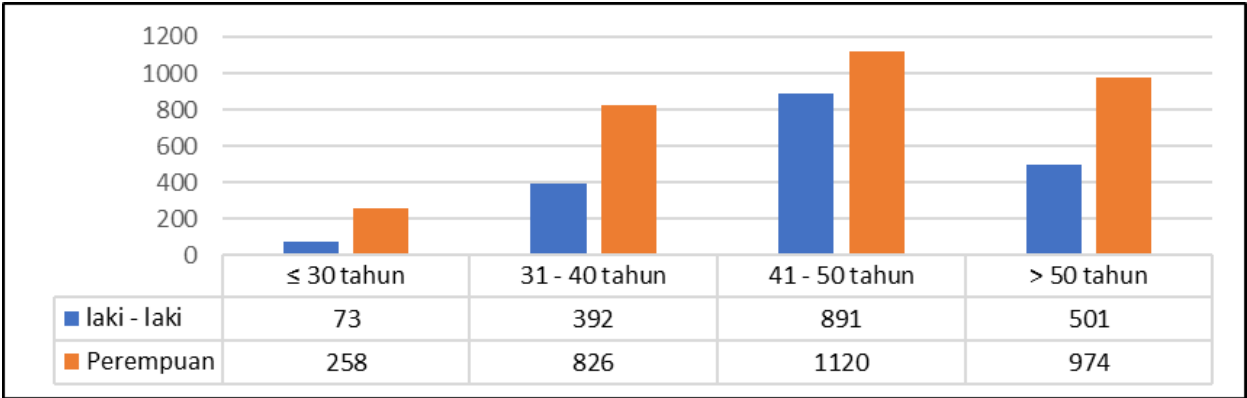
Komposisi ASN Kota Cilegon didominasi Jenis Jabatan Fungsional Tertentu khususnya pada Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan, hal ini dikarenakan Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar minimal yang masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel di atas, Jabatan Fungsional tertentu adalah sebanyak 3.368 orang. Jumlah ASN fungsional di 2022 jauh meningkat dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya sebanyak 2.624 orang, hal ini dikarenakan adanya penyetaraan dan penyederhanaan jabatan dari struktural menjadi fungsional sebagai pemenuhan amanat pemerintah pusat dalam hal penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi pemerintahan.

Tabel 1.3.4c Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, 2022

ASN berdasarkan jenis jabatan & usia	laki - laki	Perempuan	Total
Pelaksana	721	402	1123
≤ 30 tahun	18	21	39
31 - 40 tahun	153	133	286
41 - 50 tahun	409	206	615
> 50 tahun	141	42	183
Administrator	88	39	127
31 - 40 tahun	3	1	4
41 - 50 tahun	51	19	70
> 50 tahun	34	19	53
JPT	22	6	28
41 - 50 tahun	3		3
> 50 tahun	19	6	25
Fungsional	789	2557	3346
≤ 30 tahun	54	237	291
31 - 40 tahun	202	666	868
41 - 50 tahun	296	801	1097
> 50 tahun	237	853	1090
Pengawas	237	174	411

ASN berdasarkan jenis jabatan & usia	laki - laki	Perempuan	Total
≤ 30 tahun	1		1
31 - 40 tahun	34	26	60
41 - 50 tahun	132	94	226
> 50 tahun	70	54	124
Grand Total	1857	3178	5035

Sumber : BKSDM Kota Cilegon, diolah 2022



Apabila dilihat dari kelompok usia, Jumlah ASN Kota Cilegon didominasi kelompok umur 41-50 tahun dengan proporsi sebanyak 39,9%. Adapun kelompok umur tersebut didominasi oleh ASN perembuan pada jenis jabatan fungsional.

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Struktur Pendapatan APBD Kota Cilegon pada Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun jenis Pendapatan sebagai tertuang dalam Pasal 30 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk kelompok *Pendapatan Asli Daerah* dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun kelompok *Pendapatan Transfer* dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas:
 - Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK)
 - Dana Insentif Daerah (DID)
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri atas:
 - Pendapatan Bagi Hasil
 - Bantuan Keuangan

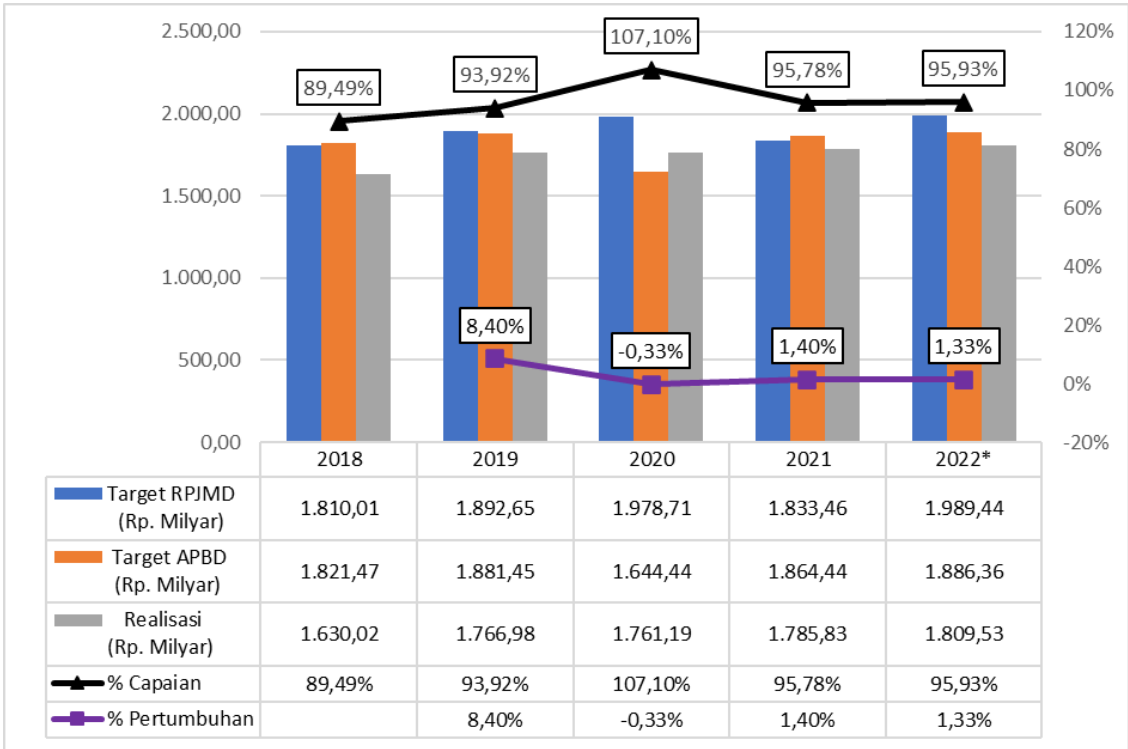
Adapun Pendapatan Hibah BOS yang sebelumnya tercatat dalam *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah* selanjutnya dicatat dalam kode rekening Pendapatan Transfer.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, dengan mempertimbangkan efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat, yang mana upaya tersebut sedapat mungkin tidak membebani masyarakat, yang dapat memunculkan efek distorsi ekonomi yang kontra produktif.

3.1.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah per tahun mengalami fluktuasi karena adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mempengaruhi perekonomian nasional termasuk di Cilegon. Fluktuasi pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan grafik berikut:

Gambar 1.3.5.1a Target dan Realisasi **Pendapatan Daerah** 2018-2022

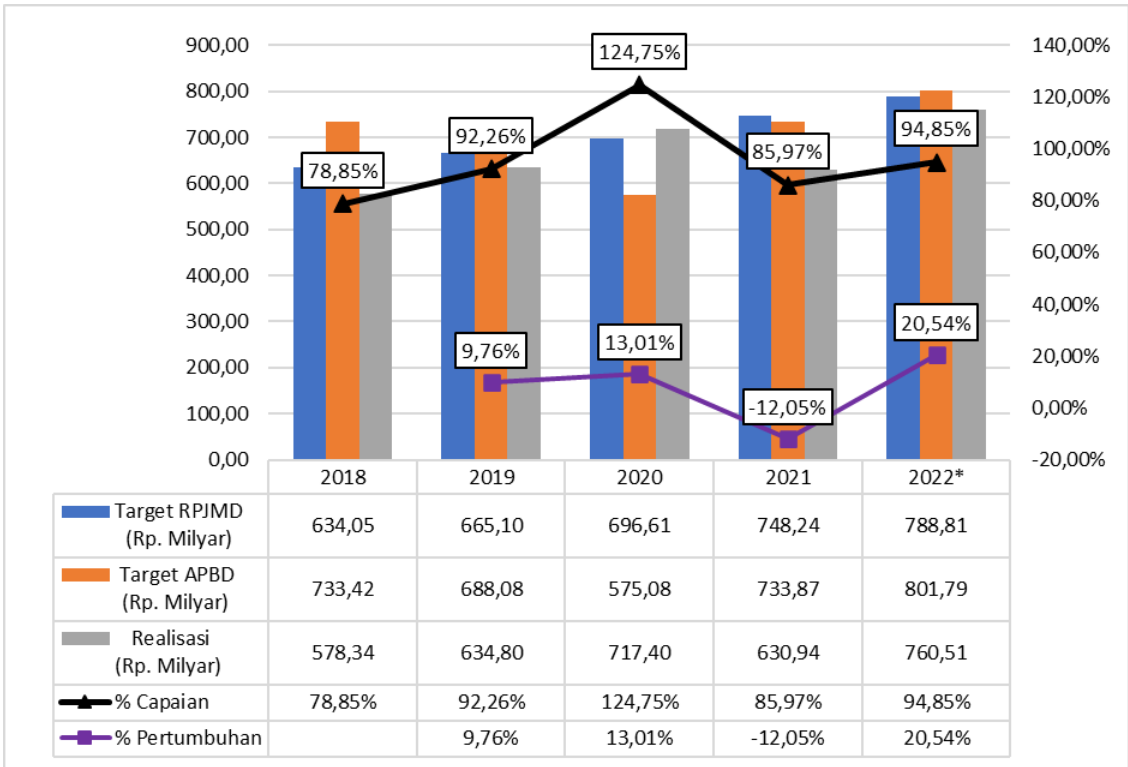


*) 2022 menggunakan data Unaudited

Sumber: LRA Kota Cilegon, diolah

Laju Pertumbuhan Realisasi Pendapatan selama kurun waktu 5 tahun mengalami perubahan secara fluktuatif. Menurun pada tahun 2020, namun kembali berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,40% pada 2021 dan 1,33% pada 2022. penurunan laju pertumbuhan realisasi pendapatan pada tahun 2020 diakibatkan oleh refocusing target anggaran pendapatan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari pusat. Namun berhasil kembali mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2021 yang mana laju pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 1,40% dan tahun 2022 sebesar 1,33%. Secara rinci berdasarkan pendapatan asli daerah serta lebih jauh pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah seperti pada grafik berikut:

Gambar 1.3.5.1b Target dan Realisasi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** 2018-2022



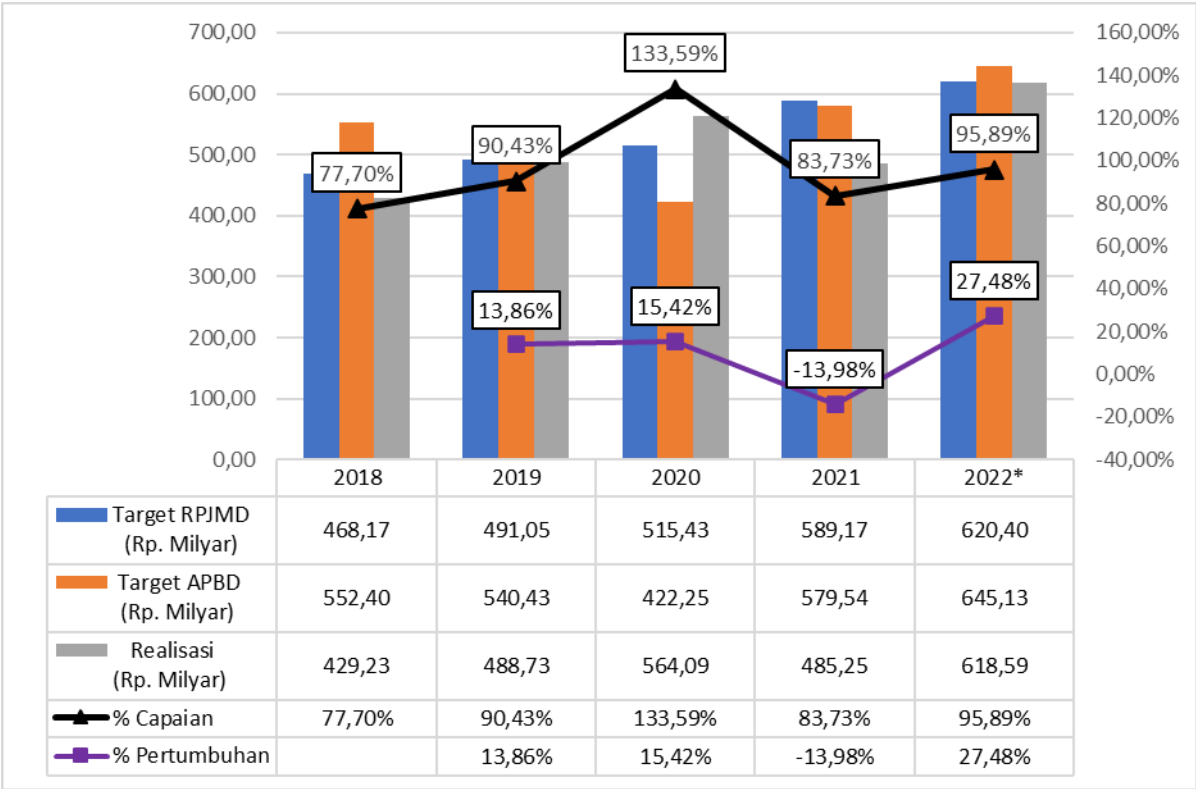
*) 2022 menggunakan data Unaudited

Sumber: LRA Kota Cilegon, diolah

Laju Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh menurunnya penerimaan sektor pajak daerah sekitar 78,8 milyar atau 13,98% serta penurunan penerimaan sektor retribusi sekitar 6,1 milyar atau 30,88%. Sedangkan peningkatan laju pertumbuhan PAD terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2022. Penyebab kenaikan PAD pada tahun 2019 adalah meningkatnya pendapatan dari sektor pajak daerah sekitar 59,4 milyar atau 13,86% meskipun retribusi daerah mengalami penurunan sekitar 99 juta atau 0,53%, pada tahun 2020 peningkatan PAD dipengaruhi oleh sektor pajak daerah sekitar 75,3 milyar atau 15,42% dan dari sektor retribusi daerah sekitar 1,1 milyar atau 6% dan pada tahun 2022 peningkatan PAD dipengaruhi dari sektor pajak daerah sekitar 133,3 milyar atau 27,48% dan dari sektor retribusi daerah sekitar 3,4 milyar atau 24,84%.

Perkembangan pajak daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.3.5.1c Target dan Realisasi Pajak Daerah 2018-2022



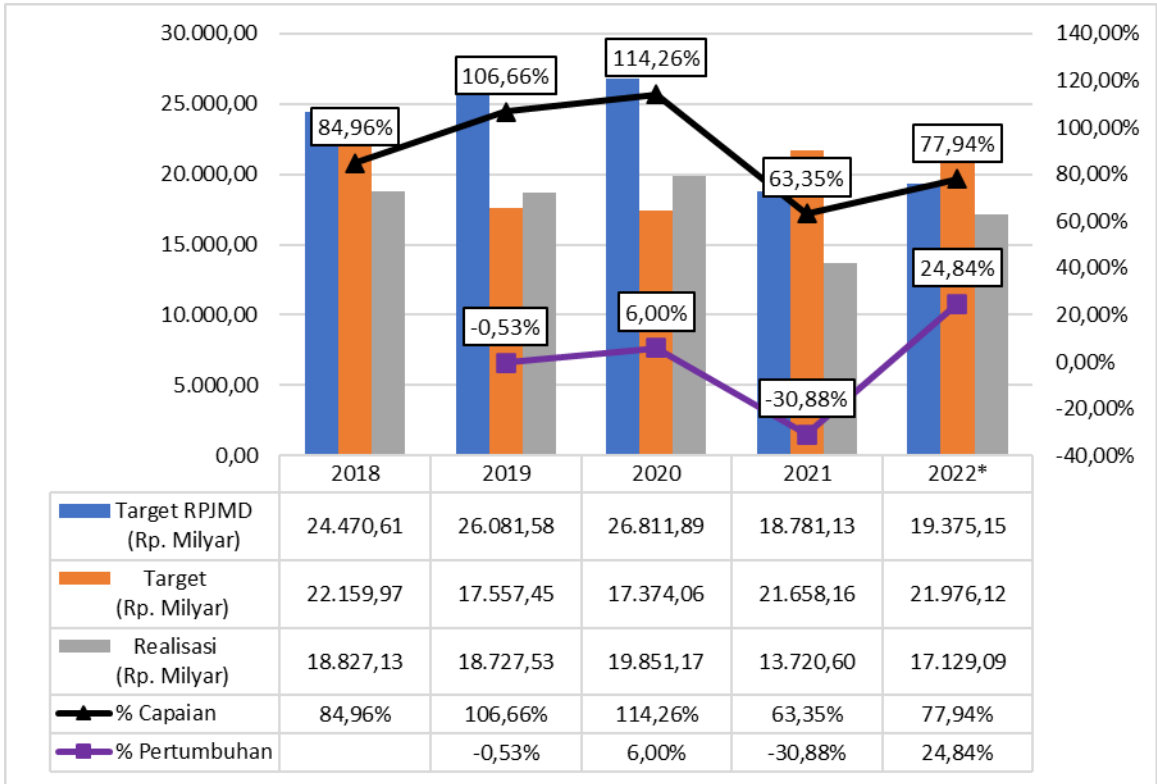
*) 2022 menggunakan data Unaudited

Sumber: LRA Kota Cilegon, diolah

Pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh menurunnya penerimaan sektor Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menurun sekitar 78,8 milyar atau 13,98%. Adapun peningkatan Pajak Daerah terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2022. Pada tahun 2019 pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 59,4 milyar atau 13,86% kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2. Tahun 2020 pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 75,3 milyar atau 15,42% hal tersebut dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, dan PBB-P2. Pada tahun 2022 pendapatan dari sektor pajak daerah mengalami peningkatan sekitar 133,3 milyar atau 27,48% peningkatan tersebut dipengaruhi oleh seluruh sektor pajak daerah kecuali Pajak Air Tanah.

Perkembangan retribusi daerah selama tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.3.5.1d Kinerja **Retribusi Daerah** 2018-2022



*) 2022 menggunakan data Unaudited

Sumber: LRA Kota Cilegon, diolah

Laju Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2021. Pada tahun 2019 Retribusi Daerah mengalami penurunan sekitar 99,59 juta atau 0,53% penurunan tersebut antara lain dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi tepi jalan umum dan retribusi IMB. Pada tahun 2021 realisasi retribusi daerah mengalami penurunan sekitar 6,1 milyar atau 30,88% yang diakibatkan oleh menurunnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi kepelabuhanan, retribusi IMB, retribusi trayek, dan retribusi IMTA. Pada tahun 2020 peningkatan retribusi daerah sekitar 1,1 milyar atau 6% dari sektor retribusi tepi jalan umum, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan, dan retribusi IMTA. Dan tahun 2022 peningkatan laju pertumbuhan Retribusi Daerah sekitar 3,4 milyar atau 24,84% dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi PKB, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, dan retribusi IMB/PBG.

1.3.1.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.886.364.441.213,-** dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar **Rp. 1.809.526.155.655,-** atau mencapai **95,93%**.

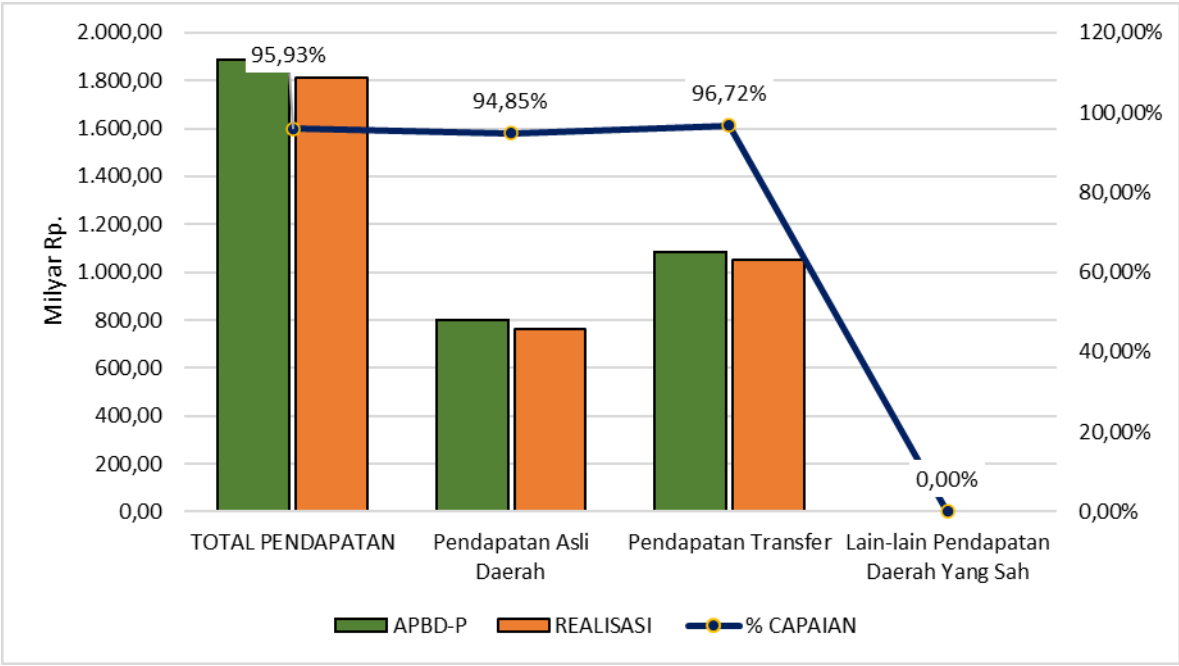
Hal tersebut dipengaruhi dari pencapaian penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar **94,85%** atau belum mencapai target dengan sisa capaian **Rp. (41.276.360.117,-)**, dan sektor Pendapatan Transfer dengan capaian sebesar **96,72%** belum mencapai target dengan sisa capaian sebesar **Rp. (35.561.925.441,-)**. Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.3.5.2a Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	2022 (Unaudited)		
	APBD-P	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
TOTAL PENDAPATAN	1.886.364.441.213	1.809.526.155.655	95,93%
Pendapatan Asli Daerah	801.790.661.154	760.514.301.037	94,85%
Pendapatan Transfer	1.084.573.780.059	1.049.011.854.618	96,72%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0,00%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2a Grafik Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber: LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

1) Pendapatan Asli Daerah

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tercantum target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon sebesar **Rp. 801.790.661.154,-** adapun realisasi sebesar **Rp. 760.514.301.037,-** atau mencapai **94,85%**, sehingga tidak mencapai target sebesar **Rp. (41.276.360.117,-)**. Hal tersebut disebabkan :

1. Capaian Pajak Daerah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.618.589.144.208,- dari target sebesar Rp.645.127.680.624,- atau **95,88%**, terdapat kekurangan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. (26.538.536.416,-)**. Dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Cilegon 8 jenis Pajak Daerah telah melampaui dari target yang telah ditetapkan, 1 jenis Pajak Daerah capaian lebih dari 90%, namun terdapat 1 jenis Pajak daerah yang capaiannya dibawah 90% yaitu BPHTB sebesar 87,38%. Capaian realisasi dari BPHTB sangat mempengaruhi prosentase penerimaan Pajak Daerah. Hal tersebut dikarenakan BPHTB merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah. Dapat disampaikan bahwa BPHTB pada tahun 2022 menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah dengan kontribusi sebesar 36,42%, sehingga berdampak signifikan terhadap capaian penerimaan pajak daerah.
2. Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar **77,94%** tidak mencapai target sebesar **Rp. (4.847.028.858,-)**. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2022 Pemerintah Pusat melaksanakan perubahan kebijakan pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi perizinan tertentu yang tertuang dalam UU Cipta Kerja salah satunya yaitu retribusi PBG sehingga komponen tersebut terhambat pemungutannya. Serta terdapat komponen retribusi lain yang tidak dilakukan pemungutan yaitu retribusi parkir tepi jalan umum.

3. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai **100%** dari target sebesar **Rp 18.591.510.375,-**. Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2021. Namun terdapat BUMD yang tidak menyalurkan Deviden-nya dikarenakan masih mengalami kerugian yakni PD.BPRS CM.
4. Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar **91,48%** tidak terlampaui sebesar **Rp. (9.890.794.873,-)**. Adapun dengan rincian:
 - Hasil pemanfaatan BMD yang dipisahkan belum mencapai target, dengan realisasi 78,09% tidak melampaui target sebesar **Rp. (197.120.787,-)** yang dikarenakan pedagang yang melakukan cicilan kios telah menyelesaikan cicilannya pada tahun 2021 sehingga rasio pedagang yang belum selesai cicilannya pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021
 - Pendapatan bunga deposito terealisasi sebesar **34,50 %**, atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (18.750.429.499,-)**. Hal tersebut dikarenakan uang yang ditempatkan dalam kas umum daerah adalah pengenaan atas perhitungan suku bunga 2,9% dari PAD, pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Banten. Deposito dalam rangka pemenuhan manajemen kas yang dilakukan oleh pemerintah kota cilegon atas penempatan uang/deposito/investasi jangka pendek tidak mengakibatkan terjadinya likuiditas keuangan daerah selama kurun waktu 1 tahun. Adapun deposito tersebut ditempatkan pada bank BJB dengan suku bunga deposito berjangka bank BJB tahun 2022 yaitu antara 2,5 % hingga 2,9%.
 - Pendapatan dana kapitasi JKN, dikarenakan sifat pengelolaannya tergantung pada alokasi salur yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui BPJS
 - Pendapatan dari pengembalian masih rendah dikarenakan prinsip pengelolaan pembiayaan atau belanja yang cukup baik
 - Terdapat beberapa komponen yang over target antara lain Jasa Giro, Denda Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan BLUD

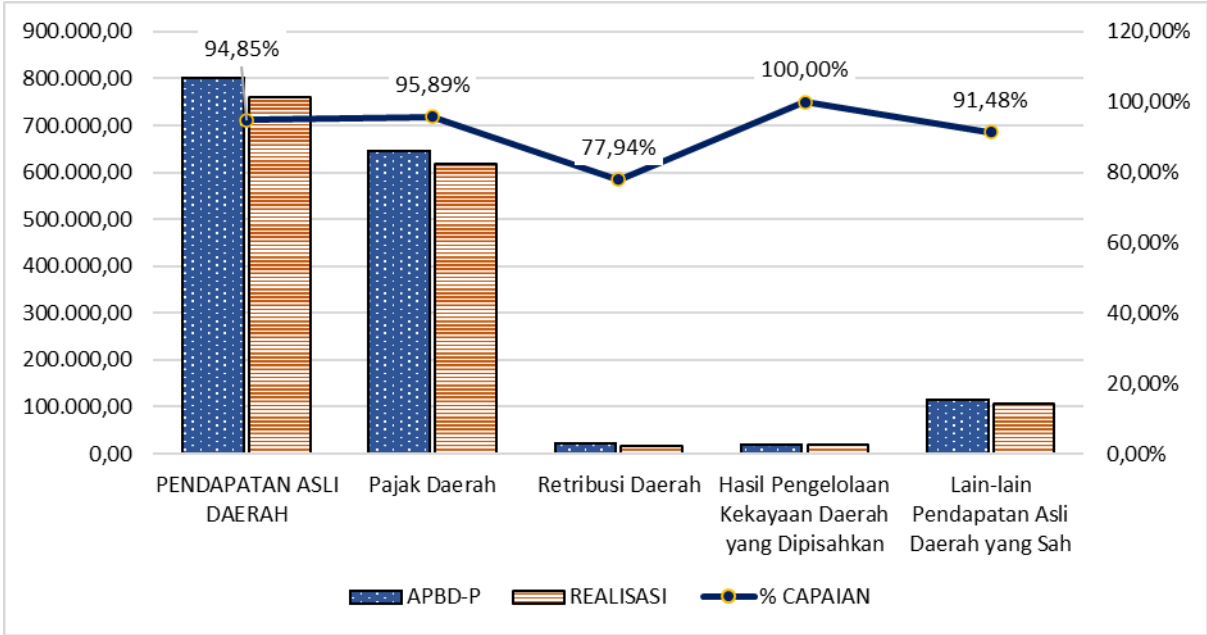
Adapun rincian rencana dan realisasi PAD sebagai berikut :

Tabel 1.3.5.2b Rencana dan Realisasi PAD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)		
	APBD-P	Realisasi	% Capaian
PENDAPATAN ASLI DAERAH	801.790.661.154	760.514.301.037	94,85%
Pajak Daerah	645.127.680.624	618.589.144.208	95,89%
Retribusi Daerah	21.976.117.200	17.129.088.342	77,94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375	18.591.510.375	100,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.095.352.955	106.204.558.112	91,48%

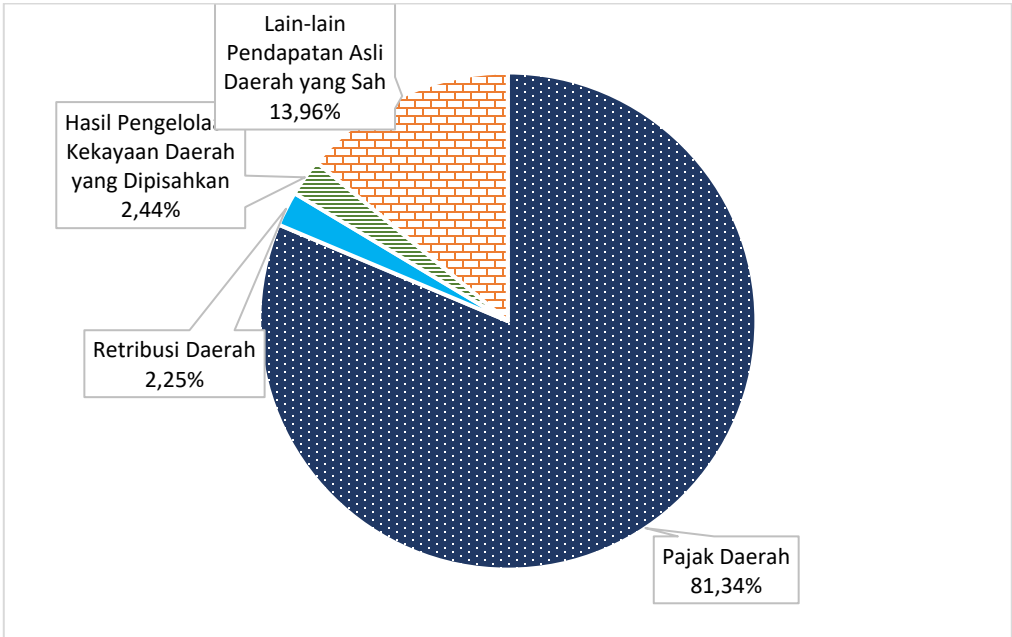
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2b Capaian PAD beserta Komponennya Tahun 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2c Distribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Deskripsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

A.1 Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kota Cilegon dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 645.127.680.624,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 618.589.144.208,-** atau mencapai **95,89%** artinya belum melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. (26.538.536.416,-)**. Hal ini dikarenakan Pajak Penerangan Jalan pada 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan September, Oktober dan November, pendapatan dari PT. PLN mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan produksi dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon selain itu karena terdapat pembatasan operasional jam kerja dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan bahkan sampai terjadi perusahaan yang stop produksi dan untuk BPHTB meskipun realisasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

realisasi pada tahun sebelumnya namun tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan BPHTB yang sifatnya *unpredictable*. Capaian realisasi pajak daerah diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1. Realisasi Pajak Hotel mencapai **103,23%** atau melampaui target sebesar **Rp. 426.654.602,-**,
- 2. Realisasi Pajak Restoran mencapai **113,08%** atau melampaui target sebesar **Rp. 4.199.764.695,-**,
- 3. Realisasi Pajak Hiburan mencapai **102,17%** atau melampaui target sebesar **Rp. 102.035.127,-**,
- 4. Realisasi Pajak Reklame mencapai **111,97%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. 233.328.483,-**,
- 5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan mencapai **99,22%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (1.696.338.660,-)**,
- 6. Realisasi Pajak Parkir mencapai **101,30%** atau melampaui target sebesar **Rp. 25.299.685,-**,
- 7. Realisasi Pajak Air Tanah mencapai **101,77%** atau melampaui target sebesar **Rp. 22.973.127,-**,
- 8. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar **122,95%** atau melampaui target sebesar **Rp. 144.556.600,-**,
- 9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan mencapai **102,23%** atau melampaui target sebesar **Rp. 2.520.979.344,-**,
- 10. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar **87,39%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (32.517.789.419,-)**.

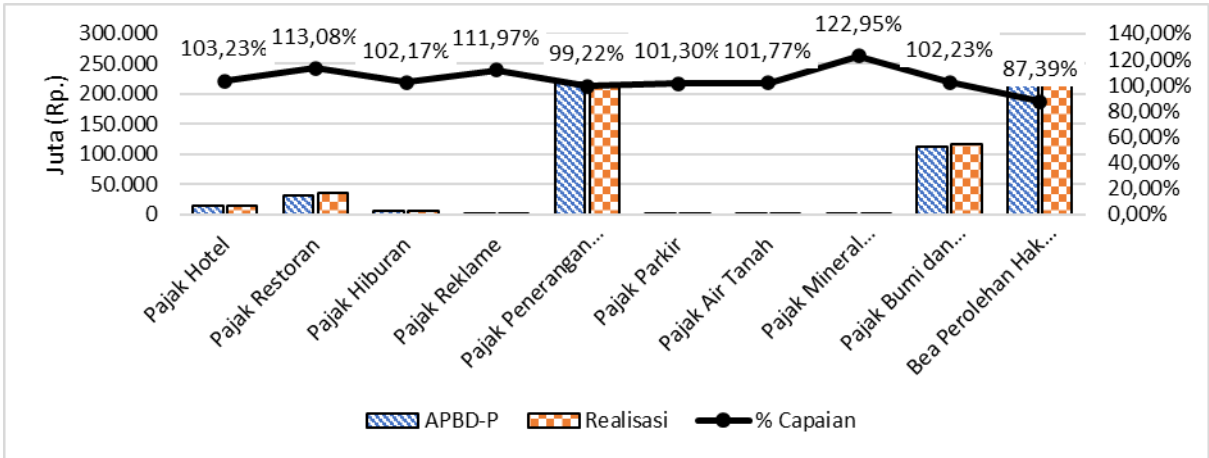
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.3.5.2c Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Pajak Daerah	645.127.680.624	618.589.144.208	95,89%	(26.538.536.416)
Pajak Hotel	13.200.000.000	13.626.654.602	103,23%	426.654.602
Pajak Restoran	32.098.000.000	36.297.764.695	113,08%	4.199.764.695
Pajak Hiburan	4.708.000.000	4.810.035.127	102,17%	102.035.127
Pajak Reklame	1.950.000.000	2.183.328.483	111,97%	233.328.483
Pajak Penerangan Jalan	218.450.000.000	216.753.661.340	99,22%	(1.696.338.660)
Pajak Parkir	1.950.000.000	1.975.299.685	101,30%	25.299.685
Pajak Air Tanah	1.300.000.000	1.322.973.127	101,77%	22.973.127
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	630.000.000	774.556.600	122,95%	144.556.600
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	113.000.000.000	115.520.979.344	102,23%	2.520.979.344
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	257.841.680.624	225.323.891.205	87,39%	(32.517.789.419)

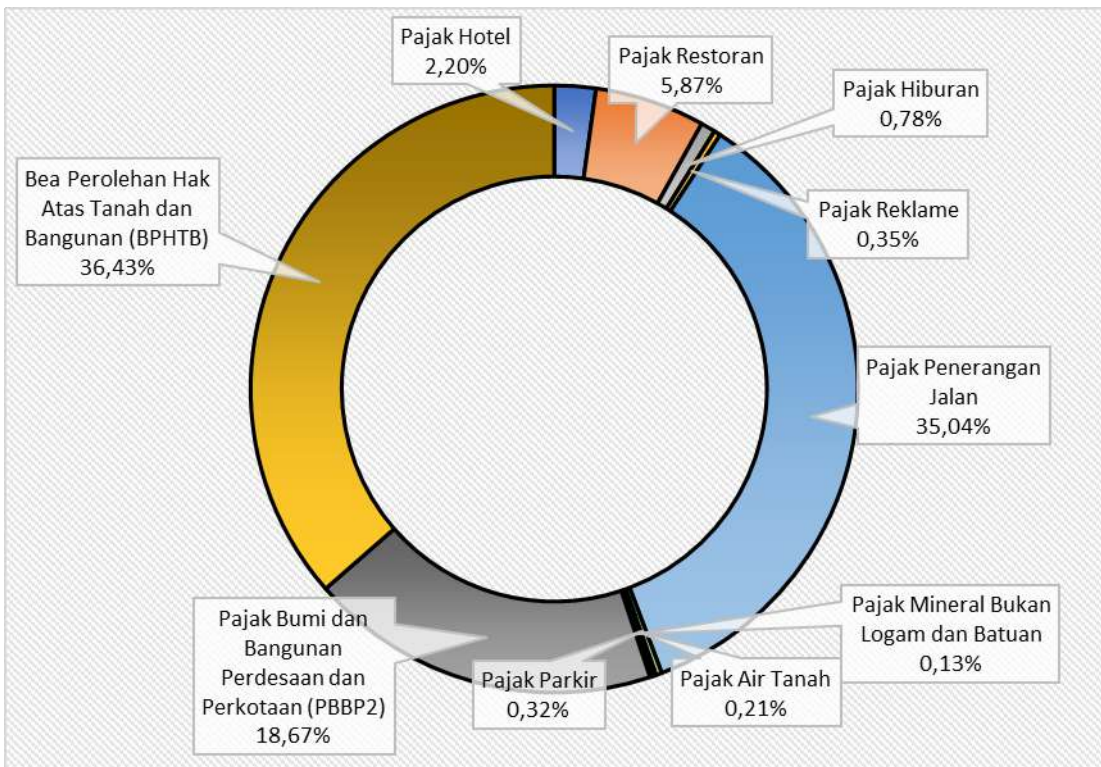
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2d Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2e Distribusi Realisasi Pajak Daerah



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

A.2 Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah Kota Cilegon dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 21.976.117.200,-** dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar **Rp. 17.129.088.342,-** atau mencapai **77,94%**, yang bersumber dari komponen berikut ini :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum sebesar **98,19%**, atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (143.506.858,-)** atau terealisasi sebesar **Rp. 7.803.283.142,-** dari target sebesar **Rp. 7.946.790.000,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari :
 1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai **138,23%** atau terlampaui sebesar **Rp. 153.969.100,-**. Kendala pada Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pandemi covid 19 di tahun 2022 yang menyebabkan dibatasinya beberapa kegiatan sosial masih terasa dampaknya terhadap pendapatan daerah khususnya pendapatan retribusi pelayanan

- kesehatan di UPTD puskesmas di Kota Cilegon. Serta Program pemerintah Kota Cilegon di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat yang berobat.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai **155,43%** atau terlampaui target sebesar **Rp. 1.563.180.500,-**. Terdapat permasalahan diantaranya:
 - a. Adanya beberapa alasan dari para pedagang yang bertujuan untuk menolak pembayaran karcis retribusi
 - b. Banyak lingkungan yang keberatan untuk membayar retribusi senilai 20.000 per meter³, sehingga banyak lingkungan yang tidak membayar retribusi
 - c. Banyak industri yang menginginkan surat tagihan retribusi diberikan langsung kepada perusahaan, dan hingga saat ini DLH Kota Cilegon belum memiliki sistem untuk pengiriman berkas tagihan kepada perusahaan dan pengiriman surat tagihan hanya dapat dilakukan menggunakan media Whatsapp dan Email
 3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah **0%**. Pengelolaan Retribusi Tepi jalan umum tidak dilakukan pemungutan dikarenakan : 1). Timbulnya permasalahan hukum dengan pihak ke-3 (Tiga) yang mengakibatkan pemberhentian pungutan retribusi di lokasi Tepi Jalan Umum parkir; dan 2). Kurang memadainya sarana penunjang di lokasi Tempat Khusus parkir;
 4. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar mencapai **106,27%** atau melampaui target sebesar **Rp. 48.593.500,-**. Terdapat permasalahan diantaranya : masih adanya kios/los dan hanggar yang tidak ditempati dan atau ditinggalkan oleh pedagang yang seharusnya menempati dan kesadaran wajib retribusi (pedagang) masih rendah.
 5. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai **96,02%** tidak melampaui target sebesar **Rp. (39.799.500,-)**. Hal ini disebabkan karena masih terdapat pemilik kendaraan yang tingkat kesedarannya masih rendah untuk melakukan uji KIR. Permasalahan yang dihadapi diantaranya banyaknya kendaraan wajib uji yang termasuk dalam kualifikasi Overloading (ODOL) yang tidak dapat/tidak diperbolehkan dalam melakukan pengujian KIR, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah.
 6. Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran mencapai **128,70%** atau melampaui target sebesar **Rp. 57.400.000,-**. Terdapat permasalahan diantaranya masih lemahnya dukungan kebijakan dari OPD teknis terkait, mengenai regulasi yang ada dan masih kurang / minimnya alat kelengkapan / penunjang tim pemeriksaan dan peralatan yang ada mengalami kerusakan.
 7. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai **109,75%** atau melampaui target sebesar **Rp. 73.149.542,-**.
2. Capaian Retribusi Jasa Usaha mencapai **104,62%** atau telah melampaui target sebesar **Rp. 276.199.000,-** dari target sebesar **Rp. 5.976.027.200,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 6.252.226.200,-**. Adapun secara rinci komponen retribusi jasa usaha adalah:
- Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai **118,96%** atau melampaui target sebesar **Rp. 961.111.000,-**.
 - Realisasi Retribusi Terminal mencapai **154%** atau melampaui target sebesar **Rp. 43.216.000,-**. adapun kendala-kendala sebagai berikut :
 - a. Sistem jaringan trayek angkutan kota belum terintegrasi dengan terminal seruni.
 - b. Belum tersedianya fasilitas penunjang terminal yang memadai.
 - c. Berkurangnya kendaraan angkutan umum (angkot), karena banyaknya kendaraan online.
 - Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mencapai **6,45%** atau tidak mencapai target sebesar **Rp. (701.628.000,-)**. Hal ini dikarenakan retribusi tempat khusus parkir

di Kota Cilegon hanya terdapat pada tempat parkir di RSUD Kota Cilegon, semula pengelolaan parkir di RSUD dikelola oleh UPTD Parkir. Namun di tahun berjalan pengelolaan parkir RSUD akan dikelola oleh pihak RSUD dan menjadi pendapatan BLUD. Akan tetapi hingga saat ini pengelolaan parkir di RSUD tidak dikelola baik oleh UPTD Parkir maupun RSUD Kota Cilegon.

- Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai **65,49%** atau tidak mencapai target sebesar **Rp. (26.500.000,-)**. Permasalahan yang dihadapi diantaranya menurunnya jumlah hewan yang dipotong di RPH serta permintaan akan daging segar menurun karena harganya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan daging beku. Dan perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi mengingat sudah 8 tahun berjalan belum ada penyesuaian.
3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu mencapai **38,17%** atau tidak mencapai target sebesar **Rp. (4.979.721.000,-)** dari target sebesar **Rp. 8.053.300.000,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 3.073.579.000,-**. Adapun permasalahan pada retribusi perizinan tertentu yakni pada Retribusi PBG yang terdampak akibat adanya perubahan kebijakan pemungutan retribusi yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. Secara rinci komponen retribusi perizinan tertentu yakni :
- Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mencapai **38,34%** atau tidak mencapai target sebesar **Rp. (4.932.120.000,-)**. Permasalahan yang dihadapi yaitu karena banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait pentingnya membuat PBG hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait Perda baru yang mengatur tentang PBG kepada masyarakat.
 - Realisasi Retribusi Izin Trayek mencapai **10,69%** atau tidak terlampaui target sebesar **Rp. (47.601.000,-)**. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya mutu sarana pelayanan dari pengusaha angkutan dan adanya bertambahnya persaingan antara angkutan umum perkotaan dengan angkutan online

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

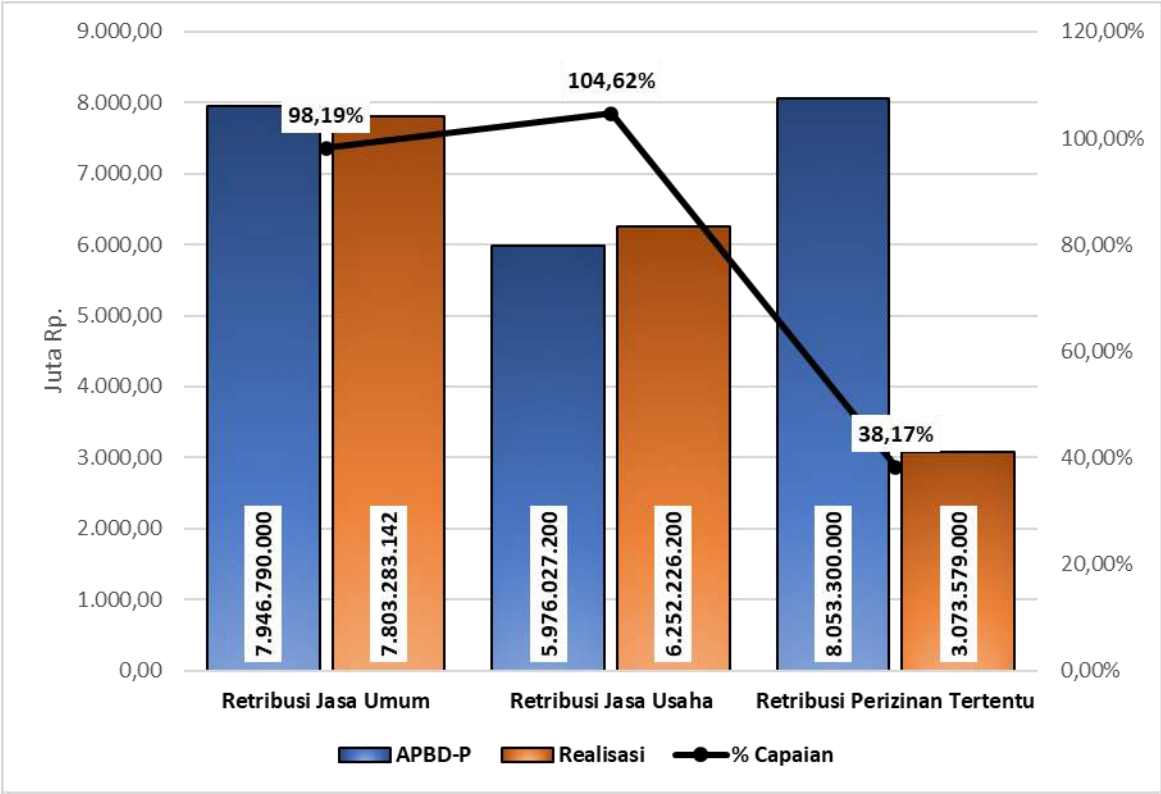
Tabel 1.3.5.2d Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Hasil Retribusi Daerah	21.976.117.200	17.129.088.342	77,94%	(4.847.028.858)
Retribusi Jasa Umum	7.946.790.000	7.803.283.142	98,19%	(143.506.858)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	402.700.000	556.669.100	138,23%	153.969.100
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.820.000.000	4.383.180.500	155,43%	1.563.180.500
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000	0	0,00%	(2.000.000.000)
Retribusi Pelayanan Pasar	774.090.000	822.683.500	106,28%	48.593.500
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	960.200.500	96,02%	(39.799.500)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000	257.400.000	128,70%	57.400.000
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	750.000.000	823.149.542	109,75%	73.149.542
Retribusi Jasa Usaha	5.976.027.200	6.252.226.200	104,62%	276.199.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.069.227.200	6.030.338.200	118,96%	961.111.000
Retribusi Terminal	80.000.000	123.216.000	154,02%	43.216.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	750.000.000	48.372.000	6,45%	(701.628.000)

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Retribusi Rumah Potong Hewan	76.800.000	50.300.000	65,49%	(26.500.000)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0	0	n/a	0
Retribusi Perizinan Tertentu	8.053.300.000	3.073.579.000	38,17%	(4.979.721.000)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000	3.067.880.000	38,35%	(4.932.120.000)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	53.300.000	5.699.000	10,69%	(47.601.000)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0	0	n/a	0

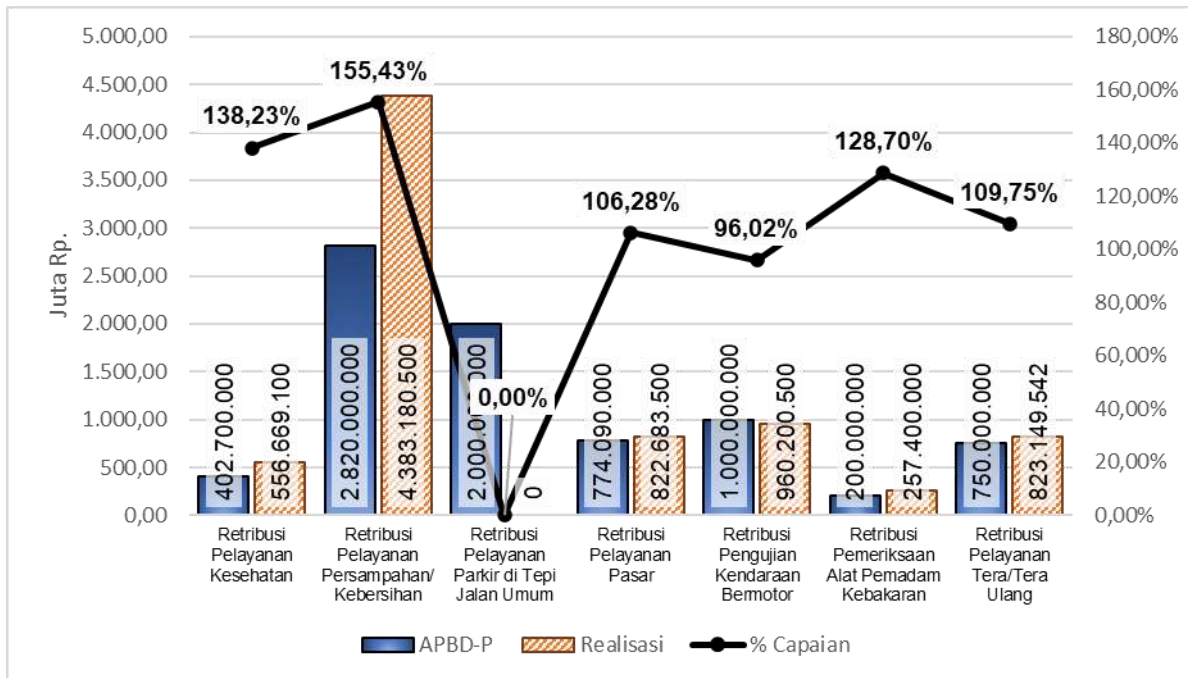
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2f Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2022



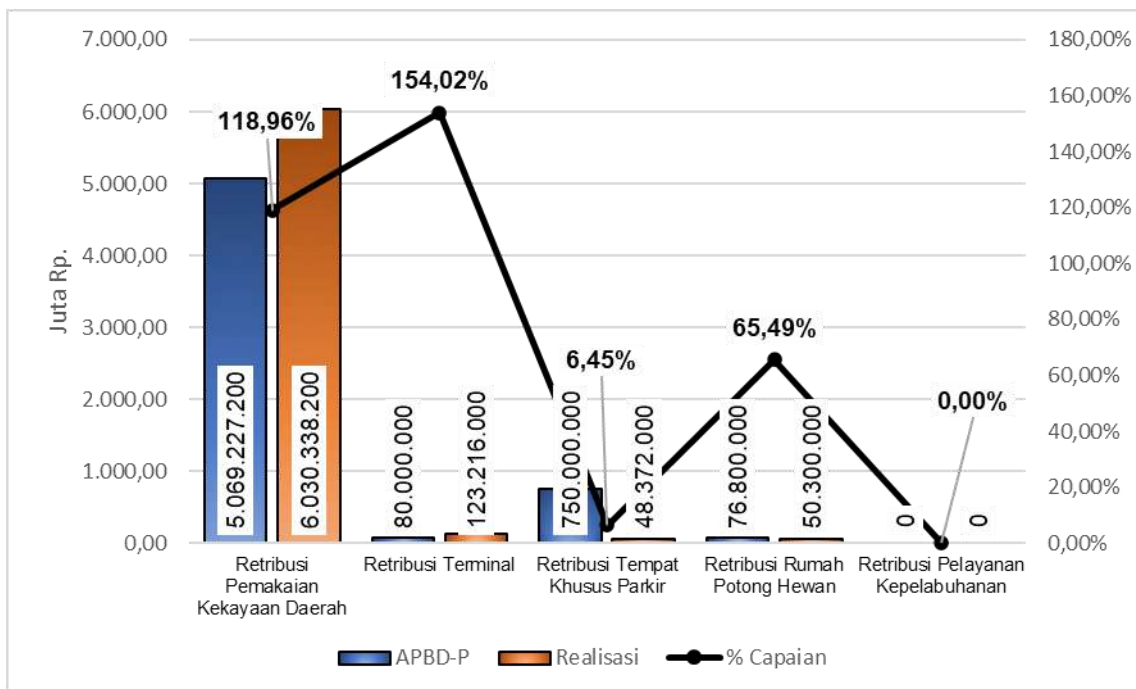
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2g Capaian Komponen Retribusi Jasa Umum



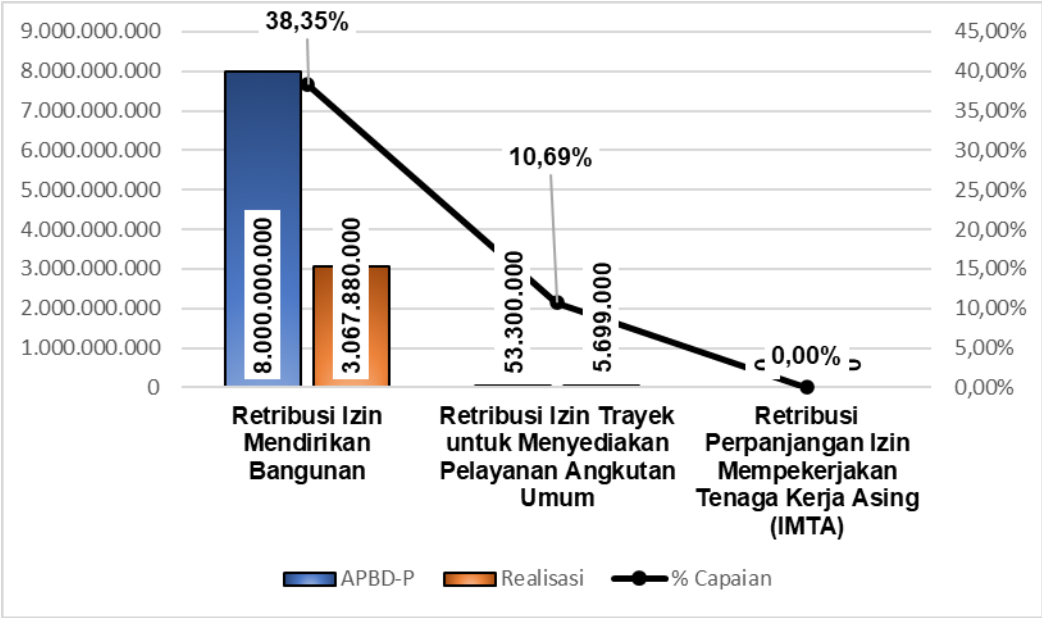
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2h Capaian Komponen Retribusi Jasa Usaha



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2i Capaian Komponen Retribusi Perizinan Tertentu



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

A.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan penerimaan mencapai **100,00%** atau tercapai seluruhnya dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 18.591.510.375,-** adapun realisasi sebesar **Rp. 18.591.510.375,-** tersebut merupakan hasil audit independen masing-masing BUMD Kota Cilegon.

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) (Laba Bank BJB Cabang Cilegon) terealisasi sebesar **Rp. 6.411.487.249,-**. Capaian realisasi Deviden Bank BJB Cab. Cilegon tahun anggaran 2022 sesuai dengan RUPS jumlah deviden sebesar **Rp. 6.411.487.249,-** dengan lembar saham **64.690.619**, adapun total setoran modal sebesar **Rp. 24.999.998.755,-**.
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) (PT. PCM). Memperoleh laba pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 8.000.000.000,-** dari proyeksi anggaran perusahaan sebesar **Rp. 8.000.000.000,-** atau terealisasi sebesar **100%**.
3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) (PDAM-CM) terealisasi senilai **Rp. 4.180.023.126,-**. Dari target anggaran yang diproyeksikan sebesar **Rp. 4.180.023.126** atau terealisasi sebesar **100%**. Permasalahan yang dihadapi yaitu kedisiplinan pelanggan dalam membayar rekening masih rendah sehingga piutang menjadi bertambah.
4. Pada tahun 2022 laba perusahaan milik daerah atau BUMD BPRS CM sebesar **Rp 3.455.062.970,-** Namun, laba tersebut belum dapat menutupi kerugian pada tahun 2021. Sehingga PT. BPRS CM tidak memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2022.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 1.3.5.2e Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375	18.591.510.375	100,00%	0
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18.591.510.375	18.591.510.375	100,00%	0
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.411.487.249	6.411.487.249	100,00%	0
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%	0
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.180.023.126	4.180.023.126	100,00%	0

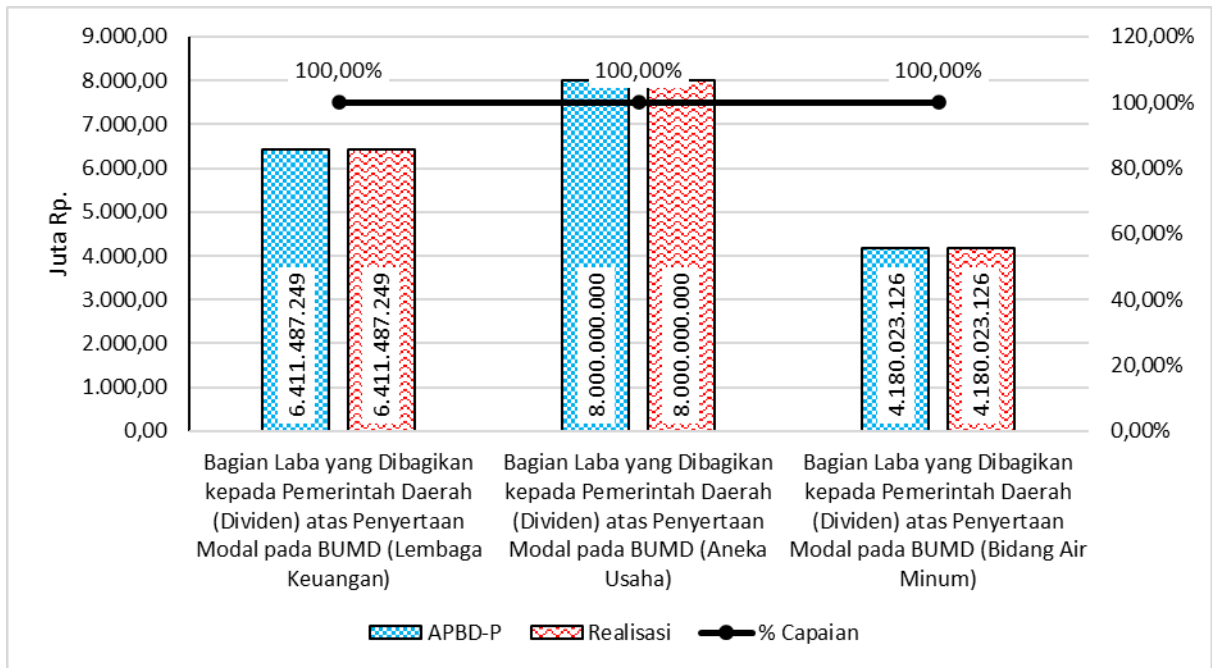
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Tabel 1.3.5.2e Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 (Berdasarkan BUMD)

URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN APBD TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	18,591,510,375	18,591,510,375	100,00%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	18,591,510,375	18,591,510,375	100,00%
Laba PDAM	4,180,023,126	4,180,023,126	100,00%
Laba PT. PCM	8,000,000,000	8,000,000,000	100%
Laba PT. BPRS	0	0	0
Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon	6,411,487,249	6,411,487,249	100%

Sumber : BPKPAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.3.5.2j Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, capaian realisasi penerimaan mencapai **91,48%** tidak terlampaui sebesar **Rp. (9.890.794.843,-)** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 116.095.352.955,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 106.204.558.112,-**. Hal tersebut dipengaruhi atas capaian realisasi beberapa sektor lain-lain PAD yang sah, diantaranya:

1. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (Hasil Sewa BMD) mencapai **78,10%** tidak melampaui target sebesar **Rp. (197.120.787,-)** . Terdapat permasalahan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.
2. Realisasi atas penerimaan Jasa Giro mencapai **112,71%** atau telah melampaui target sebesar **Rp. 508.670.332,-** dari target yang ditetapkan sebesar **RP 4.000.000.000,-**. Capaian realisasi telah over target dikarenakan sejak tahun 2022 pengenaan penempatan uang hibah BOS dan pendapatan JKN pada FKTP memperoleh bunga jasa giro atas uang yang tercatat dalam kas rekening komponen pendapatan daerah.
3. Realisasi atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar **34,51%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (18.750.429.499,-)** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 28.630.155.528,-**. Permasalahan yang dihadapi yaitu uang yang ditempatkan dalam kas umum daerah adalah pengenaan atas perhitungan suku bunga 2,9% dari PAD, dan bagi hasil. Namun berkenaan dengan uang yang masuk adalah penerimaan yang bersumber dari PAD.
4. Realisasi atas komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah **0%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 114.967.000,-**.
5. Realisasi atas komponen Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mencapai **123,28%** atau melampaui target sebesar **Rp. 415.581.534,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.785.033.000,-**.

- Realisasi atas komponen Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi mencapai **8,17%**, atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (101.009.902,-)** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 110.000.000,-**
- Realisasi atas komponen Pendapatan Denda Pajak Daerah mencapai **149,53%** atau melampaui sebesar **Rp. 475.470.924,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 960.000.000,-**.
- Realisasi atas komponen Pendapatan Denda Retribusi mencapai **204,85%** atau melampaui sebesar **Rp. 49.236.542,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 46.957.173,-**.
- Realisasi atas komponen Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan mencapai **23,45%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (424.309.673,-)** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 554.263.470,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari koordinasi yang dilakukan antar stakeholder Kota Cilegon dan pihak eksternal lainnya.
- Realisasi komponen Pendapatan BLUD mencapai **112,13%** atau terlampaui sebesar **Rp. 8.270.069.530,-**. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah adalah adanya anggapan di masyarakat bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai hibah.
- Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencapai **99,8%** atau tidak terlampaui sebesar **Rp. (21.986.844,-)** dari yang ditargetkan sebesar **Rp 10.834.045.266,-**.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut :

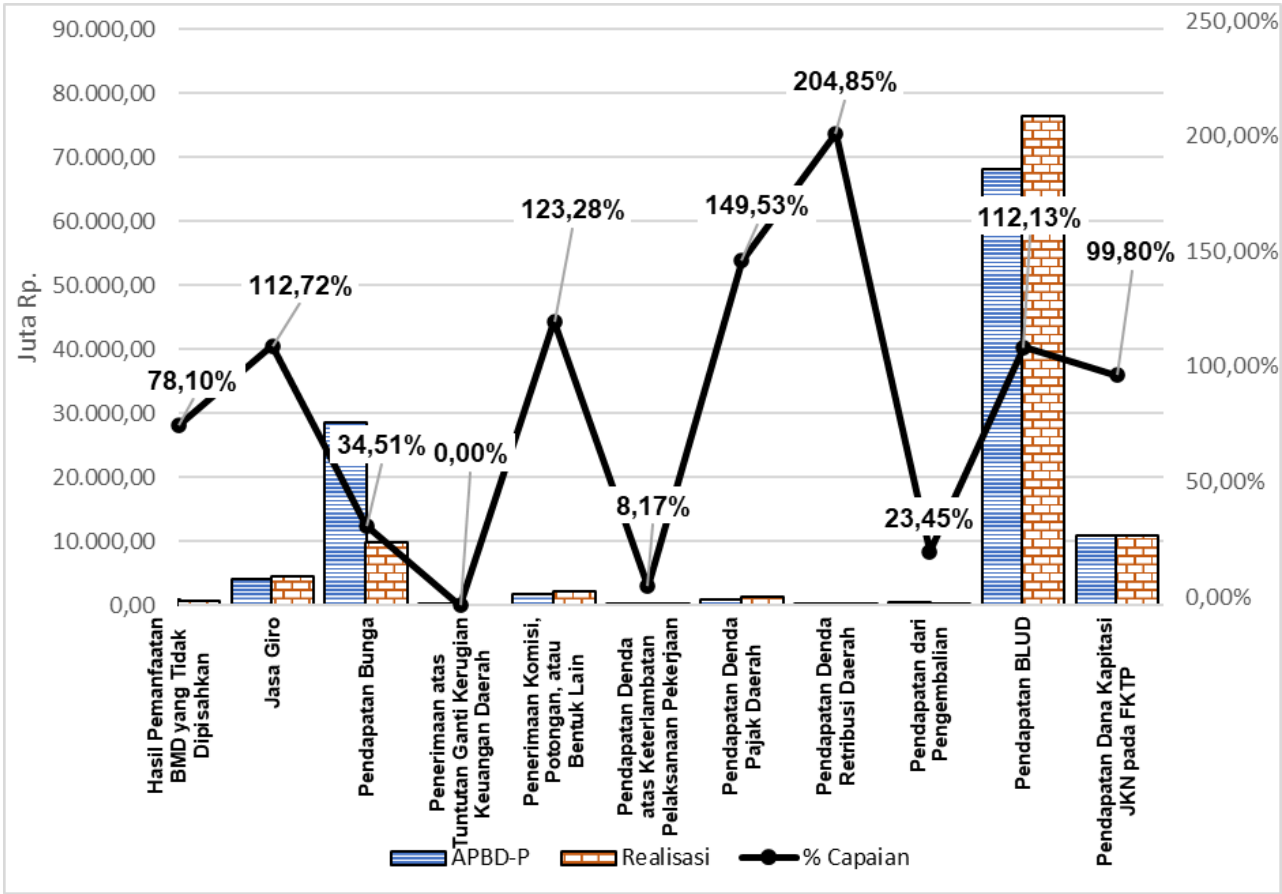
Tabel 1.3.5.2f Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.095.352.955	106.204.558.112	91,48%	(9.890.794.843)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	900.000.000	702.879.213	78,10%	(197.120.787)
Hasil Sewa BMD	900.000.000	702.879.213	78,10%	(197.120.787)
Jasa Giro	4.000.000.000	4.508.670.332	112,72%	508.670.332
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	4.494.483.638	224,72%	2.494.483.638
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.000.000.000	14.186.694	1,42%	(985.813.306)
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.000.000.000	0	0,00%	(1.000.000.000)
Pendapatan Bunga	28.630.155.528	9.879.726.029	34,51%	(18.750.429.499)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	28.630.155.528	9.879.726.029	34,51%	(18.750.429.499)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	114.967.000	0	0,00%	(114.967.000)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	114.967.000	0	0,00%	(114.967.000)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.785.033.000	2.200.614.534	123,28%	415.581.534
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.785.033.000	2.200.614.534	123,28%	415.581.534
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000	8.990.098	8,2%	(101.009.902)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000	8.990.098	8,17%	(101.009.902)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	960.000.000	1.435.470.924	149,53%	475.470.924
Pendapatan Denda Pajak Hotel	12.000.000	6.311.213	52,59%	(5.688.787)
Pendapatan Denda Pajak Restoran	40.000.000	84.847.936	212,12%	44.847.936

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000	378.757	7,58%	(4.621.243)
Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000	52.556.844	1051,14%	47.556.844
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.000.000	75.127	1,50%	(4.924.873)
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000	3.120.728	62,41%	(1.879.272)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000	2.039.150	40,78%	(2.960.850)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000	1.103.588	15,77%	(5.896.412)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	876.000.000	1.285.037.581	146,69%	409.037.581
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	46.957.173	96.193.715	204,85%	49.236.542
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.500.000	45.730.603	1829,22%	43.230.603
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	20.957.173	37.305.532	178,01%	16.348.359
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	23.500.000	13.157.580	55,99%	(10.342.420)
Pendapatan dari Pengembalian	554.263.470	129.953.797	23,45%	(424.309.673)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	554.263.470	129.953.797	23,45%	(424.309.673)
Pendapatan BLUD	68.159.931.518	76.430.001.048	112,13%	8.270.069.530
Pendapatan BLUD	68.159.931.518	76.430.001.048	112,13%	8.270.069.530
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.834.045.266	10.812.058.422	99,80%	(21.986.844)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.834.045.266	10.812.058.422	99,80%	(21.986.844)

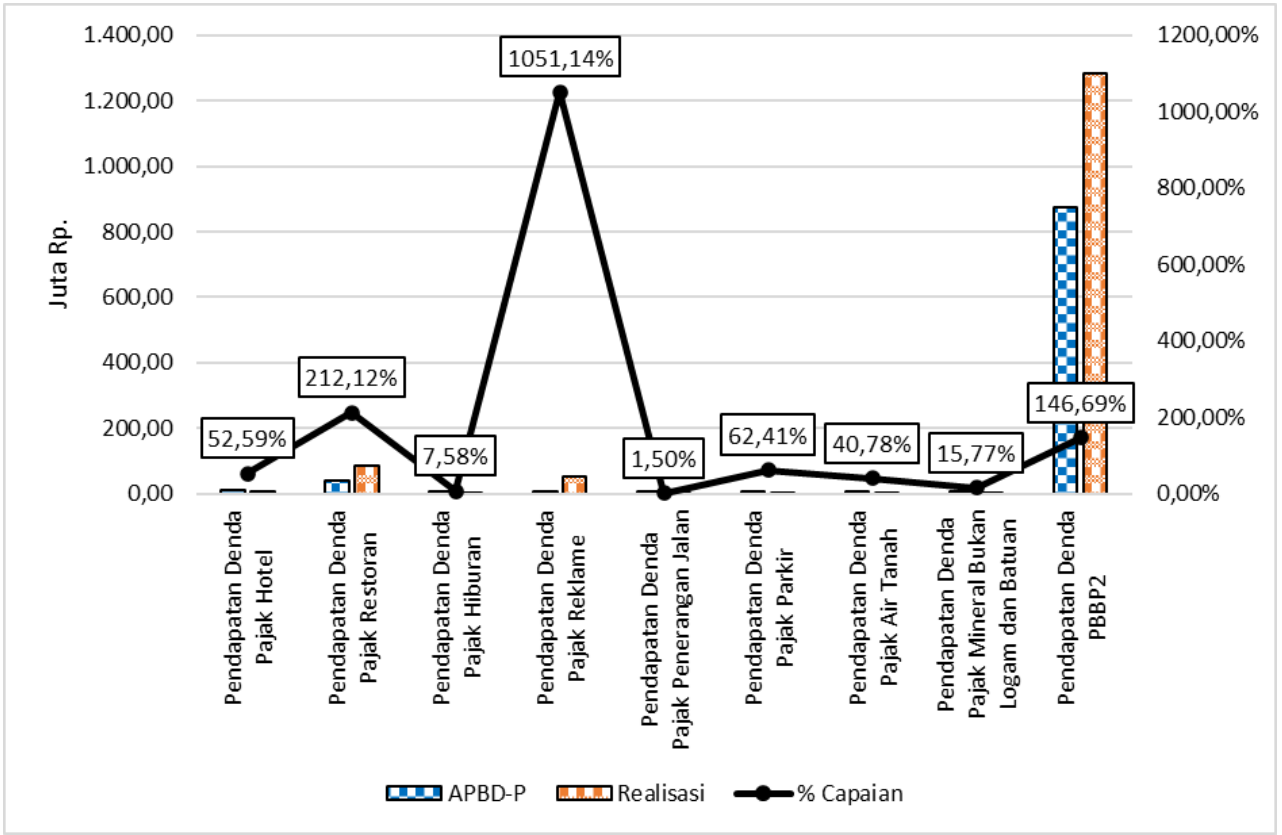
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2k Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah



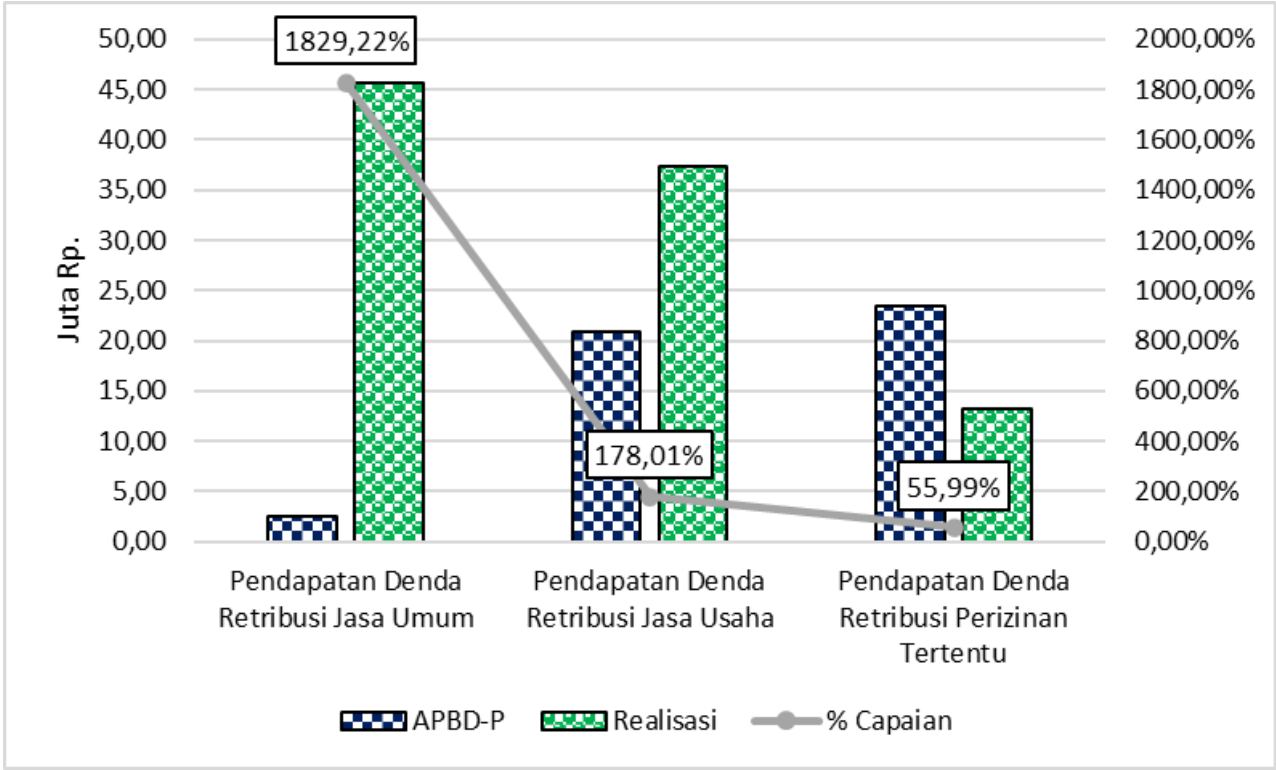
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2l Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2m Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 dari Pendapatan Transfer mencapai **96,72%** atau sebesar **Rp. 1.049.011.854.618,-**, masih kurang Rp (35.561.925.441,-) dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 1.084.573.780.059,-**. Yang bersumber dari komponen :

1. Realisasi dari sektor Dana Perimbangan sebesar 96,49% atau terealisasi sebesar Rp. 849.022.993.099,- dari target sebesar Rp. 880.084.918.540,- atau tidak melampaui target sebesar Rp. (31.061.925.441,-) Pengelolaan dana perimbangan ini sejalan dengan Undang-undang nomor 98 Tahun 2022 Tentang APBN 2022 dan turunanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022. Capaian tersebut dicapai dengan rincian:
 - Realisasi dari sektor Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tercapai sebesar **100,83%**, dengan realisasi **Rp. 132.681.711.714,-**. Dari target sebesar **Rp. 131.587.647.443,-**
 - Realisasi dari sektor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tercapai sebesar **99,99%** dengan target sebesar **Rp. 582.438.474.917** atau terealisasi sebesar **Rp. 582.371.974.917,-**
 - Realisasi dari sektor Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, terealisasi **79,48%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (3.061.589.345),-**
 - Realisasi dari sektor Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, terealisasi **80,79%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (29.027.900.367,-)**. Alokasi Dana Transfer mempedomani Undang-undang nomor 09 Tahun 2020 Tentang APBN 2022 dan turunanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, serta Juklak dan juknis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Permasalahan yang dihadapi yaitu terbitnya Surat Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 71120/A.A1/PR.07.05/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Permohonan Penyaluran Tahap IV Dana Tunjangan Guru melalui DAK Non-Fisik TA 2022 sehingga komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak terealisasi senilai (Rp 9.456.673.141,-).

- Realisasi Dana Insentif Daerah mencapai **100,00%** atau terealisasi seluruhnya sebesar **Rp. 4.420.181.000,-** sesuai dengan regulasi alokasi DID mempedomani Undang-undang nomor 09 Tahun 2020 Tentang APBN 2022 dan turunanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022.
- Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mencapai **100,00%** atau terealisasi seluruhnya sebesar **Rp. 190.068.680.519,-** adapun penyaluran dan pengalokasian berdasarkan pada Surat Kepala BPKPAD Provinsi Banten Nomor 900/1159-BPKAD.03/2022 tanggal 9 September 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada P-APBD TA.2022. Capaian tersebut terdiri:
 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor capaian 105,34%
 - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor capaian 94,16%
 - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor capaian 106,92%
 - Bagi Hasil Dari Pajak Rokok capaian 87,47%
- Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi terealisasi **55%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (4.500.000.000,-)** karena pada batas akhir penyampaian syarat salur Tahap II, OPD teknis dalam hal ini DPUTR belum bisa merealisasikan maksimal 75% dari dana yang disalurkan pada Tahap I. Alokasi tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota se--Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

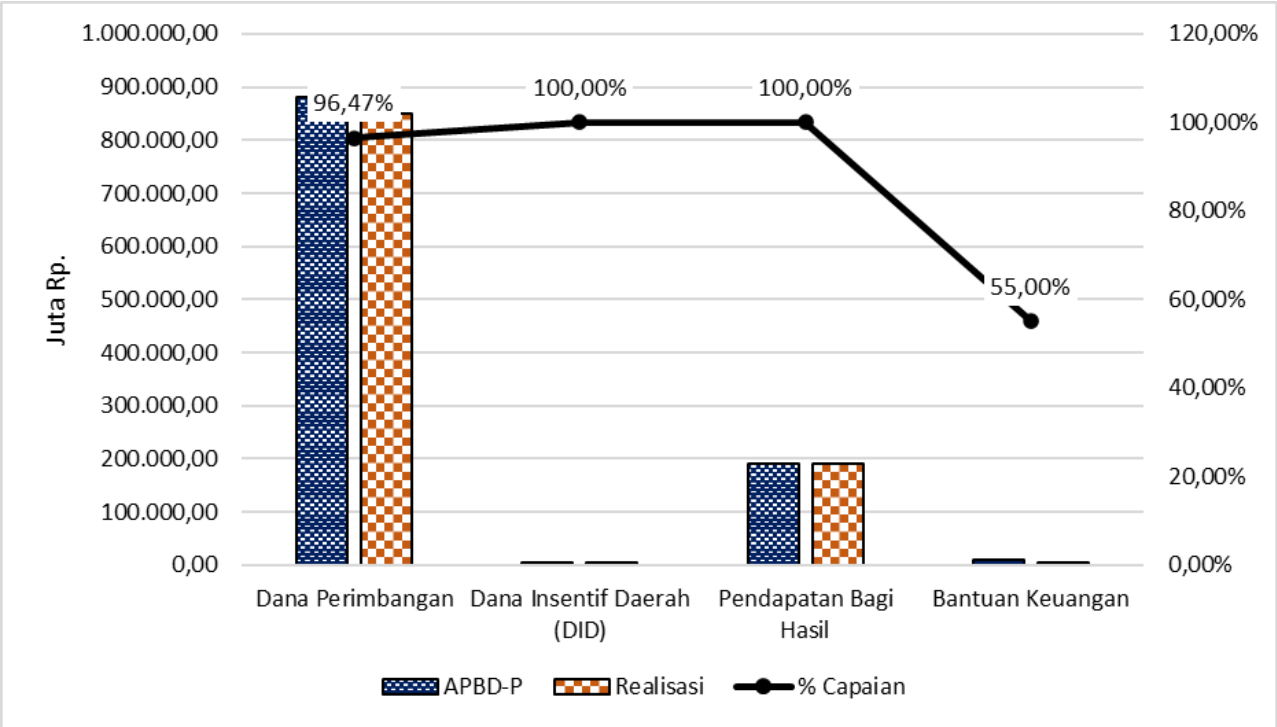
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 1.3.5.2g Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
PENDAPATAN TRANSFER	1.084.573.780.059	1.049.011.854.618	96,72%	(35.561.925.441)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.505.099.540	853.443.174.099	96,49%	(31.061.925.441)
Dana Perimbangan	880.084.918.540	849.022.993.099	96,47%	(31.061.925.441)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	131.587.647.443	132.681.711.714	100,83%	1.094.064.271
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	582.438.474.917	582.371.974.917	99,99%	(66.500.000)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.918.848.380	11.857.259.035	79,48%	(3.061.589.345)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	151.139.947.800	122.112.047.433	80,79%	(29.027.900.367)
Dana Insentif Daerah (DID)	4.420.181.000	4.420.181.000	100,00%	0
DID	4.420.181.000	4.420.181.000	100,00%	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.068.680.519	195.568.680.519	97,75%	(4.500.000.000)
Pendapatan Bagi Hasil	190.068.680.519	190.068.680.519	100,00%	0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	190.068.680.519	190.068.680.519	100,00%	0
Bantuan Keuangan	10.000.000.000	5.500.000.000	55,00%	(4.500.000.000)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000	5.500.000.000	55,00%	(4.500.000.000)

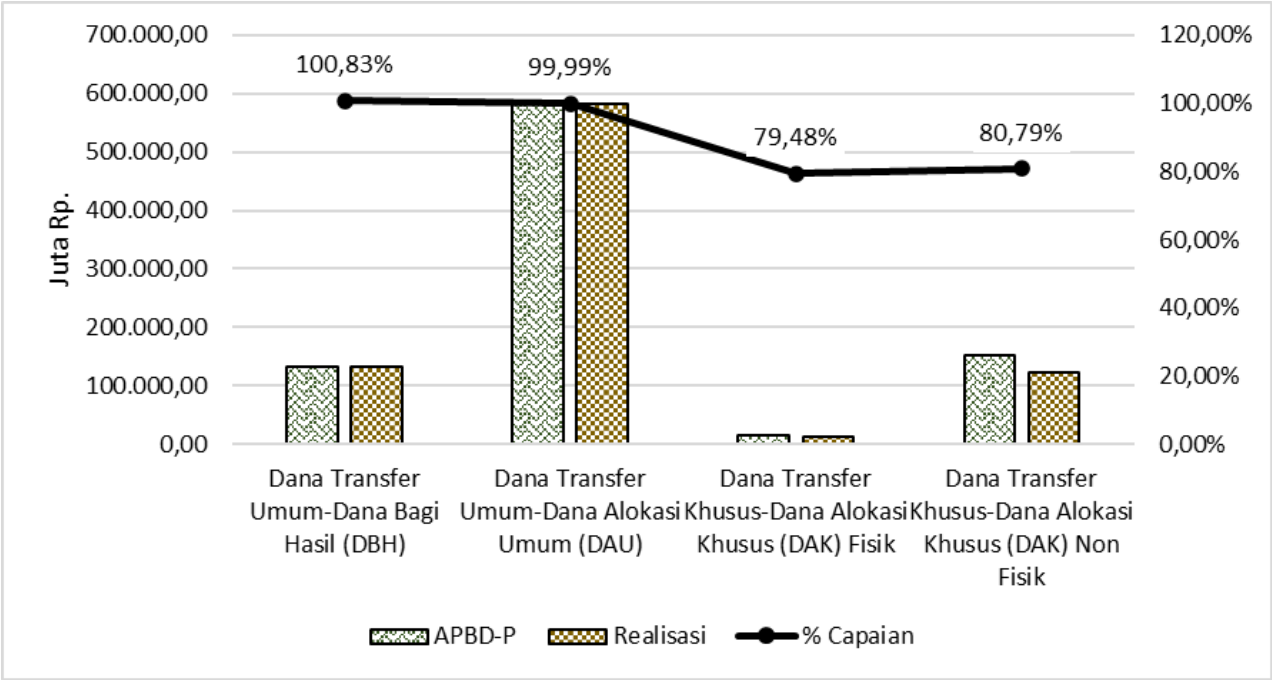
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2n Capaian Komponen Pendapatan Transfer



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Gambar 1.3.5.2o Capaian Komponen Dana Perimbangan



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

B.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Bagi Hasil

Capaian realisasi penerimaan dari komponen Dana Bagi Hasil sebesar **100,83%** atau sebesar **Rp 132.681.711.714,-** dari target sebesar **Rp. 131.587.647.443,-**. Realisasi Dana Bagi Hasil terdiri dari:

- a. Realisasi komponen Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mencapai **119,69%** melampaui target sebesar **Rp. 957.769.429,-**

- b. Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 terealisasi **99,87%** tidak melampaui target sebesar **Rp. (146.060.825),-**
- c. Realisasi Komponen Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 terealisasi **100%** dari target sebesar **Rp. 6.845.118.621,-**
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terealisasi hanya **4,76%** atau tidak melampaui target sebesar **Rp. (43.077.000),-**
- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi terealisasi **0%** dari target sebesar **Rp. 787.683.000,-**
- f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi mencapai realisasi **100%** dari target sebesar **Rp. 139.920.696,-**
- g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral/Pertambangan Umum (Royalty) memiliki realisasi mencapai **181,88%** atau melampaui target sebesar **Rp 1.113.115.667,-**
- h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi sebesar **100%** dari target sebesar **Rp. 86.839.000,-**
- i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan mencapai realisasi **100%** dari target sebesar **Rp. 1.958.311.000,-**

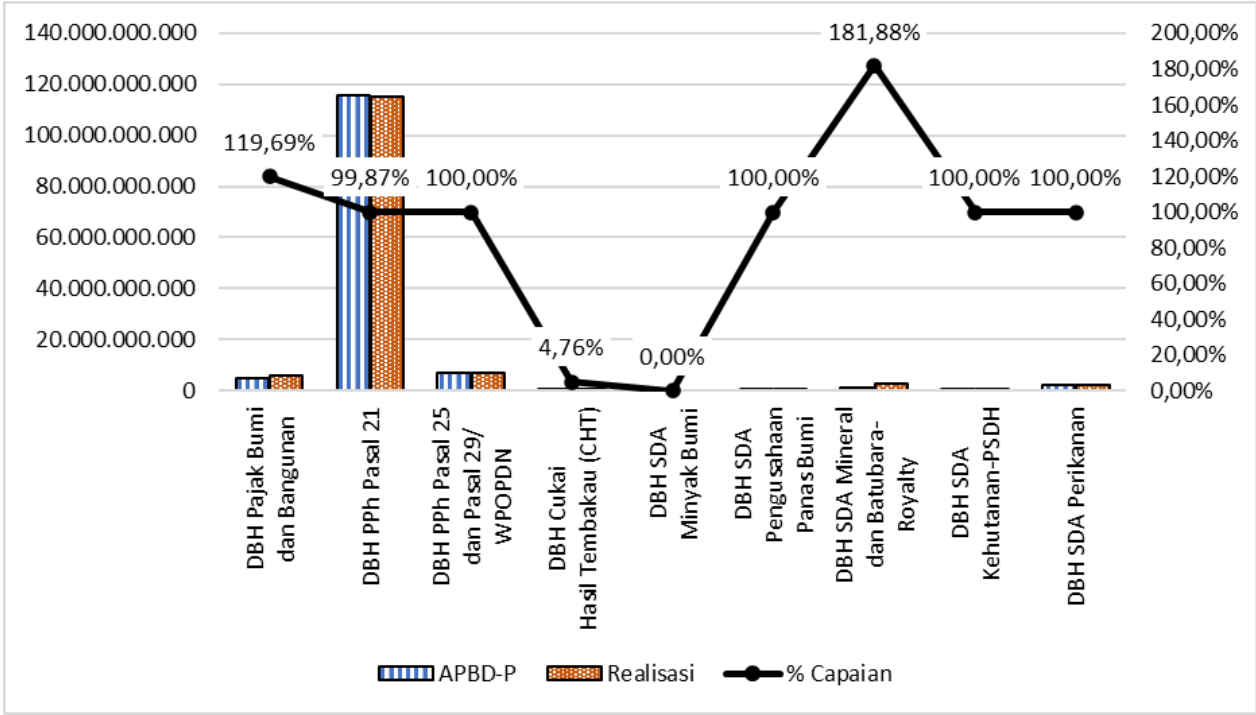
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Dana Bagi Hasil sebagai berikut :

Tabel 1.3.5.2h Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	131.587.647.443	132.681.711.714	100,83%	1.094.064.271
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.864.308.840	5.822.078.269	119,69%	957.769.429
DBH PPh Pasal 21	115.500.804.259	115.354.743.434	99,87%	(146.060.825)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.845.118.621	6.845.118.621	100,00%	0
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.227.639	2.150.639	4,76%	(43.077.000)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	787.683.000	0	0,00%	(787.683.000)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	139.920.696	139.920.696	100,00%	0
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.359.434.388	2.472.550.055	181,88%	1.113.115.667
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	86.839.000	86.839.000	100,00%	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000	1.958.311.000	100,00%	0

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2p Target & Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

b. Dana Alokasi Umum

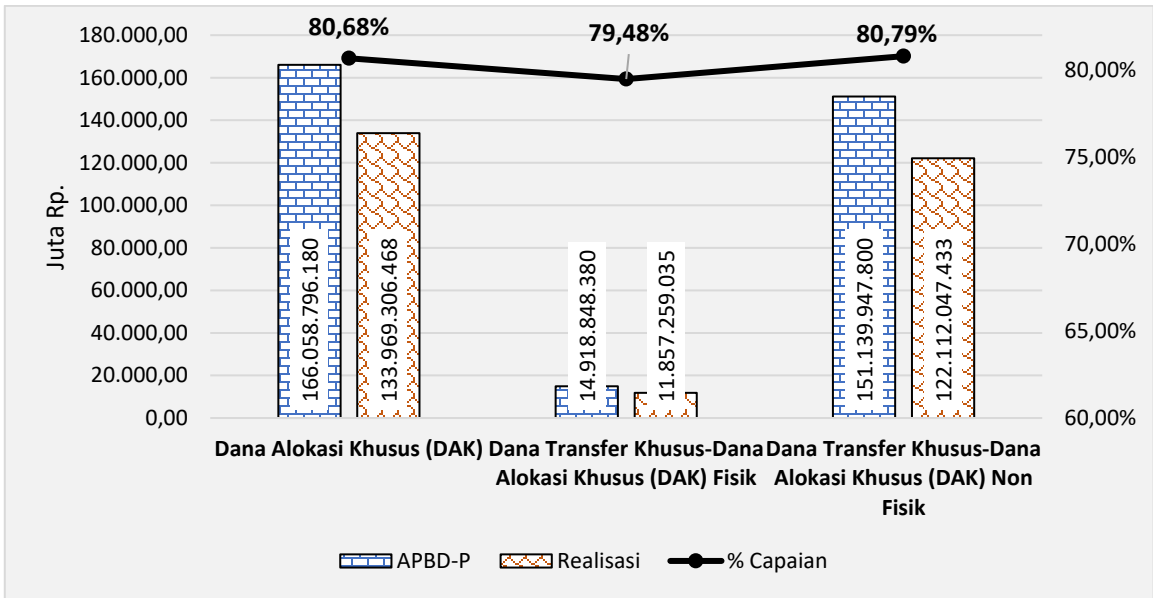
Dana Alokasi Umum terealisasi **99,99%** atau terealisasi sebesar **Rp. 582.371.974.917** dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar **Rp. 582.438.474.917,-**. Hal tersebut dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua dalam rangka Penggantian Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Alokasi Dana Transfer mempedomani Undang-undang nomor 09 Tahun 2020 Tentang APBN 2022 dan turunannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, serta Juklak dan juknis mempedomani Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terealisasi sebesar **79,48%** atau sebesar **Rp. 11.857.259.035,-** dari target sebesar **Rp. 14.918.848.380,-**. Hal ini dikarenakan kebijakan pengelolaan DAK fisik bahwa jumlah dana yang disalurkan adalah sesuai dengan jumlah data kontrak yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke Kementerian Keuangan maksimal pada tanggal 21 Juli tahun berjalan.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik terealisasi sebesar **80,79%** atau sebesar **Rp. 122.112.047.433,-** dari target sebesar **Rp. 151.139.947.800,-**. Salah satu penyebabnya adalah :
 - Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak terealisasi senilai **(Rp 9.456.673.141,-)** karena terbitnya Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor

Gambar 1.3.5.2q Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

d. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) telah mencapai target 100% dari target sebesar **Rp. 4.420.181.000,-** alokasi DID mempedomani Undang-undang nomor 09 Tahun 2020 Tentang APBN 2022 dan turunanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022.

B.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan dari komponen Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten mencapai **100%** atau sesuai dengan target. Dengan realisasi sebesar **Rp. 190.068.680.519,-** dari target sebesar **Rp. 190.068.680.519,-** yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi **105,34%** yaitu sebesar **Rp. 2.187.994.620,-**
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan realisasi **94,16%** tidak melampaui target sebesar **Rp. (1.785.455.432,-)**
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan capaian realisasi **106,92%** dengan capaian melampaui target sebesar **Rp. 5.141.102.400,-**
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan capaian realisasi **87,47%** dengan capaian tidak melampaui target sebesar **Rp. (5.543.641.588,-)**

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut:

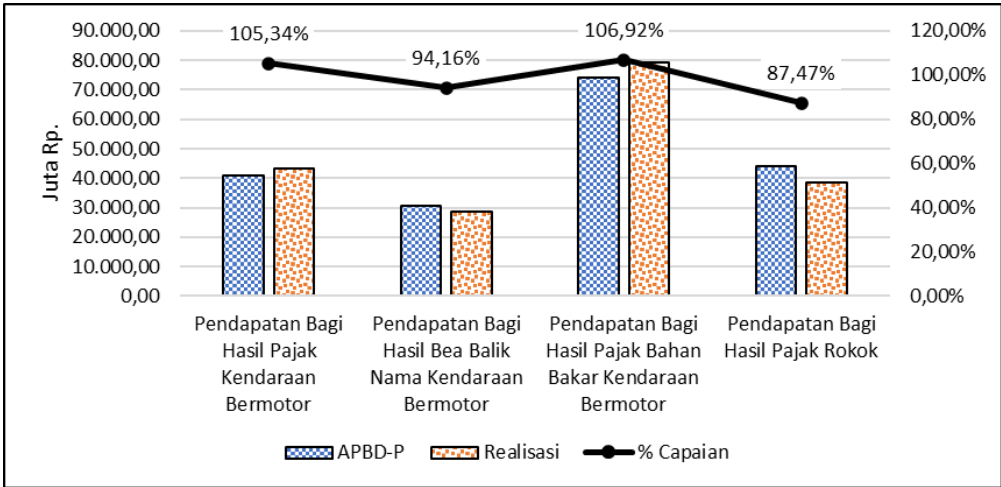
Tabel 1.3.5.2i Rencana dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Pendapatan Bagi Hasil	190.068.680.519	190.068.680.519	100,00%	0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	190.068.680.519	190.068.680.519	100,00%	0

Uraian	2022 (Unaudited)			Lebih/Kurang
	APBD-P	Realisasi	% Capaian	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	40.938.756.552	43.126.751.172	105,34%	2.187.994.620
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.557.376.992	28.771.921.560	94,16%	(1.785.455.432)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.335.591.370	79.476.693.770	106,92%	5.141.102.400
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	44.236.955.605	38.693.314.017	87,47%	(5.543.641.588)

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.5.2r Target & Realisasi Komponen Pendapatan Bagi Hasil



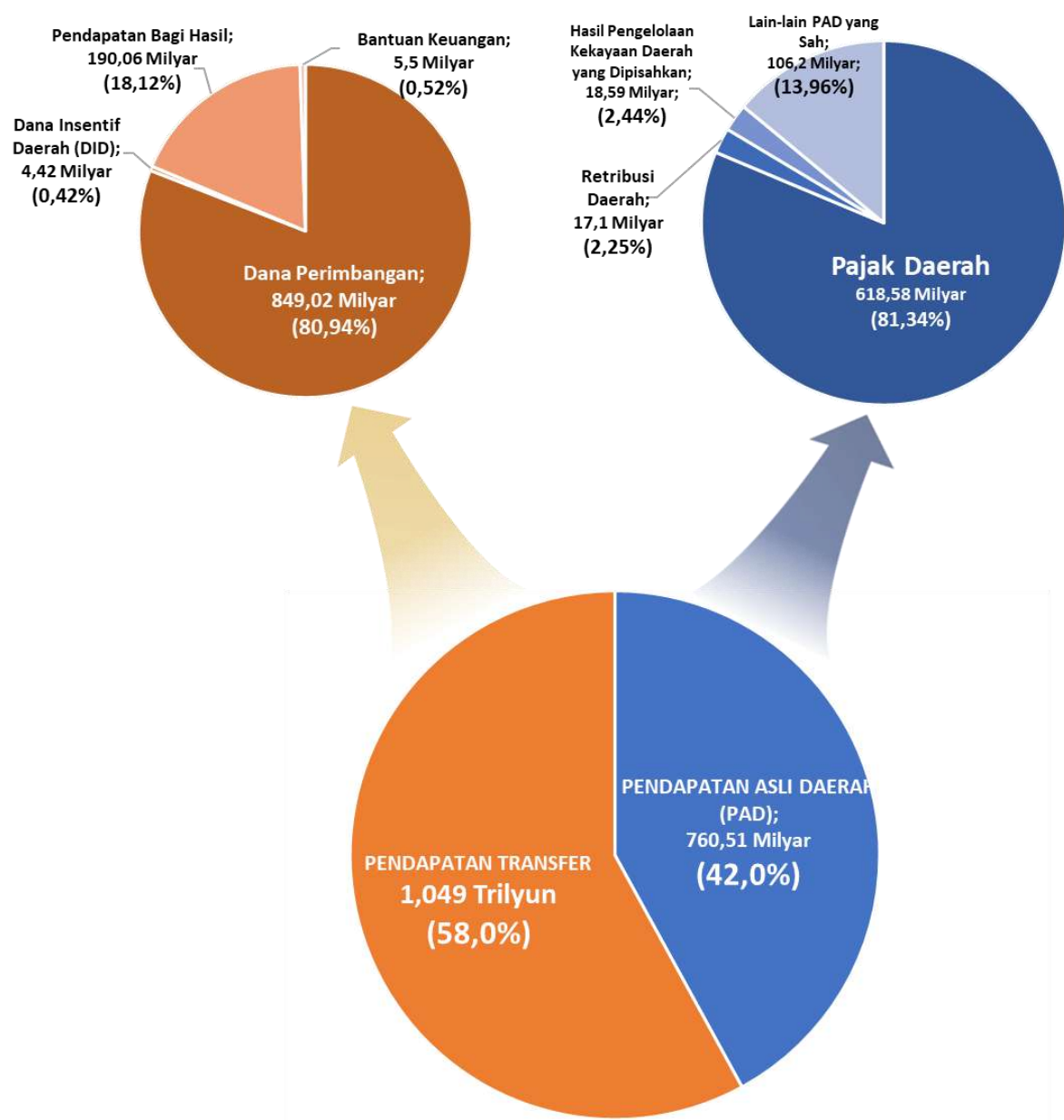
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

- b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten

Kota Cilegon mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** terealisasi **55,00%** atau terealisasi sebesar Rp. 5.500.000,- dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota se-Provinsi Banten Tahun 2022.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

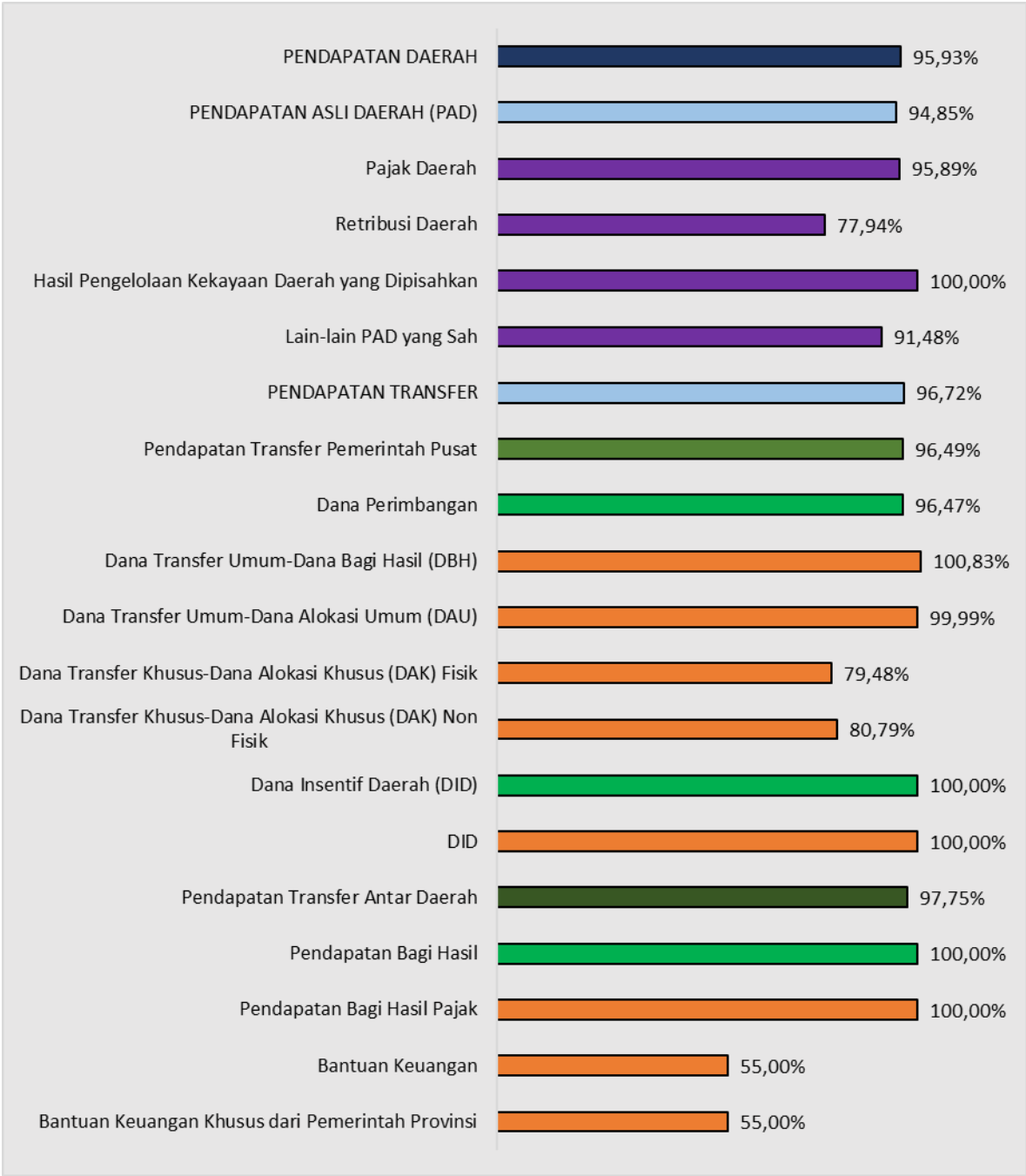
Untuk komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022, tidak dialokasikan mengingat pada tahun 2022 pendapatan Hibah Dana BOS berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi pencatatan dan pelaporannya dialihkan ke Kode Rekening Pendapatan Transfer Pusat komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik bidang pendidikan BOS Reguler dan BOS Kinerja.

Gambar 1.3.5.2t Diagram Proporsi **Realisasi** Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Gambar 1.3.5.2u Diagram Persentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : LRA APBD 2022 Kota Cilegon, diolah

3.1.1.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Komposisi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan perhitungan komposisi mencapai 42,03%, dan Pendapatan Transfer memberikan komposisi sebesar 57,97%. Dengan kata lain PAD memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, karena hampir separuhnya Pendapatan Daerah diperoleh dari PAD. Pengeluaran APBD tidak seluruhnya dibiayai dari Dana Alokasi Transfer dari Pemerintah Pusat.

A. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Untuk menjaga keseimbangan belanja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan prioritas pemerintah Kota Cilegon yang dibebankan kepada Pendapatan Asli Daerah, maka



diupayakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai strategi meliputi :

1. Peningkatan kinerja pemungutan,
2. Peningkatan pelayanan publik,
3. Penyederhanaan mekanisme dan pemberlakuan pembayaran berbasis online,
4. Perubahan Kebijakan Pemungutan Pendapatan sesuai dengan Perubahan UU Cipta Kerja,
5. Peningkatan dengan penambahan objek/subjek Pajak dan Retribusi Daerah,
6. Peningkatan daya investasi di wilayah Kota Cilegon,
7. Meningkatkan pendanaan penyertaan modal pada BUMD Kota Cilegon,
8. Mengurangi resiko pengembalian/temuan.

Secara rinci upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah :

- Melakukan Pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah;
- Melakukan Penagihan Langsung Pajak Daerah.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- Melakukan Pengendalian dan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah.
- Rekonsiliasi BPHTB
- Memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk yang Buku I.
- Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon.
- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak.
- Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon selaku pengacara Negara terkait penagihan pajak daerah.

2. Intensifikasi Retribusi Daerah

Adapun rincian intensifikasi yang dilakukan per objek Retribusi Daerah diantaranya sebagai berikut:

2.1 Intensifikasi Retribusi Jasa Umum

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Umum meliputi :

1. Peningkatan kualitas **Pelayanan Kesehatan** pada Dinas Kesehatan (Puskesmas) dengan optimalisasi melalui pemeriksaan fisik calon haji tahun 2022.
2. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Pelayanan Persampahan** yang telah dilaksanakan adalah menerbitkan surat teguran kepada Industri dan Pihak ke-3 untuk melakukan pembayaran tunggakan retribusi, dan melakukan penutupan *gatepass* bagi wajib retribusi yang belum memiliki izin agar dapat segera mengurus perizinan penggunaan lahan TPSA karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan surat tagihan.
3. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum** oleh **Dinas Perhubungan** adalah melakukan pembenahan dalam upaya meningkatkan PAD di Lokasi yang masih aktif.

4. Upaya intensifikasi terkait pengelolaan **Retribusi Pelayanan Pasar** baik yang dikelola oleh **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** maupun **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** meliputi :
 - a. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan :
 - Melakukan pembinaan kepada petugas kolektor dalam melakukan pungutan di setiap pasar
 - Merevitalisasi manajemen pengelolaan pasar dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pasar
 - Kerjasama dengan dinas terkait
 - b. Dalam hal pengelolaan **Retribusi Pasar Hewan** DKPP melakukan intensifikasi dengan memaksimalkan penagihan terhadap pengguna los/lahan
5. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** pada **Dinas Perhubungan** berupaya meningkatkan kegiatan pelayanan PKB kepada Konsumen atau masyarakat umum, dan melakukan penyempurnaan pada aplikasi pembayaran
6. Pelaksanaan intensifikasi yang dilaksanakan oleh **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan** dalam hal pemungutan **Retribusi APAR** diantaranya :
 - a. Terlaksananya sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang **Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran**.
 - b. Terlaksananya sosialisasi Perwal Nomor 07 Tahun 2020 tentang **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** dengan sumber pembiayaan mandiri.
 - c. Belum terakomodirnya alokasi anggaran untuk melakukan SWAB anti gen tim inspeksi.
 - d. Terakomodirnya pembiayaan pengadaan peralatan pemeriksaan yang memadai.
 - e. Terlaksananya penambahan/pengadaan personil pegawai teknis pemeriksaan (Tenaga yang ada belum memiliki kualifikasi bimbingan teknis).

2.2 Intensifikasi **Retribusi Jasa Usaha**

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor **Retribusi Jasa Usaha** meliputi :

1. Upaya intensifikasi dalam pemungutan **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** yang dilakukan oleh OPD sebagai berikut :
 - a) **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** dengan upaya menjaga alat berat yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dengan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala sehingga ketika ada yang menyewa alat dalam keadaan siap untuk disewakan.
 - b) **BPKPAD** dalam mengoptimalkan pemungutan **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** dengan upaya sebagai berikut:
 1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengamanan BMD Kota Cilegon.
 2. Mengoptimalkan upaya penerapan Peraturan Walikota terkait pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah.
 3. Mengembangkan Sistem Pembayaran Online, untuk mempermudah pembayaran retribusi pada Wajib Retribusi.
2. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Terminal** pada Dinas Perhubungan - Melakukan pembenahan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan **Retribusi Terminal** kepada wajib retribusi dan Memberikan pemahaman tentang **Retribusi** kepada wajib retribusi.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya pada **UPT RPH (Rumah Potong Hewan)** Ruminasi (sapi/kerbau) dengan memaksimalkan penagihan terhadap tunggakan dari para pengguna jasa yang sudah menggunakan atau memanfaatkan fasilitas baik pelayanan pemotongan maupun pelayanan pasar hewan secara persuasif. Serta melaksanakan penerapan

pembayaran non tunai berbasis online melalui transaksi pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

2.3 Intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan **Retribusi PBG** adalah menyusun perda baru terkait retribusi PBG yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja .
2. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan atas pemungutan **Retribusi Izin Trayek** dapat dilakukan dengan pembenahan dan peningkatan dan pengembangan pengelolaan retribusi kepada pemegang angkot/pengusaha angkutan umum dan Memberikan pemahaman tentang Retribusi kepada wajib retribusi

2.4 Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah

1. Langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bank BJB Cab. Cilegon dalam rangka pencapaian dan dukungan peningkatan Pendapatan Daerah diantaranya peningkatan layanan dan jaringan untuk melayani pembayaran Pajak Daerah dengan menyiapkan jaringan kantor yang mempermudah wajib pajak diantaranya :
 - a. 1 (satu) kantor cabang.
 - b. 3 (tiga) kantor cabang pembantu.
 - c. 5 (tujuh) kantor kas.
 - d. 5 (lima) payment point di kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak Daerah.
 - e. 1 (satu) unit mobil edukasi.
 - f. 54 (lima puluh empat) mesin ATM.
 - g. Pembayaran melalui kanal digital Internet Banking (Bjb Digi) dan internet banking corporate (IBC).
 - h. Pembayaran pajak melalui Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) serta e-commerce (Traveloka, Bukalapak , Tokopedia, Link aja, Ovo, dan Dana)
2. Intensifikasi yang dilakukan oleh PT PCM meliputi memberikan pelayanan jasa penyandaran kapal yang tepat waktu, handal dan aman, serta meminimalisir keluhan pelanggan secara objektif sekaligus penyelesaian keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM meliputi meminimalisir kolektibilitas pembiayaan bermasalah, melakukan sosialisasi, kerjasama dan promosi kepada pemerintah, BUMD, swasta (usaha besar, menengah, usaha kecil), lembaga kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di wilayah Cilegon, dan mengadakan jasa pembiayaan individu yang lebih kompetitif untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta.
4. Intensifikasi **Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri** dilakukan dengan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan yang menunggak diatas 3 bulan.

2.5 Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Intensifikasi yang dilakukan oleh BPKPAD dalam hal penyerapan pendapatan lelang kendaraan adalah melaksanakan inventarisir barang milik daerah pada pengguna barang.
2. Intensifikasi pada sektor jasa giro kas daerah yaitu dengan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas terkait dalam hal pencatatan dan pelaporan uang yang tercatat pada kas umum daerah.
3. Intensifikasi pada sektor pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dan rekonsiliasi atas penempatan uang di bank persepsi secara periodik.
4. Intensifikasi yang dilakukan **RSUD Kota Cilegon** dimasa pandemi covid 19 dan dampaknya, diantaranya sebagai berikut :

- 
- a. Meningkatkan Fasilitas layanan Radiologi terutama untuk alat CT Scan dan alat rontgen thorak
 - b. Meningkatkan fasilitas ruang rawat inap VIP
 - c. Pemenuhan fasilitas pelayanan instalasi forensik dan medicolegal
 - d. Meningkatkan fasilitas layanan poli mata, yaitu alat kedokteran Pachoemulsification system
 - e. Pemanfaatan instalasi gas medis yang telah menopang fasilitas layanan IGD dan Ruang Rawat Inap
 - f. Pemanfaatan sistem pendaftaran dan pembayaran secara online yang memudahkan pasien
5. Intensifikasi pada BLUD Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar penyaluran pinjaman maupun penyediaan produk input lebih ditingkatkan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan jasa pinjaman.
 6. Intensifikasi dari sektor pendapatan denda pajak dan retribusi dengan melaksanakan sosialisasi, himbauan atas ketaatan membayar pajak dan retribusi.
 7. Intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pengembalian temuan adalah meningkatkan sistem pengendalian, dan pengawasan atas serapan belanja daerah sejak tahun 2016.
 8. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pelayanan pada 8 unit UPT Puskesmas, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi JKN tahun anggaran 2022.

B. Intensifikasi Pendapatan Transfer

Secara garis besar penerimaan Pendapatan Transfer dipengaruhi dari alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan. Namun Pemerintah Daerah senantiasa melaksanakan upaya-upaya peningkatan yang komprehensif dan berkala dengan melaksanakan rekonsiliasi data dengan kementerian terkait, dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditentukan, melaksanakan konsultasi atas piutang capaian alokasi transfer lebih bayar maupun kurang bayar oleh Pemerintah Pusat, dan melakukan penyesuaian atas pagu anggaran target pendapatan dari sektor transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk Kota Cilegon. Melaksanakan koordinasi lintas linier dan integrasi manajemen pengelolaan/penyaluran dana transfer baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dan Melaksanakan koordinasi tingkat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal pengelolaan alokasi dana transfer.

Adapun intensifikasi sesuai dengan komposisi alokasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1.1 Dana Transfer Umum - Bagi Hasil Pajak Pusat

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 127/07/2022 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar dana Bagi Hasil
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPN) dalam rangka penyesuaian penerimaan pendapatan dari sektor DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pph Pasal 21, 25 dan 29 Pajak Pribadi atau Orang Asing.

1.2 Dana Transfer Umum - Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 127/07/2022 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar dana Bagi Hasil

- Melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan, dan Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (Royalti).

1.3 Intensifikasi Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kementrian Keuangan RI terkait Dana Alokasi Umum (DAU) secara periodik atas alokasi DAU sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.07/2022, melaksanakan penyerapan DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

1.4 Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Melaksanakan penyampaian pelaporan penyerapan DAK tepat waktu, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait juknis/juklak penyerapan DAK periode tahun 2022, melaksanakan Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta melakukan himbauan kepada OPD penerima DAK agar melaksanakan penyerapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

- Melaksanakan koordinasi lintas linier antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait penyaluran dana transfer.
- Melaksanakan koordinasi tingkat OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal pengelolaan alokasi dana transfer.
- Pengelolaan DAK Non-Fisik bidang Pendidikan :
 1. Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan koordinasi terhadap Pemerintah Pusat baik Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
 2. Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan amanat undang-undang dan turuannya baik alokasi yang bersumber dari Alokasi APBN Tahun 2022, dan Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, serta melaksanakan ketentuan Juklak dan Juknis sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 3. Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan Verifikasi data dapodik, melaksanakan kompilasi dari data calon penerima hibah BOS dapodik dalam kurun waktu 1 tahun berjalan.
 4. Pemerintah Kota Cilegon menetapkan Surat Keputusan atas Sekolah penerima dana BOS jenjang Pendidikan dasar 9 tahun, menetapkan SK Nomor Rekening Penerima dana BOS, Menetapkan SK Bendahara Penerima dana BOS, dan Menetapkan SK Tim Managerial pengelolaan dana Hibah BOS.

1.5 Intensifikasi Dana Insentif Daerah (DID)

Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Insentif Daerah) sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2022. Serta melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

2. Intensifikasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

2.1 Upaya intensifikasi komponen Bagi Hasil Pajak Provinsi

- a. Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Surat Kepala BPKPAD Provinsi Banten Nomor 900/1159-BPKAD.03/2022 tanggal 9 September 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada P-APBD TA.2022

- 
- b. Melaksanakan kesesuaian pagu anggaran pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.78-Huk/2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari sampai dengan November, Periode bulan Desember, dan Pelampauan atas bagi hasil pajak TA 2021 kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada TA 2022
 - c. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Bagi Hasil Dari PKB, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok yang dilaksanakan rutin setiap periodik.
 - d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Cilegon bersama dengan Bapenda Provinsi Banten, terkait pengelolaan pemungutan Pajak Provinsi Banten, dan melaksanakan koordinasi atas pemetaan atas denda pajak yang dikelola Provinsi Banten.

2.2 Upaya intensifikasi komponen Bantuan Keuangan Provinsi Banten

1. Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini koordinasi dengan Bappenda Provinsi berkaitan dengan penetapan target alokasi anggaran tahun 2022, dan alokasi penyerapan/penerimaan atas bantuan keuangan Provinsi Banten secara periodik.

C. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

1. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan, dan perubahan atas regulasi/tata cara pemungutan/mekanisme pemungutan Pendapatan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah :

1.1 Pajak Daerah

- Pendataan Wajib Pajak Daerah untuk menjaring wajib pajak baru.
- Sosialisasi Pajak daerah yang dilakukan secara terus menerus baik itu secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik
- Mencari informasi pada pihak lain terkait potensi peralihan hak yang terjadi di Kota Cilegon.
- Updating data PBB-P2 sehingga apabila terjadi mutasi sebagian atas suatu bidang tanah, maka akan menambah jumlah wajib pajak PBB-P2.
- MOU dengan KPP. Pratama Kota Cilegon.
- MOU dengan BPN Kota Cilegon.

1.2 Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon telah berupaya untuk dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1.2.1 Retribusi Jasa Umum, meliputi ;

1. Melakukan sosialisasi terhadap industri-industri yang belum memanfaatkan TPSA Bagendung sebagai lokasi pembuangan sampah dengan mengurus perizinan penggunaan lahan TPSA Bagendung.
2. Ekstensifikasi sektor Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan adalah Pendataan ulang pada titik-titik lahan parkir baik pada titik lokasi parkir Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
3. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan upaya melakukan sosialisasi tentang retribusi daerah kepada para pedagang pasar.
4. Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan perluasan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor guna memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, serta

- melakukan sosialisasi dan monitoring kepada perusahaan/pengguna jasa transportasi wajib uji.
5. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pembenahan dan peningkatan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya :
 - a. Menjalin koordinasi dengan dinas terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
 - b. Berkoordinasi dengan Pihak OPD terkait dukungan anggaran.
 - c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung untuk bahan evaluasi selanjutnya.
 - d. Melaksanakan sosialisasi bahwa pentingnya pemenuhan standar keselamatan kebakaran bangunan gedung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan meyakinkan pihak ketiga (penyewa) bahwa alat berat yang dimiliki UPTD Perlengkapan, perbengkelan dan laboratorium memiliki kualitas yang baik sehingga mampu bersaing dengan pihak swasta.
2. **BPKPAD** dalam hal pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah melaksanakan upaya ekstensifikasi berupa :
 - Akan melaksanakan Kajian untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cilegon dengan ketentuan zonasi wilayah
 - Promosi untuk meningkatkan daya investasi agar aset yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor.
3. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir adalah dengan pendataan ulang pada titik-titik lahan parkir tempat khusus parkir.
4. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan jasa usaha sektor retribusi pemotongan hewan ternak besar (sapi/kerbau) melakukan himbauan memotong hewan pada tempat yang disediakan pemerintah daerah, dan memberikan penyediaan fasilitas jasa pelayanan tambahan sesuai kebutuhan.

1.2.3 Retribusi Izin Tertentu, meliputi :

1. Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pemilik bangunan tentang pentingnya memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Retribusi IMTA : melaksanakan penerapan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 569/424/SJ tentang penerimaan daerah yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja. Serta melaksanakan penyusunan perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Pengganti Retribusi IMTA sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja.
3. Retribusi Trayek dengan Mengaktifkan kembali operasi gabungan dengan instansi penegak hukum terkait penertiban ijin angkutan.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Bank BJB turut serta mendukung pembangunan di Kota Cilegon dengan program Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur serta Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta Bank BJB senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Mendukung peningkatan dan perluasan Digitalisasi Daerah dengan memanfaatkan kanal pembayaran untuk memudahkan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. dan mendukung program digitalisasi daerah pemerintah kota cilegon sebagai tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD).
- b. PDAM Cilegon Mandiri melakukan ekstensifikasi dengan melakukan penambahan cakupan pelayanan dengan menambah pelanggan baru sebesar kurang lebih 1.500 pelanggan di tahun 2022.

- c. Ekstensifikasi yang dilakukan oleh PT. PCM adalah memelihara komunikasi rutin yang efektif dengan pelanggan, meninjau kemungkinan pengembangan bisnis perusahaan dengan kajian-kajian yang komprehensif, memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi kemaritiman dan khususnya pengusaha kepelabuhanan untuk membuka peluang pelanggan dan bisnis baru.
- d. Ekstensifikasi yang dilakukan oleh PT. BPRS CM meliputi mengadakan fasilitas jemput tabungan kepada pihak nasabah penabungan, baik setoran maupun penarikan, mengadakan pemantauan dan pembinaan yang lebih efektif terhadap nasabah Badan Usaha, melakukan kerjasama penempatan dana, mengupayakan efisiensi pengeluaran biaya, serta pengembangan teknologi untuk pelayanan transaksi nasabah dengan adanya fasilitas Virtual Account dan fasilitas pembayaran melalui alfa group.

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- a. Upaya penentuan nilai jual lelang kendaraan dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak KPKNL selaku appraisal (penilai) BMD.
- b. Melaksanakan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah sehingga penerimaan atas temuan Inspektorat dapat terminimalisir.
- c. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan Lain-lain PAD yang sah Cicilan Kios dengan meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang, dan melakukan pendataan kembali terhadap debitur.
- d. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pendapatan BLUD RSUD Cilegon adalah menambahkan beberapa pelayanan untuk pasien yaitu :
 - Pelayanan Gayatri
 - Pelayanan Spesialis Gigi Bedah Mulut
 - Pelayanan Akupuntur
- e. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD Pemerintah adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar penyaluran pinjaman maupun penyediaan produk input dapat lebih ditingkatkan.

2. Ekstensifikasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga upaya ekstensifikasi penggalan potensi baru sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Cilegon hanya dapat mendukung pengelolaan dimaksud melalui konsultasi, koordinasi terkait mekanisme pencairan/transfer yang dilakukan Pemerintah RI Kementerian terkait, agar Dana Perimbangan dimasa mendatang mendapatkan alokasi Dana Bidang Baru dan semakin optimal.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Dana Transfer antar Daerah baik DBH Pajak dan Bantuan Keuangan diantaranya melaksanakan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Provinsi Banten, dan Melaksanakan pemetaan atas alokasi dana transfer antar pemerintah guna penyerapan tepat guna dan tepat sasaran sehingga capaian lebih maksimal.

2.5.1 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Struktur Belanja Daerah pada APBD 2022 juga mengalami perubahan seiring dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar belanja dan standar satuan harga. Dalam rangka mendukung prioritas nasional, APBD juga dialokasikan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka meningkatkan berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi

2.5.1.1 TARGET DAN REALISASI BELANJA

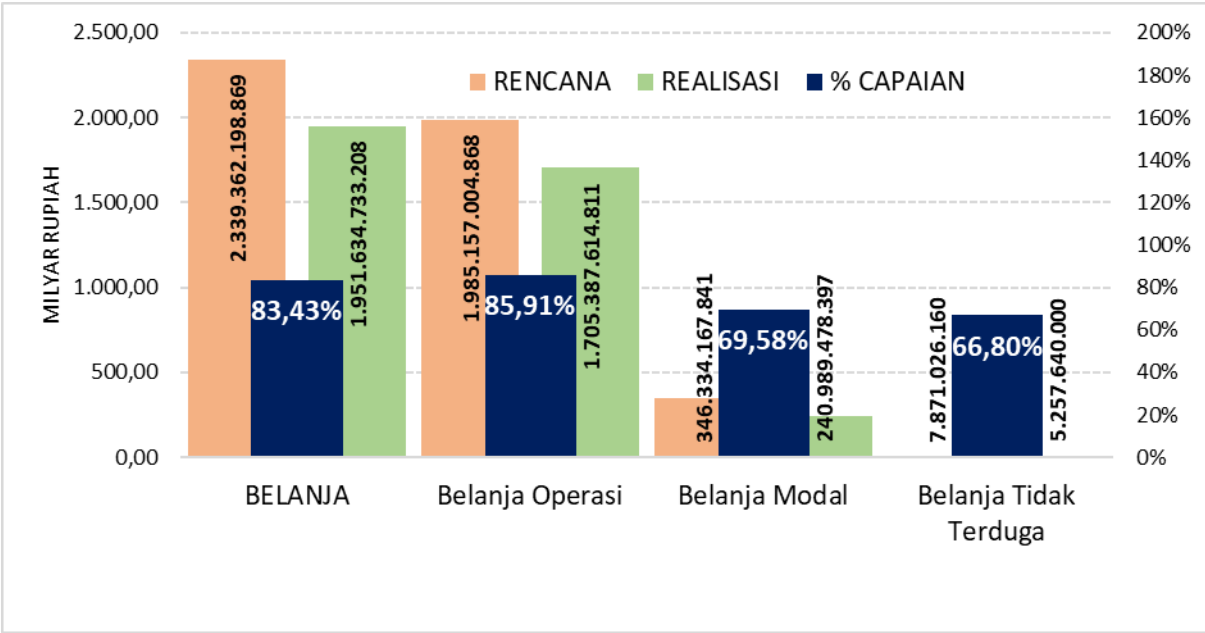
Anggaran Belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 2.339.362.198.869,-** dengan realisasi sebelum dilakukan audit oleh BPK RI sebesar **Rp. 1.951.634.733.208,-** atau persentase pencapaian sebesar **83,43%**. Terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah di tahun sebelumnya yang mencapai 75,13%. Rincian realisasi belanja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.3.6.1a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
BELANJA	2.339.362.198.869	1.951.634.733.208	83,43%
Belanja Operasi	1.985.157.004.868	1.705.387.614.811	85,91%
Belanja Modal	346.334.167.841	240.989.478.397	69,58%
Belanja Tidak Terduga	7.871.026.160	5.257.640.000	66,80%

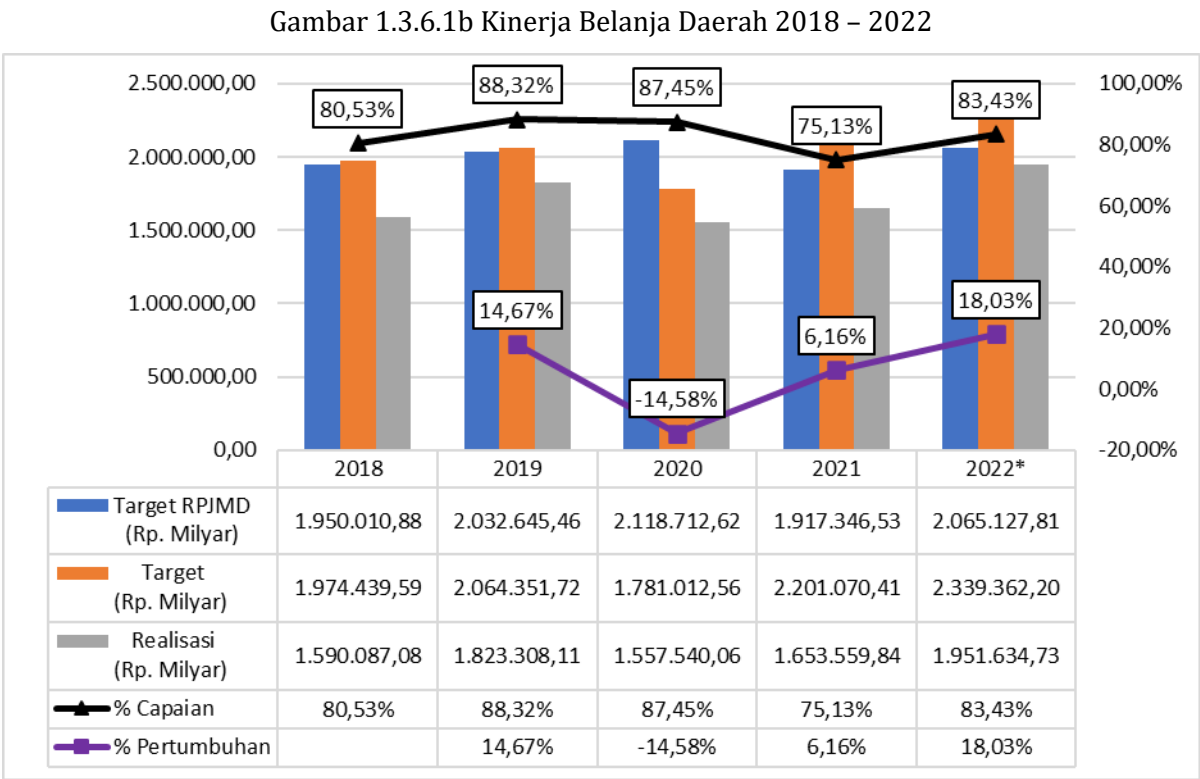
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.6.1a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Pertumbuhan Total Belanja pada Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



*) 2022 menggunakan data Unaudited

Sumber : LRA Kota Cilegon, diolah

Laju Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan pada tahun 2020, namun kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 komponen belanja modal menurun sekitar 211 milyar. Penurunan realisasi ini diakibatkan oleh komponen belanja modal tanah dan belanja modal Gedung dan bangunan. Namun laju pertumbuhan realisasi belanja daerah kembali positif pada tahun 2021 sebesar 6,16% dan tahun 2022 sebesar 18,03%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Cilegon dalam meningkatkan realisasi belanja program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

A. Belanja Operasi

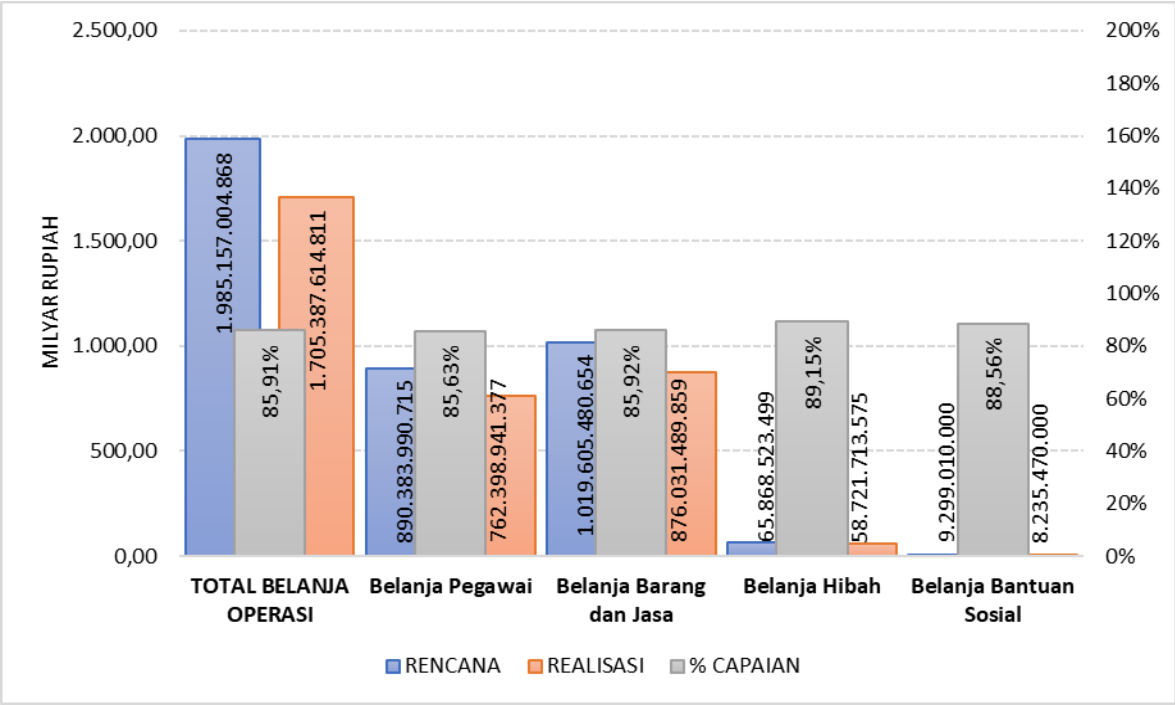
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2022 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.985.157.004.868 ,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.705.387.614.811,-** atau mencapai **85,91%**. Adapun Belanja Operasi dirinci sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
TOTAL BELANJA OPERASI	1.985.157.004.868	1.705.387.614.811	85,91%
Belanja Pegawai	890.383.990.715	762.398.941.377	85,63%
Belanja Barang dan Jasa	1.019.605.480.654	876.031.489.859	85,92%
Belanja Hibah	65.868.523.499	58.721.713.575	89,15%
Belanja Bantuan Sosial	9.299.010.000	8.235.470.000	88,56%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.6.1c Rencana & Realisasi Belanja Operasi Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

A.1 Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada APBD tahun 2022 meliputi :

1. Besaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan P3K sesuai formasi pegawai tahun 2022;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress sebesar 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dengan mempedomani PP no. 70 tahun 2015 beserta perubahannya tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN
6. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD yang mengacu kepada sistem gaji tunggal atau “Single Salary System”, yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan melalui verifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) dan merupakan perwujudan dari rekomendasi oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK);
7. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani PP no 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD melalui DAK Non Fisik, yang dalam hal ini menggunakan asumsi anggaran tahun berjalan.
9. Dengan berlakunya single salary, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, honorarium kegiatan hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan aparatur di luar Pemerintah Kota Cilegon baik PNS ataupun Non PNS, dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai

dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

10. Pegawai Non PNS Pemerintah Kota Cilegon yang meliputi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan honorarium/upah bulanan, dengan besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.;

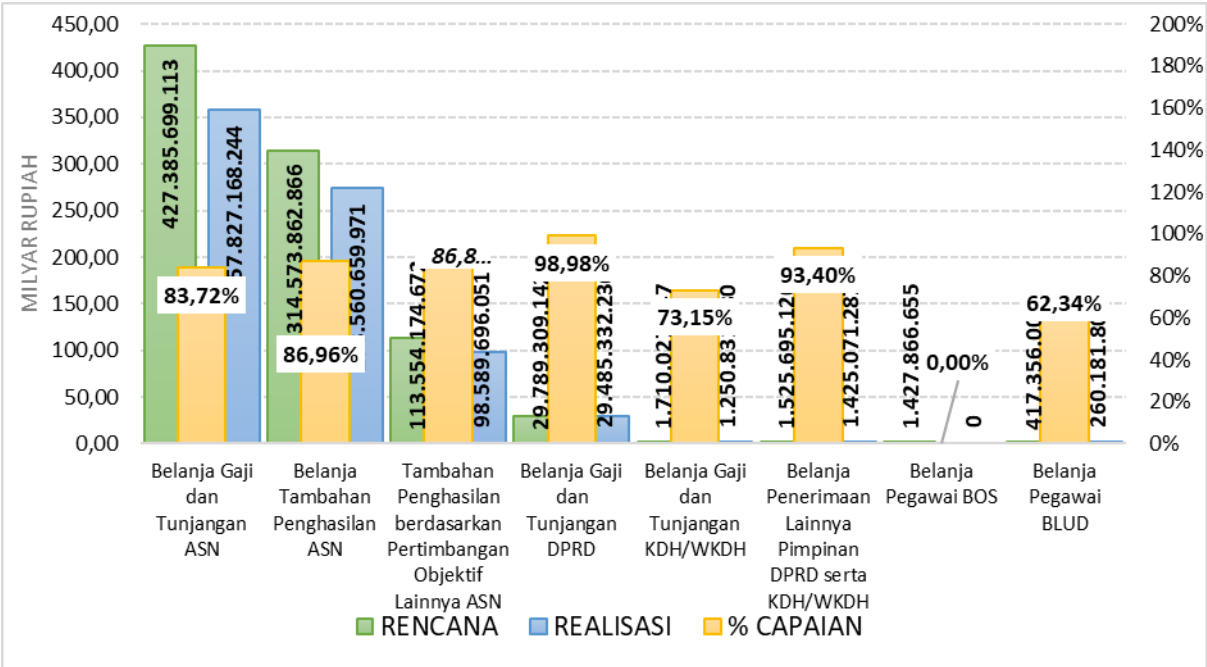
Pada tahun 2022 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar **Rp. 890.383.990.715,-** dan terealisasi sebesar **Rp 762.398.941.377,-** atau sebesar **85,63%**.

Tabel 1.3.6.1c Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
TOTAL BELANJA PEGAWAI	890.383.990.715	762.398.941.377	85,63%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	427.385.699.113	357.827.168.244	83,72%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.573.862.866	273.560.659.971	86,96%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.554.174.672	98.589.696.051	86,82%
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.789.309.142	29.485.332.236	98,98%
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.710.027.147	1.250.831.780	73,15%
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.525.695.120	1.425.071.287	93,40%
Belanja Pegawai BOS	1.427.866.655	0	0,00%
Belanja Pegawai BLUD	417.356.000	260.181.808	62,34%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Gambar 1.3.6.1d Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Operasi



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

A.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Kota Cilegon guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon 2021-2026. Belanja Barang dan Jasa Kota Cilegon Tahun 2022 meliputi antara lain: Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Adapun Kebijakan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pemberian honorarium atas jasa narasumber/tenaga ahli hanya diberikan kepada Aparatur di luar Pemerintah Kota Cilegon, dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya tahun 2022;
2. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tenaga kontrak kerja (TKK), tenaga harian lepas (THL) dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU No. 40 tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 12 Tahun 2013 beserta perubahannya;
3. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
4. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemda untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2021;
7. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial
9. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedolan kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah

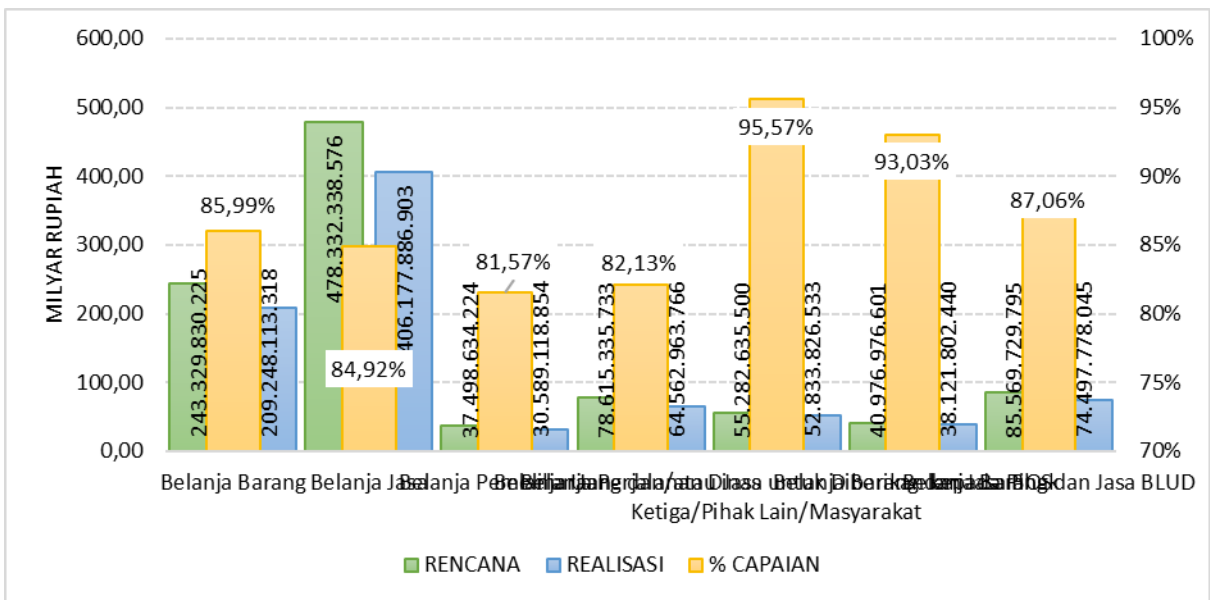
Total anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 adalah **Rp. 1.019.605.480.654,-** atau sebesar **51,36%** dari total Belanja Operasi, dan terealisasi sebesar **Rp. 876.031.489.859,-** atau sebesar **85,92%** dari yang dianggarkan. Berikut tabel anggaran dan realisasi komponen Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 1.3.6.1d Rencana dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Cilegon Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA	1.019.605.480.654	876.031.489.859	85,92%
Belanja Barang	243.329.830.225	209.248.113.318	85,99%
Belanja Jasa	478.332.338.576	406.177.886.903	84,92%
Belanja Pemeliharaan	37.498.634.224	30.589.118.854	81,57%
Belanja Perjalanan Dinas	78.615.335.733	64.562.963.766	82,13%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.282.635.500	52.833.826.533	95,57%
Belanja Barang dan Jasa BOS	40.976.976.601	38.121.802.440	93,03%
Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.569.729.795	74.497.778.045	87,06%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Gambar 1.3.6.1e Realisasi Komponen Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

A.3 Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah di Kota Cilegon ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dengan memperhatikan program prioritas daerah pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2022. Kebijakan Belanja Hibah pada Tahun 2022 di Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada masyarakat langsung ataupun kepada organisasi yang ada di masyarakat, yang sudah melalui berbagai tahapan verifikasi oleh OPD maupun tim penimbang melalui sistem e-Hibah Bansos,yang diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung capaian layanan dasar pemerintah serta prioritas daerah pemerintah kota Cilegon;
2. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja hibah, dengan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP No 5 tahun 2009 beserta perubahannya tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik serta Permendagri no 77 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

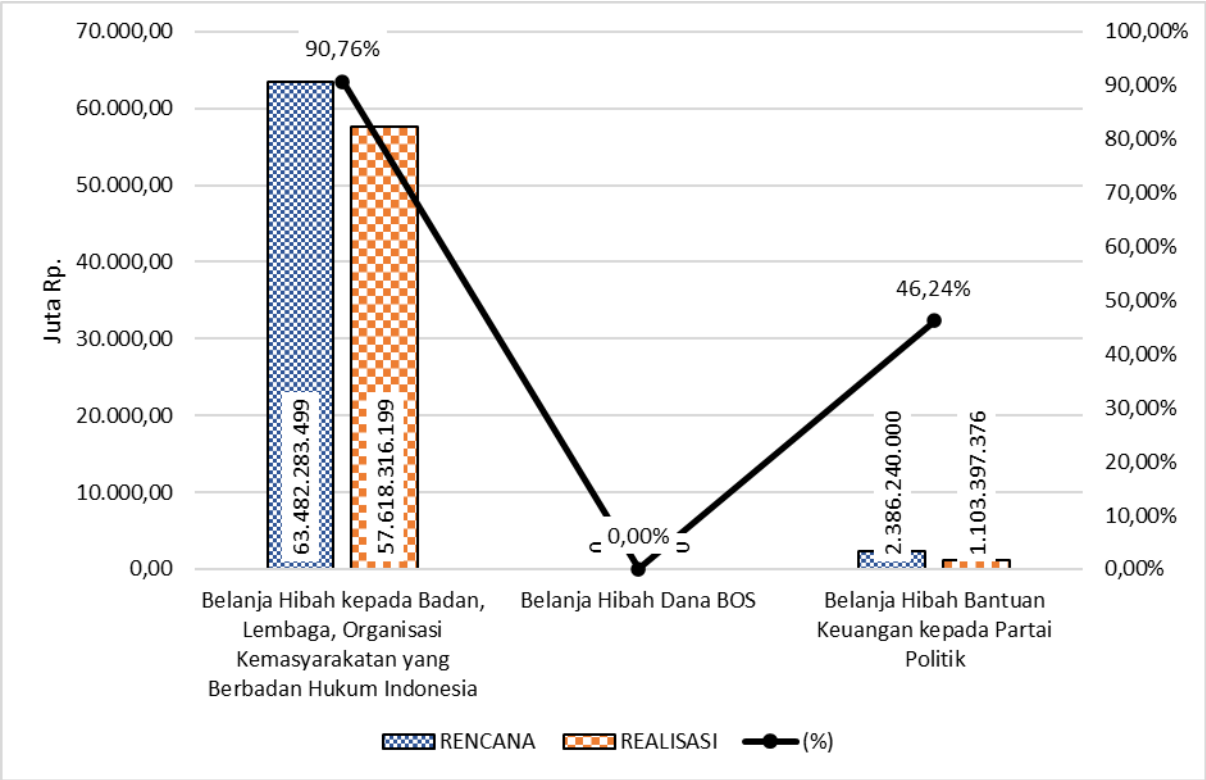
Pada tahun anggaran 2022 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp. 65.868.523.499,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 58.721.713.575,-** atau sebesar **89,15%** dari target. Target dan realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3.6.1e Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
TOTAL BELANJA HIBAH	65.868.523.499	58.721.713.575	89,15%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	63.482.283.499	57.618.316.199	90,76%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	58.258.510.999	55.498.357.199	95,26%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.144.959.000	1.704.959.000	54,21%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.078.813.500	415.000.000	19,96%
Belanja Hibah Dana BOS	0	0	0,00%
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri *	0	0	0,00%
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.386.240.000	1.103.397.376	46,24%
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.386.240.000	1.103.397.376	46,24%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Gambar 1.3.6.1f Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Keterangan : *Belanja Hibah Dana BOS masuk kepada Belanja Barang dan Jasa BOS

A.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp 8.235.470.000,-** atau sebesar **88,56%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 9.299.010.000,-**. Tidak tercapainya target dikarenakan Penerima Bansos yang diusulkan tahun sebelumnya melalui E-Hibah bansos, saat akan di salurkan telah meninggal/pindah, tidak ditemukan alamatnya dan administrasi kependudukan tidak valid/ aktif.

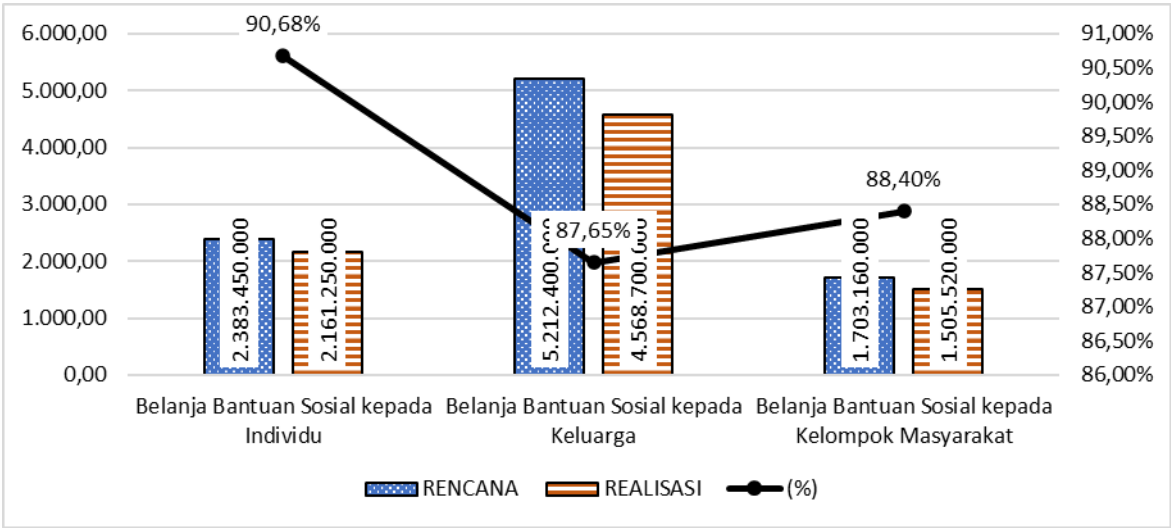
Rincian rencana dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3.6.1f Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
TOTAL BELANJA BANTUAN SOSIAL	9.299.010.000	8.235.470.000	88,56%
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.383.450.000	2.161.250.000	90,68%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.383.450.000	2.161.250.000	90,68%
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0	0	n/a
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.212.400.000	4.568.700.000	87,65%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.212.400.000	4.568.700.000	87,65%
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.703.160.000	1.505.520.000	88,40%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.703.160.000	1.505.520.000	88,40%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.6.1g Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

B. Belanja Modal

Salah satu komponen terpenting dalam struktur APBD adalah belanja modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh perangkat daerah Kota Cilegon. Kebijakan Belanja Modal di Kota Cilegon pada Tahun 2022 antara lain:

1. Prioritas alokasi belanja modal adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/standar harga yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Permendagri No 72 tahun 2012, PP No 27 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016;

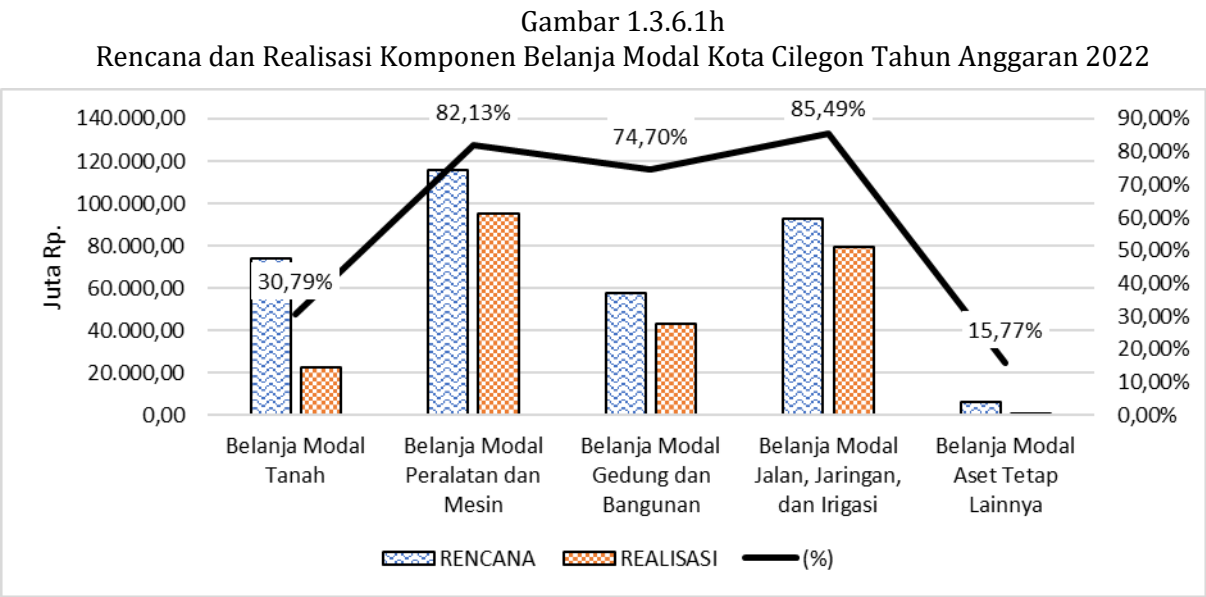
- 4. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
- 5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi asset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal

Belanja modal direncanakan pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 346.334.167.841,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 240.989.478.397,-** atau sebesar **69,58%**. Komponen Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.3.6.1g Rencana dan Realisasi Belanja Modal Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
TOTAL BELANJA MODAL	346.334.167.841	240.989.478.397	69,58%
Belanja Modal Tanah	74.162.248.748	22.833.485.725	30,79%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.682.429.455	95.005.844.824	82,13%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.499.901.202	42.952.179.434	74,70%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.637.014.977	79.196.318.317	85,49%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.352.573.459	1.001.650.097	15,77%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

B.1. Belanja Modal Tanah

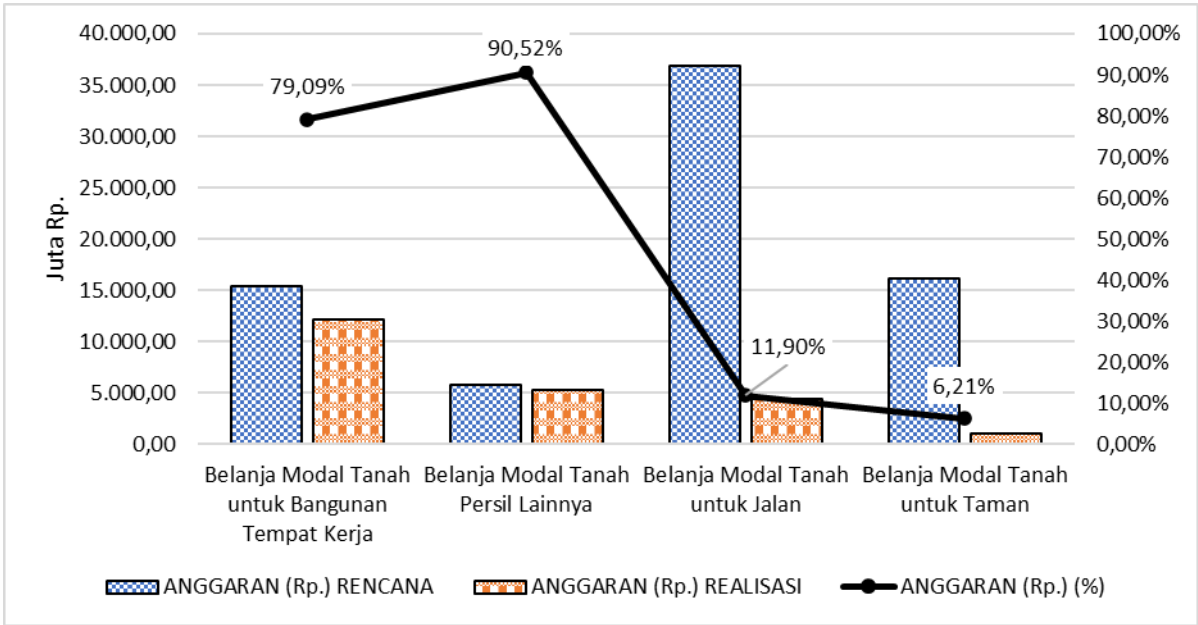
Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan **Rp. 74.162.248.748,-** dan hanya terealisasi sebesar **Rp. 22.833.485.725,-** atau **30,79%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.6.1i Rencana dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
Belanja Modal Tanah	74.162.248.748	22.833.485.725	30,79%
Belanja Modal Tanah	74.162.248.748	22.833.485.725	30,79%
Belanja Modal Tanah Persil	21.224.034.750	17.450.495.575	82,22%
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15.418.834.750	12.195.428.575	79,09%
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.805.200.000	5.255.067.000	90,52%
Belanja Modal Lapangan	52.938.213.998	5.382.990.150	10,17%
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	36.846.363.998	4.382.990.150	11,90%
Belanja Modal Tanah untuk Taman	16.091.850.000	1.000.000.000	6,21%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.6.1j
Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Tanah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Pada tahun 2022 terdapat 2 komponen belanja yang capaiannya rendah. Pertama dari Belanja Modal Tanah untuk Jalan, dikarenakan pada pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) masih pada upaya penyelesaian pembebasan lahan. Dari target tahun 2022 sebanyak 62.000 m2 baru terealisasi 2.636 m2 karena data pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran langsung belum lengkap sehingga baru sebagian yang dapat dibayarkan. Kedua dari Belanja Modal Tanah untuk Taman, dikarenakan kesulitan dalam pembebasan lahan untuk taman kecamatan dan taman kelurahan, yang salah satunya berasal dari harga appraisal yang tidak sesuai dengan harapan pemilik lahan.

B.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

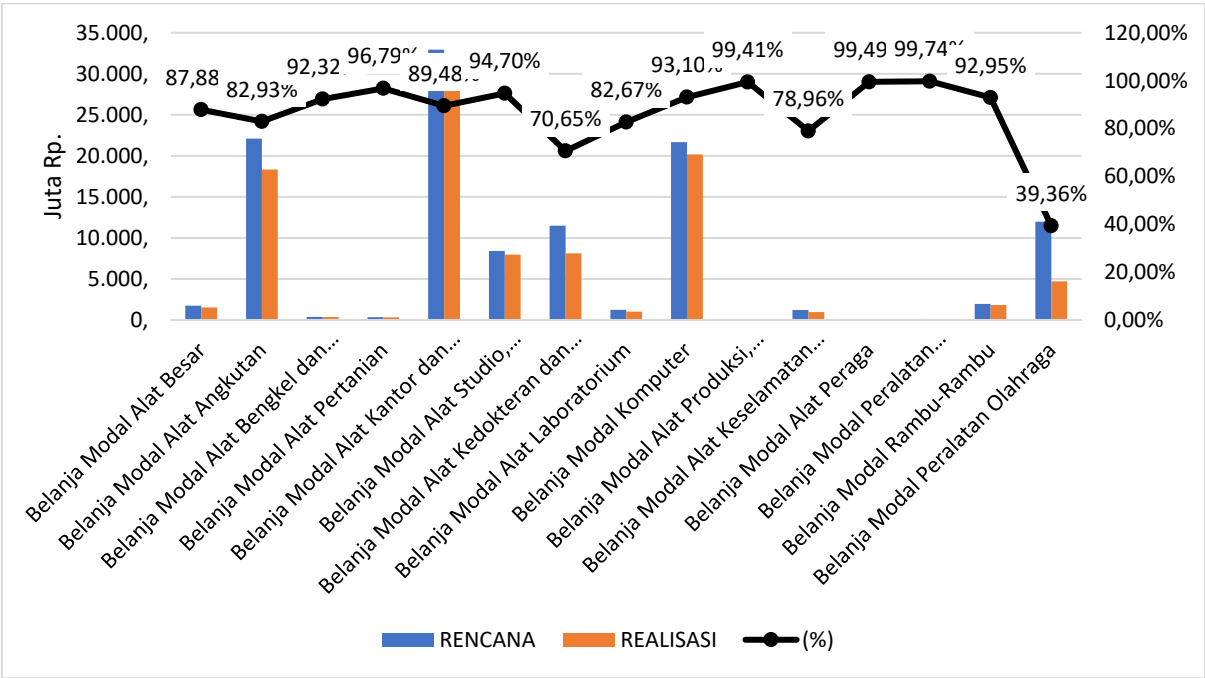
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2022 menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp. 115.682.429.455,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 95.005.844.824,-** atau **82,13%**. Untuk rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.6.1j Rencana dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.682.429.455	95.005.844.824	82,13%
Belanja Modal Alat Besar	1.749.397.451	1.537.347.000	87,88%
Belanja Modal Alat Angkutan	22.107.838.644	18.334.071.297	82,93%
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	385.090.691	355.496.671	92,32%
Belanja Modal Alat Pertanian	333.884.000	323.156.000	96,79%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.945.022.003	29.479.755.158	89,48%
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	8.406.771.472	7.961.598.342	94,70%
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.493.719.635	8.120.860.175	70,65%
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.235.633.831	1.021.484.013	82,67%
Belanja Modal Komputer	21.665.011.792	20.169.316.315	93,10%
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, & Pemurnian	51.806.000	51.500.000	99,41%
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.213.106.967	957.867.600	78,96%
Belanja Modal Alat Peraga	53.400.000	53.126.000	99,49%
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	114.300.000	114.000.000	99,74%
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.948.084.024	1.810.681.745	92,95%
Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.979.362.945	4.715.584.508	39,36%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

Gambar 1.3.6.1k
Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Berdasarkan Grafik dan Tabel diatas Capaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin cukup baik berada di atas 80%. Namun terdapat belanja yang terealisasi kurang dari 80% yaitu Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar 78,96%, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 70,65% dan yang paling rendah adalah Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar 39,36%.

B.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

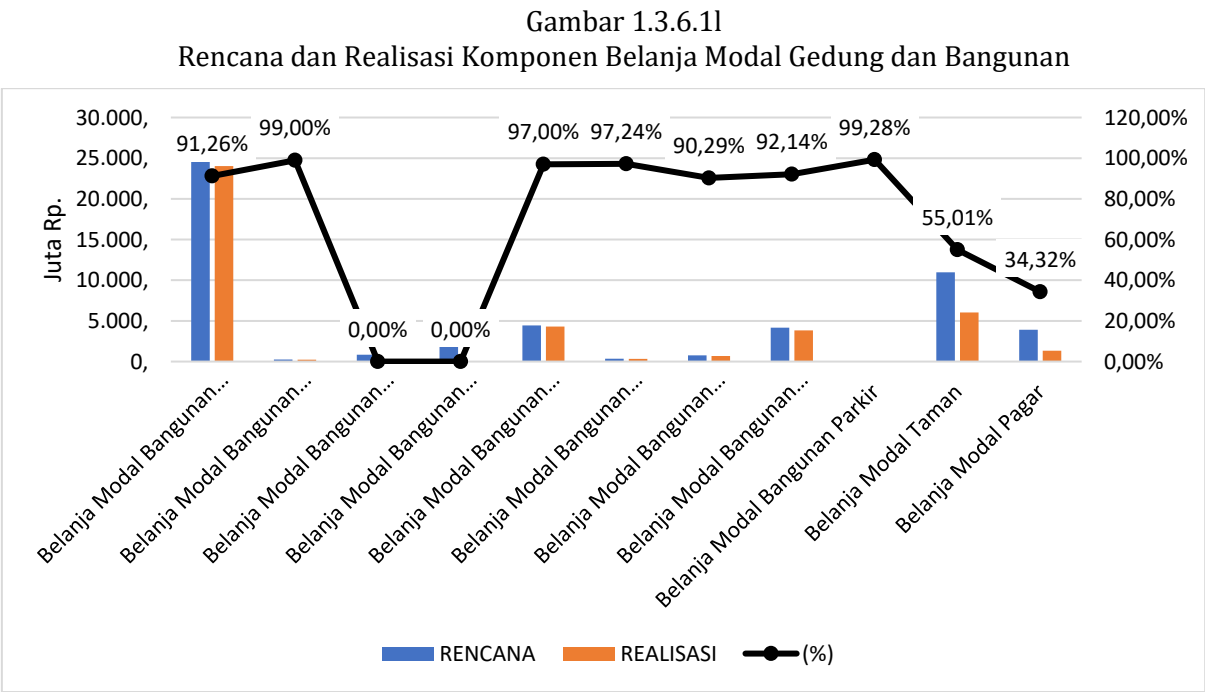
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Pada Tahun 2022

Pemerintah Kota Cilegon mengalokasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 57.499.901.202,-** terealisasi mencapai **74,70%** atau sebesar **Rp. 42.952.179.434,-** dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1.3.6.1k Rencana dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.499.901.202	42.952.179.434	74,70%
Belanja Modal Bangunan Gedung	53.591.460.933	41.610.893.299	77,64%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.882.592.513	39.538.193.694	77,70%
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	26.333.432.594	24.033.203.502	91,26%
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	244.400.000	241.948.848	99,00%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	850.002.400	0	0,00%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.714.393.000	0	0,00%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.438.666.144	4.305.688.347	97,00%
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	349.287.920	339.633.913	97,24%
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	766.250.371	691.877.854	90,29%
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.169.915.500	3.841.980.308	92,14%
Belanja Modal Bangunan Parkir	53.475.900	53.092.000	99,28%
Belanja Modal Taman	10.962.768.684	6.030.768.922	55,01%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.708.868.420	2.072.699.605	76,52%
Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.708.868.420	2.072.699.605	76,52%
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.908.440.269	1.341.286.135	34,32%
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.908.440.269	1.341.286.135	34,32%
Belanja Modal Pagar	3.908.440.269	1.341.286.135	34,32%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Pada tahun 2022, terdapat satu komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang capaiannya rendah dan dua komponen yang tidak terealisasi. Komponen Belanja yang serapannya rendah adalah Belanja Modal Pagar untuk Tugu/Tanda Batas, dikarenakan rencana pemagaran bangunan pada Dinas Sosial mengalami kendala ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara kode rekening belanja dalam DPA kegiatan dengan Dokumen Perencanaan DED Pemagaran, sehingga pelaksanaan ditunda ke tahun 2023.

Sedangkan komponen Belanja yang tidak terealisasi adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pertama dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dikarenakan pengadaan lahan sudah dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Citangkil dan direncanakan akan dibangun juga oleh pihak Kecamatan. Kedua dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dikarenakan pengadaan lahan untuk SMP Negeri 15 terkendala dengan adanya lahan yang belum bersertifikat atau AJB sehingga pembanding lahan yang disyaratkan tidak memenuhi.

B.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar **Rp. 92.637.014.977,-** dan sampai akhir tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp. 79.196.318.317,-** dengan capaian **85,49%** dengan rincian sebagai berikut:

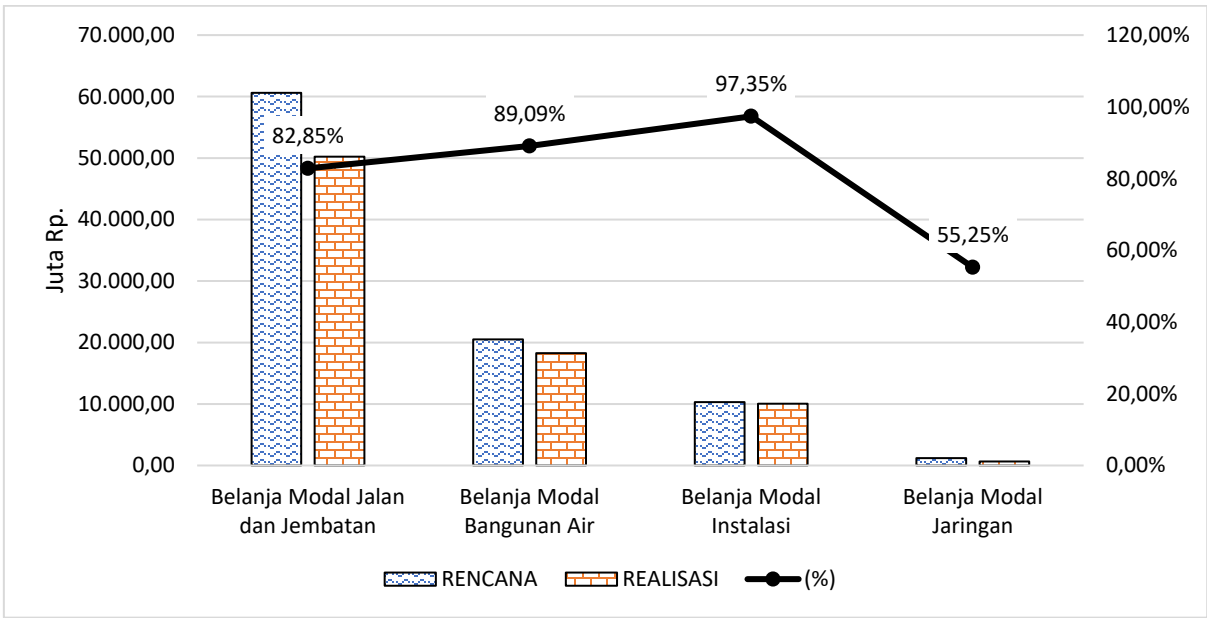
Tabel 1.3.6.11 Rencana dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.637.014.977	79.196.318.317	85,49%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.612.867.279	50.215.873.254	82,85%
Belanja Modal Jalan	60.484.700.733	50.087.873.254	82,81%
Belanja Modal Jembatan	128.166.546	128.000.000	99,87%
Belanja Modal Bangunan Air	20.514.743.009	18.276.757.003	89,09%
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.794.202.800	1.315.644.269	47,08%
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	17.342.720.024	16.766.377.414	96,68%
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	377.820.185	194.735.320	51,54%
Belanja Modal Instalasi	10.319.678.039	10.046.406.000	97,35%
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	195.975.752	193.966.000	98,97%
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	66.023.773	0	0,00%
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	10.057.678.514	9.852.440.000	97,96%
Belanja Modal Jaringan	1.189.726.650	657.282.060	55,25%
Belanja Modal Jaringan Air Minum	999.999.900	489.843.000	48,98%
Belanja Modal Jaringan Telepon	189.726.750	167.439.060	88,25%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)



Gambar 1.3.6.1m
Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Beberapa Jenis Belanja yang capaiannya tidak teraalisasi yaitu Belanja Modal Instalasi Air Kotor, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan. Sedangkan terdapat tiga komponen belanja yang capaiannya rendah, yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dan Belanja Modal Jaringan Air Minum dikarenakan berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah belum terpenuhinya persyaratan rencana (DED) pembangunan tandon.

B.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Pada Tahun 2022 anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kota Cilegon sebesar **Rp. 6.352.573.459,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.001.650.097,-** atau dengan capaian **15,77%** dengan rincian sebagaimana pada tabel dan grafik berikut:

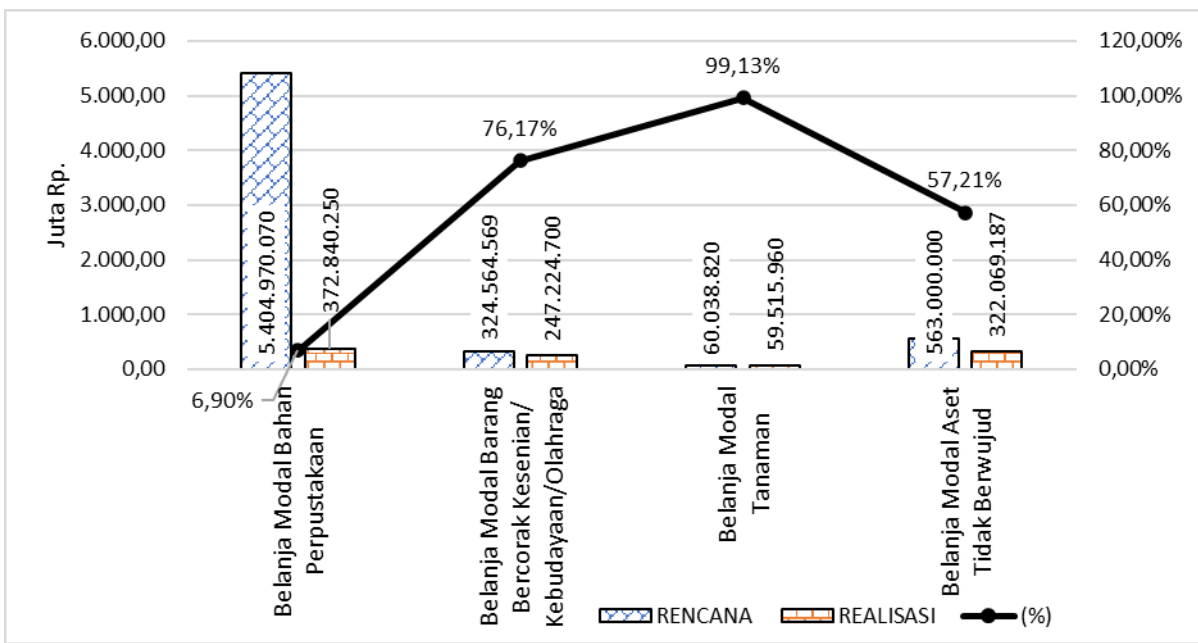
Tabel 1.3.6.1m Rencana dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.352.573.459	1.001.650.097	15,77%
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.404.970.070	372.840.250	6,90%
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	324.564.569	247.224.700	76,17%
Belanja Modal Tanaman	60.038.820	59.515.960	99,13%
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	563.000.000	322.069.187	57,21%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)



Gambar 1.3.6.1n
Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited), diolah

Beberapa rekening belanja yang terealisasi sangat rendah. Pertama pada rekening Belanja Modal Bahan Perpustakaan, yang terealisasi sebesar 6,9% dari anggaran sebesar Rp 5.404.970.070,- dikarenakan adanya kelebihan anggaran Dana BOS untuk SD dari pusat yang dialokasikan pada rekening tersebut (sesuai dengan kebutuhan), sisa anggaran tersebut akan dialokasikan kembali (realokasi) pada tahun berikutnya. Kedua dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, yang terealisasi sebesar 57,21% dari anggaran sebesar Rp 563.000.000 dikarenakan beberapa kendala pada saat pelaksanaan kegiatan, salah satunya yaitu ketidaksesuaian kode rekening pada Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

C. Belanja Tidak Terduga

Dalam APBD Kota Cilegon Tahun 2022, telah dialokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT). BTT merupakan jenis belanja untuk kondisi darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kondisi yang dimaksud darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Alokasi BTT pada tahun 2022 ditujukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari Subsidi BBM, Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, antara lain Santunan Kematian dan Pemulangan Orang Terlantar serta lain-lain. BTT dianggarkan sebesar Rp. 7.871.026.160,- dan terealisasi sebesar Rp 5.748.050.000,- atau sebesar 73,03%. Berikut rincian realisasi BTT :

Tabel 1.3.6.1n Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK TERDUGA		7.871.026.160	5.748.050.000	73,03
1	BLT Subsidi BBM	5.593.800.000	5.593.800.000	100,0
2	Bantuan Sosial Yang Tidak direncanakan	948.000.000	154.250.000	16,27

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	a. Santunan Kematian		148.000.000	
	b. Pemulangan Orang Terlantar		6.250.000	
3	Lain-lain	1.329.226.160	0	0

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

D. Belanja Daerah bersumber dana dari Bantuan Keuangan, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah

Berdasarkan sumber dananya, belanja langsung meliputi : belanja yang dibiayai dari dana transfer (dana perimbangan, antara lain meliputi DAU dan DAK) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (antara lain Bantuan Keuangan Provinsi).

D.1 Belanja Daerah yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten

Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten Kota se Provinsi Banten Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Cilegon memperoleh Bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). Untuk penyaluran dana bantuan keuangan dari provinsi Banten baru dilaksanakan pada Triwulan II, dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi. Bantuan Keuangan Tahun 2022 untuk Kota Cilegon mendapat alokasi sebesar Rp. 10 miliar, dengan alokasi untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3.6.1o Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2022

URAIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Output	Target (Rp)	Realisasi Output	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Keterangan (Permasalahan, Solusi dll)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (OPD Pelaksana : Dinas Perhubungan)							
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
Pemasangan PJU (45 titik) pada Jalan Lingkar Selatan (JLS)	45 titik	1.374.750.000	45 Titik	1.293.106.000	94,1%	100,0%	Kawasan Kec. Ciwandan, Kec Citangkil, dan Kec. Cilegon
Belanja Lampu PJU (90 unit) pada Jalan Lingkar Selatan (JLS)	90 unit	625.230.000	90 unit	624.600.000	99,9%	100,0%	Area Kec. Ciwandan, Citangkil, dan Cilegon
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (OPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang)							
Rekontruksi Jalan							
Jalan Sunan Gunung Jati (029) Kec. Ciwandan	1030 x 2,8 – 5 meter	800.000.000	1030 x 2,8-5 meter	680.111.111	85,0%	100,0%	
Jalan Imam Bonjol Kec. Cibeber	1500 x 6 meter	1.700.000.000	1500 x 6 meter	-	0,0%	0,0%	Gagal Lelang
Jl. Akses Panggung Rawi (244) Kec, Jombang	245 x 6 meter	1.300.000.000	245 x 6 meter	985.394.446	75,8%	100,0%	
Pemeliharaan Berkala Jalan							
Sunan Ampel (70) Kc. Citangkil	1598 x 3 meter	900.000.000	1598 x 3 meter	822.671.949	91,4%	100,0%	
Jalan Kelapa Tujuh Cipala (135) Kec. Pulo Merak	3369 x 3 meter	2.000.000.000	3369 x 3 meter	1.859.067.474	93,0%	100,0%	

URAIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Output	Target (Rp)	Realisasi Output	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Keterangan (Permasalahan, Solusi dll)
Jalan Tamansari Cipala (EX TMMD) (147) Kec. Pulo Merak	1462,22 x 3 meter	1.300.000.000	1462,22 x 3 meter	1.166.819.665	89,8%	100,0%	
TOTAL		10.000.000.000		7.431.770.645	74,3%	74,3%	

Sumber : BPKPAD dan Bappedalitbang Kota Cilegon, diolah

RINGKASAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN

I. Dinas Perhubungan

Anggaran Bantuan Keuangan di Dinas Perhubungan terdapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan rincian Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 45 titik di Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan total Pagu sebesar Rp. 1.374.750.000 namun terealisasi sebesar 94,1% atau Rp 1.293.106.000,-, serta Belanja Lampu PJU sebanyak 90 buah dengan pagu sebesar Rp. 625.230.000 dan terealisasi Rp 624.600.000.-.

II. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran Bantuan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan dua sub kegiatan. Sub kegiatan pertama yaitu Rekonstruksi Jalan dengan 3 (tiga) output yaitu Jalan Sunan Gunung Jati (029) Kec. Ciwandan sepanjang 1030 m dan lebar 2,8 - 5 m dengan pagu Rp. 800.000.000,-, Jalan Imam Bonjol Kec. Cibeber sepanjang 1500 m dan lebar 6 m dengan pagu Rp. 1.700.000.000,- serta Jl. Akses Panggung Rawi (244) Kec. Jombang sepanjang 245 m dan lebar 6 m dengan pagu Rp. 1.300.000.000,-. Dari 3 output, hanya 1 output yang tidak terealisasi yaitu Jalan Imam Bonjol Kec. Cibeber dikarenakan gagal lelang dengan capaian realisasi anggaran sebesar 43,8%. Sub kegiatan kedua yaitu Pemeliharaan Berkala Jalan dengan 3 (tiga) output yaitu Sunan Ampel (70) Kc. Citangkil sepanjang 1598 m dan lebar 3 m dengan pagu Rp. 900.000.000,- ; Jalan Kelapa Tujuh Cipala (135) Kec. Pulo Merak sepanjang 3.369 m dan lebar 3 m dengan pagu Rp. 2.000.000.000,-; serta Jalan Tamansari Cipala (EX TMMD) (147) Kec. Pulo Merak sepanjang 1.462,22 m dan lebar 3 m dengan pagu Rp. 1.300.000.000,-. Ketiga output telah dilaksanakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,6%.

D.2 Belanja Daerah bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada Tahun Anggaran 2022 Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) disampaikan melalui sistem aplikasi Krisna yang di kelola langsung oleh kementerian PPN/Bappenas. Anggaran dana alokasi khusus (DAK) Kota Cilegon Tahun 2022 sebesar **Rp. 167.082.178.000,-** meliputi : 1) DAK Fisik Reguler sebesar **Rp. 15.129.347.000,-** untuk kegiatan rehabilitasi dan pengadaan sarpras belajar, Pengadaan alkes dan penyediaan obat, serta Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB; 2) DAK non fisik sebesar **Rp 151.952.831.000,-** untuk Operasional Balai Penyuluhan KB, Operasional Pelayanan KB, Operasional Penggerakan di Kampung KB, Operasional Penurunan Stunting, Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana, Dukungan manajemen dan SIGA, BOS, Pengelolaan BOP PAUD, Tunjangan dan tambahan penghasilan guru, Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), serta dana perlindungan perempuan dan anak. Realisasi DAK mencapai **Rp 138.627.214.443,- (82,97 %)**. Capaian kegiatan yang bersumber dana dari dana alokasi khusus sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3.6.1p Target dan Realisasi Kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022

URAIAN	OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK FISIK		15.129.347.000	11.446.587.559	75,66
Pendidikan – SD	Dinas Pendidikan	6.325.301.000	4.298.980.920	67,96

URAIAN	OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan - SMP	Dinas Pendidikan	1.344.822.000	366.675.000	27,27
Kesehatan dan KB - Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	DP3AP2KB	98.061.000	62.850.000	64,09
Kesehatan dan KB - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Dinas Kesehatan	154.789.000	146.969.500	94,95
Kesehatan dan KB - Penguatan Sistem Kesehatan	Dinas Kesehatan	351.683.000	41.936.901	11,92
Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	1.128.185.000	1.026.140.000	90,95
Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	DP3AP2KB	1.703.007.000	1.566.925.470	92,01
Kesehatan dan KB - Kefarmasian	Dinas Kesehatan	4.023.499.000	3.936.109.768	97,83

Sumber : BPKPAD dan Bappedalitbang Kota Cilegon, diolah

Tabel 1.31 Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022

URAIAN	OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK NON FISIK		151.952.831.000	127.180.626.884	83,70
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	Dinas Pendidikan	72.008.674.000	67.092.556.880	93,17
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	Dinas Pendidikan	1.521.000.000	737.250.000	48,47
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Dinas Pendidikan	58.718.900.000	42.787.878.048	72,87
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Dinas Kesehatan	7.030.779.000	6.159.382.685	87,61
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKKB)	DP3AP2KB	3.345.305.000	2.176.556.600	65,06
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	Dinkop UKM	404.200.000	338.250.000	83,68
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	7.449.300.000	6.752.250.000	90,64
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	601.800.000	555.471.671	92,30
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	DPMPTSP	402.873.000	278.281.000	69,07
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	DKPP	470.000.000	302.750.000	64,41

Sumber : BPKPAD dan Bappedalitbang Kota Cilegon, diolah

Pada DAK Bidang Pendidikan, khususnya untuk DAK Non Fisik baik Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tambahan Penghasilan Guru, BOS dan BOP PAUD, telah terealisasi sekitar 84,02% hal ini dikarenakan TPG merupakan pengeluaran rutin yang wajib disalurkan kepada tenaga guru serta BOP PAUD dan Kesetaraan adalah merupakan hibah kepada Lembaga sesuai dengan pengajuan proposal hibah. Untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar 60,83% karena adanya kendala pada proses lelang, terkait kebijakan baru Pemerintah Pusat mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam rangka Kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Sedangkan Pada DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana serta Perlindungan Perempuan dan Anak hampir seluruh kegiatan dapat terealisasi.

Untuk kegiatan DAK non fisik peningkatan koperasi dan UKM hanya terealisasi sebesar Rp. 338.250.000,- atau sebesar 83,68% dari target anggaran Rp. 404.200.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembinaan pelaku Koperasi dan UMK.

Untuk kegiatan DAK non fisik fasilitasi penanaman modal hanya terealisasi sebesar Rp. 278.281.000,- atau sebesar 69,07% dari target anggaran Rp. 402.873.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

Untuk Kegiatan DAK Non Fisik Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian, terealisasi sampai dengan Bulan Desember sebesar 64,41% atau sebesar Rp 302.750.000,- dari target anggaran Rp 470.000.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) penumbuhan (4 kelompok) dan Pengembangan (7 kelompok).

D.3 Belanja Daerah bersumber dana dari Dana Insentif Daerah

Kota Cilegon memperoleh Dana Insentif Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 140/ PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Total Alokasi DID yang diterima Kota Cilegon Tahun 2022 sebesar **Rp. 4.420.181.000,-** yang dialokasikan untuk Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik dan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran DID sepanjang tahun 2022 sebesar **Rp. 2.727.151.000,-** atau **61,70% dari total alokasi DID.**

Tabel 1.3.6.1q Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana Dana Insentif Daerah Tahun 2022

URAIAN	OPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Keterangan
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR		450.000.000	449.920.000	99,98	
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Dinas Pendidikan	450.000.000	449.920.000	99,18	Pengadaan Laptop (56 unit)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RSUD		1.982.692.000	876.783.000	44,22	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan (RSUD)	1.982.692.000	876.783.000	44,22	- Pengadaan 1 paket <i>Pachoemulsification System</i> . - Pengadaan <i>Biometer A Scan</i> tidak direalisasi karena harga pasar melebihi pagu yang tersedia
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		1.987.489.000	1.400.448.000	70,46	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas PUTR	1.987.489.000	1.400.448.000	70,46	Pemeliharaan jalan (sepanjang 6236 m)
JUMLAH		4.420.181.000	2.727.151.000	61,70	

Sumber : BPKPAD dan Bappedalitbang, diolah

Pada tahun 2022 Kota Cilegon memperoleh sekitar 4,4 miliar Dana Insentif Daerah. Realisasi sampai dengan Triwulan IV hanya sebesar 61,70% atau sekitar 2,7 miliar. Yang tidak terealisasi adalah pengadaan *Biometer A Scan*.

Untuk DID Umum bidang pendidikan dialokasikan untuk pengadaan Laptop bagi Peserta Didik di Kota Cilegon dengan total unit sebanyak 56 unit, untuk output kegiatan ini terealisasi seluruhnya dengan total realisasi anggaran 99,18% persen.

Untuk DID Umum bidang Kesehatan dialokasikan pada Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, berupa 1 paket *Pachoemulsification System* dan pengadaan *Biometer A Scan*. Namun untuk *Biometer A Scan* tidak direalisasi karena harga melebihi pagu yang

tersedia sehingga realisasi anggaran pada output ini sebesar 44,22%. Untuk DID Umum bidang Pekerjaan Umum dialokasikan untuk Pemeliharaan Berkala Jalan, berupa Pemeliharaan JLS di 17 titik, 1 sodetan serta Perbaikan TPT Jembatan Cijalumpang, TPT dan Saluran Jembatan Cikondang dan Perbaikan Saluran Jembatan Cimahe. Sampai dengan triwulan IV terealisasi 70,46%.

2.5.2 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1.3.7a Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.500.000.000	5.500.000.555	33,33%
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0	0%
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0	0%
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0	0%
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0	0%
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.500.001.800	5.500.000.555	47,83%
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.500.001.800	5.500.000.555	47,83%
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.500.001.800	5.500.000.555	47,83%
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.500.001.800	5.500.000.555	47,83%
PEMBIAYAAN NETTO	452.997.757.656	463.997.758.901	102,43%

Sumber : BPKPAD Kota Cilegon, 2022 (Unaudited)

Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022 hanya berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang paling banyak diperoleh dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja (SILPA tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Daerah hasil audit BPK) sebanyak 469,5 milyar.

Tahun 2022 dialokasikan pembentukan dana cadangan untuk persiapan alokasi pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 mendatang. Namun komponen pengeluaran pembiayaan yang ditargetkan sebesar 5 milyar tersebut tidak jadi dilaksanakan karena proses pembentukan dana cadangan harus ditetapkan melalui peraturan daerah yang hingga akhir tahun 2022 proses penetapannya belum selesai, sehingga pembentukan dana cadangan belum bisa dilakukan di 2022 (akan dilaksanakan di APBD Perubahan 2023, atau dialihkan melalui skema hibah kepada stakholder penyelenggaran pemilu di Kota Cilegon).

Komponen lainnya terkait dengan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebesar 5,5 milyar dari alokasi 11,5 milyar. Realisasi penyertaan modal yang terealisasi di 2022 adalah penyertaan modal kepada BJB sebesar 5,5 milyar.

Berikut ini tabel penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada BUMD di Kota Cilegon selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1.3.7b Penyertaan Modal Kota Cilegon Tahun 2003-2022

NO	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (dalam Jutaan Rupiah)				JUMLAH
		PT BANK BJB	PT PELABUHAN CM	PD AIR MINUM CM	PD BPRS CM	
1	S/D 2003	3.000,00	5.584,40	5.500,00	3.855,80	17.940,20
2	2004	1.000,00	5.000,00	603,00	2.000,00	8.603,00
3	2005	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
4	2006	1.500,00	5.000,00	1.000,00	0,00	7.500,00

NO	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (dalam Jutaan Rupiah)				JUMLAH
		PT BANK BJB	PT PELABUHAN CM	PD AIR MINUM CM	PD BPRS CM	
5	2007	3.000,00	5.000,00	5.750,00	5.000,00	18.750,00
6	2008	3.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	13.000,00
7	2009	2.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
8	2010	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
9	2011	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10	2012	0,00	0,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00
11	2013	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12	2014	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00
13	2015	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00
14	2016	0,00	98.510,88	3.000,00	2.000,00	103.510,88
15	2017	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	2018	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00
17	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL		25.000,00	121.595,28	42.853,00	59.855,80	249.304,08

Sumber: BPKPAD Kota Cilegon, 2022 (Unaudited)

Total Penyertaan Modal Daerah Kota Cilegon terhadap 4 BUMD di Kota Cilegon pada periode 2003 sampai dengan tahun 2022 sebesar 249.304,08 Miliar dengan masing masing 25 miliar kepada Bank BJB Cabang Cilegon, 121,59 Milyar kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri; 42,85 Milyar kepada Perusahaan Daerah air Minum Cilegon Mandiri; dan 59,85 Milyar kepada BPRS Cilegon Mandiri.

Secara Umum, ringkasan Realisasi APBD Kota Cilegon Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3.6a Ringkasan Realisasi APBD Kota Cilegon Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.886.364.441.213	1.809.526.155.655	95,93%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	801.790.661.154	760.514.301.037	94,85%
Pajak Daerah	645.127.680.624	618.589.144.208	95,89%
Retribusi Daerah	21.976.117.200	17.129.088.342	77,94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.591.510.375	18.591.510.375	100,00%
Lain-lain PAD yang Sah	116.095.352.955	106.204.558.112	91,48%
PENDAPATAN TRANSFER	1.084.573.780.059	1.049.011.854.618	96,72%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.505.099.540	853.443.174.099	96,49%
Dana Perimbangan	880.084.918.540	849.022.993.099	96,47%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	131.587.647.443	132.681.711.714	100,83%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	582.438.474.917	582.371.974.917	99,99%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.918.848.380	11.857.259.035	79,48%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	151.139.947.800	122.112.047.433	80,79%
Dana Insentif Daerah (DID)	4.420.181.000	4.420.181.000	100,00%
DID	4.420.181.000	4.420.181.000	100,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.068.680.519	195.568.680.519	97,75%
Pendapatan Bagi Hasil	190.068.680.519	190.068.680.519	100,00%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	190.068.680.519	190.068.680.519	100,00%
Bantuan Keuangan	10.000.000.000	5.500.000.000	55,00%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000	5.500.000.000	55,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	0	0	n/a
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	n/a
Lain-lain Pendapatan	0	0	n/a
Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	n/a
BELANJA DAERAH	2.339.362.198.869	1.951.634.733.208	83,43%
BELANJA OPERASI	1.985.157.004.868	1.705.387.614.811	85,91%
Belanja Pegawai	890.383.990.715	762.398.941.377	85,63%
Belanja Barang dan Jasa	1.019.605.480.654	876.031.489.859	85,92%
Belanja Hibah	65.868.523.499	58.721.713.575	89,15%
Belanja Bantuan Sosial	9.299.010.000	8.235.470.000	88,56%
BELANJA MODAL	346.334.167.841	240.989.478.397	69,58%
Belanja Modal Tanah	74.162.248.748	22.833.485.725	30,79%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.682.429.455	95.005.844.824	82,13%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.499.901.202	42.952.179.434	74,70%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.637.014.977	79.196.318.317	85,49%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.352.573.459	1.001.650.097	15,77%
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.871.026.160	5.257.640.000	66,80%
Belanja Tidak Terduga	7.871.026.160	5.257.640.000	66,80%
	-452.997.757.656	-142.108.577.553	31,37%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	469.497.759.456	469.497.759.456	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.500.001.800	5.500.000.555	33,33%
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	0	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	11.500.001.800	5.500.000.555	47,83%
	452.997.757.656	463.997.758.901	102,43%
SILPA		321.889.181.348	

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2022 (Unaudited)

2.6 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

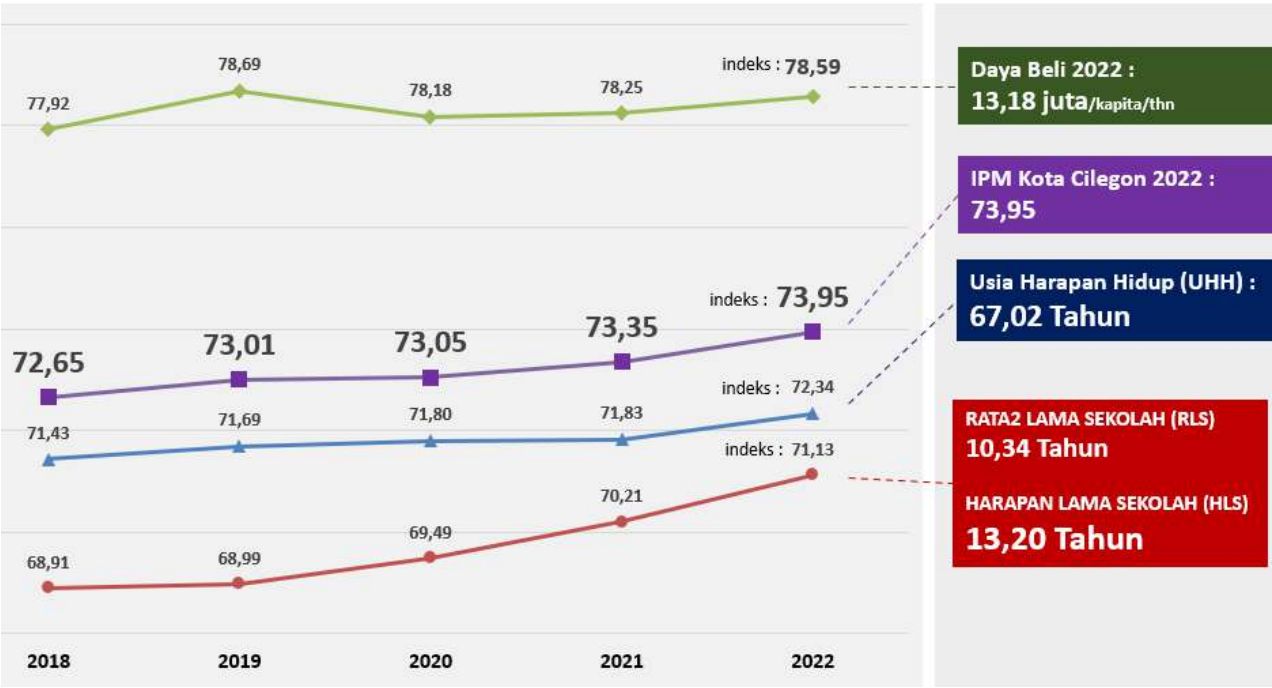
Salah satu parameter capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cilegon secara konsisten terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 IPM Kota Cilegon adalah sebesar 73,95, jika dibandingkan dengan tahun 2021, IPM Kota Cilegon telah meningkat sebesar 0,82 poin. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan IPM dari 2021 ke 2022 lalu yang hanya sebesar 0,6 poin saja.

Salah satu variabel IPM yang memberikan kontribusi peningkatan paling tinggi adalah dari komponen Indeks Pendidikan, yaitu pada variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu dari

Gambar 1.4.1a Pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten

Indeks Komposit IPM	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Angka Harapan Hidup (Usia Harapan Hidup)	71,43 (66,43 thn)	71,69 (66,60 thn)	71,80 (66,67 thn)	71,83 (66,69 thn)	72,34 (67,02 thn)
Indeks pendidikan (Harapan Lama Sekolah) (Rerata Lama Sekolah)	68,91 (13,13 thn) (9,73 thn)	68,99 (13,15 thn) (9,74 thn)	69,49 (13,16 thn) (9,87 thn)	70,21 (13,18 thn) (10,08 thn)	71,13 (13,20 thn) (10,34 thn)
Indeks daya beli (Daya Beli per kapita/tahun)	77,92 (12,9 juta)	78,69 (13,32 juta)	78,18 (13,01 juta)	78,25 (13,04 juta)	78,59 (13,18 juta)

Gambar 1.4.1a Grafik Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2017-2022



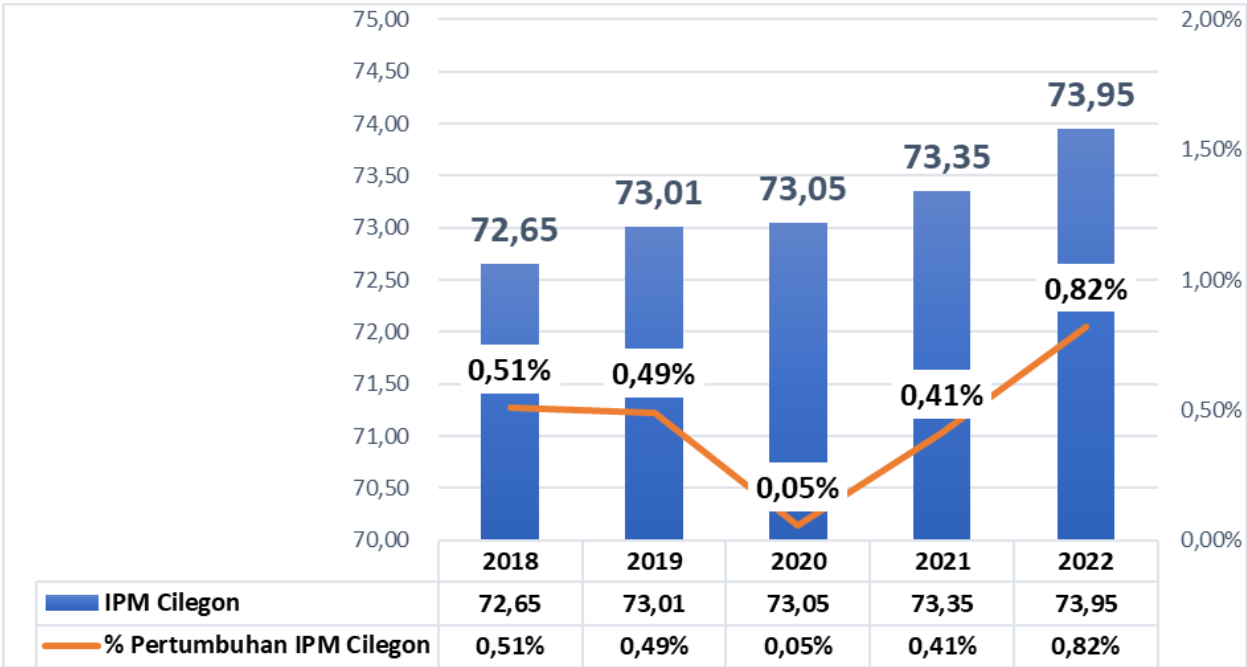
Diantara kota lainnya di provinsi Banten, persentase peningkatan nilai IPM Kota Cilegon adalah yang tertinggi dengan peningkatan sebesar 0,82 poin. Berikut adalah perbandingan nilai IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten :

Gambar 1.4.1a Persentase pertumbuhan IPM Kota Cilegon Jika dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten

KABUPATEN / KOTA		2021	2022	PERTUMBUHAN (PERSEN)
KOTA				
1	KOTA CILEGON	73,35	73,95	0,82
2	KOTA SERANG	72,44	72,98	0,75
3	KOTA TANGERANG	78,5	78,9	0,51
4	KOTA TANGERANG SELATAN	81,6	81,95	0,43
KABUPATEN				
1	KAB TANGERANG	72,29	72,97	0,94
2	KAB PANDEGLANG	65,17	65,84	1,03
3	KAB LEBAK	64,03	64,71	1,06
4	KAB SERANG	66,82	67,75	1,39
PROVINSI BANTEN		72,72	73,32	0,83

Sumber : BPS Kota Cilegon, 2023

Gambar 1.4.1b Grafik Perkembangan dan % pertumbuhan IPM Kota Cilegon Tahun 2018-2022

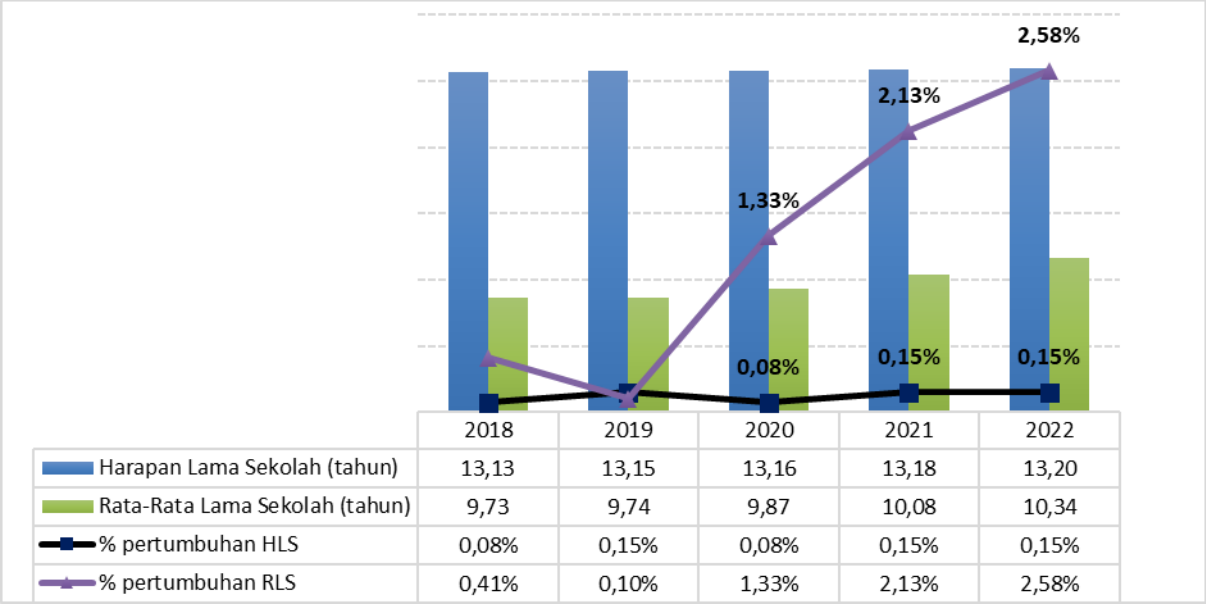


Sumber : Bappedalitbang Cilegon, diolah dari Cilegon Dalam Angka (BPS)

Indeks pembangunan manusia Kota Cilegon dalam 5 tahun terakhir secara konsisten terus mengalami peningkatan, walaupun secara laju pertumbuhan mengalami fluktuasi, terutama di masa pandemi covid-19 pada 2020 dan 2021 lalu. Pada tahun 2022 IPM Kota Cilegon meningkat cukup signifikan sebesar 0,60 poin atau meningkat menjadi 73,95 poin. Persentase peningkatan 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan IPM pada 2019 hingga 2021 lalu. Adapun status pembangunan manusia Kota Cilegon berada pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan masih berada di atas nilai IPM Provinsi Banten dan IPM nasional.

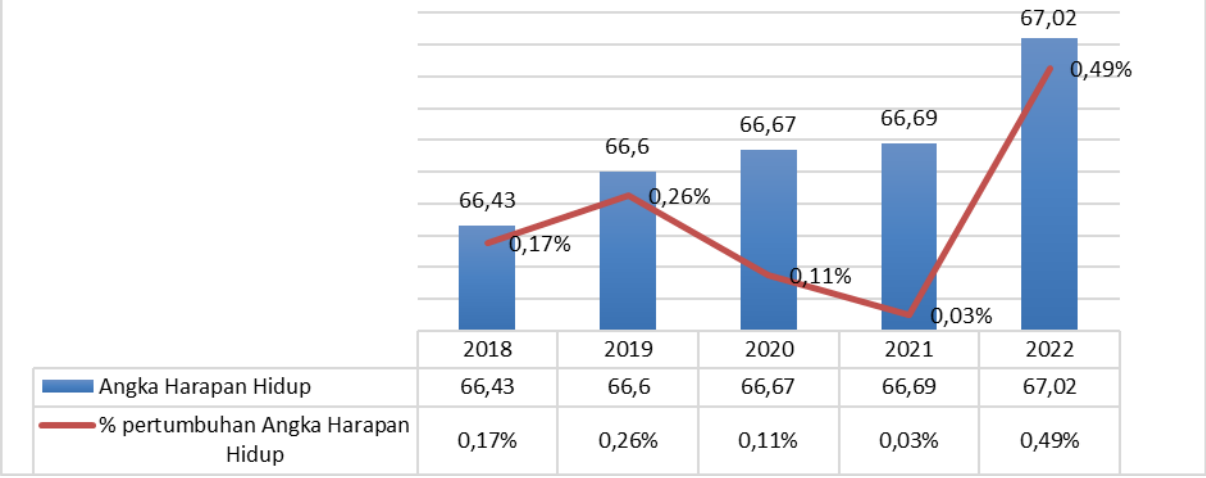
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu **umur panjang dan hidup sehat (Indeks Kesehatan)**, pendidikan (**Rata-Rata Lama Sekolah** dan **Harapan Lama Sekolah**), dan standar hidup layak (**Daya Beli per kapita**). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, sebagai berikut :

A. Pendidikan



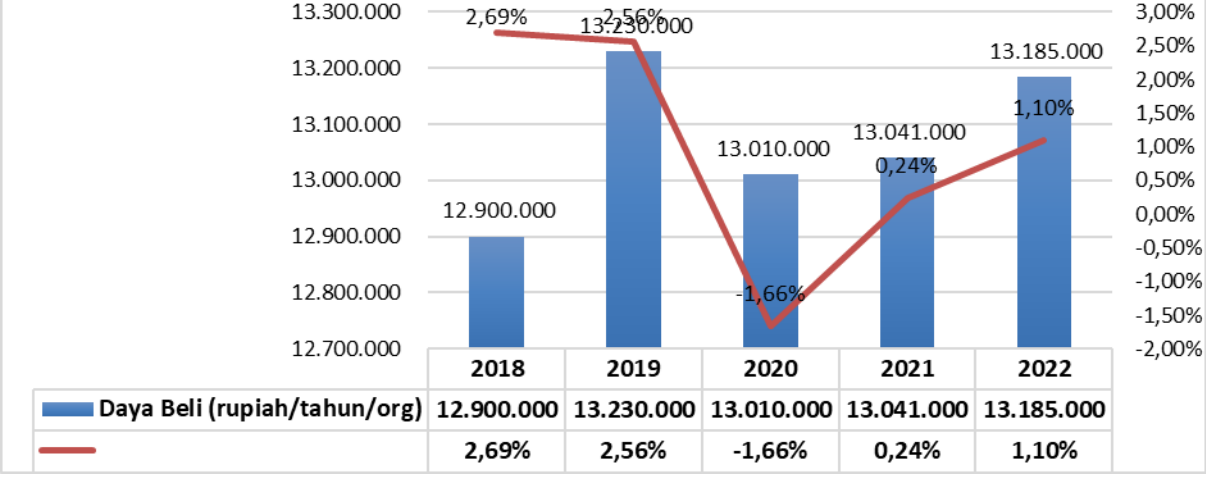
Peningkatan **rata-rata lama sekolah** (RLS) relatif lebih tinggi dan setiap tahun laju pertumbuhannya mengalami akselerasi, berbeda halnya jika dibandingkan dengan peningkatan nilai harapan lama sekolah (HLS) yang secara nilai memang sudah tinggi dibandingkan dengan nilai rata rata lama sekolah RLS.

B. Kesehatan



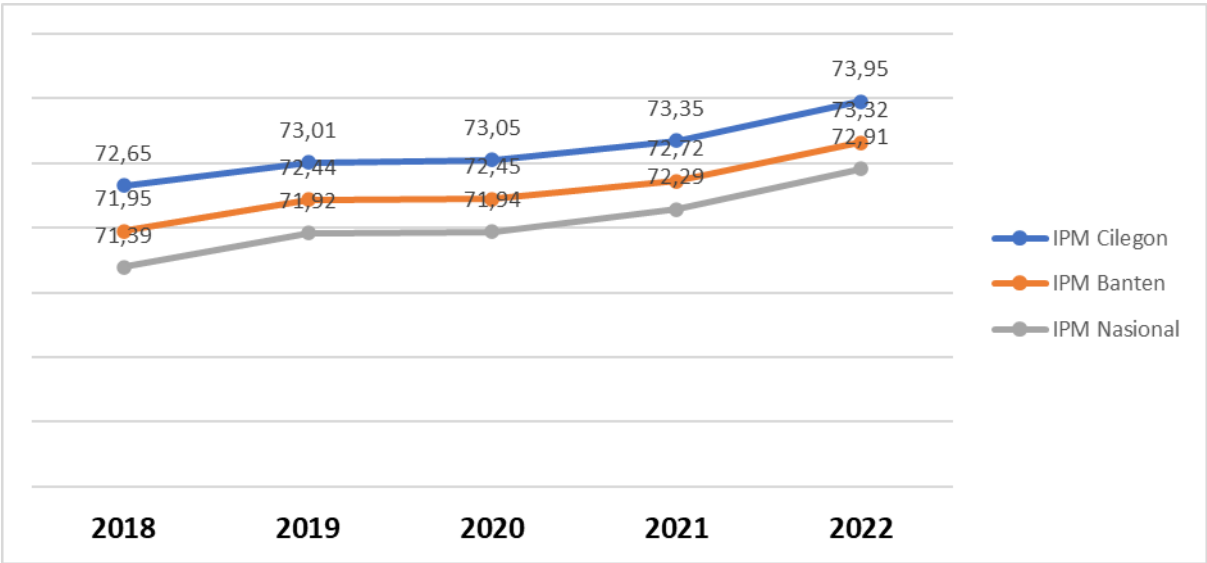
Peningkatan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Kota Cilegon meningkat cukup signifikan dan merupakan yang paling tinggi persentase peningkatannya dalam 5 tahun terakhir sejak 2018 lalu

C. Daya Beli



Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Banten, capaian indeks pembangunan manusia Kota Cilegon masih lebih baik. Adapun pola peningkatan IPM dari tahun ke tahun cenderung serupa dengan pola peningkatan IPM Provinsi Banten dan IPM nasional. Di tahun 2022, peningkatan IPM Kota Cilegon jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan peresentase peningkatan yang lebih baik dari peningkatan IPM Provinsi Banten. Peningkatan IPM Kota Cilegon pada tahun 2022 lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan Indeks Pendidikan, khususnya pada indikator Rata-rata Lama Sekolah yang peningkatan cukup signifikan dari 2020 ke 2021 dan 2022.

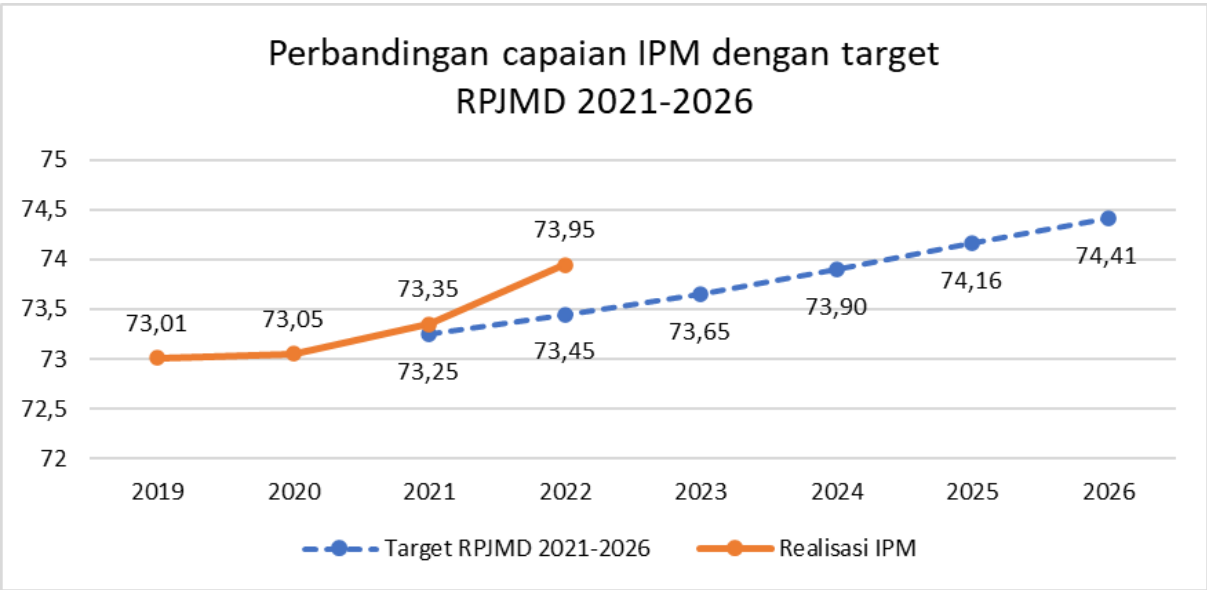
Gambar 1.4.1l IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional

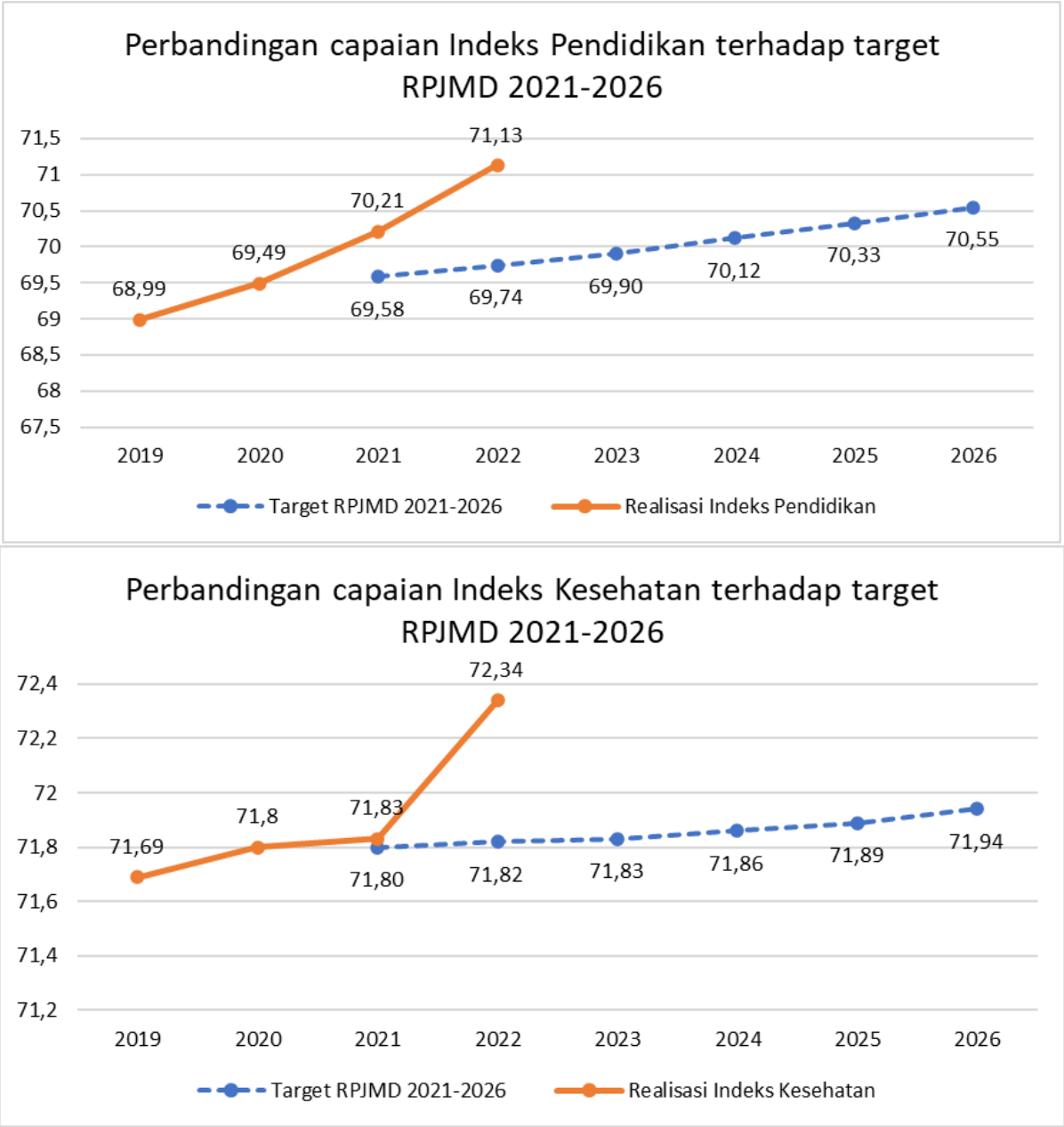


Sumber : BPS Banten, diolah

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon (beserta indeks kompositnya) sudah cukup baik jika dibandingkan dengan target makro pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indikator kompositnya, yaitu indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Indeks kesehatan merupakan salah satu indikator pada tujuan RPJMD “Peningkatan kualitas Pendidikan” pada Misi II RPJMD Kota Cilegon 2021-2026, yaitu “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas”. Sedangkan indeks kesehatan merupakan indikator tujuan “Peningkatan derajat kesehatan masyarakat” pada misi III RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu “Meningkatnya pelayanan kesehatan”.

Gambar 1.4.1m IPM Kota Cilegon terhadap target RPJMD 2022-2026





Sumber : Bappedalibang Kota Cilegon (hasil olah data BPS dan dokumen RPJMD 2021-2026)

1.4.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau angka kemiskinan atau P_0 dengan satuan persen (%) merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kondisi kesejahteraan masyarakat secara makro, yaitu proporsi masyarakat yang kemampuan pengeluarannya masih berada di bawah standar pengeluaran minimum (untuk memenuhi kebutuhan pokok) yang dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan sendiri terbagi menjadi garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Tingkat kemiskinan Kota Cilegon di 2022 adalah sebesar 3,64%, kondisi saat ini proporsi penduduk miskin di Kota Cilegon sudah kembali menurun yang 2 tahun berturut sebelumnya mengalami kenaikan dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang begitu masif di sepanjang 2020 hingga 2021.

Gambar 1.4.2a Tingkat Kemiskinan (%) dan Garis Kemiskinan Tahun 2018-2022

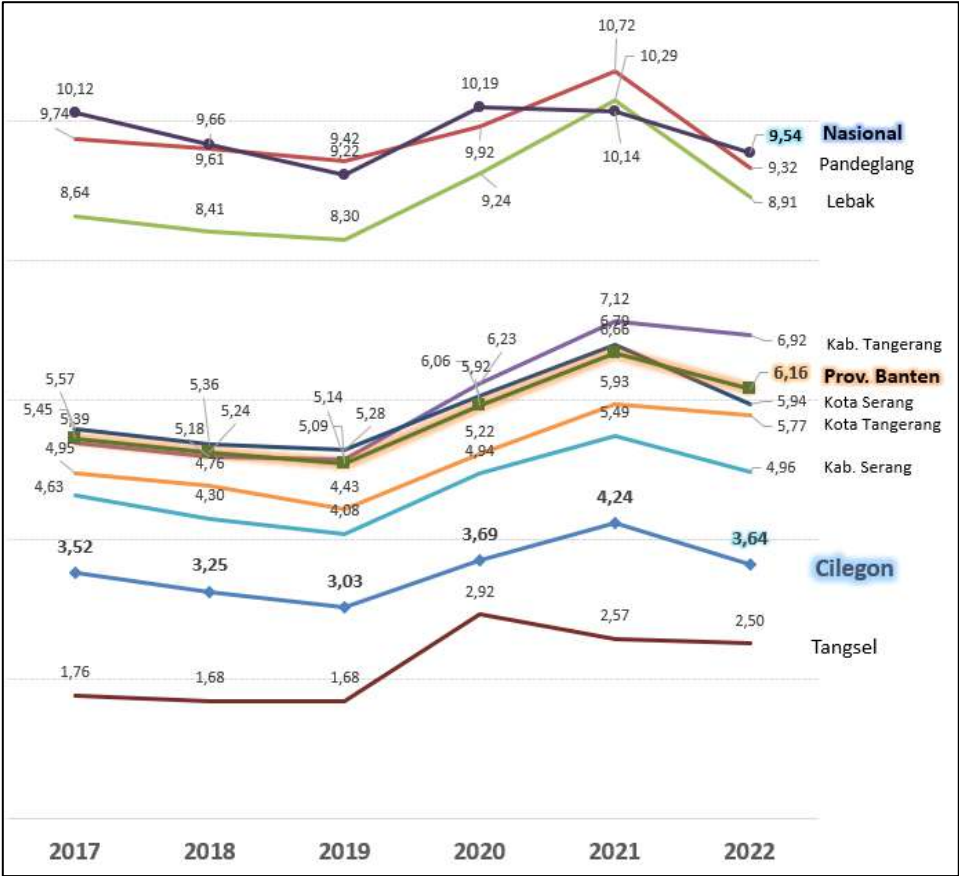


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Jika mengesampingkan capaian indeks kemiskinan di tahun 2020 dan 2021, pada dasarnya dalam 6 (enam) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Cilegon tergolong sangat rendah dan selalu menurun dengan rata-rata penurunan 0,27 % per tahun. Di Provinsi Banten, Kota Cilegon merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 setelah Kota Tangerang Selatan.

Sempat menyentuh angka 3,03 persen angka kemiskinan, semenjak covid-19 tahun 2020 dan 2021, angk kemiskinan beranjak ke angka 4,24 dan meskipun sudah mengalami penurunan di 2022, namun belum bisa kembali ke angka di tahun 2019 sebagai titik terendah dalam 6 tahun ke terakhir dari periode 2017 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, tingkat kemiskinan Kota Cilegon menempati peringkat kedua terendah setelah Kota Tangerang Selatan, dan masih di bawah angka kemiskinan nasional dan angka kemiskinan Banten.

Gambar 1.4.2b Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2022 (dalam %, semakin rendah semakin baik)



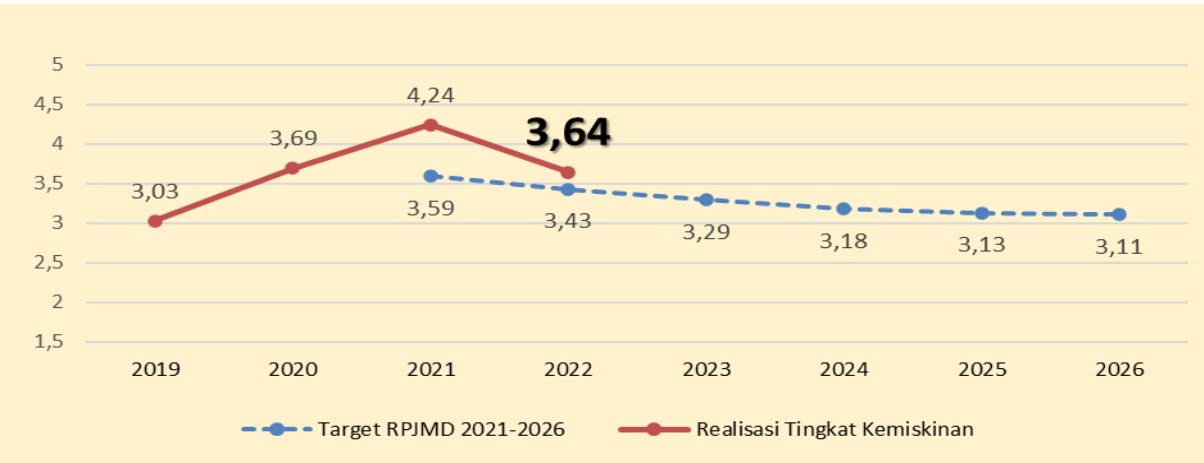
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4.2c Infografis Kondisi Kemiskinan Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : Cilegon Dalam Angka, BPS Kota Cilegon, 2023

Gambar 1.4.2d Perbandingan tingkat kemiskinan terhadap target RPJMD 2021-2026 (dalam %)



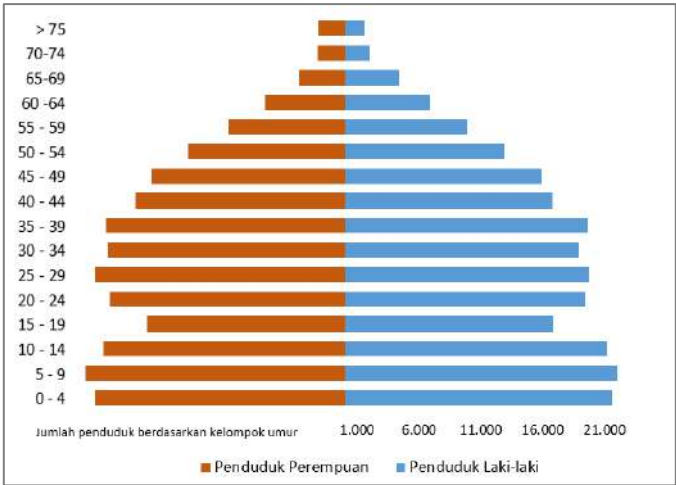
Sumber : Bappedalitbang Kota Cilegon

Meskipun capaian persentase penduduk miskin sudah menurun cukup signifikan di tahun 2022, namun jika dibandingkan dengan target RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tingkat kemiskinan Kota Cilegon Tahun 2021 dan 2022 masih lebih tinggi dibandingkan target RPJMD dan belum mencapai kondisi sebelum pandemi covid di 2019 yang hanya sebesar 3,03 %. Efek pandemi covid-19 yang diperkirakan akan mulai membaik di 2021 ternyata masih berlanjut dan baru mulai melandai di tahun 2022. Kondisi ini mengharuskan intervensi pemerintah yang lebih baik terhadap peningkatan daya beli, perluasan akses layanan dasar serta perluasan jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

1.4.3 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan biasanya juga dipengaruhi dari karakteristik demografi/ kependudukan di suatu wilayah tersebut, komposisi piramida penduduk Kota Cilegon (penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur) menunjukkan bahwa Kota Cilegon merupakan wilayah dengan penduduk ekspansif (penduduk muda). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya banyak terjadi “transisi” dari penduduk bukan usia kerja ke penduduk usia kerja. Sehingga potensi terjadi penambahan angkatan kerja per tahun sangat besar.

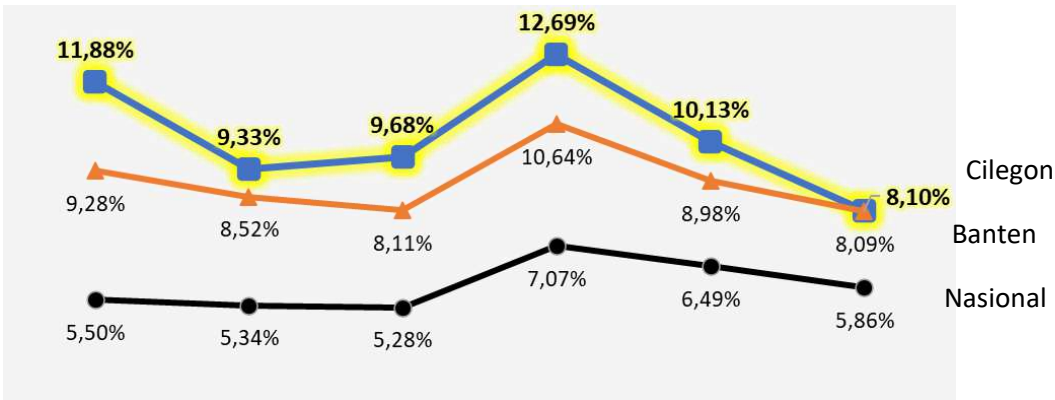
Gambar 1.4.3a Piramida Penduduk Kota Cilegon



Sumber : Bappedalitbang Kota Cilegon, 2023

Tingkat pengangguran terbuka, biasa disingkat TPT merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi ketenagakerjaan yang melibatkan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Secara ringkas, indikator TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan “angkatan kerja” adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Perlu diketahui pula bahwa penduduk “bukan angkatan kerja”, atau yang bukan termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penambahan angkatan kerja per tahun yang cukup besar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cilegon, bagaimana menjadikan masyarakat usia kerja yang produktif serta menciptakan generasi muda produktif yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Kota Cilegon.

Gambar 1.4.3b Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon Tahun 2017-2022

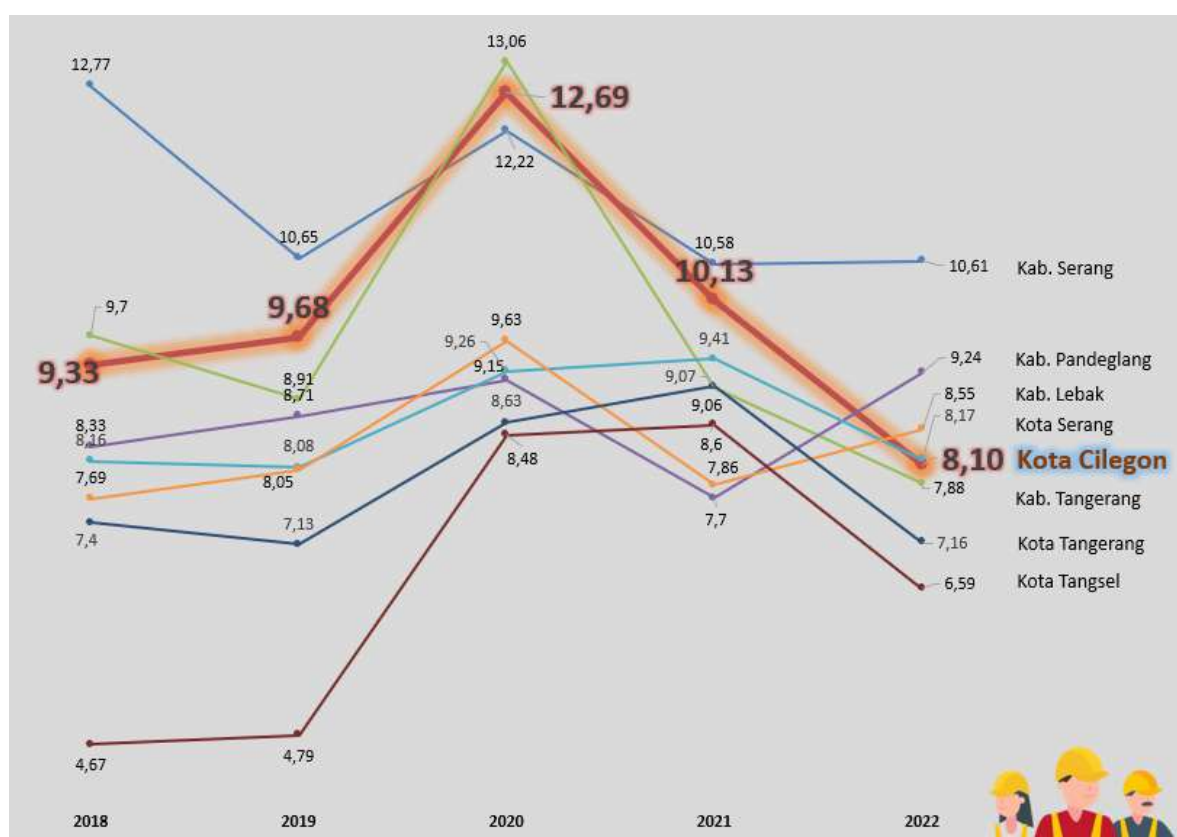


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam histori 6 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Cilegon sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018, namun kembali mengalami fluktuasi/kenaikan di tahun 2019 dikarenakan berbagai dinamika di beberapa sektor perekonomian strategis, dan meningkat di 2020 yang dipengaruhi kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 merupakan fenomena yang terjadi di hampir di seluruh

Indonesia, bahkan dunia dimana baik secara langsung maupun atau tidak langsung disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19. Karena dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun di tahun 2020 yang juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Namun mulai pertengahan tahun 2020 dan sepanjang tahun 2022, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk mereduksi dampak covid 19 yang dilakukan beriringan dengan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Hal tersebut berimbas pada kondisi ketenagakerjaan Kota Cilegon di 2022 yang jauh membaik dibandingkan tahun 2020. Di 2022, tingkat pengangguran menurun seiring aktivitas faktor produksi yang sudah kembali meningkat (yang juga ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB Kota Cilegon di 2022 dan realisasi investasi di 2021 dan 2022. Di 2022, Penurunan pengangguran di Kota Cilegon adalah yang paling signifikan dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Prov. Banten, yaitu sebesar 2,03%.

Gambar 1.4.3c Perbandingan TPT di 8 Kab/Kota Prov Banten Tahun 2018 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dengan target tingkat pengangguran pada tahun transisi RPJMD 2022-2026 sebesar 11,6 % di tahun 2022, maka realisasi capaian kinerja pada indikator pembangunan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) sudah lebih baik dari ekspektasi/target RPJMD 2021-2026.

Gambar 1.4.3c TPT & Target RPJMD 2022 - 2026 (makin rendah makin baik)



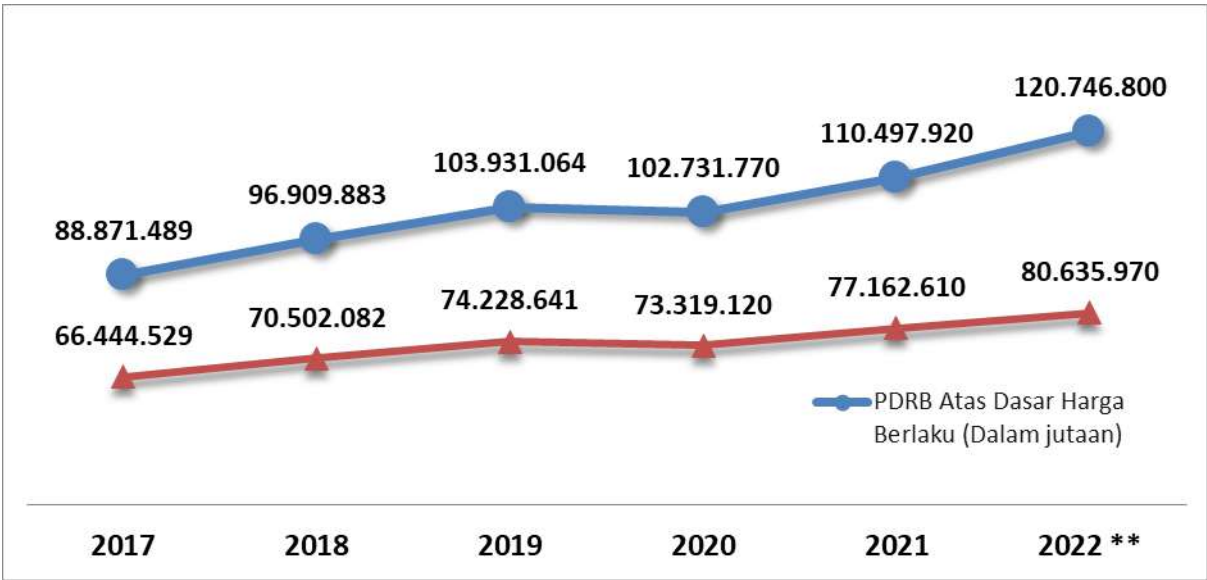
Sumber : Badan Pusat Statistik & RPJMD Kota Cilegon 2022-2026 (diolah)

1.4.4 Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

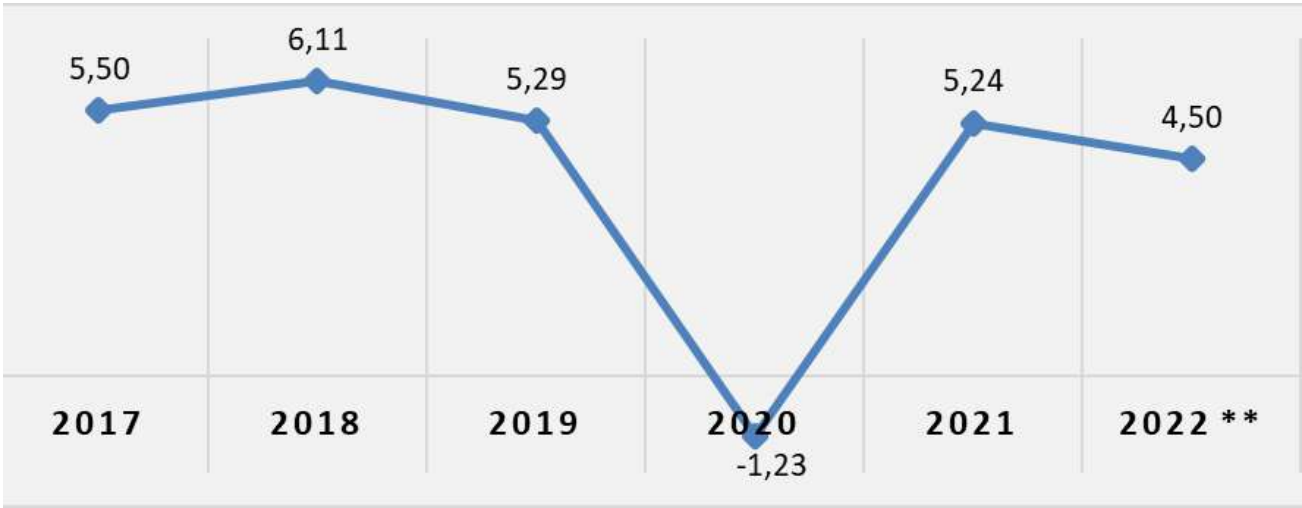
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah, seperti provinsi atau kabupaten/kota. PDRB mengukur nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu dalam periode satu tahun. PDRB mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh pihak asing yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB biasanya dihitung dengan menggunakan metode pengeluaran atau pendapatan, di mana nilai PDRB dihitung sebagai jumlah dari pengeluaran seluruh sektor ekonomi atau sebagai jumlah pendapatan yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. PDRB sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi suatu wilayah sedang berkembang dan mengalami kemajuan.

Gambar 1.4.4b PDRB ADHB & ADHK Kota Cilegon Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

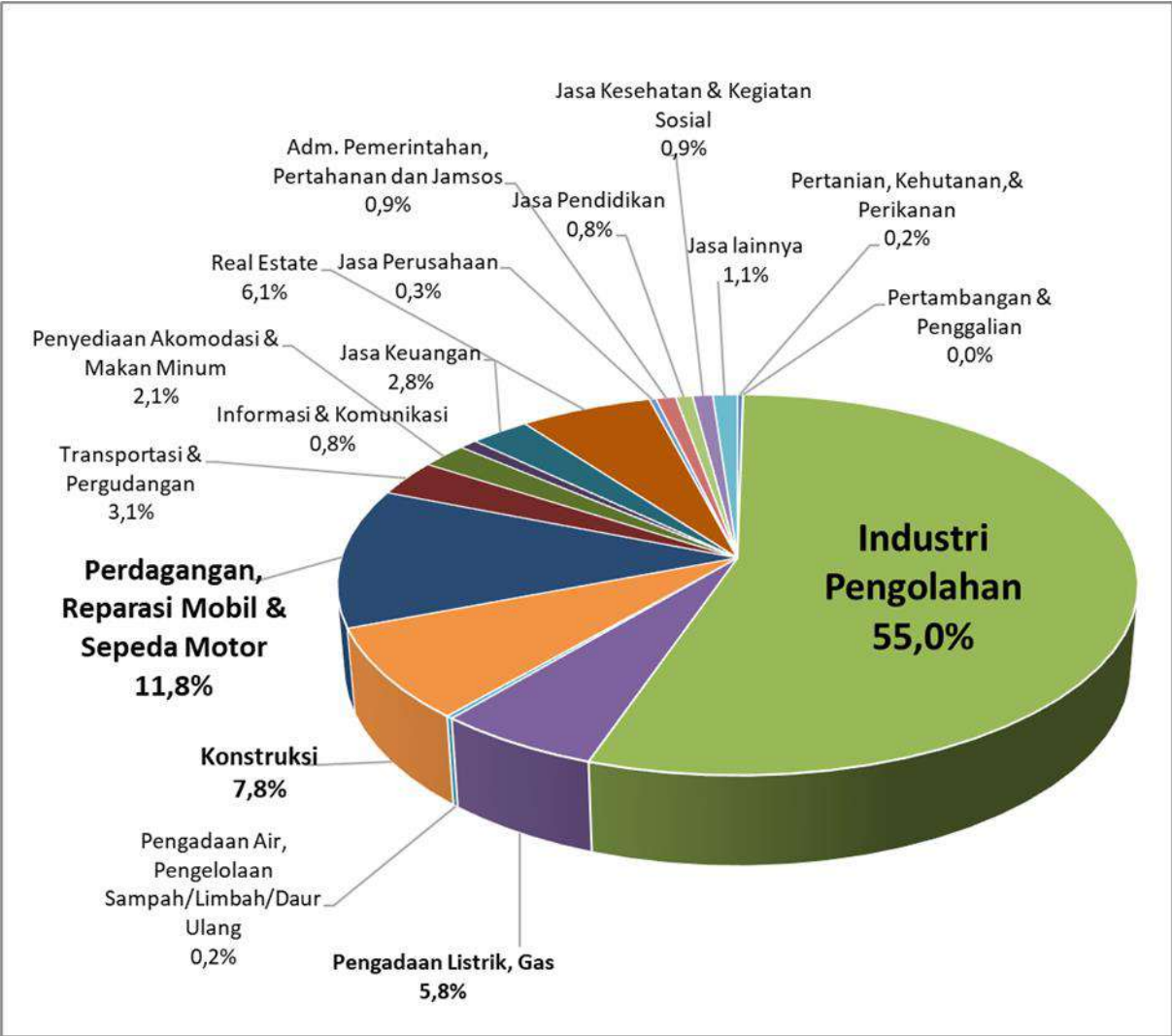
Gambar 1.4.4a Laju PDRB ADHK Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

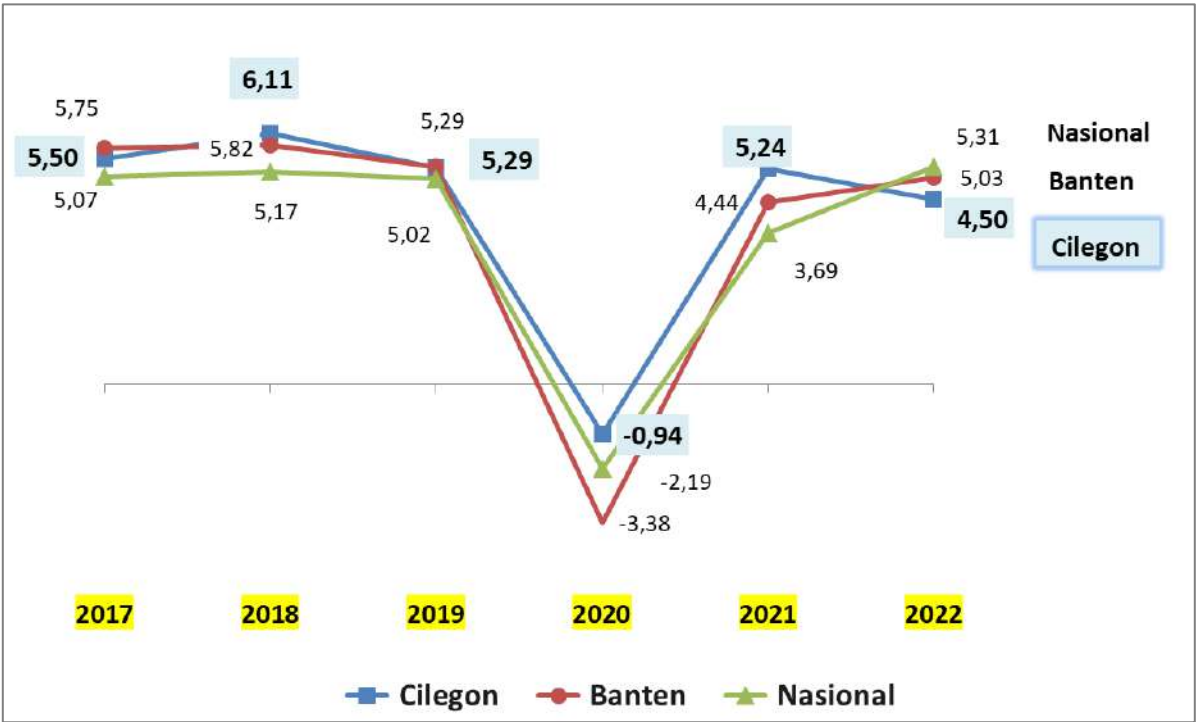
Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, rata-rata dominasi sektor industri pengolahan yaitu sebesar 55 persen dari total PDRB Kota Cilegon di tahun 2022.

Gambar 1.4.4a Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4.4c Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

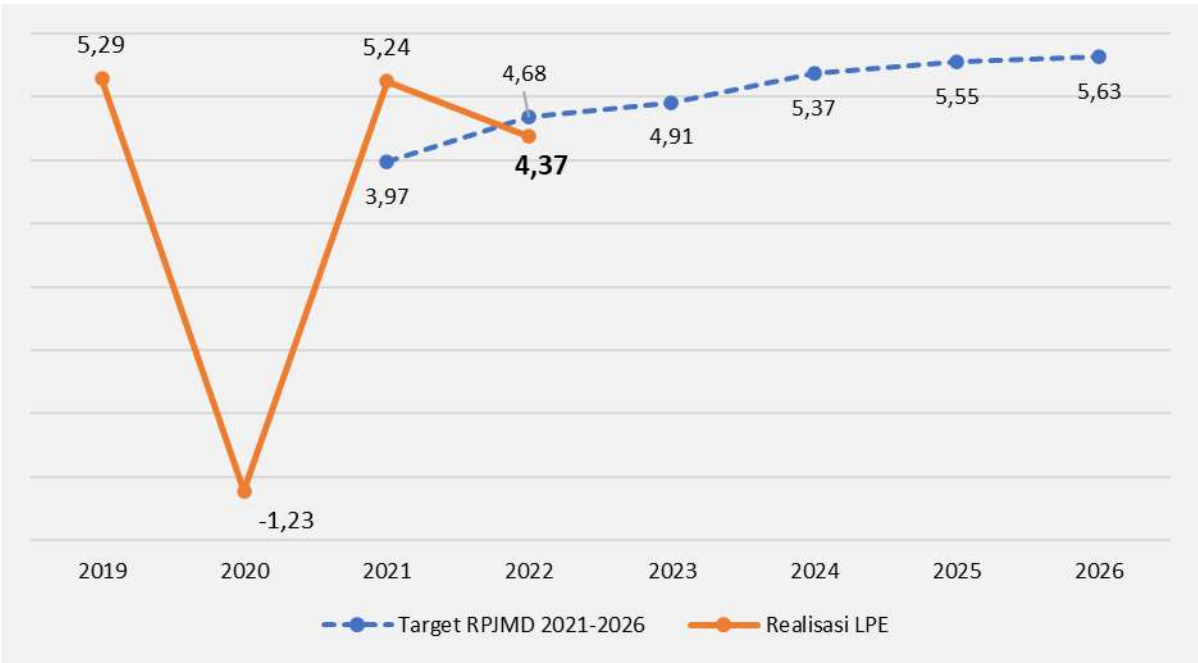
Sektor lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor jasa lainnya sebesar 16,31 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 10,53 persen, pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum. Adapun grafik laju pertumbuhan (PDRB ADHK) berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut :

Gambar 1.4.4d Laju sektoral PDRB ADHK Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4.4e LPE Kota Cilegon terhadap Target RPJMD 2022-2026



Sumber : BPS & Bappedalitbang Kota Cilegon, diolah

Sempat melebihi target RPJMD Kota Cilegon pada 2021, laju pertumbuhan ekonomi di 2022 justru melambat di angka 4,37 %. Kondisi resesi ekonomi global dan inflasi yang cukup tinggi cukup memberikan dampak pada sektor industri pengolahan di Kota Cilegon yang sebagian besar merupakan perusahaan multinasional yang masuk dalam dinamika perekonomian global. Diharapkan pada tahun berikutnya, PDRB sebagai salah satu tolok ukur pembangunan pada aspek

pertumbuhan ekonomi dapat kembali membaik dan berakselerasi sesuai dengan target akhir RPJMD diatas 5 %.

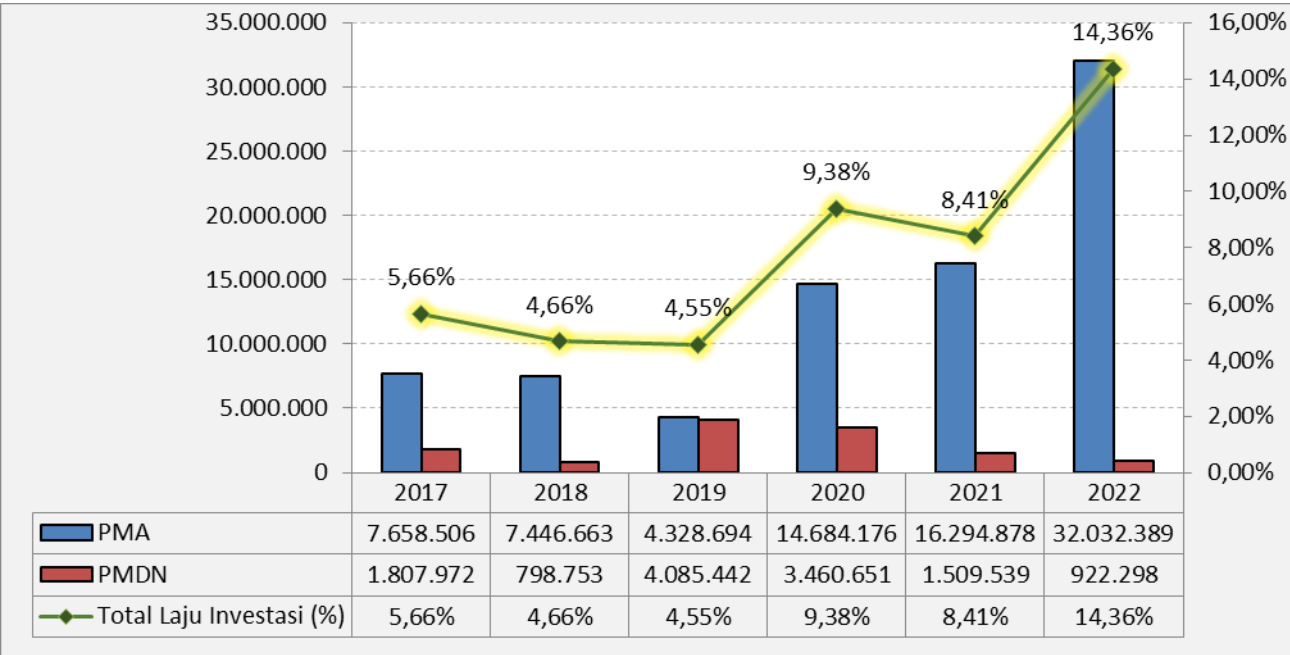
1.4.5 Perkembangan Investasi

Realisasi investasi adalah jumlah uang atau nilai investasi yang benar-benar dihabiskan atau digunakan oleh investor dalam melakukan investasi. Realisasi investasi meliputi seluruh investasi yang telah dikeluarkan atau dibayarkan untuk membeli aset-aset produktif, seperti tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku.

Realisasi investasi dalam konteks pemerintahan dan penanaman modal merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan data pendaftaran penanaman modal dan/atau pembuatan/*updating* Nomor Induk Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, yang mana PMA dan PMDN yang berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM baik pada tahap pembangunan maupun yang sudah komersil.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, realisasi investasi seringkali digunakan untuk mengukur seberapa sukses program investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika realisasi investasi tinggi, maka diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, seperti pertumbuhan industri, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Sebaliknya, jika realisasi investasi rendah, maka bisa jadi ada hambatan-hambatan seperti regulasi yang sulit, birokrasi yang memperlambat proses investasi, atau kondisi ekonomi yang kurang stabil. Total realisasi investasi di Kota Cilegon sepanjang Tahun 2022 adalah sebesar 32,9 trilyun rupiah dengan laju investasi sebesar 14,36 % terhadap nilai akumulasi investasi tahun lalu (2021). Adapun realisasi investasi sepanjang tahun 2022 di Kota Cilegon **tertinggi** se-provinsi Banten.

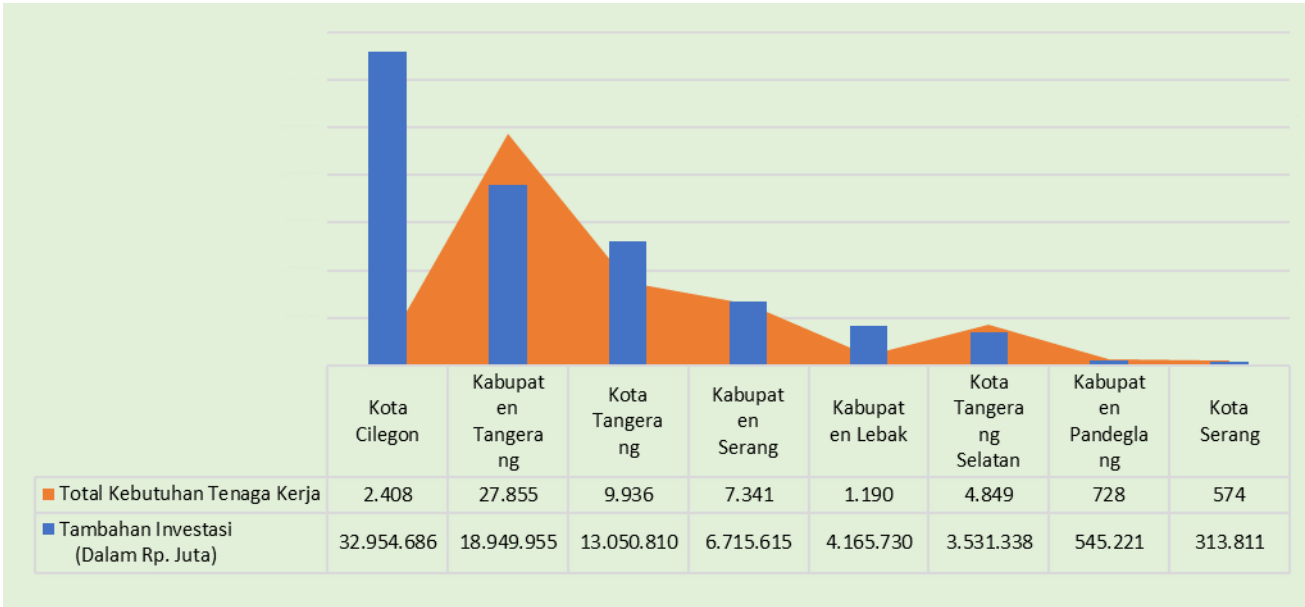
Gambar 1.4.5a Jumlah Penambahan Investasi dan laju investasi PMA & PMDN tahun 2022 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, dolah oleh Bappedalitbang, 2023

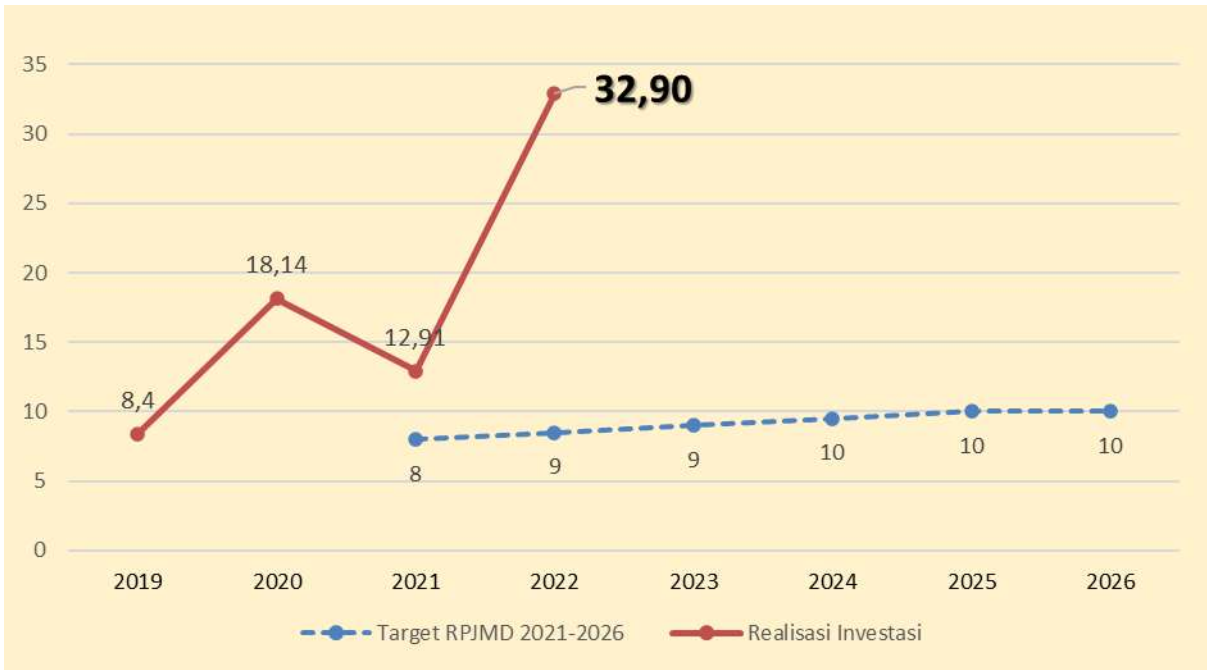
Berdasarkan nilai investasi, pertumbuhan penanaman modal paling besar berasal dari sektor Industri Kimia dan Farmasi sebesar 19,99 trilyun dan sektor listrik, gas sebesar 10,2 trilyun.

Gambar 1.4.5b Perbandingan Realisasi Investasi tahun 2022 di Provinsi Banten



Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, dolah oleh Bappedalitbang, 2023

Gambar 1.4.5c Perbandingan Realisasi Investasi Kota Cilegon dengan Target RPJMD 2016-2021 (dalam trilyun rupiah)



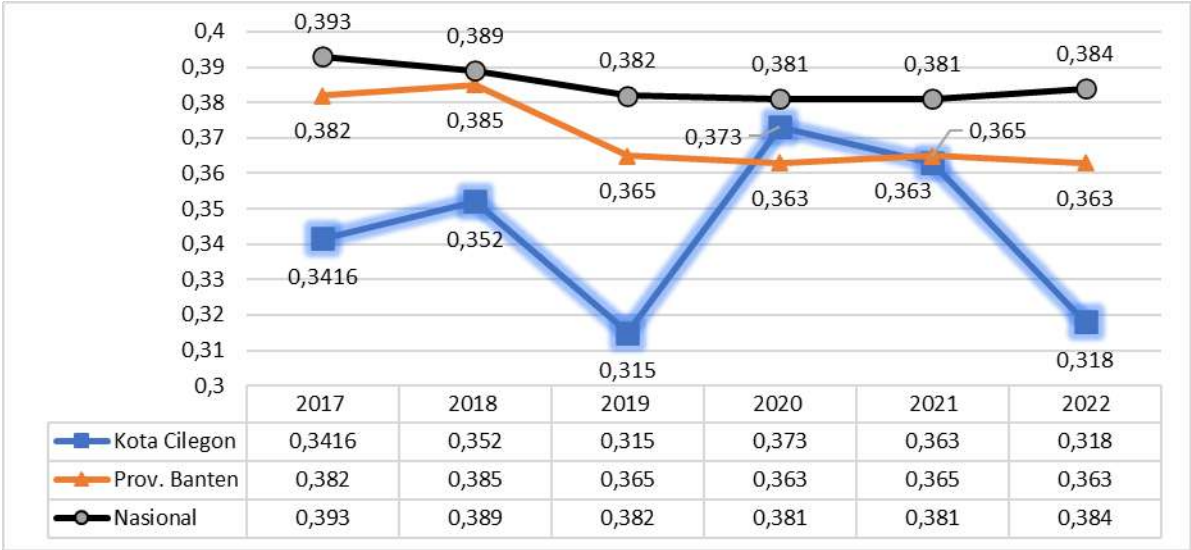
Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, hasil olah

1.4.6 Gini Ratio

Indeks gini menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, semakin kecil indeks gini maka semakin baik, yang artinya ketimpangan pendapatannya makin rendah. Kota Cilegon sebagai basis indutri dengan nilai daya beli masyarakat yang tinggi dan Upah Minimum Kerja yang tinggi (bahkan tertinggi se-Banten), memiliki kecenderungan terhadap adanya ketimpangan pendapatan/penghasilan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor industri padat modal dengan masyarakat yang bekerja di sektor lainnya atau bahkan sektor informal.

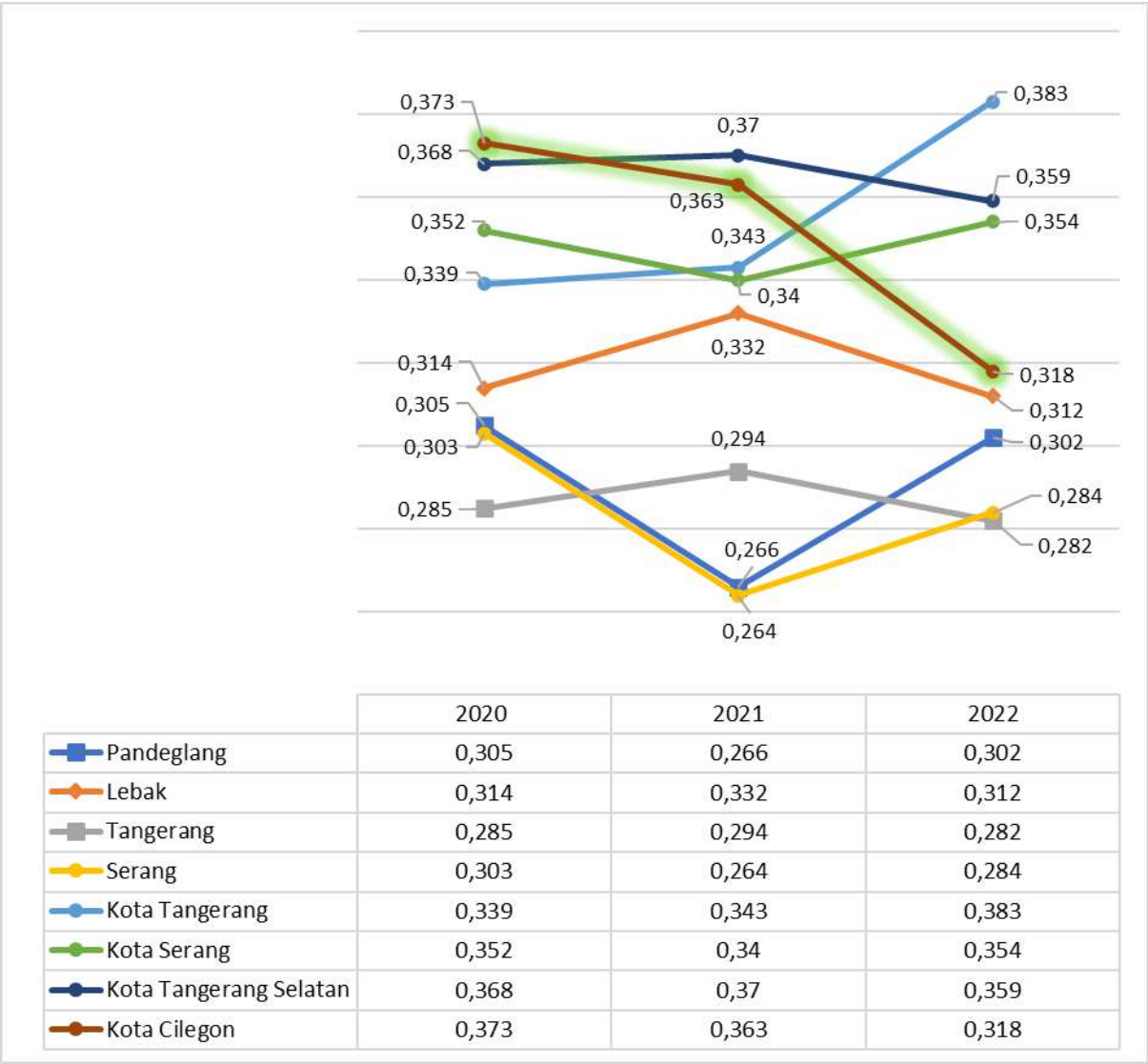
Di Tahun 2022, angka Gini Ratio Kota Cilegon adalah 0,318, menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,363 (2021) . Penurunan *gini ratio* Kota Cilegon adalah yang tertinggi di provinsi Banten, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan atau gap/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Cilegon sudah menurun cukup signifikan.

Gambar 1.4.6a Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4.6b Perbandingan Gini Ratio Kota Cilegon dengan Kab/Kota di Prov. Banten



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

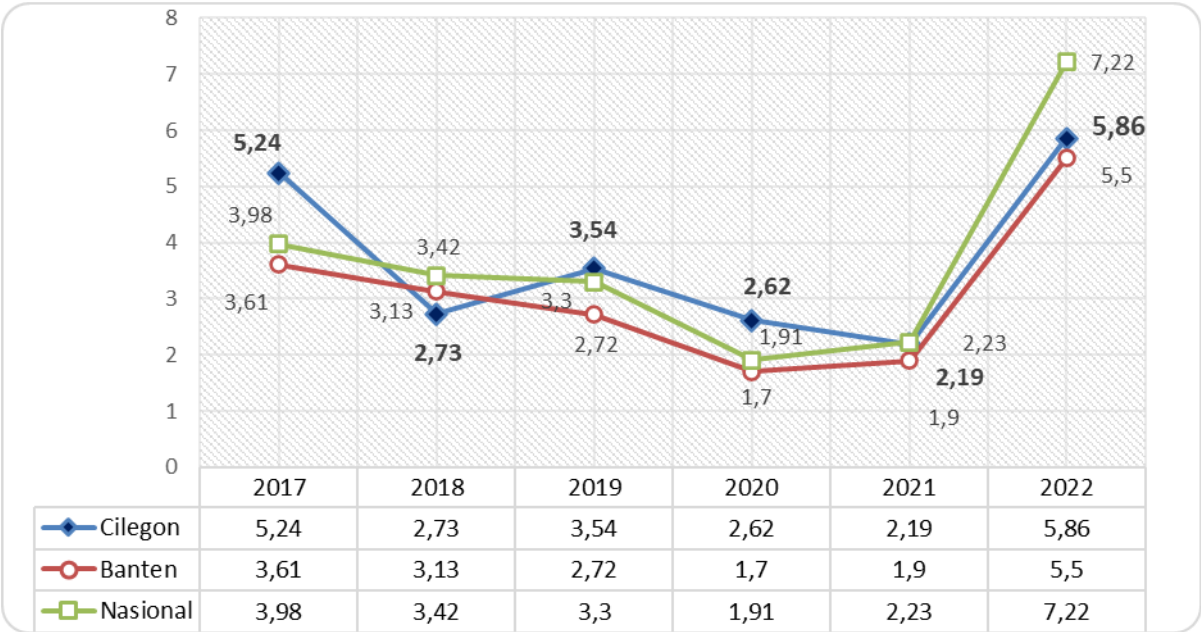
1.4.7 Tingkat Inflasi

Kota Cilegon sebagai basis industri dengan nilai daya beli masyarakat yang tinggi dan Upah Minimum Kerja yang tinggi (bahkan tertinggi se-Banten), seringkali mengalami inflasi yang tinggi di atas rata-rata nasional dan provinsi dalam 5 - 6 tahun terakhir. Namun kondisi berbeda terjadi di tahun 2021

- 2022, dimana inflasi Kota Cilegon lebih rendah dibandingkan inflasi provinsi Banten, walaupun masih di atas rata-rata inflasi nasional.

Di tahun 2022, inflasi melonjak cukup tinggi, yang beberapa penyebabnya antara lain peningkatan harga minyak goreng di April 2022 lalu serta adanya dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022 lalu secara nasional.

Gambar 1.4.7a Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten

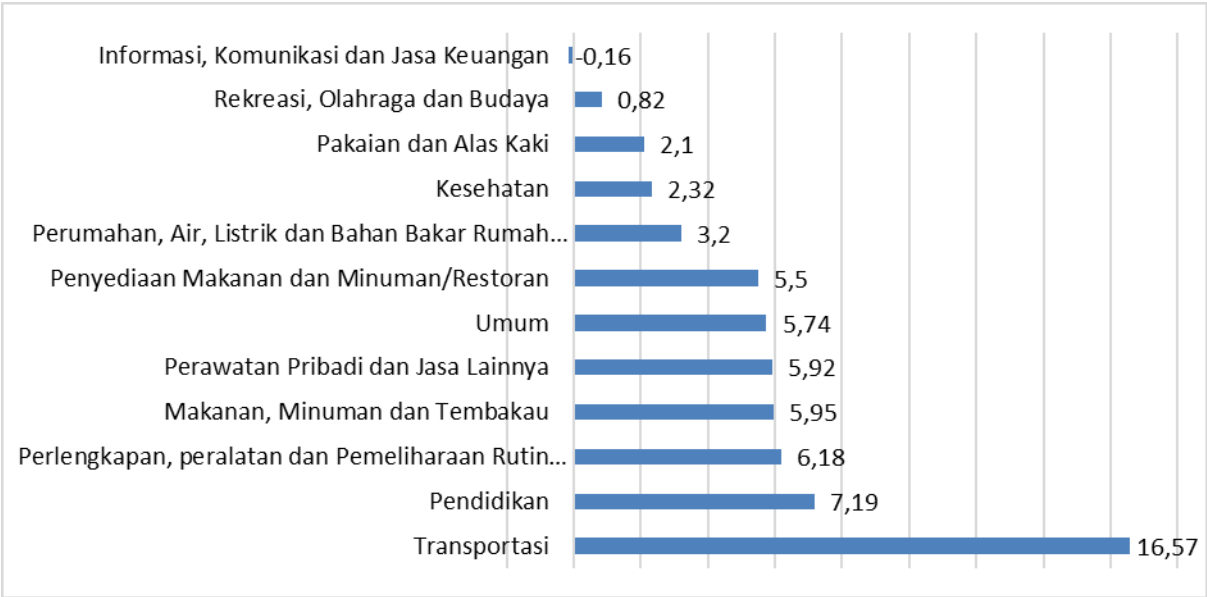


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di sepanjang 2022, 5 kelompok pengeluaran terbesar yang mengalami inflasi adalah pada kelompok transportasi sebesar 16,57%, pendidikan (7,19%), makanan (5,95%), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (5,92%), serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Adapun satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-0,16%).

Gambar 1.4.7b Inflasi Kota Cilegon berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 (YoY)



Sumber : Cilegon Dalam Angka 2023, BPS (diolah)

Bab 2: Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1 Perubahan Perwal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan penjabaran APBD Tahun 2022 dilakukan karena adanya pergeseran anggaran, baik pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja. Secara regulasi hal ini diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Permendagri 77 Tahun 2020 tersebut mengatur bahwa Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antara lain :

- Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) .
- Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Beberapa perubahan penjabaran APBD pada Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari perubahan alokasi dana transfer daerah, diantaranya **dana alokasi khusus** (PMK No. 116 /PMK.07/2022), dana insentif daerah (PMK No. 140/ PMK.07/2022, dan bantuan keuangan provinsi (SE Gubernur No. 900/509-BPKAD/2022).

Selain untuk mengakomodir belanja yang bersumber dari dana transfer daerah, perubahan penjabaran APBD di sepanjang Tahun 2022 juga dilakukan untuk mengakomodir penyesuaian belanja demi mengakselerasi pencapaian prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan efektifitas belanja untuk mencapai berbagai target pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dan/atau penyesuaian belanja pada beberapa kegiatan/sub kegiatan di beberapa Perangkat Daerah di sepanjang tahun anggaran 2022 yang dituangkan dan ditetapkan ke dalam perwal perubahan penjabaran APBD.

Sepanjang Tahun 2022, terdapat 5 (lima) Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD Tahun 2022 sebagai berikut :

1. **Perwal No. 32 Tahun 2022** tentang **Perubahan** Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022. Perubahan penjabaran yang ditetapkan melalui perwal ini sebagian besar untuk mengakomodir alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan beberapa penyesuaian

belanja terhadap regulasi/juknis DAK Fisik dan Non Fisik pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dsb.

Adapun pergeseran rekening belanja terjadi pada : Dinas Pendidikan untuk pemenuhan rehabilitasi ruang kelas/ sarana dan prasarana untuk kebutuhan aktivitas belajar mengajar dan pengelolaan biaya operasional PAUD dan pendidika kesetaraan; Dinas Kesehatan untuk optimalisasi distribusi dan pemenuhan alat kesehatan dan belanja obat dan vaksin di fasilitas kesehatan di Kota Cilegon, operasional pelayanan puskesmas, dan sebagainya;

2. **Perwal No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua** Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pergeseran rekening belanja diperuntukan bagi Dinas PUTR (optimalisasi alokasi rekening belanja rekonstruksi jalan), Dishub, Bappedalitbang, RSUD. Disporapar dan Disdukcapil (perbaikan kesesuaian kode rekening belanja TPP ASN), Disnaker, dan BPKPAD (penambahan pendapatan tarnsfer daerah untuk DAK Fisik sebesar 14,9 milyar dan penambahan alokasi DAK Non Fisik dari 73,5 milyar menjadi 92,98 milyar serta penambahan pendapatan transfer antar daerah berupa Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebesar 10 milyar rupiah), serta pergeseran kode rekening pada beberapa kecamatan untuk penyesuaian alokasi komponen penghasilan dan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja pegawai.
3. **Perwal Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga** Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir perubahan akun belanja pada Dinas PUTR, Dishub, Diskop UKM, DP3AKB, DLH, Disperindag, Dinas Kesehatan (optimalisasi belanja alkes dan sarprasa layanan kesehatan), Dinas Pendidikan (penambahan alokasi DID untuk belanja komputer sebagai sarana pembelajaran siswa, serta perubahan rekening belanja untuk pengelolaan BOP PAUD), serta Kecamatan Citangkil (penyesuaian rincian belanja untuk pengelolaan dana DPWKel 2022)
4. **Perwal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan** Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang **Penjabaran Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubhana ini dilakukan karenan adanya penambahan pendapatan BLUD sebesar 11,75 milyar dari Bantuan Pemerintah yang diberikan dari Kementrian Kesehatan, adapun pendapatan tersebut langsung dialokasikan untuk belanja modal alat kesehatan berupa CT-Scan di RSUD Kota Cilegon untuk pemenuhan Sarana dan prasarana dan alat kesehatan (SPA) layanan prioritas jantung, stroke dan Kanker Uro Nefro.
5. **Perwal No. 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua** Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang **Penjabaran Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perwal ini menetapkan penyesuaian belanja pegawai untuk penyesuaian alokasi insentif retribusi pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh BPKPAD Kota Cilegon.

2.2 Perubahan Perda APBD

2.2.1 Latar Belakang

Perubahan APBD 2022 dilatarbelakangi oleh berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2022, diantara lain kondisi perekonomian makro baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota, kebijakan dana transfer daerah serta hal-hal administratif lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Di sisi lain, pada kapasitas pembiayaan pembangunan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021. Sebagai upaya percepatan pencapaian target pembangunan, SILPA ini dapat dioptimalkan untuk digunakan kembali dalam pendanaan pembangunan di tahun berjalan (2022) melalui alokasi belanja pembangunan pada



perubahan APBD. Selain itu, pada komponen dana transfer di triwulan pertama 2022, terdapat perubahan alokasi anggaran baik berupa Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Banten, maupun Dana Insentif Daerah, yang diterima setelah APBD Tahun 2022 ditetapkan, yang berdasarkan amanat perundang-undangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020) **wajib dituangkan** dalam perubahan APBD 2022 yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada mekanisme perubahan anggaran, hal ini dilakukan melalui Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun Perubahan APBD 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan penganggaran pendapatan daerah tahun 2022, khususnya yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Ekstensifikasi sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD, meliputi :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pengelolaan beberapa komponen retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Melaksanakan pembahasan secara intensif terhadap kebijakan pelaksanaan retribusi penggunaan TKA pasca diterbitkannya UU nomor 1 tahun 2022.
- Menyusun komponen PAD sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri
- Adanya akreditasi pada seluruh Puskesmas se-Kota Cilegon yang dilakukan secara rutin sesuai dengan Permenkes nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri, Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Di sisi lain, pelaksanaan Intensifikasi sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD di pertengahan 2022 , meliputi :

- Intensifikasi Pajak Daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan komponen Pajak Daerah. Salah satu cara untuk menggali potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran data atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan melalui penilaian individual objek dan subjek PBB-P2 yang potensial sedangkan untuk BPHTB perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar.
- Melaksanakan amanat Pemerintah dan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melaksanakan pemungutan sementara pada Komponen Pajak Penerangan Jalan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

- Pelaksanaan intensifikasi dalam peningkatan pelaksanaan pendataan ulang pada wajib retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan baik objek perindustrian, dan perhotelan, serta meningkatkan pemahaman SDM pemungut retribusi persampahan (kolektor).
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan alat ukur tera ulang, dan melaksanakan standarisasi alat ukur tera ulang secara berkala kepada Pemerintah Pusat.
- Upaya peningkatan perluasan pembayaran berbasis Online melalui kanal pembayaran QRIS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian disisi administrasi pengelolaan berbasis teknologi.

Penganggaran target dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu

2.2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Hal-hal yang menjadi substansi dalam RKPD Perubahan 2022 sebagai dasar penetapan APBD-P 2022 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan kinerja APBD Tahun 2022 maka perlu dilakukan perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, yang berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 diprioritas untuk :
 - a. Percepatan pencapaian kegiatan prioritas pada 19 program prioritas RPJMD;
 - b. Pemenuhan kekurangan belanja gaji/tunjangan aparatur serta belanja rutin/operasional kantor yang mendesak antara lain pembayaran biaya komunikasi, listrik dan air;
 - c. Penyusunan kajian teknis sebagai prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas yang telah tercantum pada RKPD Tahun 2023.
2. Pembiayaan perubahan rencana kerja tersebut diprioritaskan melalui pergeseran anggaran dari anggaran yang diperkirakan tidak dapat terealisasi di tahun 2022 baik karena pertimbangan waktu, tumpang tindih dengan sumber anggaran lain atau hasil efisiensi anggaran, dengan memperhatikan anggaran yang sudah direalisasikan.
3. Usulan perubahan rencana kerja agar tidak hanya mencantumkan perubahan anggaran tetapi juga mencantumkan perubahan target kinerja kegiatan, sebagaimana format terlampir dan disertai dengan lampiran analisis dan telaahan dasar dilakukannya perubahan.
4. Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah juga mencakup perbaikan pada aspek akuntabilitas, yaitu pada teknis administrasi/sistem aplikasi, kesesuaian penggunaan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan, hingga indikator output atau kinerja sub kegiatan.

2.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan arah kebijakan penerimaan pembiayaan dalam perubahan APBD tahun 2022 adalah melakukan **penyesuaian** Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2021. Besarnya SiLPA tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp469.497.759.456,00

2.2.5 Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2022

Secara umum, berikut adalah ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022:

Tabel 2.1 Ringkasan Perubahan APBD Kota Cilegon Tahun 2022

URAIAN	APBD Murni	APBD Perubahan
PENDAPATAN DAERAH	1.780.374.262.884	1.886.364.441.213
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	808.810.080.884	801.790.661.154
Pajak Daerah	630.398.590.263	645.127.680.624
Retribusi Daerah	24.602.991.970	21.976.117.200
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.266.267.064	18.591.510.375
Lain-lain PAD yang Sah	136.542.231.587	116.095.352.955
PENDAPATAN TRANSFER	912.845.282.000	1.084.573.780.059
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.675.282.000	884.505.099.540
Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.170.000.000	200.068.680.519
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.718.900.000	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.718.900.000	0
BELANJA	2.221.673.779.914	2.339.362.198.869
BELANJA OPERASI	1.978.509.993.785	1.985.157.004.868
Belanja Pegawai	938.973.002.900	890.383.990.715
Belanja Barang dan Jasa	974.080.336.386	1.019.605.480.654
Belanja Hibah	59.228.044.499	65.868.523.499
Belanja Bantuan Sosial	6.228.610.000	9.299.010.000
BELANJA MODAL	226.736.786.129	346.334.167.841
Belanja Modal Tanah	45.156.054.852	74.162.248.748
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.880.014.358	115.682.429.455
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.554.554.138	57.499.901.202
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.046.956.263	92.637.014.977
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.099.206.518	6.352.573.459
BELANJA TIDAK TERDUGA	16.427.000.000	7.871.026.160
Belanja Tidak Terduga	16.427.000.000	7.871.026.160
Total Surplus/(Defisit)	-441.299.517.030	-452.997.757.656
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	457.799.518.830	469.497.759.456
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	457.799.518.830	469.497.759.456
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	457.799.518.830	469.497.759.456
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.500.001.800	16.500.001.800
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	11.500.001.800	11.500.001.800
Pembiayaan Netto	441.299.517.030	452.997.757.656
TOTAL APBD	2.238.173.781.714	2.355.862.200.669

Sumber : Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2022

Bab 3:
Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
3.1.1.1 Urusan Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SMPN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		480.906.750.682	415.817.035.572	86,47			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		295.853.543.282	263.807.273.131	89,17		Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada sekolah dan pelayanan Guru kepada Murid agar dapat ditingkatkan kembali guna meningkatkan mutu pendidikan.	Pemenuhan survey kepuasan pelayanan Masyarakat pada bidang Pendidikan.
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan.							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		139.466.158.340	108.718.299.749	77,95	Terdapat dua kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, yaitu Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah, serta Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas. Hal ini disebabkan karena kurang terpenuhinya berkas kelengkapan dalam hal ini belum adanya SK penetapan untuk hibah bagi sekolah swasta, dan adanya kendala prosedural yang menyebabkan adanya pembatalan dana DAK.	Berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku	Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	100,00%	93,09%	93,09			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	82,1%	82,05			
Penambahan Ruang Kelas Baru		2.000.000.000	1.673.020.000	83,65			peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah Ruang Kelas Baru SD Yang Akan Di Bangun	2 Sekolah	2 Sekolah	100			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.613.813.500	0	0	Belum adanya SK Penetapan untuk Hibah pada sekolah Swasta	Akan dikoordinasikan kembali sesuai dengan Peraturan yang berlaku	peningkatan sarpras pendidikan swasta
	Jumlah Sekolah/ Lembaga yang Mendapatkan Bantuan Hibah Uang untuk Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Sekolah	0 Sekolah	0			
Rehabilitasi Sengah/Berat Ruang Kelas		5.668.364.000	3.256.826.128	57,46	- Pengesahan dana DAK Kota Cilegon masuk ke dalam pergeseran parsial 1 oleh TAPD pergeseran bulan April dan bulan Mei - Penerapan aturan TKDN di semua item uraian belanja	untuk menyesuaikan target selanjutnya Pengesahan Dana DAK masuk dalam DPA reguler	peningkatan sarpras pendidikan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					bahan/barang menyebabkan perbaikan RAB pekerjaan/produk dari pekerjaan jasa konsultan perencanaan membutuhkan waktu penyesuaiannya - dana DAK batal dilaksanakan karena batas penginputan diaplikasi omspam sampai tgl 31 juli 2022 sehingga perkiraan proses tender belum selesai		
	Jumlah Ruang Kelas yang Direnovasi	4 Ruang Kelas	4 Ruang Kelas	100			
	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi (DAK)	15 Ruang Kelas	0 Ruang Kelas	0			
	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi	18 Ruang Kelas	18 Ruang Kelas	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1.053.536.000	941.647.808	89,38			peningkatan sarpras pendidikan
	Jumlah Ruang Guru Yang Direhabilitasi	2 Ruang	2 Ruang	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		824.751.552	415.283.147	50,35	Adanya dua sekolah tidak terealisasi karena waktu tidak mencukupi yaitu SDN deringo dan SDN kalitimbang 2	perencanaan RAB dan KAK sebelum pengusulan penganggaran dilakukan	peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar	4 Sekolah	2 Sekolah	50			
Pengadaan Mebel Sekolah		6.824.237.790	6.519.969.420	95,54			peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah Ruang Kelas SD yang Mendapatkan Bantuan Mebelair	112 Ruang Kelas	112 Ruang Kelas	100			
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		1.110.000.000	882.452.000	79,5	Tidak tersedianya barang pada e-catalogue	Menyesuaikan spesifikasi dengan ketersediaan produk yang tersedia pada e-catalogue	peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah SD yang Mendapatkan Sarana Teknologi Informasi Kantor	4 Sekolah	4 Sekolah	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		608.480.046	562.099.020	92,38	Belum adanya Juklak dan Juknis terkait BOSDA pada saat pelaksanaan	Melakukan percepatan pelaksanaan BOSDA karena Juklak dan Juknis sudah tersedia pada akhir tahun 2022.	peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah peserta didik pada jenjang SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan/BOSDA (permendagri 18/2020)	37755 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah peserta didik SD miskin yang menerima Beasiswa Kelauga Tidak Mampu/Miskin	857 Orang	857 Orang	100			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		4.088.171.000	4.084.972.000	99,92			Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah SD yang mendapatkan sarana Teknologi Informasi (Media Pendidikan)	13 Sekolah	13 Sekolah	100			
	Jumlah SD yang mendapatkan Alat Peraga Pendidikan (TIK)	28 Sekolah	28 Sekolah	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		59.999.957	47.329.800	78,88	Anggaran tidak mencukupi untuk sewa tempat rapat	mencari sewa tempat yang pas sesuai dengan pagu anggaran yang di tetapkan	peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah SD yang menyelenggarakan PPDB	150 Sekolah	150 Sekolah	100			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		483.327.523	465.580.700	96,33			peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah siswa SD yang mengikuti KSN	48 Orang	48 Orang	100			
	Jumlah siswa SD yang mengikuti FLS2N	104 Orang	104 Orang	100			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		41.946.776.185	33.600.152.761	80,1			Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah SD yang Menerima BOS Reguler	149 Sekolah	149 Sekolah	100			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		524.300.000	481.065.000	91,75			
	Jumlah Pengelola BOS SD yang Dibina	320 Orang	320 Orang	100			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	88,9%	88,89			
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		16.776.385.100	12.634.185.407	75,31	Adanya persyaratan pengadaan lahan yang belum di selesaikan diantaranya : - Pembanding lahan yang disyaratkan tidak memenuhi dikarenakan ada lahan yang belum bersertifikat atau Ajb	FS sudah tersedia sehingga dapat dilakukan percepatan pengadaan lahan untuk SMP Negeri 15	pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan.
	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yng dibangun sesuai kebutuhan berdasar SPM	4 Sekolah	4 Sekolah	100			
Penambahan Ruang Kelas Baru		3.839.999.993	3.418.958.501	89,04			pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan.
	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun sesuai kebutuhan SPM	5 Ruang Kelas	5 Ruang Kelas	100			
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		2.250.000.000	1.976.246.262	87,83			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan.
	Jumlah Ruang Serbaguna/Aula SMP yang dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		198.000.000	188.471.800	95,19			
	Jumlah Toilet SMP yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		2.500.000.000	2.345.358.450	93,81			
	Jumlah Bangunan Gedung Sekolah yang direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.253.535.735	1.089.659.699	86,93			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							sarana dan prasarana Pendidikan.
	Jumlah ruang kelas yang di rehabilitasi (ABT)	1 Sekolah	1 Sekolah	100			
	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	1 Ruang Kelas	1 Ruang Kelas	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		1.100.000.000	864.716.386	78,61	- Pengesahan dana DAK Kota Cilegon masuk ke dalam pergeseran parsial 1 oleh TAPD pergeseran bulan April dan bulan Mei - Penerapan aturan TKDN di semua item uraian belanja bahan/barang menyebabkan perbaikan RAB pekerjaan/produk dari pekerjaan jasa konsultan perencanaan membutuhkan waktu penyesuaiannya - dana DAK batal dilaksanakan karena batas penginputan diaplikasi omspan sampai tgl 31 juli 2022 sehingga perkiraan proses tender belum selesai	untuk penyesuain target selanjutnya Pengesahan Dana DAK masuk dalam DPA reguler	
	Jumlah Bangunan Ruang Guru Sekolah yang direhab	1 Ruang	1 Ruang	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		301.667.000	0	0	- Pengesahan dana DAK Kota Cilegon masuk ke dalam pergeseran parsial 1 oleh TAPD pergeseran bulan April dan bulan Mei - Penerapan aturan TKDN di semua item uraian belanja bahan/barang menyebabkan perbaikan RAB pekerjaan/produk dari pekerjaan jasa konsultan perencanaan membutuhkan waktu penyesuaiannya -	untuk penyesuain target selanjutnya Pengesahan Dana DAK masuk dalam DPA reguler	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan dan peningkatan literasi masyarakat, khususnya usia sekolah.

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dana DAK batal dilaksanakan karena batas penginputan diaplikasi omspan sampai tgl 31 juli 2022 sehingga perkiraan proses tender belum selesai		
	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	1 Ruang	0 Ruang	0			
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		661.605.000	0	0	- Pengesahan dana DAK Kota Cilegon masuk ke dalam pergeseran parsial 1 oleh TAPD pergeseran bulan April dan bulan Mei - Penerapan aturan TKDN di semua item uraian belanja bahan/barang menyebabkan perbaikan RAB pekerjaan/produk dari pekerjaan jasa konsultan perencanaan membutuhkan waktu penyesuaiannya - dana DAK batal dilaksanakan karena batas penginputan diaplikasi omspan sampai tgl 31 juli 2022 sehingga perkiraan proses tender belum selesai	untuk menyesuaikan target selanjutnya Pengesahan Dana DAK masuk dalam DPA reguler	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan.
	Jumlah ruang laboratorium SMP yang direhabilitasi	1 Ruang	0 Ruang	0			
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		988.437.888	921.887.418	93,27			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan. Dan optimalisasi alokasi anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah Pagar SMP yang direhabilitasi	1 Sekolah	1 Sekolah	100			
	Jumlah Pagar SMP Yang Direhabilitasi (ABT)	2 Sekolah	2 Sekolah	100			
Pengadaan Mebel Sekolah		1.000.000.000	829.540.000	82,95			
	Jumlah Ruang Kelas SMP yang Mendapatkan Bantuan Mebelair	7 Sekolah	7 Sekolah	100			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		1.262.840.000	1.143.382.070	90,54			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peringatan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PIP	100 Orang	100 Orang	100			biaya pendidikan bagi masyarakat
	Jumlah peserta didik SMP miskin yang menerima Beasiswa Keluarga Tidak Mampu/Miskin	1123 Orang	1123 Orang	100			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		3.082.379.800	2.976.870.000	96,58			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan
	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan Laptop	4 Sekolah	4 Sekolah	100			
	Jumlah sekolah yang akan mendapatkan bantuan Papan Tulis Interaktif	4 Sekolah	4 Sekolah	100			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		256.550.000	242.225.000	94,42			
	Jumlah SMP yang diberikan peralatan TIK	1 Sekolah	1 Sekolah	100			
	Jumlah SMP yang diberikan peralatan laboratorium	2 Sekolah	2 Sekolah	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		40.000.000	38.584.100	96,46			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan
	Jumlah SMP yang menyelenggarakan PPDB	15 Sekolah	15 Sekolah	100			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		570.000.000	550.458.602	96,57			
	Jumlah siswa SMP yang mengikuti FLS2N	345 orang	345 orang	100			
	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti KSN	294 orang	294 orang	100			
	Gebyar PAI Tingkat Kota Cilegon	350 Orang	350 Orang	100			
	Sosialisasi Kapasitas Pembinaan Karakter	200 Orang	200 Orang	100			
	Sosialisasi Bantuan Sosial	150 Orang	150 Orang	100			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		17.030.789.116	8.987.566.533	52,77	Terdapat perbedaan anggaran dimana Berita Acara hasil evaluasi Provinsi anggaran untuk BOS SMP	Melakukan koordinasi dengan BPKPAD terkait alokasi BOS SMP	Penguatan BOS Daerah untuk dukungan operasional pendidikan dasar

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					sebesar 17.030.789.116 sedangkan Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran berdasarkan jumlah peserta didik sebesar 9.003.906.853, sehingga terdapat selisih yang cukup besar.		
	Jumlah SMP yang diberikan dana BOS Reguler (BOS)	15 Sekolah	15 Sekolah	100			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		510.000.000	499.669.800	97,97			Penguatan BOS Daerah untuk dukungan operasional pendidikan dasar
	Jumlah Pengelola BOS yang dibina	48 Orang	48 Orang	100			
	Jumlah Pengelola Bos yang Di Bina (ABT)	48 Sekolah	48 Sekolah	100			
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100,0%	100			
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		507.072.000	501.958.500	98,99			Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Gedung TK Negeri	3 Sekolah	3 Sekolah	100			
Pengadaan Mebel PAUD		70.000.000	69.300.000	99	Sasaran penerima bantuan hibah tidak lolos tahap verifikasi dalam aplikasi E-Hibah bansos mandiri	Sasaran pengadaan bantuan sarpras ditujukan untuk TK Negeri dalam pergeseran anggaran perubahan	Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah TK Negeri yang mendapatkan Bantuan Mebeleur	5 sekolah	5 sekolah	100			
Pengadaan Perlengkapan PAUD		175.000.000	61.500.000	35,14	Sasaran penerima bantuan hibah Media Audio Visual (Wireless Portable) tidak lolos tahap verifikasi dalam aplikasi E-Hibah bansos mandiri	Diajukan untuk tahun Anggaran Selanjutnya	Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah PAUD yang mendapatkan perlengkapan protokol kesehatan/UKS	6 sekolah	6 sekolah	100			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		170.000.000	167.390.000	98,46	Sasaran penerima bantuan hibah tidak lolos tahap verifikasi dalam aplikasi E-Hibah bansos mandiri	Sasaran pengadaan bantuan sarpras ditujukan untuk TK Negeri dalam pergeseran anggaran perubahan	peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan alat peraga edukasi (APE) Indoor	14 sekolah	14 sekolah	100			
	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan alat peraga edukasi (APE) Outdoor	7 sekolah	7 sekolah	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		305.000.040	285.391.457	93,57			Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Cilegon	200 orang	200 orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti gebyar pramuka prasiaga PAUD saka widya budaya bakti	200 orang	200 orang	100			
	Jumlah pendidik yang mengikuti diklat	120 orang	120 orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Saka Widya Budaya Bakti	55 orang	55 orang	100			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		429.714.068	408.338.080	95,03			Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah Pengelola PAUD Holistik Integratif yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	100 Orang	100 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Cilegon yang mengikuti Study Banding PAUD Holistik Integratif	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Workshop Literasi Dasar	75 orang	75 orang	100			
	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pendampingan Penyusunan RKAS BOP PAUD	265 Lembaga	265 Lembaga	100			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		765.862.020	745.253.370	97,31			Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan seragam dan mamin rapat	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Anak dan Lembaga yang berprestasi	450 anak	450 anak	100			
	Jumlah lembaga yang melakukan pendidikan dan pelatihan pembina pramuka dasar	80 lembaga PAUD	80 lembaga PAUD	100			
	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti lomba literasi dan mendongeng	258 lembaga PAUD	258 lembaga PAUD	100			
	Sosialisasi Pelayanan PAUD Berkualitas oleh Pokja Bunda PAUD Kota Cilegon	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100			
	Jumlah Pengurus Pokja dan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Kelurahan dalam Melakukan Peningkatan Pelayanan PAUD Berkualitas dan Holistik Integratif	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100			
Pengelolaan Dana BOP PAUD		5.902.800.000	5.880.525.000	99,62			Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan PAUD
	Jumlah lembaga yang mengikuti pendampingan operasional DAK	243 lembaga	243 lembaga	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	97,0%	97,01			
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		61.100.000	60.179.200	98,49			
	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah (permendagri 18/2020))	2 PKBM	2 PKBM	100			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		9.054.163.406	7.321.705.710	80,87			Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan non formal
	Jumlah siswa yang diberikan bantuan atau beasiswa sarjana	2000 orang	1701 orang	85,05			
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		149.999.776	138.764.900	92,51			
	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Kesetaraan	700 orang	700 orang	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		250.000.000	245.265.200	98,11			
	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Nonformal	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah Warga Belajar non formal yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan	50 orang	50 orang	100			
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1.197.499.845	1.194.550.520	99,75	Saat pengisian laporan BOP DAK non fisik lembaga masih terkendala karena masih kurang maksimalnya jaringan aplikasi sehingga aplikasi sering error		
	Jumlah lembaga Pengelola BOP Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang di bina	11 lembaga	11 lembaga	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah Kebijakan : Pengembangan kurikulum muatan lokal							
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		1.059.898.220	1.001.015.096	94,44			Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Ditetapkan	180,0 Dokumen	229,0 Dokumen	127,22			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100,0%	100			
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		344.898.772	339.928.500	98,56			
	Jumlah dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD) yang disusun di sahkan	150 Dokumen	150 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SMP) yang disusun dan disyahkan	49 Dokumen	49 Dokumen	100			
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		349.999.565	345.009.396	98,57			
	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD) yang disusun dan disahkan	180 Dokumen	180 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SMP) yang disusun dan disahkan	49 Dokumen	49 Dokumen	100			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	97,1%	97,06			
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		364.999.883	316.077.200	86,6			Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD yang di susun dan di sahkan	255 Dokumen	225 Dokumen	88,24			
	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di susun dan disahkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal PAUD yang di susun dan disahkan	255 Dokumen	255 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Nonformal yang di susun dan disahkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan secara merata							
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		43.563.650.840	41.540.831.288	95,36	Capaian indikator program pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 95.36 %, akan tetapi pada indikator capaiannya sebesar 65.37 %. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga pendidik yang sudah sertifikasi memasuki usia pensiun dan ada yang meninggal dunia sehingga memperkecil jumlah pendidik yang sudah sertifikasi.	Meningkatkan kompetensi kinerja guru agar lulus ujian PPG, memberi informasi terkait PPG	
	Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi	49,58%	32,41%	65,37			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100,0%	100			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		43.563.650.840	41.540.831.288	95,36	Pada Indikator Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang di Fasilitasi	Kegiatan Cakep Cawas tidak direalisasikan karna sudah di	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Terdapat Kegiatan Yang Tidak Terserap, Adapun Kegiatan Tersebut Adalah : - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Cakep) dan Calon Pengawas (Cawas) Tingkat Kota Cilegon, Dengan Nilai Pagu 3,181,280,269 Link : https://drive.google.com/file/d/1g-rHBFATyFqQTyU9vUIPSjjmF_akISQF/view?usp=share_link	ubahnya kegiatan tersebut menjadi sekolah penggerak	
	Jumlah guru honorer yang diberikan honor	3973 Orang	3973 Orang	100			
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi	1296 Orang	1296 Orang	100			
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti lomba prestasi berjenjang	735 Orang	735 Orang	100			
	Verifikasi dan Evaluasi Data pendidik dan tenaga kependidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Pengendalian izin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu							
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		550.000.000	364.798.510	66,33	Sub kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 60.12%, hal ini dikarenakan semula akan dibuat 3 aplikasi perizinan sesuai jenjang pendidikan, akan tetapi karena keterbatasan waktu, aplikasi yang dibuat hanya 1 untuk semua jenjang pendidikan.	Dilakukan pengalihan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan aplikasi perizinan sekolah	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	100,00%	100,00%	100			
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100,0%	100			
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		460.000.000	276.533.510	60,12	Karena adanya keterbatasan waktu pembuatan aplikasi, yang semula di perencanaan 3 aplikasi akan tetapi di realisasi hanya 1 aplikasi Link https://drive.google.com/file/d/1jJX0279iAuJqFRVm55pYawnh0giWvOt/view?usp=share_link	Dilakukan pengalihan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan aplikasi perizinan sekolah	
	Jumlah Sekolah SD yang dibutuhkan survey / penilaian kelayakan ijin operasi	31 Sekolah	31 Sekolah	100			
	Jumlah sekolah SD yang diterbitkan rekomendasi ijin oprasional pada tahun berjalan	31 Sekolah	31 Sekolah	100			
	Jumlah Sekolah SMP yang dibutuhkan survey / penilaian kelayakan ijin operasi	33 Sekolah	33 Sekolah	100			
	Jumlah sekolah SMP yang diterbitkan rekomendasi ijin oprasional pada tahun berjalan	33 Sekolah	33 Sekolah	100			
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100,0%	100			
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		90.000.000	88.265.000	98,07			
	Jumlah lembaga Non Formal/Kesetaraan yang dilakukan	10 lembaga	10 lembaga	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	survey/penilaian kelayakan ijin operasional						
	Jumlah lembaga Non Formal/Kesetaraan yang diterbitkan rekomendasi ijin operasional pada tahun berjalan	10 lembaga	10 lembaga	100			
	Jumlah sekolah PAUD yang dilakukan survey/penilaian kelayakan ijin operasional	60 sekolah	60 sekolah	100			
	Jumlah sekolah PAUD yang diterbitkan rekomendasi ijin operasional pada tahun berjalan	60 sekolah	60 sekolah	100			
Arah Kebijakan : Pengembangan kurikulum muatan lokal							
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		413.500.000	384.817.798	93,06			
	Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	81,75%	66,28%	81,08			
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		323.500.000	297.617.860	92			
	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Lomba Apresiasi Bahasa Daerah (Jawa Cilegon)	24 Orang	24 Orang	100			
	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba Apresiasi Bahasa Daerah (Jawa Cilegon)	49 Sekolah	49 Sekolah	100			
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		90.000.000	87.199.938	96,89			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah yang disusun untuk jenjang SD (Kls I-VI)	6 Buku	6 Buku	100			
	Jumlah Modul dan Bahan ajar bahasa Daerah yang disusun untuk jenjang SMP (kls VII-IX)	3 Buku	3 Buku	100			
SMPN 1		1.399.502.269	1.216.835.056	86,95			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.344.697.420	1.166.294.015	86,73			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		54.804.849	50.541.041	92,22			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	90,8%	90,79			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		10.679.230	10.670.601	99,92			
	Jumlah alat perlengkapan Pendidikan dan kesehatan (5 Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	100			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		44.125.619	39.870.440	90,36			
	Jumlah siswa baru yang mengikuti orientasi (250 siswa) pembinaan imtaq dan kerohanian (700 siswa) (SMPN 1)	950 Siswa	775 Siswa	81,58			
SMPN 2		2.073.888.764	1.872.095.323	90,27			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.872.898.550	1.697.515.023	90,64			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		200.990.214	174.580.300	86,86			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		91.535.314	82.789.100	90,44			
	Jumlah penyediaan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan	28 Set	28 Set	100			
	Jumlah penyediaan masker	1184 Buah	1184 Buah	100			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		109.454.900	91.791.200	83,86			
	Jumlah kegiatan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
SMPN 3		1.691.174.414	1.505.542.985	89,02			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.407.737.540	1.227.967.985	87,23			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		283.436.874	277.575.000	97,93			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Pengadaan Mebel Sekolah		283.436.874	277.575.000	97,93			
	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 jenis	6 jenis	100			
SMPN 4		1.341.681.257	1.167.413.026	87,01			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.160.151.257	1.063.273.426	91,65			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		181.530.000	104.139.600	57,37			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	106,3%	106,25			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		181.530.000	104.139.600	57,37	Diawal tahun penyelenggaraan proses belajar dan ujian peserta didik dilakukan secara	Memaksimalkan proses belajar dan ujian peserta didik	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					daring (Googel form) sehingga anggaran tidak terserap maksimal		
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
	Belanja Makan dan Minum Rapat	8 Kegiatan	9 Kegiatan	112,5			
SMPN 5		2.251.214.734	2.112.183.144	93,82			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.251.214.734	2.112.183.144	93,82			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
SMPN 6		1.674.500.185	1.459.052.475	87,13			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.574.692.765	1.367.629.866	86,85			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		99.807.420	91.422.609	91,6			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Pengadaan Mebel Sekolah		99.807.420	91.422.609	91,6	TKDN	Mempelajari TKDN	
	Jumlah pengadaan kursi tunggu yang diadakan	8 Unit	8 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Meja Komputer yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah pengadaan Podium yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Tempat Tidur Besi untuk UKS yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100			
SMPN 7		1.447.733.309	1.303.931.134	90,07			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.250.363.814	1.148.341.134	91,84			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		197.369.495	155.590.000	78,83			
	Rata -rata pencapaian kinerja SPM Pendidikan (%)	82,78 Persen	0,0 Persen	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Pengadaan Mebel Sekolah		66.429.495	65.684.000	98,88			
	Belanja Modal Mebel Sekolah	1 Paket	1 Paket	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		130.940.000	89.906.000	68,66	Sebagian Pelaksanaan Makanan dan Minuman Kegiatan Ujian dilakukan disaat Bulan Romadhon atau pada saat puasa jadi tidak terserap dengan maksimal Anggaranya.	Anggaran disesuaikan dengan jadwal Kegiatan Belajar Mengajar.	
	Pelaksanaan Kegiatan PTS Genap	60 OB	60 OB	100			
	Pelaksanaan Kegiatan PAS Ganjil	60 OB	60 OB	100			
	Pelaksanaan Kegiatan PTS Ganjil	60 OB	60 OB	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah	60 OB	60 OB	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Kegiatan PAT Genap	60 OB	60 OB	100			
SMPN 8		1.074.018.301	920.535.180	85,71			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.074.018.301	920.535.180	85,71			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
SMPN 9		1.376.265.427	1.218.619.810	88,55			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.318.758.427	1.193.956.810	90,54			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		57.507.000	24.663.000	42,89			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		57.507.000	24.663.000	42,89	Penyerapan anggaran penyelenggaraan proses belajar mengajar dan ujian peserta didik kurang maksimal karena pembelajaran diawal tahun	Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang ada	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					ajaran dilakukan secara daring		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2 Paket	2 Paket	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7 Paket	7 Paket	100			
SMPN 10		1.170.059.043	1.066.619.420	91,16			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.133.995.443	1.044.205.820	92,08			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		36.063.600	22.413.600	62,15			
	Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		36.063.600	22.413.600	62,15	Kegiatan PAS Genap dan US tidak dapat terealisasi karena kontrak jadi setelah kegiatan tersebut	Dikoordinasikan dengan Barjas	
	Jumlah Dokumen yang digandakan	7712 Lembar	7712 Lembar	100			
	Terlaksananya Kegiatan PAS	120 Orang/Kali	120 Orang/Kali	100			
	Terlaksananya Kegiatan PAT	120 Orang/Kali	120 Orang/Kali	100			
	Terlaksananya Kegiatan PTS Ganjil	120 Orang/Kali	120 Orang/Kali	100			
SMPN 11		1.383.454.415	1.212.386.245	87,63			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.301.720.015	1.151.048.245	88,43			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		81.734.400	61.338.000	75,05			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		81.734.400	61.338.000	75,05	Pada Kegiatan Ujian Sekolah Makanan dan minuman bertepatan dibulan Puasa	Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak bertepatan dibulan puasa	
	Belanja makan minum kegiatan Penilaian tengah semester (PTS) Genap 5 Hari	536 Siswa	536 Siswa	100			
	Belanja Makan minum kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil 5 Hari	536 Siswa	536 Siswa	100			
	Belanja makan dan minum kegiatan Ujian Sekolah 4 Hari	207 Siswa	207 Siswa	100			
	Belanja makan minum kegiatan Penilaian tengah semester (PTS) Ganjil 5 Hari	536 Siswa	536 Siswa	100			
	Belanja makan minum kegiatan Try out I (4 Hari)	207 Siswa	207 Siswa	100			
	Belanja makan minum kegiatan Try out II (4 Hari)	207 Siswa	207 Siswa	100			
	Belanja makan minum kegiatan Try out III (4 Hari)	207 Siswa	207 Siswa	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Makan minum kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Genap 5 Hari	536 Siswa	536 Siswa	100			
SMPN 12		740.000.000	617.186.548	83,4			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		720.000.000	599.052.968	83,2			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		20.000.000	18.133.580	90,67			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		20.000.000	18.133.580	90,67			
	Perlengkapan Pendukung Olahraga	37 Set	37 Set	100			
SMPN 13		804.165.696	671.466.722	83,5			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		755.160.536	631.894.522	83,68			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		49.005.160	39.572.200	80,75			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100,0%	100			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		30.005.160	29.765.000	99,2	tidak kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan	menunggu data lengkap	
	Belanja Konsumsi Kegiatan Mamin Rapat	340 Orang	340 Orang	100			
	Jumlah Perlengkapan pendidikan Cetak Soal PTS Ganjil,PTS Genap, Akhir Tahun Ganjil, Akhir Tahun	12 Eksmplar	12 Eksmplar	100			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		19.000.000	9.807.200	51,62	ketidakesesuaian jadwal pelaksanaan sub kegiatan	dilaksanakan setelah data lengkap	
	Belanja Jasa Narasumber/Panitia dan Moderator	4 Orang	4 Orang	100			
	Belanja Mamin Pelaksanaan Kegiatan	60 Orang	60 Orang	100			
	Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan	36 Rim	36 Rim	100			
SMPN 14		865.875.680	753.656.503	87,04			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		755.616.088	671.481.843	88,87			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		110.259.592	82.174.660	74,53			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	83,2%	83,15			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		36.208.608	35.593.260	98,3			
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga	42 Set	42 Set	100			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		49.056.000	30.683.000	62,55	Penyerapan anggaran tidak maksimal karena proses belajar dan ujian peserta didik dilakukan secara daring	Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang ada, sehingga pembelajaran lebih efektif dan anggaran pun terserap maksimal	
	Belanja Makan Minum Rapat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		24.994.984	15.898.400	63,61	Penyerapan anggaran tidak maksimal karena aktifitas belajar mengajar dilakukan secara daring, sehingga aktifitas disekolah berkurang, sehingga menyebabkan capaian kinerja kegiatan kurang maksimal	Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang telah disediakan	
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	35 buah	25 buah	71,43			
	belanja jasa kantor honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	8 orang/jp	0 orang/jp	0			
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor	182 variasi	100 variasi	54,95			
	belanja makan minum rapat	280 orang/kali	200 orang/kali	71,43			
SMPN 15		742.626.345	583.845.248	78,62			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		691.727.574	534.070.628	77,21			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,75 poin	81,89 poin	101,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	79,78 poin	115,24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	82,0 poin	83,86 poin	102,27			
Arah kebijakan : Peningkatan pemerataan akses pendidikan, penjaminan mutu pendidikan dan pemantapan strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan non formal/kesetaraan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		50.898.771	49.774.620	97,79			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	83,67%	0,00%	0			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100,0%	100			
Pengadaan Mebel Sekolah		50.898.771	49.774.620	97,79			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Belanja Modal Mebel Sekolah	21 Jenis	21 Jenis	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan amanat dari Permendagri 100 2018 dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan layanan pendidikan kepada masyarakat. Realisasi rata-rata pencapaian SPM pendidikan Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar 84,71 % dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Teknis SPM	Uraian Data	Kinerja
Rata rata pencapaian kinerja SPM Pendidikan	(Jumlah total capaian SPM Pendidikan / jumlah SPM pendidikan) x 100	$\frac{(81,99 + 97,74 + 99,52)}{3}$ $= 93,09\%$

Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi	(Jumlah pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikat sebagai pendidik terhadap jumlah seluruh pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP) x 100%	$\frac{(289 + 1520)}{(1588 + 2780 + 1213)}$ = 32,41%
Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang SD ditambah jenjang SMP ditambah jenjang PAUD	180 + 49 + 0 = 229 Dokumen
Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	(Jumlah sekolah PAUD, SD dan SMP yang memiliki izin terhadap jumlah seluruh sekolah PAUD, SD dan SMP) x 100%	$\frac{(263 + 181 + 50)}{(263 + 181 + 50)}$ = 100%
Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	(Jumlah siswa PAUD, SD dan SMP yang belajar bahasa daerah terhadap jumlah penduduk usia 5 - 15 tahun) x 100%	$\frac{(0 + 46868 + 14,140)}{92045}$ = 66,28%
Jumlah Even Kebudayaan Yang Diselenggarakan	Jumlah even kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun berjalan	12 Even
Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional Yang Dibina	(Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina terhadap Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang ditargetkan ditahun n) x 100	$\frac{4}{4}$ = 100%
Persentase Kajian Sejarah Yang Dilakukan	(Jumlah kajian sejarah yang dilakukan terhadap Jumlah kesejarahan yang ditargetkan ditahun n) x 100	$\frac{0}{0}$ = 0%

Capaian realisasi SPM Pendidikan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD dengan indikator kinerja yaitu jumlah ruang guru PAUD yang dibangun (DAK), sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator kinerja Jumlah peserta diklat Calon Pengawas dan Calon Kepala Sekolah di Kota Cilegon dan Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, lalu sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar dengan indikator kinerja jumlah penyediaan perlengkapan belajar Sekolah Dasar dan sub kegiatan penambahan ruang kelas baru dengan indikator kinerja jumlah ruang kelas baru yang dibangun lalu sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan indikator kinerja jumlah sekolah yang mendapat rehabilitasi ruang kelas SMP dan jumlah sekolah yang mendapat rehabilitasi ruang kelas SMP (DAK), hingga sub kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan indikator kinerja yaitu jumlah guru yang mengikuti pemantapan mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama.

Capaian realisasi Proporsi Pendidik yang telah Lulus Sertifikasi didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator kinerja jumlah guru yang terverifikasi dan validasi penerima tunjangan profesi.

Capaian realisasi Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang disusun dan disahkan, Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kurikulum dan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Nonformal yang disusun dan disahkan , dan sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD) dan (SMP) yang disusun dan disahkan.

Capaian realisasi Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Sekolah SD dan SMP yang dibutuhkan survey / penilaian kelayakan ijin operasi dan Jumlah sekolah SD dan SMP yang diterbitkan rekomendasi ijin operasional pada tahun berjalan lalu sub kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah sekolah PAUD dan lembaga Non Formal/Kesetaraan yang dilakukan survey/penilaian kelayakan ijin operasional dan Jumlah Sekolah PAUD dan lembaga Non Formal/Kesetaraan yang diterbitkan rekomendasi ijin operasional pada tahun berjalan.

Capaian kinerja Prioritas daerah (19 program) perlu dibuat kertas kerja dan dianalisis setelah analisis indikator program:

Indikator 19 Prioritas Daerah	Uraian Data	Kinerja
5.000 Beasiswa Full Sarjana	Pembilang: Jumlah mahasiswa yang sudah di terima di perguruan tinggi sebanyak : 1.701 Orang Penyebut: Jumlah calon mahasiswa penerima beasiswa full sarjana sebanyak : 2.000 Orang	85.05%
50% Kenaikan Honor Guru Honorer	Pembilang: Jumlah guru honorer yang telah menerima honor daerah Sebanyak 3.984 Penyebut: Jumlah guru honorer yang diberikan honor daerah sebanyak 3.984	100%
Pengukuhan Pahlawan Nasional Banten (KH. Wasyid dan KH. Arsyad Thowil)	Pembilang: Jumlah Kajian Sejarah yang dilakukan Penyebut: Jumlah Kesejerahan yang ditargetkan di tahun N	0 %

Dinas Pendidikan mengampu pemenuhan target prioritas daerah terkait **Peningkatan Sarpras Pendidikan yang berkualitas dan merata (PP 4)**, sebagai berikut :

- KP-4.1 Pembangunan SMP Negeri pada tahun anggaran 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
- KP-4.2 Pemenuhan sarpras sekolah sesuai standar pada tahun anggaran 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.

Peningkatan kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

- KP-4.3 50% peningkatan honor guru honorer pada tahun anggaran 2022 jumlah guru honorer yang mendapat 50% peningkatan honor sebanyak 3984 orang.
- KP-4.4 Sertifikasi pendidik, kepala sekolah dan kualifikasi pendidikan tenaga penunjang (PAUD, SD, SMP, Non Formal) pada tahun anggaran 2022 jumlah pendidik jenjang PAUD yang menerima sertifikasi sebanyak 289 orang dari total 1588 pendidik PAUD, pada jenjang Dikdas yang menerima sertifikasi sebanyak 1520 orang dari total 2780 Pendidik SD dan 1213 Pendidik SMP.

Peningkatan akses dan daya saing pendidikan.

- KP-4.5 Pemenuhan perlengkapan dasar dan perlengkapan siswa pada tahun anggaran 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, sub kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik, dan sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD
- KP-4.6 Beasiswa pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat) melalui mekanisme hibah bansos pada tahun anggaran 2022 untuk SD/ sederajat teranggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, sedangkan untuk SMP/ sederajat teranggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, dan untuk SMA/ sederajat Dinas Pendidikan Kota Cilegon tidak mengganggu karena berada di naungan Provinsi.
- KP-4.7 5000 beasiswa full sarjana, pada tahun anggaran 2022 sudah teranggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,054,163,406,- serapan anggaran sebesar Rp.7,321,705,710,-
- KP-4.8 Penyelenggaraan lomba-lomba prestasi pada tahun anggaran 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan prestasi Juara 3 Lomba Gitar Duet FLS2N SMP Tingkat Nasional Tahun 2022 , Juara 10 Lomba Musik Tradisional FLS2N SMP Tingkat Nasional Tahun 2022, dan Juara 2 Lomba Matematika KSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2022.
- KP-4.9 Kurikulum pada tahun 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dan sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.

Sedangkan terkait dengan pemenuhan prioritas daerah **“Peningkatan Destinasi Wisata dan Pelestarian Budaya Daerah” (PP 12)**, adalah sebagai berikut :

- KP-12.1 Penguatan Pahlawan Nasional pada tahun anggaran 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175,000,000,- serapan anggaran sebesar Rp.167,606,500,-
- KP-12.2 Pembangunan Monumen Geger Cilegon dan Museum Cilegon pada tahun anggaran 2022 teranggarkan pada sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum, akan tetapi anggarannya dibekukan.

3.1.1.2 Urusan Kesehatan

DINAS KESEHATAN, RSUD, UPTD PUSKESMAS, LABKESDA, P2KT DAN JAMKESMAS

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KESEHATAN		133.872.283.038	111.653.291.383	83,4			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94.914.383.309	80.084.675.312	84,38	pengaduan pelayanan kesehatan,masyarakat dapat menggunakan kanal pengaduan dinas kesehatan diantaranya SP4N-LAPOR, nomor pengaduan (087783799360), melalui media sosial FB maupun IG dinas kesehatan. untuk kedaruratan kesehatan masyarakat dapat menghubungi 119. c. Telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat baik oleh dinas kesehatan maupun oleh RSUD Kota Cilegon dengan hasil IKM dinas kesehatan yaitu 83.94 dan RSUD sebesar 80.99		Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Penanganan Pengaduan Pelayanan kesehatan melalui IT terhadap masyarakat yang membutuhkan dan bersifat urgent.
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		37.234.492.485	29.890.243.935	80,28	1. Belum semua pengadaan alat kesehatan dapat digunakan di pelayanan posyandu 2. Survei akreditasi belum terserap dikarenakan adanya	1. Pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan posyandu 2. Reschedule survei akreditasi di tahun yang akan datang	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Peningkatan Pelayanan Berbasis posyandu dengan menyiapkan satu

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					perubahan kebijakan di pusat		posyandu dan satu dokter umum.
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,8%	81,79			
Pembangunan Puskesmas		200.000.000	121.870.406	60,94	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretaris tim pelaksanaan kegiatan tidak terserap sebagian dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur. Kegiatan telah berjalan tanpa jasa iklan, Kegiatan telah cukup sehingga anggaran mamin rapat tidak dihabiskan	Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, maka honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretaris tim pelaksanaan kegiatan tidak perlu untuk direalisasikan karena dikhawatirkan melanggar ketentuan yang ada	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Peningkatan kualitas dan standar pelayanan Puskesmas
	Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Puskesmas Citangkil	1 paket	1 paket	100			
	Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Puskesmas Grogol	1 paket	1 paket	100			
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		530.000.077	448.235.600	84,57			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Peningkatan kualitas dan standar pelayanan Puskesmas
	Jumlah dokumen perencanaan (DED) IPAL puskesmas citangkil 2	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah instalasi pengolah limbah puskesmas citangkil 2	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah unit pengolah limbah puskesmas citangkil 2	1 set	1 set	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		5.650.000	0	0	Anggaran tidak di ambil karena belanja modal alat pengadaan IPAL Sudah 1 paket dengan bangunan (sipil)	Sudah terakomodir, kaji ulang untuk tahun berikutnya	
	jumlah dokumen perencanaan IPAL yang dibangun	1 dokumen	0 dokumen	0			
	jumlah instalasi farmasi yang dikembangkan menjadi UPT IFK (UPT INSTALASI FARMASI KOTA)	1 UPT	0 UPT	0			
	jumlah UPT Dinkes yang dikembangkan sesuai standar	3 fasyankes	0 fasyankes	0			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		2.297.978.906	2.243.021.460	97,61	Penyesuaian pengadaan Barang/produk dengan Peraturan Pemerintah mengenai TKDN		
	Puskemas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		972.499.900	837.025.292	86,07	Meningkatkan fasilitas pelayanan di posyandu dengan menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan d. Pendaftaran Online sudah di tersedia di Mobile JKN, perlu sosialisasikan kepada masyarakat e. Menurut Perpres No 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pada pasal 50 menyebutkan bahwa layanan rawat inap yang di akomodir ruang ruang perawatan kelas III. f. Kota Cilegon sudah mencapai Universal Health Coverage peroktober 2022 sebesar 96,81% i. Sudah 3 Puskesmas penambahan jam kerja pelayanan IGD		
	UPT Dinkes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	3 UPT	3 UPT	100			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		5.063.026.668	4.129.225.285	81,56	Barang/produk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai TKDN	Mencari barang yang sesuai dengan kualifikasi TKDN	
	Jumlah Pengadaan Antropometri (DAK)	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Jenis Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	289 Jenis Alat Kesehatan	286 Jenis Alat Kesehatan	98,96			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah pengadaan telekonsultasi	4 jenis	4 jenis	100			
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		150.000.000	139.500.000	93			
	Jumlah Alat Kesehatan yang di kalibrasi	19 Jenis	19 Jenis	100			
Pengadaan Obat, Vaksin		4.277.269.160	4.172.856.708	97,56			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Penjaminan stok obat untuk menjamin peningkatan layanan kesehatan
	Jumlah UPT yang menerima ketersediaan obat dan vaksin	10 UPT	10 UPT	100			
	Jumlah Puskesmas yang menerima ketersediaan obat dan vaksin	9 puskesmas	9 puskesmas	100			
Pengadaan Bahan Habis Pakai		6.804.806.572	5.967.598.577	87,7			
	Jumlah UPT yang menerima ketersediaan obat, bmhp dan vaksin	10 UPT	10 UPT	100			
	Jumlah pengadaan BMHP pemeriksaan gula darah (DAK)	1425 Unit	1425 Unit	100			
	Jumlah Puskesmas yang menerima ketersediaan BMHP	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Penjaminan stok obat untuk menjamin peningkatan layanan kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		71.719.000	71.719.000	100			
	Tersedianya Distribusi Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan (BOK)	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	89,5%	89,48			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		423.450.800	400.522.400	94,59			
	jumlah bulan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah peserta pertemuan orientasi simatneo (DAK)	50 orang	50 orang	100			
	jumlah peserta koordinasi LP/LS penguatan pelayanan kesehatan	45 orang	45 orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	reproduksi pada situasi krisis kesehatan (DAK)						
	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan GP2SP (DAK)	30 orang	0 orang	0			
	jumlah peserta kegiatan bimtek program kesehatan reproduksi dan KB termasuk pencatatan pelaporan (DAK)	25 orang	25 orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		207.761.000	138.651.000	66,74	Dikarenakan akses rujukan ke faskes lanjutan terlalu dekat maka tidak di realisasikan		
	Jumlah Transport rujukan neonatal dari rumah ke faskes lanjutan	288 orang	288 orang	100			
	Jumlah Transport Rujukan ibu hamil dan ibu bersalin dari Faskes pertama ke faskes lanjutan	661 orang	661 orang	100			
	Jumlah bulan pengelolaan ibu bersalin	12 bulan	12 bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		134.490.000	120.840.000	89,85			
	jumlah bulan pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		291.941.588	290.661.500	99,56			
	jumlah bulan pengelolaan pelayanan kesehatan balita	12 bulan	8 bulan	66,67			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		905.133.200	258.249.900	28,53	pengadaan cetak buku raport kesehatanku gagal lelang dikarenakan peserta lelang tidak memenuhi kualifikasi yang di tentukan dan waktu yang tidak memungkinkan untuk diadakan lelang ulang	dianggarkan kembali pada tahun 2023	
	jumlah peserta pengembangan posyandu remaja	50 Orang	50 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	jumlah pembinaan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah peserta pertemuan penguatan UKS/M dan TP UKS/M tingkat Kota	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah bulan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	12 bulan	11 bulan	91,67			
	jumlah peserta koordinasi pemberian tablet Tambah Darah pada remaja putri	50 orang	50 orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		232.247.000	166.148.250	71,54	Gagal Lelang		
	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Skrining PTM pada OPD	400 Orang	400 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Skrining PTM pada Masyarakat	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemeriksaan IVA pada Masyarakat	225 Orang	225 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengendalian PTM	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi SI PTM	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi untuk Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Validasi Data Skrining PTM	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Bulan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Formulir Pencatatan dan Pelaporan Faktor resiko PTM	50 Buku	0 Buku	0			
	Jumlah Pengadaan Media Konseling PTM	1000 Lembar	1000 Lembar	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		557.540.000	371.753.390	66,68	adanya efisiensi anggaran pada pengadaan cetak di kegiatan usila		
	jumlah bulan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	12 bulan	12 bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		95.232.000	95.232.000	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Konseling / Konselor untuk Klinik UBM	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah pengadaan bahan / Madie KIE	350 Lembar	350 Lembar	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Penatalaksanaan Hipertensi Pada Ibu Hamil	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Hipertensi dan Komplikasi Bagi Petugas Kesehatan	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi UBM Bagi Guru	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi UBM Bagi Petugas Kesehatan	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang melaksanakan monitoring ke Posbindu	180 Orang	180 Orang	100			
	Peringatan Hari Hipertensi Sedunia	9 Buah	9 Buah	100			
	Jumlah Bulan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		71.070.000	71.070.000	100	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi DM Anak Pada Guru	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi DM Komplikasi Pada Petugas Kesehatan	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Validasi data PTM	15 Orang	15 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Petugas yang melaksanakan monitoring ke Puskesmas	10 Orang	10 Orang	100			
	Peringatan Hari Diabetes Sedunia	12 Buah	12 Buah	100			
	Jumlah Bulan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah pengadaan bahan / Madie KIE	400 Lembar	400 Lembar	100			
	Jumlah Peserta yang Melaksanakan Evaluasi Pandu PTM di Puskesmas	90 Orang	90 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		96.645.000	90.645.000	93,79			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bintek ke Puskesmas	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembentukan UKM Peduli Kesehatan Jiwa	65 Orang	65 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA pada Komite Sekolah	70 Orang	70 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kesehatan Jiwa pada Keluarga Pasien ODGJ Berat	70 Orang	70 Orang	100			
	Jumlah Bulan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		267.077.617	261.054.200	97,74			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Orientasi TPT	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi ke Faskes	240 Orang	240 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Evaluasi Semester Seksi P2	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Hari TB Sedunia	150 Orang	150 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Penjaringan Kasus TB	90 Orang	90 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Bulanan SITB	385 Orang	385 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Pokja TB-HIV Tk. UPK	720 Orang	720 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Hari TB	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Validasi TB	160 Orang	120 Orang	75			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Validasi Kolaborasi Data TB-HIV	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Orientasi Tatalaksanaan Kolaborasi TB dengan Komorbid (TB-HIV, TB-DM)	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah WBP yang di screening TB	375 Orang	375 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		295.980.484	287.691.000	97,2			
	Jumlah Penjangkau yang melakukan Penjangkauan pada populasi resiko tinggi	192 Orang	192 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Mobile VCT	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Kampanye HIV di Masyarakat	222 Orang	222 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan HAS Sedunia 2022	150 Orang	150 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Mobile VCT	680 Orang	680 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Monev PPIA HIV ke UPK	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Orientasi PITC	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan P2 HIV di RS/Klinik	75 Orang	75 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Penguatan Jejaring ARV	80 Orang	80 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi HIV dan Survey Komprehensif	210 Orang	210 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi HIV pada Guru	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Layanan Komprehensif Berkesinambungan	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi HIV/AIDS dan IMS	148 Orang	148 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi P2HIV	180 Orang	180 Orang	100			
	Jumlah Fasilitas Layanan VCT yang Memiliki Sarana dan Operasional	15 Layanan	15 Layanan	100			
	Jumlah Fasilitas Layanan IMS Yang Memiliki Sarana dan Operasional	13 Layanan	13 Layanan	100			
	Jumlah Bulan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Fasilitas Layanan CST yang memiliki sarana dan operasional	9 Layanan	9 Layanan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		1.431.901.390	1.080.549.680	75,46	Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan sifatnya "kondisional"	-	
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Keberhasilan Penanggulangan pada Kondisi KLB	60 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan lainnya (BUS KPK)	2 HARI	2 HARI	100			
	jumlah petugas yang melaksanakan validasi data	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah petugas yang mengambil vaksin ke Dinas Kesehatan Provisi Banten	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Kontak	90 Orang	90 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kasus Covid-19 Kepada Puskesmas Hingga Petugas Tracer						
	Jumlah Petugas yang Mengikuti Pelacakan Kasus ISPA HPISP	135 Orang	135 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pelacakan Kontak/ Tracer	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Surveilans/ Pengolah Data di Puskesmas dalam Rangka Tracing Data dan Manajemen Data	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Covid-19	100 Orang	50 Orang	50			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Monev Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Covid-19	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Covid-19	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Penerima Honor Surveilans/ Pengolah Data bagi Petugas Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Petugas Tim Monitoring Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Tk.Kota	720 Orang	131 Orang	18,19			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19 TK.Kota	11 Kali	11 Kali	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi alam Upaya Pelayanan Kesehatan pada Kondisi KLB	300 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan dalam Penanggulangan pada Kondisi KLB	60 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerja	120 Orang	120 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	dalam Upaya Pelayanan Kesehatan pada Kondisi KLB						
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Kondisi KLB	100 Orang	100 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		250.000.000	93.909.800	37,56	Ada beberapa kegiatan yang belum dikerjakan, karena disesuaikan dengan kejadian bencana berlangsung (Kondisional)		
	Jumlah peserta yang mengikuti simulasi penanggulangan krisis kesehatan bagi kader	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti Rakor kegiatan upaya penanggulangan Resiko Krisis Kesehatan	120 Orang	160 Orang	133,33			
	Jumlah peserta yang melakukan pelayanan kesehatan akibat bencana	20 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Jumlah peserta yang melaksanakan monitoring dan supervisi akibat bencana/ potensi bencana	20 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan Resiko Krisis Kesehatan	120 Orang	120 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		932.868.453	887.730.200	95,16	Kegiatan Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat Makanan Tambahan terkendala TKDN pada jenis bahan Makanan Tambahan tersebut dan Kegiatan bersumber dana DAK baru dapat dicairkan oleh Pusat dan DPA DAK blm disahkan	Berkoordinasi dengan penyedia Makanan Tambahan terkait TKDN dan menunggu DPA DAK disahkan.	
	Jumlah peserta Evaluasi e-PPGBM	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pertemuan Konvergensi Rencana Aksi Cegah Stunting	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta Penguatan Pengukuran dan Publikasi Rencana Aksi Stunting	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Alat Ukur Antropometri dalam rencana Aksi Stunting	53 Kit	53 Kit	100			
	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Makanan Tambahan Masyarakat	216 Balita	216 Balita	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Pertemuan Validasi Data Program Gizi	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Peserta Orientasi Ruang ASI di tempat-tempat umum	50 Orang	50 Orang	100			
	jumlah peserta kegiatan penyusunan PERWAL terkait stunting (DAK Stunting)	50 orang	50 orang	100			
	jumlah peserta pemetaan dan analisa situasi program stunting(DAK Stunting)	70 orang	70 orang	100			
	jumlah peserta pendataan dalam rangka pemetaan situasi program stunting(DAK Stunting)	56 Orang	56 Orang	100			
	jumlah peserta kegiatan promosi/kampanye terkait perbaikan gizi masyarakat(DAK)	40 orang	40 orang	100			
	jumlah peserta pelaksanaan rembug stunting(DAK Stunting)	80 orang	80 orang	100			
	Jumlah peserta pengumpulan dan pelaporan data terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat(DAK)	50 orang	50 orang	100			
	jumlah peserta pelatihan optimalisasi gizi pada masa 1000 HPK bagi kader(DAK Stunting)	60 orang	60 orang	100			
	jumlah peserta pertemuan koordinasi pencatatan dan pelaporan (trmsk dokumentasi) intervensi dan hasil dalam penguatan pemantauan tumbuh kembang balita(DAK Stunting)	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah peserta pertemuan diseminasi surveilan gizi(DAK)	40 orang	40 orang	100			
	Jumlah Peserta Orientasi PAG Puskesmas	60 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kader dalam komunikasi antar pribadi terkait stunting (DAK Stunting)	60 orang	60 orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Kegiatan orientasi bagi petugas dalam penerapan strategi komunikasi perubahan prilaku dan komunikasi antar pribadi (DAK)	40 orang	40 orang	100			
	jumlah peserta pertemuan review kinerja tahunan aksi integrasi stunting(DAK Stunting)	50 orang	50 orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		219.208.374	217.417.900	99,18	sudah dilaporkan dan menunggu verifikasi	sudah dilaporkan dan menunggu verifikasi	
	Media Edukasi pembinaan Kesehatan kerja dan olah raga	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Peningkatan kapasitas pekerja melalui pos ukk	4 pos ukk	4 pos ukk	100			
	Jumlah karyawan yang dilakukan pemeriksaan medical check up	95 orang	95 orang	100			
	Jumlah karyawan yang mengikuti senam sehat	25 orang	25 orang	100			
	Jumlah pembentukan pos UKK baru	4 pos ukk	4 pos ukk	100			
	Jumlah peserta kegiatan koordinasi kesehatan olahraga	60 orang	60 orang	100			
	Jumlah peserta kegiatan koordinasi kesehatan kerja	60 orang	60 orang	100			
	Jumlah peserta pertemuan tim kesja	20 orang	20 orang	100			
	Jumlah peserta koordinasi GP2SP tk Kota	30 orang	30 orang	100			
	Jumlah peserta sosialisasi advokasi pengukuran kebugaran melalui aplikasi sipgar	40 orang	36 orang	90			
	Jumlah kegiatan pengukuran kebugaran pada kelompok masyarakat tertentu	7 kegiatan	7 kegiatan	100			
	Belanja Alat Bahan Habis pakai untuk -Bahan Cetak	1483 lembar	1483 lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		638.388.000	423.897.694	66,4	Efek <i>force majeure</i> pandemi covid banyak terjadi penundaan terhadap perencanaan kegiatan dan ada	Menjadwalkan ulang kegiatan yang belum terlaksana sesuai perencanaan	
	jumlah pemeriksaan kualitas sampel air pemukiman	144 sampel	144 sampel	100			
	Jumlah Cetakan Bahan Lainnya	637 lembar	300 lembar	47,1			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah fasyankes yang dilakukan monitoring	48 lokasi	20 lokasi	41,67	beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan yang padat dan singkat		
	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan pangan	35 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Jumlah lokasi pemeriksaan sampel air kolam renang	8 lokasi	0 lokasi	0			
	Jumlah peserta desiminasi program kesling	30 orang	30 orang	100			
	Jumlah peserta orientasi sanitasi total berbasis masyarakat	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah peserta sosialisasi kantin sekolah sehat	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah Peserta sosialisasi pengelolaan limbah medis	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah TTU yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan	27 lokasi	0 lokasi	0			
	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi percepatan ODF dan 5 pilar	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah Peserta Sosialisasi dalam rangka penghapusan alkes bermerkuri pada fasyankes	40 orang	40 orang	100			
	Jumlah peserta pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor pengelolaan limbah isolman	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah Inspeksi sanitasi dasar tempat jajanan/kantin sekolah	45 lokasi	0 lokasi	0			
	Jumlah Inspeksi sanitasi dasar depot air minum	90 lokasi	90 lokasi	100			
	Jumlah inspeksi sanitasi dasar pada jasa boga, rumah makan/restoran (TPP)	42 lokasi	0 lokasi	0			
	Jumah PC unit	2 buah	2 buah	100			
	Jumlah Pengangkutan dan Pemusnahan limbah medis	11360 Kg	11360 Kg	100			
	Jumlah peserta pelatihan Tim Enumerator	60 peserta	60 peserta	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		135.747.000	135.459.000	99,79	tidak ada permasalahan	tidak ada	
	Jumlah bulan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah peserta edukasi gizi seimbang pada kelompok pos UKK Kota Cilegon	160 Orang	160 Orang	100			
	Jumlah peserta edukasi gizi seimbang pada kelompok lansia Kota Cilegon	80 Orang	80 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		114.549.700	113.027.268	98,67			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pelayanan kesehatan: a. Meningkatkan fasilitas pelayanan di posyandu

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pengelolaan layanan kesehatan tradisional, akupunktur dan tradisional lainnya	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			dengan menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan b. Pendaftaran Online sudah di tersedia di Mobile JKN, perlu sosialisasi kepada masyarakat c. Menurut Perpres No 82/ 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pada pasal 50 menyebutkan bahwa layanan rawat inap yang di akomodir ruang perawatan kelas III. d. Kota Cilegon sudah mencapai <i>Universal Health Coverage</i> per Oktober 2022 sebesar 96,81% e. Sudah 3 Puskesmas penambahan jam kerja pelayanan IGD
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		46.845.000	44.544.000	95,09			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Validasi Data Sureilans	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi Surveilans Tk.Kota	50 Orang	50 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan Olah Data dan Analisis bagi Surveilans	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Inferm Update	60 Orang	60 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		218.996.000	91.625.000	41,84	dikarenakan tidak adanya pasien napza yang dirujuk ke Rumah Sakit Lido, maka anggaran tidak direalisasikan		
	Jumlah Buku pedoman PPDGJ	40 Buku	40 Buku	100			
	Jumlah Pengadaan Buku Kerja	600 Buku	0 Buku	0			
	Jumlah Pengadaan Formulir	30 Buku	30 Buku	100			
	Jumlah Penggandaan Materi	500 Buku	0 Buku	0			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Konsulen Dokter SpKj	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti TAK (Terapi Aktivitas Kelompok)	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Validasi Data Keswa	15 Orang	15 Orang	100			
	Peringatan Hari Kesehatan Jiwa SeDunia	11 Buah	11 Buah	100			
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		80.020.000	80.020.000	100	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas petugas kesehatan	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan kesehatan indera di masyarakat	225 Orang	225 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi indera pada Tenaga Kesehatan	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Kesehatan indera pada Guru	60 Orang	60 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang mengikuti Validasi data indera	15 Orang	15 Orang	100			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		2.254.759.699	2.184.053.349	96,86			
	Jumlah posko pengendali pelayanan kesehatan arus mudik	1 Posko	1 Posko	100			
	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi	80 orang	80 orang	100			
	jumlah posko pengendali pelayanan kesehatan dalam rangka Natal dan Pergantian Tahun Baru	1 posko	1 posko	100			
	jumlah posko mandiri pelayanan kesehatan dalam rangka Natal dan Pergantian Tahun Baru	4 posko	4 posko	100			
	jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi persiapan perayaan Natal dan Pergantian Tahun baru	40 orang	40 orang	100			
	jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Evaluasi kegiatan perayaan Natal dan Pergantian Tahun baru	40 orang	0 orang	0			
	Jumlah posko mandiri pelayanan kesehatan arus mudik	5 Posko	5 Posko	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti persiapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji tahap kedua tahun 2022	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan validasi data Imunisasi	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan advokasi campaign imunisasi MR	120 Orang	120 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pra persiapan pelaksanaan campaign imunisasi MR	120 Orang	120 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi pasca pelaksanaan	50 Orang	50 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	vaksin covid-19 imunisasi MR spesialis anak						
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan BIAS	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi haji Tk. Kota	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah peserta yang melaksanakan monitoring dan supervisi pelaksanaan campaign imunisasi MR	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelaksanaan campaign imunisasi MR	100 Orang	100 Orang	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		728.563.414	671.985.930	92,23			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pelayanan kesehatan: a. Meningkatkan fasilitas pelayanan di posyandu dengan menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan b. Pendaftaran Online sudah di tersedia di Mobile JKN, perlu sosialisasikan kepada masyarakat c. Menurut Perpres No 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pada pasal 50 menyebutkan bahwa layanan rawat inap yang di
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan ISPA bagi Guru UKS	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembentukan Rabies Center	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Deteksi Dini Hepatitis B pada Kelompok Resti	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumanik Tingkat Kecamatan	288 Orang	288 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Fogging Focus yang dilaksanakan	141 Fokus	111 Fokus	78,72			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti pertemuan Monev Intensifikasi dan Frambusia	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Monev POPM Kecacingan	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi POPM Kecacingan di masyarakat	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan Pemberdayaan	120 Orang	120 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV - AIDS						akomodir ruang ruang perawatan kelas III. d. Kota Cilegon sudah mencapai <i>Universal Health Coverage</i> per Oktober 2022 sebesar 96,81% e. Sudah 3 Puskesmas penambahan jam kerja pelayanan IGD
	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Lintas Program Hepatitis	47 Orang	47 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Lintas Sektor Kawasan Tanpa Rokok Pada OPD (PTM)	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Supervisi pelaksanaan pemberian Obat Cacing pada usia 1- 12 tahun	135 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Pemberian Therapy Pencegahan Profilaksis (PPINH pada Anak) di Puskesmas	72 Orang	72 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Program Kesehatan Jiwa dan Napza ke Puskesmas (PTM)	135 Orang	135 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ke Puskesmas	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ke Puskesmas (PTM)	135 Orang	135 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pemeriksaan Kontak dan Kemoprofilaksis Kusta	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Diare bagi tenaga pendidik	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Hepatitis dan Typhoid bagi tenaga non kesehatan	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Hepatitis di masyarakat	46 Orang	46 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan ISPA Diare di masyarakat	46 Orang	46 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kusta dan Frambusia di masyarakat	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan Kader Paguyuban TB	234 Orang	234 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Penguatan Program Kusta dan Frambusia	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Penguatan Program P2BB Terpadu	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Pertemuan Integrasi Program Kusta dan Frambusia Tingkat Kota	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi Program ISPA HPISP	72 Orang	72 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi Program Kusta dan Frambusia	72 Orang	72 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi Program P2BB	108 Orang	108 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Survei Jentik	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi Kusta dan Frambusia	68 Orang	68 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi P2BB	72 Orang	72 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi Program ISPA HPISP	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis pencatatan dan pelaporan Si PTM ke Puskesmas (PTM)	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pencatatan dan	45 Orang	45 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaporan Kesehatan Jiwa ke Puskesmas (PTM)						
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Tripple Eliminasi ke Puskesmas	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan HIV - AIDS	36 Orang	36 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembentukan Kader Peduli Kusta	70 Orang	70 Orang	100			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		49.999.900	49.959.440	99,92	Anggaran Jamkesda akan dibuat ABT, Karena Kegiatan Jamkesda Bertentangan dengan PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021 tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022	Membuat surat ke KEMENDAGRI	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pelayanan kesehatan: a. Meningkatkan fasilitas pelayanan di posyandu dengan menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan b. Pendaftaran Online sudah di tersedia di Mobile JKN, perlu sosialisasikan kepada masyarakat c. Menurut Perpres No 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pada pasal 50 menyebutkan bahwa layanan rawat inap yang di akomodir ruang
	Jumlah Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							ruang perawatan kelas III. d. Kota Cilegon sudah mencapai <i>Universal Health Coverage</i> per Oktober 2022 sebesar 96,81% e. Sudah 3 Puskesmas penambahan jam kerja pelayanan IGD
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		24.999.900	24.600.000	98,4	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Konseling dan Skrining Kesehatan Jiwa dan NAPZA pada Anak Sekolah	50 Orang	50 Orang	100			
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		100.000.000	22.990.000	22,99	kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan keadaan kasus yang ada di Kota Cilegon (Kondisional)		
	Jumlah Bulan Pengambilan an Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	90 Kasus	20 Kasus	22,22			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		468.988.243	461.588.099	98,42	kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat (Rapat Kerja Kota Sehat, Rapat koordinasi Kota Sehat, rapat Evaluasi Kota Sehat, Refreshing Tim Pembina Kota Sehat) belum dapat direalisasikan dikarenakan masih berprosesnya SK Kota	terus berlanjut untuk berkoordinasi kepada pihak terkait.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sehat Periode Tahun 2022-2025		
	Jumlah peserta monev implementasi Perwal STBM	35 orang/kegiatan	35 orang/kegiatan	100			
	Jumlah peserta rapat evaluasi kota sehat	30 orang	30 orang	100			
	Jumlah peserta rapat koordinasi kota sehat	30 orang	30 orang	100			
	Jumlah peserta refreshing tim pembina kota sehat	30 orang	30 orang	100			
	Jumlah peserta yang menghadiri rapat kerja kota sehat	30 orang	30 orang	100			
Operasional Pelayanan Rumah Sakit		870.000.000	280.909.136	32,29	Pencairan menggunakan perhitungan ratio vaksinasi		Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pelayanan kesehatan: a. Meningkatkan fasilitas pelayanan di posyandu dengan menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan b. Pendaftaran Online sudah di tersedia di Mobile JKN, perlu sosialisasikan kepada masyarakat c. Menurut Perpres No 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pada pasal 50 menyebutkan bahwa layanan rawat inap yang di akomodir ruang
	Jumlah Tim Vaksinator yang melakukan Vaksinasi Covid-19	6 Bulan	6 Bulan	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.410.000.000	862.045.590	61,14	Pencairan menggunakan perhitungan ratio vaksinasi		
	Jumlah Tim Vaksinator yang mengikuti Pelayanan Vaksinasi Covid-19	6 Bulan	6 Bulan	100			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.370.000.000	840.909.321	35,48	Pencairan menggunakan perhitungan ratio vaksinasi		
	Jumlah Tim Vaksinator yang melakukan Vaksinasi Covid-19	6 Bulan	6 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							ruang perawatan kelas III. d. Kota Cilegon sudah mencapai <i>Universal Health Coverage</i> per Oktober 2022 sebesar 96,81% e. Sudah 3 Puskesmas penambahan jam kerja pelayanan IGD
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		351.532.000	106.460.800	30,28	Adanya perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan di kemenkes maka kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan	reschedule	
	Jumlah Puskesmas yang Memenuhi Persyaratan Akreditasi	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			
	Jumlah Puskesmas Yang di Survei Akreditasi Puskesmas	6 puskesmas	6 puskesmas	100			
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		50.000.000	10.820.000	21,64	sehubungan tidak banyaknya kasus KIPi sehingga sebagian anggaran tidak terealisasi		
	Jumlah pelayanan kesehatan dengan kasus KIPi	7 Kasus	1 Kasus	14,29			
	Jumlah peserta yang mengikuti monitoring supervisi kasus KIPi	12 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi KIPi	90 Orang	30 Orang	33,33			
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		25.000.000	19.500.000	78			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rakor Kewaspadaan Dini Tk. Kota	60 Orang	60 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Refresh SKDR	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Refresh TGC	30 Orang	30 Orang	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		73.000.000	70.606.400	96,72	Sewa Efarmasi : Aplikasi belum digunakan secara maksimal dan belum adanya MOU dengan pihak ke tiga	Anggaran akan dialihkan pada saat ABT	
	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pelayanan kesehatan: a. Meningkatkan fasilitas pelayanan di posyandu dengan menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan b. Pendaftaran Online sudah di tersedia di Mobile JKN, perlu sosialisasikan kepada masyarakat c. Menurut Perpres No 82/2018
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		69.996.104	69.723.040	99,61	Masih proses verifikasi dan penandatanganan SPJ	Meningkatkan koordinasi dengan bagian keuangan	
	Jumlah fasyankes yang dilaksanakan tindak lanjut pengawasan perizinan fasyankes	58 fasyankes	58 fasyankes	100			
	Jumlah RS yang dilaksanakan tindak lanjut pengawasan perizinan RS Kelas C, D	7 Rumah Sakit	7 Rumah Sakit	100			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		268.010.336	262.982.650	98,12	tidak ada masalah	tidak ada masalah	
	Jumlah Puskesmas Yang Dilaksanakan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		99.600.000	99.358.670	99,76	sedang dalam pengerjaan SPJ	Menunggu pencairan	Tentang Jaminan Kesehatan Pada pasal 50 menyebutkan bahwa layanan rawat inap yang di akomodir ruang ruang perawatan kelas III. d. Kota Cilegon sudah mencapai <i>Universal Health Coverage</i> per Oktober 2022 sebesar 96,81% e. Sudah 3 Puskesmas penambahan jam kerja pelayanan IGD
	Jumlah RS Rujukan yang memiliki sarana prasarana dan alat sesuai standar	3 RS	3 RS	100			
	Jumlah RS Rujukan yang menerapkan integrasi data	3 RS	3 RS	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.287.445.565	1.254.627.736	97,45	- Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan banyak ditemukan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah tidak berlaku - Penginputan dan update data pada aplikasi SISDMK belum maksimal	- Melakukan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan kepada tenaga kesehatan yang bermasalah tersebut - Memberikan surat teguran untuk tidak memberikan pelayanan bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP dan STR - Melakukan koordinasi, monitoring kepada penanggung jawab SISDMK di Fasyankes agar melakukan update data terkait SDM kesehatan yang ada di Fasyankes tersebut	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		99.996.646	88.127.616	88,13			
	Jumlah Peraturan tentang Perizinan yang di Sosialisasikan	2 peraturan	2 peraturan	100			
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		99.999.795	99.783.720	99,78			
	Sosialisasi peraturan bidang kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		37.899.310	37.801.100	99,74			
	Jumlah Peserta Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	130 orang hari	130 orang hari	100			
	Jumlah Petugas Monitoring Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian di UPT Dinas Kesehatan	72 orang hari	72 orang hari	100			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.049.549.814	1.028.915.300	98,03			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan kapasitas SDM Kesehatan	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100			
	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Lomba Nakes Teladan	32 orang	32 orang	100			
Arah kebijakan : Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan beresiko serta penguatan laboratorium kesehatan							
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		242.950.679	234.290.500	96,44	Faktor Pendorong Realisasi melebihi Target yang ada, yaitu : 1. Indikator Pangan IRT : adanya perubahan UU Cipta terkait Perizinan bahwa ijin harus diterbitkan tanpa adanya survey sarana dari Dinkes Cilegon 2. Indikator Sarana Distribusi Pelayanan Kefarmasian (Yanfar): dengan adanya edaran terkait cemaran sirup yang mengandung EG dan DEG maka pengawasan sarana Yanfar lebih intens	1. Indikator Pangan IRT : Melakukan pembinaan & pengawasan terkait Pemenuhan Komitmen sarana Produksi PIRT yang sudah dikeluarkan ijin melalui OSS RBA 2. Indikator Sarana Distribusi Yanfar : Pembinaan, pengawasan dan perbaikan CAPA (Corrective Action Preventif Action) pada sarana Yanfar	
	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat	68,00%	86,00%	126,47			
	Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Standar	68,00%	88,00%	129,41			
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	100%	86,1%	86,11			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		112.806.893	111.718.200	99,03			
	Jumlah Petugas Pengawasan Obat dan Pangan di Sarana Distribusi	320 orang hari	320 orang hari	100			
	Jumlah Peserta Sosialisasi POM	65 orang hari	65 orang hari	100			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan	65 orang hari	65 orang hari	100			
	Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan	135 orang hari	60 orang hari	44,44			
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	66,7%	66,67			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		43.016.000	35.673.000	82,93			
	Jumlah peserta pelatihan higiene sanitasi jasa boga	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah peserta pelatihan higiene sanitasi depot air minum	80 orang	80 orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah pemeriksaan kualitas sampel uji petik depot air minum	38 sampel	0 sampel	0			
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	100,0%	100			
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		87.127.786	86.899.300	99,74			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pangan Jajanan Anak Sekolah	550 orang hari	550 orang hari	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		193.011.000	189.453.900	98,16	Masih terdapat 3 indikator IKS yang belum memenuhi target yaitu : hipertensi, ODGJ dan merokok	- Berkerjasama dengan program terkait yaitu program penyakit tidak menular bidang UKP UKM untuk menindaklanjuti hasil tersebut - Melakukan intervensi dengan kunjungan rumah ke masyarakat sasaran sesuai indikasi terkait	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD : 1. Posyandu merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang mana pelaksana utamanya adalah kader posyandu 2. Posyandu secara pembinaan dibawah DP3AP2KB 3. perwal 73 th 2022 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain yang termasuk adalah Posy 4. Pelayanan posyandu
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		49.940.000	49.383.900	98,89			
	Jumlah Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	5 media cetak	5 media cetak	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			menitikberatkan pada keg promotif preventif sehingga nakes dapat dilibatkan sesuai kebutuhan pely yg diperlukan tdk harus tenaga dokter point G Telah melaksanakan penyebarluasan informasi kesehatan melalui media sosial, media elektronik, media massa dan media cetak.
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		143.071.000	140.070.000	97,9			
	Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100			
	Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	28 kelurahan	28 kelurahan	100			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		200.973.157.199	160.145.766.382	79,69			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		183.495.948.192	150.319.597.118	81,92	1. Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 72% (Efisiensi Anggaran) 2. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD	Tidak Ada	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (%) Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					RSUD tidak perlu menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan		
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	53,0 poin	86,24 poin	162,72			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	83,94 poin	105,32			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		14.921.683.007	7.778.057.769	52,13	1. Terkendala pergantian PPK pada RSUD, sehingga penyusunan Dokumen pengengadaan serta dokumen lainnya untuk realisasi pelaksanaan kegiatan terhambat 2. Pada awal tahun pengadaan melalui e-catalog turun tayang, e-catalog tayang pada bulan april 3. Barang yang sudah ada tayang di e-catalog ternyata tidak memenuhi unsur persyaratan TKDN	1. Segera dilakukan penyusunan dokumen pengadaan serta dokumen lainnya dalam rangka peaksanaan realisasi kegiatan fisik dan non Fisik 2. Proses seleksi melalui TKDN 3. Penyesuaian Cash Budget	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD : 1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2.
	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	84,9%	84,85			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengembangan Rumah Sakit		3.246.628.500	100.283.000	3,09	Terkendala pergantian PPK pada RSUD, sehingga penyusunan Dokumen pengengadaan serta dokumen lainnya untuk realisasi pelaksanaan kegiatan terhambat	Segera dilakukan penyusunan dokumen pengadaan serta dokumen lainnya dalam rangka peaksanaan realisasi kegiatan fisik dan non Fisik	Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
	Jumlah Dokumen DED Gedung Lima Lantai RSUD Yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Dokumen Revisi Master Plan RSUD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Maket Gedung RSUD Yang Dibuat	1 Set	0 Set	0			
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.510.660.000	574.695.000	38,04	1. Pada awal tahun pengadaan melalui e-catalog turun tayang, e-catalog tayang pada bulan april; 2. Barang yang sudah ada tayang di e-catalog ternyata tidak memenuhi unsur persyaratan TKDN.	1. Proses seleksi melalui TKDN; 2. Penyesuaian Cash Budget.	
	Jumlah Autopsy Table yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Motuary Refrigerator yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4.113.692.000	2.726.431.920	66,28	Harga belum termasuk ongkos kirim alat Biometry A Scan yang mendapat rekomendasi user setelah dilakukan presentasi dan memiliki keunggulan dengan fitur yang dibutuhkan oleh user,	Memperhitungkan ongkos kirim dan tingkat inflasi dalam merencanakan pembelian alat pada waktu yang akan datang.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (%) Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					melebih pagu yang tersedia.		
	Jumlah Biometry A Scan yang tersedia	1 Unit	0 Unit	0			
	Jumlah Suction Flowmeter yang tersedia	24 Unit	24 Unit	100			
	Jumlah Flowmeter Oksigen yang tersedia	111 Unit	111 Unit	100			
	Jumlah Pachoemulsification System yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Tensimeter yang tersedia	30 Unit	30 Unit	100			
	Jumlah Alat Kedokteran Tht Lainnya (Bera) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Electric Table (MEJA OPERASI) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah ELECTRIC CAUTER (MESIN CAUTER) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Utility Trolley yang tersedia	36 Unit	36 Unit	100			
	Jumlah Stetoscope yang tersedia	46 Unit	46 Unit	100			
	Jumlah Instrumen Cabinet yang tersedia	36 Unit	36 Unit	100			
Pengadaan Obat, Vaksin		4.000.000.000	3.081.962.269	77,05	Keterbatasan waktu pengadaan, Pengadaan melalui ekatalog, penyedia yang tayang pada akhir tahun sangat sedikit, produk ada yang turun tayang sehingga mempengaruhi proses pemesanan pada e katalog dan beberapa barang stock kosong di distributor, P	Pelaksanaan realisasi kegiatan disesuaikan dengan tahapan yang sudah direncanakan	
	Tersedianya Alat Bahan Habis Pakai Reagent Laboratorium	1 Paket	1 Paket	100			
	Tersedianya Bahan Alat Habis Pakai	1 Paket	1 Paket	100			
	Tersedianya obat-obatan	1 Paket	1 Paket	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.000.000.000	902.146.950	90,21			
	Jumlah Board DC USG yang tersedia	1 unit	1 unit	100			
	Jumlah Power Suplay, Part Gantry CT-SCAN yang tersedia	1 unit	1 unit	100			
	Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang terkalibrasi	23 jenis	23 jenis	100			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	63,6%	63,64			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		300.000.000	0	0	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan Anggaran	Tidak Ada	
	Jumlah Tersedianya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		199.000.000	98.500.000	49,5	Proses pengadaan menunggu Pergantian PPK	tetap dilaksanakan sehingga iklan baru tayang pada bulan april	
	Belanja Advertorial di media cetak lokal	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		551.702.507	294.038.630	53,3	kegiatan Survei simulasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jadwal survei simulasi rencananya di jadwalkan bulan Desember 2022, terdapat perubahan jadwal pelaksanaan pada tahun 2023, sehingga terdapat silpa dengan uraian di	Bidang Mutu dan Akreditasi	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dalamnya, Belanja Makan minum rapat, Belanja Bimbingan teknis, Sewa Hotel dan Narasumber		
	Kegiatan Pendampingan Upload sidokar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Sosialisasi Budaya Keselamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Sosialisasi sidokar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan FMEA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Upaya Capaian Indikator Mutu Rumah Sakit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Pendampingan Penguatan Mutu Rumah sakit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Sosialisasi Zoom Meeting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Revisi Dokumen Bimbingan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Bimbingan kARS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Survei Simulasi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Kegiatan Survey Internal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		2.555.526.000	2.048.111.495	80,14	Realisasi Kinerja Output Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 64,25% (Efisiensi Anggaran)	Tidak Ada	
	Presentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		2.338.351.000	1.908.571.495	81,62			
	Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya untuk Penanganan COVID-19	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		217.175.000	139.540.000	64,25	"Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 64,25% (Efisiensi Anggaran) "	Tidak Ada	
	Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	150 Orang	150 Orang	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon		2.754.242.114	2.561.734.985	93,01			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		927.001.114	836.087.877	90,19			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.709.891.000	1.608.938.608	94,1			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,8%	81,77			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		66.750.000	64.460.000	96,57	Keterlambatan Pengesahan DPA, kegiatan rujukan ibu hamil tidak di cairkan karan sudah terakomodir dari p2kt	Anggaran Baru dapat terealisasikan di Bulan Juli	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian materi kesehatan pada bimbingan perkawinan atau konseling pranikah di KUA atau lembaga agama (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Luar Gedung (Kunjungan Ibu Hamil Resti)	180 Orang/Kali	180 Orang/Kali	100			
	Jumlah Pendataan Ibu Hamil	30 Orang / Kali	30 Orang / Kali	100			
	Jumlah Rujukan Ibu Hamil	18 Orang / Kali	0 Orang / Kali	0			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi e-kohort (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat koordinasi validasi dan evaluasi data PWS KIA (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		37.390.000	35.800.000	95,75	Keterlambatan Pengesahan DPA, kegiatan rujukan ibu bersalin tidak di cairkan karena sudah terakomodir dari p2kt	Anggaran Baru dapat terealisasikan di Bulan Juli	
	Jumlah Pendataan Ibu Bersalin	195 Orang / Kali	195 Orang / Kali	100			
	Jumlah Rujukan Pertolongan Persalinan	24 Orang / Kali	0 Orang / Kali	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi P4K Bagi Bidan, Kepala Desa/Kelurahan, Kader, Tokoh Masyarakat Desa, dll (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitas KIA Bagi Puskesmas dan PMB (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		10.140.000	7.700.000	75,94	Keterlambatan Pengesahan DPA	Anggaran Baru dapat terealisasikan di Bulan Juli	
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Luar Gedung (Kunjungan Rumah Neobatus)	76 Orang/Kali	76 Orang/Kali	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatus dan Bayi Oleh Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga Lainnya (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		27.107.000	26.600.000	98,13	Keterlambatan Pengesahan DPA	Anggaran Baru dapat terealisasikan di Bulan Juli	
	Jumlah Pelaksanaan Validasi Gizi Buruk	30 Orang / Kali	30 Orang / Kali	100			
	Sweeping Vitamin A	20 Orang/Kali	20 Orang/Kali	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Bulan penimbangan (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Sweeping Balita	76 Orang/Kali	76 Orang/Kali	100			
	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Balita Usia 0-59 Bulan	128 Orang / Kali	128 Orang / Kali	100			
	Jumlah Pemberian Vitamin A di Posyandu	20 Orang / Kali	20 Orang / Kali	100			
	Jumlah Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	20 Orang / Kali	20 Orang / Kali	100			
	Jumlah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	76 Orang / Kali	76 Orang / Kali	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		52.195.000	50.255.000	96,28	Keterlambatan Pengesahan DPA		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Berkala Pada Anak Usia SD	68 Orang/kali	68 Orang/kali	100			
	Jumlah Penjarangan/Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (SD)	85 Orang/kali	85 Orang/kali	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		4.200.000	3.200.000	76,19	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	
	Jumlah Skrining Faktor Resiko PTM Usia 15-59	64 Orang/Kali	64 Orang/Kali	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		11.880.000	10.850.000	91,33	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
	Jumlah Skrining Kesehatan Lansia	88 Orang/kali	48 Orang/kali	54,55			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Caregiver Informal Oleh Puskesmas (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		6.330.000	6.300.000	99,53	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
	Jumlah Pendataan Penderita Hipertensi	120 Orang/kali	60 Orang/kali	50			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		3.330.000	3.329.900	100	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
	Jumlah Penyuluhan/Edukasi DM	52 Orang/Kali	52 Orang/Kali	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		2.820.000	2.418.300	85,76	Tidak ada Masalah	Tidak ada	
	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Rumah	48 Orang/kali	24 Orang/kali	50			
	Jumlah Rujukan Pasien ODGJ	8 Orang/kali	0 Orang/kali	0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		8.340.000	8.070.500	96,77	Tidak Ada Permasalahan	Tidak ada	
	Jumlah Peserta Hadir dalam Kegiatan Edukasi Kesehatan Orang Terduga TB	529 Orang/Kegiatan	264 Orang/Kegiatan	49,91			
	Jumlah Kunjungan Rumah Pemeriksaan TB	48 Orang/Kali	42 Orang/Kali	87,5			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		4.200.000	3.600.000	85,71	Kegiatan Belum Terlaksana	Kegiatan di laksanakan di bulan berikutnya	
	Jumlah Pemeriksaan Deteksi Dini HIV	40 Orang/Kali	8 Orang/Kali	20			
	Jumlah Promosi Kesehatan dan Penyuluhan	40 Orang/Kali	40 Orang/Kali	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		34.956.000	34.955.900	100	Keterlambatan Pengesahan DPA	Anggaran Dapat Terealisasi di Bulan Juli	
	Honor Pengolah data kasus Covid-19 di puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelacakan kontak dan Pemantauan harian selama karantina dan/ atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		69.340.000	68.320.000	98,53	Keterlambatan Pengesahan DPA		
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan advokasi LP/LS terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan cakupan pelayanan melalui Kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan maupun status gizi (termasuk balita yang tidak datang timbang) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan dan Pendampingan intervensi gizi pada bumil KEK, balita yang memiliki gangguan pertumbuhan/bermasalah status gizinya (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pemantauan pertumbuhan dan peningkatan ketahanan gizi (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita (ke masyarakat): konseling PMBA, ASI eksklusif, Gizi seimbang (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		9.600.000	9.600.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kelompok Masyarakat (Calon Jemaah Haji, Anak Sekolah, dan ASN) (BOK)						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		3.000.000	3.000.000	100	Keterlambatan Pengesahan DPA		
	Inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air minum dan sarana sanitasi dasar (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		29.520.000	28.800.000	97,56	Keterlambatan Pengesahan DPA		
	Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan Germas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		0	0	0			
	Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan/Skrining Kesehatan	0 0	0 0	0			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		128.525.000	127.594.900	99,28	Keterlambatan Pengesahan DPA	Anggaran dapat terealisasi di bulan Juli	
	Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pemantauan jentik secara berkala. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Orientasi/pembekalan/peningkatan kapasitas SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan P2P. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas bagi kader kesehatan masyarakat. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit. (BOK PKM)						
	Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.193.668.000	1.107.484.108	92,78	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1 Item	1 Item	100			
	Jumlah Pemeliharaan Printer yang dipelihara	3 Item	3 Item	100			
	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran Kandungan dan Penyakit Kandungan	1 Item	1 Item	100			
	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3 Item	3 Item	100			
	Jumlah Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Meja Kerja	2 Item	2 Item	100			
	Jumlah Pengadaan Peralatan Studio yang disediakan	2 Item	2 Item	100			
	Jumlah Pengadaan Personal Computer	2 Item	0 Item	0			
	Jumlah Pengadaan Tangki Air	1 Unit	1 Unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pengisian Tabung Gas Oksigen yang disediakan	40 Tabung	40 Tabung	100			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 Item	3 Item	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Lokakarya mini dalam rangka penguatan perencanaan (P1),penggerakan pelaksanaan (P2),pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) Kinerja puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Tersedianya Insentif UKM Bagi Non ASN (BOK PKM)	5 Bulan	5 Bulan	100			
	Tersedianya Insentif UKM Bagi ASN (BOK PKM)	5 Bulan	5 Bulan	100			
	Jumlah Bahan Obat-obatan Lainnya yang disediakan	0 Item	0 Item	0			
	Jumlah Alat Kantor Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan AC yang dipelihara	2 Item	2 Item	100			
	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor yang disediakan	23 Item	23 Item	100			
	Jumlah Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	16 Item	16 Item	100			
	Jumlah Materai yang disediakan	300 Lembar	300 Lembar	100			
	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pemeliharaan IPAL yang dipelihara	1 Item	1 Item	100			
	Jumlah Pemantauan IPAL yang dipelihara	1 Item	1 Item	100			
	Jumlah Barang Habis Pakai yang disediakan	3 Item	3 Item	100			
	Jumlah Belanja Bahan Komputer yang disediakan	5 Item	5 Item	100			
	Jumlah Pemeliharaan Komputer,Laptop,Notebook	3 Kali	3 Kali	100			
	Jumlah Pemeliharaan Mesin Ketik yang dipelihara	2 Kali	2 Kali	100			
	Jumlah Belanja Cetak yang disediakan	14 Item	14 Item	100			
	Jumlah Bahan Laboratorium / Reagent yang disediakan	4 Item	4 Item	100			
	Jumlah Bahan Obat-obatan yang disediakan	2 Item	2 Item	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	68.328.500	99,9			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	68.328.500	99,9	Keterlambatan Pengesahan DPA	Anggaran Dapat Terealisasikan di Bulan Juli	
	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja (BOK PKM)	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		48.950.000	48.380.000	98,84			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		48.950.000	48.380.000	98,84	Keterlambatan Pengesahan DPA	Anggaran dapat terealisasikan di bulan Juli	
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur di semua tatanan (sekolah/UKS, ibadah, kantor pemerintahan/non pemenntahan, melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda, serta melalui UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wsma, Karang Taruna, Pos UKK, dII) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Ciwandan		3.194.958.944	3.076.827.654	96,3			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		703.874.264	690.524.357	98,1			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2.388.484.680	2.283.835.297	95,62			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,8%	99,76			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		43.095.040	43.094.800	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK)	170 Orang/Kegiatan	170 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK)	248 Orang/Kegiatan	248 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK)	120 Orang/Kali	120 Orang/Kali	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Ibu Hamil	30 Orang Kegiatan	30 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK)	170 Orang/Kali	170 Orang/Kali	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Petugas Melakukan Pelayanan ANC Luar Gedung	216 Orang Kegiatan	216 Orang Kegiatan	100			
		52.274.580	51.546.900	98,61			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Ibu Bersalin	252 orang Kegiatan	252 orang Kegiatan	100			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK)	240 Orang/Kali	240 Orang/Kali	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK)	240 Orang/Kali	240 Orang/Kali	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK)	240 Orang/Kegiatan	240 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK)	192 Orang/Kegiatan	192 Orang/Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (BOK)	1660 Lemar	1660 Lemar	100			
		92.860.200	92.860.200	100			
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Luar Gedung	96 Orang Kegiatan	96 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Bayi Baru Lahir	30 Orang Kegiatan	30 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BOK)	1728 Orang/ Kegiatan	1728 Orang/ Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		46.617.600	46.347.600	99,42			
	Jumlah Petugas Penjangkaran Kesehatan Anak	39 Orang Kegiatan	39 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK)	50 Orang/Kegiatan	50 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK)	50 Orang/Kali	44 Orang/Kali	88			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK)	50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	100			
	Jumlah Petugas Pendataan Balita Usia 0 - 59 Bulan	258 Orang Kegiatan	258 Orang Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Petugas Pelayanan Kesehatan Balita di Posyandu	504 Orang Kegiatan	504 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		44.150.000	43.700.000	98,98			
	Jumlah Petugas Melakukan Pelaksanaan Skrining Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	70 Orang Kegiatan	70 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Sasaran Pada Usia Pendidikan Dasar	50 Orang Kegiatan	50 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (BOK)	150 Orang/ Hari	150 Orang/ Hari	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (BOK)	150 Orang/Hari	150 Orang/Hari	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (BOK)	150 Orang /Kegiatan	150 Orang /Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (BOK)	394 Orang /Kegiatan	394 Orang /Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		9.360.000	9.358.900	99,99			
	Jumlah Petugas Pelaksana Tentang Faktor resiko PTM Pada Usia Produktif	14 Orang Kegiatan	14 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Skrining Usila 30-50 Tahun Pada Usia Produktif	84 Orang Kegiatan	84 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Skrining Usila 15-59 Tahun Pada Usia Produktif	84 Orang Kegiatan	84 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		22.451.320	22.451.200	100			
	Jumlah Petugas Pendataan Sasaran Lansia	42 Orang Kegiatan	42 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Skrining Kesehatan Lansia	84 Orang Kegiatan	84 Orang Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (BOK)	132 Orang/ Hari	132 Orang/ Hari	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (BOK)	132 Orang/Hari	132 Orang/Hari	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (BOK)	128 Orang/ Kegiatan	128 Orang/ Kegiatan	100			
	Belanja Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (BOK)	340 Lembar	340 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2.774.700	2.774.700	100			
	Jumlah Petugas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang Kegiatan	48 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Untuk Melakukan Pendataan Penderita Hipertensi	6 Orang Kegiatan	6 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		895.680	895.600	99,99			
	Jumlah Petugas Pendataan Penderita DM (Diabetes Melitus)	14 Orang Kegiatan	14 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		4.740.000	4.740.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Rumah Penderita ODGJ	72 Orang Kegiatan	72 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Pendataan Penderita ODGJ	18 Orang Kegiatan	18 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		8.280.000	8.280.000	100			
	Jumlah Petugas Pelayanan Didalam Gedung	48 Orang Kegiatan	48 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Edukasi Tuberkulosis	36 Orang Kegiatan	36 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Pemeriksaan Klinis Luar Gedung	72 Orang Kegiatan	72 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		8.640.000	8.640.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Petugas Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Penyakit HIV	24 Orang Kegiatan	24 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Pemeriksaan Deteksi Dini HIV	144 Orang Kegiatan	144 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		20.000.000	20.000.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Kontak dan pemantauan harian selama karantina dan /atau isolasi oleh tracer dan / atau petugas puskesmas (BOK PKM)	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Honor Pengolah Data kasus covid-19 di puskesmas (BOK PKM)	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		58.892.560	58.892.300	100			
	Jumlah Belanja Cetak Untuk Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 M2	27 M2	100			
	Jumlah Belanja Jasa Akomodasi Untuk Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	210 Orang Hari	210 Orang Hari	100			
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	420 Orang Kali	420 Orang Kali	100			
	Belanja Penggandaan -Peserta Pertemuan Penguatan Pemantauan status Gizi Balita	1461 Lembar	1461 Lembar	100			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (BOK)	43 Orang/ Hari	43 Orang/ Hari	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (BOK)	43 Orang/ Hari	43 Orang/ Hari	100			
	Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (BOK)	45 Orang/ Kegiatan	45 Orang/ Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (BOK)	484 Orang/ Kegiatan	484 Orang/ Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		22.070.000	22.070.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK)	250 Orang/Kali	250 Orang/Kali	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK)	180 Orang/Kali	180 Orang/Kali	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK)	112 Orang/Kegiatan	112 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK)	40 Orang/Kegiatan	40 Orang/Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		32.170.000	32.170.000	100			
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	360 Box	360 Box	100			
	Jumlah Cetak Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 M2	12 M2	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	113 Orang Kegiatan	113 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Kudapan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (BOK)	60 Orang/ Hari	60 Orang/ Hari	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkung (BOK)	60 Orang/ Hari	60 Orang/ Hari	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan lingkungan (BOK)	75 Orang/Kegiatan	75 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan kesehatan LINGKUNGAN (BOK)	87 Orang/ Kegiatan	87 Orang/ Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		28.830.000	28.815.000	99,95			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat Tulis Kantor (BOK)	1650 Lembar	1600 Lembar	96,97			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK)	418 Orang/Kegiatan	418 Orang/Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK)	45 Orang/Kegiatan	45 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK)	45 Orang/Kali	45 Orang/Kali	100			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK)	145 Orang/Kali	145 Orang/Kali	100			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1.000.000	1.000.000	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20 Orang / Kegiatan	20 Orang / Kegiatan	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		115.565.000	114.464.000	99,05			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)	358 Orang / Kegiatan	358 Orang / Kegiatan	100			
	Jumlah Makanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)	330 Orang/Kali	330 Orang/Kali	100			
	Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)	358 Orang /Kali	358 Orang /Kali	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)	1460 Orang / Kegiatan	1460 Orang / Kegiatan	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.767.218.000	1.665.134.097	94,22	Sisa Uang di Rekening tidak Mencukupi karena Pagu anggaran Lebih besar dari pada Pendapatan		
	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Suku Cadang Ambulance	6 Unit	6 Unit	100			
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dipelihara	12 Unit	9 Unit	75			
	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Cetak Spanduk	20 Meter	20 Meter	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kebutuhan Pengisian Ulang Tabung ASPAR yang Disediakan	11 Tabung	11 Tabung	100			
	Jumlah Kebutuhan Pengisian Tabung Gas yang disediakan	64 Tabung	64 Tabung	100			
	Jumlah Kebutuhan Bahan Obat-Obatan yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	100			
	Jumlah Kebutuhan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit Yang Disediakan	14 Jenis	14 Jenis	100			
	Jumlah Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Kebutuhan Alat Laboratorium yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100			
	Jumlah IPAL yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit	50			
	Jumlah Dokumen Yng Digandakan	4000 Lembar	4000 Lembar	100			
	Jumlah Dokumen yang dicetak	29 Jenis	29 Jenis	100			
	Jumlah ATK yang disediakan	34 Jenis Bulan	34 Jenis Bulan	100			
	Jumlah Pengadaan Laptop	4 unit	4 unit	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan Intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS -PK (BOK PKM)	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Mini dalam rangka penguatan perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2), Pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya (BOK PKM)	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pengecatan Gedung PKM	500 M2	500 M2	100			
	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan	16 unit	16 unit	100			
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor (Ac Split) yang di pelihara	28 unit	28 unit	100			
	Jumlah Pengadaan Filling Kabinet	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Printer	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Mesin Fogging	2 Unit	2 Unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan kunjungan keluarga dan Intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengadaan Komputer Pc	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Jumlah Penambahan Dinding Balkon dan keramik	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Kursi Kerja	3 unit	3 unit	100			
	Jumlah Materai 10000 yang disediakan	200 Lembar	200 Lembar	100			
	Jumlah Makan dan Minum pasien Rawat Inap Poned yang disediakan	920 Orang Kali	920 Orang Kali	100			
	Jumlah Komputer/ Laptop/Printer/yang dipelihara	38 Unit	38 Unit	100			
	Jumlah Komponen Listrik yang Disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100			
	Jumlah Kebutuhan Pakaian Batik Tradisional yang di sediakan	74 Stel	74 Stel	100			
	Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Untuk kegiatan UKM (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100			
	Jumlah Pembayaran Sewa E Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		102.600.000	102.468.000	99,87			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		102.600.000	102.468.000	99,87			
	Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan	24 Orang X Bulan	24 Orang X Bulan	100			
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	12 Orang X Bulan	12 Orang X Bulan	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber		3.267.931.529	2.970.214.362	90,89			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		834.976.729	787.238.274	94,28			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2.344.874.800	2.098.338.088	89,49			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	83,0%	83,03			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		177.507.000	169.969.000	95,75	Ketidaksesuaian Jadwal Kegiatan	Dilaksanakan di triwulan selanjutnya	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	1098 Orang/Hari	1098 Orang/Hari	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	474 Box	474 Box	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	3174 Box	3174 Box	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	2950 Lembar	1900 Lembar	64,41			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2400 Lembar	2400 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	288 Orang/Hari	288 Orang/Hari	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	414 Orang/Hari	350 Orang/Hari	84,54			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		24.913.500	18.799.500	75,46	Ketidaksesuaian jadwal kegiatan	Dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600 Lembar	600 Lembar	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	75 Box	75 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	75 Orang/Hari	75 Orang/Hari	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	91 Orang/Hari	91 Orang/Hari	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan(BOK)	76 Box	76 Box	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	465 Lembar	365 Lembar	78,49			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216 Orang/Hari	175 Orang/Hari	81,02			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		20.835.000	20.835.000	100	Ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan	Dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
	Belanja Bahan/Alat Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3300 Lembar	3300 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	300 Orang/Hari	300 Orang/Hari	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96 Orang/Hari	96 Orang/Hari	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	150 Lembar	150 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		38.880.000	33.630.000	86,5	Ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan	Dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100 Lembar	100 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas	201 Orang/Hari	170 Orang/Hari	84,58			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	576 Orang/Hari	576 Orang/Hari	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		38.850.000	36.315.000	93,47	Ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan	Dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5100 Lembar	5100 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171 Orang/Hari	171 Orang/Hari	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	1400 Lembar	1400 Lembar	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	140 Box	110 Box	78,57			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	110 Box	110 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	110 Orang/Hari	110 Orang/Hari	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	285 Orang/Hari	280 Orang/Hari	98,25			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		14.580.000	8.430.000	57,82	Ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan	Dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	291 Orang/Hari	243 Orang/Hari	83,51			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100 Lembar	100 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		7.230.000	2.550.000	35,27	-	-	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600 Lembar	400 Lembar	66,67			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90 Orang/Hari	90 Orang/Hari	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	50 Lembar	30 Lembar	60			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	20 Box	20 Box	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	20 Box	20 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(BOK)	20 Orang/Hari	20 Orang/Hari	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Cetak Spanduk (BOK)	1 Pcs	0 Pcs	0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		720.000	720.000	100	-	-	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400 Lembar	400 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12 Orang/Hari	12 Orang/Hari	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		720.000	720.000	100	-	-	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400 Lembar	400 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12 Orang/Hari	12 Orang/Hari	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		7.200.000	4.000.000	55,56	Ketidaksesuaian teknis administrasi	Merevisi administrasi	
	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Biasa	144 Orang/Hari	94 Orang/Hari	65,28			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3.600.000	3.300.000	91,67	Terlaksananya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72 Orang/Hari	70 Orang/Hari	97,22			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		14.400.000	14.150.000	98,26	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285 Orang/Hari	280 Orang/Hari	98,25			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500 Lembar	500 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		19.000.000	17.000.000	89,47			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	240 Orang / Hari	240 Orang / Hari	100			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Pengolah Data (BOK)	7 Bulan	5 Bulan	71,43			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		127.590.800	125.868.400	98,65	Keterlambatan Pengesahan APBD/DPA	Dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100 -	100 -	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2489 Lembar	2489 Lembar	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156 Orang/Kali	156 Orang/Kali	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Kota	156 Orang/Kegiatan	156 Orang/Kegiatan	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	4120 Lembar	3545 Lembar	86,04			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	2400 Box	2400 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	1176 Orang/Hari	1176 Orang/Hari	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		16.420.000	14.430.000	87,88	Tidak ada permasalahan	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	780 Box	780 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	20 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	4 M2	0 M2	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		7.000.000	3.785.000	54,07	Tidak ada permasalahan	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	60 Kali	30 Kali	50			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	40 Kali	40 Kali	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	100 Box	15 Box	15			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (BOK)	100 Lembar	100 Lembar	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	333 Lembar	0 Lembar	0			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		10.513.000	10.189.000	96,92			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	8 M2	4 M2	50			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	80 Orang / Hari	80 Orang / Hari	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	81 Box	81 Box	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	81 Box	81 Box	100			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1.000.000	0	0	Tidak Ditemukannya Kasus Pelacakan Covid-19	Anggaran tidak di realisasikan	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	20 Orang / Hari	0 Orang / Hari	0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		7.280.000	1.279.900	17,58	Tidak ada permasalahan	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	933 Lembar	933 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	140 Orang / Hari	20 Orang / Hari	14,29			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (BOK)	100 Lembar	100 Lembar	100			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		9.800.000	9.800.000	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200 Orang/Kali	200 Orang/Kali	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		86.155.500	84.997.500	98,66	Tidak ada permasalahan	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	405 Lembar	405 Lembar	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	258 Box	258 Box	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	258 Box	258 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	258 Orang / Hari	258 Orang / Hari	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	1086 Orang / Hari	1086 Orang / Hari	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.704.080.000	1.510.969.788	88,67	Keterlambatan pengesahan APBD/DPPA, Peraturan baru TKDN	Dilaksanakan di bulan/triwulan berikutnya	
	Belanja Modal Mebel	15 Unit	15 Unit	100			
	Belanja Modal Alat Pendingin	2 Unit	2 Unit	100			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7 Item	7 Item	100			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2 Unit	2 Unit	100			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2 Unit	2 Unit	100			
	Belanja Modal Kedokteran Mata	2 Buah	2 Buah	100			
	Belanja Modal Kedokteran Anak	2 Item	2 Item	100			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2 Item	2 Item	100			
	Belanja Modal Personal Computer	2 Item	0 Item	0			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27 Item	27 Item	100			
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2 Unit	0 Unit	0			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BOK)	53 Lembar	0 Lembar	0			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	948 Box	911 Box	96,1			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	288 Box	288 Box	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	220 Orang/Hari	165 Orang/Hari	75			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (BOK)	150 Orang/Hari	150 Orang/Hari	100			
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (BOK)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (BOK)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Air Kotor Lainnya	2 Unit	2 Unit	100			
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2 Item	2 Item	100			
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 Orang/Paket	4 Orang/Paket	80			
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2 Item	2 Item	100			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8 Unit/3 Bulan	8 Unit/3 Bulan	100			
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	80 Tabung	80 Tabung	100			
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1 Roll	1 Roll	100			
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	11 Item	11 Item	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26 Item	26 Item	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300 Lembar	300 Lembar	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	120 Botol	120 Botol	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21 Buah	21 Buah	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6 Item	6 Item	100			
	Belanja Obat-Obatan-Obat	33 Item	28 Item	84,85			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1930 Orang/Kali	1930 Orang/Kali	100			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	60 Rim	60 Rim	100			
	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1 Unit	1 Unit	100			
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1 Unit	1 Unit	100			
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1 Unit	1 Unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100	Tidak ada permasalahan	-	
	Belanja Sewa System/Power Supply	12 aplikasi/Bulan	12 aplikasi/Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	68.389.000	99,98			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	68.389.000	99,98	-	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (BOK)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (BOK)	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		19.680.000	16.249.000	82,57			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		19.680.000	16.249.000	82,57			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kudapan (BOK)	160 Box	160 Box	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan (BOK)	160 Box	160 Box	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK)	160 Orang / Hari	160 Orang / Hari	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol		1.996.278.800	1.881.752.989	94,26			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		405.710.800	397.912.984	98,08			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.509.168.000	1.402.440.005	92,93			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang		12.500.000	12.500.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
	Belanja Pemeliharaan instalasi-intalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya	5 Unit	5 Unit	100			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,3%	98,32			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		55.795.000	55.000.000	98,58			
	Cetak Spanduk Printing (DAK)	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Belanja Uang Saku (DAK)	105 Dokumen	105 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Transport Lokal) (DAK)	528 Dokumen	528 Dokumen	100			
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (DAK)	115 Dokumen	110 Dokumen	95,65			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132 Orang	132 Orang	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1500 Lembar	1500 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		18.470.000	18.469.900	100			
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan penyeliaan fasilitas KIA bagi Puskesmas dan PMB (BOK PKM)	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah pelaksanaan kegiatan jumlah pelaksanaan kegiatan orientasi P4K bagi Bidan, Kepala desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat desa ,dll (PKM BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	220 Orang	220 Orang	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1533 Lembar	1533 Lembar	100			
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan transport calon pendonor darah	1 kegiatan	1 kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		21.190.000	21.190.000	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	300 Lembar	300 Lembar	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	290 Dokumen	290 Dokumen	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	132 Orang	132 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		56.145.000	56.145.000	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita	10200 Lembar	10200 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita	564 Orang	564 Orang	100			
	Belanja Makanan Dan Minuman rapat (DAK)	61 Dokumen	61 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota (DAK)	40 Dokumen	40 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	1122 Dokumen	1122 Dokumen	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		57.687.000	56.924.900	98,68			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	133 Lembar	133 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar	145 Orang	145 Orang	100			
	Belanja Makanan Minuman Rapat (DAK)	162 Dokumen	162 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Blasa (DAK)	743 Dokumen	743 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (DAK)	70 Dokumen	70 Dokumen	100			
	Cetak Spanduk Printing (DAK)	5 Dokumen	5 Dokumen	100			
	Penggandaan (DAK)	2540 Dokumen	0 Dokumen	0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		3.240.000	3.239.900	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	133 Lembar	133 Lembar	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan pada Usia Produktif	64 Orang	64 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		9.155.000	9.004.900	98,36			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1733 Lembar	1733 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	64 Orang	64 Orang	100			
	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	500 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Belanja Makanan Minuman Rapat (DAK)	61 Dokumen	61 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK)	40 Dokumen	40 Dokumen	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		13.730.000	13.729.900	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5733 Lembar	5733 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	220 Orang	220 Orang	100			
	honor PPTK	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		4.560.000	4.559.800	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1886 Lembar	1886 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80 Orang	80 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		960.000	960.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	18 Lembar	18 Lembar	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	200 Lembar	200 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2.112.000	2.112.000	100			
	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 Orang	100 Orang	100			
	umlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4 Orang	4 Orang	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	40 Lembar	40 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		4.070.000	4.070.000	100			
	Cetak Spanduk	2 Mater	2 Mater	100			
	Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	150 Lembar	150 Lembar	100			
	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum (snack) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	44 Orang	44 Orang	100			
	honor PPTK	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		55.300.000	55.300.000	100			
	belanja perjalanan dinas biasa	1240 Dokumen	1240 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		78.227.000	77.518.000	99,09			
	Jumlah Penyediaan Makan Dan Minum Gizi Masyarakat	500 Orang	500 Orang	100			
	Jumlah Penggandaan	3240 Lembar	3240 Lembar	100			
	Belanja Makanan Minuman rapat (DAK)	265 Dokumen	255 Dokumen	96,23			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	589 Dokumen	589 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK)	300 Dokumen	300 Dokumen	100			
	Belanja Alat Bahan/Alat Kantor Lainnya (DAK)	500 Dokumen	500 Dokumen	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		39.970.000	39.260.000	98,22			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		4.700.000	4.650.000	98,94			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan orientasi STBM,PKAM bagi natural leader dan pemangku kepentingan lainnya (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Inpeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air minum dan sarana sanitasi dasar (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemngambilan dan sanitasi dan air tingkat rumah tangga (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pengambilan sampel dalam rangka surveilans kualitas air minum (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		16.655.000	16.355.000	98,2			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	di semua tatanan, serta melalui UKBM) (BOK PKM)						
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan Germas. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1.570.000	1.569.900	99,99			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Validasi,Sasaran hasil cangkupan imunasasi dan rapid convinience assessment (RCA) (BOK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		8.910.000	8.910.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa napza (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pendampingan rujukan kasus gangguan jiwa dan napza (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		10.000.000	9.997.000	99,97			
	Jumlah Jamaah Haji yang Dilakukan Pemeriksaan / Skrining Kesehatan	283 Orang Hari	283 Orang Hari	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		141.605.000	139.850.000	98,76			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (DAK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (DAK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Operasional Pelayanan Puskesmas		886.017.000	784.523.805	88,55			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	18 buah	18 buah	100			
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31 Unit	31 Unit	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Lainnya	3 jenis	3 jenis	100			
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2 Unit	2 Unit	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK)	200 Dokumen	200 Dokumen	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	1072 Dokumen	1072 Dokumen	100			
	Belanja Makanan Dan Minuman (DAK)	911 Dokumen	911 Dokumen	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Lainnya (DAK)	1163 Dokumen	1163 Dokumen	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	967 Dokumen	967 Dokumen	100			
	Belanja Obat-Obatan-Obat	12 Jenis	9 Jenis	75			
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12 Bulan	11 Bulan	91,67			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30 Jenis	30 Jenis	100			
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8 Jenis	8 Jenis	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22 Jenis	22 Jenis	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 orang	4 orang	100			
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0 Jenis	2 Jenis	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28 Unit	28 Unit	100			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1 Jenis	1 Jenis	100			
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	100			
	Belanja Modal Mebel	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0 pcs	48 pcs	100			
	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	48 pcs	48 pcs	100			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13 Jenis	13 Jenis	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100			
	Jumlah Pembayaran Jasa sewa aplikasi E Puskesmas NG	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	68.400.000	100			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	68.400.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		13.000.000	13.000.000	100			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		13.000.000	13.000.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu, Poskestren, Posyandu Remaja, Pos UKK, Poskestren dan UKBM Lainnya (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Pulomerak		2.819.247.834	2.625.985.203	93,14			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokras							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		582.249.954	533.290.441	91,59			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		2.113.597.880	1.970.147.262	93,21			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	102,4%	102,37			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		50.133.060	50.132.900	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan pelayanan KB di Posyandu/Posbindu PTM (BOK)	110 Orang/Hari	110 Orang/Hari	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline (BOK)	160 Orang/Hari	160 Orang/Hari	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian materi kesehatan pada bimbingan perkawinan atau konseling pranikah di KUA atau lembaga agama (BOK)	120 Orang/Hari	120 Orang/Hari	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan otopsi verbal kematian maternal neonatal (transportasi) (BOK)	30 Orang/Hari	30 Orang/Hari	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Paket Pendataan Ibu Hamil (APBD)	843 Lembar	843 Lembar	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Rujukan Ibu Hamil (APBD)	70 Orang	70 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil (APBD)	300 Orang	300 Orang	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Ibu Hamil (APBD)	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi e-kohort (BOK)	60 Orang	60 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		27.185.600	27.185.400	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Koordinasi penguatan P4K Pembentukan forum peduli KIA dalam mendukung P4K (BOK)	30 Orang / Hari	30 Orang / Hari	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyeliaan fasilitatif Pustu dan bidan desa (BOK)	30 Orang / Hari	30 Orang / Hari	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas dan PMB (BOK)	60 Orang / Hari	60 Orang / Hari	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi P4K bagi bidan, kepala desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat desa, dll (BOK)	30 Orang / Hari	30 Orang / Hari	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Paket Pendataan Ibu Bersalin	1418 Lembar	1418 Lembar	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Rujukan Ibu Bersalin	70 Orang	70 Orang	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Ibu Bersalin	100 Orang	100 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		14.077.500	14.077.500	100	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Bayi Baru Lahir	36 ORANG	36 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Paket Pendataan Bayi Baru Lahir	925 LEMBAR	925 LEMBAR	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi oleh Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya (BOK)	240 ORANG / HARI	240 ORANG / HARI	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		19.344.640	19.344.600	100	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Pada Balita Usia 0 s.d 59 Bulan	100 ORANG	100 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pendataan Balita 0-59 Bulan	2482 LEMBAR	2482 LEMBAR	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Bulan penimbangan (BOK)	32 ORANG / HARI	32 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PAUD, TK. (BOK)	240 ORANG / HARI	240 ORANG / HARI	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		34.460.000	34.460.000	100	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Petugas Melakukan Koordinasi dan Pendataan Sasaran Pada Anak Usia Pendidikan Dasar	150 ORANG	150 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pendataan	2200 LEMBAR	2200 LEMBAR	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah dan Remaja (BOK)	68 ORANG / HARI	68 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (BOK)	150 ORANG / HARI	150 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri (BOK)	90 ORANG / HARI	90 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di satuan Pendidikan (BOK)	68 ORANG / HARI	68 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja (BOK)	150 ORANG / HARI	150 ORANG / HARI	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		10.920.000	10.919.800	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Kunjungan Dalam Kegiatan Konseling dan Edukasi Tentang Faktor Resiko PTM	200 ORANG	200 ORANG	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Penggandaan - Formulir Konseling & Edukasi	3066 LEMBAR	3066 LEMBAR	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		9.225.300	9.225.300	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Caregiver Informal oleh puskesmas (BOK)	30 Orang / Hari	30 Orang / Hari	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Pada Masyarakat Lansia	108 ORANG	108 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pendataan Pada Masyarakat Lansia	451 LEMBAR	451 LEMBAR	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		1.718.220	1.718.200	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Pada Pasien Penderita Hipertensi	32 ORANG	32 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pendataan	394 LEMBAR	394 LEMBAR	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		899.760	899.700	99,99			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Pada Pasien Penderita Diabetes Melitus	15 ORANG	15 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pendataan	499 LEMBAR	499 LEMBAR	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		2.880.000	2.880.000	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pendataan	600 LEMBAR	600 LEMBAR	100			
	Jumlah Petugas Melakukan Pendataan Pada Orang/Pasien Dalam Gangguan Jiwa Berat	54 ORANG	54 ORANG	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		12.600.000	12.599.900	100			
	BELANJA MAKAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN EDUKASI KESEHATAN	60 ORANG	60 ORANG	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	TRANSPORT LOKAL PEMERIKSAAN KLINIS	100 ORANG	100 ORANG	100			
	Belanja Penggandaan - Formulir Pemeriksaan Klinis	733 LEMBAR	733 LEMBAR	100			
	Belanja Uang Saku Kegiatan - Edukasi Kesehatan Orang Terduga TB	60 ORANG	60 ORANG	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		12.000.000	12.000.000	100			
	Jumlah Petugas yang Berkunjungan Dalam Kegiatan Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Penyakit HIV	240 ORANG	240 ORANG	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		38.000.000	37.949.900	99,87	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ABT)	733 LEMBAR	933 LEMBAR	127,29			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Honor Pengolah data kasus covid 19 di puskesmas (BOK)	7 ORANG / BULAN	9 ORANG / BULAN	128,57			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan kontak dan Pemantauan harian selama karantina dan/ atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas puskesmas (BOK)	260 ORANG / HARI	1130 ORANG / HARI	434,62			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB. (BOK)	160 ORANG / HARI	160 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pokja DBD (ABT)	60 ORANG/KEGIATAN	60 ORANG/KEGIATAN	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Kontak Kasus KLB (ABT)	48 ORANG	48 ORANG	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		38.589.800	38.589.800	100	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Penggandaan Formulir Pendataan	2366 LEMBAR	2366 LEMBAR	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Vitamin A Pemberian tablet tambah darah ibu hamil, termasuk pengawasan minum TTD (BOK)	24 ORANG / HARI	24 ORANG / HARI	100			
	Jumah Makanan dan Minuman Pertemuan Penguatan Status Gizi Balita yang Disediakan	160 ORANG KALI	160 ORANG KALI	100			
	Jumlah Peserta Pertemuan Penguatan Status Gizi Balita	160 ORANG / KALI	160 ORANG / KALI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu (BOK)	110 ORANG / HARI	110 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan cakupan pelayanan melalui Kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan maupun status gizi (termasuk balita yang tidak datang timbang) (BOK)	110 ORANG / HARI	110 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita (ke masyarakat): konseling PMBA, ASI eksklusif, Gizi seimbang (BOK)	120 ORANG / HARI	120 ORANG / HARI	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		55.880.000	55.880.000	100	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Aktifitas fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, kelompok komorbid, dll), (BOK)	850 ORANG/HARI	850 ORANG/HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran TB dan BB, pengukuran obesitas), (BOK)	60 ORANG/KEGIATAN	60 ORANG/KEGIATAN	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon Jemaah haji, anak sekolah, dan ASN) (BOK)	120 ORANG/HARI	60 ORANG/HARI	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		48.640.000	48.589.900	99,9			
	Jumlah peserta kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan lingkungan	176 ORANG KEGIATAN	176 ORANG KEGIATAN	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan eksternal penyelenggaraan air minum aman (BOK)	120 ORANG / HARI	120 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air minum dan sarana sanitasi dasar (BOK)	120 ORANG / HARI	120 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan data sanitasi dan air tingkat rumah tangga (BOK)	120 ORANG / HARI	120 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader dan pemangku kepentingan lainnya (BOK)	80 ORANG / HARI	80 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sampel dalam rangka surveilans kualitas air minum (BOK)	120 ORANG / HARI	120 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan kualitas air minum (pengambilan sampel dan pengujian sampel) (BOK)	120 ORANG / HARI	120 ORANG / HARI	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		20.000.000	20.000.000	100	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur di semua tatanan, serta melalui UKBM) (BOK)	200 ORANG/HARI	200 ORANG/HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media spesifik lokal/tradisional (BOK)	200 ORANG/HARI	200 ORANG/HARI	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		14.500.000	14.500.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza. (BOK)	150 ORANG/HARI	150 ORANG/HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Validasi sasaran, hasil cakupan GME, Depresi, ODGJ Berat, Penyalahgunaan Napza dan Bunuh Diri (BOK)	140 ORANG/HARI	140 ORANG/HARI	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		146.130.000	145.409.900	99,51	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Pemantauan jentik secara berkala (BOK)	160 ORANG/HARI	160 ORANG/HARI	100			
	Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas bagi kader kesehatan masyarakat (BOK)	30 ORANG/KEGIATAN	30 ORANG/KEGIATAN	100			
	Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking (BOK)	550 ORANG/HARI	550 ORANG/HARI	100			
	Jumlah Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (BOK)	136 ORANG/HARI	136 ORANG/HARI	100			
	Jumlah Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit (BOK)	530 ORANG/HARI	530 ORANG/HARI	100			
	Follow up tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta dan penyakit menular lainnya serta gangguan jiwa (BOK)	320 ORANG/HARI	320 ORANG/HARI	100			
	Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan penyakit menular lainnya pada Ibu hamil dan kelompok berisiko (BOK)	160 ORANG/HARI	160 ORANG/HARI	100			
	Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia (BOK)	340 ORANG/HARI	340 ORANG/HARI	100			
	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan	27 ORANG/KEGIATAN	27 ORANG/KEGIATAN	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid (BOK)						
	Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P (BOK)	240 ORANG/KEGIATAN	240 ORANG/KEGIATAN	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.549.814.000	1.407.184.462	90,8			
	Jumlah Pengisian Tabung Gas yang disediakan	150 TABUNG	150 TABUNG	100			
	Jumlah Pemeliharaan AC (AIR CONDITIONAL) Jumlah AC yang di Pelihara	35 UNIT	35 UNIT	100			
	Jumlah Printer yang di pelihara	10 UNIT	10 UNIT	100			
	Jumlah IPAL yang di pelihara	2 UNIT	2 UNIT	100			
	Jumlah Lemari dan Arsip yang Disediakan	2 UNIT	2 UNIT	100			
	Jumlah Alat Pendingin yang disediakan	2 UNIT	2 UNIT	100			
	Jumlah Alat Kedokteran Umum yang disediakan	3 BUAH	3 BUAH	100			
	Jumlah Alat Kedokteran Gigi yang Disediakan	2 JENIS	2 JENIS	100			
	Jumlah Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Yang Disediakan	4 JENIS	4 JENIS	100			
	Jumlah Laptop yang Disediakan	2 UNIT	2 UNIT	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga (BOK)	200 ORANG / HARI	200 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK (BOK)	500 ORANG / HARI	500 ORANG / HARI	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya mini dalam rangka penguatan perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2), pengawasan pengendalian dan	164 ORANG / HARI	164 ORANG / HARI	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya. (BOK)						
	Jumlah Penyediaan Insentif Jasa Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN (BOK)	5 BULAN	5 BULAN	100			
	Jumlah CCTV yang Dipelihara	15 UNIT	15 UNIT	100			
	Jumlah Modal Mebel yang Disediakan	1 UNIT	1 UNIT	100			
	Jumlah Alat Kalibrasi yang Disediakan	2 UNIT	2 UNIT	100			
	Jumlah Komputer dan Laptop yang dipelihara	28 UNIT	28 UNIT	100			
	Jumlah bahan laboratorium yang disediakan	12 BULAN	12 BULAN	100			
	Jumlah Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Yang Disediakan	7 JENIS	9 JENIS	128,57			
	Jumlah ATK yang Disediakan	21 JENIS	22 JENIS	104,76			
	Jumlah Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang Disediakan	1 JENIS	1 JENIS	100			
	Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan	12 JENIS	12 JENIS	100			
	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	120 LEMBAR	120 LEMBAR	100			
	Jumlah Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yang Disediakan	2 JENIS	2 JENIS	100			
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	14 JENIS	14 JENIS	100			
	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Yang Disediakan	8 JENIS	8 JENIS	100			
	Jumlah Perlengkapan Lapangan yang disediakan	6 SET	6 SET	100			
	Jumlah Obat-Obatan yang Disediakan	34 JENIS	17 JENIS	50			
	Jumlah makanan dan minuman untuk petugas jaga rawat inap dan pasien rawat inap yang disediakan	4728 PORSI	4098 PORSI	86,68			
	Jumlah Jasa Tenaga Kesehatan yang disediakan	12 BULAN	12 BULAN	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100			
	Penyediaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Puskesmas	12 BULAN	12 BULAN	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	67.547.500	98,75			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	67.547.500	98,75	DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja 2 Orang x 12 Bulan) (BOK)	24 ORANG/BULAN	24 ORANG/BULAN	100			
Arah kebijakna : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		55.000.000	55.000.000	100			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (%) Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		55.000.000	55.000.000	100	Dikarenakan DPA masuk ke parsial 1 dan 3	Tindak lanjutnya Akan direalisasikan di TW III	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu. Poskestren, Posyandu remaia, Pos UKK, Poskestren, dan UKBM lainnya (BOK)	1100 ORANG/HARI	1100 ORANG/HARI	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta		2.076.563.784	1.985.959.357	95,64			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		487.084.504	458.222.445	94,07			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.520.079.280	1.458.380.912	95,94			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		153.574.000	147.899.800	96,31	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru (APBD) Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (APBD) Penginputan SIMDA di	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Bulan Juni Intruksi dari BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah kegiatan pendataan ibu hamil	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan otopsi verbal kematian maternal neonatal (transportasi) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan pemetaan sasaran bumil,bersalin, nifas dan bayi (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian materi kesehatan pada bimbingan perkawinan atau konseling pranikah di KUA atau lembaga agama (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan kelas ibu secara online/offline (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		32.850.540	32.850.300	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru (APBD) Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (APBD) Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Koordinasi penguatan P4K Pembentukan forum peduli KIA dalam mendukung P4K (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi P4K bagi bidan, kepala desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat desa, dll (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah kegiatan pendataan ibu bersalin	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas dan PMB (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		18.196.080	18.195.900	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Baru (APBD) Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	BPKAD (APBD) Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah kegiatan pendataan bayi baru lahir	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi oleh Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan lapangan untuk pembinaan maupun monev (termasuk Pelayanan Kunjungan Antenatal dan Kunjungan Neonatal Lengkap) (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		14.382.200	14.382.200	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru (APBD) Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (APBD) Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah kegiatan pendataan balita	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan pemantauan tumbuh kembang balita (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PAUD, TK. (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		42.815.000	42.815.000	100	Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah sekolah yang dilakukan pendataan	36 Sekolah	36 Sekolah	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M (BOK PKM)	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		8.640.000	8.640.000	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah kegiatan skrining faktor resiko PTM	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		12.734.460	12.734.400	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru (APBD) Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (APBD) Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah kegiatan pendataan sasaran lansia	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Caregiver Informal oleh puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		3.668.700	3.668.700	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah kegiatan pendataan penderita hipertensi	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		972.300	972.300	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah kegiatan pendataan penderita diabetes melitus	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		1.440.000	1.440.000	100	-	-	
	Jumlah pendataan penderita ODGJ	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2.700.000	2.700.000	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah kegiatan pemeriksaan klinis luar gedung	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		8.640.000	8.640.000	100	-	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah kegiatan pemetaan kelompok sasaran	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		45.700.000	45.700.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Honor Pengolah data kasus Covid-19 di puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan kontak dan Pemantauan harian selama karantina dan/ atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas puskesmas (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan pemerintah di kab/kota (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		34.528.000	34.528.000	100	Penyesuaian SPJ Dengan Sistem yang Baru (APBD) Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (APBD) Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah Peserta Pelaksanaan Evaluasi e-PPBGM	114 Orang	114 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pelaksanaan Validasi e-PPBGM	114 Orang	114 Orang	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan cakupan pelayanan melalui Kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan maupun	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	status gizi (termasuk balita yang tidak datang timbang) (BOK PKM)						
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita (ke masyarakat): konseling PMBA, ASI eksklusif, Gizi seimbang (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Vitamin A Pemberian tablet tambah darah ibu hamil, termasuk pengawasan minum TTD (BOK PKM)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2.780.000	2.780.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon Jemaah haji, anak sekolah, dan ASN) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat (Kelompok olahraga, ASN tk kecamatan, anak sekolah, dan Jemaah Haji) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1.300.000	1.300.000	100	Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air minum dan sarana sanitasi dasar (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan kualitas air minum (pengambilan sampel dan pengujian sampel) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		19.770.000	19.170.000	96,97			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	di semua tatanan, serta melalui UKBM) (BOK PKM)						
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan Germas(BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		1.570.000	1.569.900	99,99			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza. (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		109.085.000	109.085.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya (BOK PKM)	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit(BOK PKM)						
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM, imunisasi dan penyakit menular lainnya (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian vektor nyamuk (Pemberantasan Sarang Nyamuk, larvasidasi, fogging, Indoor Residual Spraying (IRS), modifikasi lingkungan) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan jentik secara berkala (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		998.133.000	942.709.412	94,45	Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK) Adanya Peraturan Belanja Harus Mengandung TKDN (JKN)	Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK) Sosialisasi TKDN di Bulan Juni (JKN)	
	Jumlah bahan laboratorium yang disediakan	28 Item	28 Item	100			
	Jumlah bahan komputer yang disediakan	72 Item	72 Item	100			
	Jumlah dokumen yang dicetak	3479 Item	3479 Item	100			
	Jumlah dokumen yang digandakan	24642 Lembar	24642 Lembar	100			
	Jumlah obat yang disediakan	2001 Item	2001 Item	100			
	Jumlah pembayaran jasa pelayanan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah pembayaran jasa service	112 Unit	111 Unit	99,11			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah spanduk yang dicetak	110 m2	110 m2	100			
	Jumlah Meubelair yang disediakan	10 Unit	10 Unit	100			
	Jumlah Alat Kedokteran yang disediakan	11 Unit	11 Unit	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya mini dalam rangka penguatan perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2), pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan untuk Kegiatan UKM (BOK PKM)	2 Bulan	2 Bulan	100			
	Jumlah layar proyektor elektrik yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah alat pendingin	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah alat kesehatan pakai habis yang disediakan	1305 Item	1305 Item	100			
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	386 Item	386 Item	100			
	Jumlah bahan habis pakai kesehatan yang disediakan	130 Item	130 Item	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100	Pembayaran dilakukan per 3 bulan	Di bayar per 3 bulan	
	Jumlah Bulan Penyediaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (UPTD Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
Atah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	68.356.000	99,94			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	68.356.000	99,94	Adanya perubahan parsial DPA sampai bulan Juni	Pelaksanaan kegiatan setelah pengesahan DPA	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1.000.000	1.000.000	100			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1.000.000	1.000.000	100	Rincian Belanja Belum Masuk SIMDA (DAK-BOK)	Penginputan SIMDA di Bulan Juni Instruksi BPKAD (DAK-BOK)	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu. Poskestren, Posyandu remaia, Pos UKK, Poskestren, dan UKBM lainnya (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang		2.552.795.627	2.427.311.457	95,08			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		435.485.327	426.237.076	97,88			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2.023.910.300	1.908.977.881	94,32			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,8%	99,84			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		53.350.000	53.350.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah transport lokal Pendataan Kesehatan Ibu Hamil	336 Orang Kegiatan	336 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1600 Lembar	1600 Lembar	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi E-Kohort (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Kader Dalam Pelacakan Kematian Wanita Usia Subur (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan otopsi Verbal Kematian maternal Neonata (Transportasi) (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Materi Kesehatan pada Bimbingan Perkawinan atau Konseling Pranikah di KUA atau Lembaga Agama (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelas Ibu Secara Online/Offline (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan KB di Posyandu/Posbindu PTM (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		16.467.000	16.467.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4200 Lembar	4200 Lembar	100			
	Jumlah transport lokal Pendataan Kesehatan Ibu Bersalin	90 Orang Kegiatan	90 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi P4K bagi Bidan, Kepala Desa/Kelurahan, Kader, Tokoh Masyarakat Desa, dll (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif KIA bagi Puskesmas dan PMB (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Pustu dan Bidan Desa (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		27.870.000	27.870.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900 Lembar	900 Lembar	100			
	Jumlah transport lokal Pendataan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	144 Orang Kegiatan	144 Orang Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatus dan bayi Oleh Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya (BOK PKM)	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		16.936.000	16.936.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Transport Lokal Pendataan Balita 0-59 Bulan	195 Orang Kegiatan	195 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan Balita	1620 Lembar	1620 Lembar	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SIDTK) di Posyandu, PAUD, TK (BOK PKM)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		45.091.000	44.791.000	99,33	tidak ada masalah	-	
	Jumlah Transport Lokal Pendataan sasaran Pada Usia Pendidikan dasar	195 Orang Kegiatan	195 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD pada Remaja Putri (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		14.160.000	14.160.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3200 Lembar	3200 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Skirinig Faktor risiko PTM	264 Orang Kegiatan	264 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		37.623.120	36.663.100	97,45			
	Jumlah Transport Lokal Pendataan Sasaran Usia Lanjut	104 Orang Kegiatan	104 Orang Kegiatan	100			
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1177 Lembar	1177 Lembar	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Caregiver Informal Oleh Puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2.400.000	2.400.000	100	tidak ada masalah	-	
	Jumlah Transport Lokal Pendataan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48 Orang Kegiatan	48 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		2.400.000	2.400.000	100			
	Jumlah Transport Lokal Pendataan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48 Orang Kegiatan	48 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		3.360.000	3.360.000	100	Tidak ada masalah	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1200 Lembar	1200 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Pendataan Penderita ODGJ	60 Orang Kegiatan	60 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		17.590.000	17.589.900	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2300 Lembar	2300 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Pemeriksaan Klinis Luar Gedung	300 Orang Kegiatan	300 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		1.680.000	1.680.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Penggandaan/Fotocopy Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	600 Lembar	600 Lembar	100			
	Jumlah Transport Lokal Pemeriksaan Deteksi Dini HIV 30 Orang Kegiatan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah	30 Orang Kegiatan	30 Orang Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		22.200.000	22.200.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensi KLB dan Penanggulangan KLB (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Kontak dan Pemantauan Harian Selama Karantina dan /Atau Isolasi Oleh Tracer dan/ atau Petugas Puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Honor Pengolah data Covid-19 di Puskesmas (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		121.430.180	121.106.500	99,73	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Bulan Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Advokasi LP/LS Terkait Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Sasaran Program Kesehatan Terintegrasi dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pemantauan di Posyandu (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Vitamin A Pemberian Tablet Tambah darah Ibu Hamil, Termasuk Pengawasan Minum TTD (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan dan Pendampingan Intervensi Gizi pada Bumil KEK, Balita yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan/Bermasalah Status Gizinya (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Penyuluhan kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		7.070.000	7.070.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kebugaran Jasmani pada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kelompok Masyarakat (Calon Jemaah Haji, Anak Sekolah, dan ASN) (BOK PKM)						
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Pemeriksaan Kebugaran Jasmani, Pengukuran TB dan BB, Pengukuran Obesitas) (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		7.455.000	7.455.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orientasi STBM, PKAM bagi Natura Leader dan Pemangku Kepentingan Lainnya (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk Sarana air Minum dan Sarana Sanitasi dasar (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan data Sanitasi dan air Tingkat Rumah Tangga (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		11.909.000	11.909.000	100	tidak ada masalah	-	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan, Penggerakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader, Fasilitator Desa, Kelompok Masyarakat Lainnya Untuk Melakukan Kegiatan GERMAS (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		6.588.000	6.588.000	100	Tidak ada masalah	-	
	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Konseling dan Deteksi dini masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		176.951.000	175.821.000	99,36	tidak ada masalah	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Orientasi/Pembekalan/Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kader Kesehatan Untuk Peningkatan P2P (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Follow Up Tatalaksana dan Pencegahan Cacat Kasus Kusta dan Penyakit Menular Lainnya Serta Gangguan Jiwa (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Monitoring, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular Oleh Petugas Puskesmas (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Deteksi Dini Kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Pada Ibu Hamil dan Kelompok Berisiko (BOK PKM)	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Deteksi Dini Faktor Risiko PTM di Posbindu PTM dan Posyandu Lansia (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Baik Imunisasi Rutn, Pengenalan ANTigen Baru, Imunisasi Tambahan, Maupun Kegiatan Defaulter Tracking (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pemantauan Jentik Secara Berkala (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pembentukan dan Pengaktifan, Serta Pembinaan Kader Kesehatan Program P2P Serta Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (BOK PKM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Untuk Pencegahan Penyakit (BOK PKM)	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
	Pendampingan Penderita Penyakit Menular Menahun dan Penyakit Tidak Menular (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Penemuan Kasus PD3I, Kasus Kontak TB dan Kasus Mangkir, Kasus Kontak Kusta Serta Orang Dengan Gangguan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jiwa Serta Penyakit Lainnya (BOK PKM)						
	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Desa Tanpa Asap Rokok (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Kepada Orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Kepada Guru dan Wali Murid (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Survei Anak Sekolah Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Sweeping Untuk Meningkatkan Cakupan POPM, Imunisasi dan Penyakit Menular Lainnya (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.424.780.000	1.312.561.381	92,12	Adanya Peraturan baru terkait TKDN	Mencari barang yang Sudah ada TKDN	
	Jumlah Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kanto	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100			
	Jumlah Pengadaan Mebel	30 Unit	30 Unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan Aerosol Suction di Puskesmas	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Bahan Laboratorium/Reagent	10 Jenis	10 Jenis	100			
	Jumlah Bahan Obat-obatan Puskesmas Yang disediakan	22 Jenis	22 Jenis	100			
	Jumlah Cetak Spanduk	300 Meter Persegi	300 Meter Persegi	100			
	Jumlah Dokumen yang dicetak	22 Jenis	22 Jenis	100			
	Jumlah dokumen yang di gandakan	30008 Lembar	30008 Lembar	100			
	Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerang Bangunan Kantor yang disediakan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100			
	Jumlah Materai 10.000 yang disediakan	75 Lembar	75 Lembar	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	12 Bulan	11 Bulan	91,67			
	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	24 Jenis	24 Jenis	100			
	Jumlah Pemeliharaan Alat Steril di Puskesmas	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan Dental Unit di Puskesmas	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan IPAL di Puskesmas	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan Komputer di Puskesmas	35 Unit	35 Unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Printer di Puskesmas	15 Unit	15 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20 Unit	20 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Alat Pembersih	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Modal Alat Kedokteran Umum Lainnya	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Modal Alat Kedokteran Umum	2 Unit	2 Unit	100			
	Pemeliharaan AC	25 Unit	25 Unit	100			
	Pengadaan AC	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Pakaian Tradisional	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Untuk Kegiatan UKM Bagi Non ASN (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Untuk Kegiatan UKM Bagi ASN (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dalam Rangka Deteksi dini dan Pengelolaan Masalah Kesehatan Terintegrasi Melalui Pendekatan Keluarga (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian (P3), Kinerja Puskesmas serta Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Lainnya (BOK PKM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	16 Unit	16 Unit	100			
	Jumlah Pengadaan Personal Komputer	1 Unit	0 Unit	0			
	Jumlah Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	1 Unit	1 Unit	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		6.600.000	6.600.000	100			
	Jumlah pembayaran jasa Sewa Aplikasi E-Puskesmas NG	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	67.096.500	98,09			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	67.096.500	98,09	Tidak ada Masalah	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK PKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		25.000.000	25.000.000	100			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		25.000.000	25.000.000	100	tidak ada masalah	-	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu, Poskestren, posyandu remaja, Pos UKK.dan UKBM Lainnya (BOK PKM)	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 1		2.761.005.263	2.667.076.021	96,6			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		435.105.173	412.033.299	94,7			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		2.254.000.090	2.184.792.722	96,93			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,9%	94,93			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		141.720.000	140.439.900	99,1	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Peserta yang Hadir Pertemuan Koordinasi dengan KUA/Lembaga Agama di Puskesmas (BOK)	20 Orang	20 Orang	100			
	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	100 Rupiah	0 Rupiah	0			
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor?Bahan Cetak Yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	610 Box	600 Box	98,36			
	Jumlah Kunjungan Rumah Bumil	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Orientasi Kader Dalam Pelacakan Kematian Wanita Usia Subur (BOK)	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Orientasi Kader Dalam Pelacakan Kematian Wanita Usia Subur (BOK)	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian	6 Orang	6 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Maternal Neonatal (Transportasi) (BOK)						
	Jumlah Peserta yang Hadir Rapat Koordinasi Validasi dan Evaluasi Data PWS KIA (BOK)	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Pemberian Materi Kesehatan pada Bimbingan Perkawinan atau Konseling Pranikah di KUA atau Lembaga Agama (BOK)	20 Orang	20 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Penyuluhan dan Pelayanan KB di Posyandu/Posbindu PTM (BOK)	360 Orang	360 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Penyelenggaraan Kelas Ibu secara Online/Offline (BOK)	1200 Orang	1200 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		10.065.000	10.055.000	99,9	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang Disediakan	10000 Rupiah	0 Rupiah	0			
	Jumlah Kunjungan Rumah Ibu Bersalin Resti dan Rujukan	115 Orang	115 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penguatan P4K Pmebentukan Forum Peduli KIA dalam Mendukung KIA (BOK)	35 Orang	35 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		7.440.000	7.435.000	99,93	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kunjungan Rumah BBL Resti dan Pemantauan BBL Resti	84 Orang	84 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir dalam Kegiatan Pertemuan SAHRINI	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Pertemuan SAHRINI	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah ATK yang Disediakan	20 Buah	20 Buah	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		15.542.000	15.540.000	99,99	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelaksanaan Bulan Penimbangan (BOK)	31 Orang	31 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di Posyandu, PAUD, TK (BOK)	58 Orang	58 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Pendampingan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita (BOK)	31 Orang	31 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Penimbangan Rutin Balita dan Pemantauan Tumbuh Kembang (BOK)	31 Orang	31 Orang	100			
	Jumlah Rujukan Balita dengan Kelainan Tumbuh Kembang	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Kegiatan Kunjungan Monitoring dan Pembinaan TK, PAUD dan RA	16 Orang	16 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Sosialisasi SBMR dan MOU dengan TK, PAUD dan RA	90 Orang	90 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pertemuan Evaluasi TK, PAUD dan RA	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Penggandaan yang Disediakan	400 Lembar	400 Lembar	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		27.913.000	27.913.000	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Penggandaan yang Disediakan	350 Lembar	350 Lembar	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pembinaan Kader Sekolah	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Monitoring dan Pembinaan SD	39 Orang	39 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan (BOK)	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M (BOK)	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (BOK)	20 Orang	20 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja (BOK)	8 Orang	8 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja (BOK)	16 Orang	16 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (BOK)	120 Orang	120 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi	16 Orang	16 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Pemberian TTD pada Remaja Putri (BOK)						
	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (BOK)	35 Orang	35 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		43.200.000	42.910.000	99,33	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Gebyar PTM dan IVA Test	180 Orang	180 Orang	100			
	Jumlah Spanduk yang Disediakan	4 Buah	4 Buah	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Penyuluhan PTM	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta Skrinning Kesehatan Kelompok UKBM	300 Orang	300 Orang	100			
	Jumlah Kegiatan Kunjungan Pembinaan dan Monitoring Pos UKK	60 Orang	60 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		22.524.000	22.366.500	99,3	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Item Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Pada Kegiatan Gebyar Lansia	110 Orang	110 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Kegiatan Posbindu	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Rumah Lansia	36 Orang	36 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Kegiatan Pendataan Lansia	12 Orang	12 Orang	100			
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Gebyar Lansia	110 Orang	110 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Caregiver Informal oleh Puskesmas (BOK)	33 Orang	33 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		8.160.000	8.160.000	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Penggandaan yang Disediakan	190 Lembar	190 Lembar	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Penyuluhan	111 Orang	111 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		16.560.000	16.287.000	98,35	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Penggandaan Yang Disediakan	170 Lembar	170 Lembar	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Penyuluhan	111 Orang	111 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Skrinning DM	324 Orang	324 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Kegiatan Skrinning DM	45 Orang	45 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		9.360.000	9.359.900	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Penggandaan Yang Disediakan	163 Lembar	0 Lembar	0			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Deteksi Dini Penjarangan Penderita di Luar Gedung Melalui Penyuluhan	32 Orang	32 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pertemuan Keluarga ODGJ dan Kader Kesehatan Jiwa	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Terapi Aktifitas Kelompok	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Rumah ODGJ	30 Orang	30 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		18.792.000	18.792.000	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Penyuluhan dan Promosi Program TBC pada Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Uang Saku Peserta Kegiatan	125 Orang	125 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Rumah, Monitoring dan Evaluasi Pasien TBC	84 Orang	84 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan GETUK PAI SUSU dan PPM	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		7.485.000	7.484.000	99,99	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pembentukan Warga Peduli HIV	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Penyuluhan Tentang HIV pada Anak Sekolah	61 Orang	61 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Kegiatan Mobile VCT	90 Orang	90 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		12.800.000	12.800.000	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelacakan Kontak dan Pemantauan Harian Selama Karantina dan/atau Isolasi oleh Tracer dan/atau Petugas Puskesmas (BOK)	116 Orang	116 Orang	100			
	Jumlah Bulan Pembayaran Honor Petugas Pengolah Data Kasus Covid-19 di Puskesmas (BOK)	7 Bulan	7 Bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		92.430.000	92.398.500	99,97	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.		
	Jumlah Item Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang Disediakan	2 Jenis	0 Jenis	0			
	Jumlah Kunjungan Petugas Pemberian Vitamin A Pemberian Tablet Darah Ibu Hamil, Termasuk Pengawasan Minum TTD (BOK)	62 Orang	62 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Edukasi pada Ibu Hamil dan Balita ke Masyarakat, Konseling PMBA, ASI Eksklusif, Gizi Seimbang (BOK)	35 Orang	35 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah, Sweeping Balita yang Tidak Datang ke Posyandu (BOK)	310 Orang	310 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Edukasi Penyuluhan Kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi (BOK)	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelacakan dan Pendampingan Intervensi Gizi pada Bumil KEK, Balita yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan/Bermasalah Status Gizi (BOK)	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Risiko Gangguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi (BOK)	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pertemuan Analisis Pemantauan Pertumbuhan (BOK)	135 Orang	135 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pendampingan Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu (BOK)	310 Orang	310 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Validasi Data e-PPGBM	220 Orang	220 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan SEGANI	120 Orang	120 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1.000.000	1.000.000	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pembinaan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat (Kelompok Olahraga, ASN Tk. Kecamatan, Anak Sekolah, dan Jemaah Haji) (BOK)	20 Orang	20 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		27.150.000	27.150.000	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman (BOK)	31 Orang	31 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pemeriksaan Kualitas Air Minum (Pengambilan Sampel dan Pengujian Sampel) (BOK)	31 Orang	31 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pengambilan Sampel Dalam Rangka Surveilans Kualitas Air Minum (BOK)	31 Orang	31 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Dasar (BOK)	30 Orang	30 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	210 Orang	210 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Kegiatan Kesehatan Lingkungan	210 Orang	210 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		5.535.000	5.535.000	100			
	Jumlah Petugas yang Hadir Kegiatan Penggerakkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader, Fasilitator Desa, Kelompok Masyarakat Lainnya untuk Melakukan Kegiatan Germas (BOK)	45 Orang	45 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		11.100.000	11.100.000	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Peserta Kegiatan Asman Toga	150 Orang	150 Orang	100			
	Jumlah Penggandaan yang Disediakan	500 Lembar	500 Lembar	100			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		10.431.090	10.429.000	99,98	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan.		
	Jumlah Item ATK yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Calon Jamaah Haji Kecamatan Citangkil	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Kecamatan Citangkil	0 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium PPTK	3 Bulan	3 Bulan	100			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		69.325.000	69.325.000	100	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					penginputan DPA pada aplikasi SIMDA.		
	Jumlah Kunjungan Kegiatan Produktif oleh Petugas	480 Orang	480 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Kepada Orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Kepada Guru dan Wali Murid (BOK)	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk Pencegahan Penyakit (BOK)	116 Orang	116 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pendampingan Penderita Penyakit Menular Menahun dan Penyakit Tidak Menular (BOK)	180 Orang	180 Orang	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Pertemuan Berkala Kader untuk P2P (BOK)	160 Orang	160 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pemantauan Jentik Secara Berkala (BOK)	124 Orang	124 Orang	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		1.695.468.000	1.628.312.922	96,04	Untuk Sumber Dana PAD, pengajuan yang dilakukan mengalami keterlambatan. Untuk Sumber Dana BOK, penyerapan anggaran terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD	
	Jumlah Bahan Laboratorium/Reagent yang Disediakan	362 Botol	362 Botol	100			
	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan yang disediakan	61 Pcs	61 Pcs	100			
	Jumlah BHPRS yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Jumlah Belanja Modal Alat Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Bahan Cetak yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Bulan dibayarkan Insentif UKM	5 Bulan	5 Bulan	100			
	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	11 Orang	11 Orang	100			
	Jumlah Paket Obat-obatan	1 Paket	1 Paket	100			
	Jumlah Alat Listrik yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Jumlah Pemeliharaan Instalasi air kotor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100			
	Jumlah Belanja Modal Alat Pendingin yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Jumlah Belanja Modal Alat Studio yang disediakan	1 Buah	1 Buah	100			
	Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran Umum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang disediakan	4 Buah	4 Buah	100			
	Jumlah Belanja Modal Komputer yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Isi Ulang Tabung Gas yang Disediakan	120 Tabung	110 Tabung	91,67			
	Jumlah Paket Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dibayarkan	0 Paket	0 Paket	0			
	Tersedianya Bahan Komputer yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100			
	Jumlah Bahan Pembersih yang Disediakan	400 Buah	400 Buah	100			
	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan yang Dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Tagihan Epuskesmas yang Dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Lokakarya Mini Dalam Rangka Penguatan Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2), Pengawasan	780 Orang	780 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pengendalian dan Penilaian (P3) Kinerja Puskesmas (Lokmin Bulanan) (BOK)						
	Jumlah ATK yang Disediakan	35 Jenis	35 Jenis	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Lokakarya Mini Dalam Rangka Penguatan Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian (P3) Kinerja Puskesmas (Lokmin Triwulan) (BOK)	320 Orang	300 Orang	93,75			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi Awal Dalam Rangka Deteksi Dini dan Pengelolaan Masalah Kesehatan Terintegrasi Melalui Pendekatan Keluarga (BOK)	330 Orang	330 Orang	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Lanjut termasuk Perkesmas Dalam Rangka Intervensi Hasil PIS-PK (BOK)	450 Orang	450 Orang	100			
	Tersedianya Materai	504 Lembar	504 Lembar	100			
	Jumlah Bulan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang Dibayarkan	0 Bulan	0 Bulan	0			
	Jumlah Paket Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) yang Dibayarkan	0 Paket	0 Paket	0			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	66.750.000	97,59			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	66.750.000	97,59			
	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Tenaga Kesehatan Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja (BOK)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Keuangan Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja (BOK)	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan kesehatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		3.500.000	3.500.000	100			
	Indeks Keluarga Sehat	0,3 Skore	0,25 Skore	83,33			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3.500.000	3.500.000	100			
	Jumlah Kunjungan Petugas Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui UKBM Dalam Upaya Penurunan AKI AKB Terintegrasi dengan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	70 Orang	70 Orang	100			
UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Citangkil 2		1.781.136.320	1.638.365.753	91,98			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokras							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		588.297.310	568.091.778	96,57			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.124.439.010	1.001.901.475	89,1			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	88,2%	88,19			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		129.070.920	127.700.600	98,94	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK), Rujukan ibu hamil d sesuaikan dengan jumlah rujukan ke FKRTL.	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Penyelenggaraan Kelas Ibu Secara Online/Offline (BOK)	1200 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pemberian Materi Kesehatan pada Bimbingan Perkawinan atau Konseling Pranikah di KUA atau Lembaga Agama (BOK)	20 Orang	20 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Orientasi Kader dalam Pelacakan Kematian Wanita Usia Subur (BOK)	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Rapat Koordinasi Validasi dan Evaluasi Data PWS KIA (BOK)	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Orientasi e-kohort (BOK)	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Sasaran Bumil, Bersalin, Nifas dan Bayi (BOK)	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Maternal Neonatal (Transportasi) (BOK)	16 Orang	16 Orang	100			
	jumlah pelayanan rujukan ibu hamil	40 orang / kegiatan	3 orang / kegiatan	7,5			
	jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil	4 kegiatan	3 kegiatan	75			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		17.369.900	11.169.700	64,3	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK), rujukan ibu bersalin d sesuaikan rujukan ke FKRTL	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	
	jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin	4 kegiatan	3 kegiatan	75			
	jumlah pelayanan rujukan pertolongan persalinan	4 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Penyeliaan Fasilitatif Pustu dan Bidan Desa (BOK)	16 Orang	16 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif KIA Bagi Puskesmas dan PMB (BOK)	18 Orang	18 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Orientasi P4K bagi Bidan, Kepala Desa/Kelurahan, Kader, Tokoh Masyarakat Desa dll (BOK)	30 Orang	30 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		7.128.060	3.628.000	50,9	rujukan bayi baru lahir d sesuaikan rujukan ke FKRTL	tidak ada masalah	
	jumlah pelayanann kesehatan bayi baru lahir	4 kegiatan	3 kegiatan	75			
	jumlah pelayanan rujukan pertolongan kasus komplikasi pada BBL	4 kegiatan	0 kegiatan	0			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		35.202.940	35.200.000	99,99	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK), rujukan Balita disesuaikan dengan rujukan ke FKRTL	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	
	jumlah pelayanan kesehatan balita	4 kegiatan	3 kegiatan	75			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksanaan Bulan Penimbangan (BOK)	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di Posyandu, PAUD, TK (BOK)	68 Orang	68 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Penimbangan Rutin Balita, dan Pemantauan Tumbuh Kembang (BOK)	400 Orang	400 Orang	100			
	jumlah pelayanan rujukan balita	4 kegiatan	3 kegiatan	75			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pendampingan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita (BOK)	40 Orang	40 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		18.970.000	18.670.000	98,42	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (%) Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					pada aplikasi SIMDA (BOK), pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar dilakukan pada tahun ajaran baru		
	jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Peserta Yang Datang Penguatan UKS/M dan TP UKS/M (BOK)	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pengembang dan Pelaksanaan Posyandu Remaja (BOK)	12 Orang	12 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja (BOK)	24 Orang	24 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksaaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (BOK)	87 Orang	87 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri (BOK)	24 Orang	24 Orang	100			
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (BOK)	15 Orang	15 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		10.800.000	10.800.000	100	proses penyusunan SPj	mempercepat penyusunan spj	
	Jumlah pelayanan kesehatan padaUsia Produktif	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		10.373.640	10.284.000	99,14	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK)	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	
	Jumlah pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah pelayanan rujukan usia lanjut	8 Orang/Kegiatan	8 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Pelatihan Caregiver Informasi oleh Puskesmas (BOK)	33 Orang	33 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		6.589.140	6.589.000	100	proses penyusunan SPJ	rujukan kasus hipertensi di sesuaikan dengan rujukan ke FKRTL	
	Jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah pelayanan rujukan kasus hipertensi	8 Orang/Kegiatan	8 Orang/Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		9.142.740	9.142.500	100	keterlambatan realisasi,	mempersiapkan kelengkapan spj	
	Jumlah pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		2.160.000	2.100.000	97,22	realisasi bulan jan-maret hanya kegiatan rutin	proses penyusunan spj	
	Jumlah pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		15.809.280	15.730.000	99,5	Keterlambata memulai realisasi	mempersiapkan kelengkapan spj,	
	Jumlah pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		9.060.000	9.060.000	100	tidak ada masalah, proses penyusunan spj	-	
	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi program HIV	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan penyuluhan HIV	4 kegiatan	3 kegiatan	75			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		25.800.000	25.800.000	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelacakan	376 Orang	376 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kontak dan Pemantauan Harian Selama Karantina dan/ atau Isolasi Oleh Tracer dan/atau Petugas Puskesmas BOK						
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Honor Pengolah data kasus Covid-19 di Puskesmas (BOK PKM)	7 Bulan	7 Bulan	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		95.209.156	95.139.500	99,93	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK)	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	
	Jumlah timbangan bayi yang diadakan	6 Unit	6 Unit	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pemberian Vitamin A Pemberian Tablet Tambahan Darah Ibu Hamil, Termasuk Pengawasan Minum TTD (BOK)	40 Orang	40 Orang	100			
	Transportasi peserta yang mengikuti kegiatan	84 Orang/Kegiatan	42 Orang/Kegiatan	50			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Edukasi pada Ibu Hamil dan Balita (Ke Masyarakat): Konseling PMBA, ASI Eksklusif, Gizi Seimbang (BOK)	27 Orang	30 Orang	111,11			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah, Sweeping Balita yang Tidak Datang ke Posyandu (BOK)	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelacakan dan Pendampingan Penduduk dengan Risiko Masalah Gizi (BOK)	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pendataan dan Pemuktahiran Sasaran Program	40 Orang	40 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kesehatan Terintegrasi dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK)						
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelacakan dan Pendampingan Intervensi Gizi pada Bumil KEK, Balita yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan/Bermasalah Status Gizinya (BOK)	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah dalam Rangka Konfirmasi Balita Risiko Gangguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi (Termasuk Balita yang tidak Datang Timbang) (BOK)	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Pertemuan Analisis Pemantauan Pertumbuhan (BOK)	200 Orang	205 Orang	102,5			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pendampingan Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu (BOK)	400 Orang	400 Orang	100			
	Jumlah jamuan peserta dan petugas yang mengikuti kegiatan	168 Box	84 Box	50			
	Jumlah ATK yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Peserta Yang Hadir Kegiatan Edukasi Penyuluhan Kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi (BOK)	120 Orang	120 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3.718.000	3.718.000	100	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK), keterlambatan pelaksanaan kegiatan rockport	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK), kordinasi dengan PJ Kes.Ja	
	Jumlah peserta yang mengikuti rocksport pegawai	67 Orang	67 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Pemeriksaan Kebugaran Jasmani, Pengukuran TB dan BB, Pengukuran Obesitas), (BOK)	2 Orang	2 Orang	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		37.950.000	37.650.000	99,21	Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK)	Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK)	
	Jumlah bulan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Bulan	9 Bulan	75			
	Jumlah pembentukan gerakan 1 rumah 1 jumantik (Juru Pemantau Jentik)	4 Kelurahan	0 Kelurahan	0			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman (BOK)	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pemeriksaan Kuaitas Air Minum (Pengambilan Sampel dan Pengujian Sampel (BOK)	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pengambilan Sampel dalam Rangka Surveilans Kuaitas Air Minum (BOK)	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Dasar (BOK)	40 Orang	36 Orang	90			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		4.670.000	4.670.000	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Kegiatan Penggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat	40 Orang	40 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	lain untuk melanjutkan kegiatan Germas BOK						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		35.714.854	35.403.100	99,13	proses penyusunan kontrak	-	
	Jumlah biaya transport peserta pembinaan Asman TOGA dan Akupresur	120 Orang/Kegiatan	120 Orang/Kegiatan	100			
	Jumlah peserta, petugas hadir dalam kegiatan	125 Orang	125 Orang	100			
	Tersedianya bahan atau bibit tanaman TOGA di Puskesmas dan 4 Kelurahan	422 Item	422 Item	100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		800.000	800.000	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Konseling dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza BOK	16 Orang	16 Orang	100			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		9.063.380	9.063.000	100	waktu keberangkatan dengan pemeriksaan haji terbatas	mengotimalkan pemeriksaan haji	
	Jumlah ATK yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	100			
	Jumlah peserta, petugas yang mengikuti kegiatan pemeriksaan calon jemaah haji tahap I tingkat Kecamatan	50 Orang/Kegiatan	60 Orang/Kegiatan	120			
	Jumlah peserta, petugas yang mengikuti kegiatan pemeriksaan jemaah haji tahap II tingkat kota	0 Orang/Kegiatan	0 Orang/Kegiatan	0			
	Jumlah peserta, petugas yang mengikuti kegiatan pengukuran kebugaran tingkat kecamatan (Rocksport)	0 Orang/Kegiatan	0 Orang/Kegiatan	0			
	Jumlah peserta petugas yang mengikuti kegiatan sosialisasi calon jemaah haji tingkat Kecamatan	50 Orang/Kegiatan	60 Orang/Kegiatan	120			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		34.835.000	34.835.000	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pemantauan jentik secara berkala BOK	160 Orang	160 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orang tua dan ulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Kepada guru dan wali murid BOK	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan penyakit meular lainnya pada bu hamil dan kelompok berisiko	80 Orang	80 Orang	100			
	umlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu PTM dan posyandu lansia BOK	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Penemuan kasus PD3I, Kasus kontak TB dan kass mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan iwa serta penyakit lainnya	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit	136 Orang	136 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P BOK	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Monitoring an bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Follow Up tatalaksana danpencegaha cacat	16 Orang	16 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	kasus dan penyakit menular lainnya serta gangguan jiwa BOK						
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pengendalian vektor nyamuk (pemerantasan saang nyamuk, larvasidasi, fogging, indoor Residual Spraying (IRS) modifikasi lingkungan BOK	8 Orang	8 Orang	100			
Operasional Pelayanan Puskesmas		583.402.000	476.427.649	81,66	- Terkendala karena masih dalam proses penginputan DPA pada aplikasi SIMDA (BOK) - Pendapatan Kapitasi dari BPJS (JKN)	- Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPKAD (BOK) - Melakukan Follow Up Kebersertaan BPJS (JKN)	
	Jumlah Laptop Yang Diadakan	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah lemari es yang diadakan	2 Unit	0 Unit	0			
	Jumlah microphone yang diadakan	1 Buah	1 Buah	100			
	Tersedianya Insentif UKM Bagi ASN dan Non ASN (BOK PKM)	5 Bulan	0 Bulan	0			
	Jumlah Peserta yang Hadir Kegiatan Lokakarya Mini dalam Rangka Penguatan Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan (P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian (P3) Kinerja Puskesmas Serta Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Lainnya (BOK)	980 Orang	980 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam Rangka Intervensi Hasil PIS-PK (BOK)	259 Orang	259 Orang	100			
	Jumlah Petugas yang Melakukan Kunjungan Kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi Awal dalam Rangka Deteksi Dini dan Pengelolaan Masalah Kesehatan Terintegrasi Melalui Pendekatan Keluarga (BOK)	320 Orang	320 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Sound System Yang Diadakan	2 Item	2 Item	100			
	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Obat Obatan Yang Diadakan	4 Item	4 Item	100			
	Jumlah Komputer Yang Diadakan	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah Jenis Bahan Laboratorium / Reagent Yang Diadakan	8 Item	8 Item	100			
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	21 Jenis	0 Jenis	0			
	Jumlah Exhaust Fan Yang Diadakan	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Alat Rumah Tangga (Home Use) Yang Diadakan	1 Item	1 Item	100			
	Jumlah Alat Pemadam Kebakaran Yang Diadakan	4 Unit	4 Unit	100			
	Jumlah AC Dipelihara	23 Unit	23 Unit	100			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100,0%	100			
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		21.600.000	18.321.426	84,82	proses MOU dengan PT Telkom untuk sewa e-puskesmas selesai dilakukan pada bulan maret sehingga realisasi bisa dilakukan pada bulan april, sewa aplikasi e-puskesmas saat ini belum bisa di gunakan untuk jaringan puskesmas, sehingga realisasi berkurang	tidak ada	
	jumlah penyediaan sewa aplikasi e-puskesmas	12 bulan	12 bulan	100			
	jumlah pembayaran jasa internet	12 bulan	12 bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		68.400.000	68.372.500	99,96			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100,00%	60,00%	60			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		68.400.000	68.372.500	99,96			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK) 2 Orang	12 Bulan	12 Bulan	100			
UPTD Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		23.407.171.971	22.518.937.236	96,21			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		93.686.376	83.879.680	89,53			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		23.313.485.595	22.435.057.556	96,23			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	82,7%	82,74			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		23.313.485.595	22.435.057.556	96,23	-Puskesmas Non Poned tidak melaksanakan Ambulance Rujukan. - Pemegang Program Prolanis Puskemas tidak mengetahui bagaimana cara penginputan ke sistem P-Care & Dikarnakan Pandemi. -Keterlambatan claim tagihan dari BPJS Kesehatan. -Jumlah Peserta Bantuan Subsidi Kelas 3 Mandiri Aktif sesuai dari sistem data Kepesertaan BPJS Kesehatan. -Rujukan Ambulance Puskesmas Poned melebihi target. - Jumlah Peserta PBPU BP Pemda melebihi target sesuai dari sistem data Kepesertaan BPJS Kesehatan.	-Diskusi dengan Puskesmas Non Poned agar Rujukan ambulance dilaksanakan. -Diskusi pada Pihak Ketiga BPJS memberikan tagihan tepat waktu setiap bulannya. - Mengadakan Sosialisasi kepada pemegang program prolanis Puskesmas cara menginput di sistem P-Care & Dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan. -Mengurangi Jumlah Peserta & Anggaran Bantuan Subsidi Kelas 3 Mandiri Aktif. - Menghitung ulang perencanaan anggaran untuk Puskesmas Poned - Menghitung ulang perencanaan jumlah & anggaran peserta PBPU.	
	Jumlah Orang Hadir dalam Pertemuan Rapat Koordinasi Kegiatan Non Kapitasi (Prolanis)	50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	100			
	Jumlah Orang Hadir dalam Rapat Koordinasi dengan Bendahara JKN dan BPJS	18 Orang/Kali	18 Orang/Kali	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Orang Hadir dalam Rapat Koordinasi Kegiatan JPKM	50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	100			
	Jumlah Orang Hadir dalam Rekonsiliasi Kepesertaan	60 Orang/Kali	60 Orang/Kali	100			
	Jumlah Penggandaan	18227 Lembar	18227 Lembar	100			
	Jumlah Peserta Premi PBI (APBD II) dan Subsidi (63605 jiwa x 12 Bulan)	63605 Jiwa/Bulan	66605 Jiwa/Bulan	104,72			
	Jumlah Subsidi Premi BPJS Kelas 3 Mandiri (58322 Jiwa x 12 Bulan)	58322 Jiwa/Bulan	38380 Jiwa/Bulan	65,81			
	Jumlah Orang Hadir dalam Pelaksanaan Evaluasi Kepesertaan JKN PBI APBD II Kegiatan JPKM	100 Orang/Kali	100 Orang/Kali	100			
	Jumlah Ambulance Rujukan Puskesmas (Selain Ciwandan & Pulomerak) 2 org x 4 lokasi x 5 kali	40 Orang/Kali	0 Orang/Kali	0			
	Jumlah Orang Hadir dalam Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kepesertaan JKN PBI APBD II Kota Cilegon	160 Orang/Kali	160 Orang/Kali	100			
	Jumlah Orang Hadir dalam Pertemuan Rapat Koordinasi Kegiatan Non Kapitasi	50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	100			
	Jumlah Orang Hadir dalam Pelaksanaan Kegiatan Senam Prolanis	3168 Orang/Kali	60 Orang/Kali	1,89			
	Jumlah Orang Hadir dalam Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Prolanis	1152 Orang/Kali	60 Orang/Kali	5,21			
	Jumlah Orang Hadir dalam Kegiatan JPKM dan OPD/Instansi terkait	50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	100			
	Jumlah Kegiatan Pertemuan Bidan	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Jasa Tenaga Kesehatan	1730 Kasus	1074 Kasus	62,08			
	Jumlah Honor PPTK (2 org x 17 bln)	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Cetak Spanduk Digital Printing 5 mtr x 7 Kegiatan	35 m2	35 m2	100			
	Jumlah Barang Habis Pakai (Materai) 10.000	146 Lembar	146 Lembar	100			
	Jumlah Ambulance Rujukan Puskesmas (Ciwandan & Pulomerak) 2 orangx 2 lokasi x 5 kali	20 Orang/Kali	23 Orang/Kali	115			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu		2.133.787.570	1.626.332.254	76,22			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.005.236.586	941.678.010	93,68			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.128.550.984	684.654.244	60,67			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	50,0%	50			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		973.263.584	684.654.244	70,35	Penggunaan Belanja Tenaga Kesehatan Sebagai Pendamping Menyesuaikan dengan Jadwal dinas petugas Kesehatan	terus melakukan koordinasi, pengawasan di setiap pelaksanaannya	
	Pelayanan Ambulan Rujukan Gratis	12 Bulan	12 Bulan	100			
	SPGDT	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pelayanan Ambulan Jenazah	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		155.287.400	0	0	Tidak sesuai anatar pekerjaan dengan kode rekening	Pengadaan dilakukan tahun depan	
	Jumlah Bulan Penyediaan dan Pengelolaan SPGDT	12 Bulan	0 Bulan	0			
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah		514.997.621	430.159.344	83,53			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		162.716.426	139.419.189	85,68			
	Indeks Lakip Perangkat Daerah	75,7 poin	79,89 poin	105,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	59,0 poin	86,24 poin	146,17			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,7 poin	82,46 poin	103,46			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		331.881.195	277.942.155	83,75			
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100,00%	103,00%	103			
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100,00%	99,07%	99,07			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		331.881.195	277.942.155	83,75	Perubahan KPA dan PPTK, TKDN Reagensia Lab sebagian besar tidak tersedia	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan P2BJ	
	Jumlah Bahan/barang Pakai habis Lab yang disediakan	84 Item	84 Item	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Manajemen Laboratorium	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pengiriman Sampel ke Laboratorium Rujukan	144 Kali	144 Kali	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		20.400.000	12.798.000	62,74			
	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100,00%	60,00%	60			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.400.000	12.798.000	62,74	Perubahan Jadwal pelaksanaan terkait topik pelatihan dan biaya pelatihan lebih rendah dari pagu Anggaran	Penjadwalan ulang Pelatihan sesuai topik pelatihan	
	Jumlah SDM UPTD Labkesda yang ditingkatkan kompetensinya	4 Orang	4 Orang	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan Kegiatan Prioritas. Berikut merupakan Dukungan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan:

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
PP 5 Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan	KP 5.1 Peningkatan kualitas layanan RSUD; KP 5.2 Peningkatan kualitas layanan puskesmas: 9 puskesmas dengan fasilitas, utilitas dan sdm yang handal;

	KP 5.3 Perluasan Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin; KP 5.4 Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan;

Terdapat 4 (empat) Program Teknis yang mendukung Program Prioritas dalam Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan (PP 5), yaitu terdiri dari:

1. **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
 - a. Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan (Target Kinerja 100%)
 - b. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan (Target Kinerja 100%)
2. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
 - a. Persentase SDM Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya (Target Kinerja 100%)
3. **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**
 - a. Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Memenuhi Syarat (Target Kinerja 68%)
 - b. Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat Yang Memenuhi Standar (Target Kinerja 68%)
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**
 - a. Indeks Keluarga Sehat (Target Kinerja 0,30 Skore)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan layanan Kesehatan kepada masyarakat. Dengan Realisasi rata-rata pencapaian SPM Kesehatan Kota Cilegon di Tahun 2022 adalah sebesar 103,00% dengan rincian sebagai berikut:

1. **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT:**
 - a. **Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan**

No	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Uraian Data	Capaian Kinerja
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pembilang: Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan <i>Antenatal</i> sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator). Realisasi tahun 2022 : 8.535 orang Penyebut: Jumlah sasaran Ibu Hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator). Realisasi 2022 : 8.549 orang	99,84%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pembilang:	101,65%

No	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Uraian Data	Capaian Kinerja
		Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi tahun 2022 : 8.296 orang Penyebut: Jumlah sasaran Ibu Bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Realisasi 2022 : 8.161 orang	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pembilang: Jumlah Bayi Baru Lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi : 8.179 Orang Penyebut: Jumlah sasaran bayi baru lahir di x 100 % wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Realisasi : 7.772 Orang	105,24%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pembilang: Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3. Realisasi 2022 : 28.865 Orang Penyebut: Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama. Target : 30.242 Orang	95,45%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pembilang: Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Realisasi 2022 : 58.711 Orang Penyebut:	88,16%

No	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Uraian Data	Capaian Kinerja
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. Target : 66.596 Orang	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pembilang: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi 2022 : 287.066 Orang Penyebut: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Target : 303.769 Orang	94,50%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pembilang: Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator). Realisasi : 33.514 Orang Penyebut: Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator). Target : 37.205 Orang	90,08%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pembilang: Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Realisasi : 92.924 Orang Penyebut: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Target : 103.656 Orang	89,65%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pembilang:	106,72%

No	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Uraian Data	Capaian Kinerja
		Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi : 9461 Orang Penyebut: Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Target : 8865 Orang	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pembilang: Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi : 638 Orang Penyebut: Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama. Target : 588 orang	108,50%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pembilang: Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi : 8.947 Orang Penyebut: Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Target : 7.523 Orang	118,93%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Pembilang: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Realisasi : 17.089 Orang Penyebut: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama Target : 12.445 Orang	137,32%

Capaian realisasi pencapaian SPM didukung melalui Pendekatan Keluarga yang salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan didalam gedung saja, melainkan juga ke luar gedung dengan mengunjungi keluarga di Kota Cilegon. dan *intervensi* melalui pelaksanaan dan pemenuhan *output* pada Sub Kegiatan:

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

b. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan

No	Indikator SPM Bidang Kesehatan	Uraian Data	Capaian Kinerja
1	<u>Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan</u>	Pembilang: Jumlah data dan informasi kesehatan yang tersedia. Realisasi : 106 Tabel Penyebut: Jumlah data dan informasi kesehatan yang ada Target : 107 Tabel	99,07

Ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan mewujudkan data yang akurat dan dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Kesehatan. Kebutuhan data dan informasi kesehatan dapat dipenuhi melalui data dasar Puskesmas dan Rumah Sakit, Capaian Kinerja SPM, Sistem Informasi Kesehatan dan Profil Kesehatan.

Realisasi Data Informasi yang tersedia Tahun 2022 adalah sebesar 106 Tabel dari target 107 Tabel sehingga Capaian Data Informasi adalah sebesar 99,77%, ini dikarenakan dengan masih adanya Tabel Data yang dari Klinik Swasta, Praktik Dokter Mandiri dan Praktik Bidan Mandiri belum tersedia datanya. Intervensi Sub Kegiatan yang mendukung yaitu pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a. Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya

No	Indikator	Uraian Data	Capaian Kinerja
1	<u>Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya</u>	Pembilang: Jumlah SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Realisasi : 2.121 Orang Penyebut: Jumlah SDM Kesehatan yang ada Target : 3.510 Orang	60,00%

SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dengan Capaian Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya di Dinas Kesehatan Kota Cilegon sebesar 60% ini dikarenakan masih kurang maksimal Pengawasan Nakes yang Praktik di Fasyankes dan masih adanya sebagian Nakes yang belum menyadari bahwa penting sekali untuk pembuatan STR dan SIP.

Intervensi Sub Kegiatan yang mendukung:

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a. Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat

No	Indikator	Uraian Data	Capaian Kinerja
1	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat	Pembilang: Jumlah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat. Realisasi : 182 Lokasi Penyebut: Jumlah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang ada. Target : 157 Lokasi	86,00%

Capaian Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 86%, hal ini dikarenakan adanya perubahan UU Cipta terkait Perizinan bahwa izin harus diterbitkan tanpa adanya survey sarana dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon.

Intervensi Sub Kegiatan yang mendukung:

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

b. Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Standar

No	Indikator	Uraian Data	Capaian Kinerja
1	Persentase Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Standar	Pembilang: Jumlah Sarana Distribusi Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar Realisasi : 116 Lokasi Penyebut: Jumlah Sarana Distribusi Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa Target : 103 Lokasi	88,00%

Capaian Sarana Distribusi Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar adalah sebesar 88%, ini dikarenakan dengan adanya edaran terkait cemarkan sirup yang mengandung EG dan DEG maka pengawasan Sarana Yanfar lebih intens.

Intervensi Sub Kegiatan yang mendukung:

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
2. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAARAKAT BIDANG KESEHATAN

a. Indeks Keluarga Sehat

No	Indikator	Uraian Data	Capaian Kinerja
1	Indeks Keluarga Sehat	Berdasarkan hasil penilaian Indeks Keluarga Sehat yang dilakukan oleh Surveyor. Hasil penilaian Indeks Keluarga Sehat sebesar : 0,25	83,33%

Realisasi Hasil Penilaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2022 adalah sebesar 0,25 dari target 0,30 sehingga capaian Indeks Keluarga Sehat adalah sebesar 83,33%, ini dikarenakan dengan masih adanya anggota Keluarga yang Merokok dan Hipertensi yang tidak berobat teratur.

Intervensi Sub Kegiatan yang mendukung:

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN UPTD PERBENGKELAN, ALAT BERAT DAN LABORATORIUM

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		174.449.566.033	118.817.119.361	68,11			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.811.849.073	20.505.341.860	89,89	- Penilaian LAKIP dari inspektorat melebihi target karena di dukung dengan evidence/bukti. - Nilai RB tidak mencapai target karena tidak didukung evidence/ bukti.	Melengkapi evidence/bukti yang diperlukan untuk meningkatkan Nilai RB pada tahun 2023	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	68,50%	72,23%	105,45			
	Indeks RB Perangkat daerah	71,20%	60,42%	84,86			
Arah kebijakan : Peningkatan fungsi pusdalop, pengembangan sistem informasi, penyelenggaraan diklat dan logistik, penguatan regulasi, tata kelembagaan dan kemitraan masyarakat, serta sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana							
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		6.994.431.044	6.532.048.453	93,39	penanganan titik banjir sd th 2021 : 13 titik banjir realisasi penanganan titik banjir di th 2022 : 18 titik banjir penanganan titik banjir sd th 2022 : 31 titik banjir total titik banjir : 96 titik banjir persentase penanganan titik banjir/genangan sd th 2022 : 31/96 : 32,29%		
	Prosentase titik yang rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	26,04%	32,29%	124			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,2%	99,17			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		207.675.520	196.925.100	94,82			
	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Bidang Sumber Daya Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		4.613.299.761	4.173.041.953	90,46			
	Jumlah Dokumen DED dan Database Bidang SDA	40 Dokumen	39 Dokumen	97,5			
Pembangunan Polder/Kolam Retensi		2.173.455.763	2.162.081.400	99,48	beberapa tandon belum berfungsi secara maksimal karena pembangunan fisik belum mencapai 100%	Dengan memfokuskan kegiatan pembangunan fisik satu persatu sehingga dapat diselesaikan secara bertahap. Upaya selanjutnya mengubah air dalam tandon menjadi sumber air baku.	
	Pasangan Dinding TPT Tandon	1356 m3	1356 m3	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SPAM melalui penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan penyediaan air minum yang terintegrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		5.122.107.449	555.608.668	10,85	rumah tangga yg dpt air minum sd th 2021 : 128.900 jiwa rumah tangga yg dpt air minum pada th 2022 : 4.915 jiwa rumah tangga yg dpt air minum sd th 2022 : 133.815 jiwa total rumah tangga : 452.991 jiwa Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg layak dan aman : $133.815/452.991 \times 100\% = 29,54\%$		
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg layak dan aman	15,01%	29,54%	196,8			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	33,3%	33,33			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		889.500.000	250.950.190	28,21	- Terdapat 6 kegiatan yang gagal lelang dan tidak dapat dilelang kembali mengingat pelaksanaan diakhir tahun senilai kurang lebih Rp. 600 Juta	- menginventarisasi dan mengevaluasi kegagalan tersebut untuk dilaksanakan ditahun berikutnya - membuat DED ditahun berikutnya	
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67			
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2.408.999.967	304.658.478	12,65	-Terdapat 1 kegiatan gagal lelang senilai kurang lebih Rp. 300 Juta karena tidak ada yang mengajukan penawaran -Terdapat 3 paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena belum memiliki DED senilai kurang lebih Rp. 525 Juta	meninventarisasi dan mengevaluasi untuk dilaksanakan ditahun berikutnya	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah lokasi Pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang terbangun	6 Lokasi	2 Lokasi	33,33	- Terdapat 2 kegiatan pembangunan sumur bor yang tidak dapat dilaksanakan pada APBD perubahan mengingat terbatasnya waktu di Lokasi langon 2 kel. Mekarsari dan link. Baru kelurahan Tamansari.		
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		1.823.607.482	0	0	Tidak Dilaksanakan karena terkait waktu pelaksanaan sangat terbatas karena pada bulan Juli 2022 ada proses transisi pelimpahan kewenangan dari dinas Perkim ke bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Minum dan Drainase (PSDAAMD) DPUPR	sudah disurvei untuk diinventarisasikan pemeliharannya untuk pelaksanaan di tahun 2023	
	Jumlah lokasi SPAM bukan jaringan perpipaan yang terpelihara	8 lokasi	0 lokasi	0			
Arah kebijakan : Peningkatan sistem drainase perkotaan dan sungai dalam daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		21.563.912.312	20.852.229.906	96,7	Panjang drainase kondisi baik sd th 2021 : 139,609 km Realisasi panjang drainase kondisi baik th 2022 : 6,363 km panjang drainase kondisi baik sd th 2022 : 145,9742 km total panjang drainase : 210,89 km persentase drainase kondisi baik th 2022 : 145,9742 km/210,89 km : 69,22%		
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	58,00%	69,22%	119,34			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	100%	86,2%	86,19			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		14.979.662.753	14.703.097.725	98,15	Terdapat 3 kegiatan yang gagal lelang dan tidak dapat diusulkan kembali karena masa kerja sudah berada di akhir tahun. 1. Peningkatan Sal. Link. Kubang Laban RT.001 RW.002 Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang senilai kurang lebih Rp. 155 Juta 2. Peningkatan sungai Kedung Ingas Link. Pabuaran RT.01/06 Kel. Ciwedus senilai Kurang lebih Rp. 133 Juta 3. Jasa Konsultan Pengawas Lapangan Paket 26 (3 Lokasi) Senilai kurang lebih Rp. 33 Juta	menjadikan catatan/evaluasi untuk dilaksanakan ditahun berikutnya	
	Terwujudnya Pasangan batu kali	1030 m	1030 m	100			
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		2.553.094.700	2.352.101.589	92,13			
	Panjang saluran/drainase yang direhabilitasi (Swakelola)	500 m	261 m	52,2			
	Panjang saluran/drainase yang direhabilitasi (melalui Penyedia)	1114 m	971 m	87,16			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		4.031.154.859	3.797.030.592	94,19			
	Panjang Saluran/drainase yang dipelihara (Swakelola)	9 km	8 km	88,89			
	Panjang Saluran/drainase yang dipelihara (melalui Penyedia)	9 km	7,62 km	84,67			
Arah kebijakan : Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sistem informasi, pola insentif disinsentif/sanksi, kapasitas dan kualitas PPPNS penataan Ruang serta peran masyarakat dalam penataan ruang							
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		11.001.602.136	10.069.321.055	91,53	Brdsrkn UU No.11 Th. 2020 ttg Cipta Krja & PP no 16 th 2021	Mengadakan sosialisasi dan	Pembangunan Gedung Dinas Sosial

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					ttg Prturan pelaks UU no.28 th 2002 ttg Bang Gdg, isiny IMB mnjd Prstjuan Bang Gdng (PBG) ,PBG tdk bsa dilaks pd Jan sd Mart 2022 dikrnkn PEMKOT Clgn blm mmlki PERDA Retbsi PBG. Nmn pd Aprl 2022 ad SE Brsma 3 Mentri ttg Percptn pelks Ret PBG yg memprblhkn mmngut Ret PBG dg trf PERDA yg lm smp berlknya pntpn PERDA PBG yg br, Cap Indiktr Prog 23,88% diprlh dr Rekmdsi PBG yg diklurkn pd th 2022 sbnyak 285 dok dr trgt 300 dok/th	himbauan kepada masyarakat, optimalisasi pendataan bangunan gedung, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan. Mempercepat proses penetapan PERDA PBG yang isinya tentang tarif Retribusi PBG Kota Cilegon	Kota Cilegon akan dilaksanakan TA 2023
	Rasio Kepatuhan IMB	26,64%	23,88%	89,64			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	99,2%	99,17			
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		799.999.346	754.534.655	94,32	-	-	Pembangunan Gedung Dinas Sosial Kota Cilegon akan dilaksanakan TA 2023
	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	5 lokasi	5 lokasi	100			
	Jumlah Pembangunan Jembatan Penyebrangan	1 unit	1 unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	2 unit	2 unit	100			
	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Media Luar	12 titik	12 titik	100			
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		10.182.417.092	9.295.600.702	91,29	Adanya Dok Perencanaan yg tdk terealisasi, yaitu Perenc Perawatan gd BPKPAD Kota Clgn krna kegagalan dlm proses pengadaan barang/jasa & Penysnan Dok Lingk RUMDIN Jab SEKDA krna Dok Penunjang sdh tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Akan dianggarkan kembali Perencanaan Perawatan Gedung BPKPAD Kota Cilegon di TA berikutnya	Pembangunan Gedung Dinas Sosial Kota Cilegon akan dilaksanakan TA 2023
	Jumlah fasad gedung yang di bangun	1 gedung	1 gedung	100			
	Jumlah Landscape yang di bangun	1 lokasi	1 lokasi	100			
	Jumlah gedung rumah dinas jabatan yang di bangun	1 gedung	1 gedung	100			
	Jumlah gedung kantor yang di renovasi	1 gedung	1 gedung	100			
	Jumlah dokumen perencanaan yang di susun	10 dokumen	8 dokumen	80			
	Jumlah rehab interior kantor yang di bangun	2 gedung	2 gedung	100			
	Jumlah Normalisasi saluran dan kolam yang diperbaiki	1 lokasi	1 lokasi	100			
	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang di bangun	9 gedung	9 gedung	100			
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		19.185.698	19.185.698	100	-	-	Pembangunan Gedung Dinas Sosial Kota Cilegon akan dilaksanakan TA 2023
	Jumlah dokumen bantuan teknis yang di susun	50 Dokumen	50 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kinerja pelayanan jalan dan transportasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		105.330.688.924	58.921.485.854	55,94			
	Persentase jalan dalam kondisi baik	87,40%	88,47%	101,22			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	65,3%	65,28			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		2.292.147.410	1.836.756.496	80,13	Gagal lelang. maka diputuskan dengan pengadaan langsung, sehingga terjadi keterbatasan waktu yang mempengaruhi capaian target perencanaan.	Dilakukan perubahan metode pengadaan dari seleksi menjadi pengadaan langsung.	
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 dokumen	11 dokumen	84,62			
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		39.114.973.000	5.561.363.329	14,22	Data pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran langsung belum lengkap sehingga tidak dapat dibayarkan.	Koordinasi dengan pihak terkait.	
	Luas lahan/tanah yang di bebaskan	62000 m2	2636 m2	4,25			
Pengelolaan Leger Jalan		194.858.000	98.962.050	50,79	Karena proses lelang mengalami kegagalan, sehingga merubah metode pengadaan barang dari seleksi menjadi pengadaan langsung sehingga mengurangi kebutuhan biaya.	Untuk tahun 2023 kegiatan dianggarkan di Triwulan agar waktunya mencukupi.	
	Dokumen Leger Jalan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembangunan Jalan		172.400.000	0	0	Tidak ada dana pendampingan karena tidak mendapatkan bantuan DAK.	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.	
	Panjang Jalan yang dibangun	2450 m	0 m	0			
Rekonstruksi Jalan		30.700.893.297	23.695.114.851	77,18	- Gagal lelang - Penawaran lebih dari 10% - Optimalisasi Pekerjaan	- Koordinasi dengan Pihak Pokja - Evaluasi Pekerjaan yang dilaksanakan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Panjang jalan yang konstruksinya ditingkatkan	4000 m	3411 m	85,28			
Pemeliharaan Berkala Jalan		12.930.429.846	10.860.672.712	83,99			
	Panjang jalan yang dipelihara berkala	7 km	7 km	100			
Pemeliharaan Rutin Jalan		19.218.088.173	16.477.776.563	85,74	Karena bahan material untuk penangnan jembatan tidak masuk dalam SIPD .	Evaluasi target yang ditangani dan pengajuan bahan bahan yang akan digunakan dalam SIPD.	
	Panjang jalan yang dipelihara rutin	70 km	57 km	81,43			
Pemeliharaan Rutin Jembatan		706.899.198	390.839.853	55,29	Bahan material untuk penangan jembatan tidak masuk dalam SIPD	- Evaluasi target yang akan ditangani - Mengusulkan bahan -bahan yang akan digunakan dalam SIPD	
	Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	3 unit	2 unit	66,67			
Arah kebijakan : Peningkatan kinerja pengawasan internal, pengendalian dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan kualitas SDM jasa konstruksi							
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		174.977.295	152.279.354	87,03	Perhitungan indikator program adalah : 1. Tenaga kerja yang tidak bersertifikat 2000 orang, Yang sudah bersertifikat di tahun 2021 berjumlah 1050 orang dan pada tahun 2022 yang mengikuti sertifikasi berjumlah 28 orang, yang lulus dan bersertifikat 24 orang sehingga sampai dengan Tahun 2022 tenaga kerja yang bersertifikat berjumlah 1074 orang 2. Adanya Penyesuain harga sertifikasi dari LSP	1. Menyesuaikan harga sertifikasi LSP	
	rasio tenaga kerja kontruksi yang memiliki sertifikat	58,00%	34,94%	60,24			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	kompetensi (Operator, teknisi, Analis)						
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	85,7%	85,71			
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		99.994.000	95.368.044	95,37			
	Jumlah Tenaga Terampil yang di Sertifikasi	28 orang	24 orang	85,71			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan		49.998.625	47.770.710	95,54	Terhambatnya proses pengadaan karena semua bidang se-PUTR belum selesai penginputan dan sulitnya mencari penyedia	Mengkoordinasikan ke setiap bidang-bidang untuk segera menyelesaikan	
	Jumlah dokumen harga upah, alat, dan bahan ke-PU-an PUTR	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0%	0,0%	100	Berdasarkan UU Ciptakerja, sudah tidak diperlukan lagi penerbitan IUJK		
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		24.984.670	9.140.600	36,58	Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka SIUJK sudah tidak berlaku akan tetapi perda No 3 tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa konstruksi belum di cabut.	Pencabutan peraturan Daerah kota cilegon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, seHINGA sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Terkait penyerapan anggaran sebesar 9.140.600 digunakan untuk rapat pembahasan tentang tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kewenangan rekomendasi SIUJK sudah bukan kewenangan daerah	IUJK Nasional sebaiknya dihilangkan	
	Jumlah Dokumen Penerbitan Rekomendasi SIUJK	100 dokumen	0 dokumen	0			
Arah kebijakan : Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sistem informasi, pola insentif disinsentif/sanksi, kapasitas dan kualitas PPPNS penataan Ruang serta peran masyarakat dalam penataan ruang							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1.449.997.800	1.228.804.211	84,75	Nilai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Cilegon Tahun 2022 diperoleh dari luas lahan yang sesuai dengan RTRW Tahun 2022 (2.979,77 Ha) dibandingkan dengan luas lahan kawasan budidaya pada RTRW (12.746 Ha), sehingga diperoleh besaran persentase kesesuaian sebesar 23,38%.	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada program penyelenggaraan penataan ruang	
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	22,57%	23,38%	103,59			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		99.999.520	97.451.550	97,45	- Terkendala Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) - KLHS masih dalam Proses Lelang (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) yang	- Masih Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan Kementerian ATR/BPN - Akan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon	dilakukan penyesuaian anggaran perubahan	
	Jumlah Dokumen RDTR yang terintegrasi dengan KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		614.999.112	500.537.195	81,39	Terkendala Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)	- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian ATR/BPN) - Akan dilakukan penyesuaian anggaran perubahan	
	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen Pemutakhiran Perangkat Pelayanan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Orang yang memperoleh pembinaan penyelenggaraan penataan ruang	105 Orang	105 Orang	100			
	Kompilasi Data Persiapan Penyusunan RRTR	1 dokumen	1 dokumen	100			
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		99.999.880	96.943.430	96,94			
	Jumlah Produk Hukum Rencana Tata Ruang yang tersosialisasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,0%	99			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk		234.999.752	172.516.216	73,41	- Perubahan Aturan dan Mekanisme Perizinan (OSS-PBG) - Menurunnya	- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Investasi dan Pembangunan Daerah					Permohonan SKRK dari Masyarakat - Adanya pengalihan kebijakan (perpindahan pelayanan penataan ruang/ SKRK) sehingga kinerja proses tidak mencapai target	(Kementerian ATR/BPN) - Akan dilakukan penyesuaian anggaran perubahan	
	Jumlah Dokumen Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Cilegon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Jumlah Dokumen Pelayanan Penataan Ruang yang diterbitkan	100 Dokumen	94 Dokumen	94			
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Ruang Terbuka Publik (Hijau dan Non-Hijau) Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Sistem Informasi Penataan Ruang		399.999.536	361.355.820	90,34			
	Jumlah Dokumen Peta Guna Bangunan Eksisting Kota Cilegon (Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon) Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium		428.832.069	416.238.149	97,06			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		428.832.069	416.238.149	97,06	-		
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	68,5 Poin	72,23 Poin	105,45			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi atas implementasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan proses penilaian LAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 yang dilakukan Inspektorat Kota Cilegon belum selesai, maka realisasi indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah menggunakan penilaian tahun 2021. Berdasarkan Surat Inspektorat No. 700/266.14/Sekret Tanggal 12 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021, hasil evaluasi LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 72,23 poin. Target penilaian Lakip OPD DPUPR melebihi target sebesar 105,45% karena telah memenuhi penyempurnaan dalam persyaratan penilaian dengan melampirkan evidence/bukti.

Capaian Target indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022 sebesar 60,42 poin. Capaian tersebut tidak memenuhi target dari nilai sebesar 71,20 poin, sehingga capaian nya hanya 84,86 %. Hal ini disebabkan Ketika penilaian belum melampirkan evidence/bukti administrasi yang dibutuhkan saat penilaian. Berikut Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2022 :

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	68,50	72,23	105,45
2	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	71,20	60,42	84,86

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung memiliki satu indikator yang harus dicapai, yaitu rasio kepatuhan perizinan bangunan gedung, dengan target sebesar 26,64%. Indikator rasio kepatuhan perizinan bangunan gedung didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah bangunan berizin terhadap jumlah seluruh bangunan di Kota Cilegon. Indikator ini dihitung berdasarkan dengan rumus:

$$= \frac{\text{jumlah bangunan yang berizin (PBG)}}{\text{jumlah seluruh bangunan di Kota Cilegon}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tahun 2022, jumlah bangunan berizin adalah 13.828 unit. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan jumlah bangunan berizin, yang menghasilkan data jumlah bangunan berizin adalah 27.540 unit. Jumlah seluruh bangunan di Kota Cilegon pada tahun 2022 adalah 115.328 unit, sehingga rasio kepatuhan perizinan bangunan gedung pada tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{27.540 \text{ unit}}{115.328 \text{ unit}} \times 100\% \\ &= 23,88\% \end{aligned}$$

Target indikator program adalah 26,64% dan dapat direalisasikan sebesar 23,88%, sehingga capaian indikator program sebesar 89,64%.

Tabel Capaian Indikator Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio kepatuhan perizinan bangunan gedung	%	26,64	23,88	89,64

Capaian indikator rasio kepatuhan perizinan bangunan gedung tersebut didukung dengan berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG.
2. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
3. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Terkait kegiatan prioritas daerah pada Program Penataan Bangunan Gedung, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pembangunan Rumah Dinas Jabatan SEKDA Kota Cilegon

Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan SEKDA Kota Cilegon , Tahap I Tahun 2022 fisiknya mencapai fisik 97% dikarenakan terkendala oleh cuaca dan waktu, dan akan dilanjutkan ke TA 2023.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki satu indikator, yaitu persentase luasan genangan yang tertangani (lebih dari 30 cm selama 2 jam). Indikator program dihitung berdasarkan jumlah titik rawan banjir terhadap total luas banjir/genangan di Kota Cilegon, yaitu dengan rumus:

$$= \frac{\text{luas banjir/genangan yang ditangani}}{\text{luas total banjir/genangan}} \times 100\%$$

Dinas PUTR Kota Cilegon dalam menanggulangi permasalahan banjir/genangan berpedoman pada data banjir/genangan sebanyak 96 titik dengan luas total sebesar 134,50 ha, sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel Data Dasar Lokasi Banjir / Genangan di Kota Cilegon

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas Genangan (Ha)
I	Jombang	1. Wilayah Fly Over SKI / Link. Priuk Rel Kel. Sukmajaya	0,1
		2. Link. Sawah (Sukmajaya) Kel. Sukmajaya	0,2
		3. Link. Sawah (Seneja Tegal) Kel. Sukmajaya	0,1
		4. Link. Kranggut (RT 001)/RW 003 Kel. Sukmajaya	2
		5. Link. Kranggut (RT 003)/RW 004 Kel. Sukmajaya	2
		6. Link. Samandaran Kel. Panggungrawi	2
		7. Link. Selokan Kel. Panggungrawi	0,2
		8. Komp. BPI Kel. Panggungrawi	1,5
		9. Link. Kependilan Kel. Panggungrawi	0,1
		10. Link. Sukalila Kel. Panggungrawi	0,2
		11. Link. Taman Raya RT 001 Kel. Gedong Dalem	3
		12. Perum. Metro (Samping) Kel. Gedong Dalem	11
		13. SDN Masigit Kel. Masigit	0,1
		14. Perum. PGRI Kel. Masigit	0,1
		15. Link. Sawah Besar Kel. Jombang Wetan	0,5
		16. Link. Rokal Kel. Jombang Wetan	1
		17. Link. Pecek RT 004 Kel. Gedong Dalem	2
		18. Link. Cigiceh RT 003 Kel. Gedong Dalem	1
		19. Link. Taman Raya RT 006 Kel. Gedong Dalem	3
		20. Link. Metro Villa Rt 1 sd 5 Kel. Gedong Dalem	10
		21. Link. Tunjung Putih Rt 002 Kel. Gedong Dalem	1,5
		22. Jombangkali RW 001 Kel. Jombang Wetan	1
		23. Perum. TCI RT 003 & Rt 005 Kel. Sukmajaya	1,5
		24. Link. Terate Udik Kel. Masigit	1
II	Citangkil	25. Link. Gajah Mungkur Kel. Citangkil	1,5
		26. Link. Jerenong Kel. Lebak Denok	1
		27. Kubang Welut Kel. Samangraya	2
		28. Link. Ramanuju Baru (RGM) Kel. Citangkil	1,5
III	Pulomerak	29. Link. Medaksa RT 001 Kel. Mekarsari	0,4

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas Genangan (Ha)
		30. Link. Gamblang RT 004 Kel. Mekarsari	0,1
		31. Link. Sukarela RT 006 Kel. Mekarsari	0,2
		32. Link. Langonsari RT 007/ RW 001 Kel. Mekarsari	0,1
		33. Link. Langon 2 RT 002/ RW 005 Kel. Mekarsari	0,2
		34. Link. Sukajadi RT 001/RW 002 Kel. Mekarsari	0,5
		35. Link. Langon 1 RT 005/RW 001 Kel. Mekarsari	0,1
		36. Link. Mekarsari RT 002 RW 001 Kel. Mekarsari	0,1
		37. Link. Sukamaju (Jalan Tol)/Masjid Al Hidayat Kel. Mekarsari	0,4
		38. Link. Medaksa Sebrang Kel. Tamansari	0,3
		39. Jembatan Jalan Nasional RT 002/RW 005 Kel. Tamansari	0,1
		40. Link. Sudimampir (RT 002, RT 006) RW 004 Kel. Tamansari/ sekitar Rel KA	5
		41. SMPN 6 (Kampung Sawah) Kel. Tamansari	1
		42. Link. Sumurjaya Rt 004 RW 006 Kel. Tamansari	0,2
		43. Link. Langonindah RT 005 RW 006 Kel. Tamansari	0,2
		44. Link. Pasar Baru Kel. Tamansari	0,3
		45. Link. Sukasenang dekat LANAL Kel. Tamansari	0,1
		46. SDN 5 Tamansari dan Lingk. Batu Bolong RT 01/01 Kel. Tamansari	0,3
		47. Link. Kembang Kuning Kel. Suralaya	0,1
		48. Simpang Tiga Jembatan Berigil Kel. Suralaya	0,1
IV	Cilegon	49. Link. Bendungan (Jalan Purbaya) Kel. Bendungan	3
		50. Sawah Blok E (Kel. Ciwaduk)	2,5
V	Purwakarta	51. Perum. Golf Asri Kel. Kebon Dalem	5
		52. Link. Kaligandu Kel. Purwakarta	0,1
		53. Link. Blacu Kel. Tegal Bunder	0,3
		54. Link. Kubang Lampit Kel. Tegal Bunder	1,5
		55. Link. Kedaung Kel. Tegal Bunder	5
		56. Link. Dukuh Malang Kel. Tegal Bunder	3
		57. Link. Sumampir Kel. Ramanuju	1,5
		58. Link. Blok Slorot Kel. Kebon Dalem	0,5
		59. Link. Ramanuju Kenanga Kel. Ramanuju	1,5
		60. Perum. Metro (Cendana & Grand Cendana) Kel. Kebon Dalem	8,7
		61. Link. Gempol Kulon Kel. Pabean	0,1

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas Genangan (Ha)
		62. Link. Pecinan Kel. Pabean	0,3
		63. Link. Pabean Kel. Pabean	0,5
		64. Link. Daliran Kel. Kebon Dalem	0,3
VI	Grogol	65. Komp. Arga Baja Pura Kel. Kotasari	1
		66. Link. Ciore Kwista Kel. Kotasari	0,5
		67. Link. Sumur Menjangan Kel. Kotasari	1
		68. Link. Bagedad/Masigit Kel. Kotasari	0,1
		69. Perum. Puri Krakatau Hijau Kel. Kotasari	0,3
		70. Link. Ciore Waseh Kel. Kotasari	0,5
		71. Link. Kantor Kelurahan Kotasari	2
		72. Komp. TNI AL Kel. Gerem	0,5
		73. Link. Cikuasa Kel. Gerem	0,1
		74. Link. Kalibaru Kel. Gerem	0,5
		75. Link. Sumur Wuluh Kel. Gerem	0,5
		76. Link. Bayur Kel. Gerem	1
		77. Link. Kruwuk Kel. Rawa Arum	5
		78. Link. Pabuaran Kel. Rawa Arum	1
		79. Link. Curug Kel. Rawa Arum	0,1
		80. Link. Bujanggadung Kel. Rawa Arum	1
		81. Link. Kecerangan Belakang Samsat Kota Cilegon Kel. Rawa Arum	0,5
		82. Link. Ciore Gede Kel. Kotasari	1,5
VII	Ciwandan	83. Link. Pintu Air (Penauan) Kel. Kubangsari	5
		84. Link. Kebanjiran Kel. Tegal Ratu	0,5
		85. Link. Cigading Pasar Kel. Kubangsari	1,5
		86. Link. Depan Kantor KORAMIL Kel. Tegal Ratu	3
		87. Link. Sukasari (S. Bapang) Kel. Randakari	2,5
		88. Simpul JLS Jalan Nasional Kel. Kepuh	2,5
VIII	Cibeber	89. PCI Blok D Kel. Kedaleman	3
		90. PCI Blok E Kel. Kedaleman	1,5
		91. Ciberko Kel. Kalitimbang	0,2
		92. Komp. Gedong Damai Kel. Kalitimbang	0,4
		93. Link. Kerotek/Bulakan Kel. Cibeber	0,2

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas Genangan (Ha)
		94. Link. Sambirata RT. 01 sd 05 RW 03 Kel. Cibeber	0,4
		95. Link. Cibeber Kulon Kel. Cibeber	1
		96. Link. Polsek Cibeber Kel. Cibeber	1
Total Luas Banjir dan Genangan			134,5

Penanganan titik banjir sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 13 titik banjir dan realisasi penanganan titik banjir Tahun 2022 sebanyak 18 titik banjir. Total keseluruhan penanganan titik banjir sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar 31 titik banjir. Total luasan penanganan titik banjir pada Tahun 2022 adalah 25,3 ha atau 18 titik banjir dengan rincian lokasi sebagai berikut:

No	Lokasi Titik Banjir	Luas Genangan (ha)
1	Link. Cibeber Kulon Kel. Cibeber	1
2	Link. Polsek Cibeber Kel. Cibeber	1
3	Link. Taman Raya RT 001 Kel. Gedong Dalem	3
4	Link. Terate Udik Kel. Masigit	1
5	Sawah Blok E (Kel. Ciwaduk)	2,5
6	Link. Ramanuju Kenanga Kel. Ramanuju	1,5
7	Link. Gempol Kulon Kel. Pabean	0,1
8	Link. Bayur Kel. Gerem	1
9	Link. Curug Kel. Rawa Arum	0,1
10	Link. Langonindah RT 005 RW 006 Kel. Tamansari	0,2
11	Link. Taman Raya RT 006 Kel. Gedong Dalem	3

No	Lokasi Titik Banjir	Luas Genangan (ha)
12	Link. Kubang Lampit Kel. Tegal Bunder	1,5
13	Link. Pecinan Kel. Pabean	0,3
14	Simpang Tiga Jembatan Berigil Kel. Suralaya	0,1
15	Link. Dukuh Malang Kel. Tegal Bunder	3
16	Link. Sumur Wuluh Kel. Gerem	0,5
17	Link. Kruwuk Kel. Rawa Arum	5
18	Link. Kebanjiran Kel. Tegal Ratu	0,5
	TOTAL	25,3

Realisasi di indikator diperoleh berdasarkan penanganan titik banjir pada Tahun 2022 dengan total keseluruhan seluas 37,82 Ha atau sebanyak 31 titik banjir dengan jumlah titik banjir sebanyak 96 titik atau 134,5 Ha. Realisasi presentase penanganan banjir/genangan yang telah dilakukan DPUTR Kota Cilegon sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 32,29 %. Adapun perhitungan realisasi indikator persentase luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{jumlah titik banjir/genangan yang dotamgani}}{\text{jumalh total titik banjir/genangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{31}{96} \times 100\% \\
 &= 32,29 \, \%
 \end{aligned}$$

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase luasan genangan yang tertangani	%	26,04	32,29	122,31

Salah satu upaya DPUTR Kota Cilegon dalam menanggulangi banjir adalah dengan melaksanakan pembangunan kolam retensi atau yang biasa disebut sebagai tandon. Pembangunan kolam retensi (tandon) merupakan salah satu kegiatan prioritas daerah Dinas PUTR Kota Cilegon tahun 2022-2026. Pada prinsipnya kolam retensi (tandon) yang telah dibangun tersebut sudah berfungsi untuk menampung air, tetapi infrastrukturnya belum terbangun secara maksimal.

Pembangunan tandon dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi yang difokuskan pada lokasi Tandon Sukmajaya II. Target pada tahun 2022 Tandon Sukmajaya II membuat Tembok Penahan Tanah Tandon, Pengecoran Jalan Akses, Pemagaran, Paving Blok Area Tandon dan Pembangunan Saluran Outlet namun pada tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan pemagaran BRC, Batas Lahan, Pembangunan Saluran Outlet dan Pembersihan Gulma di sekitar tandon sehingga serapan anggaran tidak optimal. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan waktu pelaksanaan di TW IV, sedangkan kebutuhan waktu ideal adalah 6 bulan dari mulai proses pengadaan. Berdasarkan hal tersebut, lanjutan pembangunan tandon sukmajaya 2 akan dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2023.

Secara umum pembangunan Tandon di Kota Cilegon terdapat 6 (enam) lokasi yang diprioritaskan. Prioritas sampai dengan akhir RPJMD 2021-2026 difokuskan pada lokasi Sukmajaya 2, Cibuntu, Bulakan dan Karang Asem. Progres Pelaksanaan pembangunan tandon dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No	Uraian	Estimasi Luas Lahan (m2)	Estimasi Luas Tandon (m2)	Kedalaman (m)	Keterangan
1	Tandon Metro	10.250	5.973	7,00	Progress 100% Minus Pompa
2	Tandon Sukmajaya 1	1.175,67	1.175,67	5,00	Progress 100% Minus Pompa Perlu Pengadaan Jalan Akses
3	Tandon Sukmajaya 2	9.287,70	3.146,13	5,00	Progress 73% Minus : Galian : ±300 m3, TPT : ± 231,85 m3 Outlet : 1 unit , Pompa 2 unit dan Perkerasan Jalan Akses : 100 m, lebar 5 m
4	Tandon Bulakan	25.000	18.617	5,00	Progress 41%

No	Uraian	Estimasi Luas Lahan (m2)	Estimasi Luas Tandon (m2)	Kedalaman (m)	Keterangan
					Minus : Galian : ± 40.573m3 TPT : 1356 m3, Outlet : 1 unit, Pompa : 2 unit Perkerasan Jalan Akses 700 m, lebar 5 m
5	Tandon Cibuntu	21.714	15.528	5,00	Progress 30% Minus : Galian :± 66.087 m3, TPT : 1614 m3, Inlet : 1 unit, Outlet 1 unit, Pengadaan Lahan untuk Jalan Akses (3 bidang/ ± 600 m2). Perkerasan Jalan Akses 120 m, lebar 5 m
6	Tandon Karangasem	20.000			Perencanaan, Proses Pengadaan Tanah

Beberapa visualisasi tandon yang sudah dibangun di Kota Cilegon, seperti gambar di bawah ini :



Gambar Tandon Sukmajaya 1 dan 2



Gambar.. Lokasi Tandon Cibuntu



Gambar.. Lokasi Tandon Metro



Gambar.. Lokasi Rawa Arum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memiliki satu indikator, yaitu persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik dan tidak tersumbat. Indikator ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program dapat dihitung berdasarkan perbandingan panjang drainase dalam kondisi baik dan tidak tersumbat terhadap total panjang drainase perkotaan, sebagai berikut:

$$= \frac{\text{panjang drainase dalam kondisi baik dan tidak tersumbat}}{\text{total panjang drainase perkotaan}} \times 100\%$$

Untuk mencapai target indikator program, maka perlu pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan, dengan fokus pada pemenuhan output kegiatan/sub kegiatan pada program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Panjang drainase dalam kondisi baik diperoleh dari sub kegiatan : (1) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, (2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, dan (3) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.

Pada tahun 2022, melalui sub kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, jumlah saluran yang ditingkatkan yaitu sebanyak 79 saluran dengan total Panjang 6,632 km. Adapun ruas saluran yang ditingkatkan adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Lokasi	Panjang Penanganan (m)
1	Pembangunan Sodetan Link. Kubang Lampit RT.01/01 Kel Tegal Bunder Kec. Purwakarta	Kel Tegal Bunder Kec. Purwakarta	6,5
2	Pembuatan saluran drainase link. Dukuh Malang RT. 12/04 Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	101,8
3	Peningkatan Saluran Sekunder Cibeber Kulon Link. Cibeber Kulon Kel. Cibeber	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	133,75
4	Pembangunan TPT Link. Sungai Nyi Kambang	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	52,5
5	Peningkatan Sungai Cibeber Link. Cibeber Bedeng	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	62,45
6	Peningkatan Saluran Sekunder Kubang Mayit Kel. Sukmajaya	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	68,2
7	Peningkatan Sungai Pabean Link. Gempol Kulon Kel. Pabean	Kel. Pabean Kec. Purwakarta	36
8	Peningkatan Saluran Sekunder Sumampir Link. Ramanuju Kenanga Kel. Ramanuju	Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	73,88
9	Saluran Tersier Link. Gerem Talang RT/RW. 04/08 Kel. Gerem	Kel. Gerem Kec. Grogol	37,61
10	Peningkatan Saluran Tersier Warung Juwet Link. Warung Kara Kel. Samangraya	Kel. Samangraya Kec. Citangkil	174,38
11	Lanjutan Peningkatan Sungai Ciluit Link. Ciri Kel. Samang Raya	Kel. Samangraya Kec. Citangkil	68,1
12	Peningkatan Sungai Kedung Ingas Link. Terate Udik Kel. Masigit	Kel. Masigit Kec. Jombang	73,26
13	Peningkatan Sungai Lebak Gede Link. Kepindis	Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak	71
14	Pemasangan Drainase Volume (400 m) Link. Kubang Laban RW. 02 Kel. Panggung Rawi	Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang	80,88

No.	Pekerjaan	Lokasi	Panjang Penanganan (m)
15	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Brigil RT. 01/04 Kel. Suralaya Kec. Pulo Merak	Kel. Suralaya Kec. Pulo Merak	30,3
16	Peningkatan Sungai Pabean Link. Taman Raya Kel. Gedong Dalem	Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang	75,5
17	Peningkatan Sungai Cibeber Link. Polsek Cibeber Kel. Cibeber	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	90,7
18	Peningkatan Saluran Sekunder Darma Kusuma Hilir Link. Bendungan Kel. Ketileng	Kel. Ketileng Kec. Cibeber	89,8
19	Lanjutan Peningkatan Saluran Sekunder Kubang Laban Eks Pasar Baru Kel. Jombang Wetan	Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	118,8
20	Pebangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Karang Tengah Rt.01/01 Kel. Pabean Kec. Purwakarta	Kel. Pabean Kec. Purwakarta	87,85
21	Lanjutan Peningkatan Saluran Sekunder Karang Tengah	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	18,7
22	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dan Jembatan Sungai Makam Tepus Link. Pecinan RT.03/01 Pabean	Kel. Pabean Kec. Purwakarta	62,2
23	Peningkatan Sungai Link. Pabean Kel. Pabean Kec. Purwakarta	Kel. Pabean Kec. Purwakarta	75,45
24	Peningkatan Saluran Sekunder Keserangan Kel. Grogol	Kel. Grogol Kec. Grogol	131,23
25	Pembangunan Saluran Drainase Link. Gerem Kwista RT.03/11 Kel. Gerem Kec. Grogol	Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak	26,3
26	Pembanguanan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Kedung Ingas Link. Rakata Kel. Citangkil	Kel. Mekar Sari Kec. Pulo Merak	54,66
27	Peningkatan Sungai Link. Pecinan Kel. Pabean Kec. Purwakarta	Kel. Dringo Kec. Citangkil	84,3
28	Peningkatan Sungai Gerem Link. Kagungan	Kel. Gerem Kec. Grogol	77,31

No.	Pekerjaan	Lokasi	Panjang Penanganan (m)
29	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Pekalongan RT.01/01 Kel. Deringo	Kel. Gerem Kec. Grogol	151,31
30	Peningkatan Sungai Ciluit Kel. Deringo	Kel. Deringo Kec. Citangkil	107,65
31	Pembangunan TPT Dan Jembatan Sungai Cikarang Link. Pecinan RT.02/01 Kel. Pabean	Kel. Pabean Kec. Purwakarta	97,47
32	Lanjutan Peningkatan Sungai Cibatut Link. Sumur Wuluh Kel. Gerem	Kel. Gerem Kec. Grogol	73,1
33	Pembangunan TPT Lebak Kayang RT. 03/03 Kel. Bulakan	Kel. Bulakan Kec. Cibeber	93,3
34	Peningkatan Sungai Gerem Link. Klotoh RT/RW.02/10 Kel. Gerem	Kel. Gerem Kec. Grogol	139,5
35	Peningkatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dan Jembatan Sungai Sumur China Link. Pecinan RT.03/01 Kel Pabean	Kel. Pabean Kec. Purwakarta	102,53
36	Pembangunan TPT Sungai Ciluit Kel. Samang Raya Kec. Citangkil	Kel. Samang Raya Kec. Citangkil	51,2
37	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Deringo Landoh RT.14/03 Kel. Deringo	Kel. Deringo Kec. Citangkil	152,3
38	Lanjutan Peningkatan Saluran Blok E Kel. Ciwaduk	Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon	71,6
39	Peningkatan Saluran Sekunder Kubang Menyawak Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil	Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil	102,45
40	Peningkatan Saluran Sekunder Kubang Menyawak Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil	Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil	120,3
41	Pembangunan Saluran Air Ke Situ Rawa Arum (Di bawah RM Dana Raya)	Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol	84,33
42	Pembangunan Sungai Cikalong Kel. Taman Baru	Kel. Taman Baru, Kec. Citangkil	47,8

No.	Pekerjaan	Lokasi	Panjang Penanganan (m)
43	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Kedung Ingas Kel. Taman Baru	Kel. Taman Baru, Kec. Citangkil	66
44	Peningkatan Sungai Grogol Link. Cioire Wetan RT.02/03 Kel. Grogol	Kel. Grogol Kec. Grogol	94
45	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Link. Slirit Kel. Suralaya Kec. Pulo Merak	Kel. Suralaya Kec. Pulo Merak	11,92
46	Peningkatan Saluran Tersier Link. Weri Kel. Kebon Sari	Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil	36,6
47	Peningkatan Sungai Gerem Link. Bayur Kel. Gerem	Kel. Gerem Kec. Grogol	80,4
48	Peningkatan Sungai Grogol Link. Keruwuk Kel. Rawa Arum	Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol	40,7
49	Peningkatan Sungai Medaksa Link. Langon Indah Kel. Taman Sari	Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak	61,8
50	Peningkatan Saluran Curug Kel. Rawa Arum	Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol	88
51	Peningkatan TPT Link. Langon Indah Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak	Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak	83,3
52	Peningkatan TPT Link. Panesepan RT 14/ RW 03 Kel. Tegal Bunder, Kec. Purwakarta	Kel. Tegal Bunder, Kec. Purwakarta	102,9
53	Peningkatan TPT Link. Pecinan RT 003 RW 001 Kel. Pabean, Kec. Purwakarta	Kel. Pabean, Kec. Purwakarta	36
54	Peningkatan TPT Link. Sambilawang RT 03/ RW 03 Kel. Kepuh, Kec. Ciwandan	Kel. Kepuh, Kec. Ciwandan	155,9
55	Peningkatan TPT Link. Selirit Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak	Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak	8,93
56	Peningkatan TPT Link. Cipondoy RT 02 RW 05 Kel. Randakari Kec. Ciwandan	Kel. Randakari Kec. Ciwandan	108,42
57	Peningkatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jl. TMMD RT 05 RW 09 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak	Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak	119,98

No.	Pekerjaan	Lokasi	Panjang Penanganan (m)
58	Peningkatan Sungai Kedung Ingas (Kali Tumpang RSUD)	Kel. Panggung Rawi, Kec. Jombang	63,25
59	Peningkatan TPT Link. Jerang barat RT 03 RW 01 Kel. Karang Asem Kec. Cibeber (Sekitar belakang kantor Kel. Karang asem)	Kel. Karang Asem Kec. Cibeber	98,8
60	Peningkatan TPT Link. Ciora tengah RT 002/001 Kel. Grogol	Kel. Grogol, Kec. Grogol	57,9
61	Lanjutan Peningkatan Sungai Pabean Link. Ciputat Kel. Pabean	Kel. Pabean, Kec. Purwakarta	80,1
62	Peningkatan Sungai Pabean Link. Perum Taman Raya Kel. Gedong Dalem	Kel. Gedong Dalem, Kec. Jombang	73,6
63	Lanjutan Peningkatan Saluran Sekunder Link. Kubang Mayit, Kec. Jombang	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	70,5
64	Lanjutan Peningkatan Sungai Cibeber Kulon	Kel. Cibeber, Kec. Cibeber	95,8
65	Peningkatan Sungai Cikuasa RT 02 RW 01 Link. Cikuasa Kel. Gerem Kec. Grogol	Kel. Gerem Kec. Grogol	96
66	Peningkatan Sungai Ciluit Kel. Samangraya	Kel. Samang Raya Kec. Citangkil	53,2
67	Lanjutan Peningkatan Sungai Gerem Kel. Grogol	Kel. Grogol, Kec. Grogol	96
68	Peningkatan Sungai Gerem RT.01 RW 04 Kel. Gerem	Kel. Gerem Kec. Grogol	16,74
69	Peningkatan Sungai Gerem Link. Dermaga Malang RT.01 RW.11 Kel. Gerem	Kel. Gerem Kec. Grogol	72
70	Peningkatan Sungai Ciluit Link. Kb. Welut RT.002/004 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	Kel. Samang Raya Kec. Citangkil	72,5
71	Peningkatan Sal. Dukuh Malang Link. Kedawung RT.15/05 Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	211,75

No.	Pekerjaan	Lokasi	Panjang Penanganan (m)
72	Peningkatan Saluran Kubang Lele RT.03 - 04 Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	150
73	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sepanjang Kali Mati Link. Cibeber Bedeng Rt.08/01 Kel. Cibeber Kec Cibeber	Kel. Cibeber Kec Cibeber	40,3
74	Peningkatan KB. Lampit Kel. Tegal Bunder	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	60,1
75	Peningkatan Sungai Pabean RT.14 RW.05 Kel. Pabean Kec, Purwakarta	Kel. Pabean Kec, Purwakarta	109,7
76	Peningkatan Drainase Link. Penawuan-Link. Kebanjiran Rt.03 Rw.02 Kel. Kubangsari	Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan	50,8
77	Lanjutan Peningkatan Kali Semar Kel. Bulakan Kec. Cibeber	Kel. Bulakan Kec. Cibeber	48,86
78	Pembuatan Tanggul Penahan Tanah di Link, Rt.07, Rt.09 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak	Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak	38,86
79	Peningkatan Sal. Drainase Link. Pagebangan Rt.002/003 Kel. Kubang Sari Kec. Ciwandan	Kel. Kubang Sari Kec. Ciwandan	152,9

Untuk sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, intervensi dilakukan melalui pengangkutan sampah dan pengerukan sedimen dari saluran. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase dilaksanakan dengan 2 (dua) cara pengadaan, yaitu swakelola dan melalui penyedia. Realisasi kinerja melalui Swakelola mencapai 8,99 km dari target 9 km yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Adapun titik lokasi pelaksanaan sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase yang dilakukan melalui swakelola adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Volume (m')
1	Sungai Gerem Samping Pertamina	Kel. Gerem Kec. Grogol	575,00
2	Saluran Sekunder Cibeber Wetan (Samping Sarana Teknik)	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	185,35
3	Sungai Pabean Link. Pecek	Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang	210,00

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Volume (m')
4	Saluran Tersier Kependilan Perum Metro Vila Rw.06	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	225,40
5	Sungai Medaksa Link. Sumur Jaya	Kel.Mekar Sari Kec. Pulomerak	104,00
6	Sungai Cijalumpang Link. Kadipaten	Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	104,00
7	Saluran Sekunder Kubang Laban Link. Kranggots	Kel.Sukmajaya Kec. Jombang	238,45
8	Sungai Cijalumpang Jl. Negara Samping Rm.Laguna	Kel. Kedaleman. Cibeber	151,00
9	Sungai Kedung Ingas (Bonakarta)	Kel. Masigit Kec. Jombang	213,00
10	Sungai Cijalumpang Samping Komplek Pci Blok B	Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	170,00
11	Saluran Sekunder Ramanuju /Sumampir Samping Dprd S/D Belakang Porles	Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	213,80
12	Saluran Sekunder Kubang Mayit	Kel. Ketileng Kec. Cilegon	512,00
13	Saluran Sekunder Darmakusuma Belakang Smp 7	Kel.Ciwedus Kec. Cilegon	100,00
14	Saluran Sekunder Purbaya Link.Palas	Kel. Bendungan Kec. Cilegon	263,30
15	Sungai Ciluit Area 2.4 & 2.5 Link. Kubang Welut	Kel. Samang Raya Kec. Citangkil	124,70
16	Saluran Sekunder Tegal Ratu Link. Jublin	Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	550,00
17	Sungai Pabean Link. Kali Gandu	Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	156,00
18	Sungai Medaksa Link. Sawah	Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak	215,00
19	Sungai Kedung Ingas Link. Tegal Cabe	Kel.Citangkil Kec. Citangkil	200,00
20	Sungai Cibeber Link. Nyikambang (Hulu)	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	394,00
21	Sungai Ciluit Area 2.1, 2.2 & 2.3 Link. Penauan	Kel.Kubang Sari Kec. Ciwandan	169,05
22	Sungai Cibuntu Area 1.2, 1.5 & 1.6 Link. Cigading	Kel.Kubang Sari Kec. Ciwandan	160,00

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Volume (m')
23	Saluran Tersier Cikuasa Depan Kantor (Pomal)	Kel. Gerem Kec. Grogol	489,30
24	Sungai Kedung Ingas Samp. Kantor Kejaksaan Negri & Kantor Dindik	Kel. Masigit Kec. Jombang	213,00
25	Sungai Cibeber Link. Ciberko	Kel.Kalitimbang Kec. Cibeber	190,50
26	Sungai Pabean Link. Pabean	Kel.Pabean Kec. Purwakarta	432,50
27	Sungai Cibeber Link. Cibeber Timur Pesantren	Kel. Cibeber Kec..Cibeber	192,00
28	Sungai Cijalumpang Link.Kadipaten Tahap 2	Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	200,00
29	Sungai Pabean Link.Kubang Lampit	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	180,00
30	Saluran Tersier Kadipaten Link.Belakang Pci Blok E	Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	232,95
31	Sungai Grogol Link.Kubang Koru	Kel. Grogol Kec. Grogol	213,80
32	Lanjutan Sungai Pabean Link.Pabean (Hilir)	Kel. Gerem Kec. Grogol	145,00
33	Kedung Ingas Samping Perum Metro	Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang	225,40
34	Saluran Sekunder Griya Praja Mandiri	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	67,00
35	Sungai Kedung Ingas Link. Cigiceh	Kel. Kedong Dalem Kec. Jombang	95,00
36	Lanjutan Sungai Cibeber Link. Ciberco (Hulu)	Kel. Kedong Dalem Kec. Jombang	106,00
37	Kali Cijalumpang Link. Kadipaten Kel. Kadipaten	Kel. Kadipaten Kec. Cibeber	124,70
38	Sungai Cibeber Link. Samandaran	Kel. Kedong Dalem Kec. Jombang	120,00
39	Sungai Cibeber Link. Perum Gedong Damai Cluster Sriknadi	Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber	69,00
40	Sungai Cibeber Wetan (Samping Sarana Teknik)	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	195,00
41	Sungai Cibeber Link.Kranggot Perum Tci	Kel.Jombang Wetan Kec. Jombang	140,70
42	Saluran Mitsubishi	Kel.Sukmajaya Kec. Jombang	175,00

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Volume (m')
43	Kali Panasepan Link. Cipaot Rt.10	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	370,00
44	Lanjutan Op Sungai Medaksa Link. Sawah	Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak	80,00
45	Sungai Medaksa Link. Sawah	Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak	80,00
JUMLAH			8.990,25

Untuk operasi dan pemeliharaan sistem drainase yang dilakukan melalui penyedia pada tahun 2022 adalah sepanjang 7,89 km, dari target sebesar 9 km dengan capaian kinerja sebesar 87,74%. Adapun titik lokasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem drainase melalui penyedia adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Volume (m')
1	Pemeliharaan Saluran Sekunder Cibeber Kulon	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	340,00
2	Pemeliharaan Saluran Sekunder Tegal Ratu	Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	457,00
3	Pemeliharaan Sungai Bapang	Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	975,90
4	Pemeliharaan Sungai Cibeber (Link. Samandaran)	Kel. Panggung Rawi, Kec. Jombang	586,00
5	Pemeliharaan Sungai Cibeber (Perumahan TCI)	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	550,00
6	Pemeliharaan Sungai Kedung Ingas (Link. Cikalong)	Kel. Masigit Kec. Jombang	672,00
7	Pemeliharaan Sungai Kedung Ingas (Link. Sentul)	Kel. Taman Baru Kec. Citangkil	502,40
8	Pemeliharaan Sungai Kepuh	Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	450,00
9	Pemeliharaan Sungai Ciluit, Kel. Samangraya	Kel. Samangraya/Dringo Kec. Citangkil	2.559,18
10	Pemeliharaan Sungai Medaksa, Kel. Tamansari	Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	
11	Pemeliharaan Drainase Link. Jangkar Wetan RT 08 RW 03	Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	532,00
12	Pemeliharaan Sungai Cibeber (Link, Cibeber Timur RT. 01-07 RW. 01 Kel. Cibeber, Kota Cilegon)	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	63,00

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Volume (m')
13	Pemeliharaan Sungai Kedung Ingas (BPI RT.03 & 04 RW.06 Kel. Panggungrawi kec. Jombang)	Kel. Panggung Rawi Kec. Cibeber	47,70
14	Pemeliharaan Sungai Kedung Ingas (Link. Cigiceh rw.01 Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang)	Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang	2.559,18
JUMLAH			7.896,18

Untuk Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan, intervensi dilakukan melalui penggantian atau perbaikan saluran dan perbaikan tanggul akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam). Rehabilitasi saluran drainase perkotaan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara pengadaan, yaitu swakelola dan melalui penyedia. Realisasi kinerja melalui Swakelola mencapai 164,50 meter dari target sebesar 500 meter dengan capaian kinerja sebesar 32,90%. Namun secara volume (m³), realisasi kinerja mencapai 265,46 m³ dari target DPA sebesar 265 m³ (capaian kinerja 100%). Hal ini disebabkan ketidakcermatan dalam menentukan target kinerja dan dipengaruhi juga oleh ketinggian tanggul sungai/saluran yang bervariasi menyebabkan capaian panjang penanganan berkurang. Sementara realisasi kinerja melalui Penyedia mencapai 970,97 meter dari target sebesar 1.114 meter dengan capaian kinerja sebesar 87,16%. Adapun titik lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan sebagai berikut :

No	Uraian	Kelurahan / Kecamatan	Panjang (m')	Volume (m ³)
1	Rehab Sungai Cibeber Link.Griya Praja Mandiri (Gpm) Pasangan	Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber	17,50	33,40
2	Rehabilitasi Saluran Pasar Baru Kranggot (Pasangan)	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	33,00	52,27
3	Rehabilitasi Saluran Sumur Wuluh (Pasangan)	Kel. Gerem Kec. Grogol	13,00	21,37
4	Rehabilitasi Kali Panasepan (Pasangan)	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	20,00	29,04
5	Rehabilitasi Sungai Cibeber Timur Depan Polsek Cibeber (Pasangan)	Kel. Cibeber Kec. Cibeber	81,00	129,38
Jumlah			164,50	265,46

Lokasi Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Melalui Penyedia Tahun 2022

No	Uraian	Kelurahan / kecamatan	Volume (m')
1	Lanjutan Rehabilitasi Saluran Link Brigil Kel. Suralaya Kec. Pulomerak	Kel. Suralaya Kec. Pulomerak	50,80
2	Rehabilitasi Tandon Sukmajaya 1 / Mitsubishi	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	67,20
3	Lanjutan Rehabilitasi Sungai Medaksa	Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	64,50
4	Rehabilitasi Saluran Sekunder Semar	Kel. Bulakan Kec. Cibeber	39,60
5	Rehabilitasi Saluran Link. Jombang Kali	Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	90,00
6	Rehabilitasi Saluran Sekunder Dharma Kusuma	Kel. Ketileng Kec. Cilegon	128,50
7	Rehabilitasi Saluran Sekunder Kedung Ingas (Link. Pegantungan), Kel. Jombang Wetan	Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	149,50
8	Rehabilitasi Saluran Sekunder Kubang Laban (Link. Kranggot)	Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	158,50
9	Rehabilitasi Sungai Grogol (Perumahan Arga Baja)	Kel. Grogol Kec. Grogol	98,00
10	Rehabilitasi Sungai Kedung Ingas (Link. Terate Udik)	Kel. Masigit, Kec. Jombang	63,87
11	Rehabilitasi Sungai Medaksa (Link. Pengobelan)	Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	60,50
JUMLAH			970,97

Saluran/drainase di Kota Cilegon adalah 210,89 km. Berdasarkan data panjang saluran/drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 sebesar 139,61 km, ditambah dengan penanganan saluran.drainase pada tahun 2022 melalui peningkatan saluran/drainase perkotaan sebesar 6,36 km, maka total panjang saluran/drainase dalam kondisi baik menjadi 145,97 km. Dengan demikian dapat dihitung persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik dan tidak tersumbat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{139,61 \text{ km} + 6,36 \text{ km}}{210,89 \text{ km}} \times 100\% \\ &= \frac{145,97 \text{ km}}{210,89 \text{ km}} \times 100\% \\ &= 69,22\% \end{aligned}$$

Dari target indikator sebesar 58% dapat direalisasikan sebesar 69,22%, maka capaiannya adalah 119,34%.

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik dan tidak tersumbat	%	58,00	69,22	119,34

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Target Indikator Program Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak dan Aman sebesar 15,01%.

Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang layak dan aman dihitung berdasarkan rumus Jumlah Penduduk yang terlayani Jaringan Perpipaan (JP) dan Jaringan Bukan Perpipaan (JBP) dibagi total jumlah penduduk Kota Cilegon. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menetapkan standar perhitungan akses air minum 1 KK melayani 5 jiwa. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar 128.900 jiwa, sedangkan jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2022 melalui jaringan perpipaan sebesar 780 KK atau 3900 jiwa dan melalui Bukan Jaringan Perpipaan (BJB) sebesar 203 KK atau sebesar 1.015 jiwa. Jumlah total akumulasi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum sampai dengan Tahun 2022 sebesar 133.815 jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2022 adalah 441.761 jiwa sehingga perhitungan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak dan aman pada tahun 2022 adalah: $133.815/441.761 \times 100\% = 30,29 \%$.

$$\begin{aligned} &= \frac{133.815 \text{ jiwa}}{441.761 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 30,29 \% \end{aligned}$$

Tabel Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang layak dan aman	Persen	15,01	30,29	201,79%

Capaian realisasi indikator persentase Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan Air Minum didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada beberapa sub kegiatan, yaitu : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki satu indikator, yaitu persentase jalan dalam kondisi mantap. Indikator ini dihitung dengan membandingkan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kota, yang dirumuskan sebagai berikut:

=
$$\frac{\text{panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{total panjang jalan kota}} \times 100\%$$

Kondisi jalan terbagi ke dalam 4 katagori, yaitu : baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Kondisi jalan diperoleh dari hasil survei kemantapan yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Survei kondisi kemantapan jalan pada tahun 2022 dilakukan dengan metode Surface Distress Index (SDI). Dari hasil survei SDI, diperoleh data: jalan dengan kondisi baik sebesar 111,971 km, jalan dengan kondisi sedang 228,00 km, jalan dengan kondisi rusak ringan 26,619 km, dan jalan dengan kondisi rusak berat 4,61 km. Dari hasil survei tersebut, dapat dihitung persentase jalan dalam kondisi mantap, yaitu:

=
$$\frac{111,971 + 228,531}{348,858} \times 100\%$$

=
$$\frac{340,502 \text{ km}}{384.858 \text{ km}} \times 100\%$$

= 88,47%

Kondisi Mantap (km)				Kondisi Tidak Mantap (km)			
Baik		Sedang		Rusak RIngan		Rusak Berat	
Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%
111,971	28,09	228,531	59,38	26,619	6,92	17,738	4,61
340,502 km (88,47%)				44,357 km (11,53%)			



Gambar. 3.1.1.3a Grafik Kondisi Jalan Kota Cilegon

Secara Umum kondisi jalan di Kota Cilegon cukup baik karena berdasarkan data grafik pada gambar di atas. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Berbeda dengan kondisi jalan baik, bahwa tiga kondisi jalan lainnya justru mengalami penurunan, sebagaimana terlihat pada Tabel di atas. Penurunan persentase kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat ini yang berkontribusi terhadap peningkatan persentase jalan baik.



Gambar. 3.1.1.3.a1 Grafik Kondisi Jalan Kota Cilegon

Apabila grafik kondisi jalan di atas disajikan dalam kondisi mantap dan tidak mantap, maka diperoleh garfik sebagaimana Gambar di atas. Pada grafik tersebut dapat dilihat adanya peningkatan persentase jalan mantap, dan disisi lain terjadi penurunan kondisi jalan tidak mantap.

Berdasarkan perhitungan di atas, panjang jalan dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2022 adalah 340,502 km atau 88,47 % dari total panjang jalan kota. Target indikator program penyelenggaraan jalan pada tahun 2022 adalah 87,40 %, dengan demikian capaian indikator program sebesar 101,22 %.

Tabel Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	87,40	88,47	101,22

Capaian indikator persentase jalan dalam kondisi mantap didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
3. Rekonstruksi Jalan
4. Pemeliharaan Berkala Jalan
5. Pemeliharaan Rutin Jalan

Terdapat kegiatan prioritas daerah dalam program Penyelenggaraan Jalan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon 2021-2026, yaitu: Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan dan Peningkatan Jalan terhadap pusat-pusat aktivitas. Pada tahun anggaran 2022, Pembangunan Jalan Lingkar Utara masih pada upaya penyelesaian pengadaan tanah. Dari pagu pembebasan lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan terdapat anggaran sebesar Rp. 39.114.973.000,- yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 5.561.363.329,00,- atau sebesar 14,22 %. Pada Pembebasan Lahan ini difokuskan pengadaan lahan untuk Jalan Lingkar Utara melakukan pembayaran terhadap 26 bidang tanah atau seluas 2.636,00 m². Target keseluruhan bidang tanah JLU yang harus dibebaskan adalah 854 bidang atau 340.198 m². Realisasi Target pembebasan Lahan JLU sampai dengan Tahun 2022 adalah 685 Ha atau seluas 195.519 m² sehingga masih ada 169 bidang atau seluas 144,679 Ha yang belum dibebaskan.

Penanganan jalan yang berkaitan dengan program prioritas RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 seperti Peningkatan Jalan Akses Kelurahan, Rekonstruksi Jalan dan pemeliharaan berkala jalan yang dilakukan pada Tahun 2022 dijelaskan pada tabel penanganan jalan di bawah ini.

Tabel Penanganan Jalan yang berkaitan Program Prioritas

No	Nama Kegiatan/Pekerjaan	Keterangan
	Rekonstruksi Jalan	
1	Jl. KH. Ach. Dahlan (244)	Akses Kantor Kel. Ciwedus, Akses Puskesmas Cilegon, Aksee MDTA Al-Khaeriyah
2	Pembangunan Jembatan Ciberko	Akses Kantor kel. Kali Timbang, Akses Kantor Kec. Cibeber, Akses SMP Raudhatul Jannah, Akses TK Islam Terpadu Raudhatussyyfa, Akses SDN II Kali Timbang
3	Jalan Akses Panggung Rawi (244)	Akses Kel. Panggung Rawi, SDN Panggung Rawi
4	Jalan Gunung Jati (029)	Akses Kec. Ciwandan
5	Lanjutan Peningkatan Jalan Imam Bonjol	Gagal Lelang
6	Jl. Akses Puskesmas Citangkil 2 - Jl. Link. Jeruk Tipis	Akses Puskesmas Citangkil 2
	Pemeliharaan Berkala Jalan	
1	Jl. Sunan Gunung Jati	Akses Kec. Ciwandan

No	Nama Kegiatan/Pekerjaan	Keterangan
	Pemeliharaan Rutin Jalan	
1	Jl. Cendana (468), Jl. Cikerut (469), Jl. Akses Puskesmas Paru (473)	Akses Puskesmas Paru
2	Jl. Cikuasa (202), Jl. Grogol - Cupas Kulon (210), Jl. Link. Tegalwangi Tengah (213), Kaserangan - Bujang Gadung (216), Jl. Link. Cipinang (223), Jl. Kb. Wates (227)	((202) Akses SDN CIKUASA I); ((210)Akses Kantor Kec. Grogol, Akses SLTP YP 17 CILEGON, SDN BUJANG GADUNG, Akses MAN 2 Kota Cilegon, Akses SD Cikuasa II, Akses UPTD Puskesmas Grogol, Akses Puskesmas Rawa Arum); ((213) SDN Tegal Wangi); ((227) SD Islam Terpadu AL - Muqorrobin)
3	Jl. KH Abdul Latief (245)	Akses Kantor KPU Kota Cilegon
4	Jl. Krotek (456), Lanj. Jl. Kp. Larangan (457), Lanj. Kedung Baya - Kosambirangon (461), Jl. Link. Jarangudik (462)	((456) Akses SDN Bulakan 1);
5	Jl. Paus (409), Jl. Kakap (410), Jl. Pesut (411), Jl. Hiu (412)	((412) SDN Blok C Cilegon)
6	Jl. Perum Warnasari - SMP N 11 Cilegon (069), Jl. Krenceng - Tegal Tong (071), Jl. Tegal Tong - Sumur Batu (072)	((069) Akses SMPN 11 Cilegon);

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki satu indikator yang harus dicapai, yaitu rasio tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (operator, teknisi, analis). Untuk menghitung indikator program digunakan rumus sebagai berikut :

=
$$\frac{\text{jumlah tenaga kerja terampil konstruksi yang sudah bersertifikat}}{\text{jumlah seluruh tenaga kerja terampil konstruksi di Kota Cilegon}} \times 100\%$$

Dinas PUTR Kota Cilegon memfasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi untuk para pekerja, dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang handal, berkualitas. Sertifikat merupakan bukti kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi. Pada tahun anggaran 2022, jumlah data pekerja konstruksi di Kecamatan Jombang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi adalah 28 orang, dan yang mengikuti ujian dan mendapatkan sertifikasi sebanyak 24 orang.

Tabel Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Bersertifikat di Kota Cilegon Tahun 2017 s.d. 2022

Tahun Anggaran	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat (orang)	Keterangan
2017	20	
2018	280	
2019	724	
2020	0	Tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19
2021	26	
2022	24	
jumlah	1074	

Jumlah total tenaga terampil konstruksi di Kota Cilegon yang terdata adalah sebanyak 2000 orang. Dari data jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1074 orang, maka dapat dihitung rasio tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat sebagai berikut :

$$= \frac{1074}{2000} \times 100\%$$

$$= 53,7 \%$$

Tabel Capaian Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	58,00	53,00	82,35

Capaian indikator Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi, didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, adapun kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis Iujk Nasional Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka SIUJK sudah tidak berlaku akan tetapi perda No 3 tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa konstruksi belum di cabut. Terkait penyerapan anggaran sebesar 9.140.600 digunakan untuk rapat pembahasan tentang tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kewenangan rekomendasi SIUJK sudah bukan kewenangan daerah Kabupaten Kota tapi menjadi kewenangan pemerintah pusat

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
- b. Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- d. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- e. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- f. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
- g. Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
- h. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki satu indikator yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Cilegon. Indikator ini diperoleh dengan menghitung perbandingan antara luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan RTRW terhadap luas kawasan budidaya pada RTRW. Pada RPJMD Kota Cilegon, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{luas pemanfaatan lahan yang sesuai RTRW}}{\text{luas kawasan budidaya pada RTRW}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020, luas lahan yang sesuai dengan RTRW adalah seluas 2.367,39 ha. Luas tersebut mengalami penambahan pada tahun 2021 seluas 609,69 ha dan tahun 2022 seluas 2,68 Ha, dengan demikian nilai akumulatif sampai dengan tahun 2022 dapat diketahui luas pemanfaatan lahan yang sesuai RTRW adalah 2.979,77 Ha. Luas Kawasan budidaya pada RTRW adalah 12.746 ha, dengan demikian dapat dihitung persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{luas pemanfaatan lahan yang sesuai RTRW}}{\text{luas kawasan budidaya pada RTRW}} \times 100\% \\ &= \frac{2.979,77 \text{ ha}}{12.746 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= 23,38\% \end{aligned}$$

Tabel Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	22,57	23,38	103,58

Pada Tahun 2022, program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota (memiliki 3 sub kegiatan) dan Koordinasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (memiliki 2 sub kegiatan) yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pengampu. Uraian mengenai target dan realisasi masing-masing kegiatan pada program penyelenggaraan penataan ruang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
 - a. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, memiliki satu indikator yaitu Jumlah dokumen RDTR yang terintegrasi dengan KLHS.
 - b. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, Pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki 4 (empat) indikator, antara lain: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang; jumlah dokumen pemutakhiran perangkat pelayanan penataan ruang, jumlah orang yang memperoleh pembinaan penyelenggaraan penataan ruang, dan jumlah dokumen kompilasi data persiapan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Pada Tahun 2022 untuk Kegiatan ini memiliki target kinerja sebanyak 4 (empat) Dokumen dan 105 orang peserta sosialisasi. dan pada akhir tahun 2022, capaian realisasi pekerjaan ini sebesar 100%, dengan rincian :

- a. 1 Dokumen RDTR yang terintegrasi dengan KLHS
- b. 1 Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang
- c. 1 Dokumen pemutakhiran perangkat pelayanan penataan ruang,
- d. 1 Dokumen kompilasi data persiapan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
- e. 105 orang yang memperoleh pembinaan penyelenggaraan penataan ruang.

Hasil dari kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang di Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Ruang dan Pertanahan menggunakan APBD Kota Cilegon dengan capaian realisasi anggaran untuk pekerjaan ini sebesar 85,27% atau sebesar Rp. 694.932.175.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah, terdapat 2 (dua) sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah; dan sub kegiatan sistem informasi penataan ruang. Uraian mengenai target dan realisasi masing-masing kegiatan pada program penyelenggaraan penataan ruang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu jumlah dokumen rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Cilegon; jumlah dokumen pelayanan penataan ruang yang diterbitkan; dan jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Ruang Terbuka Publik (Hijau dan Non-Hijau) Kota Cilegon.
 - b. Sub kegiatan sistem informasi penataan ruang dengan indikator jumlah dokumen peta guna bangunan eksisting Kota Cilegon (Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon).

Pada Tahun 2022 untuk Kegiatan ini memiliki target kinerja sebanyak 114 (seratus empat belas) Dokumen. dan pada akhir tahun 2022 capaian realisasi pekerjaan ini sebesar 99% yaitu sebanyak 108 dokumen, dengan rincian:

- a. 12 Dokumen rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Cilegon;
- b. 94 Dokumen pelayanan penataan ruang yang diterbitkan;
- c. 1 Dokumen Monitoring dan evaluasi Ruang Terbuka Publik (Hijau dan Non-Hijau) Kota Cilegon,
- d. 1 Dokumen peta guna bangunan eksisting Kota Cilegon (Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon). dokumen peta guna bangunan eksisting Kota Cilegon (Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon).

Hasil dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang di Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Ruang dan Pertanahan menggunakan APBD Kota Cilegon dengan capaian realisasi anggaran untuk pekerjaan ini sebesar 84,07% atau sebesar Rp. 533.872.036. Tidak tercapainya target kinerja terlihat jelas pada realisasi jumlah dokumen pelayanan penataan ruang yang diterbitkan yang disebabkan terjadinya perubahan aturan dan mekanisme perizinan (OSS-PBG), menurunnya permohonan SKRK dari masyarakat dan adanya pengalihan kebijakan (perpindahan pelayanan penataan ruang/SKRK) sehingga kinerja proses tidak mencapai target.

3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CILEGON

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		68.555.202.332	43.125.972.402	62,91			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.576.192.353	14.325.758.917	91,97	Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Cilegon nilai Lakip yang diperoleh sebesar 70,28 (BB=Sangat Baik) hal ini adanya peningkatan dari penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja pada Perencanaan Kinerja sebesar 27,45.	-	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	63,00%	70,28%	111,56			
	Indeks RB Perangkat Daerah	71,20%	60,85%	85,46			
Arah kebijakan : Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana							
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		918.130.896	97.549.000	10,62	Pada tahun 2022 di Kota Cilegon tidak terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai bencana namun demikian Disperkim menyiapkan anggaran untuk merehabilitasi seluruh rumah yang rusak akibat bencana	-	
	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100,00%	100,00%	100			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		98.131.000	97.549.000	99,41			
	Jumlah Dokumen Pendataan Lahan Potensial untuk Relokasi perumahan rawan Bencana yang disusun	1 dok	1 dok	100			
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	0,0%	0			
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		769.999.896	0	0	Pada tahun 2022 di Kota Cilegon tidak terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai bencana namun demikian Disperkim menyiapkan anggaran untuk merehabilitasi seluruh rumah yang rusak akibat bencana		
	Jumlah Rumah Terkena Bencana yang di Rehab	14 unit	0 unit	0			
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000	0	0	Alokasi dana senilai Rp 50.000.000 pada awalnya digunakan untuk operasional pengukuran / verifikasi fasos fasum yang akan diserahkan oleh pihak ke 3, namun mengingat proses pengukuran tersebut masih dapat dilakukan secara swadaya oleh personil Disperkim. Maka alokasi anggaran tersebut tidak diserap (efisiensi anggaran).		
	Jumlah Perumahan yang menyerahkan Fasos Fasum	2 Perumahan	0 Perumahan	0			
Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin dan korban bencana alam serat optimalisasi sistem pendataan program kesejahteraan sosial secara terintegrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan prasarana dan sarana permukiman							
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		17.552.681.200	17.005.643.477	96,88	Kaw.kumuh di Kota Cilegon berdsrkn SK Walikota No:600/Kep.364-Disperkim/2020 tersisa 37,66Ha. Pemkot Cilegon berkomitmen untuk melakukan penataan sehingga Kawasan kumuh ini berangsur-angsur dapat dieleminasi. Pada Tahun 2021 Pemkot Cilegon melakukan penataan Kawasan kumuh seluas 6.3Ha. Selanjutnya pada Tahun 2022 melalui Program DPWkel menangani Kawasan kumuh seluas 21,14Ha. Total Kawasan kumuh yang telah ditangani s/d Thn 2022 seluas 27,44Ha.		Pengurangan luasan kawasan kumuh dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase difokuskan pada kawasan kumuh
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	30,30%	72,86%	240,46			
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100,0%	100			
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		901.225.100	884.959.200	98,2			Pengurangan luasan kawasan kumuh dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase difokuskan pada kawasan kumuh
	REVIEW SK KAWASAN KUMUH	1 Dok	1 Dok	100			
	PERENCANAAN TEKNIS TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)	1 Dok	1 Dok	100			
	Pendamping Dpwkel	1 Dok	1 Dok	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen DED Kawasan Kumuh Yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100			
	DED Jalan Lingkungan	2 Dok	2 Dok	100			
	DED Drainase Lingkungan	2 Dok	2 Dok	100			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		99.988.600	97.378.100	97,39			Pengurangan luasan kawasan kumuh dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase difokuskan pada kawasan kumuh
	Jumlah Rumah Layak Tidak Huni yang didata dan yang di perbaiki	1 dok	1 dok	100			
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		16.551.467.500	16.023.306.177	96,81			Pengurangan luasan kawasan kumuh dilakukan dengan melakukan kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase difokuskan pada kawasan kumuh
	Jumlah TPT yang terbangun	16 lokasi	16 lokasi	100			
	Jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun	80 lokasi	80 lokasi	100			
	Jumlah Drainase Lingkungan yang terbangun	50 lokasi	50 lokasi	100			
Arah kebijakan : Peningkatan ruang publik yang representatif dan ramah difabel							
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		34.508.197.883	11.697.021.008	33,9	Dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Ruang Terbuka Publik (RTP) terdapat kesulitan dalam pengadaan lahan yang salah satunya berasal dari harga	Memaksimalkan pemanfaatan lahan fasos fasum di perumahan untuk pembangunan	Dewan merekomendasikan menertibkan prasarana, sarana, dan utilitas dari

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					appraisal yang tidak sesuai dengan harapan pemilik lahan.	Ruang Terbuka Publik (RTP)	pengembang untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan ditindaklanjuti dengan memanfaatkan lahan fasos fasum tersebut untuk Ruang Terbuka Publik (RTP)
	Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman	93,29%	98,67%	105,77			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	83,2%	83,24			
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1.139.185.180	986.223.600	86,57	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan tidak dapat diserap mengingat proses pengadaan lahan mengalami kegagalan		Dewan merekomendasikan menertibkan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan ditindaklanjuti dengan memanfaatkan lahan fasos fasum tersebut untuk Ruang Terbuka Publik (RTP)
	Jumlah dokumen perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10 dokumen	10 dokumen	100			
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		33.369.012.703	10.710.797.408	32,1	Pemb.GSG tidak terlaksana dikarenakan sejak awal pengadaan lahan oleh pihak Kec.Citangkil dan direncanakan akan dibangun juga oleh pihak Kec. Dlm SOTK	1. Dengan merubah FS lokasi Ruang Terbuka Publik (RTP)	Dewan merekomendasikan menertibkan prasarana, sarana,

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Disperkim tidak terdapat penyediaan PSU berupa GSG, Tidak terlaksananya Pemb.RTP Kec.Pulomerak dikarenakan gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk tender ulang, Tidak dilaksanakannya sewa lahan Markah Cilegon Baru dikarenakan tidak sesuai kode rekening belanja, Penyerapan Anggaran Pengadaan lahan penyerapannya kurang optimal dikarenakan masyarakat tidak menyetujui Harga Appraisal, serta Lahan yg akan dibebaskan masih dalam proses hak milik	ketempat yang lebih akomodatif. 4. Proses serah terima PSU Perumahan 5. Merubah lokasi Ruang Terbuka Publik (RTP) ke alternatif lain dalam FS .Pergeseran Partial	dan utilitas dari pengembang untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan ditindaklanjuti dengan memanfaatkan lahan fasos fasum tersebut untuk Ruang Terbuka Publik (RTP)
	Fasilitas Taman Kota yang ditingkatkan	4 Lokasi	4 Lokasi	100			
	Taman Kecamatan yang terbangun	2 Lokasi	1 Lokasi	50			
	Gerbang Kota yang dipelihara	2 Lokasi	2 Lokasi	100			
	Jumlah Alat Lapangan Bermesin yang dipelihara	47 Unit	47 Unit	100			
	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	11 Unit	11 Unit	100			
	Ketersediaan Peralatan pertamanan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Lahan Markah Cilegon Baru yang tersedia	1 Lokasi	0 Lokasi	0			
	Lahan Taman Kecamatan yang tersedia	2 Lokasi	0 Lokasi	0			
	Lahan Taman Kelurahan yang tersedia	7 Lokasi	1 Lokasi	14,29			
	Landmark Kota yang dipelihara	1 Lokasi	1 Lokasi	100			
	Sarana dan Utilitas Umum yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Taman Kelurahan yang terbangun	2 Lokasi	2 Lokasi	100			
	Gedung Serbaguna yang terbangun	1 Lokasi	0 Lokasi	0			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman, memiliki 2 (dua) indikator program generik yang ingin dicapai yaitu :
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

Capaian realisasi indikator nilai Laki Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan *output* pada 7 (Tujuh) Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- a. Indeks RB Perangkat Daerah untuk Tahun 2022 menggunakan hasil evaluasi Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 meliputi 2 Aspek, yaitu Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform, yang masing – masing Aspek terdiri dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Cilegon Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memperoleh nilai sebesar 60.85 dengan kategori B/Cukup Baik. Nilai ini merupakan hasil dari upaya perbaikan pada Aspek Reform dari komponen Manajemen Perubahan (1.49) dan Penataan Tata Laksana (1.33)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	71.20	60.85	85.46

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Target Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana pada tahun 2022 sebesar 100%, namun Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Pada Tahun 2022 dikarenakan tidak ada kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah di Kota Cilegon, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak merealisasikan anggaran yang telah disediakan. Adapun capaian Jenis Layanan SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana table.

Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian (<i>Output</i>)	Kinerja
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	100%

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki SPM yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal. Dalam aturan tersebut dijelaskan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Sub Urusan Pekerjaan umum dan Sub Urusan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Perumahan Rakyat yang mencakup jenis pelayanan dasar yang harus disediakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah. Capaian kinerja SPM telah mencapai 100% dikarenakan telah menyediakan anggaran dan regulasi dalam pemenuhan target SPM.

Capaian Indikator Kinerja Program sebesar 100% walaupun pada tahun 2022 tidak ada kejadian bencana alam/lainnya yang bersifat massif, sehingga tidak ada rumah yang memerlukan rehabilitasi. Meskipun demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyediakan anggaran untuk rehabilitasi rumah terdampak bencana sebagai antisipasi apabila terjadi bencana, sebagaimana dalam table.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100

Capaian realisasi indikator persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan *output* pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

1. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
2. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Luas kawasan kumuh yang ditangani dapat dihitung berdasarkan rumus Luas Kawasan kumuh yang ditangani dibagi Total Luas Kawasan Kumuh dikali 100%. Target indikator tahun 2022 adalah 30,30 % . Luas Kawasan Kumuh di Kota Cilegon berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 600/Kep.364-Disperkim/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Cilegon adalah seluas 37,66 Ha.

Penanganan Kawasan Kumuh pada Tahun 2022 sebesar 21,14 Ha lebih luas dari penanganan Kawasan Kumuh pada Tahun 2021 sebesar 6,3 Ha. Pada Tahun ini Penanganan Kawasan Kumuh dilaksanakan melalui Program DPWKel, dimana lokasi Kawasan kumuh yang ditangani adalah :

- a. RW 04 Kel. Kec. Cibeber seluas 2,75 Ha
- b. RW 03 Kel. Karang Asem Kec. Cibeber seluas 3,30 Ha
- c. RW 04 Kel. Lebak Denok Kec. Ciwandan seluas 2,39 Ha
- d. RW 04 Kel Tegal Ratu Kec. Ciwandan seluas 1,90 Ha
- e. RW 10 Kel. Jombang Wetan Kelurahan Jombang seluas 0,80
- f. RW 04 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak seluas 1,00 Ha
- g. RW 02 Kel Mekarsari Kec. Pulomerak seluas 9,00 Ha

Sehingga sampai dengan Tahun 2022 total Luas Kawasan Kumuh yang telah ditangani sebesar 27,44 Ha dengan sisa luasan 10,22 Ha, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Nilai	Tingkat
1	Link. Rokal	0,80	004/010	Jombang Wetan	Jombang	16	Ringan
2	Link. Kedurung	0,30	012/001	Pabean	Purwakarta	31	Ringan
3	Link. Jerang Ilir	3.30	003/003	Karangasem	Cibeber	19	Ringan
4	Link. Pakishaji	2.75	001/004	Bulakan	Cibeber	23	Ringan
5	Link. Cikebel	4.80	001/002 002/002	Gerogol	Gerogol	27	Ringan

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Nilai	Tingkat
			003/002				
6	Link. Ciora Wetan	1,50	002/003 003/003	Gerogol	Gerogol	16	Ringan
7	Link. Gunung Batur	3,61	001/003	Mekarsari	Pulomerak	18	Ringan
8	Link. Tembulun	1,51	002/004 003/004	Mekarsari	Pulomerak	19	Ringan
9	Link. Sukajadi	9,00	006/002	Mekarsari	Pulomerak	18	Ringan
10	Link. Jangkar Sukun	1,90	015/004	Tegal Ratu	Ciwandan	16	Ringan
11	Link. Deringo Londoh	5,80	011/004	Deringo	Ciwandan	28	Ringan
12	Link. Lebak Lebah	2,39	007/004	Lebak Denok	Citangkil	16	Ringan
Luas		37,66					

Capaian indikator kinerja penanganan Kumuh sebesar 240,54% berdasarkan perhitungan adalah $72,86/30,30 \times 100 = 240,54\%$, sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Persen	30,30	72,86	240,54

Capaian realisasi indikator persentase Luas kawasan kumuh yang ditangani didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan *output* pada beberapa sub kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Target Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman pada tahun 2022 sebesar 93,29%.

Capaian indikator Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dapat dihitung dari Rata-rata Persentase Rukun Warga (RW) yang difasilitasi oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman dengan target 93,29%. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas permukiman difokuskan pada penyediaan jalan

lingkungan, drainase lingkungan dan Ruang Terbuka Publik (RTP) pada lingkungan dengan total 300 RW. Berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 600/Kep.364-Disperkim/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Cilegon terdapat di 4 RW yang merupakan Kawasan Kumuh, sehingga jumlah RW dianggap sudah terpenuhi PSU nya sebesar 296 RW. Berdasarkan Perhitungan tersebut, Maka persentase capaian Penyediaan PSU Perumahan yang dihitung dari Jumlah RW yang terfasilitasi PSU dibagi Jumlah total RW dikota Cilegon = $296/300 \times 100 = 98,67\%$, sebagaimana dalam table berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Capaian Penyediaan PSU Perumahan	Persen	93,29	98,67	105,76

Capaian kinerja sebesar 105,76% dengan perhitungan perbandingan capaian PSU yang terfasilitasi terhadap jumlah total RW sekota Cilegon melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar wilayah Rukun Warga di Kota Cilegon telah dilayani Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan.

Pembangunan Prasarana Utilitas Umum Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Pembangunan PSU ini diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Ruang Terbuka Publik merupakan salah satu kegiatan yang masuk ke dalam 19 program prioritas dimana capaiannya sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut

- a. 5 (lima) Ruang Terbuka Publik Kecamatan, yaitu Kec. Jombang, Kec. Cilegon, Kec. Ciwandan, Kec. Purwakarta dan Kec. Cibeber.
- b. 5 (lima) Ruang Terbuka Publik Kelurahan, yaitu : Kel. Kedaleman, Kel. Cibeber, Kel. Kalitimbang, Kel. Sukmajaya dan Kel. Tegal Bunder
- c. 3 (Tiga) Fasilitas Hobi dan Komunitas di Alun-alun Kota Cilegon, Kec Cilegon dan Kec Jombang.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Lahan di Kelurahan Ketileng, Pembangunan Lanjutan Taman Kecamatan Cibeber dan Pembangunan Taman Kelurahan Sukmajaya dan Tegal Bunder.

Capaian realisasi indikator persentase Penyediaan PSU Perumahan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan *output* pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

- 1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
- 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuMenunjang Fungsi Hunian.

3.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu pengampu dari pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang mendukung pada Misi 1 (satu) yaitu Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel dengan tujuannya peningkatan layanan pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sedangkan pada Misi 5 (lima) yaitu Mewujudkan masyarakat berperadaban dengan tujuannya Peningkatan kualitas hidup masyarakat, indikator kinerja dari tujuannya Indeks Kebahagiaan. Adapun sasarannya adalah terwujudnya stabilitas pangan, ketangguhan bencana, kondusivitas wilayah, kerukunan umat berama dan tujuannya peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dengan indikator Rata-rata pencapaian kinerja SPM Trantibum Linmas.

A.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada perangkat daerah Satpol PP memiliki 2 (dua) program dan 3 (tiga) indikator yang harus dicapai yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikatornya (1) Nilai LAKIP Perangkat daerah dengan target 65,11 poin, (2) Indeks RB perangkat daerah dengan target 66,97 poin
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikatornya Rata-rata pencapaian kinerja SPM Trantibum dengan target 100 persen

Sedangkan capaian kinerja anggarannya sebesar Rp. 24.902.889.692,- deng target Rp. 27.011.701.295,-(92,19%). Sedangka Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan Trantibum Linmas pada Satpol PP secara lebih detil tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		27.011.701.295	24.902.889.692	92,19			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.613.984.729	20.649.561.449	91,31	- Belum dilaksanakannya monitoring capaian target kinerja eselon III dan IV serta reviu terhadap IKU secara berkala, belum terdapat pemanfaatan atas hasil	- Untuk mengendalikan kinerja perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan informasi capaian kinerja dijadikan dasar untuk	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					pengukuran capaian kinerja eselon IV keatas dalam pemberian reward dan punishment - Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja (Renaksi RB) serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment - Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi dan Tindak Lanjut serta Renaksi RB yang berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	65,11 poin	72,13 poin	110,78			
	Indeks RB Perangkat Daerah	66,97 poin	71,86 poin	107,3			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.397.716.566	4.253.328.243	96,72	- Kompleksnya data yang harus dihimpun belum dapat terpenuhi semuanya karena terbentur padatnya aktivitas pelaksanaan tupoksi Satpol PP serta belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang dapat membantu pengumpulan data tersebut dalam hal pemenuhan data SPM - pengadaan sarana prasarana pendukung dilaksanakan secara bertahap dan melihat prioritas kebutuhan karena juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah	- Memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait yang dapat membantu pengumpulan data tersebut dalam hal pemenuhan data SPM serta membentuk tim internal polpp dalam hal pengumpulan data - Permohonan kepada TAPD pada tahun berikutnya terkait pemenuhan sarana prasarana pendukung pemenuhan SPM agar lebih diprioritaskan penganggarnya	
	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Trantibum	100,00%	98,67%	98,67			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		897.072.866	859.887.526	95,85	-	-	
	Jumlah bulan dan tempat - tempat penting yang diberikan pengamanan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah kegiatan patroli yang dilaksanakan	105 Kegiatan	105 Kegiatan	100			
	Jumlah kegiatan yang diberikan pengamanan/pengawalan VVIP	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengamanan Kegiatan Khusus yang dilaksanakan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100			
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		263.894.465	223.910.465	84,85	-	-	
	Jumlah kegiatan insidental yang dilaksanakan	72 kegiatan	72 kegiatan	100			
	jumlah unjuk rasa yang ditangani	12 kejadian	12 kejadian	100			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		54.999.273	53.501.273	97,28			
	Jumlah kegiatan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan satlinmas yang dilaksanakan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100			
	Jumlah kegiatan Pemetaan gangguan trantibum linmas kota cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka		198.110.673	198.110.673	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	Jumlah kegiatan updating data keanggotaan dan penugasan satlinmas tahun yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah hari pemeliharaan pengamanan dan perlindungan masyarakat pengunjung area publik tertentu yang dilaksanakan	10 bulan	10 bulan	100			
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		905.761.396	889.819.000	98,24			
	JUMLAH ANGGOTA SATPOL PP YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	202 ORANG	202 ORANG	100			
	JUMLAH KEGIATAN BINTEK PENINGKATAN POTENSI SDM SATLINMAS KOTA CILEGON YANG DILAKSANAKAN	8 KEGIATAN	8 KEGIATAN	100			
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan/Kesiapsiagaan Fisik dan Mental yang dilaksanakan	24 kegiatan	24 kegiatan	100			
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		183.433.532	180.889.532	98,61			
	JUMLAH KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI PENGAMANAN SEKTORAL/KEWILAYAHAN YANG DILAKSANAKAN	8 KEGIATAN	8 KEGIATAN	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		73.253.912	73.253.752	100			
	JUMLAH KEPWAL PEMBENTUKAN DAN SOP TATA KELOLA PPNS	1 KEPWAL	1 KEPWAL	100			
	JUMLAH KEPWAL YANG MENGATUR SOP KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERSEDIA	1 KEPWAL	1 KEPWAL	100			
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		54.275.000	52.373.300	96,5			
	JUMLAH PENYEDIAAN LAYANAN YANG DIBERIKAN	2 Jenis	2 Jenis	100			
	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100,0%	100			
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		304.586.845	299.078.200	98,19	-	-	
	Kegiatan Sosialisasi Nataru yang dilaksanakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	16 kegiatan	16 kegiatan	100			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		169.857.188	168.772.800	99,36	-	-	
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Implementasi Daerah yang dilaksanakan	60 kegiatan	60 kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1.020.693.694	986.121.214	96,61			
	Jumlah Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dilaksanakan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Pelanggar Perda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Dokumen Naskah Akademik Raperda Trantibum	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		271.777.722	267.610.508	98,47			
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			

A.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Capaian pada indikator nilai LAKIP perangkat daerah Satpol PP Tahun 2021 sebesar 72,13 poin dengan target sebesar 65,11 poin, sedangkan persentase dari kinerja indikator ini sebesar 110,78% dengan kategori sangat tinggi. Adapun capaian nilai LAKIP tersebut dijabarkan dengan beberapa komponen sebagai berikut:

- Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% memperoleh poin sebesar 22,71%
- Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 25% memperoleh poin sebesar 20,00%
- Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot 15% memperoleh poin sebesar 10,61%
- Komponen Evaluasi Internal dengan bobot 10% memperoleh poin sebesar 5,00%
- Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan bobot 20% memperoleh poin sebesar 13,81%

Indeks RB Perangkat Daerah

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Kota Cilegon pada tahun 2021 adalah 71,86 poin dengan target yaitu 61,97 poin dengan persentase kinerja sebesar 107,30% dengan kategori sangat tinggi. Capaian kinerja didapatkan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu :

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator program ini adalah Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Trantibum, pada indikator ini nilai capaiannya diperoleh dari Rata rata Pemenuhan mutu pelayanan dasar Sub Urusan Trantibum pada aspek Pemenuhan SOP, Pemenuhan Sarana Prasarana, Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas serta Pemenuhan Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan disana bahwa Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kriteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi, Kabupaten/Kota dan perkada. Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah

1. Pelayanan kerugian materi dan Pelayanan pengobatan,

Layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud. Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan adalah pelaksanaan penegakan perda sesuai SOP, Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar, dan Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar.

Perhitungan nilai indikator kinerja Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Trantibum menggunakan dasar perhitungan dari penjelasan tersebut diatas dimana pada tahun 2021 diperoleh nilai realisasi sebesar 98,67% dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100% sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 98,67. Nilai tersebut diperoleh dari komposit komposit Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) berikut ini : 1. Presentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot sebesar 80% dan nilai capaian sebesar 100 % diperoleh dari perhitungan jumlah total yang harus dilayani sebesar 480 dan jumlah total yang terlayani sebesar 480 sehingga diperoleh capaian 100 % 2. Presentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar dengan bobot 20% dan nilai capaian sebesar 93,35% yang mana terdiri dari komposit komposit sebagai berikut : · Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil sebesar 0 % · Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan sebesar 0 % · Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebesar 100% · Standar sarana dan prasarana Satpol PP sebesar 88,89% · Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sebesar 84,51% · Standar

pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 100% Dari ketiga komposit tersebut diperoleh nilai rata rata sebesar 93,35%.

Analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja progam, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Pada urusan Trantibum Linmas pada Satpol PP terdapat 1 (satu) Program teknis dengan 1 (satu) Indikator yang dibandingkan kepada 3 (tiga) Kegiatan dengan 12 (dua belas) Sub Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) indikator sub kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan.

Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program dan Indikator Output Sub Kegiatan, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

PROGRAM	Rata-rata Capaian Indikator Program	Rata-rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Capaian Keuangan Program
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98,67 %	83,71 %	96,72 %

Pada Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum terdapat kesesuaian yang baik antara capaian indikator program (98,67%) dengan capaian keuangan program (96,72%), kedua komponen tersebut memiliki angka capaian yang sangat dekat nilainya, yang menunjukkan capaian keuangan yang dirumuskan sangat mendukung ketercapaian indikator program, begitu pula dengan capaian output sub kegiatan (96,72 %), sehingga perangkat daerah yang mengampu indikator ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, selaras dari setiap jenjangnya dimulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta capaian keuangan.

B. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

B.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.5b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		23.912.467.582	18.838.978.128	78,79			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.593.135.142	13.827.388.071	88,68	-Di awal Agustus realisasi anggaran tercatat 29,70% - Adanya SOTK Baru - Proses pengadaan barang dan jasa terkendala TKDN dan anggaran perubahan membutuhkan waktu	- berkonsultasi dengan pihak ULP terkait pengadaan barang dan jasa - Evaluasi perencanaan dan penganggaran	
	Nilai Lakip perangkat daerah	67,0 kategori/point	72,11 kategori/point	107,63			
	Indeks RB perangkat daerah	40,0 point	53,1 point	132,75			
	Pertumbuhan realisasi retribusi (OPD penghasil)	5,0 persen	13,0 persen	260			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran							
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		8.319.332.440	5.013.368.480	60,26	terkendala unsur TKDN barang dan jasa dan ada beberapa barang tidak ada unsur TKDN, tidak tersediannya penyedia dalam e-katalog	konsultasi dengan pihak ULP dan membuat surat pernyataan TKDN	
	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	65,0 Persen	65,0 Persen	100			
	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	0,0 Persen	0,0 Persen	0			
	Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	100,0 Persen	100,0 Persen	100			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	45,5%	45,48			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		260.635.650	565.300	0,22	5 Agustus dilantik baru terserap 61 jt untuk tenda ultah damkar, drill. - RISPK, hydrant, pusdalops (adanya keterbatasan waktu) - Hidrant rencana 13 titik realisasi 7 titik hydran (PL). mau lelang waktu tidak terkejar karena lelang membutuhkan 60 hari kerja - Bantek belum ada	Evaluasi terkait perencanaan anggaran	
	Pembuatan Dokumen RISPK	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.614.151.262	1.206.713.430	74,76	Terkait mamin karena insidental	Evaluasi terkait perencanaan anggaran	
	Jumlah Kegiatan Pengamanan	28 Hari	20 Hari	71,43			
	Jumlah Kegiatan Latihan Rutin	12 Kegiatan	8 Kegiatan	66,67			
	Jumlah Kejadian kebakaran/Insidentil	100 Kejadian	74 Kejadian	74			
	Jumlah Pelaksanaan Piket Siaga 1 x 24 Jam	365 Hari	365 Hari	100			
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		110.426.322	44.316.267	40,13	1. Belanja berdasarkan berdasarkan kejadian atau insidentil sehingga tidak terserap semua 2. Adanya SOTK yang belum sesuai	Evaluasi terkait perencanaan anggaran	
	Jumlah makan dan minum dalam kejadian insidentil penyelamatan	500 box	500 box	100			
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		160.838.346	132.090.000	82,13			
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Drill Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	25 orang	0 orang	0			
	Jumlah APD penanganan bahan berbahaya dan beracun	10 unit	0 unit	0			
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		626.983.164	22.349.410	3,56	- Rekondisi mobile fire rescue tidak terserap karena keterbatasan waktu sehingga proses lelang terhambat - 5 Agustus dilantik baru terserap 61 jt untuk tenda ultah damkar, drill. - RISPK, hydrant, pusdalops (adanya keterbatasan waktu) - Hidrant	- Menyesuaikan dengan SOTK yang baru - Evaluasi cash budget terkait perencanaan proses	
	Pengadaan suku cadang Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Damkar	1 Paket	0 Paket	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1 Paket	1 Paket	100	rencana 13 titik realisasi 7 titik hidran (PL). mau lelang waktu tidak terkejar karena lelang membutuhkan 60 hari kerja - Bantek belum ada - Adanya perubahan SOTK		
	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Damkar serta Tandon Air	1 Paket	0 Paket	0			
	Terpeliharanya Tabung Pemadam Kebakaran	1 Paket	1 Paket	100			
	Tersedianya Mobil Fire Rescue yang Direkondisi	1 Unit	0 Unit	0			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		2.406.470.410	1.505.514.570	62,56	Tandon air tidak terserap karena tidak ada DED nya, DED pos damkar di Cibeber dan DED tandon di merak	Mengusulkan DED dan bantek	
	Tersedianya Tabung Oksigen Portable	3 Unit	3 Unit	100			
	Tersedianya Tenda Pleton	5 Set	5 Set	100			
	Tersedianya DED Pos Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Tersedianya Tandon Air	1 Unit	0 Unit	0			
	Tersedianya Hydrant Kota	13 Titik	7 Titik	53,85			
	Tersedianya Alat Pelindung Diri Petugas	8 Jenis	8 Jenis	100			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Damkar	5 jenis	5 jenis	100			
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		1.192.773.890	776.139.890	65,07	- Adanya diklat yang tidak terlaksana karena tidak ada kelasnya - F1 terlaksana, tahap ABT ada tambahan 10 orang F1 tidak terlaksana, - Rescue 15 orang terlaksana - Inspektur 6 orang tidak terlaksana	Akan dikoordinasikan kembali dengan DIKLATKAR	
	Diklat Inspektur	6 Orang	0 Orang	0			
	Diklat Rescue	15 Orang	15 Orang	100			
	Diklat Pemadam 1	39 Orang	39 Orang	100			
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		101.041.414	0	0	Pusdalop (adanya keterbatasan waktu) awalnya anggaran 480 jt di ABT dipecah menjadi 2 dengan sekretariat	Evaluasi terkait perencanaan anggaran	
	Tersediannya Sarana Pusdalops Damkar	1 Paket	0 Paket	0			
	Tersidanya Alat Komunikasi	60 Unit	0 Unit	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	66,7%	66,67			
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		237.918.922	199.364.395	83,8	adanya pengurangan/efisiensi anggaran, sehingga pekerjaan inventarisasi sarana proteksi kebakaran tidak dapat dilaksanakan	- Evaluasi terkait perencanaan anggaran - Menyesuaikan dengan SOTK baru	
	Alat Inspeksi Yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100			
	Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	100 Objek	100 Objek	100			
	Inventarisasi sarana proteksi kebakaran	1 database	0 database	0			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100,0%	100			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		291.693.327	225.185.085	77,2	- Adanya SOTK baru - Pelimpahan SOTK dari bidang ke bidang pada bulan agustus - Manajemen pengelolaan waktu dan SDM belum optimal sehingga banyak keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Menyesuaikan dengan SOTK baru	
	Terlaksananya Penyuluhan Relawan Kebakaran (BALAKAR)	40 orang	40 orang	100			
	Terlaksananya Sosialisasi PERDA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terpublikasinya Cara Pencegahan kebakaran dan Emergensi Call (Publikasi)	4 Jenis	4 Jenis	100			
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		274.910.336	199.253.450	72,48	- Tidak terealisasi karena bentuknya honor, sedangkan SKnya belum ada - Pengelolaan manajemen waktu dan SDM belum maksimal - Belum adanya SK Penetapan Redkar	- Akan dikoordinasikan kembali sesuai dengan Peraturan yang berlaku - Dibuatkan SK	
	Terbentuknya SATLAKAR Kota Cilegon	50 Orang	50 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat	60 Orang	60 Orang	100			
	Terlaksananya Penyuluhan Kepada Relawan Kebakaran	60 Orang	60 Orang	100			
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		250.386.723	158.500.000	63,3	Pengadaan baju seragam dianggarkan untuk 100 orang anggota balakarnamun baru terbentuk 50 anggota, karena dilakukan di akhir TW	Evaluasi terkait perencanaan anggaran	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bagi Satlakar	3 jenis	3 jenis	100			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	65,2%	65,22			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		72.126.552	13.294.473	18,43	- Karna keterlambatan proses pengadaan dan bertepatan dengan waktu Diklat Rescue - Proses schedulnya sudah dibuat di November akhir tetapi ada diklat rescue, ada perubahan ABT dari 200 jt jadi 72 jt (dialihkan ke motor) - Ada belanja yang kurang pas sehingga tidak sesuai dengan output - Adanya perubahan SOTK baru	- Perlunya evaluasi terkait perencanaan penganggaran - Menyesuaikan dengan SOTK baru	
	Drill Penyelenggaraan operasi pencarian korban	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Jumlah Petugas Rescue	13 Orang	0 Orang	0			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		521.226.804	350.833.920	67,31	- ada 1 barang yang memang tidak relevan dengan DPA - ada peralatan yang tidak dibeli - alat untuk membuka pintu yang terkunci atau celah (peralatan ketika dianggarkan belum melingkupi semua komponen) - unit yang direncanakan tidak tersedia di dalam e - catalogue	- Menyesuaikan spesifikasi dengan ketersediaan produk yang tersedia pada e-catalogue - Menyesuaikan dengan SOTK Baru	
	pengadaan peralatan Rescue	23 Jenis	22 Jenis	95,65			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		197.749.318	179.248.290	90,64			
	jumlah Anggota Penyelamatan yang memenuhi standar kualifikasi	15 Orang	15 Orang	100			
	terlaksananya anggota yang mengikuti diklat	15 Orang	15 Orang	100			
	terlaksananya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

B.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan indikator :
- a. Persentase layanan pemadaman penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap (target : 65%)
 - b. Prosentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap (target 0%)
 - c. Prosentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran (target : 100%)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud :

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Program ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu :

- a. Persentase layanan pemadaman penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap

No	Indikator	Formula Indikator
1	Persentase layanan pemadaman penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100%

Artinya jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Mutu pelayanan dasar yang meliputi waktu tanggap (*response time*) adalah 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Data yang tercatat pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon pada tahun 2022 sebaran lokasi kebakaran paling banyak terjadi secara berurutan adalah di kecamatan Jombang, kecamatan Purwakarta, kecamatan Cibeber, kecamatan Citangkil, kecamatan Cilegon, kecamatan Ciwandan, kecamatan Grogol, kecamatan Pulomerak.

Penyebab kebakaran banyak diakibatkan karena bakaran sampah, pembakaran liar dan hubungan arus pendek. Berdasarkan data *response time* prosentase kejadian kebakaran yang tidak memenuhi waktu tanggap (lebih dari 15 menit) hanya ada 1 kejadian yaitu di kecamatan Ciwandan. Sepanjang tahun 2022 tercatat jumlah kejadian kebakaran adalah sebanyak 80 kejadian, yang mana terdapat 1 kejadian kebakaran melebihi waktu *response time* sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 151,92%.

Cara menghitung realisasi indikator :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100%
= x 100%
= 98,75%
(sehingga capaian sebesar **151,92%**)

Persentase capaian kinerja dengan indikator Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap dengan membandingkan realisasi sebesar 98,75 %. Dengan target untuk tahun 2022 sebesar 65%. Sehingga diperoleh nilai sebesar 151,92 %. Dari perhitungan tersebut capaian kinerja indikator Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dalam tingkat waktu tanggap dalam kategori Baik Sekali.

Adapun lokasi yang paling banyak terjadi berada di kecamatan Jombang dengan daerah yang melebihi *response time* adalah kecamatan Ciwandan. Sedangkan penyebab kebakaran didominasi karena bakaran sampah, arus pendek/konslet. Jumlah kerugian yang tercatat akibat kebakaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Dan sepanjang tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pun belum melingkupi penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3).

b. Prosentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap.

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Prosentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh BALAKAR dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100%

Indikator ini artinya jumlah layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran (balakar, satlakar, dan/atau komunitas lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Perangkat Daerah) dalam tingkat waktu tanggap. Sepanjang tahun 2022 peran serta Balakar, Satlakar dan/atau komunitas masyarakat lainnya) belum ada. Sehingga capaian indikator ini masih 0%.

Tahun 2022 baru pembentukan Balakar sebanyak 40 orang di Kecamatan Cibeber dan Citangkil, pembentukan BALAKAR tersebut dimulai dari pelatihan K3, termasuk tata cara pemadaman api, pemakaian APAR, kapasitas pemadaman api besar (*fire ground*).

Cara menghitung realisasi indikator :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh BALAKAR dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100%

= x 100%

= 0%

(realisasi 0% dari target 0%, sehingga capaian 100%)

- c. Prosentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran.

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Prosentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang terlayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian non kebakaran dikali 100%

Sepanjang tahun 2022 tercatat layanan penyelamatan dan evakuasi kejadian non kebakaran adalah sebanyak 195 kejadian yang meliputi : penyelamatan sarang tawon vespa, sarang tawon madu, ular, hewan peliharaan, biawak, penyelamatan orang terjepit, orang tenggelam, orang tersengat listrik, hewan liar, orang terjebur ke dalam sumur, tenggelam, laka lantak, laka laut, penyelamatan jiwa, evakuasi cincin dan anting. Dari seluruh kejadian tersebut semua dapat dilakukan penyelamatan dan dievakuasi dengan baik.

Cara menghitung realisasi indikator :

Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang terlayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian non kebakaran dikali 100%.

= x 100%

= 100%

(realisasi 100% dari target 100%, sehingga capaian 100%)

Sepanjang tahun 2022 program ini memiliki realisasi penyerapan anggaran hanya sekitar 60,12%, yaitu Rp 5,001,524,175,- dari Rp 8,319,332,440,- yang dianggarkan. Ini terjadi pada sebagian besar pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak dilaksanakan, meliputi : pengadaan hydrant kota di kecamatan Jombang dan kecamatan Cibeber, pengadaan dan pemeliharaan peralatan rescue. Sebenarnya semua peralatan ini selain merupakan standar

peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan, juga merupakan peralatan utama yang melekat dan sangat melindungi, memudahkan bagi anggota Damkar dalam melakukan semua tugasnya guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Tidak bisa dilaksanakan pengadaan peralatan ini karena pemahaman yang masih sangat kurang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini merupakan hambatan yang sangat penting mengingat program ini merupakan SPM dan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Semua peralatan ini dibutuhkan pada setiap tahun. Ke depan seluruh personal di dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus mengikuti dan memahami proses pengadaan barang dan jasa melalui Diklat.

Dari seluruh keterangan di atas menyebutkan bahwa semua indikator dapat tercapai. Namun pencapaian indikator tersebut sebenarnya sangat sulit dijalankan dan dicapai bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, berikut pula upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan bahaya beracun (B3) dalam daerah kabupaten/kota. Program ini merupakan Standar Pelayanan Minimum sehingga menjadi prioritas daerah bagi pemerintah kota Cilegon. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokus pemerintah agar tidak menjadi sulit untuk menjalankan indikator ini antara lain melalui upaya:

1. Pengurangan Probabilitas (kemungkinan terjadi kebakaran), meliputi perlunya sosialisasi dan penyusunan regulasi terutama peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran karena kejadian kebakaran didominasi akibat bakaran sampah, pembakaran liar dan hubungan arus pendek yang berada di pemukiman. Selanjutnya butuh perbaikan manajemen pada seluruh anggota pemadam kebakaran, peningkatan kompetensi SDM (keahlian), peralatan kebakaran yang lengkap (mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran dan rescue) serta upaya penyadaran atau budaya keselamatan bagi seluruh masyarakat di kota Cilegon.
2. Pengurangan Konsekuensi (pengurangan dampak jika terjadi kebakaran), meliputi perlunya upaya pelatihan bagi anggota pemadam dan penyelamatan (ketrampilan), penyediaan infrastruktur (tandon, hydrant, jalan, pos) terutama pada wilayah yang padat penduduk karena rentan kebakaran (risiko tinggi). Serta system komando dan system komunikasi, dan diutamakan penyusunan SOP.
3. Transfer Risiko, artinya diperlukan keterlibatan semua unsur dalam upaya pencegahan kejadian kebakaran dan penyelamatan melalui kolaborasi peran serta antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media.
4. Peningkatan SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal pengetahuan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga seluruh pengadaan peralatan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bisa dipenuhi.

Adapun dukungan kegiatan dalam pencapaian indikator ini adalah melalui Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan bahaya beracun (B3) dalam daerah kabupaten/kota; Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; Penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran; Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

C. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

C.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.5c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		11.583.181.223	10.135.228.373	87,5			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.390.588.242	7.854.637.560	93,61	program ini memiliki 2 indikator, dan hasil nya dengan menggunakan mandiri (self assessment) berupa LKE dan Kertas Kerja yaitu poin lakip PD sebesar 78,98 dan indeks reformasi birokrasi PD sebesar 72,76.	faktor pendorong didalam meningkatkan capaian indikator pertama pada sasaran 1 yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi.	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,0 Poin	78,98 Poin	98,73			
	Indeks RB Perangkat Daerah	45,0 Poin	72,77 Poin	161,71			
Arah kebijakan : Peningkatan fungsi pusdalop, pengembangan sistem informasi, penyelenggaraan diklat dan logistik, penguatan regulasi, tata kelembagaan dan kemitraan masyarakat, serta sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		3.192.592.981	2.280.590.813	71,43	Program Penanggulangan Bencana pada APBD-P TA. 2022 terdiri dari 3 kegiatan dan 17 Sub Keg. dimana kegiatan tsb mendukung 3 (tiga) indikator program. realisasi anggaran program ini yaitu 71.43%. akan tetapi masih perlu di maksimalkan dalam hal pencapaian kinerja pelayanan seperti:SDM yg kurang mumpuni/berkualitas, koordinasi yg kurang	amanat SPM sub urusan bencana no. 101 tahun 2018 wajib dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan semua permasalahan diatas sudah diakomodir di rencana strategis 5 th kedepan melalui program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					maksimal antar lembaga/OPD terkait dan pihak industri serta keterbatasan alat kebencanaan		
	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100,00%	82,65%	82,65			
	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100,00%	90,00%	90			
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	100,00%	100			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	36,3%	36,27			
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		249.631.869	63.434.000	25,41	Kesulitan dalam koordinasi karena banyak keterlibatan dengan stakeholder dan keterbatasan pengetahuan dalam menyusun KRB. Namun pengerjaan KRB sudah berjalan sebagian dan akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya.	akan dilakukan atau dilanjutkan ditahun selanjutnya	
	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Koordinasi Perkuatan data dan informasi per resiko bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		99.998.690	94.346.980	94,35			
	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	443803 Orang	100000 Orang	22,53			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	76,9%	76,93			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		574.996.451	512.549.709	89,14			
	Jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	40 Orang	40 Orang	100			
	Kelompok rentan bencana kegagalan teknologi	144 Orang	122 Orang	84,72			
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		139.994.485	0	0	Drone tidak dapat lakukan pengadaan, PPTK belum memahami dalam pengadaan barang dan untuk kegiatan teknisnya tidak dapat dilakukan karena unit drone tidak jadi pengadaan	PPTK akan mempelajari terkait pengadaan ekatalog dan sebagainya	
	Jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Kebencanaan	60 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Sarpas Operasional Kesiapsiagaan Bencana yang di Sediakan	1 Unit	0 Unit	0			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		169.997.627	0	0	1. Perahu karet tidak dapat lakukan pengadaan, PPTK belum memahami dalam pengadaan barang 2. Perahu karet tidak dapat di PL kan sehingga dilakukan e katalog 3. Ketersediaan Spesifikasi perahu karet tidak ada yang sesuai	PPTK akan mempelajari terkait pengadaan ekatalog dan sebagainya	
	Jumlah Perahu Karet (alat angkutan apung tak bermotor khusus) yang tersedia	2 unit	0 unit	0			
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		49.992.718	45.233.100	90,48			
	Jumlah Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	7 Pemangku Kepentingan	7 Pemangku Kepentingan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	(Pengutan Perkuatan data Kelembagaan dan Regulasi)						
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		49.997.317	49.112.500	98,23			
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Pengamanan Hari Raya (Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional)	30 Orang	30 Orang	100			
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		29.998.856	28.188.780	93,97			
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi penanganan rehabilitasi pasca bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya survey/monitoring koordinasi penanganan rehabilitasi pasca bencana	20 Kali	20 Kali	100			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		95.201.006	69.377.700	72,87			
	Jumlah Satgas Penanganan Dan Mitigasi Bencana	6 orang	6 orang	100			
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		439.986.918	378.240.600	85,97			
	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang Mengikuti Drill Penanggulangan Bencana	250 Orang	250 Orang	100			
	Apel Siaga Bencana	200 Orang	200 Orang	100			
	Sekolah Lapang Bencana (goes to school)	400 Orang	400 Orang	100			
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		19.999.907	18.971.600	94,86			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100,0%	100			
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		25.000.000	17.544.000	70,18			
	Presentase Penanganan Operasional Respon Cepat KLB	100 %	100 %	100			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		804.300.000	639.784.300	79,55			
	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Di BPBD Yang Bersertifikasi Dan Berlisensi	23 orang	23 orang	100			
	Persentase Penanganan Operasional Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	100			
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		30.000.000	23.064.000	76,88			
	Presentase Jumlah Korban Yang Tertolong Dan Terevakuasi	100 %	100 %	100			
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		384.997.137	316.038.544	82,09			
	jumlah kegiatan pelatihan manajemen logistik kebencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Presentase Logistik dan Peralatan yang Terdistribusi	100 %	100 %	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Jenis Logistik Dan Peralatan Kebencanaan (Pangan)	7 Jenis	7 Jenis	100			
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		8.500.000	8.500.000	100			
	Tersedianya Peralatan Pendukung Penanganan Darurat Bencana	1 Jenis	1 Jenis	100			
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		20.000.000	16.205.000	81,03			
	Presentase Penanganan Respon Cepat Bencana non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	100 %	100 %	100			

C.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud:

- a. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014, setiap penyelenggaraan SAKIP pada SKPD yang dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Evaluasi implementasi SAKIP berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 85,33 % dari target yang ditetapkan, yakni nilai SAKIP sebesar 78,43 dari target 80 poin. Hal ini dapat dilihat dari Surat Inspektorat Cilegon Nomor 700/ 266.15 /Sekret Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022, dimana evaluator memberikan nilai 78,43 poin yang artinya bahwa SAKIP BPBD Kota Cilegon mendapat predikat BB (Sangat Baik).

Nilai tersebut terdiri atas 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, meliputi Perencanaan Kinerja sebesar 26,83 ; Pengukuran Kinerja sebesar 16,56; Pelaporan Kinerja sebesar 12,62, valuasi Internal sebesar 5,65; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar16,75.
- b. Indeks RB Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan program Reformasi Birokrasi, dilakukan evaluasi yang berpedoman kepada permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran kinerja indikator ke-2 yaitu Indeks RB Perangkat Daerah pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 161,71% dari target yang ditetapkan, yakni indeks RB mendapatkan hasil sebesar 72,77 poin dari target sebesar 45 poin. Berdasarkan self assessment.

Pada urusan penanggulangan bencana terdapat terdapat 3 (tiga) Indikator program yang harus dicapai, yakni :

a. Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan (target : 100%)

Indikator ini untuk menggambarkan persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan informasi kebencanaan. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang semua potensi bencana diprioritaskan pada bencana yang berisiko tinggi di Kota Cilegon yang diberikan kepada seluruh Masyarakat Kota Cilegon.

Indikator	Formula Indikator
Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan informasi kebencanaan	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cilegon tahun 2016-2020, tingkat risiko rendah ada pada bencana epidemi dan wabah penyakit; tingkat risiko sedang ada pada bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor; sedangkan bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi dan tsunami memiliki tingkat risiko tinggi. Tercatat pada tahun 2022 nilai Indeks Risiko Bencana kota Cilegon adalah sebesar 120 artinya adalah Sedang, menurun sebesar 1 poin dari tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 121. Menurunnya indeks 1 poin adalah berdasarkan 71 indikator indeks ketahanan daerah yang dihitung setiap tahun, salah satunya adalah Pelayanan Informasi Rawan Bencana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebencanaan yang mana sektor kebencanaan adalah termasuk urusan wajib pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana meliputi : penyusunan Kajian Risiko Bencana serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana. Komunikasi dan edukasi dapat dilakukan melalui Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multi media, Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.

Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cilegon tahun 2022-2026 masih belum dapat diselesaikan, karena terdapat beberapa proses penyusunan yang membutuhkan waktu cukup panjang yaitu proses pengumpulan data primer (FGD penilaian indeks ketahanan daerah, survei indeks kesiapsiagaan masyarakat) dan pengumpulan data sekunder. Proses ini harus dilanjutkan tahun 2023 ke depan, mengingat dokumen KRB merupakan kebutuhan dokumen pokok. Karena melalui dokumen KRB ini juga akan diketahui kebutuhan komunikasi, informasi dan edukasi, dilanjutkan untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi kebencanaan sepanjang tahun 2022 dilakukan melalui sosialisasi informasi kebencanaan dengan tatap muka, media radio, media online, media cetak. Diharapkan tahun yang akan datang pelaksanaan pelayanan informasi kebencanaan dilakukan kepada data individu warga negara yang berada pada daerah rawan bencana dan warga negara yang menjadi korban bencana serta kerangka kebutuhan komunikasi, informasi dan edukasi. Penyampaian informasi kebencanaan yang paling efektif ke masyarakat adalah melalui : televisi, media sosial, dan, secara langsung tatap muka (berdasarkan survey informasi dasar tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat di Kota Cilegon terhadap bencana). Hal ini bisa dilakukan juga dengan partisipasi masyarakat diikuti dengan peningkatan kapasitasnya. Diikuti dengan setiap tahun BPBD harus mencatat berapa jumlah warga negara (berdasarkan NIK) yang telah memperoleh informasi kebencanaan.

Realisasi persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan informasi kebencanaan pada tahun 2022 adalah sebesar 82.65%,

b. Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (target : 100%)

Indikator ini menggambarkan Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana dan masa terjadinya bencana. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Pembuatan Rencana Kontijensi, Pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator	Formula Indikator
Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%.

Sepanjang tahun 2022 pelaksanaan indicator ini telah dilaksanakan dengan baik. Ini dapat terlihat dari beberapa output yang diselesaikan, walaupun beberapa output masih tidak dapat dilaksanakan antara lain penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana. Diharapkan ke depan pemerintah melalui BPBD Kota Cilegon dalam melaksanakan indicator ini memiliki data kerawanan bencana, data kejadian bencana dan data sarana prasarana untuk memberikan layanan saat bencana. Harus ada jenis bencana yang akan diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan : bencana yang bisa memberikan dampak ekonomi daerah termasuk infrastruktur, memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat, berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan. Berdasarkan data dan tren kejadian bencana di kota Cilegon diperoleh bencana yang akan diprioritaskan ke depan adalah pada bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan kegagalan teknologi/industry. Sehingga dengan data ini akan diketahui kebutuhan pelatihan pencegahan dan mitigasi dan kebutuhan kesiapsiagaan warga negara, meliputi : daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan, rekapitulasi warga negara wajib latih, daftar kebutuhan dan penyediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana, daftar ketersediaan stok logistic, termasuk kerangka pendanaannya.

c. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (target : 100%).

Indikator ini untuk menggambarkan Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Bencana alam, non alam, dan bencana sosial.

Indikator	Formula Indikator
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana x 100%.

Kejadian Bencana di Kota Cilegon selama Tahun 2022 yang berjumlah 101 (Seratus Satu) kejadian dengan rincian sebagai berikut :

1. Bencana banjir sebanyak 8 kejadian;
2. Bencana cuaca ekstrim (pohon tumbang) sebanyak 58 kejadian;
3. Bencana longsor (rumah ambruk) sebanyak 16 kejadian;
4. Bencana kebakaran lahan sebanyak 14 kejadian;
5. Bencana kegagalan teknologi sebanyak 2 kejadian; dan
6. Bencana laka air sebanyak 3 kejadian;

Seluruh kejadian bencana tersebut dapat ditangani dengan baik, sehingga realisasi persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tahun 2022 sebesar 100%. Ini sebagai suatu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan memberikan pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana kepada masyarakat. Indikator ini didukung oleh kegiatan : respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi system komando penanganan darurat bencana, pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh Unsur OPD Terkait, TNI/Polri, Pihak kecamatan dan kelurahan, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Kelurahan tangguh Bencana, unsur akademisi dan masyarakat yang peduli dengan kebencanaan. Catatan penting untuk indikator ini adalah pada respon cepat darurat bencana yaitu penyediaan dokumen perhitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang harus disusun.

Indikator Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2022 seluruhnya belum dapat terealisasi 100% sebagaimana yang ditentukan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Terdapat beberapa catatan dan upaya yang perlu ditingkatkan serta pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kinerja Program Penanggulangan Bencana. Mengingat begitu pentingnya program ini dan merupakan Standar Pelayanan Minimal maka program ini masuk ke dalam prioritas daerah. Adapun beberapa permasalahan yang perlu ditangani seperti :

1. Belum focus pada bencana prioritas yang akan ditangani berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana terutama terhadap bencana dengan risiko tinggi dan data tren kejadian bencana di kota Cilegon
2. Minimnya penguatan data dan kelembagaan, termasuk koordinasi antar pihak
3. Minimnya perhitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, berupa :
 - Kebutuhan dokumen pokok : pembuatan Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi
 - Kebutuhan terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi : warga negara berdasarkan NIK yang berada di daerah rawan bencana dan warga negara yang menjadi korban bencana
 - Kebutuhan pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - Kebutuhan kesiapsiagaan warga negara : gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Minimnya perhitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : kebutuhan warga negara korban bencana.

3.1.1.6 Sosial

DINAS SOSIAL DAN UPTD DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.1.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS SOSIAL		27.515.957.925	20.625.529.036	74,96			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.004.248.314	10.247.014.927	73,17	Faktor pendorong pencapaian target kinerja 1) Nilai Lakip PD & Indeks RB PD yaitu karena adanya upaya tindak lanjut atas hasil rekomendasi inspektorat. sehingga terjadi kenaikan nilai pada beberapa komponen akuntabilitas kinerja yang di evaluasi maupun aspek RB yang di nilai 2) Adanya pembenahan pada aspek-aspek pelayanan. Faktor penghambat : masih terdapat kendala sarana dan prasana belum memadai (gedung untuk melakukan peyalanan)	Telah dilakukan upaya usulan percepatan pembangunan gedung Dinas Sosial. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rencana pembangunan gedung Dinas Sosial sudah dialokasikan tahun anggaran 2023	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Pengadaan Gedung Baru Dinas Sosial yang representatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,5 Poin	81,25 Poin	100,93			
	Indeks RB Perangkat Daerah	67,0 Poin	75,25 Poin	112,31			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,0 Poin	85,49 Poin	108,22			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pemberdayaan sosial melalui penguatan institusi							
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.581.217.468	1.043.515.044	65,99	Faktor pendorong Keberhasilan capaian indikator ini merupakan hasil dari fasilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon terhadap PSKS / Tenaga	Pelaksanaan peningkatan kapasitas relawan sosial melalui uji kompetensi/ sertifikasi SDM penyelenggara	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Relawan Sosial di Kota Cilegon untuk mengikuti program sertifikasi dan uji kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI melalui Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof)	Kesejahteraan sosial serta optimalisasi layanan melalui Puskesmas-SLRT. untuk Tahun 2023 Dinas Sosial meningkatkan presentase jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi serta mendorong pembiayaan Puskesmas melalui mandatori DPW Kelurahan	dalam bentuk penanggulangan kemiskinan.
	Rata-Rata Persentase PSKS yang tersertifikasi	6,08%	49,48%	813,82			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,5%	97,5			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		46.797.820	45.357.700	96,92	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan	Upaya peningkatan kapasitas relawan sosial melalui uji kompetensi/sertifikasi SDM penyelenggara Kesejahteraan sosial serta optimalisasi layanan melalui Puskesmas-SLRT	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan.
	Jumlah Pembinaan PSM	50 orang	50 orang	100			
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial yang Tersertifikasi	50 orang	50 orang	100			
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		56.999.950	56.999.600	100	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan	-	
	Jumlah Pemberdayaan TKSK	32 Orang	32 Orang	100			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		84.999.788	69.182.944	81,39	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan		
	Jumlah Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU	50 Orang	50 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pembinaan Veteran dan Keluarga serta Pejuang Kemerdekaan	10 Orang	10 Orang	100			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.332.419.974	814.975.700	61,17	Alokasi anggaran untuk tali asih SDM penyelenggara Puskesmas di 16 Kelurahan tidak dapat direalisasikan dikarenakan ada penundaan kegiatan SLRT-Puskesmas dari pusat berdasarkan surat Kemensos untuk penundaan kegiatan SLRT tertanggal 15 Juni 2022 dan belum jelasnya regulasi dari Kemsos terkait pembiayaan operasional dan tali asih SDM penyelenggara Puskesmas-SLRT.	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI.	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan.
	Jumlah Puskesmas	16 lembaga	2 lembaga	12,5			
	Jumlah Peserta HKSN	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah Peserta Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan LKS	20 orang	20 orang	100			
	Jumlah Pendampingan CCSR	1 lembaga	1 lembaga	100			
	Jumlah Pendampingan Akreditasi/Verval LKS/Orsos	18 lembaga	18 lembaga	100			
	Jumlah Karang Taruna	1 lembaga	1 lembaga	100			
	Jumlah SLRT	1 lembaga	1 lembaga	100			
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		59.999.936	56.999.100	95	Kurangnya sarana dan prasarana layanan LK3 yang memadai seperti sekretariat dan kelengkapan layanan yang tidak lengkap. Kemudian kondisi mobil pelayanan LK3 (Mobil LK3 pinjam pakai dari Kemensos RI) yang memerlukan perbaikan karoseri karena cat yang sudah mengelupas menyebabkan kebocoran ke interior kendaraan sehingga penggunaan kendaraan layanan LK3 terbatas.	Layanan dilakukan secara tentatif / bisa dilakukan dengan metode penjangkauan langsung ke tempat tinggal klien LK3 / lokasi pemohon layanan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
	Jumlah Pemberdayaan LK3	1 lembaga	1 lembaga	100			
Arah kebijakan : Peningkatan upaya rehabilitasi sosial yang berkelanjutan							
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		2.139.794.235	1.182.090.507	55,24	Beberapa Kasus yang membutuhkan Penanganan Khusus tetapi terkendala saat	Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain : 1) Adanya koordinasi internal	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					melakukan Reunifikasi dan/atau rujukan	yang baik antara Pekerja Sosial, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pendamping Sosial yang dengan tanggap dalam penanganan rehabilitasi sosial 2) Adanya sinergitas lintas sektor dengan berbagai stakeholder terkait, serta adanya peran serta masyarakat melalui berbagai komunitas yang ada di Kota Cilegon 3) Dukungan Anggaran yang mencukupi	sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	100,00%	100,00%	100			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	57,9%	57,91			
Penyediaan Permakanan		323.048.915	96.731.700	29,94	1) Adanya keterlambatan pengadaan karna daftar penyedia yang telah memenuhi syarat kualifikasi tidak tersedia 2) Transportasi petugas tidak direalisasi	1) Dikoordinasikan lebih lanjut dengan Bagian Barang dan Jasa 2) Petugas melakukan monitoring	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dikarenakan pengantaran permakanan ke lanjut usia terlantar di Luar Panti dilaksanakan oleh Penyedia	dengan anggaran kegiatan yang lain	memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah layanan permakanan yang diberikan (dalam Puskesmas/rumah singgah)	2625 Kali	1624 Kali	61,87			
	Transport petugas	24 Orang Bulan	0 Orang Bulan	0			
	Jumlah layanan permakanan diluar rumah singgah yang diberikan untuk lansia yang bedidden yang tidak ada keluarga yang tidak ada keluarga namun dilayani diluar panti	3435 Orang Hari	517 Orang Hari	15,05			
Penyediaan Sandang		30.795.004	28.285.200	91,85	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan		Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah kebutuhan khusus untuk balita dan lansia yang mengalami berdridden	20 Buah	20 Buah	100			
	Jumlah sandang dirumah singgah	80 Buah	80 Buah	100			
Penyediaan Alat Bantu		81.819.726	11.908.500	14,55	Adanya kegiatan serupa dari pusat yang muncul setelah selesainya tahap perencanaan kegiatan, sehingga anggaran yang bersumber dari APBD Kota tidak dapat dimaksimalkan, Bantuan dari Dinas Sosial Provinsi 43 buah	Sinergitas antara Pusat, Provinsit dan Kegiatan Daerah sehingga kebutuhan layanan data dan pemenuhan alat bantu terpenuhi	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah Data Penerima Alat Bantu	158 Orang	43 Orang	27,22			
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		45.000.000	1.950.000	4,33	Kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen.

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah penyandang yang diberikan pelayanan reunifikasi keluarga	30 Orang	13 Orang	43,33			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		179.191.218	160.130.880	89,36	Penyediaan Persiapan Bimbingan Fisik, mental, spiritual dan sosial sudah disiapkan akan tetapi peserta tidak bersedia untuk mengikuti bimbingan tersebut, dan realisasi anggaran 89,36 % untuk honorarium tenaga penanganan Sosial yang terdapat di Puskesmas.	Bimbingan Fisik, mental spritrual dan sosial dilaksanakan secara home visit oleh Peksos.	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah penerima layanan yang diberikan bimbingan fisik, mental dan sosial	150 Orang	21 Orang	14			
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		25.999.800	11.550.000	44,42	Kasus yang ditangani sesuai hasil assesmen, sehingga penanganan tidak bisa di samakan setiap klien.	Pembinaan dilakukan secara home visit. Serta cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis.
	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan sosial	50 Orang	28 Orang	56			
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		2.000.000	600.000	30	Kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan	realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		
	Jumlah penyandang yang difasilitasi NIK	10 Orang kali	9 Orang kali	90			
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		3.500.000	0	0	Orang Terlantar sakit yang setelah dirawat di RSUD dan Orang terlantar sakit yang berada di rumah singgah belum bisa diberikan pelayanan secara maksimal dikeranakan tidak adanya SDM khusus yang mengerti tentang kesehatan	Berkoordinasi dengan Dinkes, Puskesmas terdekat dan komunitas yang terkait dengan layanan kesehatan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis.
	Jumlah penyandang yang dibantu akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	35 Orang	1 Orang	2,86			
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		93.600.000	93.600.000	100	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan		
	Jumlah petugas dan pengelola data dan pengaduan	36 Orang Bulan	36 Orang Bulan	100			
Pemberian Layanan Kedaruratan		389.968.265	358.727.905	91,99	1) Jumlah kasus yang ditangani tidak dapat diprediksi 2) Adanya Kesulitan Penanganan Lanjutan terhadap OT sakit yang sudah dinyatakan sembuh secara medis namun tidak memiliki identitas dan atau belum ditemukan keluarganya 3) masih ada Kasus yang terjadi di akhir tahun terkait pengajuan anggaran yang dibatasi oleh waktu	Berkoordinasi dengan Instansi terkait dan dituangkan dalam PKS dalam penanganan kasus akhir tahun	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah honor bulanan tim reaksi cepat pemberi layanan kesejahteraan	108 orang x bulan	108 orang x bulan	100			
	Jumlah orang terlantar sakit	10 orang	12 orang	120			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Honor Penjangkauan	60 Orang	60 Orang	100			
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		14.991.450	10.315.000	68,81	Kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	
	Jumlah penyandang yang diberikan layanan penelusuran keluarga	30 Orang	25 Orang	83,33			
Pemberian Layanan Rujukan		106.999.000	11.703.000	10,94	Kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	
	Jumlah penyandang yang diberikan layanan rujukan	72 Orang	33 Orang	45,83			
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	92,5%	92,54			
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		10.600.000	9.600.000	90,57	Kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Petugas mendapatkan Transfortasi dari Anggaran Pusat sehingga layanan data melebihi target sasaran	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis.
	Jumlah transfortasi penanganan/penjangkauan kasus tenaga peksos untuk penjangkauan anak terlantar	53 Orang/kali	43 Orang/kali	81,13			
	Jumlah penyusunan perwal dan SOP pengaduan /rehabilitasi sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Pemberian Layanan Kedaruratan		111.999.168	96.376.550	86,05	1) Jenazah terlantar yang ditangani melebihi target 2) Proses penelusuran keluarga terhadap jenazah terlantar yang ditangani terlalu singkat karena kondisi jenazah harus segera di tangani (di makamkan) sehingga ada	1) Jenazah terlantar Ditangani sesuai prosedur 2) Proses penanganan (pemakaman) jenazah terlantar berkoordinasi dengan pihak Kepolisian	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					kemungkinan Jenazah terlantar yang ditangani masih memiliki keluarga 3) Ditemukan oknum mengaku sebagai orang terlantar/ orang terlantar palsu demi keuntungan pribadi 4) Orang terlantar yang ditangani tidak memiliki identitas/ tidak ditemukan di database Kependudukan	3)Penanganan orang terlantar dilakukan sesuai prosedur 4) Berkoordinasi dengan Polres dan Disdukcapil	dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah orang terlantar dalam perjalanan	160 orang	73 orang	45,62			
	Jumlah pelayanan jenazah terlantar	20 jenazah	21 jenazah	105			
Penyediaan Permakanan		433.085.082	67.942.400	15,69	Penerima Bansos yang di usulkan tahun sebelumnya melalui E-Hibah bansos, saat akan di salurkan telah meninggal/ Pindah, tidak diketemukan alamatnya dan administrasi kependudukan tidak valid/ aktif serta adanya tambahan pagu anggaran penyediaan permakanan dalam rangka mendukung program Balai Rehabilitasi NAPZA ADHYAKSA, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan kewenangan Pemerintah Pusat	Realisasi Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah Penerima Sembako	100 Orang	67 Orang	67			
Penyediaan Sandang		29.950.000	24.250.000	80,97	Ada penerima manfaat yang tidak memiliki administrasi kependudukannya yang	Pengembalian dana yang tidak disalurkan dan untuk penerima	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					disyaratkan seperti (KIA dan AKTE Kelahiran)	manfaat untuk dapat mengurus administrasi kependudukan sebagai syarat penerima bansos maupun sebagai identitas diri, penerima diajukan kembali di tahun berikutnya melalui bantuan kementerian atau APBD I	dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah Kebutuhan Khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami Bedriden	20 Paket	20 Paket	100			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		20.054.699	10.452.900	52,12	Belanja transportasi tidak direalisasikan karena kegiatan bimbingan fisik, mental dan spiritual, dan sosial dilakukan secara home visit oleh Peksos dan relawan sosial	Realisasi keuangan sesuai kebutuhan	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah Lansia yang mengikuti HLUN	20 Orang kali	20 Orang kali	100			
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		19.999.716	15.892.500	79,46	Efisiensi anggaran dan kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani dan adanya Anggaran dialokasikan dengan kegiatan yang serupa	
	Jumlah Lansia yang mengikuti / memperingati HLUN	20 Orang	20 Orang	100			
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		15.000.000	5.100.000	34	1) PPKS terlantar yang putus sekolah tidak mau meneruskan Pendidikan	Koordinasi dengan Pihak terkait dan melakukan bimbingan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dikarenakan tidak memiliki lzasah terakhir, 2) PPKS yang ditangani ada yang tidak memiliki identitas sehingga menyulitkan untuk dilakukan tindak lanjut.	sosial keluarga kepada PPKS yang tidak memiliki identitas untuk dapat mengurus administrasi terlebih dahulu agar dapat dibantu dalam Akses pelayanan pendidikan.	jaminan sosial untuk fakir miskin
	Jumlah Penerima Layanan	10 Orang	10 Orang	100			
Pemberian Layanan Rujukan		29.999.990	8.902.000	29,67	Kasus yang ditangani tidak dapat di prediksi, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis.
	Jumlah Penyandang yang diberikan Layanan Rujukan	30 Orang	30 Orang	100			
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		172.192.202	158.071.972	91,8	Jumlah odgj yang di rehabilitasi yang mendapatkan perawatan melebihi kuota anggaran	Telah dilakukan penambahan anggaran pada saat Perubahan APBD	Cepat dan tanggap dalam melakukan pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS.
	Jumlah ODGJ Terlantar yang di Rehabilitasi Sosial	40 Orang	40 Orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin dan korban bencana alam serat optimalisasi sistem pendataan program kesejahteraan sosial secara terintegrasi							
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		8.419.826.200	7.533.399.720	89,47	1) NIK tidak padan dengan Disdukcapil 2) Ada beberapa Nik Ganda 3) Masih kurangnya SDM pengelola Data	1) Koordinasi dengan Disdukcapil untuk Pemadanan dan NIK ganda 2) Usulan SDM pengelola data	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan jaminan sosial untuk fakir miskin.
	Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang	98,50%	83,79%	85,07			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial						
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	100,0%	100			
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		59.999.906	59.111.931	98,52	Anggaran tidak terserap Rp. 887.975 atau 1% dari total anggaran Rp. 59.999.906 yaitu honorarium pembaca doa karena honor pembaca doa hanya untuk kegiatan hari keagamaan.	Honorarium pembaca doa tidak diserap dan tidak dimasukkan lagi di tahun selanjutnya	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis.
	Jumlah Penjangkauan Anak Yatim	25 Kali	25 Kali	100			
	Petugas Verval	8 orang	8 orang	100			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,5%	96,53			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		275.000.000	256.731.684	93,36	Terjadi perubahan pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya menjadi kewenangan UPT Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial akibat adanya perubahan SOTK pada saat APBD Perubahan	Melakukan penyesuaian rencana kerja dan RAK Belanja pada APBD Perubahan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan jaminan sosial untuk fakir miskin
	Jumlah data PSKS	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah Rekonsiliasi Data Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Muskel	43 dokumen	43 dokumen	100			
	Jumlah Data Sektoral Bidang Kesejahteraan Sosial	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah Data Rekonsiliasi PBI	12 dokumen	12 dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah data PMKS	1 dokumen	1 dokumen	100			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		8.054.826.549	7.200.656.360	89,4	1) Realisasi kegiatan santunan kematian 73 jiwa dari target 450 jiwa karena terhambat tahapan proses administrasi dari OPD lain yang membutuhkan waktu yang panjang sehingga TA 2022 bisa direalisasikan pada bulan November 2) Anggaran Bansos pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial masih tersisa karena hasil verifikasi sebelum penyaluran KPM terindikasi mendapat bantuan lain, meninggal, dan tidak ditemukan 3) Realisasi PKH 141% karena adanya perluasan KPM PKH yang ditetapkan oleh Kemensos	1) Terus berkoordinasi dengan OPD terkait dan memantau perkembangan proses administrasi santunan kematian sampai pencairan 2) Melakukan validasi dan verifikasi sebelum input ke e-hibah bansos sehingga jika ditemukan KPM tidak layak mengganti dengan KPM lainnya	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis. Serta menindaklanjuti terkait Perluasan jaminan sosial untuk fakir miskin
	Jumlah pendampingan dan pembinaan penerima manfaat Program Jamsosratu	2137 RTS	1413 RTS	66,12			
	Jumlah penerima program Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat	702 KS	636 KS	90,6			
	Jumlah pendampingan dan pembinaan penerima PKH	6387 KPM	9011 KPM	141,08			
	Pelaksanaan Pembangunan RS-RTLH	152 Unit	152 Unit	100			
	Jumlah Pendampingan Program Sembako	30 E Warong	30 E Warong	100			
	Jumlah Pendampingan RTLH	152 Unit	152 Unit	100			
	Jumlah Tim Koordinasi Program Sembako	65 Orang	65 Orang	100			
	Jumlah penerima program santunan kematian	450 Jiwa	73 Jiwa	16,22			
	Jumlah penerima BLT BBM APBD Kota	16482 KPM	15226 KPM	92,38			
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		29.999.745	16.899.745	56,33	Bansos tidak dicairkan menunggu draft perwal bansos UEP diselesaikan sebagai dasar hukum pemberian bantuan sosial	Koordinasi bersama stakeholder terkait (Bappeda, Bagian Hukum, BPKAD, Inspektorat)	
	Jumlah Bantuan UEP	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Pendampingan UEP dan KUBE	100 Orang	100 Orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan fungsi pusdalop, pengembangan sistem informasi, penyelenggaraan diklat dan logistik, penguatan regulasi, tata kelembagaan dan kemitraan masyarakat, serta sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana							
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.370.871.708	619.508.838	45,19	Faktor pendorong capaian kinerja indikator dikarenakan Seluruh Korban bencana dapat tertangani meskipun pengadaan Buffer Stock dan Dapur umum tidak dapat	telah dilakukan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyediaan Bantuan Buffer Stock dan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					terlaksana. Dimana bantuan yang diserahkan kepada korban merupakan stok bantuan (Buffer Stok) dari Provinsi dan bahan makanan operasional Dapur Umum di sediakan oleh Pihak yang terkait (PMI, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cilegon, dan pihak lainnya).	Koordinasi bersama Pihak-pihak terkait dalam penyediaan Bahan-bahan dan Alat Pendukung Dapur Umum.	
	Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100,00%	100,00%	100			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	75,0%	75			
Penyediaan Makanan		703.499.759	34.446.400	4,9	Untuk Belanja Natura dan Pakan Natura (Belanja Bahan Makanan Buffer Stok, Belanja Bahan Makanan Oprasional Dapur Umum). Anggaran tidak diserap tetapi kegiatan tetap di laksanakan, karena terdapatnya stok bantuan (Buffer Stok) dari Provinsi dan bahan makanan oprasional Dapur Umum di sediakan oleh Pihak yang terkait (PMI, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cilegon, dan pihak lainnya)	Usulan Bantuan Buffer Stok ke Provinsi, Menyediakan Alat-alat Pendukung Dapur Umum dan Sumber Daya Manusia (Anggota TAGANA dan KSB) pada Dapur Umum.	
	Jumlah makanan siap saji (dapur umum)	9000 Paket	0 Paket	0			
	Jumlah Penyediaan Buffer Stock	3000 Paket	0 Paket	0			
Penyediaan Sandang		165.499.808	160.208.790	96,8	1) Adanya penerapan aturan TKDN 2) Terjadinya Bencana Alam yang Tidak dapat di	Mengusulkan Bantuan ke Provinsi	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Prediksi 3) Persediaan Bantuan yang Masih Mencukupi		
	Jumlah sandang dan perlengkapan keluarga serta family kit	1000 Paket	1000 Paket	100			
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		213.999.861	157.801.778	73,74	Adanya efisiensi anggaran akibat penyesuaian harga terhadap komponen belanja pada pengadaan Natura dan Pakan Natura untuk Kelompok Rentan	Survei dan Penawaran Harga di Lapangan	
	Jumlah Penyediaan Bahan Makanan Khusus (Lansia, Ibu Hamil, Disabilitas, dan Anak-anak)	300 Paket	300 Paket	100			
Pelayanan Dukungan Psikososial		5.494.660	5.486.000	99,84	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan		
	Jumlah alat bantu dukungan psikososial	5 Paket	5 Paket	100			
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		65.900.000	48.862.800	74,15	Terdapat sebagian kegiatan luar ruangan (outbound) yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga Honorarium Instruktur Outbound tidak terserap	Tetap melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas KSB dengan Menghadirkan Narasumber dan Anggota KSB	
	Jumlah Peserta Pembinaan KSB	80 Orang	80 Orang	100			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		216.477.620	212.703.070	98,26	Tidak ada hambatan, dilaksanakan sesuai perencanaan		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah anggota Tagana	1020 Orang/Tahun	1020 Orang/Tahun	100			
UPTD Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial		431.131.641	33.120.000	7,68			
Arah kebijakan : Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin dan korban bencana alam serat optimalisasi sistem pendataan program kesejahteraan sosial secara terintegrasi							
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		431.131.641	33.120.000	7,68	Adanya perubahan SOTK baru berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, sehingga UPTD Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dihapuskan dan kegiatan didalamnya tidak dapat dilaksanakan	Melakukan perubahan rencana kerja pada APBD Perubahan dengan memindahkan sub kegiatan di bawah UPTD Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sesuai SOTK baru	
	Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	98,50%	0,00%	0			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,0%	0			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		431.131.641	33.120.000	7,68	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena adanya perubahan SOTK baru	Melakukan usulan kegiatan Updating Data pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	
	Jumlah Dokumen muskel (UPTD Data dan Informasi Kesos)	43 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Rekonsiliasi Data Kelurahan (UPTD Data dan Informasi Kesos)	2 Dokumen	0 Dokumen	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Data Sektoral Bidang Kesejahteraan Sosial (Updating Data) (UPTD Data dan Informasi Kesos)	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah data Rekonsiliasi PBI (UPTD Data dan Informasi Kesos)	12 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Data PSKS (UPTD Data dan Informasi Kesos)	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah data PMKS (UPTD Data dan Informasi Kesos)	1 Dokumen	0 Dokumen	0			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program yang mendukung Program Prioritas Daerah dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Program Rehabilitasi Sosial, merupakan program Prioritas program yang mendukung Prioritas Daerah karena merupakan program yang melakukan standar Pelayanan minimal bidang sosial dalam pemenuhan pelayanan dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis melalui Sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Pemberian Layanan Rujukan.
2. Program Jaminan Sosial
Pada program jaminan sosial yang mendukung prioritas daerah adalah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar.
3. Program Penanganan Bencana.
Pada program penanganan Bencana yang mendukung prioritas daerah adalah sub kegiatan Penyediaan Makanan bagi korban bencana.

Berikut adalah penejelasan teknis mengani ketercapaian indikator dimaksud :

a. Rata-Rata Persentase PSKS yang tersertifikasi

Indikator ini mengukur tingkat pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi dalam Upaya penanganan masalah kemiskinan sehingga diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat. **Realisasi Rata-Rata Persentase PSKS yang tersertifikasi Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar 49,47 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator teknis	Uraian data	Kinerja
Rata-Rata Persentase PSKS yang tersertifikasi	Penyebut : Persentase PSKS (TKSK, PSM, dan Tagana) yang bersertifikasi. Realisasi 2022 : TKSK : 7/8 anggota, PSM : 19/215 anggota, Tagana : 137/263 anggota Pembilang : Realisasi 2022 : 3 Jenis	49,48%

Capaian realisasi PSKS yang tersertifikasi didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dan sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

b. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial (SPM) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti

Realisasi Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

Indikator teknis	Uraian data	Kinerja
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	Penyebut : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Realisasi 2022 : 1930 Orang Pembilang : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Realisasi 2022 : 1930 Orang	100 %

Capaian Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada *Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial, Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Layanan Rujukan, Pemberian Layanan Kedaruratan dan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang.*

c. Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selain bersumber dari APBN ,APBD I, APBD kota penangan PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) bekerjasama dengan pihak swasta, masyarakat dan lembaga lain seperti Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 182 KK, **Realisasi Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar 85,07 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator teknis	Uraian data	Kinerja
Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penyebut : Jumlah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terdaftar di DTKS/Non DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Realisasi 2022 : 44.341 Orang Pembilang : Jumlah FM dan OTM yang Terdaftar di DTKS/Non DTKS Realisasi 2022 : 52.919 Orang	83,79 %

Capaian Persentase Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada *Sub Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Rujukan Anak-Anak Terlantar, Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Penyediaan Makanan.*

d. Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, **Realisasi Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Kota Cilegon di tahun 2021 adalah sebesar 100 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator teknis	Uraian data	Kinerja
Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Penyebut : Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi	100 %

	kebutuhan dasarnya. Realisasi 2022 : 1.476 Jiwa Pembilang : Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/Perlindungan Sosial Realisasi 2022 : 1.476 Jiwa	

Capaian Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

3.1.2.1 Tenaga Kerja

DINAS TENAGA KERJA DAN UPTD LATIHAN KERJA

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Tenaga Kerja

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS TENAGA KERJA		17.273.860.830	14.339.466.293	83,01			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokras							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.898.124.145	8.337.306.488	84,23	Tidak tercapainya target realisasi retribusi pada tahun 2021 dikarenakan pada akhir Oktober Dinas Tenaga Kerja tidak dapat memungut Retribusi perpanjangan TKA, karena semua pelayanan perpanjangan TKA dilakukan di pusat (kemanker). Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021	Dinas Tenaga Kerja melalui Pemerintah Kota Cilegon perlu segera menetapkan peraturan daerah mengenai Retribusi TKA untuk dapat memungut perpanjangan TKA dan saat ini perda tersebut sedang dalam proses, sehingga diharapkan pada tahun 2023 Retribusi perpanjangan TKA dapat dipungut oleh daerah	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	70,02 Poin	70,04 Poin	100,03			
	Indeks RB Perangkat Daerah	55,8 Poin	68,8 Poin	123,3			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	100,0 Persen (%)	-24,0 Persen (%)	-24			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	69,0 Poin	79,5 Poin	115,22			
Arah kebijakan : Peningkatan dukungan sarpras, kurikulum pelatihan, sertifikasi pelatihan serta pemagangan							
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		5.702.600.060	4.517.507.638	79,22	Jumlah Peserta Pelatihan Pada Tahun 2022 Sebanyak 1072 Orang. Jumlah Pendaftar Pelatihan yang mengikuti seleksi sebanyak 2150 Orang.		a. Peningkatan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	60,0 Persen (%)	49,86 Persen (%)	83,1			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	91,7%	91,67			b.Mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang adaptif terhadap kebutuhan industri, perdagangan dan jasa. c. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi d.Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi e. Melaksanakan sertifikasi kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		5.702.600.060	4.517.507.638	79,22	Ada Beberapa Pelatihan dan Sertifikasi yang tidak terlaksana. Untuk Pelatihan otomotif mobil tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan jadwalnya bentrok dengan otomotif sepeda motor serta tidak adanya instruktur pengganti. Untuk Pelatihan Kombinasi GTAW-SMAW, waktu tidak mencukupi untuk pelatihan karena ditargetkan di TW IV. Sedangkan untuk sertifikasi Kemnaker tidak dilaksanakan karena gagal lelang (pihak penyedia yang mendaftar kurang dan ada kualifikasi yg tidak terpenuhi)	Menambah Tenaga Instruktur di Kejuruan tersebut	Rekomendasi DPRD : a. Peningkatan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. b. Mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang adaptif terhadap kebutuhan industri, perdagangan dan jasa. Tindak lanjut : a. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi b. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi
	Terlaksananya Pelatihan Tata Rias Rambut	60 Orang	60 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Las SMAW 4G	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan AC	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Drafter 2D/3D	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Las SMAW 6G	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Public Speaking	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Sablon	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pengiriman pelatihan kelistrikan dan pneumatik plc	16 Orang	16 Orang	100			
	Terlaksananya Pengiriman Pelatihan operator bubut	16 Orang	16 Orang	100			
	Terlaksananya Sertifikasi Kemnaker	120 Orang	0 Orang	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Mobil	20 Orang	0 Orang	0			
	Terlaksananya Pelatihan Las Kombinasi GTAW-SMAW 6G	20 Orang	0 Orang	0			
	Terlaksananya Pelatihan Operator Forklift	80 Orang	80 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Cleaning Service	40 Orang	40 Orang	100			
	Sertifikasi Profesi Las SMAW 6G	20 Orang	20 Orang	100			
	Sertifikasi Profesi Las FCAW 3G	20 Orang	20 Orang	100			
	Sertifikasi Profesi Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan	16 Orang	16 Orang	100			
	Sertifikasi Profesi Otomotif Sepeda Motor	32 Orang	32 Orang	100			
	Sertifikasi Profesi Las SMAW 4G	20 Orang	20 Orang	100			
	Peserta Pelatihan Tata Boga	100 Orang	100 Orang	100			
	Pelatihan Rias Pengantin	80 Orang	80 Orang	100			
	Pelatihan Operator Crane	20 Orang	20 Orang	100			
	Pelatihan Operator Excavator	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Sertifikasi Pelatihan Las SMAW - GTAW 4G	20 Orang	20 Orang	100			
	Pelatihan Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri	40 Orang	40 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan	16 Orang	16 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	32 Orang	32 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Menjahit	40 Orang	40 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Practical Office Advance	32 Orang	32 Orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Las Kombinasi GTAW-SMAW 4G	20 Orang	20 Orang	100			
	Pelatihan Las FCAW 3G	20 Orang	20 Orang	100			
	Terlaksananya Pengiriman AMC	36 Orang	36 Orang	100			
	Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Security	80 Orang	80 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pengiriman Pelatihan Fitter Structure	16 Orang	16 Orang	100			
	sertifikasi Pelatihan Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industri	40 Orang	40 Orang	100			
	Pelatihan Pangkas Rambut	20 Orang	20 Orang	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas layanan informasi ketenagakerjaan							
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1.050.178.895	985.188.167	93,81	- Data Penempatan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 2942 Orang + Data Pemagangan sebanyak 429 Orang + Data Pekerja Migran 22 Orang (Sumber BP2MI) - Data Pencari Kerja yg Terdaftar sebanyak 5362 Orang. - Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah Gencarnya Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan terkait peraturan wajib lapor lowongan dan program pemagangan dalam negeri		
	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30,0 Persen (%)	63,27 Persen (%)	210,9			
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	128,6%	128,62			
Pelayanan antar Kerja		806.817.860	769.303.230	95,35	Raperda sudah diparipurnakan akhir desember 2021 untuk dibahas & di proses sampai tingkat provinsi a. Sudah dilaksanakan melalui sub kegiatan pelayanan antar kerja dan penyedia informasi pasar kerja online b. Penyampaian informasi lowongan pekerjaan sudah dilaksanakan secara masif dan terstruktur melalui akun media sosial		
	Jumlah Peserta Pemagangan Lulusan BLK dan pemagangan Mandiri	200 orang	429 orang	214,5			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja	40 lembaga/perusahaan	40 lembaga/perusahaan	100			
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		52.965.833	45.425.190	85,76	a. Mendukung sub kegiatan pelayanan antar kerja dan penyedia informasi pasar kerja online b. Penyampaian informasi lowongan pekerjaan sudah dilaksanakan secara masif dan terstruktur melalui akun media sosial		
	Jumlah Peserta Penyuluhan Bimbingan Jabatan	300 Peserta	300 Peserta	100			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	148,0%	148			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		68.015.202	49.654.951	73,01			
	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	1500 Orang	2940 Orang	196			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Perusahaan yang Dimonitoring	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100			
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		122.380.000	120.804.796	98,71			
	Terlaksananya Sosialisasi TKI Ke Luar Negeri	504 Orang	504 Orang	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hubungan industrial							
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		622.957.730	499.464.000	80,18	Pada Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan. Serapan anggaran di bawah 80% dikarenakan proses lelang tidak cukup, maka anggaran hanya dicairkan setengah dari proses lelang menjadi pengadaan langsung. Catatan : Data Kasus yang Tercatat pada tahun 2022 sebanyak 45 kasus - Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) sebanyak 25 kasus.		Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terkait Peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Hasil Tindak Lanjut : Penyelesaian perselisihan telah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 45% (20 kasus yang tercatat) telah diselesaikan 9 kasus melalui perjanjian bersama, menjadi 76,9% pada tahun 2022 dengan 30 kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dari 39 kasus.
	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80,0 Persen (%)	55,55 Persen (%)	69,44			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		552.958.200	436.684.000	78,97			Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terkait Peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
	Jumlah pekerja/buruh dalam berserikat dan berkumpul	2000 Orang	2000 Orang	100			
	Jumlah dokumen perumusan UMK dan UMSK	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		34.999.800	34.130.000	97,51			Penyelesaian perselisihan telah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 45% (20 kasus yang tercatat telah diselesaikan 9 kasus melalui perjanjian bersama, menjadi 76,9% pada tahun 2022 dengan 30 kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dari 39 kasus.
	Jumlah Penanganan Demo / Unjuk Rasa	280 Orang	280 Orang	100			
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		34.999.730	28.650.000	81,86			
	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan ketenagakerjaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA / DEFINISI OPERASIONAL	KINERJA
Nilai Lakip Perangkat Daerah	Nilai Lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15% dan evaluasi internal 10% serta capaian kinerja 20%.	Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon, Nilai Lakip Dinas Tenaga Kerja memperoleh nilai B dengan poin 70,04 Dari target yang ditetapkan sebesar 70,02, sehingga capaian kinerja pada indikator nilai lakip perangkat daerah sebesar 100%. Salah satu upaya dalam pencapaian target kinerja adalah dengan self assessment atau penilaian mandiri berupa pengisian kertas kerja Lakip. Adapun faktor pendorong dalam meningkatkan capaian kinerja yaitu perencanaan dan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran / tujuan organisasi
Indeks RB Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60% dan hasil 40%	Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat atas penilaian mandiri program reformasi birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, tahun 2022 indeks RB Dinas Tenaga Kerja memperoleh poin sebesar 68.80 dengan kategori B. dari target yang ditetapkan sebesar 55.80. Adapun faktor pendorong peningkatan capaian kinerja adalah manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Berdasarkan Penilaian (IKM) dari Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017.	Penilaian dilakukan pada 9 unsur, yakni: Persyaratan pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana prasarana dan penanganan pengaduan. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada 38 responden, baik itu para calon pencari kerja maupun peserta pelatihan. Diperoleh nilai sebesar 79,50 dari target 69 poin. Dari ke 9 unsur yang dinilai, sebagian besar memperoleh nilai rata-rata cukup baik, sedangkan untuk kualitas sarana prasarana masih perlu ditingkatkan lagi

Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Laju Pertumbuhan Realisasi Retribusi tahun 2022 terhadap realisasi retribusi tahun sebelumnya. $Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <i>Ket :</i> Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X (t - 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya	Indikator “Pertumbuhan Realisasi Retribusi” pada tahun 2022 mengalami perubahan target/dihapuskan, dikarenakan Disnaker Kota Cilegon tidak dapat memungut retribusi perpanjangan tenaga kerja asing (TKA), karena semua pelayanan perpanjangan TKA dilakukan di pusat (Kemnaker) hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021. Oleh Karena itu Disnaker Kota Cilegon melalui Pemerintah Kota Cilegon perlu segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi TKA dan saat ini Perda tersebut masih dalam proses, sehingga diharapkan pada tahun 2023 Retribusi Perpanjangan TKA dapat dipungut oleh Daerah

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pada tahun 2022 program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja realisasi kinerjanya sebesar 49,86% dari target sebesar 60%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,10% . Adapun dari 36 jenis pelatihan / sertifikasi yang direncanakan di tahun 2022, ada 3 pelatihan / sertifikasi yang tidak dapat terlaksana, yakni : Pelatihan Otomotif mobil, Pelatihan Kombinasi Las GTAW-SMAW 6G dan Sertifikasi Kompetensi (Kemnaker) untuk operator forklift, crane dan excavator.

Untuk pelatihan otomotif mobil dan pelatihan las kombinasi GTAW-SMAW 6G ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terlaksana yaitu perencanaan jadwal pelaksanaan pelatihan yang ditempatkan di Triwulan IV, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan tidak mencukupi dan proses lelang pengadaan makan minum yang gagal hingga 4 kali, serta khusus untuk pelatihan otomotif mobil adalah kurangnya tenaga instruktur pelatihan otomotif di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

Untuk kegiatan sertifikasi kompetensi (kemnaker) operator forklift, crane dan excavator tidak dilaksanakan karena gagal lelang, dikarenakan pihak penyedia yang mendaftar tidak memenuhi kualifikasi, sedangkan untuk melakukan lelang kembali waktunya tidak mencukupi dikarenakan sertifikasi direncanakan di Triwulan IV.

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Penyebut : jumlah pencari kerja yang ikut seleksi pelatihan 2150 orang Pembilang : Jumlah pencari kerja yang diberikan pelatihan 1072 orang	49,86%

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pada tahun 2022 Program Penempatan Tenaga Kerja memperoleh realisasi kinerja sebesar 63,27% dari target yang ditetapkan 30%. Adapun faktor pendukung tingginya capaian kinerja yang diperoleh yaitu dengan melaksanakan program kegiatan yang mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja diantaranya melakukan sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja, melakukan monitoring lowongan dan penempatan tenaga kerja, melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan terhadap pencari kerja, melakukan sosialisasi kesempatan bekerja ke luar negeri terhadap pencari kerja, melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan cara perusahaan yang akan melaksanakan recruitment diberikan dan disuport tempat pelaksanaan test recruitment. Dengan program kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan aturan wajib lapor lowongan dan penempatan. Sehingga dengan perusahaan melaporkan lowongannya ke Disnaker maka kesempatan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikontrol dan dimonitoring agar dapat menyerap tenaga kerja cilegon dengan maksimal.

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	Penyebut : Jumlah pencari kerja yang terdaftar 5.362 Orang Pembilang : Jumlah Pencari Kerja yang diterima kerja, magang, bekerja ke luar negeri dan berwirausaha 3.393 Orang	63,27%

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) pada tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 55,5% dari target kinerja sebesar 80%. Data ini diperoleh dari jumlah kasus / perselisihan yang tercatat pada dinas tenaga kerja sebanyak 45 kasus, baru terselesaikan 25 kasus melalui Perjanjian Bersama (PB) sedangkan sisanya sebanyak 20 kasus diselesaikan melalui anjuran.

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Penyebut : Jumlah pengaduan kasus / perselisihan hubungan industrial yang tercatat : 45 Kasus Pembilang : Jumlah kasus / perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) : 25 Kasus	55,5%



Dalam mendukung Program Prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD terkait penyerapan 25 ribu tenaga kerja, maka 1(satu) Program Prioritas yaitu Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yaitu:

1. Pelatihan, pemagangan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi
2. Pengembangan BLK

Pada Tahun 2022, jumlah tenaga kerja (pencari kerja) yang diberikan pelatihan ditargetkan sebanyak 2000 orang. Namun pada Pelaksanaan Pelatihan tahun 2022 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, jumlah tenaga kerja yang diberikan pelatihan sebanyak 1012 orang dari 36 jenis pelatihan dan sertifikasi. Adapun hal tersebut dikarenakan sarana prasarana pelatihan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon belum cukup memadai, di samping itu padatnya jadwal dan waktu pelatihan yang tidak mencukupi. Sedangkan untuk kegiatan prioritas pengembangan BLK akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2022 memiliki target sebanyak 2000 orang pada RPJMD 2021-2026. Dalam pelaksanaan di tahun 2022, jumlah penempatan tenaga kerja dan pemagangan mencapai 3393 orang dengan rincian penempatan tenaga kerja dalam negeri 2942 orang, jumlah tenaga kerja migran (TKI) ke luar negeri sebanyak 22 orang dan pemagangan 429 orang.

Adapun faktor pendukung tingginya capaian kinerja yang diperoleh yaitu dengan melaksanakan program kegiatan yang mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja diantaranya melakukan sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja, melakukan monitoring lowongan dan penempatan tenaga kerja, melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan terhadap pencari kerja, melakukan sosialisasi kesempatan bekerja ke luar negeri terhadap pencari kerja, melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan cara perusahaan yang akan melaksanakan recruitment di berikan dan di suport tempat pelaksanaan test recruitment. Dengan program kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan aturan wajib lapor lowongan dan penempatan. Sehingga dengan perusahaan melaporkan lowongan nya ke Disnaker maka kesempatan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut dapat di kontrol dan dimonitoring agar dapat menyerap tenaga kerja di Kota Cilegon dengan maksimal.

3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		19.772.624.306	18.337.120.005	92,74			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.045.244.233	12.000.396.802	91,99	-	-	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,0 Poin	69,94 Poin	101,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	58,0 Poin	71,45 Poin	123,19			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,0 Poin	86,71 Poin	109,76			
Arah kebijakan : Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi pengarusutamaan responsif gender							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		4.057.553.391	3.836.975.035	94,56	Dikarenakan pelatihan perizinan, pemasaran, pengemasan, dan manajemen keuangan dari jumlah 2093 pelaku industri rumahan yang telah dibina sebanyak 470 orang, dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Dari 36 OPD yang mengikuti Pelatihan PPRG, baru 23 OPD yang menyerahkan dokumen GAP-GBS	Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi yang dapat mendukung para pelaku industri rumahan agar meningkat skala usahanya telah dilaksanakan. Akan ditindaklanjuti pada BIMTEK Pelatihan Penganggaran Responsif Gender kepada OPD se-Kota Cilegon di tahun 2023	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase OPD yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender	30,00%	63,89%	212,97			
	Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	30,00%	22,46%	74,87			
	Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pelaksanaan Program	100,00%	100,00%	100			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		218.744.000	187.559.600	85,74	Dari 36 OPD yang mengikuti Pelatihan PPRG, hanya 23 OPD yang menyerahkan dokumen GAP-GBS	Akan ditindaklanjuti pada BIMTEK Pelatihan Penganggaran Responsif Gender kepada OPD se-Kota Cilegon di tahun 2023	
	Jumlah peserta kegiatan pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) tingkat kota	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah peserta kegiatan workshop kelembagaan PUG	85 Orang	85 Orang	100			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan		1.699.999.332	1.630.302.800	95,9	Dikarenakan pelatihan perizinan, pemasaran, pengemasan, dan manajemen keuangan dari jumlah 2093	Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi yang dapat mendukung para pelaku	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					pelaku industri rumahan yang telah dibina sebanyak 470 orang, dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.	industri rumahan agar meningkat skala usahanya telah dilaksanakan	
	jumlah pelaku industri rumahan yang dibina	350 orang	350 orang	100			
	presentase kehadiran peserta advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100 persen	100 persen	100			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2.138.810.059	2.019.112.635	94,4	Dikarenakan pelatihan perizinan, pemasaran, pengemasan, dan manajemen keuangan dari jumlah 2093 pelaku industri rumahan yang telah dibina sebanyak 470 orang, dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.	Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi yang dapat mendukung para pelaku industri rumahan agar meningkat skala usahanya telah dilaksanakan	
	Jumlah Pembinaan/Pertemuan rutin TP.PKK Kota, kecamatan dan kelurahan se-kota cilegon	6 kegiatan	6 kegiatan	100			
	Peringatan Hari Ibu	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi Wanita	1 paket	1 paket	100			
	Jumlah Temu Karya GOW Kota Cilegon	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta pelatihan peakaging dan branding	80 orang	80 orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	jumlah peserta peningkatan kapasitas ketua TP.PKK kelurahan dan kecamatan sekota cilegon	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi wanita (GOW)	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta rapat kerja GOW	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta puncak HUT DWP	100 orang	100 orang	100			
	jumlah peserta pelatihan hatinya PKK	8 kegiatan	8 kegiatan	100			
	jumlah peserta temu karya PKK	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta kegiatan Hari Kartini	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	jumlah peserta bimtek pengembangan hasil produk UP2K PKK	5 kegiatan	5 kegiatan	100			
	jumlah peserta Temu karya DWP Kota Cilegon	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta pembinaan remaja di era digital kegiatan PKK	6 kegiatan	6 kegiatan	100			
	jumlah peserta kegiatan GSI tingkat Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	jumlah peserta kegiatan dasawisma	16 kegiatan	16 kegiatan	100			
	jumlah peserta bimtek kadarzi dan pencegahan stunting kegiatan PKK	4 kegiatan	4 kegiatan	100			
	jumlah peserta workshop pemberdayaan ekonomi kreatif kegiatan dwp	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan kehidupan berkoperasi kegiatan PKK	80 oraang	80 oraang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	jumlah peserta seminar keperibadian bagi DWP unsur pelaksana DWP OPD,BUMD dan kecamatan	100 orang	100 orang	100			
	jumlah peserta rapat kerja PKK	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah Rapat Kerja DWP Kota Cilegon	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	jumlah peserta puncak acara HKG PKK tingkat Kota cilegon	70 orang	70 orang	100			
	Jumlah pertemuan rutin DWP	6 kegiatan	6 kegiatan	100			
	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sekretaris PKK	70 orang	70 orang	100			
	Jumlah peserta pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak kegiatan PKK	80 orang	80 orang	100			
	jumlah peserta pembinaan karakter melalui PAAR kegiatan PKK	80 orang	80 orang	100			
	jumlah peserta pembinaan kader posyandu kegiatan PKK	80 orang	80 orang	100			
	jumlah peserta pelatihan pemanfaatan limbah daur ulang kegiatan DWP	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah peserta keterampilan membuat kue kering kegiatan DWP	80 orang	80 orang	100			
	Jumlah peserta pelatihan IT bagi pengurus DWP kota cilegon	80 orang	80 orang	100			
	Jumlah peserta lomba HKG PKK tingkat provinsi	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	Jumlah Peserta Lomba HKG tingkat kota cilegon	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	Jumlah pengajian rutin PKK tingkat kota cilegon	5 kegiatan	5 kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	jumlah peserta kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi wanita kota cilegon	1 paket	1 paket	100			
	jumlah peserta sosialisasi taman bacaan masyarakat dan literasi digital kegiatan PKK	80 orang	80 orang	100			
	jumlah peserta sosialisasi gagah bencana kegiatan PKK	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	jumlah peserta kegiatan penyelenggaraan sekolah ibu (PSI) PKK	6 kegiatan	6 kegiatan	100			
	jumlah peserta pengajian rutin DWP	6 kegiatan	6 kegiatan	100			
	jumlah peserta pembinaan kader bank sampah kegiatan PKK	4 kegiatan	4 kegiatan	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan serta upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		420.449.705	411.431.900	97,86	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan KDRT, sosialisasi RP3 belum maksimal dan belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan RP3	1. tetap konsen terhadap program perlindungan perempuan 2. mengadakan bimtek bagi aktivis PATBM tentang pencegahan KDRT dan TPPO dan Pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan bagi aktivis PATBM	Tetap konsen terhadap program perlindungan perempuan, Mengadakan Sosialisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan Industri PT. KIEC / KSP, Bimtek pencegahan KTP, KTA dan TPPO di 2 Kelurahan dan Akan membentuk Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebanyak 12 kelurahan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	36,00%	36,84%	102,33			
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		290.450.000	282.458.600	97,25	1. Masih minimnya pengetahuan tentang TPPO 2. Masih minimnya pengetahuan tentang Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) 3. Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RP3 4. Belum adanya anggaran untuk kegiatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	1. Tetap konsen terhadap program perlindungan perempuan 2. Mengadakan sosialisasi RP3 3. Akan membentuk Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Tetap konsen terhadap program perlindungan perempuan, Mengadakan Sosialisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan Industri PT. KIEC / KSP, Bimtek pencegahan KTP, KTA dan TPPO di 2 Kelurahan dan Akan membentuk Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebanyak 12 kelurahan
	Rakor Gugus Tugas TPPO Se-kota Cilegon	50 Orang	50 Orang	100			
	Satgas Perlindungan Perempuan	50 Orang	50 Orang	100			
	Sosialisasi RP3 Dikawasan Industri PT. KIEC	40 Orang	40 Orang	100			
	Rubrik Konsultasi Keluarga	6 tayang	6 tayang	100			
	Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Pencegahan KTP, KTA dan TPPO	180 orang	180 orang	100			
	Bimtek Pencegahan KTP, KTA dan TPPO Melalui Pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	160 orang	160 orang	100			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		129.999.705	128.973.300	99,21	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan KDRT, Sosialisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) belum	1. Tetap fokus terhadap program perlindungan perempuan 2. mengadakan bimtek bagi aktivis PATBM tentang pencegahan KDRT	Tetap konsen terhadap program perlindungan perempuan, Mengadakan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Bimtek Aktivis PATBM Tentang Pencegahan KDRT dan TPPO Di dalam Keluarga di 2 Kecamatan	130 Orang	130 Orang	100	maksimal, belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan RP3	dan TPPO Sekota Cilegon dan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan bagi aktivis PATBM	Sosialisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan Industri PT. KIEC / KSP, Bimtek pencegahan KTP, KTA dan TPPO di 2 Kelurahan dan Akan membentuk Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebanyak 12 kelurahan
	Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan bagi Aktivis PATBM	30 Orang	30 Orang	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan peran serta ormas dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta usaha lainnya							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		1.028.447.131	928.997.168	90,33	- Membutuhkan Psikolog klinis dan Rohaniawan - Membutuhkan dukungan alokasi kegiatan dari OPD terkait untuk Kelurahan Binaan	- Tersedianya tenaga Psikolog klinis dan Rohaniawan di PUSPAGA - Tersedianya partisipasi dan dukungan dari OPD terkait	
	Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya	80,00%	100,00%	125			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		960.447.131	880.273.168	91,65	Membutuhkan dukungan alokasi kegiatan dari OPD terkait untuk Kelurahan Binaan	Tersedianya partisipasi dan dukungan dari OPD terkait	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kelurahan yang Dibina dan Dilakukan Penilaian P2WKSS	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		68.000.000	48.724.000	71,65	Mebutuhkan Psikolog klinis dan Rohaniawan	Tersedianya tenaga Psikolog klinis dan Rohaniawan di PUSPAGA	
	Jumlah Keluarga Terlayani PUSPAGA	184 Orang	184 Orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas Data Gender dan Anak							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		218.507.318	205.294.700	93,95	1. Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan data tentang gender dan anak 2. Masih harus melakukan koordinasi antar OPD yang memberikan pelayanan kesehatan pada korban kekerasan tentang tata cara pembebasan biaya kepada korban kekerasan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah 3. Setiap tahun DP3AP2KB Bersama OPD yang ada di Kota Cilegon harus melakukan pembaharuan data terpilah yang ada di Website Profil Data Gender dan Anak	Melakukan pengembangan sistem informasi data gender dan anak untuk meningkatkan dan melengkapi penyajian dan pengumpulan data gender dan anak yang dilakukan sektor dan daerah dalam rangka pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)	Tetap konsen dalam upaya meningkatkan jaringan kerja terpadu daerah dan sektor sehingga sinergi penyediaan data gender dan anak dapat dilakukan secara cepat, tepat, akurat efektif dan efisien

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Presentase ketersediaan data gender dan anak	100,00%	100,00%	100			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		218.507.318	205.294.700	93,95	1. Masih kurangnya OPD untuk memberikan data tentang gender dan anak 2. Masih harus melakukan koordinasi antar OPD yang memberikan pelayanan kesehatan pada korban kekerasan tentang tata cara pembebasan biaya kepada korban kekerasan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	Tetap konsisten dalam memberikan pengetahuan tentang data gender dan anak	Tetap konsen dalam upaya meningkatkan jaringan kerja terpadu daerah dan sektor sehingga sinergi penyediaan data gender dan anak dapat dilakukan secara cepat, tepat, akurat efektif dan efisien
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Program Pengelolaan Database Gender	60 Orang	60 Orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemenuhan hak anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		159.999.845	150.037.400	93,77	Pilihan tempat sehingga merubah kegiatan yang sudah direncanakan.	Dibutuhkan anggaran untuk alokasi sewa tempat.	-
	Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	100,00%	100,00%	100			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi		159.999.845	150.037.400	93,77	-	-	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Peserta Gugus Tugas KLA	30 Orang	30 Orang	100			
	Workshop Aplikasi KLA	51 Orang	51 Orang	100			
	Pembinaan Forum Anak Tingkat Kota	40 Orang	40 Orang	100			
	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	51 Orang	51 Orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemenuhan hak anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		842.422.683	803.987.000	95,44	Pengadministrasian Keuangan yang lambat	Pengadministrasian keuangan yang akan datang dilakukan	-
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		120.022.683	115.836.000	96,51	-	-	-
	jumlah kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan PATBM	2 KECAMATAN	2 KECAMATAN	100			
	Jumlah siswa/siswi SMP Kelas 7 yang Mendapat sosialisasi Bahaya Pornografi	200 Orang	200 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Stacholder/Instansi yang Menangani Perlindungan Khusus Anak yang Mendapatkan Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	50 Orang	50 Orang	100			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	91,4%	91,44			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	88.515.000	88,52	- Proses Administrasi baru dapat dilakukan pada bulan maret dan dijadikan dalam satu pencairan. - Sampai saat ini sudah bisa pencairan sesuai dengan bulan yang harus di cairkan - Administrasi yang lain sedang dalam proses	- Tetap melakukan koordinasi ke bagian keuangan untuk mendapatkan informasi tentang pengadimistrasian - Mempersiapkan Proses adiministrasi selanjutnya.	-
	Jumlah dilaksanakannya Pendampingan Klien	185 Kali	185 Kali	100			
	Jumlah dilaksanakannya Home visit	165 Kali	165 Kali	100			
	Dilaksanakannya Rapat koordinasi UPTD PPA	60 orang	60 orang	100			
	Dilaksanakannya Psikoedukasi UPTD PPA	460 orang	60 orang	13,04			
	Jumlah rujukan Rawat Inap	1 Orang	1 Orang	100			
	Jumlah Rujukan Rawat Jalan	2 Orang	5 Orang	250			
	Jumlah Rujukan Test DNA	3 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Rujukan Visum	4 Orang	0 Orang	0			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		200.000.000	193.519.400	96,76	Pengajuan uang transport peserta harus lengkap nama peserta nya sehingga spj belum bisa di proses oleh bagian keuangan dan narasumber	pengajuan honor narasumber dan uang transport peserta setelah nama peserta lengkap dan honorarium untuk	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kewenangan Kabupaten/Kota					eselon 3 berasal dari penyelenggara	narasumber eselon 3 di berikan 50 %	
	Jumlah Peserta Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dari Stigmanisasi dan Minoritas Disabilitas	400 Orang	400 Orang	100			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	130,0%	130			
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		422.400.000	406.116.600	96,15	Satuan harga honor moderator terlalu besar untuk per jam nya sehingga tidak terserap keseluruhan dan honor narasumber eselon 3 berasal dari OPD penyelenggara	Honor moderator di sesuaikan dengan standar biaya yang berlaku dan honor narasumber hanya diberikan 50%	-
	Jumlah Aktivis PATBM yang Mendapatkan Pelatihan Kekerasan Terhadap Anak	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta Parenting Ibu dan Anak	200 Orang	200 Orang	100			
	Jumlah Peserta Seminar Parenting Disabilitas	50 Orang	110 Orang	220			
	Jumlah Anak Disabilitas yang Mengikuti Destinasi Wisata	60 Orang	60 Orang	100			
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		751.350.000	705.305.366	93,87			
Arah Kebijakan : Peningkatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan serta upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		751.350.000	705.305.366	93,87	Permasalahan dalam menyusun SPJ ini tidak ada kendala apapun dan untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk di	Spj tetap berjalan dengan lancar tanpa permasalahan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					spjkan berjalan dengan lancar tanpa kendala.		
	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (Per-100.000 Penduduk Perempuan)	100,00%	100,00%	100			
	Pencapaian Kegiatan Manajemen dan penanganan kasus dan operasional rumah perlindungan	100,00%	100,00%	100			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,9%	99,87			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		300.000.000	297.589.350	99,2	- Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, administrasi keuangan sedang dalam proses - Kegiatan Therapy kelompok diundur ke bulan Mei karena menyesuaikan jadwal narasumber	- Tetap melakukan perencanaan yang sudah di jadwalkan - Proses pengadiminitrasian tetap di lakukan secara bertahap	
	Jumlah Peserta Rakor UPTD PPA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	jumlah dilaksanakannya pendampingan home visit	388 Kali	388 Kali	100			
	Jumlah dilaksanakannya Therapy Kelompok	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah dilaksanakannya Talk show di Radio	6 kali	6 kali	100			
	Jumlah dilaksanakannya rapat rutin UPTD PPA	6 kali	6 kali	100			
	Jumlah dilaksanakannya pendampingan korban kekerasan	388 Kali	378 Kali	97,42			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Dilaksanakannya pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Dilaksanakannya pelayanan psikolog	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Dilaksanakannya pelayanan rohaniawan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	100			
	Jumlah dilaksanakannya audit kasus	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		349.044.000	328.018.638	93,98			
	Terlaksananya Pemeriksaan Medikolegal pada korban kekerasan	107 orang	107 orang	100			
	terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban	909 kali	909 kali	100			
	Tersedianya layanan rumah perlindungan	12 bulan	12 bulan	100			
	Terlaksananya Pelayanan oleh tenaga ahli	6 Orang	6 Orang	100			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		102.306.000	79.697.378	77,9			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah peserta kegiatan manajemen dan penanganan kasus	26 orang	26 orang	100			
	Terlaksananya operasional rumah perlindungan/biaya listrik	6 Bulan	6 Bulan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program prioritas pembangunan tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026. Terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas, dengan uraian lengkap sebagai berikut.

Adapun Program yang mendukung Program Prioritas Daerah dalam *Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan* terdiri dari:

- 1. **Program Pengarusutamaan GenderDan Pemberdayaan Perempuan** melalui kegiatan pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) tingkat kota, Pembinaan/Pertemuan rutin TP.PKK Kota, kecamatan dan kelurahan se-kota cilegon, pelatihan IT bagi pengurus DWP kota cilegon, pembinaan kader posyandu kegiatan PKK, pembinaan karakter melalui PAAR kegiatan PKK, pembinaan dan pengembangan organisasi wanita kota cilegon, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi Wanita
- 2. **Program Peningkatan KualitasKeluarga** melalui kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS, Pelayanan PUSPAGA
- 3. **Program Perlindungan Khusus Anak** melalui dukungan kegiatan Pendampingan kien korban kekerasan, Home visit, Psikoedukasi UPTDPPA

Berikut adalah penejelasan teknis mengani ketercapaian indikator dimaksud :

- a. **Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender** adapun di tahun 2022 dengan **capaian realisasi adalah sebesar 63,89 %** (dari target yang di tetapkan 30%) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
Persentase OPD yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender	Penyebut : Jumlah OPD yang melaksanakan ARG Realisasi 2022 : 23 OPD Pembilang : Jumlah Seluruh OPD di Kota Cilegon Realisasi 2022 : 36 OPD	63,89 %

Capaian Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan **Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG**.

b. **Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya**

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti : warung makan, toko kecil, pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini bisa dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikerjakan dengan sungguh - sungguh. Realisasi Presentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **22,46 %** (dari target yang di tetapkan sebesar 30%) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	Penyebut : Jumlah pelaku usaha yang dibina Realisasi 2022 : 470 orang Pembilang : Jumlah pelaku usaha yang terdata Realisasi 2022 : 2093 orang	22,46 %

Capaian Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan skala usahanya didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan **ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI**.

c. **Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pelaksanaan Program**

Kegiatan pembinaan dan pengembangan GOW pada tahun 2021. Maksud pembinaan adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota sehingga menjadi sumber daya wanita makin bermutu dengan tujuan dari kegiatan GOW Kota Cilegon Menggalang persatuan dan kesatuan untuk membina kerjasama antar Organisasi Wanita Indonesia di Kota Cilegon, Meningkatkan kedudukan dan derajat wanita khususnya di Bidang Sosial, Bidang Pendidikan dan Lingkungan Hidup, Bidang Sosial, Bidang Organisasi dan Humas dan Bidang Ekonomi untuk mencapai kesejahteraan keluarga, Bekerjsama dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan Non Pemerintah dalam program-program peningkatan peranan wanita usaha-usaha sosial dalam masyarakat. Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pelaksanaan Program Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **100 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pelaksanaan Program	Penyebut : Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif dan tergabung di GOW Realisasi 2022 : 41 organisasi Pembilang : Jumlah Organisasi Perempuan yang tergabung di GOW Realisasi 2022 : 41 organisasi	100 %

Capaian Persentase Anggota Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pelaksanaan Program didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

d. **Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan dan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Selain perempuan, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terhadap TPPO atau yang dikenal dengan istilah trafficking, diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau praktik perbudakan. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **36,84 %** (dari target yang ditetapkan sebesar 36%) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Penyebut : Jumlah Perempuan yang Mengalami Kekerasan Realisasi 2022 : 69 Perempuan Pembilang : Jumlah Penduduk Perempuan : 187.281 Penduduk Perempuan	36.84%

Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

e. **Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya**

Keluarga Binaan yang di lakukan oleh DP3AP2KB dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas keluarga dan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS), yang berbentuk pembinaan dan pelatihan aneka pemberdayaan ekonomi perempuan, Realisasi Persentase Keluarga Binaan yang meningkat kualitasnya Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **100 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
1. Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya	Penyebut : Jumlah Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya realisasi 2022 : 200 KK Pembilang : Jumlah Seluruh Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya : 200 KK	100 %

Capaian Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan Kualitasnya didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

f. **Presentase ketersediaan data gender dan anak**

Realisasi Presentase ketersediaan data gender dan anak Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **100 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
2. Presentase ketersediaan data gender dan anak	<u>Penyebut:</u> Jumlah Data Gender Anak yang ada realisasi 2022 : 9 Orang <u>Pembilang:</u> Jumlah Data anak yang tersedia : 9 Orang	100 %

Capaian Presentase ketersediaan data gender dan anak didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota.

g. **Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak**

Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak bertujuan dalam rangka mengembangkan Kota Cilegon untuk mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak untuk membangun seluruh wilayah Kota Cilegon dari tingkat Kelurahan sampai Tingkat Kota untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Realisasi Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **100 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
3. Presentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak	<u>Penyebut:</u> Jumlah Indikator yang tercapai KLA realisasi 2022 : 4 Indikator <u>Pembilang:</u> Jumlah Indikator KLa yang ditangani oleh DP3AP2KB : 4 Indikator	100 %

Capaian Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

h. **Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani**

Persentase penanganan pengaduan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak.

Realisasi Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **100 %** dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
4. Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	<u>Penyebut :</u> Jumlah Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kota (UPTD PPA) realisasi 2022 : 87 Kasus <u>Pembilang :</u> Jumlah Anak yang Mengalami Korban Kekerasan yang dilaporkan ke instansi Kota realisasi 2022 : 87 Kasus	100 %

Capaian Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3.1.2.3 Pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pangan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		15.829.080.796	14.031.949.429	88,65			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.529.494.675	12.096.128.615	89,41	Adanya impor daging beku dan inflasi sehingga daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan permintaan daging potong asal RPH berkurang, serta rendahnya harga karcis retribusi RPH	Melakukan koordinasi untuk merevisi Perda Retribusi karena biaya saat ini masih rendah di angka Rp20.000/ekor	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	79,0 Skor	82,6 Skor	104,56			
	Indeks Reformasi Birokrasi	38,0 Poin	70,05 Poin	184,34			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi	1,29%	-8,78%	-680,62			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,00%	82,67%	107,36			
Arah kebijakan : Peningkatan diversifikasi dan pengawasan keamanan pangan							
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		2.071.065.467	1.721.522.967	83,12			
	Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	100,00%	103,50%	103,5			
	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	100,00%	117,14%	117,14			
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	111,0 Ton	113,48 Ton	102,23			
	Stabilitas Harga Pangan (Beras)	10,00%	2,20%	178			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	97,5%	97,5			
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		96.762.342	89.052.160	92,03			
	Tersusun NBM Kota Cilegon	1 Dok	1 Dok	100			
	Terlaksana Apresiasi Hasil Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		470.000.000	302.750.000	64,41			
	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Pengembangan)	7 Kelompok	7 Kelompok	100			
	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (Penumbuhan)	4 Kelompok	3 Kelompok	75			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		25.002.000	20.231.920	80,92			
	Terlaksananya Koordinasi Pantauan Harga dan Pasokan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		25.000.000	22.239.440	88,96			
	jumlah dokumen neraca bahan makanan dan analisis harga pasokan pangan daerah yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		21.046.000	19.296.000	91,68			
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TTI di Kota Cilegon	3 kegiatan	3 kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	58,3%	58,33			
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		275.499.834	227.022.747	82,4	Karena tidak ada kegiatan penyaluran atas dasar bencana yg dikeluarkan oleh walikota setempat		
	Tercapainya Jumlah Beras Untuk cadangan Pangan Pemerintah daerah (CCPD)	16554 kg	19313 kg	116,67			
	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi dalam rangka penyaluran bantuan CCPD	4 kegiatan	0 kegiatan	0			
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		52.416.000	52.416.000	100			
	data informasi stok ,pasokan, dan harga pangan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	100,0%	100			
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		134.998.647	102.766.640	76,12	Tidak ada permasalahan pada kegiatan Konsumsi Pangan, karna realisasi pelaksanaan sesuai dengan target kegiatan.	Tidak ada permasalahan pada kegiatan Konsumsi Pangan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Pola Pangan Harapan	52 Orang	52 Orang	100			
	Terlaksananya Penyusunan Pola Pangan Harapan	430 Responden	430 Responden	100			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		970.340.644	885.748.060	91,28			
	Jumlah Dokumen yang dibuat setelah pengembalian sample hasil panen dan produksi KWT di Cilegon	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Event Kegiatan Yang dilakukan	1 Event Kegiatan	1 Event Kegiatan	100			
	Jumlah KWT yang diberdayakan secara ekonomi	8 Kelompok	8 Kelompok	100			
	Jumlah KWT yang memperoleh Perbaikan Gizi	10 Kelompok	10 Kelompok	100			
	Jumlah KWT yang menerapkan P2L	10 Kelompok	10 Kelompok	100			
	Jumlah KWT yang terpilih Sesuai Kriteria	4 Kelompok	4 Kelompok	100			
	Jumlah Orang yang melakukan Olahan Pangan Lokal dan Sayuran	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Orang yang menggunakan Pangan Lokal	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang menerapkan Hydroponik	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Peserta yang menerapkan Urban Farming	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Rumah Tangga yang diberdayakan secara ekonomi	25 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	100			
	Jumlah Rumah Tangga yang melakukan Optimalisasi Pekarangan Sumber Pangan	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana pangan dan pertanian							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		108.578.985	101.337.827	93,33			
	Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100%	100,0%	100			
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		46.159.322	44.406.427	96,2			
	Jumlah dokumen pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah data dan informasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		12.653.514	12.653.400	100			
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100			
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.766.149	44.278.000	88,97			
	Jumlah Kelurahan yang disalurkan bahan pangan B2SA	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan diversifikasi dan pengawasan keamanan pangan							
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		119.941.669	112.960.020	94,18			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tingkat Pengawasan Pangan Segar	80,00%	80,00%	100			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		119.941.669	112.960.020	94,18			
	Terlaksananya pengawasan PSAT di pelaku usaha, peredaran di pasar se kota Cilegon	90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	100			
	Terlaksananya penerapan registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Poktan dan KWT	30 Kelompok	30 Kelompok	100			
	Terlaksananya uji laboratorium komoditas sayuran	5 Sampel	5 Sampel	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 4 (empat) indikator program yang harus dicapai yaitu:

a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah (target 79 poin)

Sesuai amanat PP Nomor 29 Tahun 2014, setiap penyelenggaraan SAKIP pada SKPD yang dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Evaluasi implementasi SAKIP berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 104,56 % dari target yang ditetapkan. Artinya Dokumen Penilaian SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon pada tahun 2021 mendapat Predikat A. Hal ini dapat dilihat dari Surat Inspektorat Cilegon Nomor

700/ 1465 /Sekret Tanggal 13 Oktober 2022 Perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021, dimana evaluator memberikan nilai 82,6 poin yang artinya bahwa SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon mendapat predikat **A** (Memuaskan).

b. Indeks RB Perangkat Daerah (target 38 poin)

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan program Reformasi Birokrasi, dilakukan evaluasi yang berpedoman kepada permenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil pengukuran kinerja indikator ke-2 yaitu Indeks RB Perangkat Daerah pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 184,34 % dari target yang ditetapkan. Artinya Dokumen PMPRB DKPP Kota Cilegon pada tahun 2021 mendapat Predikat BB. Hal ini dapat dilihat dari Surat Inspektorat Cilegon Nomor 700/ 1772.14 /Sekret Tanggal 30 November 2022 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon Tahun 2021, dimana evaluator memberikan nilai 70,05 yang artinya bahwa Indeks RB Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon mendapat predikat **BB (Baik)**.

Pertumbuhan Realisasi Retribusi (target 1,29 %)

Hasil pengukuran kinerja indikator Pertumbuhan realisasi retribusi daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon didapat dari retribusi Rumah potong hewan dan pasar hewan dengan target sebesar 1,29 %.

Pertumbuhan realisasi retribusi didapat menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{\% pertumbuhan} &= \frac{((\text{Realisasi th n}) - (\text{Realisasi th n-1}))}{\text{Realisasi th n-1}} \times 100\% \\ \text{realisasi retribusi} &= \frac{56.855.000 - 62.324.000}{62.324.000} \times 100\% \\ &= - 8,78 \% \end{aligned}$$

Sehingga untuk realisasi pertumbuhan retribusi sebesar - 8,78 % dan target sebesar 1,28% maka capaian pertumbuhan realisasi retribusi sebesar minus 680,24 %.

Terjadinya penurunan retribusi di tahun 2022 terjadi disebabkan oleh : Menurunnya jumlah sapi yang dipotong di RPH dimana pada tahun 2021 rata-rata sebesar 10 – 15 ekor per hari menurun menjadi rata-rata 5 – 6 ekor per hari di tahun 2022. Turunnya jumlah pemotongan sapi ini adalah imbas dari menurunnya permintaan masyarakat akan daging segar RPH karena harganya yang relatif lebih mahal dari daging beku. Harga daging RPH sebesar Rp 140.000 / kg sementara harga daging beku sebesar Rp 80.000 / kg. Selain itu semakin banyaknya meat shop atau toko daging modern yang letaknya lebih

dekat ke perumahan masyarakat mengakibatkan minat masyarakat belanja daging di pasar semakin menurun. Maka upaya agar realisasi pertumbuhan retribusi menjadi meningkat di tahun mendatang maka akan dilakukan upaya : Penggalan retribusi dari pasar hewan yang belum tergal maksimal.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (target 77%)

Hasil pengukuran kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat, Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian memiliki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh karena itu maka dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Umum. Dari hasil survei tersebut didapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,67 % atau mutu Pelayanan B sedangkan target dari IKM adakah 77% maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 107,36%.

URUSAN PANGAN

Pada urusan pangan terdapat 3 (tiga) program yakni : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

Pada program ini ada 4 (empat) indikator program yang harus dicapai, yakni: Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (target 100%), Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (target 100%), Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (target 111 ton) dan Stabilitas Harga Pangan (Beras) (target CV kurang dari 10%)

A. Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (target 100%)

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi energi berupa kalori dan tingkat konsumsi protein yang dikonsumsi per hari oleh masyarakat Kota Cilegon. Tingkat Konsumsi Energi dan protein adalah perbandingan antara banyaknya energi dan protein yang dikonsumsi masyarakat terhadap kecukupan energi dan protein, dalam satuan % Angka Kebutuhan Gizi. Pengukurannya dilakukan dengan menghitung rata-rata tingkat konsumsi energi dan tingkat konsumsi protein. Semakin besar capaian konsumsi energi dan protein per kapita, berarti asupan energi dan protein masyarakat semakin tercukupi. Perhitungan Tingkat konsumsi energi:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat konsumsi energi} &= \frac{\text{Jumlah energi yang dikonsumsi}}{\text{Standar Kebutuhan energi}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.969,6}{2.100} \times 100 \% \\ &= 93,80 \% \end{aligned}$$

Sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.100 kkal/kapita/hari dan Pada tahun 2022 jumlah energi yang dikonsumsi masyarakat kota Cilegon sebesar 1.969,6 kkal/kapita/hari, maka tingkat konsumsi energi = 93,80 %. Perhitungan Tingkat konsumsi protein :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat konsumsi protein} &= \frac{\text{Jumlah protein yang dikonsumsi}}{\text{Standar Kebutuhan protein}} \times 100 \% \\
 &= \frac{64,6}{57} \times 100 \% = \mathbf{113 \%}
 \end{aligned}$$

Sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, Angka Kecukupan Protein (AKP) = 57 gram/kapita/hari dan Pada tahun 2022 jumlah protein yg dikonsumsi masyarakat kota Cilegon sebesar 64,6 gram/kapita/hari, maka tingkat konsumsi protein = 113,33%.

Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita dapat dihitung = 93,8% + 113,33% dibagi 2 diperoleh hasil 103,57%. Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita tahun 2022 sebesar 103,57%, target pencapaian Persentase Konsumsi Energi dan Protein Perkapita yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. **Maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 103,57%.**

B. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (target 100%)

Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi dan tingkat ketersediaan protein yang tersedia Kota Cilegon. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung rata-rata tingkat ketersediaan energi dan tingkat ketersediaan protein. Semakin tinggi ketersediaan pangan menunjukkan kemampuan daerah dalam menyediakan pangan bagi masyarakat semakin baik.

Perhitungan Tingkat ketersediaan energi :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat ketersediaan energi} &= \frac{\text{Jumlah ketersediaan energi}}{\text{Standar Tingkat ketersediaan energi}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.529}{2.400} \times 100 \% \\
 &= \mathbf{105,38 \%}
 \end{aligned}$$

Sesuai Permentan Nomor 65 Tahun 2010, Standar Tingkat Ketersediaan Energi = 2.400 kkal/kapita/hari dan Pada tahun 2022 jumlah ketersediaan energi di kota Cilegon sebesar 2.529 kkal/kap/hari, maka tingkat ketersediaan energi = 105,38 %

Perhitungan Tingkat ketersediaan protein :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat ketersediaan protein} &= \frac{\text{Jumlah ketersediaan protein}}{\text{Standar Tingkat ketersediaan protein}} \times 100 \% \\
 &= \frac{81,2}{63} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

$$= 128,89 \%$$

Sesuai Permentan Nomor 65 Tahun 2010, Standar Tingkat Ketersediaan Protein = 63 gram/kapita/hari dan Pada tahun 2022 jumlah ketersediaan protein di kota Cilegon sebesar 81,2 gram/kapita/hari, maka tingkat ketersediaan protein = 128,89%. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dapat dihitung = 105,38 % + 128,89 % dibagi 2 diperoleh hasil 117,14 %.

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita tahun 2022 sebesar 117,14%, target pencapaian Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. **Maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 117,14%.**

Perlu diketahui ketersediaan pangan di kota Cilegon diperoleh dari perhitungan Neraca Bahan Makanan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa produksi pangan yang berasal dari lokal adalah sebesar 11,2%, sisanya pasokan sebesar 88,8% diperoleh dari luar Kota Cilegon. Angka pasokan pangan yang berasal dari luar kota Cilegon setiap tahun cenderung bertambah. Informasi data ini sangat penting untuk kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kedepan mengingat kota Cilegon memiliki keterbatasan lahan pertanian dan jumlah penduduk yang cenderung bertambah setiap tahun. Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan-lahan terbiar adalah salah satu cara dalam penyediaan bahan pangan penduduk dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui diversifikasi pangan lokal. Ini mengarah kepada pola pangan berbasis sumber daya, budaya, kearifan lokal. Upaya ini dan juga secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku utama usaha pertanian. Begitu pentingnya upaya ketahanan pangan daerah berbasis sumber daya lokal membuat kegiatan ini menjadi Prioritas Daerah agar pemerintah lebih fokus dalam menanggulangi ketergantungan pasokan pangan yang berasal dari luar kota Cilegon yaitu melalui Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian serta Diversifikasi Pangan (termasuk Gerakan Masyarakat *Urban Farming*).

C. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (target 111 ton)

Indikator ini menggambarkan Persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Cadangan beras adalah persediaan beras untuk konsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat (Permentan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah). Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung Jumlah persediaan beras pada stok opname Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada akhir tahun. Pada tahun 2022 Pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebesar 19,3 ton sementara stok CPPD Berdasarkan Hasil Berita Acara Rekon Bulog Per Tanggal 31 Desember 2022 sebesar 94,167 ton sehingga total CPPD tahun 2022 sejumlah 113,48 ton dari target pencapaian CPPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 111 ton. **Maka capaian kinerja Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar 102,23 %.**

D. Stabilitas Harga Pangan (Beras) (target CV kurang dari 10%)

Indikator ini untuk menggambarkan perkembangan stabilitas harga beras ditingkat konsumen melalui pemantauan / pengumpulan data di pedagang (eceran dan grosir) data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Hal ini untuk menjamin bahwa harga pangan (beras) sepanjang tahun tetap mengalami kestabilan yang ditunjukkan dengan nilai CV (*coefficient variability*) < 10%, artinya fluktuasi harga pangan tidak melebihi 10%. Semakin kecil koefisien variasi harga pangan mengindikasikan variasi harga pangan makin rendah, dengan kata lain stabilitas harga semakin baik. Pada tahun 2022 diperoleh hasil capaian stabilitas harga pangan (beras) sebesar 1,45%, target pencapaian Stabilitas Harga Pangan (Beras) yang telah ditetapkan dalam RPJMD kurang dari 10%, dengan demikian fluktuasi harga pangan (beras) di bawah 10%. Ini berarti bahwa tercipta stabilitas harga beras karena terjaminnya rantai distribusi pangan di kota Cilegon dalam upaya

mewujudkan ketahanan pangan daerah. Semakin kecil koefisien variasi harga pangan mengindikasikan variasi harga pangan makin rendah, dengan kata lain stabilitas harga semakin baik. **Maka capaian kinerja Stabilitas Harga Pangan (Beras) pada tahun 2022 sebesar 100%.**

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;

Pada program Penanganan Kerawanan Pangan, indikator program yang harus dicapai adalah Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani (target 100%). Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Jumlah daerah rawan pangan dalam satuan kelurahan yang rawan pangan ditentukan oleh survei FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) yang dilaksanakan setiap tahun.

Pengukurannya dilakukan dengan cara :

$$\text{Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah kelurahan rawan pangan yang ditangani}}{\text{Jumlah kelurahan rawan pangan}} \times 100\%$$

Semakin besar cakupan daerah rawan pangan yang ditangani maka semakin baik ketahanan pangan daerah tersebut.

Pada tahun 2022 diperoleh hasil Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani sebesar 100%, meliputi 5 (lima) kelurahan, yakni 1. Kel. Cikerei (Kec. Cibeber), 2. Kel. Kepuh (Kec. Ciwandan), 3. Kel. Deringo (Kec. Citangkil), 4. Kel. Bagendung (Kec. Cilegon) dan 5. Kel. Bulakan (Kec. Cibeber).

Upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 adalah Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Penyaluran Bantuan Bahan Pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) untuk balita stunting dan gizi buruk, dan Kegiatan P2L yang berupa bantuan bibit cabai merah, cabai rawit, tomat, dan terong melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). Target pencapaian Cakupan daerah rawan pangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. Maka capaian Cakupan daerah rawan pangan yang ditangani pada Tahun 2022 sebesar 100%.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pada program Pengawasan Keamanan Pangan, indikator program yang harus dicapai adalah Tingkat Pengawasan Pangan Segar (target 100%). Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan. Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal tumbuhan sesuai dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yakni tidak memiliki cemaran residu pestisida, logam berat dan mikroba. Indikator ini menggambarkan tingkat keamanan pangan segar yang memenuhi standar yang beredar di kota Cilegon.

Semakin besar tingkat pengawasan pangan segar, menunjukkan tingkat keamanan dan mutu pangan segar yang lebih baik, tidak mengandung cemaran biologis, kimia dan benda lain yang melebihi ambang batas, serta tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat pengawasan} &= \frac{\text{Jumlah sampel Pangan segar yg aman}}{\text{Jumlah total sampel Pangan segar}} \times 100 \% \\ \text{Pangan Segar} &= \frac{72}{90} \times 100 \% \\ &= 80 \%\end{aligned}$$

Upaya pengawasan pangan segar yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diperoleh hasil tingkat pengawasan pangan segar sebesar 80 %, artinya dari 90 sampel masih ada 18 sampel yang berdasarkan hasil tes menyatakan sampel positif tercemar. Sampel itu meliputi : sayuran dan buah dan cemaran yang teridentifikasi adalah cemaran residu pestisida. Sementara Target pencapaian tingkat pengawasan pangan segar yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar > 80%. Maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar **80 %**.

Saat ini Program Pengawasan Keamanan Pangan telah melangkah lebih maju dengan dilakukannya upaya sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan dimana jika produk sudah mendapatkan sertifikat maka akses pasarnya bisa lebih luas dan ini juga memberikan kepastian bagi konsumen dalam hal keamanan pangan segar. Sampai dengan tahun 2022 sudah terdaftar sebanyak 12 sertifikat izin edar Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), sebanyak 1 sertifikat jaminan mutu hidroponik untuk komoditas pokcoy (pelaku usaha Hartanto) dan 1 sertifikat prima 3 untuk komoditas melon (pelaku usaha Bambang Regowo).

3.1.2.4 Pertanahan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CILEGON

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		299.756.402	236.806.452	79			
Arah Kebijakan : Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sistem informasi, pola insentif disinsentif/sanksi, kapasitas dan kualitas PPPNS penataan Ruang serta peran masyarakat dalam penataan ruang							
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		50.001.140	0	0	Berdasarkan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, maka Izin lokasi tidak dapat di laksanakan. sehingga Indikator Tingkat Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Lokasi sebesar 0 %.	Bahwa Izin lokasi berganti menjadi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) berdasarkan PP no 5 tahun 2021. dan Program ini sebaiknya dihapuskan atau disesuaikan.	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	100,0 Persen	0,0 Persen	0			
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,00%	0			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		50.001.140	0	0	Berdasarkan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, maka Izin lokasi tidak dapat di laksanakan. sehingga Indikator Tingkat Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Izin Lokasi sebesar 0 %.	Bahwa Izin lokasi berganti menjadi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) berdasarkan PP no 5 tahun 2021. dan Program ini sebaiknya dihapuskan atau disesuaikan.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Rapat Kegiatan Izin Lokasi.	100%	0%	0			
Arah Kebijakan : Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sistem informasi, pola insentif disinsentif/sanksi, kapasitas dan kualitas PPPNS penataan Ruang serta peran masyarakat dalam penataan ruang							
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		249.755.262	236.806.452	94,82	- Pihak Kelurahan / Kecamatan tidak punya data / Dokumen yg Valid. - Jumlah Inventarisasi Tanah Jalan, Tanah Wakaf dan Tanah kosong yang di inventarisasi di tahun 2022 seluas 1.315.106 M2, Tanah Kosong 7.035M2, Tanah Jalan 1.167.928 M2, Tanah Wakaf 140.143 M2. Persentase $1.315.106 / 512.390.000 \times 100 \% = 25,6 \%$.	- Koordinasi dengan Instansi Terkait, Badan Pertanahan Nasional dan BPKAD. - Melakukan survei ke Lapangan.	
	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	22,50%	25,67%	114,09			
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	100,00%	100			
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		249.755.262	236.806.452	94,82	- Pihak Kelurahan / Kecamatan tidak punya data / Dokumen yg Valid. - Nadzir lupa akan history tentang Tanah Wakaf. - Banyak Sertifikat Wakaf yang masih nginduk dengan sertifikat Wakif (yang mewakafkan) - Jumlah Inventarisasi Tanah Jalan, Tanah Wakaf dan Tanah kosong yang di inventarisasi di tahun 2022 seluas 1.315.106 M2, Tanah Kosong 7.035M2, Tanah Jalan 1.167.928 M2, Tanah Wakaf 140.143 M2. Persentase $1.315.106 / 512.390.000 \times 100 \% = 25,6 \%$.	- Koordinasi dengan pihak KUA dan Kemenag - Koordinasi dengan Sesepuh / Tokoh Agama yang ada di Daerah Tersebut. - Pemerintah Daerah memfasilitasi tentang Pemecahan Sertifikat. - Sosialisasi dengan KUA, Kemenag, BPN Stakeholder terkait untuk Tata Cara Pemecahan Sertifikat.	
	Persentase Tanah Kosong yang di Inventarisasi	100%	100%	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program Pengelolaan Tanah Kosong mempunyai indikator prosentase tanah kosong yang terinventarisasi yang diperoleh dari jumlah bidang tanah di Inventarisasi. Indikator program dihitung berdasarkan jumlah Jumlah Bidang Tanah Diinventarisasi di bagi Jumlah Data Tanah Kosong yang tersedia yaitu dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Bidang Tanah di Invetarisasi (M2)}}{\text{Jumlah Data Tanah Kosong yang Tersedia (M2)}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil kegiatan iventarisasi tanah kosong diperoleh data luasan yang di inventarisasi di berbagai wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- Luas Invetarisasi Tanah Wakaf untuk Kecamatan Ciwandan adalah 74,951 M2
- Luas Inventarisasi Tanah Wakaf untuk Kecamatan Citangkil adalah 65,191 M2
- Luas Inventarsasi Tanah Jalan untuk Kecamatan Ciwandan adalah 925,031 M2
- Luas Invetarisasi Tanah Jalan Untuk Kecamatan Citangkil adalah 242,897 M2
- Luas Inventarisasi Tanah Kosong untuk Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil adalah 70,350 M2
- Luas Total hasil Inventarisasi Tanah Kosong berupa Tanah Wakaf, Tanah Jalan dan Tanah Kosong adalah 1.315.106 M2

Perhitungan Persentase Jumlah Bidang Tanah yang di Inventarisasi adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Bidang Tanah di Invetarisasi (M2)}}{\text{Jumlah Data Tanah Kosong yang Tersedia (M2)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,315,106 \text{ m}^2}{5,1239,000 \text{ m}^2} \times 100\% \\ &= 25,67 \% \end{aligned}$$

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tanah Kosong yang terinventarisasi	%	22,55	25,67	113,84

3.1.2.5 Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I-IV, DAN UPTD TPSA

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		43.779.038.863	39.365.942.067	89,92			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35.557.615.342	32.947.154.552	92,66	Adanya peraturan baru tentang penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan Barang / Jasa	Peningkatan koordinasi dengan Bagian Barjas Setda Kota Cilegon	
	Nilai LAKIP DLH	68,5 poin	71,86 poin	104,91			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71,4 poin	77,06 poin	107,93			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70,0 poin	77,64 poin	110,91			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	2,0 Prosentase	205,21 Prosentase	10,260,50			
Arah kebijakan : Penyediaan dokumen analisis kinerja jasa lingkungan							
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		847.212.397	773.158.555	91,26			
	Ketersediaan Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan	1,0 Dokumen	1,0 Dokumen	100			
	Persentase Kebijakan Rencana dan Program yang Memiliki KLHS	100,0 Persentase	100,0 Persentase	100			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rencana Perlindungan dan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		90.909.728	88.988.270	97,89	-	-	
	Jumlah Dokumen DIKPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		756.302.669	684.170.285	90,46	anggaran untuk pembuatan dokumen KLHS Kecamatan Cilegon Cibeber tidak di serap karena kegiatan RDTR belum ada	dialihkan pada anggaran perubahan	
	Jumlah dokumen KLHS untuk RDTR Jombang Purwakarta	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah dokumen D3TLH	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah dokumen KLHS untuk RDTR Cibeber Cilegon	2 dokumen	2 dokumen	100			
Arah Kebijakan : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		1.890.752.489	1.628.556.088	86,13			
	Rata-Rata Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Air dan Udara	100,0 Persentase	148,44 Persentase	148,44			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	91,1%	91,11			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup		1.150.083.300	1.055.966.289	91,82	Jumlah PERTEK yang masuk dan dilakukan pembahasan tidak sesuai dengan perencanaan		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
	Jumlah Sampel Analisa Laboratorium Kualitas Lingkungan	196 Sampel	196 Sampel	100			
	Jumlah penilaian Substansi Persetujuan Teknis	20 Kali	4 Kali	20			
	Jumlah APD yang disediakan	25 Unit	25 Unit	100			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		100.000.000	88.254.299	88,25			
	Tersusunnya laporan IGRK	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		47.278.000	43.202.500	91,38			
	Jumlah dokumen pendukung pembangunan laboratorium lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		349.998.675	338.878.200	96,82			
	Tersusunnya Dokumen IKLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Alat ISPU yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100			
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	75,0%	75			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		121.943.249	29.762.800	24,41	Belum tersusunnya naskah akademis Perda RPPLH sehingga belum dapat dilakukan pembahasan dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat	Melakukan penyusunan naskah akademis ditahun berikut	
	Rancangan PERDA PPLH	1 Perda	0 Perda	0			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran yang dibina	20 perusahaan	20 perusahaan	100			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		121.449.265	72.492.000	59,69			
	Jumlah Dokumen Kajian Pemetaan Lahan Kritis	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah lokasi yang direboisasi yang ditanami pohon	1 lokasi	1 lokasi	100			
Arah kebijakan : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		74.999.897	72.425.810	96,57			
	Luasan Pengelolaan Kawasan Lindung	12,94 Persentase	8,88 Persentase	68,62			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	78,1%	78,12			
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		74.999.897	72.425.810	96,57	Karena tanaman di hutan kota sudah relatif besar sehingga tidak diperlukan penyiraman secara rutin		
	Tersedianya Bibit tanaman penghijauan lingkungan	213 Batang	213 Batang	100			
	Terlaksananya Penyiraman Hutan Kota Cibeber	32 Kali	18 Kali	56,25			
Arah kebijakan : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH		130.007.968	12.150.960	9,35	Adanya SOTK baru sehingga terjadi perubahan pemangku kegiatan, sehingga waktu pelaksanaan yang relatif singkat (2 bulan) dan jumlah		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					SDM fungsional pengendali yang terbatas		
	Persentase Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	100,0 Persentase	19,8 Persentase	19,8			
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	9,4%	9,41			
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		100.002.822	12.150.960	12,15	Adanya SOTK baru sehingga terjadi perubahan pemangku kegiatan, sehingga waktu pelaksanaan yang relatif singkat (2 bulan) dan jumlah SDM fungsional pengendali yang terbatas	Dilaksanakan pada TW. IV	
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diverifikasi	101 Kegiatan	19 Kegiatan	18,81			
	Inventarisasi Dan Identifikasi Limbah B3	1 dokumen	0 dokumen	0			
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,0%	0			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		30.005.146	0	0	Adanya SOTK baru sehingga terjadi perubahan pemangku kegiatan, sehingga waktu pelaksanaan yang relatif singkat (2 bulan) dan jumlah SDM fungsional pengendali yang terbatas	Dilaksanakan pada TW. IV	
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan Laporan	50 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0			
	Jumlah Koordinasi yang Akan Dilaksanakan	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0			
Arah kebijakan : Penguatan SDM, pengoptimalan pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN		331.478.099	275.673.052	83,16	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak memerlukan uji laboratorium, Covid-19 masih ada sehingga		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum dapat maksimal. https://drive.google.com/drive/folders/1B0YD198xAShksqJV456p44oPnpUjIHpe?usp=share_link		
	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Lingkungan	29,07 Persentase	14,54 Persentase	50,02			
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	75,0%	75			
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		81.478.834	50.878.584	62,44	diklat tidak terealisasi dikarenakan tidak ada jadwal diklat secara offline		
	Jumlah PPLH yang mengikuti pelatihan/diklat	1 orang	0 orang	0			
	Jumlah Calon PPLH yang mengikuti bimtek/pelatihan/diklat	10 orang	10 orang	100			
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		249.999.265	224.794.468	89,92	Belum bisa melakukan pencairan anggaran karena sistemnya dan Anggaran Dinas tidak bisa dicairkan sebelum menginput RUP; Beberapa perusahaan, karyawannya terkena covid-19 sehingga meminta schedule ulang pengawasan; Beberapa perusahaan mensyaratkan SWAB Antigen bagi Tim Pengawasn DLH; dan beberapa orang dari Tim Pengawas DLH terkena Covid-19.	Kedepannya harus ada perubahan sistem dan mekanisme sehingga pencairan anggaran kegiatan dapat dicairkan; kedepannya perlu menganggarkan SWAB Antigen; Menyiapkan alternatif perusahaan lain atau menyiapkan alternatif metode pengawasan lainnya.	
	Jumlah Usaha/Kegiatan yang menerima izin lingkungan, izin PPLH, dan sanksi administratif dari Pemerintah Kota Cilegon yang diawasi	50 Usaha dan/atau Kegiatan	50 Usaha dan/atau Kegiatan	100			
Arah Kebijakan : Penguatan SDM, pengoptimalan pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		49.998.999	45.753.806	91,51	https://drive.google.com/drive/folders/1RPZMwNgi2hopEGTJ6GbrZKXYE09oVZBC?usp=share_link		
	Persentase masyarakat/Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	20,09 Persentase	20,09 Persentase	100			
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		49.998.999	45.753.806	91,51			
	Jumlah lembaga yang menerapkan gerakan berbudaya lingkungan hidup (sekolah dan pondok pesantren)	45 lembaga	45 lembaga	100			
Arah Kebijakan : Penguatan SDM, pengoptimalan pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan							
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		18.299.477	18.296.720	99,98	https://drive.google.com/drive/folders/1jlaK8tXXAIquMQKzv3Kwy-QfgbTOauuV?usp=share_link		
	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	4,0 Penghargaan	4,0 Penghargaan	100			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		18.299.477	18.296.720	99,98			
	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai dalam PPLH	4 Kelompok	4 Kelompok	100			
Arah Kebijakan : Penguatan SDM, pengoptimalan pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan							
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		399.995.547	46.431.016	11,61	Hasil dari penanganan pengaduan lingkungan tidak memerlukan uji laboratorium		
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan hidup	100,0 Persentase	100,0 Persentase	100			
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	64,2%	64,22			
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		199.999.718	17.068.852	8,53			
	Prosentase jumlah pengaduan LH yang dapat diselesaikan	34 kasus	21 kasus	61,76			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		199.995.829	29.362.164	14,68	Keterbatasan personil dalam pelaksanaan pengawasan Sanksi Administrasi, dikarenakan waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan rutin.		
	Capaian kinerja penyelesaian sanksi administrasi pengaduan LH di luar pengadilan	15 kasus	10 kasus	66,67			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		4.478.678.648	3.546.341.508	79,18	Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran dari Bagian Barjas Setda Kota Cilegon Nomor : 027/847/Barjas tanggal 23 Mei 2022 tentang Validasi dan Penginputan Realisasi Data P3DN Pengadaan Barang/Jasa, sehingga harus dilakukan terlebih dahulu ketentuan yang ada dalam surat tersebut sebelum melaksanakan kegiatannya. sehingga waktu pelaksanaan menjadi tidak sesuai jadwal	Segera melakukan validasi dan penginputan data P3DN di Barjas Setda Kota Cilegon	
	Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah	100,0 Persentase	89,0 Persentase	89			
Pengelolaan Sampah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	80,9%	80,89			
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		366.558.741	258.470.280	70,51	- Masterplan topografi TPSA Bagendung tidak dilaksanakan dikarenakan tidak cukup waktu, karena waktu pelaksanaan ada di anggaran perubahan, sementara tahapan nya harus melakukan pengukuran kembali batas lahan TPSA Bagendung		
	Dokumen BLUD TPSA	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Dokumen Raperwal BLUD TPSA	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Masterplan Topografi dan Re-Design Block Plan TPSA Bagendung	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Pengukuran Kembali Batas Lahan TPSA Bagendung	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		777.988.999	490.113.200	63	Pembentukan bank sampah menggunakan dana swadaya masyarakat (bank sampah Menderma di Kecamatan Grogol dan bank sampah cinta bersih di Kelurahan Bagendung)		
	Pembentukan Bank Sampah	4 Bank Sampah	2 Bank Sampah	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya Biaya Operasional Pengolahan Sampah di TPSA Bagendung	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		830.461.314	498.370.822	60,01			
	Tertutupnya zona pembuangan yang selesai digunakan	0 m2	0 m2	0			
	Tersedianya kelengkapan APD petugas BBJP	1 paket	1 paket	100			
	Pemeliharaan TPS Pasar Kranggut	1 Unit	1 Unit	100			
	Pemeliharaan Workshop TPSA Bagendung	1 Unit	1 Unit	100			
	Belanja Bahan Bioaktivator	789 Liter	789 Liter	100			
	Pembangunan TPT TPSA Bagendung	237 Meter	237 Meter	100			
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		114.996.076	94.715.720	82,36			
	Terselenggaranya Jumat Bersih	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100			
	Terselenggaranya Hari Peduli Sampah Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		2.388.673.518	2.204.671.486	92,3	- PJU di TPSA Bagendung tidak direalisasikan karena belum disusunnya DED - Landasan Container terealisasi 4 dari 10 dikarenakan anggaran yang di alokasikan tidak mencukupi		
	Perluasan Lahan TPSA Bagendung	0 M2	0 M2	0			
	Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU) di TPSA Bagendung	4 Titik	0 Titik	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya Landasan Container	10 Lokasi	4 Lokasi	40			
	Tersedianya Gerobak Sampah	43 Unit	43 Unit	100			
	Tersedianya Container Bin (Portable)	107 Unit	107 Unit	100			
	Tersedianya Bak Container Sampah	27 Unit	27 Unit	100			
	Tersedianya Alat Kebersihan untuk penunjang pelayanan persampahan	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Tersedianya Tong Sampah Terpilah 3 Jenis	149 Unit	149 Unit	100			
	Pengadaan alat processing	8 unit	8 unit	100			
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I		1.376.150.745	1.234.041.756	89,67			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		210.167.574	200.595.202	95,45			
Arah Kebijakan : Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		1.165.983.171	1.033.446.554	88,63			
Pengelolaan Sampah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	98,6%	98,61			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		1.072.034.336	944.627.774	88,12			
	Jumlah Kendaraan lapangan yang dipelihara (7 Unit Truk Sampah, 4 unit Cator/Becak Motor, 3 unit Mobil Pick Up	24 Unit	22 Unit	91,67			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman kegiatan persampahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Peralatan untuk persampahan	6 Jenis	6 Jenis	100			
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		93.948.835	88.818.780	94,54			
	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi dalam pengelolaan Persampahan	20 Pokmas	20 Pokmas	100			
	Pemberian peralatan kebersihan untuk 70 RW dalam 2 kecamatan (Kec.cibeber dan kec.Cilegon)	4 Jenis	4 Jenis	100			
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II		1.194.945.207	1.117.539.292	93,52			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		253.311.548	245.935.712	97,09			
Arah Kebijakan : Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		941.633.659	871.603.580	92,56			
Pengelolaan Sampah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	100,0%	100			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		872.289.871	811.825.120	93,07			
	Pemeliharaan Kendaraan Pick-Up Sampah R4	3 Unit	3 Unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pemeliharaan Kendaraan Truck Sampah R6	8 Unit	8 Unit	100			
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		69.343.788	59.778.460	86,21			
	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Sosialisasi	20 pokmas	20 pokmas	100			
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah III		1.972.373.814	1.118.286.901	56,7			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		228.341.398	222.649.966	97,51			
	Jumlah Jenis Pakaian Kerja dan Perlengkapan Pegawai	9,0 Jenis	0,0 Jenis	0			
Arah Kebijakan : Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		1.744.032.416	895.636.935	51,35			
Pengelolaan Sampah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	100,0%	100			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		1.744.032.416	895.636.935	51,35			
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Roda 6	9 Unit	9 Unit	100			
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Roda 4	4 Unit	4 Unit	100			
	Pemeliharaan kendaraan pengangkut Roda 3	4 Unit	4 Unit	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah IV		2.502.542.623	2.031.245.294	81,17			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		287.285.756	280.744.325	97,72			
Arah Kebijakan : Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		2.215.256.867	1.750.500.969	79,02			
Pengelolaan Sampah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	100,0%	100			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA		2.121.303.437	1.662.191.969	78,36			
	Honor/ upah lembur petugas penanganan sampah	6 OK	6 OK	100			
	Jumlah kendaraan lapangan yang dipelihara (15 unit truck sampah, 3 unit cator/becak motor, 4 unit mobil pick up)	22 Unit	22 Unit	100			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		93.953.430	88.309.000	93,99			
	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi dalam pengelolaan persampahan	20 POKMAS	20 POKMAS	100			
UPTD Tempat Pengolahan Sampah Akhir		5.923.938.018	3.878.868.156	65,48			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		377.968.504	152.129.976	40,25			
Arah Kebijakan : Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan sampah							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		5.545.969.514	3.726.738.180	67,2			
Pengelolaan Sampah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	100,0%	100			
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		5.545.969.514	3.726.738.180	67,2			
	Beban jasa servis kendaraan sweepers truk	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Belanja penggantian suku cadang	10 Paket	10 Paket	100			
	Biaya operasional pembelian BBM Alat berat persampahan	5 Unit	5 Unit	100			
	Jumlah kendaraan alat berat persampahan yang di pelihara	5 Unit	5 Unit	100			
	Jumlah Pembelian BBM kendaraan Sweepers	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Penggantian spare part/ suku cadang	10 Jenis	10 Jenis	100			
	Jumlah Pintu Gate System yang di pelihara	2 Unit	2 Unit	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Dinas Lingkungan memiliki 4 (empat) indikator yaitu :

Nilai LAKIP PD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator	Formula Indikator
Nilai LAKIP DLH	Nilai Lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15% dan Evaluasi internal 10% dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)

Realisasi nilai LAKIP DLH Tahun 2022 yaitu mencantumkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon terhadap laporan LAKIP DLH dengan nilai 71,86 poin (BB= Baik).

Sedangkan pencapaian **Indeks Reformasi Perangkat Daerah** adalah sebagai berikut :

Indikator	FormulaIndikator
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)

Realisasi nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu mencantumkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 dengan nilai 77,345poin dengan kategori (BB = baik).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Formula Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober 2022 dengan responden masyarakat pengguna layanan DLH, didapatkan penilaian Indeks Kepuasan Layanan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebesar 77,78 poin. Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan pelayanan yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon masuk dalam kategori B atau Baik.

Berikut Unsur dan Indeks Penilaian 81 Responden dalam penghitungan IKM Dinas Lingkungan Hidup:

UNSUR	INDEKS	IKM	MUTU	KETERANGAN
Persyaratan	3,19	80	B	Baik

Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme	3,11	78	B	Baik
Waktu Layanan	3,09	77	B	Baik
Biaya	3,06	77	C	Kurang Baik
Jenis Spesifikasi Layanan	3,12	78	B	Baik
Kompetensi Petugas	3,12	78	B	Baik
Sikap Petugas	3,14	79	B	Baik
Sarana dan Kesigapan dalam Pengaduan	3,05	76	C	Kurang Baik
Sarana dan Prasarana	3,07	77	B	Baik

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat – DLH Tahun 2022

a. Pertumbuhan Realisasi Retribusi(OPD Penghasil)

Indikator	FormulaIndikator
Pertumbuhan Realisasi Retribusi(OPD Penghasil)	$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$ Ket : Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X (t – 1) =Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya

Data Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
2020	1.069.835.340,-	547.899.000,-	Ada penurunan target yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.069.835.340,- menjadi Rp. 641.901.204,-. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dengan adanya aturan WFH dan dibatasinya kegiatan-kegiatan ekonomi dan wisata sehingga berpengaruh terhadap jumlah volume sampah
2021	1.370.235.000,-	1.447.245.843,-	Surplus sebesar 6 %
2022	2.821.000.000,-	4.417.186.103,-	Surplus sebesar 56,58 %

Bidang urusan Lingkungan Hidup memiliki 9 (sembilan) program yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Ketersediaan Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan (target : 2 dokumen)
 Prosentase KRP yang memiliki KLHS (target : 100%)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 Rata-rata Prosentase Capaian Peningkatan Kualitas Air dan Udara (target : 100%)
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 Luasan Pengelolaan Kawasan Lindung, meliputi Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), Hutan Kota dan Kawasan Lindung Geologi (target : 12,93%)
 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3
 Rata-rata Prosentase Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3 (target : 100%)
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (target : 29,07%)
 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (target : 100%)
 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (target : 4 penghargaan)
 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (target : 100%)
 9. Program Pengelolaan Persampahan (target : 100%)
 Rata-rata Prosentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah (target : 100%)

Berikut adalah penejelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup meliputi 2 (dua) indikator yaitu :

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Ketersediaan Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan	1 Dokumen
2	Prosentase KRP yang memiliki KLHS	Jumlah KRP yang memiliki KLHS dibagi Jumlah KRP yang wajib memiliki KLHS X 100 %

- a. Ketersediaan Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan.
 Indikator ini mengharuskan pemerintah mempunyai dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Perencanaan lingkungan hidup melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH, dalam hal RPPLH belum tersusun pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Ini sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun berbagai perencanaan baik dalam urusan ruang dan pembangunan meliputi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2022 indikator ini telah dilakukan melalui penyusunan dokumen D3TLH.

Cara menghitung indikator :

Jumlah Dokumen Analisis Kinerja Jasa Lingkungan yang tersedia = 1 dokumen (RPPLH dan/atau D3TLH)
Realisasi = 1 dokumen, sehingga capaian indikator ini **100 %**.

Sepanjang tahun 2022 penyusunan dokumen D3TLH telah selesai dilakukan. Diharapkan dokumen ini dapat disosialisasikan dan diimplementasikan pada upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.

- b. Presentase Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Indikator ini mencerminkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyusunan KLHS salah satunya memuat kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Sepanjang tahun 2022 terdapat 2 (dua) KLHS RDTR yang akan disusun yaitu Jombang-Purwakarta dan Cibeber-Cilegon, namun pada penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kecamatan Cilegon dan Cibeber tidak bisa dilakukan disebabkan karena penyusunan RDTR belum tuntas dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cilegon.

Cara menghitung indikator :

Target KLHS RDTR = 1 dokumen

Realisasi KLHS RDTR = 1 dokumen (kecJombang-Purwakarta)

Realisasi = 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga capaian indikator ini **100 %**.

Perlu upaya tambahan berupa keseriusan dan komitmen penuh dari pemerintah kota Cilegon didalam dukungan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar indikator ini dapat tercapai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Rata-rata Prosentase Capaian Peningkatan Kualitas Air dan Udara	Menggunakan rumus perhitungan indeks pencemaran air sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, dengan target pada tahun 2022 IKA (38,94 poin) dan IKU(44,19 poin)

Indikator ini disusun sebagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meliputi indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perhitungan IKLH. Pengukuran ini dilakukan melalui pengambilan sample pada air permukaan dan beberapa titik pantau kualitas udara. Pengukuran dilakukan sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam setahun, dan pada sepanjang tahun 2022

pengambilan sample dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil pengukuran IKA tahun 2022 adalah 49,17 poin dari target 38,94 poin dan hasil pengukuran IKU adalah 75,39 poin dari 44,19 point.

Komponen	Nilai	Target	% Capaian berdasarkan Base Line
IKLH	Base Line	45,66	120,87
	Aktual	55,19	
IKU	Base Line	44,19	170,60
	Aktual	75,39	
IKA	Base Line	38,94	126,27
	Aktual	49,17	
ITL	Base Line	57,9	65,19
	Aktual	28,17	

Cara menghitung indikator :

$$\frac{\text{Capaian IKU berdasarkan Nilai Base Line} + \% \text{ Capaian IKA berdasarkan Nilai Base Line}}{2} = \frac{170,60\% + 126,27\%}{2} = 148,43\%$$

Capaian indicator ini **148,43 %**.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut menyebutkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Cilegon sepanjang tahun 2022 adalah 55,19 point artinya memiliki kualitas Sedang. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi nilai IKLH yaitu pada kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.

Pada kualitas air tercatat memiliki kualitas Kurang yaitu 49,17 poin. Pengambilan titik sample/pemantauan tersebar pada air permukaan. Penyebab kualitas air permukaan yang Kurang karena masih banyak pemukiman bahkan usaha/kegiatan yang memakai lahan sempadan sungai/kali sebagai aktifitas sehingga menyebabkan limbah (termasuk sampah) yang berasal dari pemukiman dan usaha/kegiatan tersebut langsung dibuang ke badan air penerima tersebut. Seyogyanya sempadan sungai/kali merupakan kawasan ruang terbuka hijau. Sebagai rekomendasi agar kualitas air permukaan dapat menjadi baik adalah melalui peningkatan pengendalian pencemaraan air berupa : peningkatan pelayanan terhadap IPAL Domestik, peningkatan pembinaan terhadap Usaha Skala Kecil, peningkatan peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran air.

Untuk kualitas udara tercatat memiliki kualitas Baik yaitu 75,39 point. Walaupun sudah dinilai baik, namun terdapat upaya yang harus dilakukan melalui peningkatan pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian pencemaran udara.

Untuk tutupan lahan tercatat memiliki kualitas Kurang dengan 28,17 point. Kerusakan lingkungan berupa alih fungsi lahan secara illegal turut menyumbang semakin berkurangnya tutupan lahan vegetasi yang berdampak pula terhadap berkurangnya kinerja jasa lingkungan. Perlu upaya dalam meningkatkan indeks tutupan lahan yaitu fokus penanganan pada lahan-lahan kritis dengan kategori sangat kritis luas total sebesar 395,7 Ha luas terbesar terdapat di kelurahan

Randakari seluas 229,5 Ha; dan penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang terutama daerah sempadan sungai, DAS berupa penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL, penyusunan kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan, peningkatan RTH dan pemeliharanya, peningkatan peran serta stakeholder.

Dan pada tahun 2022, pemerintah kota Cilegon berencana akan membentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang dimulai dengan penyusunan *Feasibility Study*, diharapkan dapat menyelesaikan salah satu upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Diperlukan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sector Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pengendalian emisi GRK (sector transportasi, industry, energi, persampahan, pertanian) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Adapun dukungan kegiatan untuk pencapaian indikator ini adalah upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Luasan Pengelolaan Kawasan Lindung, meliputi Kawasan Perlindungan Setempat yaitu hutan kota, sempadan sungai, dan Kawasan Lindung Geologi	Luas Kawasan Lindung yang dikelola oleh DLH dibagi total luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRW x 100%

Data Kawasan Lindung yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup

No.	Lokasi	Luas	Keterangan
1.	Hutan Kota di Kecamatan Cibeber Perumnas Cibeber Blok A	0,56 Ha	SK. Walikota No. 522/Kep.203-BLH/2013
2.	Hutan Kota di Kecamatan Cibeber Perumnas Cibeber Blok F	0,45 Ha	
3.	Hutan Kota di Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan	0,24 Ha	Sertifikat Nomor : 00013 Tahun 2020
4.	Sempadan Sungai di Kecamatan Cibeber (Cikera, Bulakan, Sukmajaya, Kalitimbang dan Samandaran)	7,5 Ha	
5	Sempadan Sungai Kedung ingas	3.36 Ha	
6	Sempadan Sungai Grogol	2.35 Ha	
7	Kawasan Lindung geologi mata air Ciputri Cikera	2.52 Ha	
TOTAL		16,99 Ha	

Tahun 2022 pelaksanaan pengelolaan Kawasan lindung pada lokasi hutan kota di blok A seluas 0,56 Ha dan Blok F seluas 0,45 Ha berupa penyiraman, dan pelaksanaan penanaman pohon di Situ Rawa Arum seluas 0,5 Ha yang mana ini sebagai kawasan lindung air permukaan. Total yang dilakukan pengelolaan seluas = 1,51 Ha, dari yang harusnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sesuai Renstra adalah 2,19 Ha. .

Cara menghitung indikator = Luas Kawasan Lindung yang dikelola oleh DLH dibagi luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam Renstra x 100%

$$\frac{1,51 \times 100\%}{2,19} = 68,95$$

Realisasi sebesar **68,95 %** .

Program ini secara langsung dapat meningkatkan Indeks Tutupan Lahan yang berpengaruh terhadap nilai IKLH. Pengelolaan pada sempadan sungai sangat mendominasi pencapaian target indicator ini, yang mana sempadan sungai sebagian besar dipakai untuk permukiman bukan sebagai RTH. Dibutuhkan penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah sempadan sungai. Adapun dukungan kegiatan untuk pencapaian indicator ini adalah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3).

Indikator	Formula Indikator
Rata – rata Prosentase Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3	Jumlah industri menghasilkan limbah B3 yang diawasi dibagi jumlah industri penghasil limbah B3 x 100%

Didalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Dan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan kabupaten/kotadalam sub bidang pengelolaan B3 dan limbah B3 adalah meliputi : Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Saat ini hingga tahun 2022 di Kota Cilegon terdapat 150 kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, yang mana harus senantiasa diawasi dan dibina oleh pemerintah Kota Cilegon sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.12/MenLHK/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3. Namun dalam target tahun 2022 seperti tercatat dalam Renstra terdapat hanya 101 usaha dan/atau kegiatan yang harus diawasi dan dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan Hidup. Namun hanya terdapat 20 usaha dan/atau kegiatan yang merespon.

Cara menghitung indicator :

Jumlah industri menghasilkan limbah B3 yang diawasi dibagi jumlah industri penghasil limbah B3

$$= \frac{20 \text{ pelaku usaha/kegiatan}}{101 \text{ pelaku usaha/kegiatan}} \times 100\%$$

$$= 19,80 \%$$

Realisasi 19,80 % dari target 100%

Pemerintah Kota Cilegon senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan limbah B3, namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat peralihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Belum samanya persepsi pemahaman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan dibawahnya tersebut menyebabkan para pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 belum segera mengurus izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini yang menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah B3 sepanjang tahun 2022 mengalami banyak hambatan. Maka diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui pemahaman regulasi yang benar dan butuh keseriusan pemerintah kota terhadap penanggulangan risiko apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Maka ke depan dinas Lingkungan Hidup kota Cilegon perlu mengundang KLHK dalam menjelaskan batas kewenangan pemerintah kota. Adapun dukungan kegiatan untuk pencapaian indikator ini adalah Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH dan sanksi.

Hingga tahun 2022 tercatat 344 usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH dan sanksi sebagai upaya pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2022 upaya pembinaan dan pengawasan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap 50 perusahaan yang memiliki izin PPLH.

Diharapkan pada waktu mendatang pemerintah kota dapat mengeluarkan sanksi administrasi dari hasil pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan ygang tidak taat. Dan dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar pelestarian lingkungan hidup berjalan baik, maka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup melingkupi juga tindaklanjut data kualitas lingkungan hidup terhadap hasil uji pengukuran baku mutu air, udara ambien, dan emisi yang dilakukan setiap tahun. Adapun dukungan kegiatan

untuk pencapaian indicator ini adalah Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Cara menghitung indikator :

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan, ijin PPLH dan sanksi}} \times 100\%$$
$$= \frac{50 \text{ usaha dan/atau kegiatan} \times 100\%}{334 \text{ usaha dan/atau kegiatan}}$$
$$= 14,50 \%$$

Realisasi 14,50 % dari target 29,07% sehingga capaian **49,99%**.

6. Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Prosentase pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat/kelompok masyarakat.	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan latihan dan penyuluhan dibagi jumlah masyarakat yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan hidup

Indikator ini dilaksanakan agar terdapat peran organisasi lingkungan hidup seperti masyarakat/kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota peduli lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu melalui pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon. Sepanjang tahun 2022 pelatihan dan penyuluhan dilakukan terhadap organisasi lingkungan hidup pada sejumlah sekolah yaitu 45 sekolah dari 224 jumlah sekolah Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama.

Cara menghitung indikator $\frac{45}{224} \times 100\% = 20\%$

Realisasi 20 % dari target 20% sehingga capaian **100%**.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Penghargaan telah diberikan kepada 4 (empat) unsur yaitu : sekolah adiwiyata tingkat kota, propinsi, nasional dan kampung iklim (mengelola sampah melalui bank sampah).

Diharapkan pada waktu mendatang program ini meliputi juga organisasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota seluruhnya dan masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun dukungan kegiatan untuk pencapaian indicator ini adalah Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota.

Cara menghitung indikator : $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

Realisasi 4 penghargaan dari target 4 Penghargaan, sehingga capaian **100%**.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dijalankan untuk menampung dan menganalisis kasus – kasus lingkungan hidup yang disampaikan oleh masyarakat serta menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus -kasus lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas ini pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk tim dari berbagai unsur yang bertugas menangani konflik-konflik kasus lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2022 terdapat 18 kasus pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah kota Cilegon. Dan dari semua pengaduan tersebut semua dapat diselesaikan dengan mediasi, sehingga target **100%** tercapai. Selain itu diharapkan ke depan pemerintah kota Cilegon juga harus dapat menindaklanjuti kasus usaha/kegiatan yang memiliki dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tidak memiliki izin lingkungan. Pada tahun 2022 tidak ada kasus-kasus yang sampai pada penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan/atau penegakan hukum pidana.

9. Program Pengelolaan Persampahan,

NO	Indikator	Formula Indikator
1	Rata-rata prosentase capaian kinerja pengelolaan sampah.	Jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah dibagi seluruh timbulan sampah x 100%

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir sampah. Hal ini dipertegas juga didalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, disebutkan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah adalah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

NO	Indikator Target berdasarkan Jakstrada	Tahun 2022

1	Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tingkat Kota Cilegon (Ton/Tahun)	20,26% (15.533,06 ton/tahun)
2	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tingkat Kota Cilegon (Ton/Tahun)	39,82% (30.529,44 ton/tahun)

Sumber : Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Disebutkan target pengurangan sampah hingga tahun 2022 adalah sebesar 20,26% dan penanganan sampah sebesar 39,82%. Pengurangan sampah melingkupi pembatasan, pandaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah, hal ini diupayakan melalui peran serta masyarakat diantaranya adanya bank sampah, TPS3R (anorganik), TPST (anorganik), rumahkompos, biopori, program kampung iklim, pembatasan timbulan sampah yang berasal dari hotel, rumahmakan/restoran, perkantoran, sekolah, fasilitas umum (stasiun, terminal, taman, tempat ibadah), retail. Sedangkan penanganan sampah meliputi :pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan lingkup adalah pengolahan sampah menjadi bahan baku, sampah termamfaatkan menjadi sumber energi, serta pemrosesan akhir sampah. Ini dapat dilakukan dengan cara melalui TPS3R, TPST dan TPSA. Jika penduduk kota Cilegon pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 451.722 jiwa dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan per orang adalah 0,465 kg/kg/hari maka timbulan sampah yang dihasilkan adalah sekitar 76.668 ton/tahun.

Data pengelolaan sampah tahun 2022 :

1. Pengurangan Sampah

Bank Sampah terdiri dari 22 Unit, jumlah total adalah 49,160 ton/bulan x 12 bulan = 589,92 ton/tahun

Lapak terdiri dari 12 Unit, jumlah total adalah 75,770 ton/bulan x 12 bulan = 909,24 ton/tahun.

Metode perhitungan indicator ini adalah :

% pengurangan = $\frac{\text{Jumlah sampah terpilah}}{\text{Jumlah timbulan sampah kota cilegon}} \times 100\%$

Jumlah timbulan sampah kota cilegon

= $\frac{(589,92 + 909,24) \text{ ton}}{76.668,00 \text{ ton}} \times 100\%$

76.668,00 ton

= 1,95 %

Realisasi 1,95 % dari target 20,26 % sehingga capaian **9,6 %**.

2. Penanganan Sampah

TPS3R terdiri dari 2 Unit, jumlah total adalah 564,48 ton/tahun
BBJP di TPSA Bagendung, kapasitas pengolahan 5 T/D : 1825 ton/tahun,

30 T/D : 2700 ton/tahun

% Penanganan = $\frac{\text{Jumlah sampah terkelola}}{\text{Jumlah timbunan sampah kota cilegon}} \times 100\%$

= $\frac{5089,48 \text{ ton} \times 100\%}{76.668,00 \text{ ton}}$

= 6,63 %

Realisasi 6,63 % dari target 39,82 % sehingga capaian **16,64 %**.

Sepanjang tahun 2022 pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pengurangan sampah melalui pembentukan bank sampah (22 unit), lapak (12 unit), 23 sekolah (adiwiyata) sehingga capaiannya sebesar 1,95%. Hal ini terlihat masih jauh dari target Jakstrada sebesar 20,26%, sehingga capaian kinerja pengurangan sampah adalah sebesar 9,6%.

Sedangkan realisasi penanganan sampah adalah sebesar 6,63% dari target Jakstrada sebesar 39,82%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 16,64%. Ini diperoleh dari TPS3R (2 unit) dan penanganan sebagian sampah yang masuk ke TPSA Bagendung sekitar 215 ton/hari melalui hasil kerjasama antara pemerintah kota Cilegon dengan PT. PLN yaitu mengubah sampah di TPA Bagendung menjadi sumber energy melalui Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) co-firing bahan bakar batu bara kapasitas sebesar 5 ton/hari sampah segar telah berjalan selama 1 tahun dan kapasitas 30 ton/hari telah berjalan selama 3 bulan terakhir. Di tahun 2022 juga telah dimulai rencana pemberian bantuan dari pusat melalui dana *loan* yang akan ikut membantu pemerintah kota Cilegon dalam pengolahan sampah menjadi sumber energy melalui Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) *co-firing* bahan bakar batu bara dengan kapasitas 100 ton/tahun. Pengolahan sampah ini berpotensi dapat menghasilkan pendapatan dengan dilakukannya penjualan BBJP kepada PT. Indonesia Power, sehingga UPTD TPSA Bagendung perlu dinaikkan statusnya menjadi BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) yang mana pembentukan BLUD ini telah dimulai sejak tahun 2022 melalui penyusunan *Feasibility Study* dan ditargetkan pada tahun 2023 selesai dibentuk. Disamping itu dengan masih terdapatnya sampah-sampah liar yang belum terangkut sejumlah kurang lebih 38% dari jumlah timbunan sampah akan menjadi perhatian khusus pemerintah kota.

Untuk itu ke depan Dinas Lingkungan Hidup harus membuat dan memperhatikan skema pengelolaan sampah yang tepat terutama pada 38% sampah yang belum ditangani, melalui perbaikan manajemen pengelolaan sampah yaitu dengan system pengangkutan sampah ke TPSA Bagendung (pemenuhan jumlah armada, tenaga kerja, jumlah ritasi) sarana dan prasarana pengumpulan dan pewadahan sampah, dan pemenuhan infrastruktur di TPSA Bagendung dengan memperhatikan usia dan daya dukung daya tampungnya. Pemerintah kota pun dinilai sangat perlu melakukan revisi Retribusi Sampah dengan memperhatikan analisa biaya penanganan sampah ideal. Untuk pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah perlu digiatkan kembali dan diberikan insentif sebagai upaya pengurangan sampah.

3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu urusan Wajib Non Pelayanan Dasar pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendukung Misi ke 1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel), pada misi tersebut mendukung 1 Tujuan yaitu Peningkatan layanan pemerintahan, indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikator Nilai SAKIP.

Tabel 3.1.2.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		23.679.470.785	20.296.808.399	85,71			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		21.479.421.477	18.320.333.724	85,29	kode rekening tambahan penghasilan beban kerja pns eselon 4 masuk pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas pns	sudah melakukan pengajuan permohonan perubahan parsial ke BPKAD	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	83,0 poin(skala 1-100)	83,09 poin(skala 1-100)	100,11			
	Indeks RB Perangkat Daerah	55,0 poin(skala 1-100)	87,95 poin(skala 1-100)	159,91			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	87,2 poin	89,36 poin	102,48			
Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil							
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		365.993.019	275.248.900	75,21	(a) meningkatnya cakupan penerbitan dokumen kependudukan (b) terlaksananya pelayanan langsung di kota cilegon baik di dinas, kecamatan, kelurahan	(a) pada tahun 2022 disdukcipil melakukan layanan di tingkat kelurahan dan pada tahun 2023 bidang pendaftaran penduduk selain melakukan layanan secara online dan	(a) Melakukan pendataan penduduk secara tatap muka, karena pendataan secara online tidak terakomodasi

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						offline di dinas juga tetap melakukan pelayanan langsung di kelurahan dan di landmark kota cilegon (b) melakukan layanan terintegrasi dari mulai online sd offline dan layanan langsung di beberapa titik layanan adapun untuk tahun 2023 tetap akan di laksanakan layanan online dan offline serta layanan di beberapa titik layanan	secara menyeluruh. (b) Melakukan upaya agar seluruh penduduk ber KTP elektronik.
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	97,25%	95,45%	98,15			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100,0%	100			
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		119.997.699	109.314.700	91,1			Melakukan pendataan penduduk secara tatap muka, selain pendaftaran online.
	Jumlah kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan yang dilaksanakan	43 kegiatan	43 kegiatan	100			Upaya agar seluruh penduduk ber KTP elektronik.
	Terlaksananya pendataan pendudukan non permanen	43 kelurahan	43 kelurahan	100			
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		245.995.320	165.934.200	67,45			Melakukan upaya agar seluruh penduduk ber KTP elektronik.

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah kegiatan pelayanan langsung dokumen kependudukan	43 kegiatan	43 kegiatan	100			
	Terlaksananya sosialisasi pindah datang penduduk	8 kecamatan	8 kecamatan	100			
	Terlaksananya pengiriman dokumen pendaftaran penduduk	12 bulan	12 bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil							
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		366.060.265	350.397.800	95,72	Tidak bisa Pelayanan Langsung Akta Kematian di Bulan Februari di Karenakan Wabah Pandemi	Dilakukan Pelayanan Secara Online	
	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	97,25%	93,00%	95,63			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100,0%	100			
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		99.999.400	95.428.400	95,43	Tertunda Karena Belum Terlaksana Rapat dengan Pihak Kelurahan	Surat Menyurat dengan Pihak kelurahan	
	Jumlah Kegiatan Pelayanan Langsung Akta Kelahiran	43 kegiatan	43 kegiatan	100			
	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan di Kelurahan	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100			
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		113.385.197	109.416.900	96,5	tidak ada	tidak ada	
	Jumlah Informasi Layanan Publik Kependudukan Di	2 Tayang	2 Tayang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Masyarakat-Iklan Layanan						
	Terlaksananya Kegiatan roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi"	100 %	100 %	100			
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		14.994.368	14.982.800	99,92	Tertunda Karena Belum Terlaksana Rapat dengan Pihak Kelurahan	Surat Menyurat dengan Pihak kelurahan	
	Jumlah Pendokumentasian Buku Register Akta Pencatatan Sipil	100 Buku	100 Buku	100			
	Jumlah Buku Register yang di Dokumentasikan	100 Buku	100 Buku	100			
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100,0%	100			
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		99.999.200	92.887.600	92,89	Tertunda Akibat Wabah	Pelaksanaan di Bulan Berikutnya	
	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pelayanan Langsung Akta Kematian	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		37.682.100	37.682.100	100	Perubahan Jadwal Pelayanan	Terlaksana di Bulan Berikutnya	
	Jumlah Peserta Pelayanan Pencatatan Perkawinan Non Muslim	40 Pasangan	40 Pasangan	100			
	Jumlah Peserta Pembinaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	80 Orang	80 Orang	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil							
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1.391.995.545	1.275.560.975	91,64			
	Persentase Validitas Data Kependudukan	90,20%	100,00%	110,86			
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100,0%	100			
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		34.340.000	18.888.000	55	Bioadata penduduk sesuai DKB I 2022 tidak dipublikasikan ke Dukcapil Kab/Kota sehingga kegiatan Pengolahan Data tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan	Pemutakhiran KK dilakukan secara manual, atau sesuai pengajuan/permintaan pemilik KK	
	Jumlah Data Penduduk yang divalidasi	5000 KK	5000 KK	100			
	Jumlah Penduduk yang dimutakhirkan berdasarkan Kartu Keluarga	50000 KK	50000 KK	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		73.806.483	70.506.575	95,53	1. Database Kependudukan adalah Data yang Bersifat privasi dan harus dilindungi 2. Setiap OPD yang Membutuhkan Data Kependudukan Harus Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan Sesuai dengan Permendagri No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. 3. Setiap OPD Belum Optimal dalam Memanfaatkan Data Kependudukan Untuk Kepentingan Pelayanan 4. PKS (Perjanjian Kerja Sama) bisa melampaui target 10 dokumen, tetapi belum terintegrasi dengan DWH terpus	1. Telah dilakukan Sosialisasi Permendagri No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Masing -Masing OPD 2. Belum Adanya Respon Dari Setiap OPD Terkait Perjanjian Kerjasama Pemafaatan Data Kependudukan 3. Sosialisasi Tentang Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan 4. Mendorong usulan ketersediaan jaringan internet tertutup di OPD/lembaga yg melakukan PKS dengan Dinas Dukcapil melalui Bappeda maupun Dinas Kominfo	
	Jumlah OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	1 OPD	1 OPD	100			
	Jumlah Instansi Yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Dan Percepatan Pelayanan Dokumen Adminduk Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	3 Instansi	3 Instansi	100			
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		14.999.999	10.618.000	70,79	tidak ada	tidak ada	
	Jenis Data dalam Pelayanan Jaringan SIAK	29 Jenis/Laporan	29 Jenis/Laporan	100			
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100,0%	100			
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		416.996.300	396.717.000	95,14	tidak ada	tidak ada	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Alat yang dapat di Operasionalkan	54 Unit	54 Unit	100			
	Jumlah Aplikasi yang Beroperasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		464.975.200	437.332.700	94,06	Sisa pagu anggaran karena efisiensi anggaran dan belanja pemeliharaan komputer jaringan SIAK	tidak ada	
	Jumlah Jaringan Komunikasi SIAK yang Terhubung antara Kecamatan dan Dinas	10 Titik	10 Titik	100			
	Jumlah Personal Komputer yang di manfaatkan di Dinas dan 8 Kecamatan	20 Buah	20 Buah	100			
	Jumlah Server Pelayanan dan Backup Database Kependudukan yang terpelihara di Dinas	3 Server	3 Server	100			
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		39.660.000	32.728.000	82,52	Belum ada OPD yang mau melakukan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan Data dikarenakan terkendala jaringan, karena harus menggunakan jaringan tertutup dan persyaratan ISO	OPD terkait untuk dapat menyediakan jaringan tertutup	
	Jumlah OPD Yang Telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	1 OPD	1 OPD	100			
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		116.090.745	103.416.400	89,08	tidak ada permasalahan	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Perekaman Jemput Bola	100 Orang	75 Orang	75			
	Jumlah Usia Wajib KTP yang melakukan Perekaman	800 Orang	1000 Orang	125			
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		20.999.998	6.824.000	32,5	Biodata penduduk sesuai DKB 1 2022 BNBA (By Name By Adress) tidak dipublikasikan ke dukcapil Kab/Kota, sehingga BIP (Buku Induk Kependudukan) tidak dapat tersusun dan dicetak	Pemutakhiran KK dilakukan secara manual (sesuai permintaan/pengajuan pemilik KK)	
	Tersedianya Buku Induk Kependudukan (BIP)	43 Buku	43 Buku	100			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		210.126.820	198.530.300	94,48	Tidak ada permasalahan, namun tahun 2023 anggaran Bintek tidak tersedia	tidak ada	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Operator SIAK	60 Orang	60 Orang	100			
Arah Kebijakan :Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil							
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		76.000.479	75.267.000	99,03			
	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	100,00%	96,82%	96,82			
Penyusunan Profil Kependudukan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100,0%	100			
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		31.000.470	30.673.000	98,94	Data Kependudukan yang bisa dijadikan dasar untuk pembuatan	cut off manual dari data SIAK dan pengecekan data	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya kebutuhan dokumen analisis kependudukan yang tersedia	50 Buku	50 Buku	100	Dokumen Analisis Kependudukan berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang terkadang rilis resmi datanya baru dilakukan di bulan Agustus-September	kependudukan di aplikasi GIS yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		45.000.009	44.594.000	99,1	Data Kependudukan yang bisa dijadikan dasar untuk pembuatan Buku Profil Kependudukan berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang terkadang rilis resmi datanya baru dilakukan di bulan Agustus-September	Antisipasi keterlambatan data dengan mengakses portal Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk informasi kependudukan	
	Tersedianya Kebutuhan Pofil Kependudukan	100 Buku	100 Buku	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Untuk capaian indikator kinerja, penjelasan teknisnya adalah sebagai berikut:

1. **Program Pendaftaran Penduduk :**
Melalui Program Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan oleh DKPS Kota Cilegon terus berupaya selalu meningkatkan kinerja pelayanan pendaftaran penduduk secara maksimal dan merata kepada seluruh pemohon baik di dalam pembuatan Kartu Keluarga(KK), kepemilikanKTP-el, kepemilikan Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan PindahKeluar Kota Cilegon, SKTT maupun melaksanakan sosialisasi penyuluhan pindah datang penduduk sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- a) Realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah sebesar 94.3 % (Dari Target yang di tetapkan 97.25%) dengan capaian Kinerja 96.97% dari target. secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
1. Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Pembilang : Jumlah Cakupan Kepemilikan KK : 100% Jumlah Cakupan Kepemilikan KTP-el : 99,38% (Sudah sesuai dg data Lakip 2022 yg diambil dr data DKB 2022 Jumlah Cakupan Kepemilikan KIA : 72,14% Jumlah Cakupan Surat Keterangan Pindah : 100%	96,97%

	Jumlah Cakupan SKTT : 100% 100+97.38+72.14+100+100=475,67 Realisasi 2022 : 471.52 Penyebut : Jumlah Item sebagai pembagi. Realisasi 2022 : 5 jenis layanan	

Capaian realisasi pencapaian didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, hingga sub kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk.

2. **Program Pencatatan Sipil**

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pencatatan sipil diperlukan kemauan dan kemampuan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat di tingkatkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon melauai Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan Langsung Terhadap Masyarakat di Kelurahan-kelurahan maupun di Kecamatan dalam pembuatan kepemilikan akta kelahiran dan melakukan sosialisasi guna untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta-akta Pencatatan Sipil.

- a) Realisasi Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah sebesar 93.3% (dari Target yang di tetapkan 97.25%) dengan capaian kinerja atau 95.94% dari target. secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Pembilang : Jumlah Cakupan Akta Kelahiran Usia 0-17th : 95.5% Jumlah Cakupan Akta Kematian : 100% Jumlah Cakupan Akta Perkawinan : 77.7% Jumlah Cakupan Akta Perceraian : 100% 95.5+100+77.7+100=365,32 Realisasi 2021 : 373,2 Penyebut : Jumlah Item sebagai pembagi. Realisasi 2022 : 4	95,94%

Capaian realisasi pencapaian didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, hingga sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :**

Pencatatan data penduduk melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang dimana dalam pelaksanaannya diawali dari kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk, Melalui Program ini yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan Internet sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

- a) Realisasi Persentase Validitas Data Kependudukan adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja 110.86% dari target sebesar 90.20%. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan telah menggunakan sistem SIAK Terpusat sehingga data yang bermasalah langsung dapat terverifikasi oleh pusat. Perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Validitas Data Kependudukan	Pembilang : Jumlah Data Bermasalah yang Terverifikasi Tahun 2022 : 139287 Penyebut : Jumlah Data Bermasalah Tahun 2022 : 139387	110,86%

Capaian realisasi pencapaian didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan :

- a) Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan (target : 100%), realisasi pencapaian indikator program ini sebesar 96.82%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Pembilang : Jumlah jenis data yang tersedia Tahun 2022 : 61 Penyebut : jumlah jenis data yang seharusnya tersedia Tahun 2022 : 63	96.82%

Capaian realisasi pencapaian didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain, sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya, Memuat uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a.Melakukan pendataan penduduk secara tatap muka, karena pendataan secara online tidak terakomodasi secara menyeluruh.	a) pada tahun 2022 disdukcapil melakukan layanan di tingkat kelurahan dan pada tahun 2023 bidang pendaftaran penduduk selain melakukan layanan secara online dan offline di dinas juga tetap melakukan pelayanan langsung di kelurahan dan di landmark kota cilegon	(a) meningkatnya cakupan penerbitan dokumen kependudukan
	b.Melakukan upaya agar seluruh penduduk ber KTP elektronik.	(b) melakukan layanan terintegrasi dari mulai online sd offline dan layanan langsung di beberapa titik layanan adapun untuk tahun 2023 tetap akan di laksanakan layanan online dan offline serta layanan di beberapa titik layanan	(b) terlaksananya pelayanan langsung di kota cilegon baik di dinas, kecamatan, kelurahan

3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.1.2.7a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS SOSIAL		279.999.593	2.409.000	0,86			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		279.999.593	2.409.000	0,86	Adanya perubahan SOTK baru berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial Tidak lagi mengampu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menyesuaikan dengan SOTK baru	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	0,00%	0			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		149.999.709	0	0	Adanya perubahan SOTK baru berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial		
	LKK	1 orang	0 orang	0			
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		129.999.884	2.409.000	1,85	Adanya perubahan SOTK baru berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial		
	Jumlah Rapat Persiapan Musrenbangkel	33 Orang	0 Orang	0			

Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak menjadi kewenangan Dinas Sosial dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat tidak dapat dilaksanakan.

3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD KELUARGA BERENCANA

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.8a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		17.135.306.220	15.501.116.708	90,46			
Arah kebijakan : Peningkatan layanan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		3.947.389.314	2.743.399.750	69,5	Melebihi Target dari target 0.88% target yang di per oleh -1.28%	Memberikan Komunikasi Informasi Edukasi Kepada Masyarakat tentang Manfaat dan Pentingnya Penggunaan Kontrasepsi atau KB	
	Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	1,90%	-1,28%	267,4			
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	99,3%	99,29			
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		2.314.105.000	1.345.464.900	58,14	Penyerapan anggaran untuk belanja internet untuk Tim Pendamping Keluarga di lakukan dibulan Mei - Desember 2022.		Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Terlaksananya biaya transport pendampingan ibu pasca persalinan di desa	8726 orang	8726 orang	100			
	Terlaksananya cetak data hasil pendataan keluarga kota cilegon	1321 orang	1321 orang	100			
	jumlah peserta audit kasus stunting	180 orang	180 orang	100			
	Jumlah peserta mini lokakarya	960 orang	960 orang	100			
	Terlaksananya biaya transport pendampingan calon pengantin di desa	3015 orang	3015 orang	100			
	Terlaksananya biaya operasional survailance stunting tingkat desa	12060 orang	9045 orang	75			
	Terlaksananya biaya transport pendampingan ibu hamil di desa	8726 orang	8726 orang	100			
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		360.000.000	356.250.000	98,96	Efisiensi anggaran Aplikasi Grand Design Pembangunan Kependudukan	Menekan tidak terserapnya Anggaran	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5 Pilar	5 Pilar	100			
	Terlaksananya Aplikasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan		30.000.000	27.535.000	91,78	Efisiensi anggaran karena Honor narasumber Eselon III berasal dari penyelenggara,	honorarium untuk narasumber eselon III di berikan 50 %	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Terlaksananya Kegiatan Survei/Pendataan Indeks	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan						
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		145.862.714	144.306.700	98,93	-	-	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Jumlah kader PPKBD mengikuti pelatihan pendidikan kependudukan	280 kader	280 kader	100			
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan		100.000.000	95.884.500	95,88	- Pada Belanja bahan komputer terdapat belanja tinta Ribbon Catridge, karena tidak memiliki komputer dengan Spek Printer merek tersebut, maka belanja tinta Ribbon Catridge tidak terserap. - Belanja Alat Tulis Kantor Binder Clip 105 Efisiensi Anggaran - Pada belanja Cendera Mata dan Paket Meeting Luar Kota terdapat Efisiensi	Menekan tidak terserapnya Anggaran di Tahun yang akan datang	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Anggaran - Pengajuan Honor Narasumber tidak sesuai dengan DPA yang seharusnya dilaksanakan oleh Kepala Daerah tetapi karena ada kedinasan lain maka diganti dgn ASDA I		Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Jumlah Peserta Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini dampak Kependudukan kepada Pemangku	100 Orang	100 Orang	100			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	95,1%	95,14			
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		25.000.000	24.700.000	98,8	Pengajuan Honor Narasumber tidak sesuai dengan DPA yang seharusnya dilaksanakan oleh Esselon II ke bawah dari penyelenggara kegiatan tetapi karena ada kedinasan lain maka diganti dengan Narasumber Esselon III ke bawah dari penyelenggara kegiatan	Menekan tidak terserapnya Anggaran di Tahun yang akan datang	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							bulan akan terus melakukan updating data.
	Tercapainya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	4 Kali	4 Kali	100			
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		50.000.000	50.000.000	100	-	-	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Tercapainya Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Profil	1 Profil	100			
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		226.406.600	187.750.650	82,93	Pagu anggaran tidak terserap karena ada honor narasumber yang seharusnya untuk narasumber profesional (sebesar Rp.1.700.000) di alihkan ke honor narasumber setingkat eselon III (BKKBN Provinsi Banten) yang standar biayanya hanya		Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					sebesar Rp.900.000 Per jam Pelajaran		Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi rumah data 9 kampung KB	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah peserta pembinaan rumah data 9 kampung KB	270 Orang	270 Orang	100			
	Jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk di kampung KB	2 Rumah data	2 Rumah data	100			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		69.600.000	59.536.000	85,54	Anggaran Internet balai tidak terserap dikarenakan double anggaran dengan APBD	Merencanakan lebih baik kedepannya	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen	100 %	100 %	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Kegiatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di balai Penyuluh	100 %	100 %	100			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		320.000.000	149.110.000	46,6	Dari 43 Kelurahan hanya 20 Kelurahan yang melakukan pendataan, dikarenakan 23 Kelurahan melakukan pendataan tetapi anggaran dari APBN (BKKBN)	Menekan tidak terserapnya Anggaran, Melakukan Perencanaan Lebih Baik di tahun yg akan datang	Tahun 2022 : Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota: - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 pada - Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes - sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus melakukan updating data.
	Jumlah Kader Kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Pengumpulan Data	75 Orang	75 Orang	100			
	Jumlah Kader Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1165 Orang	486 Orang	41,72			
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		306.415.000	302.862.000	98,84			
	Jumlah kader PPKBD yang melakukan KIE Tingkat Kelurahan	43 Orang	43 Orang	100			
	Jumlah Kader Sub PPKBD yang melakukan pemutakhiran data di Tingkat RW	286 Orang	286 Orang	100			
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Advokasi Bangsa Kencana	100 %	100 %	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Kegiatan Media KIE Cetak, Elektronik dan Momentum	100 %	100 %	100			
Arah kebijakan : Peningkatan layanan Keluarga Berencana							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		12.857.916.906	12.442.071.558	96,77	Minat masyarakat (Pasangan Usia Subur) pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya MOW dan MOP masih kurang; Penentuan capaian PPM terlalu tinggi; masih adanya keyakinan bahwa berKB itu bertentangan dengan keyakinan agama tertentu; masih kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat, cara kerja, efektifitas, keuntungan serta kerugian Alat Kontrasepsi yang akan digunakan; Satuan biaya jasa medis tertinggi yang ditetapkan pada juknis, jauh dibawah biaya standar pada rumah sakit yang ada	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Binaan atau Klinik, diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang jenis Alat Kontrasepsi secara kelompok atau individu agar dapat memahami manfaat, cara kerja, efektifitas, keuntungan serta kerugian Alat Kontrasepsi yang akan digunakan; Melakukan negoisasi kepada rumah sakit yang ada di Kota Cilegon agar bisa melakukan pelayanan dengan biaya yang sudah ditetapkan di juknis	Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana & peningkatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
	Rata-rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan BerKB	100,00%	70,00%	70			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK		433.420.100	421.563.670	97,26	-	-	
	Jumlah Lomba Harganas Tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. (Kategori : Lomba KB Lestari 20 Tahun, Lomba Bidan Praktek Mandiri, Lomba MKJP di Pusekesmas, Lomba BKB, Lomba BKR, Lomba BKL, Lomba UPPKS, Lomba PIK R, Lomba Kampung KB, Lomba IMP, Lomba PLKB/PKB Teladan)	11 Kategori	11 Kategori	100			
Pengendalian Program KKBPK		165.000.000	112.998.604	68,48	Minat masyarakat (Pasangan Usia Subur) pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya MOW masih kurang; Penentuan capaian PPM terlalu tinggi; masih adanya keyakinan bahwa berKB itu bertentangan dengan keyakinan agama tertentu; masih kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat, cara kerja, efektifitas, keuntungan serta kerugian Alat Kontrasepsi yang akan digunakan.	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Binaan atau Klinik, diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang jenis Alat Kontrasepsi secara kelompok atau individu agar dapat memahami manfaat, cara kerja, efektifitas, keuntungan serta kerugian Alat Kontrasepsi yang akan digunakan	Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana & peningkatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB dalam rangka Bhaksos IBI Kes, Bhaksos TNI KB Terpadu, Pelayanan KB dalam rangka Satuan Gerak PKK, Pelayanan KB dalam rangka Hari Besar Nasional Tk. Kota dan MOW	5 Even	5 Even	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	100,0%	100			
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		9.540.000.000	9.538.236.000	99,98	-	-	Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana & peningkatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
	Sebanyak 2650 Kader Mendapatkan Honor Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12 Orang	12 Orang	100			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	91,0%	91,01			
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12.000.000	4.992.000	41,6	Terdapat belanja yang sama dengan sub kegiatan lain sehingga dilakukan ABT agar dialihkan untuk kegiatan yang lain		
	Jumlah Faskes yang Terdistribusi Alokasi	37 Faskes	37 Faskes	100			
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		1.703.007.000	1.566.925.470	92,01	-		Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana
	Pengadaan Minilaparotomi/Tubectomy	37 UNIT	37 UNIT	100			
	Pengadaan Vtp Kit	102 UNIT	102 UNIT	100			
	Pengadaan Kit Siap Nikah	10 UNIT	10 UNIT	100			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		130.000.000	129.949.800	99,96	-	-	Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana & peningkatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan CTU	15 Orang	15 Orang	100			
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		418.935.000	242.055.700	57,78	Minat masyarakat (pasangan usia subur) pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) khususnya MOW dan MOP masih kurang	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Binaan atau Klinik, diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang jenis Alat Kontrasepsi secara kelompok atau individu agar dapat memahami manfaat, cara kerja, efektifitas, keuntungan serta kerugian Alat Kontrasepsi yang akan digunakan	Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana & peningkatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	18 Faskes	18 Faskes	100			
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	1 Kali	1 Kali	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB MOW	10 Akseptor	0 Akseptor	0			
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB MOP	3 Akseptor	0 Akseptor	0			
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB IUD	654 Akseptor	288 Akseptor	44,04			
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB Implant	979 Akseptor	670 Akseptor	68,44			
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Cabut Implant	2 Akseptor	2 Akseptor	100			
	Terlaksananya Distribusi Alokasi	36 Faskes	36 Faskes	100			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100,0%	100			
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		50.305.000	48.196.100	95,81			Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana & peningkatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
	Rakor Tingkat Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100			
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		155.250.000	145.842.000	93,94	Tidak Terserapnya beberapa honor narasumber		Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	352 Orang	352 Orang	100			
	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN)	704 Orang	704 Orang	100			
Pembinaan Terpadu Kampung KB		249.999.806	231.312.214	92,52	Tidak terserapnya beberapa honor narasumber, dan Belanja Modal Alat Angkutan tak Bermotor		Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana
	Jumlah Pembentukan Kampung KB	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Dialog Interaktif Penggarapan Kampung KB	70 Orang	70 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pembinaan TP.PKK	40 Orang	40 Orang	100			
	Pembinaan Wilayah Pembentukan Kampung KB	40 Orang	40 Orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan peran serta ormas dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta usaha lainnya							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		330.000.000	315.645.400	95,65	Ada Beberapa Pasangan Usia Subur (PUS) Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKA/UPPKS yang tidak Ber-KB Karena sedang Hamil, Ingin Anak Segera (IAS), Ingin Anak di Tunda (IAT), Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Pada Tahun Selanjutnya akan di Tingkatkan Kembali Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KKBPK Terhadap Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang Berstatus Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan program pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, dan pusat konseling remaja.
	Presentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	86,53%	86,32%	99,76			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (%) Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		150.000.000	146.079.900	97,39	Adanya Anggaran yang tidak Terserap sejumlah Rp 3.920.100 dikarenakan adanya efisiensi	Akan dibelanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Satuan Standar harga yang berlaku	Peningkatan program pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, dan pusat konseling remaja.sebanyak 32 orang
	Jumlah Peserta Pembinaan Pendapatan Ekonomi Keluarga (PPEK)	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja	160 Orang	160 Orang	100			
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		50.000.000	46.550.000	93,1	Adanya Anggaran yang tidak Terserap sejumlah Rp 3.450.000 dikarenakan adanya efisiensi	Akan dibelanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Satuan Standar harga yang berlaku	
	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kader Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL) Masing-masing Kelompok 35 Orang	105 Orang	105 Orang	100			
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		50.000.000	48.999.900	98	Adanya Anggaran yang tidak Terserap sejumlah Rp 1.000.100 dikarenakan adanya efisiensi	Akan dibelanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Satuan Standar harga yang berlaku	1). Peningkatan program pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, dan pusat konseling remaja - 2022: Pembinaan kader BKB, BKR, BKL masing-masing 35 orang; Pembinaan anggota kelompok Pik-R 80 orang - 2023: Pembinaan kader BKB, BKR,
	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	200 Orang	200 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							BKL masing-masing 32 orang; Pembinaan anggota kelompok Pik-R 110 orang Pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga - 2022: Pembinaan anggota kelompok UPPKS/UPPKS sebanyak 40 peserta - 2023: Pembinaan anggota kelompok UPPKS/UPPKA sebanyak 32 orang
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100,0%	100			
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		80.000.000	74.015.600	92,52	Adanya Anggaran yang tidak Terserap sejumlah Rp 5.984.400 dikarenakan adanya efisiensi	Akan dibelanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Satuan Standar harga yang berlaku	Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD terkait peningkatan program pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, dan pusat konseling remaja.
	Jumlah Peserta Pelatihan Kegiatan Pengutan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Kegiatan Sarasehan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka	25 Orang	25 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	80 Orang	80 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Berbasis Pendidikan dan Masyarakat						
UPTD Keluarga Berencana		81.000.000	80.796.000	99,75			
Arah kebijakan : Peningkatan layanan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		81.000.000	80.796.000	99,75			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	105,0%	105			
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		81.000.000	80.796.000	99,75			
	Orientasi tenaga Lini lapangan balai 1 dan balai II, Pembinaan Kader Balai I dan Balai II, Pengolahan Data Balai I dan Balai II, Penyuluhan KB dan Stunting Balai I dan Balai II	100 Persen	105 Persen	105			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Memiliki Indikator Program teknis yang harus dicapai:

- Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk (target 1.90 %)
- Rata – Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB(target : 100 %)
- Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB (target : 86.53%)

Adapun Program yang mendukung **Program Prioritas Daerah** dalam **Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan** terdiri dari:

1. **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** melalui dukungan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2. **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** melalui dukungan kegiatan Lomba Harganas Tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. (Kategori : Lomba KB Lestari 20 Tahun, Lomba Bidan Praktek Mandiri, Lomba MKJP di Pusekesmas, Lomba BKB, Lomba BKR, Lomba BKL, Lomba UPPKS, Lomba PIK R, Lomba Kampung KB, Lomba IMP, Lomba PLKB/PKB Teladan), Kegiatan Pelayanan KB dalam rangka Bhaksos IBI Kes, Bhaksos TNIKB Terpadu, Pelayanan

KB dalam rangka Satuan Gerak PKK, Pelayanan KB dalam rangka Hari Besar Nasional Tk. Kota dan MOW, 2650 Kader Mendapatkan Honor Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pembentukan Kampung KB, Pembinaan TP.PKK, Pembinaan Wilayah Pembentukan Kampung KB.

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud :

a. Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Salah satu penyebab penurunan laju pertumbuhan penduduk adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk lewat Program Keluarga Berencana dalam satu tahun. Realisasi Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **-1.28 %** (dari target yang ditetapkan sebesar 1.90%) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Capaian
1. Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Penyebut : Jumlah Kelahiran Hidup dikurangi Jumlah Kematian Penduduk Sepanjang tahun realisasi 2022 : 6.756 – 12.610 = -5.854 Penduduk Pembilang : Jumlah Penduduk Awal tahun realisasi 2022 : 455.721 Penduduk	- 1.28 % - Kinerja terhadap target 2022 = 267,4 %

Capaian Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyediaan Dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Dan Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan Kb.

b. Rata – Rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB

Realisasi rata-rata persentasi capaian kinerja dalam pemenuhan kebutuhan Ber-KB Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **70 %** (dari target yang ditetapkan sebesar 100%) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja

2. rata-rata persentasi capaian kinerja dalam pemenuhan kebutuhan Ber-KB	<u>Penyebut :</u> Jumlah yang menjadi peserta KB menurut metode kontrasepsi realisasi 2022 : 48.766 orang <u>Pembilang :</u> Jumlah pasangan usia subur (PUS) realisasi 2022 : 71.674 orang	70%

Capaian Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani didukung melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pengendalian Program Kkbpk, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan Kb (Pkb/Plkb, Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya.

c. Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB

Program Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Realisasi Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB Kota Cilegon di tahun 2022 adalah sebesar **86,32 %** (dari target yang ditetapkan sebesar 86.53%) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Uraian data	Kinerja
3. Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	<u>Penyebut :</u> Jumlah peserta KB anggota kelompok BKB,BKR,BKL,UPPKA/UPPKS sekota cilegon realisasi 2022 : 7.557 orang <u>Pembilang :</u> Jumlah PUS anggota kelompok BKB,BKR,BKL,UPPKA/UPPKS sekota cilegon realisasi 2022 : 8.755 orang	86,32%



3.1.2.9 Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN, UPTD PENGELOLAAN SARPRAS PERHUBUNGAN, UPTD PARKIR

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.9a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PERHUBUNGAN		55.160.158.863	49.091.141.937	89			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		29.173.241.114	25.766.290.738	88,32	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) di peroleh 80,73 yang merupakan hasil survey tahun 2022 akhir. Capaian 101,55% di peroleh dari pengambilan sampel variabel persyaratan pelayanan, perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan pada pelayanan Dinas Perhubungan. Dari 149 responden menyatakan yang paling dominan dan responnya baik adalah penanganan pengaduan,saran dan masukan.	- Untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) di tahun 2023, maka perlu adanya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan SOP, ketersediaan anggaran untuk pelatihan servis excellent,dan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79,5 B poin	80,73 B poin	101,55			
	Indeks RB Perangkat Daerah	60,42 poin	64,58 poin	106,89			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	62,32 B kategori / poin	67,13 B kategori / poin	107,72			
Arah kebijakan : Peningkatan kinerja pelayanan jalan dan transportasi							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		25.986.917.749	23.324.851.199	89,76	banyak nya angkot yang tidak memperpanjang trayek, dan banyak nya angkot yang terkena efek covid dan kenaikan BBM, dan menunggu	https://drive.google.com/file/d/1xn_P7s_eFZMP2LFhjWtCDFKf0f1l66WT/view?usp=share_link	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					tatralok terbaru untuk mengetahui perhitungan realisasi kinerja lalu lintas jalan		
	Rasio Konektivitas Wilayah	0,58 Poin	0,18 Poin	31,03			
	Kinerja Lalu Lintas Jalan	0,4 Poin	0,24 Poin	60			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		325.000.000	322.603.833	99,26	Efisiensi anggaran		
	Penyusunan Data Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Study Kelayakan Sistem Kendali Lalu Lintas Kendaraan /ATCS	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Inventarisasi Kelengkapan Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Pengembangan dan Penataan Terminal	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		275.000.000	267.672.600	97,34	Penetapan DPAP TA 2022 di Akhir Oktober	mengatur jadwal dan memulai tahapan pekerjaan sebelum DPAP TA 2022	
	Laporan Evaluasi Efektifitas Manajemen Penerangan Jalan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Laporan Evaluasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Jasa Angkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		2.735.520.860	2.499.600.658	91,38	'- DED dan pembangunan konstruksi perlintasan KA berada dalam 1 tahun anggaran yang sama sehingga pelaksanaan konstruksi kurang efektif dan kurang optimal, serta rincian belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. - Belum adanya perubahan standar satuan harga : 1. pembangunan kontruksi Palang Pintu perlintasan kereta api Elektrik Tipe 1 sehingga anggaran yang tersedia hanya cukup untuk biaya pembangunan kontruksi Palang Pintu perlintasan KA Elektrik,	'- Perencanaan DED dilaksanakan 1 tahun sebelum pelaksanaan konstruksi (n-1) - Mengusulkan SSH Tentang kriteria dan harga pembangunan palang pintu KA Elektrik tipe I, biaya diklat, Uji kompetensi dan biaya sertifikasi untuk petugas perlintasan KA.	
	Palang Pintu Kereta Api	4 Lokasi	4 Lokasi	100			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		4.815.935.223	4.041.993.605	83,93	'- Penyusunan perencanaan DED dan pembangunan konstruksi Penerangan Jalan Umum (PJU) baik di OPD maupun Usulan POKIR berada dalam 1 tahun anggaran yang sama sehingga Pelaksanaannya kurang efektif dan kurang optimal. - Dalam hal pemenuhan usulan POKIR DEWAN Tentang Penerangan Jalan Umum jenis Solar cell tidak terdapat di SSH dan Besaran harganya tidak sesuai dengan E-katalog	'- Perencanaan DED seharusnya dilaksanakan 1 tahun sebelum pelaksanaan konstruksi (n-1) sehingga pelaksanaan konstruksi penerangan jalan umum (PJU) di OPD dan usulan Pokir lebih efektif dan optimal. - Kegiatan PJU lingkungan yang melalui pokir dewan sebaiknya direncanakan melalui program anggaran DPWKEL. -Mengusulkan SSH Tentang kriteria dan harga pembangunan konstruksi Penerangan Jalan Umum (PJU) jenis Solar cell atau Anggaran menyesuaikan E-katalog.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terpasangnya PJU Pokir Dewan	105 Titik	105 Titik	100			
	Terpasangnya PJU jalan sultan	24 Titik	24 Titik	100			
	Terpasangnya PJU jalan AAT Rusli	45 Titik	45 Titik	100			
	Terpasangnya Guardrill	124 meter	124 meter	100			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		15.747.698.443	14.702.986.720	93,37			
	Jumlah Pemeliharaan PJU	13 Item	13 Item	100			
	Informasi Pelayanan Pengaduan PJU kepada masyarakat Kota Cilegon	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pembayaran Verifikasi Tagihan PJU	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Penunjang Pelayanan PJU	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100,0%	100			
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		277.431.000	275.320.690	99,24			
	Jumlah Aplikasi Yang Di Pelihara	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Kartu Uji Smart Card Yang Di Adakan	9500 Set	9500 Set	100			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		49.500.000	48.000.000	96,97	kondisi eksisting jaringan listrik yang di gunakan oleh alat uji masih bergabung dengan jaringan listrik yang di gunakan oleh gedung kantor, sehingga sering terjadi turun daya yang mengakibatkan kerusakan pada alat uji dan mengganggu pelayanan pengujian kendaraan.	Perlu adanya pemisahan jaringan listrik antara gedung kantor dengan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan perlu adanya backup genset untuk mengantisipasi apabila sewaktu waktu terjadi pemadaman aliran listrik.	
	Jumlah Alat Uji Yang DiPelihara	9 Buah	9 Buah	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		39.952.911	39.952.911	100			
	Jumlah Kendaraan yang diuji	200 Unit	200 Unit	100			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	50,0%	50			
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		729.980.966	696.253.720	95,38	Penyesuaian dengan Nomenklatur Baru	Akan dilakukan penyesuaian pada kegiatan tahun berikutnya	
	Pelaksanaan Pendampingan Bus Road KPK	3 Hari	3 Hari	100			
	Pemeliharaan Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu	16 Unit	16 Unit	100			
	Oprasi Pengamanan (jumlah personil)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	4 Paket	4 Paket	100			
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		80.000.000	9.450.000	11,81	Disebabkan adanya Keterlambatan penerbitan SK Walikota tentang Forum Lalu Lintas Kota Cilegon Sehingga Honorarium Anggota, Makan dan Minum dan Sewa gedung tempat pertemuan tidak terealisasi.	Pelaksanaan Forum Lalu Lintas diusulkan kembali tahun 2023, Dalam rangka terciptanya sistem transportasi wilayah perkotaan.	
	Terlaksananya Koordinasi Antara Muspida Guna Tertib Lalu Lintas	100 Peserta	0 Peserta	0			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100,0%	100	JLS merupakan jalan daerah /kelas 3 yang secara manfaatnya juga merupakan akses industri dan pariwisata sehingga dari sisi pemanfaatan jalan JLS tidak hanya dinikmati oleh warga lokal cilegon tetapi juga warga luar kota cilegon yang banyak beraktifitas khususnya aktifitas industri dan pariwisata sehingga dari kondisi tersebut mobilisasi kendaraan di JLS terhitung cukup padat dilalui		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					angkutan gerak, angkutan tambang dan juga kendaraan pribadi sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		73.000.000	65.127.000	89,22			
	Jumlah Data Angkutan Orang Yang Keluar Masuk Terminal	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		179.055.574	163.922.000	91,55	Waktu Pelaksaasn Terbatas dikarenakan Perubahan Stuktur Organisasi	Peningkatan Dalam Penanganan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Barang dan orang	
	Pengawasan dan Keselamatan Tertib Berlalu lintas angkutan jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		59.080.710	54.074.000	91,53			
	Jumlah Dokumen Monitoring dan sosialisasi Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50,0%	50			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		536.021.462	76.881.462	14,34	'Realisasi kegiatan tidak dapat terealisasi secara maksimal disebabkan : -Adanya perubahan rincian pada DPA yang tidak sesuai dengan perencanaan atau kajian awal SAUM yakni Semula Untuk Operasional SAUM Dengan Koridor 2 Seruni - Ciwandan (PP). Berubah Menjadi trayek terminal seruni -	'-Menganalisa Efektivitas Pelaksanaan Operasional SAUM - Menyediakan Anggaran Untuk pemeliharaan Armada Trans Cilegon (SAUM) Seperti BBM, Pelumas Mesin dan Suku Cadang Angkutan. - Kajian	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					bandara Soetta yang Bekerjasama dengan DAMRI dan Modifikasi Kendaraan SAUM. -Adanya rekomdasi dari Rapat DPRD Kota Cilegon untuk tidak merealisasikan keseluruhan dari Kegiatan tersebut, Seperti BBM, Honorarium	kerjasama dengan pihak operator transportasi.	
	Jumlah Waktu Operasional Armada SAUM (4 Unit)	3 Bulan	0 Bulan	0			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		63.740.600	61.012.000	95,72			
	Jumlah Peserta Awak Angkutan Umum yang Mengikuti Kegiatan	100 Peserta	100 Peserta	100			
	Jumlah Data Angkutan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100			
UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan		300.000.000	295.697.480	98,57			
Arah kebijakan : Peningkatan kinerja pelayanan jalan dan transportasi							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		300.000.000	295.697.480	98,57	tidak ada masalah	pengerjaan tidak ada kendala ,proses lancar	
	Kinerja Lalu Lintas Jalan	40,0 poin	0,0 poin	0			
	Rasio Konektifitas Wilayah	58,0 poin	0,0 poin	0			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100,0%	100			
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		300.000.000	295.697.480	98,57	uraian pekerjaan kurang selaras dengan judul sub kegiatan	menambah sub kegiatan yang sesuai dengan uraian pekerjaan yang dibutuhkan	
	tersedianya peralatan kantor dan pemeliharaan terminal	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Seruni (fasilitas utama dan pendukung)						
UPT Parkir		192.300.000	132.662.600	68,99			
Arah kebijakan : Peningkatan kinerja pelayanan jalan dan transportasi							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		192.300.000	132.662.600	68,99			
	Kinerja Lalu Lintas Jalan	40,0 poin	0,0 poin	0			
	Rasio Konektivitas Wilayah	58,0 poin	0,0 poin	0			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		192.300.000	132.662.600	68,99	Penyusunan RAPERDA Perparkiran: Waktu pelaksanaan dan anggaran tidak mencukupi.	Penyusunan RAPERDA Perparkiran: Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Rancangan PERDA terlebih dahulu	
	Analisis Pemetaan Potensi Ritribusi Parkir Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Hasil laporan akuntabilitas tahun 2022 masih dalam tahap /proses penilaian evaluator. Adapun Perhitungan realisasi tahun 2022 berdasarkan self assessment yang didampingi oleh Tim inspektorat & Organisasi Rb untuk Dinas Perhubungan Kota Cilegon mendapatkan nilai 67.23 point.

Indeks RB perangkat Daerah target kinerja untuk tahun 2022 sebesar 60,42 poin, untuk hasil tahun 2022 masih dalam tahap / proses penilaian evaluator. Berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi berdasarkan self-assesment yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 64.58 poin. Nilai tersebut merupakan akumulasi evaluasi (Self- Assessment) dari penilaian mandiri terhadap seluruh komponen area perubahan, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Data yang digunakan menggunakan data tahun 2022. Target kinerja Indeks kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 79.50 point. Penilaian hasil capaian tahun 2022 menggunakan penilaian realisasi kinerja di tahun 2022 dengan hasil realisasi 80.73 point, dengan capaian kinerja sebesar 101,55 % sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No	Indikator Kinerja	satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian(%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	79.50	80.73	101,55

Penilaian indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat kota Cilegon yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data melalui formula yang diberikan oleh bagian Organisasi Setda Kota Cilegon. Survei dilaksanakan pada pelayanan Trayek dengan jumlah responden sebanyak 21 orang, dan Pelayanan Pengujian kendaraan sebanyak 128 orang. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut mencapai 80.73 point, dengan predikat BAIK. Ada beberapa variable yang menjadi penilaian IKM dengan nilai masing-masing indikator tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR	NILAI RATA- RATA	NILAI PER UNSUR	KATEGORI
1.	Persyaratan	3,349	83,72	Baik
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,336	83,39	Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,027	75,67	Kurang Baik
4.	Biaya/Tarif	2,926	73,15	Kurang Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,356	83,89	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,349	82,2	Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3,289	81,21	Baik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,248	81,21	Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3,477	86,91	Baik
Nilai IKM		3,261	80.73	Baik

Berdasarkan tabel tersebut ada beberapa unsur yang harus diperbaiki atau ditindak lanjuti atas hasil survey IKM oleh Dinas Perhubungan kota Cilegon yaitu unsur biaya /tarif dan waktu penyelesaian. Untuk biaya/tarif uji kendaraan bermotor masih dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat dan waktu penyelesaiannya dianggap masih terlalu lama.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Urusan Bidang Perhubungan dengan **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)** memiliki 2 indikator yang harus dicapai, yaitu :

1. Persentase Rasio Konektivitas Wilayah

Rasio Konektivitas Wilayah diukur berdasarkan jumlah angkot yang aktif melayani trayek yang tersedia dibagi dengan jumlah keseluruhan angkot yang dibutuhkan. Target kinerja rasio konektivitas wilayah pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 58%, realisasi kinerjanya adalah sebesar 18%. dengan jumlah angkot aktif yaitu sebesar 144 unit dengan jumlah total angkot sebesar 800 unit. Sehingga capaian realisasinya sebesar 31,03%. Target kinerja tidak dapat tercapai karena banyaknya angkot yang tidak memperpanjang trayek, hal ini disebabkan oleh banyaknya angkot yang tidak beroperasi imbas dari pandemic covid – 19 dan kurangnya optimalnya kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan perkotaan. Tabel Realisasi Rasio konektivitas Wilayah pada Dishub Tahun sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian
Rasio Konektivitas Wilayah	Konektivitas wilayah yang diukur dari jumlah angkot yang tersedia dari trayek yang ada dibandingkan dengan jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan di Kota Cilegon	Jumlah angkot yang aktif melayani trayek yang ada dibagi Jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yg dibutuhkan pada kab / kota dikali 100 %	%	464/800 = 0.58	144/800= 18 %	31,03%

Jumlah angkutan perkotaan yang aktif beroperasi mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 angkot yang aktif beroperasi sebanyak 787 dari 1.084 dari jumlah angkot keseluruhan yang dibutuhkan. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yaitu sebanyak 144 dari 800 keseluruhan jumlah angkot. Penurunan jumlah tersebut selain karena terdapat angkot yang tidak memperpanjang izin trayek akibat imbas dari pandemic covid-19 juga disebabkan oleh semakin banyaknya angkutan online yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon. Tabel Data Historis Jumlah Angkutan Kota yang aktif sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Angkot Aktif	Jumlah Angkot Keseluruhan	Presentase
1	2019	787	1084	72,6 %
2	2020	274	900	30,4 %
3	2021	184	900	20,4 %
4	2022	144	800	18 %

Capaian realisasi indikator persentase rasio konektifitas wilayah yang ditangani didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada beberapa sub kegiatan diantaranya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah.

2. Kinerja Lalu Lintas Jalan

Kinerja Lalu Lintas Jalan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi kota. Salah satu tolak ukur indikator Kinerja lalu lintas jalan adalah (v/c) rasio atau tingkat pelayanan jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2006, tentang Manajemen dan Rekapitulasi Lalu Lintas di Jalan. Tingkat Pelayanan Jalan/Kinerja Jalan/Los diklasifikasikan menjadi 6, Tingkat Pelayanan A sampai F (MKJI).

Pada tahun 2022 kinerja lalu lintas jalan di targetkan Sebesar 0.40, dengan hasil realisasi 0.27. Hal ini menunjukkan keadaan kinerja lalulintas jalan kota Cilegon dalam keadaan Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Perhitungan ini menggunakan dua sampel yaitu jalan KH.Wasyid dan jalan Jabalintang (kranggot-seruni) yang di survey pada saat jam-jam tertentu (peak hours). Tingkat pelayanan ruas jalan kota diklasifikasikan menjadi 6 yaitu tingkat pelayanan A sampai dengan tingkat pelayanan F berdasarkan Manual kapasitas jalan Indonesia (MKJI), sebagaimana table berikut:

Tingkat Pelayanan	Penjelasan Kondisi Lalu Lintas (Karakteristik)	Batas Lingkup V/C
A	Kondisi arus lalulintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalulintas rendah	0.00 – 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas	0.20 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan v/c masih dapat ditolerir	0.75 – 0.84
E	Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0.85 – 1.00
F	Arus dipaksakan , kecepatanrendah, volume diatas kapasitas , antrian Panjang(macet)	>1.00

Capaian kinerja lalulintas jalan (Tingkat Pelayanan Jalan) tahun 2022 sebesar 0,27 dibandingkan dengan target jangka menengah 0,40 sudah tercapai, dengan Perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Keterangan	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian
Rasio Konektifitas Wilayah	Tingkat pelayanan ruas jalan kota yang diklasifikasikan menjadi 6, tingkat pelayanan A sampai F, rumusan nya	V/ C Volume Lalu lintas kapasitas Jalan (Berdasarkan Survey lapangan)	0.40	0.27	60%



Realisasi kinerja lalulintas jalan sebagai indikator dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi kota tahun 2022 sebesar 0,27 melebihi dari yang ditargetkan 0,40. Capaian realisasi indikator persentase kinerja lalulintas jalan yang ditangani didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada beberapa kegiatan, yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, serta Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.10a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN		25.774.521.236	22.751.718.695	88,27			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.732.478.459	9.285.914.742	86,52	Kendala pada RB yaitu koordinasi dengan bidang - bidang kurang efektif. sedangkan pada LAKIP, adanya keterbatasan kapabilitas SDM di akuntabilitas Kinerja - untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih dibawah 70 % karena pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk realisasi masih di bawah 70 %	Meningkatkan SDM sesuai dengan Kompetensi - untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah akan di sesuaikan dengan kebutuhan. Tindak lanjut LKIP yaitu Mengikuti Diklat/Bimtek. Tindak lanjut RB yaitu Koordinasi dengan bidang bidang untuk mendapatkan Evident yang dibutuhkan.	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	78,2 Poin	80,11 Poin	102,44			
	Indeks RB Perangkat Daerah	50,0 Poin	69,49 Poin	138,98			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan, kualitas data dan informasi pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah							
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		11.561.449.256	10.565.383.636	91,38	1. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan	1. Diadakannya tenaga ahli, disediakan sarana	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					kegiatan dan SDM menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan tugas di lingkup bidang IKP. 2. Penerapan norma standar prosedur kegiatan yang belum optimal	dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan yang ada di bidang IKP 2. Sosialisasi NSPK agar kedepannya lebih optimal dalam penerapannya	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,0 Poin	60,05 Poin	85,79			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	78,9%	78,89			
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		605.914.380	532.736.850	87,92	Tidak ada masalah	1. Diadakannya tenaga ahli, disediakan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan yang ada di bidang IKP 2. Sosialisasi NSPK agar kedepannya lebih optimal dalam penerapannya	
	Jenis Media Informasi luar ruang yang dikelola Pemkot Cilegon	3 jenis	3 jenis	100			
	Jumlah cetak buku hari jadi	450 eksemplar	450 eksemplar	100			
	Jumlah cetak buletin suara cilegon mandiri	1400 eksemplar	1400 eksemplar	100			
	Jumlah Konten video yang dibuat	4 video	4 video	100			
	Jumlah Media Sosial Yang dikelola Pemkot Cilegon	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Video Profil Pemkot Cilegon	1 video	1 video	100			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		3.085.500.000	2.830.621.098	91,74	Untuk permasalahannya di TKDN	merubah spesifikasi yang sesuai dengan TKDN yang berlaku	
	Jumlah Obi Van Radio yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	100			
	Propaganda LPPL Radio Mandiri FM	75 Pendengar	75 Pendengar	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Tower dan Pemancar yang Ditambahkan	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Radio	20 Orang	10 Orang	50			
	Jumlah Personal Komputer yang Diadakan	3 Unit	3 Unit	100			
	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah Alat-alat Studio dan Pemancar yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jenis Informasi Pembangunan yang Disebarluaskan	7839 Jam	7839 Jam	100			
Pelayanan Informasi Publik		250.009.575	232.631.600	93,05	Kurangnya perhatian Perangkat Daerah terhadap tugas dan fungsi PPID pelaksana, salah satunya dalam updating data yang harus di upload dalam website PPID, serta kurangnya koordinasi seluruh stakeholder yang berhubungan dengan PPID.	Melakukan optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah dan sosialisasi PPID secara berkala agar Perangkat Daerah lebih memahami peran PPID di masing-masing Perangkat Daerah, serta meningkat koordinasi seluruh stake holder.	
	Jumlah Aplikasi Layanan Informasi Yang Dibangun	1 Aplikasi/Sistem	1 Aplikasi/Sistem	100			
	Jumlah Kelurahan Yang Memahami Keterbukaan Informasi Publik	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100			
	Jumlah OPD yang memahami Keterbukaan Informasi Publik	38 opd	38 opd	100			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	45 orang	45 orang	100			
	Jumlah Video Profil Yang Disediakan	1 video	1 video	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Rapat Koordinasi PPID	2 kali	2 kali	100			
Layanan Hubungan Media		7.600.140.301	6.969.394.088	91,7	1. Adanya anggaran yang tidak terserap pada swakelola karena belum adanya MOU pihak ketiga dengan Pemerintah Kota Cilegon 2. Adapula anggaran podcast yang tidak terserap karena penyedia tidak memenuhi kualifikasi, 3. Juga belanja modal yang tidak ada di e-katalog	1. Diadakannya tenaga ahli, disediakan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan yang ada di bidang IKP 2. Sosialisasi NSPK agar kedepannya lebih optimal dalam penerapannya	
	Jenis Media Pemberitaan (Cetak, online, TV dan radio)	4 media	4 media	100			
	Jenis Pemberitaan Kegiatan Pemerintah Kota Cilegon Yang Dipublikasikan	4 media	4 media	100			
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		19.885.000	0	0	alokasi anggaran sub keg. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas sebagian besar berada pada sub keg. layanan hubungan media, sehingga secara keseluruhan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada sub keg tersebut	mengalihkan alokasi anggaran kegiatan KIM yang ada di sub keg layanan hubungan media ke sub keg penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	
	Jumlah KIM di Kota Cilegon	52 km	0 km	0			
Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)							
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		3.480.593.521	2.900.420.317	83,33	Nilai Indeks SPBE penilaian dari Pusat belum turun sementara Nilai 3 ini berdasarkan Penilaian Mandiri. Masih Kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam pelaksanaan E-Government. Tuntutan percepatan Informasi dalam Pelayanan Publik	Bersurat kepada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Penerapan SPBE pada Kemenpan RB RI di Jakarta. Menambah SDM yang menguasai IT. Menambah Sarana dan Prasarana untuk	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						mendukung kegiatan Infokom.	
	Indeks SPBE	2,8 Poin	3,0 Poin	107,14			
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	83,3%	83,33			
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		391.757.131	263.272.238	67,2	suku cadang tidak terserap di karnakan waktu pelaksanaan berada di TW 4 (bulan desember) dan tidak ada d E-katalog	-	
	Jumlah Server ICCSR yang dipelihara (9unit)	4 unit/tw	2 unit/tw	50			
	Jumlah alat perlengkapan zoom meeting	1 set	2 set	200			
	Jumlah suku cadang komputer dan/atau Server Control City System	1 unit	0 unit	0			
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	106,3%	106,31			
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		123.578.960	121.904.728	98,65	Tidak Ada Permasalahan		
	Jumlah dokumen Rencana Induk Arsitektur SPBE Kota Cilegon	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		834.556.421	777.249.942	93,13	-	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Aplikasi SPBE yang diintegrasikan	3 aplikasi	4 aplikasi	133,33			
	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan diintegrasikan	1 aplikasi	4 aplikasi	400			
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		1.042.643.300	877.110.659	84,12	pada output tersedianya internet akses smartvillage hanya terlaksana 2 bulan (november dan desember) karna pekerjaan aplikasi belum selesai aplikasi nya belum selesai	-	
	Jumlah Bandwidth Internet Akses ruang Publik yang tersedia (22 titik)	12 bulan	5 bulan	41,67			
	Jumlah Bandwidth yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (660 Mbps)	12 bulan	5 bulan	41,67			
	Tersedianya Internet Akses Smart Village (51 titik)	12 bulan	2 bulan	16,67			
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		280.046.365	186.645.620	66,65	PC Unit dan Handphone tidak terserap dikarenakan spesifikasi terkunci dan barang tidak ada di E-Catalog		
	Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu	12 laporan	12 laporan	100			
	Jumlah Personal Komputer yang diadakan	2 unit	0 unit	0			
	Jumlah Printer yang diadakan	1 unit	0 unit	0			
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		808.011.344	674.237.130	83,44	tidak ada masalah		
	Jumlah dokumen laporan Pemeliharaan Jaringan TIK	12 Dokumen	12 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah pengembangan jaringan fiber optik	280 Meter	265 Meter	94,64			
	Jumlah Suku Cadang Peralatan Jaringan SPBE	18 buah	18 buah	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Pada Urusan Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik pada tahun 2022 memiliki 4 indikator program teknis yang harus dicapai yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Nilai Lakip Perangkat Daerah(target : 78,20 poin)
 - ii. Indikator Indeks RB Perangkat Daerah (target : 50,00 poin)
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - i. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (target : 65,00 poin)
- c. Program Aplikasi Informatika
 - i. Indeks SPBE (target : 2.7 poin)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud

- a) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - i) Nilai Lakip Perangkat Daerah(target : 78,20 poin)
 - ii) Indikator Indeks RB Perangkat Daerah (target : 50,00 poin)

Capaian indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- i) Hasil evaluasi dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 80,11 (A=Memuaskan). Pada Tahun 2022 Nilai Lakip Perangkat Daerah mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 80,11 Point dengan predikat Nilai A (Memuaskan) yang berarti “Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”. Sehingga capaian realisasi nilai LAKIP Perangkat Daerah Sebesar 102,44%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen akuntabilitas kinerja yang di evaluasi, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:
 - A. Perencanaan kinerja: 26.02**
 - 1) Perencanaan Strategis: 7.22
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan: 18.80
 - B. Pengukuran Kinerja: 18.75**
 - 1) Pemenuhan Pengukuran: 5.00

- 2) Kualitas Pengukuran: 9,69
- 3) Implementasi Pengukuran: 3.75
- C. Pelaporan Kinerja: 12.12**
 - 1) Pemenuhan Pelaporan: 2.81
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja: 5.71
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja: 3.60
- D. Evaluasi Internal: 7.43**
 - 1) Pemenuhan Evaluasi : 1.88
 - 2) Kualitas Evaluasi: 3.68
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi: 1.88
- E. Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi:15.16**
 - 1) Kinerja yang di laporkan (output): 5,00
 - 2) Kinerja yang di Laporkan (outcome): 10.16

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	78.20	80,11	102,44

- ii) Berdasarkan Surat Inspektorat Cilegon Nomor 700/ 420.5 /Sekret Tanggal 12 April 2022 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi Pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Cilegon, evaluator memberikan nilai **69.49** yang berarti bahwa Indeks RB Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Cilegon mendapat predikat **B (Baik)**. hal ini menunjukan bahwa penerapan reformasi birokrasi secara formal di tingkat instansi hanya mencakup sebagian kecil Unit Kerja. Hasil pengukuran kinerja indikator ke-2 yaitu Indeks RB Perangkat Daerah terealisasi sebesar 138,98% dari target yang ditetapkan sebagaimana table berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	50.00	69.49	138,98

Capaian indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah dan Indeks RB Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut :

- 
- 
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Bahan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pengadaan Mebel
 - 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Mebel
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target pada tahun 2022 sebesar 65,00 poin. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik yang juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik berpedoman Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan Interpretasi sebagai berikut :

- < 39 : Tidak Informatif
- 40-59 : Kurang Informatif
- 60-79 : Cukup Informatif
- 80-96 : Menuju Informatif
- 97-100 : Informatif

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Banten No. 006/SK-BP/KI BANTEN/XI/2021 tanggal 23 November 2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Provinsi Banten tahun 2022, Pemerintah Kota Cilegon Memperoleh Poin sebesar **60,05** dengan Kualifikasi **Cukup Informatif**. Hasil pengukuran Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 sebesar 60,05 Point. Hasil ini lebih rendah dari target tahun 2022 sebesar 70,00 Point, sehingga capaian realisasinya Sebesar **85,79 %**. Terdapat beberapa Faktor yang menghambat pencapaian kinerja Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 diantaranya:

- Penyediaan Informasi Publik masih banyak yang belum terupdate;
- Beberapa pemenuhan dokumen belum dapat diperlihatkan pada saat Visitasi

Keberhasilan capaian indikator ini di tunjang oleh *Program Informasi dan Komunikasi Publik* melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang pada tahun 2022.

Adapun hasil kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Siaran Radio Mandiri FM

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mandiri FM Kota Cilegon didirikan untuk memberikan pelayanan informasi dan hiburan kepada masyarakat melalui siaran radio informasi yang dimaksud terkait dengan bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan agama. Dengan informasi tersebut diharapkan masyarakat Cilegon dan sekitarnya dapat mengetahui perkembangan yang terjadi di daerah, dan pada gilirannya masyarakat dapat memberikan masukan, baik berupa saran-saran maupun kritik terhadap proses pembangunan daerah yang telah dan sedang berlangsung, sehingga sinergi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara sinergis. Dalam rangka penyebarluasan informasi LPPL Radio Mandiri FM melaksanakan 26 Program acara Siaran.

NO	NAMA PROGRAM	KETERANGAN
1.	SIRAMAN ROHANI	SETIAP HARI
2.	SELAMAT PAGI CILEGON	SENIN S/D MINGGU
3.	SELAMAT PAGI CILEGON SPESIAL WEEKEND	1 X / MINGGU
4.	INFO MANDIRI	SENIN S/D MINGGU
5.	HALLO MANDIRI	SENIN S/D SABTU
6.	NYENYORE	SENIN S/D MINGGU
7.	ZONA MALAM	4 X / MINGGU
8.	WAYAHE BEBASAN	1 X / MINGGU
9.	MUTIARA MANDIRI	1 X / MINGGU
10.	DUNIA KAMPUS	1 X / MINGGU
11.	BINTANG RADIO	1 X / MINGGU
12.	KOMUNITAS	1 X / MINGGU
13.	NGEDAKOM (NGERUNGU DANGDUT KOMPLIT)	4 X / MINGGU
14.	ROCK WEEKEND	1 X / MINGGU
15.	MANDIRI TOP 10	1 X / MINGGU
16.	CILEGON MALAM INI	1 X / MINGGU
17.	NOSTALGIA INDONESIA	1 X / MINGGU
18.	INFO BANTEN (INTEN)	1 X / MINGGU
19.	TRAVEL MANIA	1 X / MINGGU
20.	SHOW TIME (VIRAL)	1 X / MINGGU

21.	INTIP (INFORMASI DAN TIP)	1 X / MINGGU
22.	TRAVELING	1 X / MINGGU
23.	CINEMA	1 X / MINGGU
24.	SIMPONI MANDIRI	1 X / MINGGU
25.	HOBBY	1 X / MINGGU
26.	ZONA KELUARGA	1 X / MINGGU
27.	TO DAY DIARY	1 X / MINGGU
28.	HEADLINE WORLD NEWS	1 X / MINGGU

2. Pembuatan Buletin Cilegon Baru

Buletin Cilegon Baru diterbitkan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Setiap terbit dicetak sebanyak 350 exp, yang disebarakan kepada OPD dan masyarakat di Kota Cilegon. Isi buletin tersebut memuat informasi-informasi terkait program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kota Cilegon.



Gambar Buletin Cilegon Baru Terbit Tahun 2022

3. Penyebarluasan informasi Pemerintah Kota Cilegon melalui media cetak dan elektronik

Penyebarluasan informasi Pemerintah Kota Cilegon melalui media cetak dan elektronik berupa Pemberitaan Kebijakan dan pembangunan Kota Cilegon serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Untuk lebih memaksimalkan pengelolaan dan penyebaran informasi yang berkualitas kepada masyarakat bidang IKP melaksanakan kegiatan kemitraan dengan media secara intensif melalui kegiatan-kegiatan yang rutin baik dengan media cetak ataupun media elektronik lokal maupun nasional.

Daftar jenis pemberitaan melalui media cetak dan elektronik

1. Iklan Ucapan Selamat dan dukacita Media Cetak	11. Publikasi Media TV Lokal
2. Pemberitaan Potret Cilegon Membangun	12. Publikasi Media TV Nasional
3. Pemberitaan Lensa Event	13. Pemberitaan Advetorial tabloid Lokal
4. Iklan Display uk ¼ Halaman	14. Pemberitaan Advetorial Majalah
5. Pemberitaan Rubrik Cilegon City	15. Publikasi Media Elektronik
6. Pemberitaan Parade Foto	16. Iklan Display 1 hal Bw
7. Pemberitaan Media Online	17. Iklan Display ½ hal Bw
8. Pemberitaan Rubrik Cilegon mandiri	18. Advetorial khusus Program Prioritas
9. Advetorial 1 halaman FC	19. Pemberitaan media elektronik radio
10. Advetorial ½ Halaman FC	20. Podcast dan Youtube

4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial

Penyebarluasan informasi kegiatan Kota Cilegon melalui media sosial yang banyak digunakan, yaitu Instagram, Youtube, Facebook dan Twitter. Sampai dengan akhir 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Instagram Pemkot Cilegon sebanyak 22.900 Follower;
2. Twitter sebanyak 1.073 follower;
3. Facebook Pemerintah Kota Cilegon di ikuti oleh 2.323 orang;
4. Youtube Pemerintah Kota Cilegon dengan Subciber sebanyak 2100 dengan rata rata 2.000 viewer.

Adapun informasi yang disebarkan melalui media sosial adalah kegiatan rutin pimpinan dalam melaksanakan agenda pembangunan.

- Untuk penyebaran informasi ke masyarakat, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian membentuk **Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai agen – agen informasi yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 Kelurahan.
- Adanya Aplikasi **Permohonan Informasi Publik**. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik dan bisa langsung mengunjungi alamat website <http://ppid.cilegon.com/informasipublik/permohonan>.

c) Program Aplikasi Informatika

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kota Cilegon. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Cilegon untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Cilegon. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian dengan pedoman pada evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain, dengan Interpretasi sebagai berikut :

- 4,2 - 5,0 Memuaskan
- 3,5 -< 4,2 Sangat Baik
- 2,6 -< 3,5 Baik
- 1,8 -< 2,6 Cukup
- < 1,8 Kurang

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Cilegon menargetkan Indeks SPBE pada tahun 2022 sebesar 2.8 point dengan kategori **Baik**. Adapun hasil penilaian Mandiri SPBE Kota Cilegon pada Tahun 2022 sebesar 3,00 Poin, namun nilai tersebut belum divalidasi oleh Kemenpan RB. Hasil rincian penilaian Index SPBE sebagaimana table di bawah ini:

Pemerintah Kota Cilegon		
K/L/D	:	Pemerintah Kota
Indeks SPBE	:	3
Predikat SPBE	:	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	3
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3
Domain Tata Kelola SPBE	:	2.2
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	1.5
Penyelenggara SPBE	:	3
Domain Manajemen SPBE	:	1.64

Pemerintah Kota Cilegon		
Penerapan Manajemen SPBE	:	1.88
Audit TIK	:	1
Domain Layanan SPBE	:	3.94
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.9
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks SPBE	Poin	2.8	3.00	107.14

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2022 ini diantaranya:

- Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
- Adanya komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan level kematangan SPBE;
- Adanya dukungan dari perangkat daerah dalam menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- Adanya dukungan dari USAID dalam optimalisasi SPBE Pemerintah Kota Cilegon.

Beberapa Faktor yang menghambat pencapaian kinerja pada tahun 2022 diantaranya:

- Belum optimalnya integrasi data dan aplikasi
- Belum optimalnya tingkat kepatuhan pengguna SPBE terhadap regulasi yang berlaku
- Belum optimalnya fungsi koordinasi antar perangkat daerah
- Belum optimalnya kapasitas SDM TIK.

Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Aplikasi Informatika yang diantaranya sebagai berikut :

1. Penyediaan Jaringan Internet untuk Perangkat Daerah
Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sampai dengan akhir tahun 2022 telah menyediakan Titik Jaringan Internet 34 titik untuk Organisasi Perangkat Daerah dari 37 Organisasi Perangkat daerah yang ada, sedangkan untuk 3 perangkat daerah belum terpasang di karenakan adanya kendala teknis.

2. Penyediaan Jaringan Internet Akses Ruang Publik

Dinas Kominfo juga telah menyediakan sarana WiFi gratis di 23 (dua puluh tiga) titik area publik, yaitu :

a. Taman Kedurung Pabean;	m. Aula Setda;
b. Alun-Alun Cilegon;	n. Media Center;
c. Alun-Alun Cilegon;	o. Sanggar Seni;
d. Taman Baca Anak;	p. Pangkalan Opang Cilegon;
e. Loby Walikota;	q. Taman Layak Anak;
f. Aula Kominfo;	r. RTH Jombang;
g. Ruang Tunggu Perpustakaan Daerah;	s. RTH Cilegon;
h. Auning Pasar Blok F;	t. Alun-alun;
i. Aula PKK Rumah Dinas;	u. Auning Pasar Blok F Cilegon;
j. Ruang Tunggu Pajak DPKAD;	v. Seruni;
k. Ruang Layanan Teras Pintar;	w. Rumah Dinas
l. Pers Room;	

3. Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun 2022 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung proses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian telah membuat dan mengembangkan beberapa Sistem Informasi berbasis teknologi Informasi di antaranya :

- Pengembangan Aplikasi SIMAPAN yang merupakan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
- Pengembangan Aplikasi E Hibah Bansos yang merupakan Aplikasi Pengajuan Bantuan Sosial dan Hibah;
- Pemutakhiran Website OPD yang merupakan Pengembangan Website Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Cilegon;
- Pembuatan Website 43 Kelurahan yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Pengelolaan layanan panggilan darurat 112 Pemerintah Kota Cilegon, Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama dengan PT Jasnita. Layanan panggilan darurat 112 ini merupakan layanan panggilan bebas pulsa yang digunakan untuk media komunikasi secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat;
- Pembuatan Aplikasi Manajemen pendataan dan pengelolaan UMKM di Kota Cilegon, termasuk *E-Commerce* khusus UMKM Kota Cilegon. Melalui aplikasi ini UMKM bisa mendaftar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMK;
- Pembuatan Aplikasi SIBUKER berbasis Web, yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan dan penyedia lowongan kerja bagi masyarakat Kota Cilegon;
- Pembuatan *Dashboard Command Centre* merupakan Aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indikator utama dari aktifitas OPD secara sekilas dalam layar tunggal. Penyajian data/informasi bisa di personalisasi sesuai kebutuhan data;

3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.11a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		22.880.351.492	20.132.953.565	87,99			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.765.021.036	9.813.879.348	91,16	Nilai yang di dapatkan 67,3 dengan predikat B berdasarkan Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon tahun 2021 (No. 700/1567.1/Sekret) 28 Oktober 2022		
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,0 poin	67,3 poin	97,54			
	Indeks RB Perangkat Daerah	67,5 poin	74,79 poin	110,8			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	86,0 poin	86,05 poin	100,06			
Arah kebijakan : Peningkatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dalam perekonomian daerah							
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		339.210.000	253.515.000	74,74	Rendahnya serapan anggaran dikarenakan adanya target kinerja yang tidak terlaksana yaitu pada fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu di cilegon dan fasilitasi Pemenuhan izin usaha pembukaan kantor kas di cilegon dikarenakan belum ada permohonan dan belum ada Koperasi yang membuka kantor	Menyesuaikan kebutuhan anggaran dalam perencanaan anggaran	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					cabang, cabang pembantu dan kantor kas.		
	Persentase penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam	100,00%	100,00%	100			
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,0%	97			
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		313.210.000	244.045.000	77,92	1) Capaian serapan anggaran yang tidak optimal dikarenakan adanya efesiensi anggaran pada belanja Makanan dan Minuman Rapat, Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Perjalanan Dinas. 2) koperasi yang mengajukan perijinan simpan pinjam masih belum memenuhi syarat perijinan dan proses waktu pemenuhan perijinan yang panjang. Sehingga koperasi yang mengajukan tidak selesai di tahun 2022	1) Menyusun perencanaan dan penggaran sesuai kebutuhan 2) Pembinaan dan pengarahan untuk menempuh persyaratan menjadi lengkap	
	Verifikasi dan validasi calon koperasi syariah	25 koperas	25 koperas	100			
	sosialisasi izin usaha simpan pinjam dan Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	40 koperasi	40 koperasi	100			
	Pembuatan Badan Hukum Koperasi	20 Koperasi	17 Koperasi	85			
	Fasilitas Pemenuhan Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan	5 koperasi	5 koperasi	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Fasilitas Pemenuhan Izin Pembukaan kantor Cabang	3 koperasi	3 koperasi	100			
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	33,3%	33,33			
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		26.000.000	9.470.000	36,42	Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan belanja SPPD tidak digunakan yang mana SPPD tersebut untuk memenuhi output fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu di cilegon dan fasilitasi Pemenuhan izin usaha pembukaan kantor kas di cilegon, hal ini dikarenakan belum ada permohonan dan belum ada Koperasi yang membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Memastikan dan menyesuaikan kebutuhan anggaran dalam perencanaan anggaran	
	fasilitasi Pemenuhan izin usaha pembukaan kantor kas di cilegon	3 koperasi	0 koperasi	0			
	fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu di cilegon	5 koperasi	0 koperasi	0			
	fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang	5 koperasi	5 koperasi	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dalam perekonomian daerah							
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		416.281.500	378.200.400	90,85	Permasalahan koperasi yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan antara lain, Jumlah dan kompetensi SDM	Pengawasan, pemeriksaan dan pelatihan perkoperasian dan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Pengawas koperasi masih kurang , koperasi masih lemah dari aspek tatakelola, manajemen, keuangan dan permodalan, belum tersentuhnya pengawasan kepada koperasi yang tidak aktif.	pentingnya diadakan pelatihan Pengawasan kepada SDM pengawas koperasi.	
	Persentase pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi	16,20%	30,29%	186,98			
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	90,6%	90,62			
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		278.891.500	253.595.400	90,93			
	laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi (LHPKK)	1 dokumen	1 dokumen	100			
	pengawasan koperasi sewaktu-waktu	12 pengawasan	3 pengawasan	25			
	pengawasan koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100			
	sertifikat koperasi sehat	50 sertifikat	50 sertifikat	100			
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		137.390.000	124.605.000	90,69	masih terdapat Koperasi yang belum memahami tentang perundang - undangan perkoperasian.	pengarahan, pembinaan dan sosialisasi tentang perkoperasian	
	kesehatan pemeriksaan koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100			
	koperasi yang di bubarkan	50 koperasi	50 koperasi	100			
	sosialisasi peraturan perundang -undangan koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dalam perekonomian daerah							
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		154.400.000	136.857.000	88,64	Capaian kinerja Tidak tercapain dikarenakan banyak koperasi tidak melakukan RAT	Melaksanakan Monitoring, Pembinaan dan Bimbingan Pelaksanaan RAT dan Pendampingan Usaha koperasi.	
	persentase koperasi sehat	28,25%	27,06%	95,79			
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		79.400.000	70.784.000	89,15			
	penilaian kesehatan koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100			
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		75.000.000	66.073.000	88,1			
	KSP/USP mendapatkan penghargaan	10 koperasi	10 koperasi	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dalam perekonomian daerah							
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		526.605.712	503.231.600	95,56			
	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	15,00%	25,00%	166,67			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		526.605.712	503.231.600	95,56			
	Pelatihan Calon Koperasi Syariah	25 Koperasi	25 Koperasi	100			
	Pelatihan Dewan Pengawas Koperasi Syariah	15 Koperasi	15 Koperasi	100			
	Pendampingan Calon Koperasi Syariah	25 Koperasi	25 Koperasi	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pendampingan dan pemberdayaan koperasi dalam perekonomian daerah							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		1.081.995.000	923.959.548	85,39	Dalam kelembagaan koperasi masih banyak anggota koperasi yang menjalankan usahanya (pemasaran) berkepentingan sendiri tidak melalui kelembagaan koperasi	Pembinaan Kelembagaan Koperasi (Anggota dan Pengurus Koperasi)	
	Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan Fasilitas Kemitraan	18,00%	55,56%	308,67			
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	111,9%	111,9			
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1.081.995.000	923.959.548	85,39			
	Akselarasi Produktifitas Akses Pasar Melalui Digitalisasi Bagi Koperasi (DAK)	20 Orang/ Koperasi	20 Orang/ Koperasi	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Koperasi UMK dengan Perusahaan/ Perbankan/ badan USaha Lainnya	15 Koperasi	15 Koperasi	100			
	Fasilitasi Penataan Manajemen dan Rekruturisasi Pengembangan Usaha Perkoperasian	40 Koperasi	40 Koperasi	100			
	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran melalui Event Pameran Tk. Nasional	10 Koperasi	20 Koperasi	200			
	Akselarasi Produktivitas Akses Pasar Melalui Digitalisasi Bagi UMKM (DAK)	58 UMK	58 UMK	100			
	Fasilitasi Akses Kredit Lembaga Keuangan Formal bagi Koperasi (DAK)	25 Koperasi/orang	25 Koperasi/orang	100			
	Rapat Koordinasi Daerah DEKOPINDA dalam Daerah dengan Dekopinda Luar Daerah	30 Orang/ Peserta	25 Orang/ Peserta	83,33			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, akses pemasaran dan kapasitas kelembagaan UMK							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		7.382.426.044	6.000.374.169	81,28	1) Masih Terdapat Pelaku UKM Dari Database Yang Belum Terfasilitasi Menjadi Wirausaha 2) Belum ada tindak lanjut hasil pelaksanaan kemitraan dengan para retel modern, perbankan dan e-commerce 3) Belum optimalnya operasional dan sarana prasarana rumah siap kerja	1) Meningkatkan Fasilitas Bagi Pelaku UKM Dalam Database Untuk Menjadi Wirausaha 2) RAKORDA Kemitraan dengan lintas sektoral 3) Memenuhi operasional dan sarana prasanaran rumah siap kerja	
	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	15,00%	17,16%	114,4			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro	100%	99,7%	99,74			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		448.699.772	331.127.500	73,8	Rendahnya realisasi anggran dikarenakan adanya efesiensi belanja SPPD pada verivikasi dan valiadasi database UMK	Memastikan dan menyesuaikan kebutuhan anggaran dalam perencanaan anggaran	
	Road Map Pemetaan Sektor Unggulan UMKM (OVOP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Aplikasi/Update Aplikasi Database UMK	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data, Peta UMK	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		37.000.000	35.434.090	95,77			
	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha	5 Lembaga	5 Lembaga	100			
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		6.866.726.272	5.612.762.579	81,74			Terkait Rekomendasi DPRD untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di industri.
	Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Perizinan PKP	340 Orang	340 Orang	100			
	Jumlah Pemusatan Tempat Usaha bagi Pelaku UMK	2 Lokasi	2 Lokasi	100			
	Jumlah Peserta Inkubasi Pelaku UMK	120 Orang	100 Orang	83,33			
	Jumlah Peserta Pelatihan dan FasilitasiMD BPOM	140 Orang	140 Orang	100			
	Jumlah Fasilitasi PT Perorangan	100 UMK	100 UMK	100			
	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Bela Pengadaan	100 UMK	100 UMK	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi HAKI	75 UMK	75 UMK	100			
	Jumlah Peserta Pembinaan Calon Wirausaha BARU Kaum Milenial	400 WUB	400 WUB	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan NIB IUMK	90 Orang	90 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Perizinan SP-PIRT	240 Orang	240 Orang	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Uji UMR Simpan	140 Orang	140 Orang	100			
	Jumlah Pelatihan Kursus Membuat Aneka Makanan & Minuman Milenial	50 UMK	50 UMK	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Kursus Membuat Produk Home care / Produksi Sabun Rumahan (herbal)	75 UMK	75 UMK	100			
	Penyelenggaraan Entrepreneurs Award/ Penghargaan Pemberian Kepada UMK Berprestasi & Inovatif	1 Acara	1 Acara	100			
	Jumlah Peserta Pembinaan Calon Wirausaha Baru	600 CWUB	600 CWUB	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikasi Halal	90 Orang	90 Orang	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		30.000.000	21.050.000	70,17	-rendahnya capaian anggaran dikarenakan adanya efisiensi belanja sewa ruang rapat dan honor pengguna anggaran	Memastikan dan menyesuaikan kebutuhan anggaran dalam perencanaan anggaran	
	Koordinasi pengembangan UMK luar daerah Rapat koordinasi dan sinkronisasi	4 Rakor	4 Rakor	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, akses pemasaran dan kapasitas kelembagaan UMK							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		2.214.412.200	2.122.936.500	95,87	kebutuhan peralatan dalam rangka pengembangproduksi dan pengolahan berbasis teknologi, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi bagi pelaku umk masih belum optimal.	Memastikan kebutuhan peralatan produksi pengolahan sesuai dengan kebutuhan para pelaku umk serta pemasaran sdm desain dan tekhnologi bagi pelaku umk.	
	Persentase Usaha Mikro yg meningkat menjadi Usaha Kecil	5,00%	12,40%	248			
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		2.214.412.200	2.122.936.500	95,87			Terkait Rekomendasi DPRD untuk Ditingkatkan Program Pengembangan UMKM dari usaha mikro menjadi usaha kecil.
	Jumlah Peserta Bimtek dan Pendampingan Digital Marketing	50 Orang	50 Orang	100			
	Pembuatan Media Belajar Online untuk Koperasi dan UMK	1 Situs Web	1 Situs Web	100			
	Jumlah Peserta Pendampingan UMK (Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro & Usaha Kecil) Kota Cilegon	400 UMK	400 UMK	100			
	Jumlah Mesin /Alat Produksi Dalam Pengembangan Produksi dan pengolahan yang disediakan	42 Alat	42 Alat	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Pelatihan Inovasi Produksi Gipang	50 UMK/Orang	50 UMK/Orang	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Kemasan (Packaging) Label dan Desain Kemasan Produk UMK	100 UMK/ Orang	100 UMK/ Orang	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Toko Online/ Marketplace Digital	200 UMK/ Orang	200 UMK/ Orang	100			
UPTD Pengelola Dana Bergulir		5.744.325.560	6.526.405.407	113,61			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.614.325.560	6.413.757.254	114,24			
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	89,8%	89,84			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		4.710.525.349	5.591.560.000	118,7	Jumlah Pelaku usaha yang diberikan pinjaman dana bergulir dengan target 1.000 pelaku usaha hanya tercapai 842 pelaku usaha, hal ini disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan pinjaman dana bergulir	Meningkatkan pendampingan dan sosialisasi usaha sehingga terjadi peningkatan pelaku usaha yang melakukan pinjaman dana bergulir	Terkait Rekomendasi DPRD, maka : 1. Dipermudah dan Pelonggaran Permodalan Koperasi dan UMK. 2. Diperlukan Gudang Penyimpanan Produk Bahan Baku.
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, akses pemasaran dan kapasitas kelembagaan UMK							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		20.000.000	13.848.500	69,24			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui	100%	50,0%	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		20.000.000	13.848.500	69,24	Sebagian tidak bisa diserap karena belum ada perbankan yang bisa diajak kerjasama dalam tahap pengembangan	akan berkoordinasi dengan pihak perbankan dalam hal permodalan	
	Jumlah MOU yang dihasilkan	2 MOU	1 MOU	50			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, akses pemasaran dan kapasitas kelembagaan UMK							
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		110.000.000	98.799.653	89,82			
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		110.000.000	98.799.653	89,82	Honorarium Narasumber tidak sesuai dengan SIPD karena mengikuti Standar Biaya Umum (SBU)	Akan menyesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU)	
	Seleksi Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil mampu urusan Koperasi usaha mikro dan kecil, mendukung Misi ke 4 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2022 – 2026 dengan Tujuan (T4.1) Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran (S4.1.2) Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat. dengan capaian pelaksanaan urusan, sebagai berikut:

- Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan
 Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan dalam rangka peningkatan koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri di Kota Cilegon. Pada Tahun 2022 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini adalah program penunjang operasional Perangkat daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki, terutama adalah Sumber daya manusia dan Sarana prasarana. dalam menjalankan tugas fungsinya dalam pembangunan harus memiliki target kinerja yang harus dicapai sehingga kinerja Sumber daya manusia/aparatur harus memiliki perencanaan dan evaluasi seluruh kapasitas pegawai dan sarana prasarana yang dimiliki. Sehingga dalam pencapaian kinerja dapat di evaluasi. Pada program ini indicator program kinerja adalah :

1) Nilai Lakip Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil oleh Inspektorat Kota Cilegon diperoleh nilai sebesar 65,99 poin dengan Kategori B/Baik, dengan target 67 poin maka capaian sakip Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon di tahun 2021 adalah 98,50%. sementara pada tahun 2022 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil oleh Inspektorat Kota Cilegon diperoleh nilai sebesar 67,30 poin dengan kategori yang sama B/Baik, targetnya adalah 69 poin, capaian sakip Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon di tahun 2022 adalah 97.54%.

2) Indeks RB Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon diperoleh nilai sebesar 74,79 dengan Kategori BB (Cukup Baik).

3) Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)

Capaian Realisasi IKM pada Tahun 2022 adalah sebesar 86.05 dari Target 86.00% sehingga Capaian Kinerja nya sebesar 100,06%.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Program ini dilaksanakan bertujuan pelayanan pada fasilitasi dan rekomendasi kepengurusan perizinan usaha koperasi. Sebagai indikator pembangunan program ini adalah *Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam*. Kinerja yang dicapai sebesar 100 % dari target 100 % dengan realisasi 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa terpenuhinya perizinan koperasi KSP/USP yang di fasilitasi sebanyak 5 koperasi dari jumlah koperasi KSP/USP yang difasilitasi (dilayani) sebanyak 5 koperasi. Upaya yang dilakukannya melalui Fasilitas Pemenuhan Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan. Pada program ini terdapat program prioritas Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan kegiatan prioritas Pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan melalui **sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** dengan target dan hasil kinerja sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi	Keterangan
Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil	Pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan	Verifikasi dan validasi calon koperasi syariah	25 koperasi	25 koperasi	Pembentukan calon koperasi syariah dari Lembaga keagamaan: Pondok pesantren, Sekolah MTS, Aliyah dan DKM Masjid

Tabel verifikasi dan validasi calon koperasi syariah.

No.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	No.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	MAS AL-KHAIRIYAH CITANGKIL	CIWANDAN	16	PONPES Al-Insan	CIBEBER
2	MAS BANY NAWAWY GELERENG	CIWANDAN	17	BMT Syariah Cilegon	GEROGOL
3	PONPES Daarul Falah	CILEGON	18	PONPES Nurul Huda Asshofwani	CIBEBER
4	MAS AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH JERANG BARAT	CIBEBER	19	PONDOK PESANTREN AL-FATH	CIBEBER
5	MAS AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH PALAS	CILEGON	20	DKM AL-MUHAJIRIN	CILEGON
6	MTS AL-KHAERiyAH PEKALONGAN	CITANGKIL	21	DKM AS SALAM	CITANGKIL
7	MAS AL-HIDAYAH	CITANGKIL	22	MAJLIS TAKLIM FATIMAH AZZAHRA	CIWANDAN
8	MTS AL JAUHAROTUNNAQIYYAH PRIUK	JOMBANG	23	DKM AL-MUHAJIRIN	GROGOL
9	MTS AL JAUHAROTUNNAQIYYAH PASIR ANGIN	CIBEBER	24	MAJLIS TAKLIM FATIMAH AZZAHRA	CIWANDAN
10	MAS AL-KHAIRIYAH TEGAL BUNTU	CIWANDAN	25	DKM AL-MUHAJIRIN	GROGOL
11	MAS AL-KHAIRIYAH PABUARAN	GEROGOL	26	PONPES DARUL MUSTHOFA	JOMBANG
12	PONPES Daarul Muta`Allimin	GEROGOL	27	DKM AL-MUTTAQIEN	PURWAKARTA
13	DKM AL-IKHLAS	PULOMERAK			
14	PONPES Al-Istiqomah	CIWANDAN			
15	MTS AL-KHAIRIYAH KOTASARI	GEROGOL			

5. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Program ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari program ini adalah *Persentase pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi*. Realisasi yang dicapai dari target 16,20 % adalah sebesar 30,29%, sehingga kinerja yang dihasilkan 181,54 %. Interpretasi dari capaian indikator ini adalah banyaknya koperasi sehat yang diperiksa dari koperasi aktif sebanyak 103 koperasi terdiri dari 53 pengawasan koperasi dan 50 pemeriksaan koperasi dari jumlah koperasi aktif sebanyak 340 koperasi. Faktor pendorong capaian kinerja yang melebihi dari target adalah adanya SDM pengawas koperasi dan di dukung dengan target kinerja. Upaya pengawasan dan pemeriksaan koperasi melalui :

- Pengawasan koperasi
- Pengawasan koperasi sewaktu-waktu
- Sertifikat koperasi sehat
- Kesehatan pemeriksaan koperasi
- Sosialisasi peraturan perundang -undangan koperasi

6. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Program ini bertujuan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP. Sebagai indikator pembangunan program adalah *Persentase Koperasi Sehat*. Kinerja yang dicapai sebesar 95,79% dari target 28,25 % dengan realisasi 27,06 koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat kesehatan koperasi sebanyak 92 koperasi dari 340 koperasi aktif. Upaya yang dilakukan pada program ini adalah :

- Penilaian kesehatan koperasi
- KSP/USP mendapatkan penghargaan

7. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah Dan Menengah.

Sebagai indikator pembangunan yaitu *Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah*. Kinerja yang dicapai sebesar 166 % dari target 15 % dengan realisasi 25%. Interpretasi dari capaian indikator ini adalah Meningkatnya kapasitas dan kompetensi kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan, inovasi dan teknologi yaitu koperasi yaitu Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan sebanyak 85 koperasi dari seluruh koperasi aktif sebanyak 340 koperasi. Capaian kinerja melebihi target dikarenakan adanya target kinerja yang di dukung dari APBN (DAK) sehingga terget koperasi meteri diklat yang rencana dilatih bertambah. Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, pengurus, anggota dan menumbuhkan koperasi, pengawas koperasi syariah adalah :

- Pelatihan penataan Manajemen dan Restrukturasi Pengembangan Usaha Perkoperasian
- Pelatihan Akselerasi Produktifitas Akses Pasar Melalui Digitalisasi Bagi Koperasi
- Pelatihan Akselerasi Produktivitas Akses Pasar Melalui Digitalisasi Bagi UMKM

- Pelatihan Calon Koperasi Syariah
- Pendampingan Calon Koperasi Syariah

Pada program ini terdapat program priorotas Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan kegiatan prioritas Pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan melalui ***sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi*** dengan target dan hasil kinerja sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022

Program	Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi	Keterangan
PP-7. Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil	KP-5 : Pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan	Pelatihan Calon Koperasi Syariah dan Dewan Pengawas	25 Koperasi; 15 Orang Dewan Pengawas	25 Koperasi; 15 Orang Dewan Pengawas	Hasil kompetensi dewan syariah yang lulus menerima sertifikat dewan pengawas yang lulus 8 orang
		Pendampingan Calon Koperasi Syariah	25 Koperasi	25 Koperasi	

8. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Program ini bertujuan melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan; dan inovasi dan teknologi. Sebagai indicator pembangunan adalah *Persentase Koperasi yang Diberikan dukungan fasilitasi*. Kinerja yang dicapai sebesar 308,67% dari target 18 % dengan realisasi 55%. Inteprestasi dari capaian ini adalah Perluasan akses pemasaran melalui Kerjasama sebanyak 15koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan dari 27 seluruh koperasi konsumen (UMK). Faktor pendorong dari tinggi capaian dikarenakan adanya pertumbuhan pembentukan koperasi UMK sebagai wadah akses pemasaran dan permodalan.

Tabel Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Th 2022

NO	JENIS KOPERASI	KOPERASI		
		JUMLAH	AKTIF	TDK AKTIF
1	Produsen	64	33	31
2	Pemasaran	3	0	3
3	Konsumen	564	283	281
4	Jasa	22	21	1
5	Simpan Pinjam	9	3	6
JUMLAH		662	340	322

Tabel Jumlah Koperasi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN SUBDISTRICT	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	Ciwandan	57	69	126
2	Citangkil	40	80	120
3	Pulomerak	61	25	86
4	Purwakarta	42	12	54
5	Grogol	32	22	54
6	Cilegon	43	27	70
7	Jombang	33	53	86
8	Cibeber	32	34	66
Kota Cilegon		340	322	662

Tabel Jumlah Kelompok Koperasi s/d Th 2022

No	Kelompok Koperasi	Jumlah	Jenis Koperasi
1	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	42 koperasi	Konsumen, Produsen,
2	Koppontren	23 koperasi	Konsumen,
3	Kopkar	149 koperasi	Konsumen, Jasa, Produsen, Simpan Pinjam,
4	Kop. Serba Usaha	70 koperasi	Konsumen, Jasa, Produsen,
5	Kop. Lainnya	289 koperasi	Konsumen, Jasa, Produsen, Simpan Pinjam,
6	Kop. Pemuda	28 koperasi	Konsumen
7	Kop. Nelayan	7 koperasi	Produsen
8	Kop. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	1 koperasi	Jasa
9	Kop. Pedagang Kaki Lima	9 koperasi	Konsumen
10	Kop. Angkatan Darat	1 koperasi	Jasa
11	Kop. Angkatan Laut	1 koperasi	Konsumen
12	Kop. Kepolisian	koperasi	Jasa
13	Kop. Pertanian	2 koperasi	Produsen
14	Kop. Simpan Pinjam	1 koperasi	Simpan Pinjam
15	Kop. Wanita	3 koperasi	Konsumen
16	Kop. Profesi	3 koperasi	Konsumen
17	Kop. Mahasiswa	1 koperasi	Konsumen,

No	Kelompok Koperasi	Jumlah	Jenis Koperasi
18	Jasa Lainnya	149 koperasi	Kop. Lainnya
19	Kop. Perumahan	2 koperasi	Konsumen

Tabel Jumlah Koperasi Th 2019 -2022

TAHUN	JUMLAH KOPERASI	KOPERASI AKTIF	KOPERASI TIDAK AKTIF
2022	662	340	322
2021	635	323	312
2020	617	359	258
2019	607	349	258

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program ini bertujuan sebagai Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan. Sebagai indicator pembangunan dari program tersebut adalah *Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi*.

Kinerja yang dicapai sebesar 114 % dari target 15 % dengan realiasi 17,16 % Interpretasi capaian kinerja adalah banyaknya usaha mikro yang difasilitasi sebanyak 3.601 dari jumlah usaha mikro dalam database sebanyak 20.986 pelaku usaha. Besarnya capaian kinerja dikarenakan adanya Besarnya capaian kinerja dikarenakan oleh banyaknya pelaku umkm yg ingin di fasilitasi dan dibina juga didampingi, baik yg di klinik umkm maupun yg mengikuti diklat dan bimtek. Dan adanya pertumbuhan data para pelaku UMKM yg bertambah maka bertambah pula jumlah para pelaku UMKM yg difasilitasi dan karena adanya tambahan output indikator pada perubahan nggaran diantaranya bela pengadaan, PT perorangan, sertifikasi halal dan haki.

Pada program ini terdapat program priorotas Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil dan kegiatan prioritas Pengembangan kampung batik dan kuliner melalui *sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro* dengan target dan hasil kinerja sebagai berikut :

Table Program dan Kegiatan Th 2022

Program	Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
PP-7. Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil	KP-7.3 : Pengembangan kampung batik dan kuliner	pelatihan dan fasilitasi HAKI	75 UMK	75 UMK
		pelatihan dan fasilitasi MD BPOM	140 Orang	140 Orang
		pelatihan dan fasilitasi perizinan dan non perizinan NIB, IUMK	90 Orang	90 Orang
		pelatihan dan fasilitasi perizinan PKP	340 Orang	340 Orang
		pelatihan dan fasilitasi perizinan SP-PIRT	240 Orang	240 Orang

		pelatihan dan fasilitasi uji umur simpan	140 Orang	140 Orang
		pelatihan Sertifikasi Halal	90 Orang	90 Orang

10. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program bertujuan Pengembangan Usaha Mikro untuk meningkatkan omset penjualan pada pelaku usaha mikro. Sebagai indicator pembangunan adalah *persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil*. Kinerja yang dicapai sebesar 248 % dari target 5% dengan realisasi 12,40 %. Interpretasi dari capaian ini adalah Bertambahnya omset hasil penjualan usaha selama 1 tahun (2022) sebanyak 2.601 dari jumlah usaha mikro sebanyak 20.986 pelaku usaha mikro. Tingginya capain ini dikarenakan Fasilitasi akses pasar melalui fasilitasi digital marketing (shopee, Lazada, tiktok, ngejubel), market place, bussines matching, ecommerce dan berbagai even expo yg diikuti oleh pelaku umkm baik didalam kota maupun diluar kota, Pendampingan, monitoring dan pembinaan yang berkelanjutan dari dinas maupun dari lembaga2 . Contohnya lembaga pembinaan rumah kreatif bano mandiri, BJB, Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dan kerjasama kemitraan lainnya.

Pada program ini terdapat program priorotas Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil dan kegiatan prioritas Pengembangan kampung batik dan kuliner melalui *sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi* dengan target dan hasil kinerja sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Th 2022				
Program	Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
PP-7. Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil	KP-1: Pembangunan rumah siap kerja (Pusat layanan usaha terpadu untuk UMK)	Pendampingan UMK (Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro & Usaha Kecil) Kota Cilegon	400 UMK	400 UMK
		Inkubasi Pelaku UMK	120 orang	100 orang
	KP-3 : Pengembangan kampung batik dan kuliner	imtek dan Pendampingan Digital Marketing	50 orang	50 orang
		PelatihanKemasan (Packaging) Label dan Desain Kemasan Produk UMK	100 orang	100 orang
		Pelatihan Pembuatan Toko Online/ Marketplace Digital	200 UMK/orang	200 UMK/orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Inovasi Produksi Gipang	50,00 UMK/Orang	50,00 UMK/Orang

Tabel rekapitulasi jumlah usaha kecil menengah
Berdasarkan kategori usaha tahun 2022

NO	KATEGORI USAHA	JUMLAH	KELAS USAHA		JUMLAH TENAGA KERJA BERDASAR KTP
			MIKRO	KECIL	
1	Industri Pengolahan	2.309	2.273	35	2.729
2	Informasi & Komunikasi	17	17	0	20
3	Jasa Lainnya	1.099	1.060	39	1.183
4	Pengadaan Listrik & Gas	2	-	-	2
5	Pengelolaan Limbah & Daur Ulang	2	2	0	9
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.223	4.167	56	4.541
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.028	12.751	277	13.029
8	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	311	299	12	290
Jumlah		20.991	20.569	419	21.803

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sebagai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan dana bergulir juga melaksanakan perdagangan bahan produk input kepada wirausaha. Pada program ini sebagai penunjang pelaksanaan di dukung dengan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Capaian realisasi dan kinerja terdapat pada tabel di bawah ini

Tabel Jumlah Penyaluran dana bergulir kepada Mitra Binaan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Cibeber	125	99
2	Cilegon	125	101
3	Citangkil	125	215
4	Ciwandan	125	110
5	Pulomerak	125	54
6	Grogol	125	66
7	Purwakarta	125	50
8	Jombang	125	147
Total		1.000	842

Tabel Penjualan Produk Input Tahun 2022

Jenis	Target (Kg)	Realisasi (Kg)	%
Kedelai	482.345	450.000	93
Melinjo	4.000	2.450	61
Total Produk Input	486.345	452.450	154

Pada program ini terdapat program priorotas Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil dan kegiatan prioritas Pengembangan kampung batik dan kuliner melalui *sub kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD* dengan target dan hasil kinerja sebagai berikut :

Table Program dan Kegiatan Prioritas Th 2022

Program	Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi	Keterangan
PP-7. Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mkro kecil	KP-4 : Peningkatan akses permodalan	Pemberian permodalan usaha kepada mitra binaan	1.000 mitra binaan	842 mitra binaan	Pelaku usaha yang diberikan pinjaman dana bergulir dengan target 1.000 pelaku usaha hanya tercapai 842 pelaku usaha, hal ini disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan pinjaman dana bergulir

3.1.2.12 Penanaman Modal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.12a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		20.449.592.823	18.522.226.805	90,58			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.869.467.115	15.739.110.725	93,3	1. belum adanya monitoring SOP yang jelas dan legal tentang mekanisme monitoring capaian renstra secara periodik supaya target kinerja selaras dan terukur 2. IKU dan renstra belum di reuiu 3.belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) 4.hasil survey kepuasan masyarakat belum ditindaklanjuti	dilakukannya monitoring sop, melakukan review, menyesuaikan dengan Perda nomor 19 tahun 2022 dan menindaklanjuti survey kepuasan masyarakat	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80,0 Point	81,6 Point	102			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	73,5 Point	87,71 Point	119,33			
	Indeks kepuasan Masyarakat	76,0 Point	84,63 Point	111,36			
Arah kebijakan : Pengintegrasian layanan perijinan, investasi, dan layanan aduan							
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		811.505.840	457.970.900	56,43	adanya RUPM, Peta Potensi dan Peluang Investasi, RAPERDA	-	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Penanaman Modal, RAPERDA pemberian insentif		
	Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50,00%	55,00%	110			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	50,0%	50			
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		311.510.080	192.350.900	61,75	Sisa anggaran sebesar RP. 29.872.000 dari kegiatan Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen.	Perencanaan Penganggaran Kegiatan di sesuaikan dengan kebutuhan.	-Perlu Peningkatan Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.
	jumlah perda penanaman modal dan perijinan berusaha	1 dokumen	0 dokumen	0			
	jumlah naskah akademik tentang perda penanaman modal dan perijinan berusaha	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		299.998.380	104.990.100	35	Sisa anggaran sebesar RP. 194.641.780 dari kegiatan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen.	Perencanaan Penganggaran Kegiatan di sesuaikan dengan kebutuhan.	-
	jumlah RUPM yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		199.997.380	160.629.900	80,32	Sisa anggaran sebesar RP. 37.703.880 dari kegiatan Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta.	Perencanaan Penganggaran Kegiatan di sesuaikan dengan kebutuhan.	Terkait Rekomendasi DPRS terkait diperlukan penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha
	jumlah peta potensi yang di sediakan	1 dokumen	1 dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Pengintegrasian layanan perijinan, investasi, dan layanan aduan							
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		529.744.200	454.527.900	85,8	keterbatasan anggaran dan sulit melakukan forum bisnis karena masih ada pandemi covid 19 Adanya kegiatan di anggaran perubahan kena rasionalisasi anggaran yaitu kegiatan Forum Bisnis	Kegiatan Forum Bisnis dianggarkan kembali ditahun 2023	-
	Persentase sarana promosi penanaman modal	80,00%	75,00%	93,75			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	66,7%	66,67			
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		215.130.800	195.990.000	91,1	Tidak Ada	Tidak Ada	-
	jumlah sarana promosi dalam bentuk cetak	2 jenis	2 jenis	100			
	video profil investasi Kota Cilegon	1 video	1 video	100			
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		314.613.400	258.537.900	82,18	Sisa anggaran sebesar RP. 56.075.500 dari kegiatan Perjalan Dinas paket Meeting Luar Kota.	Perencanaan Penganggaran Kegiatan di sesuaikan dengan kebutuhan.	-
	jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi tingkat nasional	3 event	2 event	66,67			
	jumlah pelaksanaan forum bisnis penanaman modal	1 event	0 event	0			
Arah kebijakan : Pengintegrasian layanan perijinan, investasi, dan layanan aduan							
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.149.289.445	953.916.240	83	Kurangnya sarana dan prasana, belum ada inovasi, kurangnya publikasi dan informasi	ditambah sarana dan prasarana nya, lebih banyak lagi inovasinya	-
	Indeks Pelayanan Publik	4,0 Point	4,17 Point	104,25			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	76,9%	76,93			
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		797.665.520	759.497.440	95,22	Realisasi Kegiatan Mal Pelayanan Publik mundur dari perencanaan	Kegiatan Launching Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon dilaksanakan pada Bulan Desember 2022 karena menyesuaikan jadwal Nasional secara serentak bersama 25 Kabupaten/kota se Indonesia	-
	Jumlah Launching MPP	1 Event	1 Event	100			
	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Perizinan Beresiko Rendah	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Tata Kelola MPP	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		269.090.300	112.375.840	41,76	Adanya perubahan regulasi terkait pelaksanaan perizinan (Peraturan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja) dengan turunannya PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko	Melakukan kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen berdasarkan resiko usaha	-Perlu Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
	Jumlah Survey Untuk Pemenuhan	250 kali	77 kali	30,8			
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan		82.533.625	82.042.960	99,41	Tidak ada permasalahan	-	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							
	Jumlah Tayang Pemberitaan Rubrik Khusus Halaman Cilegon	2540 MMK	2540 MMK	100			
	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	16 Buku	16 Buku	100			
Arah kebijakan : Pengintegrasian layanan perijinan, investasi, dan layanan aduan							
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		702.873.000	532.817.800	75,81	Adanya kemudahan pelayanan perizinan berusaha dan pendampingan pelayanan perizinan Kurangnya Respon Dari Para Pelaku Usaha Untuk Mengikuti Kegiatan	Melakukan Pendekatan Secara Langsung Terhadap Pelaku Usaha	-
	Realisasi Investasi	8,5 triliun	32,95 triliun	387,65			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		90.197.000	73.735.400	81,75	Tidak diserapnya SPPD karena tidak ada Pemantauan Keluar Daerah Aneka Jus tidak di serap karena tidak adanya tamu VIP	Untuk kedepan tidak ada pengajuan aneka jus dan sppd	-
	Profil Pemantauan	100 Dokumen	100 Dokumen	100			
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100			
	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		453.415.000	357.737.000	78,9	Aneka Jus tidak di serap karena tidak adanya tamu VIP	Untuk kedepan tidak ada pengajuan aneka jus	-
	Pelaku Usaha	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150 Peserta	150 Peserta	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	155 Peserta	155 Peserta	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		159.261.000	101.345.400	63,63	Swab antigen yang tidak diserap karena sudah tidak adanya covid-19 Aneka Jus tidak di serap karena tidak adanya tamu VIP	Untuk kedepan tidak ada pengajuan aneka jus dan swab antigen	-
	Berita Acara Pemeriksaan	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100			
	Profil Pengawasan	100 dokumen	100 dokumen	100			
	Jumlah Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	100			
Arah kebijakan : Pengintegrasian layanan perijinan, investasi, dan layanan aduan							
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		386.713.223	383.883.240	99,27	Kurangnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas sistem dan penambahan jaringan internet	ditambah anggaran	-
	Persentase ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00%	100,00%	100			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		386.713.223	383.883.240	99,27	Tidak ada permasalahan	-	-
	Jumlah Data dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	100			
	Jumlah Media Publikasi Informasi	3 Media	3 Media	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Online Yang Dipelihara	1 Sistem	1 Sistem	100			
	Tersedianya Layanan Jaringan Internet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	12 Bulan	12 Bulan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud sebagai Berikut :

- a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah
- Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap penyelenggaraan SAKIP oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja OPD. Evaluasi implementasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Cilegon.
- Evaluasi LAKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memberikan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja sesuai dengan prioritas program pemerintah daerah. Adapun hasil evaluasi di Tahun 2022 atas LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon tahun 2021 oleh Inspektorat Kota Cilegon, berdasarkan Surat Inspektorat No. 700/1453/Sekretariat Tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja DMPTSP Kota Cilegon. Hasil evaluasi LAKIP DPMPTSP Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar **81,61 dengan Kategori A/Memuaskan**, nilai tersebut terdiri atas 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, meliputi :

TABEL CAPAIAN NILAI LAKIP DPMPTSP KOTA CILEGON

No.	KOMPONEN/SUB KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	27,20
	1. Perencanaan Strategis	9,00
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	18,20
B.	PENGUKURAN KINERJA	20,31
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00
	2. Kualitas Pengukuran	12,50

No.	KOMPONEN/SUB KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA	NILAI
	3. Implementasi Pengukuran	2,81
C.	PELAPORAN KINERJA	13,83
	1. Pemenuhan Pelaporan	3,00
	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,23
	3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	3,60
D.	EVALUASI INTERNAL	6,20
	1. Pemenuhan Evaluasi	1,71
	2. Kualitas Evaluasi	2,99
	3. Pemanfaatan Evaluasi	1,50
E.	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA	14,06
	1. Pelaporan Kinerja (Output)	5,00
	2. Pelaporan Kinerja (Outcome)	9,06
	TOTAL NILAI	81,61

Sumber : Surat dari Inspektorat Kota Cilegon

Realisasi indikator program **Nilai LAKIP Perangkat Daerah** sebesar **81,61** atau mencapai **102%** dari Nilai LAKIP yang ditargetkan.

- b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah
DPMPTSP selaku instansi pemerintah melaksanakan program Reformasi Birokrasi, dengan mengacu kepada PermenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dimana pelaksanaan evaluasinya oleh Inspektorat Kota Cilegon untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah dalam hal ini DPMPTSP Kota Cilegon melaksanakan program reformasi birokrasi. Adapun capaian indikator ini berdasarkan Surat Inspektorat No. 700/1731/Sekret Tanggal 22 November 2022 Perihal Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Cilegon Tahun 2021, hasil evaluasi atas penilaian mandiri program Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar **31,84 (nilai hasil konversi sebesar 87,71)** dengan kategori **A (Sangat Baik)**. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) aspek, yaitu aspek Pemenuhan dan aspek Reform, yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Realisasi indikator program **Indeks RB Perangkat Daerah** sebesar **87,71** atau mencapai **119%** dari Indeks RB yang ditargetkan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD Pelayanan Publik
IKM sebagai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh penerima layanan publik.

Survei kepuasan masyarakat tahun 2022 dilakukan secara mandiri oleh DPMPTSP per triwulan, agar dapat memudahkan pimpinan dalam mengontrol pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Berikut persentasi IKM DPMPTSP per triwulan di Tahun 2022 :

NO.	TRIWULAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IKM
1.	I (Januari- Maret)	356 orang	83,69
2.	II (April-Juni)	493 orang	82,39
3.	III (Juli-September)	704 orang	85,81
4.	IV (Oktober-Desember)	802 orang	86,65
			84,63

Sumber Data : IKM mandiri DPMPTSP

Realisasi indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebesar **84,63** atau sebesar **111%** dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan dengan memberikan pendampingan bagi pemohon yang belum memahami sistem perizinan baru yaitu OSS RBA.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terhadap prioritas daerah, yakni pada **Program Prioritas 3 - Peningkatan Kualitas Layanan Publik**, melalui **Kegiatan Prioritas-2 Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Pelayanan Publik)**. Adapun untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sebagaimana tabel berikut :

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
1.	PP-9 Peningkatan Kualitas Layanan Publik					
	KP-2 Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Pelayanan Publik)					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Display Counter Android	24 unit	24 unit
				Tersedianya PC Desktop	1 unit	1 unit
				Tersedianya Customer Service Survey KIOSK	1 unit	1 unit
				Tersedianya PC All In One	26 unit	26 unit

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
				Tersedianya Printer	26 unit	26 unit
				Monitor 27 inch	1 unit	1 unit
				Mikrotik Switch Rouer	4 unit	4 unit
				Thermal Temperatur	1 unit	1 unit
				Mesin Antrian	1 unit	1 unit
				TOA ZS 2360-AS	8 unit	8 unit
				Tersedianya TOA ZA 3248 DM-AS	1 unit	1 unit
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung dan Renovasi Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon	1 paket	1 paket

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2. Menciptakan lapangan kerja
- 3. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Investasi di daerah terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan investasi daerah. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan dalam pengembangan iklim penanaman modal yang ramah bagi investor untuk menarik minat investasi yang dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kota Cilegon.

Indikator programnya **Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal** yang dihitung dengan rumus berikut :

=
$$\frac{\text{Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Tahun } n}{\text{Target Kebijakan Pengembangan Iklim}} \times 100\%$$

Adapun target penyusunan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana tabel berikut :

No	Kebijakan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-
2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	-	100%	-	-	-
3	Penetapan PERDA Tentang Penanaman Modal	-	-	100%	-	-
4	Penetapan Perda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	100%	-

Dari empat kebijakan yang akan dibuat dan disusun, Tahun 2022 telah dilakukan pemutakhiran Peta Potensi Investasi digital dalam rangka mempermudah seluruh pelaku usaha yang ingin berinvestasi untuk mendapatkan informasi mengenai peluang investasi di Kota Cilegon, sehingga progres capaian penyusunan Peta Potensi Investasi ini sudah 100%.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan tahapan kajian akademis untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), adapun tahapan perumusan kebijakan dan tahapan penetapan kebijakannya akan dilakukan di Tahun 2023. Sehingga progress capaiannya baru tercapai 40%, hal ini karena tahapan perumusan kebijakan dan tahapan penetapan kebijakannya baru masuk dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (ProLegDa) di Tahun 2023.

Selain itu di Tahun 2022, telah dilakukan penyusunan perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal dan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang progresnya untuk masing masing peraturan daerah tersebut baru tercapai 40%. Hal ini dikarenakan tahapan pembahasan Program Legislasi Daerah (ProLegDa) di Tahun 2023.

Sehingga capaian indikator programnya sebagaimana rumus perhitungan di atas, didapat sebagaimana berikut :

$$= \frac{(100\%+40\%+40\%+40\%)}{4} \times 100\% = 55\%$$

Realisasi indikator program **Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal** sebesar **55%** atau mencapai **110%** dari yang ditargetkan sebesar **50%**. Capaian indikator Realisasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - c. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal, DPMPTSP Kota Cilegon berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal.

Indikator Program ini yaitu **Persentase Sarana Promosi Penanaman Modal** yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Sarana Promosi PM Tahun } n}{\text{Target Sarana Promosi PM}} \times 100\%$$

Dalam Renstra DPMPTSP Kota Cilegon, terdapat 5 jenis promosi penanaman modal yang ditargetkan setiap tahunnya sebagai sarana promosi penanaman modal yaitu :

- Pameran Investasi.
- Pelaksanaan Forum Bisnis.
- Sarana promosi dalam bentuk media cetak (selebaran, poster, banner, dll).
- Sarana promosi dalam bentuk media elektronik (media social, radio, situs web, dll).
- Video Profil Investasi.

Pada tahun 2022, DPMPTSP telah melaksanakan promosi melalui sarana sebagai berikut :

- ✓ Pameran Investasi yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Kota Bandung.
- ✓ Promosi dalam bentuk media cetak, yaitu flyer potensi investasi dan flyer potensi UMKM unggulan.
- ✓ Video Profile Investasi yang menampilkan potensi investasi yang ada di Kota Cilegon, hal ini untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Cilegon.

Sehingga didapat realisasi :

$$= \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Realisasi indikator program **Persentase Sarana Promosi Penanaman Modal** sebesar **60%** atau mencapai **75%** dari yang ditargetkan sebesar **80%**. Pada Tahun 2022 dari 4 sarana promosi yang di targetkan (Pameran Investasi, Promosi dalam bentuk media cetak, Video Profile Invetasi dan Forum Bisnis Penanaman Modal) hanya 3 sarana promosi yang dilaksanakan. Forum Bisnis tidak dilaksanakan kegiatannya karena sulitnya mengundang perusahaan yang menerapkan standar pengecekan Kesehatan (covid 19) yang ketat.

Capaian indikator Persentase Sarana Promosi Penanaman Modal didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut :

2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program **Indeks Pelayanan Publik** merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan 6 (enam) aspek. Hasil Penilaian kinerja menjadi dasar bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) untuk melakukan pemeringkatan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah secara nasional. Evaluasi yang dilakukan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 6 aspek penilaian Indeks Pelayanan dengan bobot sebagai berikut :

NO	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
1	Kebijakan Pelayanan		30%
		Standar Pelayanan	
		Maklumat Pelayanan Publik	
		Survey Kepuasan Masyarakat	
2	Profesionalisme SDM		18%
		Kompetensi	
		Responsifitas	
		Kode Etik	
		Penghargaan dan Sanksi	
		Budaya Pelayanan	
3	Sarana Prasarana Pelayanan Publik		15%
		Parkir dan Ruang Tunggu	
		Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus	
		Sarana Penunjang Lain	
		Sarana Front Office	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik		
		Sistem Informasi Elektronik	
		Sistem Informasi Non Elektronik	
5	Konsultasi dan Pengaduan		15%
		Konsultasi	
		Pengaduan	
6	Inovasi		7%

Sumber Data : Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2017

Nilai indeks yang diperoleh diklasifikasikan dalam 9 (Sembilan) kategori sebagaimana tabel berikut :

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C –	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B –	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A –	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada DPMPTSP tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, didapat hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada DPMPTSP sebesar **4,17 (Kategori A-/Sangat Baik)**. Sehingga indikator program **Indeks Pelayanan Publik** mencapai **104,25%** dari yang ditargetkan sebesar **4,00**.

Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut :

- 3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terhadap prioritas daerah, yakni pada **Program Prioritas 3 - Peningkatan Kualitas Layanan Publik**, melalui **Kegiatan Prioritas-2 Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Pelayanan Publik)**. Adapun untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sebagaimana tabel berikut :

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realiasi
1.	PP-93 Peningkatan Kualitas Layanan Publik					
	KP-2 Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Pelayanan Publik)					
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Tata Kelola MPP	2 dokumen	2 dokumen
				Jumlah Launching MPP	1 event	1 event

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 202 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sehingga upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dilaksanakan melalui pengawasan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam hal ini oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

Adapun pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam hal ini DPMPTSP Kota Cilegon, dimana salah satu kegiatannya menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Indikator Programnya **Realisasi Investasi**, yaitu merupakan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN yang didahului oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online. PMA dan PMDN yang berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM (mengisi aplikasi LKPM online) baik yang tahap pembangunan (investasi baru) maupun yang sudah komersial. Dari data LKPM tersebut dapat diketahui nilai realisasi investasi PMA dan PMDN baik investasi baru maupun perluasan.

Capaian Indikator Realisasi Investasi Tahun 2022 sebesar 32,954 Triliun atau 388% melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

NO	TRIWULAN	PMA (Rp)	PMDN (Rp)
1	Triwulan I	3.930.728.120.000	52.931.600.000
2	Triwulan II	6.418.922.400.000	133.749.000.000
3	Triwulan III	8.117.361.070.000	169.201.200.000
4	Triwulan IV	13.565.377.390.000	566.415.900.000
Jumlah		32.032.388.980.000	922.297.500.000
Total		32.954.686.479.480	

Sumber Data : BKPM RI

Adapun Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan negara di Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NEGARA	JUMLAH PROYEK	PMA (Rp)	PMDN (Rp)
1	Malaysia	39	16.558.443.096.708	-
2	Korea Selatan	108	10.106.345.617.718	-
3	Jepang	68	2.787.718.500.630	-
4	Thailand	8	1.247.165.704.384	-
5	Amerika Serikat	13	1.102.335.166.380	-
6	Singapura	91	207.391.881.469	-
7	Belanda	15	72.169.005.523	-
8	Inggris	10	26.833.062.806	-
9	Belgia	8	6.834.905.277	-
10	Australia	12	3.568.844.621	-
11	Jerman	14	2.268.734.040	-
12	India	4	460.635.082	-
13	Hongkong, RRT	7	384.579.880	-
14	R.R. Tiongkok	3	278.390.039	-
15	Philipina	4	190.854.919	-
16	Indonesia	980	-	922.297.500.000
JUMLAH			32.032.388.980.000	922.297.500.000
TOTAL			32.954.686.480.000	

Sumber Data : BKPM RI

Sedangkan jumlah tenaga kerja berdasarkan pertambahan investasi di Tahun 2022 berdasarkan sumber dari BKPM RI sebagai berikut :

No	PERUSAHAAN	TKI	TKA	No	PERUSAHAAN	TKI	TKA
1	KRAKATAU NIPPON STEEL SYNERGY	275	16	26	CHEETHAM GARAM INDONESIA	4	0
2	KRAKATAU POSCO	196	15	27	INDORAMA PETROCHEMICALS	3	0
3	LOTTE CHEMICAL INDONESIA	195	64	28	KRAKATAU POS-CHEM DONG-SUH CHEMICAL	3	0
4	SIEMENS INDONESIA	182	2	29	STANDARD TOYO POLYMER	2	6
5	KRNG INDONESIA	120	6	30	KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN	2	0
6	HITACHI METALS INDONESIA	106	2	31	BERLIAN AMAL PERKASA	2	0
7	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	82	11	32	NIPPON STEEL TEXENG INDONESIA	2	0
8	INDO RAYA TENAGA	45	6	33	COMMONWEALTH STEEL INDONESIA	2	0
9	MC PET FILM INDONESIA	36	1	34	ROHM AND HAAS INDONESIA	1	0
10	TEREOS FKS INDONESIA	34	0	35	NIPPON STEEL AND SUMIKIN TEXENG INDONESIA	1	0
11	TOPSCO STEEL UTAMA	33	2	36	CASTROL MANUFACTURING INDONESIA	1	0
12	TOKKI ENGINEERING AND FABRICATION	21	0	37	DOVER CHEMICAL	1	0
13	TRINSEO MATERIALS INDONESIA	21	0	38	PERLITE INDONESIA ABADI	1	3
14	PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA	20	0	39	KRAKATAU POSCO CHEMTECH CALCINATION	1	0
15	CHAMP RESTO INDONESIA	20	0	40	STEEL SCARFING AND CUTTING INDONESIA	1	0
16	PERMATA FOOD INDONESIA	12	0	41	D J E&C INDONESIA	1	5
17	NIRVANA WASTU SAGARA BHADRIKA	12	0	42	UNGGUL INDAH CAHAYA	0	1
18	LATINUSA Tbk.	12	1	43	MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA	0	2
19	LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA	11	0	44	JAWAMANIS RAFINASI	0	4
20	CHANDRA ASRI PERKASA	7	0	45	KRAKATAU POSCO CHEMICAL CALCINATION	0	8
21	BUNGASARI FLOUR MILLS INDONESIA	7	0		TOTAL	1500	157
22	PUNDI KENCANA	7	0				
23	TRIDOMAIN CHEMICALS	7	0				
24	GOLDEN GRAND MILLS	6	1				
25	INDORAMA POLYPET INDONESIA	5	1				

Sumber Data : BKPM RI

Pertambahan investasi di Kota Cilegon masih didominasi oleh industri padat modal dan PMA sebesar 98% dengan faktor pendorong tingginya pertambahan investasi tersebut adalah :

1. Iklim investasi yang kondusif;
2. Pelayanan perizinan secara online yang memudahkan pelaku usaha melakukan permohonan perizinan kapanpun dan dimanapun;
3. Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi sebagai bahan promosi investasi;
4. Fasilitasi investor dalam menyelesaikan kendala terkait investasi;
5. Dibukanya layanan konsultasi dan pendampingan pembuatan perizinan melalui OSS.

Capaian indikator Realisasi Investasi didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait keterbukaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, DPMPTSP Kota Cilegon berkewajiban menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik berupa informasi terkait layanan perizinan berupa persyaratan perizinan, standar operasional prosedur, proses perizinan, dan berbagai informasi perizinan lainnya. Serta informasi penanaman modal berupa realisasi investasi, data potensi dan peluang investasi hingga informasi lainnya yang berkaitan dengan kinerja DPMPTSP sebagai unit penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pemetaan metadata oleh Bappeda Kota Cilegon dan DPMPTSP, target ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal sebagai berikut :

1. Informasi Perizinan dan Non Perizinan
2. Data investasi
3. Data IKM
4. Data Akuntabilitas

Pada Tahun 2022, Ketersediaan data pada sistem informasi penanaman modal telah tersedia secara keseluruhan. DPMPTSP semaksimal mungkin melakukan update data sesuai dengan perkembangan regulasi dan informasi yang terbaru, sehingga pemangku kepentingan memperoleh kemudahan mengakses informasi dalam 1 (satu) sarana yaitu pada website DPMPTSP maupun pada SIPECI. Indikator Program ini adalah Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi ketersediaan data sistem informasi PM}}{\text{Target ketersediaan data sistem informasi PM}} \times 100\%$$



Sehingga Indikator Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal Tahun 2022, sebagai berikut :

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian indikator Persentase Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi antara lain adanya pemeliharaan dan pemutakhiran SIPECI secara berkala serta pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, UPTD PEMUSATAN LATIHAN CABANG OLAHRAGA BINAAN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.13a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		57.121.061.801	54.734.078.981	95,82			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.798.994.141	8.923.581.125	91,07	Capaian Indikator Outcome Indeks RB Perangkat Daerah senilai 106,69% dikarenakan Peningkatan dalam pemenuhan evidence RB berdasarkan hasil evaluasi APIP		
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	67,5 Poin (Skala 1-100)	67,35 Poin (Skala 1-100)	99,78			
	Indeks RB Perangkat Daerah	52,0 Poin (Skala 1-100)	55,48 Poin (Skala 1-100)	106,69			
Arah kebijakan : Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan							
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		2.376.965.000	2.285.656.750	96,16	Pada Tahun 2022, pertumbuhan penduduk di usia pemuda (16-30 tahun) sangat pesat mencapai 143,86%, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang hanya 21,83%	Mengusulkan perubahan target pada momen review Renstra	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,84%	0,82%	44,57			
	persentase organisasi pemuda yang aktif	19,63%	52,59%	267,91			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		250.000.000	233.553.600	93,42			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan desain grafis untuk pemuda	200 orang	200 orang	100			
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		707.060.000	691.900.950	97,86			
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan karakter building dan kepemimpinan	400 orang	400 orang	100			
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda lingkungan	400 orang	400 orang	100			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan wawasan purna paskibraka	100 orang	100 orang	100			
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		1.419.905.000	1.360.202.200	95,8			
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pra pemusatan paskibraka	85 orang	85 orang	100			
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan seleksi paskibraka	200 orang	200 orang	100			
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemusatan paskibraka	102 orang	102 orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pembinaan dan penghargaan atlet olahraga prestasi, penyelenggaraan event olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan organisasi olahraga prestasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		43.857.490.160	42.459.148.490	96,81	Capaian Indikator Program (outcome) mencapai 125,07% dengan faktor keberhasilan berupa motivasi reward berupa uang bonus bagi atlet dan pelatih yang berhasil mendapatkan medali (emas, perak, dan perunggu) pada Kejuaraan Tingkat Provinsi (Popda, Potrada, Peparpeda, Porprov, Peparprov)		
	Tingkat Prestasi Olahraga	40,20%	50,28%	125,07			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	66,7%	66,67			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		16.680.915.000	16.284.172.732	97,62			
	Jumlah Penyelenggaraan Acara Launching Sport Center	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diberikan kepada masyarakat	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Presentase Progres Pembangunan Sport Center	15 %	15 %	100			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		1.092.200.000	1.049.867.800	96,12			
	Jumlah Atlet yang Berprestasi cabang olahraga Tinju	27 Orang	27 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Atlet yang Berprestasi cabang olahraga Atletik	36 Orang	36 Orang	100			
	Jumlah Atlet yang Berprestasi cabang olahraga Karate	36 Orang	36 Orang	100			
	Jumlah Atlet yang Berprestasi cabang olahraga Pencak Silat	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah Atlet yang Berprestasi cabang olahraga Sepak Takraw	42 Orang	42 Orang	100			
	Jumlah Nomor Pertandingan Cabang Olahraga Sepak Bola Antar Kelurahan	1 Nomor Pertandingan	1 Nomor Pertandingan	100			
	Jumlah Nomor Pertandingan Cabang Olahraga Bola Voli Antar Kelurahan	2 Nomor Pertandingan	2 Nomor Pertandingan	100			
	Jumlah Atlet yang Berprestasi cabang olahraga Taek Won Do	39 Orang	39 Orang	100			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	71,4%	71,43			
Seleksi Atlet Daerah		14.638.620.000	13.831.042.690	94,48	Target indikator outputevent KOSN SD Tingkat Provinsi, KOSN SKH Tingkat Provinsi, KOSN SMP Tingkat Provinsi, dan POSPEDA tidak tercapai atau senilai 0% dikarenakan pada tingkat provinsi event kejuaraan tersebut tidak jadi dilaksanakan sehingga Kota Cilegon tidak mengirimkan atlet untuk event kejuaraan tersebut		
	Jumlah atlet pelajar yang dibina PORPROV	710 Orang	710 Orang	100			
	Jumlah atlet pelajar yang dibina POSPEDA	58 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah atlet pelajar yang dibina POPDA	180 Orang	180 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah atlet pelajar yang dibina PEPARPEDA	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah atlet pelajar yang dibina KOSN SMP Tingkat Propinsi	32 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah atlet pelajar yang dibina KOSN SKH Tingkat Propinsi	28 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah atlet pelajar yang dibina KOSN SD Tingkat Propinsi	32 Orang	0 Orang	0			
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		259.300.000	214.674.850	82,79			
	Jumlah Instruktur Senam yang di bina pada Penataran Instruktur Senam	45 Orang	45 Orang	100			
	Jumlah Pelatih Olahraga yang dibina pada Penataran Pelatih	33 Orang	33 Orang	100			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100,0%	100			
Pengembangan Organisasi Keolahragaan		10.544.488.000	10.544.488.000	100			
	Hibah KONI	100 Persen	100 Persen	100			
	Hibah NPC Kota Cilegon	100 Persen	100 Persen	100			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100,0%	100			
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		641.967.160	534.902.418	83,32			
	Jumlah Pembinaan Marching Band di Kota Cilegon	60 Orang	60 Orang	100			
	Kejuaraan Olahraga Tradisional Tingkat Kota Cilegon	4 Cabang Olahraga	4 Cabang Olahraga	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan							
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		1.087.612.500	1.065.692.616	97,98	Nilai Capaian Persentase anggota pramuka yang aktif senilai		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					111,09% dikarenakan terdapat perubahan target Indikator Program		
	persentase anggota pramuka yang aktif	90,00%	99,98%	111,09			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		658.773.500	658.773.500	100			
	persentase penerima hibah bansos yang terpenuhi	100 %	100 %	100			
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota		164.829.000	156.479.000	94,93			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diklat pengelolaan gugus depan (GUDEP)	8 KWARRAN	8 KWARRAN	100			
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		165.000.000	157.780.116	95,62			
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gebyar pramuka 8 kwarran	8 Kwarran	8 Kwarran	100			
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		99.010.000	92.660.000	93,59			
	Jumlah sarana dan prasarana kepramukaan yang disediakan	8 set	8 set	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2022 , Program Dukungan Layanan Pemerintahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 91,07% atau terealisasi Rp.9.798.994.141,- dari target anggaran Rp. 8.924.342.215,-.

Pada program ini terdapat 2 (Dua) indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu Nilai LAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata . Program Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon pada Tahun 2022 berkinerja cukup baik tercermin dari indikator capaian kinerja program keduanya memiliki tingkat capaian kinerja diatas 80%, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut:

1. Nilai LAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon, hasil yang didapat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon atas Nilai Akuntabilitas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon Tahun 2021 (n-1) adalah 67,35 dengan predikat B (Baik) dengan kriteria yaitu Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perubahan, yang merupakan akumulasi terhadap seluruh komponen akuntabilitas kinerja yang dievaluasi. Capaian Indikator Program ini sebesar 99,78% dari target Nilai LAKIP 67,5 Poin terealisasi dengan perolehan Nilai 67,35 Poin, meskipun masih sama dengan predikat B (Baik) namun terdapat peningkatan nilai atas pemenuhan kriteria akuntabilitas perangkat daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2022 .

Capaian Realisasi pencapaian indikator Nilai LAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

1. Indeks RB Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon, hasil yang didapat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon atas Indeks RB Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon Tahun 2022 adalah 55,48 dengan predikat Cc (Cukup) dengan kriteria yaitu “Penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum secara merata di seluruh unit kerja”. Capaian Indikator Program ini sebesar 112,53% dari target Indeks RB Perangkat Daerah 52 Poin terealisasi dengan perolehan Indeks 55,48 Poin, meskipun masih sama dengan predikat yang diperoleh pada tahun 2022 yaitu predikat Cc (Cukup) namun terdapat peningkatan nilai atas implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2022. Capaian Realisasi pencapaian indikator Indeks RB Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada seluruh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja	Uraian data	Kinerja
1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Realisasi 2022 : 67,35 Poin	99,78%
2. Indeks RB Perangkat Daerah	Realisasi 2022 : 55,48 Poin	106,69%

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pada Tahun 2022, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 96,16% atau terealisasi Rp. 2.285.656.750,- dari target anggaran Rp. 2.376.965.000,-.

Pada program ini terdapat 2 (Dua) indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Persentase organisasi pemuda yang aktif. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon pada Tahun 2022 berkinerja sangat baik tercermin dari capaian indikator kinerja program terdapat 1 (satu) indikator memiliki tingkat capaian kinerja mencapai 100% dan 1 (Satu) lainnya dibawah 100%, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
Target persentase untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 1,84% yang menunjukkan bahwa realisasi tidak mencapai target, dengan realisasi sebesar 0,82% yang berarti capaiannya sebesar 44,57%. Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang berwirausaha berjumlah 2.009 orang berdasarkan dari berbagai sumber data,yaitu terdiri dari :
1. 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang (Sumber data : Data pemuda wirausaha Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP));
2. 1.510 (Seribu Lima Ratus Sepuluh) orang (Sumber data : Database UMKM 16-30 tahun Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Kota Cilegon);
3. 200 (Dua Ratus) orang (Sumber data : Data IKM Pemuda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon).
Sedangkan jumlah pemuda yang ada di kota cilegon berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon pada Tahun 2022 berjumlah 294.272 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua) orang.
Capaian Realisasi pencapaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
2. Persentase organisasi pemuda yang aktif;
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon menetapkan target persentase untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 19,63% yang menunjukkan bahwa mencapai target, dengan realisasi sebesar 52,59% yang berarti capaiannya sebesar 298,63%. Jumlah organisasi pemuda yang aktif berjumlah 61 (Empat Puluh Satu) (Sumber data : Data organisasi pemuda dari KNPI Kota Cilegon). Sedangkan jumlah seluruh organisasi pemuda berdasarkan Data organisasi pemuda dari Badan Kesbangpol Kota Cilegon pada Tahun 2022 berjumlah 116 (Seratus enam belas).
Capaian Realisasi pencapaian indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda.

Indikator Kinerja	Uraian data	Kinerja
1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyebut : Jumlah pemuda yang ada di kota cilegon Realisasi 2022 : 294.247 orang	0,82%

	<u>Pembilang:</u> Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang berwirausaha Realisasi 2022: 1.929Orang	
2 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	<u>Penyebut :</u> Jumlah seluruh organisasi pemuda Realisasi 2022 : 116 Organisasi <u>Pembilang:</u> Jumlah organisasi pemuda yang aktif Realisasi 2022 : 61 Organisasi	52,59%

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon melakukan usaha Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan meliputi ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pada Tahun 2022, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 96,81% atau terealisasi Rp. 42.459.166.490,- dari target anggaran Rp. 43.857.490.160,-.

Pada program ini terdapat 1 (Satu) indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu Tingkat Prestasi Olahraga. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon pada Tahun 2022 berkinerja baik tercermin dari capaian indikator kinerja program memiliki tingkat capaian kinerja melampaui target mencapai 125,07%.

Capaian Indikator Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan yaitu Tingkat Prestasi Olahraga sebesar 50,17%, yang menunjukkan bahwa target terlampaui, dari target 40,20%. Jumlah nomor pertandingan yang berprestasi pada seluruh cabang yang diikuti di setiap event Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi sejumlah 449 (Empat ratus empat puluh sembilan). Sedangkan Jumlah nomor pertandingan pada seluruh cabang yang diikuti di setiap event Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi Tahun 2022 berjumlah 895 (Delapan ratus sembilan puluh lima).

Capaian Realisasi pencapaian indikator Tingkat Prestasi Olahraga melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Seleksi Atlet Daerah.

Indikator Kinerja	Uraian data	Kinerja
1. Tingkat Prestasi Olahraga	<u>Penyebut :</u> Jumlah nomor pertandingan pada seluruh cabang olahraga yang diikuti di tingkat Provinsi Realisasi 2022: 895 Nomor pertandingan <u>Pembilang:</u> Jumlah nomor pertandingan yang berprestasi pada seluruh cabang olahraga yang diikuti di tingkat Provinsi Realisasi 2022 : 449 Nomor pertandingan	50,17%

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pada Tahun 2022 , Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon memiliki target anggaran Rp. 1.087.612.500,- dan terealisasi Rp. 1.065.692.616,- dengan capaian Kinerja Keuangan sebesar 97,98%.

Pada program ini terdapat 1 (Satu) indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu Persentase anggota pramuka yang aktif. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon pada Tahun 2022 berkinerja baik tercermin dari capaian indikator kinerja program memiliki tingkat capaian kinerja mencapai 111,09%.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon menetapkan target persentase untuk Presentase anggota pramuka yang aktif 90,00% yang menunjukkan bahwa target tercapai, dengan realisasi hanya sebesar 99,98%. Berarti capaiannya sebesar 111,09%. Jumlah anggota pramuka yang aktif berjumlah 41.459 (Empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan) orang, sedangkan jumlah anggota pramuka yang terdaftar tahun 2022 berjumlah 41.466 (Empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam) orang (Sumber data : Data keanggotaan pramuka dari Kwarcab Cilegon).

Jumlah anggota pramuka yang aktif berjumlah 41.459 (Empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Peserta Didik sejumlah 40.338 (Empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) orang;
2. Pembina sejumlah 1.054 (Seribu lima puluh empat) orang;
3. Pelatih sejumlah 24 (Dua puluh empat) orang.

Sedangkan jumlah anggota pramuka yang terdaftar Tahun 2022 berjumlah 41.466 (Empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam) orang , yang terdiri dari :

1. Peserta Didik sejumlah 40.338 (Empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) orang;

2. Pembina sejumlah 1.054 (Seribu lima puluh empat) orang;
3. Pelatih sejumlah 15 (Lima Belas) orang.

Capaian Realisasi pencapaian indikator Persentase anggota pramuka yang aktif melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah.

Indikator Kinerja	Uraian data	Kinerja
2. Persentase anggota pramuka yang aktif	<u>Penyebut :</u> Jumlah anggota pramuka yang terdaftar Realisasi 2022 : 41.466 Orang <u>Pembilang:</u> Jumlah anggota pramuka yang aktif Realisasi 2022 : 41.459 Orang	191,28%

Kegiatan Program Prioritas

Pada Tahun 2022 , Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon melaksanakan 2 (dua) dari 19 (Sembilan belas) program Prioritas Daerah, yaitu :

1. PP 19 Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga,
KP 19.2 Optimalisasi Fungsi Sport Center;
Pencapaian pelaksanaan Program Prioritas Optimalisasi Fungsi Sport Center berkonsep operasional berupa penyelesaian pembangunan Sport Center melalui pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, dengan indikator output sub kegiatan berupa Presentase progres pembangunan sport center yang pada Tahun 2022 capaian kinerja outputnya mencapai 100% dari target progress pembangunan sport center 15%, terealisasi sebesar 15%. Berikut penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dari Program Prioritas Optimalisasi Fungsi Sport Center :

Indikator Kinerja	Uraian data	Kinerja
Progres Pembangunan Sport Center	Realisasi 2022 : 15%	100%

Optimalisasi Fungsi Sport Center dicapai melalui indikator kinerja Progres Pembangunan Sport Center sebesar 15% dengan target pekerjaan yang dapat diselesaikan pada Tahun 2022 terdiri dari :

- Pekerjaan Pemasangan Gardu Listrik dan Pemasangan Daya Listrik Stadion
- Pekerjaan Pemasangan Pompa Air Summersible dan instalasi jaringan air
- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu FOP

3.1.2.14 Statistik

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.14a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN		300.000.000	237.479.300	79,16			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan, kualitas data dan informasi pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		300.000.000	237.479.300	79,16	-Kurangnya Pemahaman tentang Keterbukaan data sebagai salah satu sarana dalam pengambil kebijakan - Tidak adanya SOP Data di Pemerintahan Kota Cilegon -Kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan aplikasi satu data (banyak data yang belum terverifikasi pejabat eselon II) -Aplikasi Yang digunakan sering UP and Down	- Forum satu Data Pemkot - Memberikan Pemahaman (Sosialisasi) tentang pentingnya validasi data - Pemutakhiran Aplikasi Satu Data - Adanya Bintek atau Forum Diskusi Intens Perihal Data - Menyederhanakan Proses Validasi Data - Menyamakan sistem penyimpanan data dengan Provinsi	-Diperlukan Koordinasi dengan cara Forum Satu Data maupun Bimtek Metadata - Peningkatan Kapasitas SDM dengan cara memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan tentang penting keterbukaan data (Perpres No 39 Tahun 2019)
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral	50,00%	68,22%	136,44			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	100%	50,0%	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		200.000.000	158.731.800	79,37	-Kurangnya Pemahaman tentang Keterbukaan data sebagai salah satu sarana dalam pengambil kebijakan - Tidak adanya SOP Data di Pemerintahan Kota Cilegon	-Dibuatnya SOP Data di Pemerintahan Kota Cilegon -Adanya Bintek atau Forum Diskusi Intens Perihal Data	-Diperlukan Koordinasi dengan cara Forum Satu Data maupun Bimtek Metadata - Peningkatan Kapasitas SDM dengan cara memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan tentang penting keterbukaan data (Perpres No 39 Tahun 2019)
	Survey Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Forum Data	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Buku Statistik Sektoral	1 Buku / Dokumen	1 Buku / Dokumen	100			
	Buku Profil Pembangunan	1 Buku / Dokumen	1 Buku / Dokumen	100			
Pengembangan Infrastruktur		100.000.000	78.747.500	78,75	-Kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan aplikasi satu data (banyak data yang belum terverifikasi pejabat eselon II) -Aplikasi Yang digunakan sering UP and Down	-Memberikan Pemahaman (Sosialisasi) tentang pentingnya validasi data -Pemutakhiran Aplikasi Satu Data - Menyederhanakan Proses Validasi Data - Menyamakan sistem penyimpanan data dengan Provinsi	-Diperlukan Koordinasi dengan cara Forum Satu Data maupun Bimtek Metadata - Peningkatan Kapasitas SDM dengan cara memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan tentang penting keterbukaan data (Perpres No 39 Tahun 2019)
	Pengembangan Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Kota Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Stati dengan indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral pada tahun 2022 sebesar 50%.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan Statistik Sektoral, diukur dari dua aspek, pertama adalah aspek kepuasan terhadap ketersediaan data sektoral; kedua, adalah kepuasan terhadap layanan data. Hasil Pengukuran terhadap kedua aspek tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Tingkat Kepuasan Terhadap Ketersediaan Data Sektoral
- Kepuasan terhadap ketersediaan data sektoral dalam hal ini diukur dari 3 variabel, yaitu kelengkapan data, akurasi data dan kemutakhiran data (berdasarkan Survei kebutuhan Data BPS, VKD 2021, Blok III Kolom 11-13). Pada ketiga variabel tersebut, mayoritas responden memberikan penilaian “baik atau lengkap” yang dalam hal ini diberikan skor 3, yaitu sebanyak 63% menyatakan kelengkapan data lengkap, 53% menyatakan akurasi data baik dan sebanyak 48% menyatakan kemutakhiran data baik. Namun disisi lainnya, prosentase responden yang menyatakan cukup baik dan tidak baik lebih besar dari pada yang menyatakan sangat baik, sehingga secara rata rata nilai berada pada rentang 2,6 – 2,75 atau kategori “kurang”. Jika dibandingkan rata-rata ketiga variabel, ketiganya memiliki nilai yang hamper setara, yaitu sekitar 2,6, yang menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dinilai paling menonjol.

Variabel Tingkat Kepuasan Ketersediaan Data	Sangat Baik/ Sangat Lengkap (%)	Baik/ Lengkap (%)	Cukup Baik /Kurang Lengkap (%)	Buruk/ Tidak Lengkap (%)	Jumlah Skor	Rata- Rata
Kelengkapan Data	5	63	28	4	269	2,69
Akurasi Data	4	53	42	1	260	2,60
Kemutakhiran Data	8	48	41	3	261	2,61

2. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Data
- Aspek Kepuasan terhadap layanan data sektoral diukur Dari 7 variabel, yaitu persyaratan, prosedur waktu penyelesaian, kesesuaian produk, kompetensi petugas, perilaku petugas dan kualitas sarana prasarana. Pada ketujuh variabel tersebut, mayoritas responden memberikan penilaian “sesuai atau mudah atau baik” yang dalam hal ini diberikan skor 3, yaitu sebanyak 74% menyatakan persyaratan mudah, 76%menyatakan prosedur mudah, 73% menyatakan waktu penyelesaian sesuai, sebanyak 82% menyatakan produk (data) sesuai, sebanyak 52% kompetensi petugas baik, sebanyak 58% menyatakan perilaku petugas baik dan sebanyak 58% menyatakan perilaku tugas baik, dan sebanyak 51% menyatakan kualitas sarpras layanan baik. Namun di sisi lainnya, prosentase responden yang menyatakan “kurang sesuai dan tidak sesuai” lebih besar dari pada yang menyatakan “sangat sesuai”, sehingga secara rata-rata ketiga variabel berada pada rentang 2,62 – 2,95 atau kategori “kurang”.

Variabel Tingkat Kepuasan Layanan Data	Sangat Sesuai /Sangat Mudah /Sangat Baik (%)	Sesuai/ Mudah/ Baik (%)	Kurang Sesuai /Cukup Mudah /Cukup Baik (%)	Tidak Sesuai /Tidak Mudah/ Buruk (%)	Jumlah Skor	Rata- Rata
Persyaratan	10	74	14	2	292	2,92

Variabel Tingkat Kepuasan Layanan Data	Sangat Sesuai /Sangat Mudah /Sangat Baik (%)	Sesuai/ Mudah/ Baik (%)	Kurang Sesuai /Cukup Mudah /Cukup Baik (%)	Tidak Sesuai /Tidak Mudah/ Buruk (%)	Jumlah Skor	Rata-Rata
Prosedur	8	76	13	3	289	2,89
Waktu Penyelesaian	5	73	20	2	281	2,81
Kesesuaian Produk	4	82	13	1	289	2,89
Kompetensi Petugas	9	52	39	0	270	2,70
Perilaku Petugas	18	58	24	0	294	2,94
Kualitas Sarpras	7	51	39	3	262	2,62

3. Indeks kepuasan Masyarakat
- Berdasarkan Jumlah dari rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek, diperoleh nilai indeks kepuasan pada masing-masing aspek, yang dalam hal ini pada aspek ketersediaan data dengan nilai indeks sebesar 65,83. Sedangkan pada aspek kepuasan layanan data diperoleh nilai indeks sebesar 70,61. Indeks kepuasan masyarakat, yang dalam hal ini diperoleh dari rata-rata dari kedua aspek tersebut, adalah sebesar **68,22** atau berada pada penilaian **“Kurang Baik”**. Maka masih diperlukan sekitar 8 poin untuk meningkat menjadi kategori “Baik”.

Variabel		Jumlah Skor	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
A.	Kepuasan Ketersediaan Data			
	Kelengkapan Data	269	2,69	0,90
	Akurasi Data	260	2,60	0,87
	Kemutakhiran Data	261	2,61	0,87
	Jumlah			2,63
	Indeks Kepuasan Ketersediaan Data			65,83
B.	Tingkat Kepuasan Layanan Data			
	Persyaratan	292	2,92	0,42
	Prosedur	289	2,89	0,41
	Waktu Penyelesaian	281	2,81	0,40
	Kesesuaian Produk	289	2,89	0,41
	Kompetensi Petugas	270	2,70	0,39
	Perilaku Tugas	294	2,94	0,42
	Kualitas Sarpras	262	2,62	0,37

Variabel		Jumlah Skor	Rata-Rata	Rata-Rata Tertimbang
	Jumlah			2,82
	Indeks Kepuasan Tingkat Kepuasan Layanan			70,61
	Indeks Kepuasan Masyarakat			68,2202

Untuk mendukung Capaian indeks Kepuasan Masyarakat terhadap data Statistik dan Sektoral, ditunjang oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dimana salah satu tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon yaitu menyediakan data-data statistik sektoral Kota Cilegon, sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon bekerja sama dengan Perangkat Daerah. Adapun Capaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan StatistikSektoral	%	50	68.22	136.44

Capaian indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup daerah Kabupaten /Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur

3.1.2.15 Persandian

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.15a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN		444.876.707	383.419.950	86,19			
Arah kebijakan : Peningkatan pelayanan publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		444.876.707	383.419.950	86,19	-SDM yang kurang menguasai tentang Persandian dan terkendala sarana dan Prasarana yang kurang memadai / terbatas -Keterlambatan Pengajuan surat rekomendasi untuk tanda tangan elektronik	Melakukan Pelatihan CISRT (Computer Incident Security Response Team) kepada Internal Kominfo agent CISRT seluruh OPD - Berkoordinasi dengan BSR (Balai Sertifikat Elektronik) sebagai penerbit sertifikasi elektronik untuk pemerintah	1. Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah melalui bintek, pelatihan, kursus seminar terkait dengan keamanan informasi 2. Mengoptimalkan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi melalui optimalisasi sumberdaya keamanan informasi seperti penyusunan regulasi, SOP, sumberdaya infrastruktur dan sumber daya lainnya.
	Persentase Layanan Keamanan Informasi	27,28%	28,70%	105,21			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	75,0%	75			
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		112.748.589	98.203.880	87,1	Ketidaksesuaian jadwal narasumber dr BSSN untuk Kegiatan Laouching dan Bintek Computer Security Insident Response Team	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					(tim tanggap Keamanan Siber)		
	Jumlah Wireless Camera Hunter	2 Unit	2 Unit	100			
	Jumlah Alat-alat Komunikasi dan telekomunikasi yang dipelihara	83 titik/unit	83 titik/unit	100			
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		136.492.337	119.225.600	87,35	Ketidak sesuaian jadwal narasumber dari pihak BSSN	-	
	Jumlah SE atau asset informasi yang akan diaudit dengan resiko kategori rendah	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100			
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		76.825.971	58.210.600	75,77	Keterlambatan pengajuan surat rekomendasi untuk Tanda tangan elektronik	-	
	Jumlah Aplikasi yang belum menerapkan SMKI dan diamankan Sertifikat Elektronik	2 Aplikasi	0 Aplikasi	0			
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		118.809.810	107.779.870	90,72	Perubahan jadwal Narasumber untuk kegiatan Kontra Penginderaan Sterilisasi Ruang Kerja Pimpinan	-	
	Jumlah titik sasaran pengamanan informasi ruang kerja pimpinan	10 titik	10 titik	100			
	Jumlah peserta bimbingan teknis keamanan informasi	80 orang	80 orang	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Keamanan persandian dan informasi adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti peretasan, penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh Pemerintah Daerah menjadi terasa lebih penting.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun di sisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Untuk mendukung capaian Kinerja ditunjang oleh Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Uraian Sebagai Berikut :

1. Security Assesment

Untuk memastikan system dan aplikasi bebas dari kerentanan, ancaman dan resiko yang dapat menyebabkan kerugian dan memastikan aset tersebut dapat digunakan dengan baik maka perlu dilakukan “Security Testing” dan “*security assessment*”. Pada tahun 2022 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Cilegon telah melakukan *Security Testing* dan *Security Assesment* terhadap 3 (tiga) Aplikasi yang dilaksanakan oleh *Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)* dari target 3 Aplikasi yang di assessment dengan capaian kinerja **100%** diantaranya sebagai berikut :

No	Nama Aplikasi	URL
1.	Portal JDIH Kota Cilegon	https://jdih.cilegon.go.id
2.	E-Hibah Bansos Mandiri Cilegon	https://ehibahbansosmandiri.cilegon
3.	Website Cisrt Kota Cilegon	https://cisrt.cilegon.go.id

Beberapa Faktor yang menghambat Security Assesment pada tahun 2022 diantaranya:

- Belum diterapkan “*Secure Coding*” untuk mencegah “*Cross Site Scripting*” (CSS);

- Password dalam beberapa aplikasi belum memiliki mekanisme “Hash Coekie”.
- Belum diterapkan manajemen menggunakan “XSRF Token”.

2. Kontra Pengindraan (Sterilisasi Ruang Kerja)

Pada tahun 2022 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian menargetkan 10 titik kontra pengindraan dan dapat merealisasikan 12 titik kontra penginderaan dengan capaian realisasi Kinerja sebesar 100%, sterilisasi Kontra penginderaan telah dilakukan terhadap 12 (Dua belas) titik strategis yang rawan penyadapan dari pihak non pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah. Berikut daftar 14 titik tersebut :

- a. Ruang Kerja Walikota;
- b. Ruang Kerja Wakil Walikota;
- c. Ruang Kerja Asisten I;
- d. Ruang Kerja Asisten II;
- e. Ruang Kerja Asisten III;
- f. Ruang Kerja Ketua DPRD;
- g. Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD;
- h. Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD;
- i. Ruang Rapat Walikota;
- j. Rumah Dinas Walikota;
- k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- m. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Beberapa Faktor yang menghambat Kontra Pengindraan (Sterilisasi Ruang Kerja) pada tahun 2022 diantaranya:

- a. Frekuensi Radio yang digunakan oleh Pamdal masih frekuensi Umum belum bersifat Frekuensi Khusus dan rahasia;
- b. Keberadaan tirai diruang rapat pimpinan beberapa belum memenuhi persyaratan;
- c. Diperlukan SOP diruang pimpinan yang mengatur para tamu tidak boleh membawa barang-barang tertentu ke dalam ruang pimpinan

3. Penerapan Sertifikat Elektronik

Pada tahun 2022 Dinas Kominfo ,Statistik dan Persandian menargetkan 2 Aplikasi yang akan dilakukan Penerapan Sertifikat Elektronik bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional, tahap awal pelaksanaan proses pererapan sertifikat elektronik berupa analisis terhadap aplikasi telah dilaksanakan. Hal ini menyebabkan Capaian Kinerja Penerapan Sertifikat elektronik dengan capaian 100 % setelah kegiatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah diterapkan disemua dinas atau OPD.

Beberapa Faktor yang menghambat Penerapan Sertifikat Elektronik pada tahun 2022 diantaranya:

- Belum semua kepala Perangkat Daerah terekam tanda tangan Elektronik;
- Belum ada regulasi yang mengatur tata naskah Dinas penggunaan TTE;
- Perangkat daerah masih bingung surat apa saja yang bisa menggunakan TTE.

Berdasarkan uraian diatas Persentase layanan keamanan menyatakan keamanan informasi berdasarkan “*security assessment*”, kontra penginderaan dan penerapan sertifikat elektronik atau Persentase rata-rata dari 3 layanan keamanan informasi.

Indikator Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu Presentase Layanan Keamanan Informasi pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 27.28%. Adapun realisasinya sebesar 28,70% dengan capaian target indikator sebesar 105,21%.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Layanan Keamanan Informasi	%	27.28	28.70	105.21

Capaian indikator Presentase Layanan Keamanan Informasi didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2.16 Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.16a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.005.000.000	951.768.808	94,7			
Arah kebijakan : Pengelolaan kesenian dan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota							
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		625.000.000	614.759.308	98,36	Capaian indikator pada program pengembangan kebudayaan mencapai 109,09%, hal ini dikarenakan pada saat perubahan anggaran mengalami penambahan anggaran sehingga realisasi capaiannya bertambah 1 output sehingga persentasi capaian indikator tersebut melebihi dari target.	Evaluasi target pada saat penambahan anggaran, dikarenakan setiap indikator yang mengalami penambahan anggaran harus menambah target	Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD terkait Penambahan Cagar Budaya di Cilegon. Di tahun 2023 akan dilakukan proses penambahan cagar budaya, dimana objek yang diduga cagar budaya yang akan di kaji antara lain : SD Negeri 2 Cilegon Makam Ki Arya Sintok Makam Ki Buyut Somad Makam Syech Jamaludin Makam Ibrahim Bin Fulan Makam Tumenggung Jayalana
	Jumlah even kebudayaan yang diselenggarakan	11,0 Even	12,0 Even	109,09			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		300.000.000	294.143.350	98,05			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Pengembangan Cagar Budaya sebagai tempat belajar juga kegiatan Pariwisata. Cagar budaya dimanfaatkan sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan bagi pelajar. Salah satu cara memperkenalkan pelajar tentang keberadaan cagar budaya di Cilegon adalah dengan kegiatan outing class
	Terlaksananya Festival Golok Day	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Peningkatan Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Daerah Cilegon dalam bentuk Lomba Silat dan Golok Day. Di tahun 2023 akan diselenggarakan lomba silat dengan 2 kategori umur yaitu umur 9 – 13 th dan umur 14 – 18 th. Kegiatan Golok Day akan dilaksanakan pada HUT Kota Cilegon atau awal bulan Mei tahun 2023
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		325.000.000	320.615.958	98,65			-
	Jumlah Cetak Buku Cerita Rakyat	1100 buku	1100 buku	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Pengelolaan kesenian dan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota							
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		205.000.000	169.403.000	82,64			
	Persentase kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina	100,0 Persen	100,0 Persen	100			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		205.000.000	169.403.000	82,64			
	Jumlah Pengadaan Alat Musik yang di adakan	6 Set	6 Set	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan akses informasi sejarah							
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		175.000.000	167.606.500	95,78	Capaian program pembinaan sejarah mencapai 95,78%, akan tetapi pada indikator persentase kajian sejarah yang dilakukan capaiannya sebesar 0%, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu untuk melakukan kajian sejarah, akibat adanya perubahan SOTK baru, sehingga dialihkan untuk indikator lain yaitu Jumlah Cetak Buku Sejarah Cilegon dengan capaian realisasi 1.200 buku sesuai dengan	Berkoordinasi dengan pihak terkait indikator program yang semula direncanakan kemudian dialihkan ke indikator lain	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Pelestarian dan pengembangan sejarah Kota Cilegon. Melanjutkan proses pengusulan pahlawan nasional KH. Wasyid dan KH Arsyad Thowil

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					target yang sudah ditentukan.		
	Persentase kajian sejarah yang dilakukan	100,0 Persen	0,0 Persen	0			
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		175.000.000	167.606.500	95,78	Keterbatasan waktu melakukan kajian sejarah karena ada peralihan SOTK baru	di anggarkan di tahun selanjutnya	-
	Jumlah Cetak Buku Sejarah Cilegon	1200 Buku	1200 Buku	100			
UPTD BALAI BUDAYA		35.564.800	35.564.800	100			
Arah kebijakan : Pengelolaan kesenian dan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota							
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		35.564.800	35.564.800	100			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,0%	0			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		35.564.800	35.564.800	100			
	Tercapainya Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga dan Pranata Tradisional	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Bidang urusan kebudayaan memiliki 3 indikator program teknis yang harus dicapai yaitu :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Jumlah Even Kebudayaan Yang Diselenggarakan (Target : 11 Even)
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - a. Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional Yang Dibina (Target : 100 %)
3. Program Pembinaan Sejarah
 - a. Persentase Kajian Sejarah Yang Dilakukan (Target : 100 %)

Capaian realisasi Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Siswa SD dan SMP yang Mengikuti Lomba Apresiasi Bahasa Daerah (Jawa Cilegon), lalu sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian realisasi Jumlah Even Kebudayaan Yang Diselenggarakan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan indikator kinerja Terlaksananya Festival Golok Day lalu sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan indikator kinerja Jumlah Cetak Buku Cerita Rakyat.

Capaian realisasi Persentase Kelompok Pelaku Kesenian Tradisional Yang Dibina didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan indikator kinerja Jumlah Pengadaan Alat Musik yang di adakan.

Capaian realisasi Persentase Kajian Sejarah Yang Dilakukan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah dengan indikator kinerja Jumlah Cetak Buku Sejarah Cilegon.

3.1.2.17 Perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.17a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		20.339.144.721	18.893.349.722	92,89			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		19.511.775.030	18.090.453.685	92,72	Indeks RB: Telah terpenuhinya dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian indeks RB hasil dari penilaian mandiri Inspektorat.	Perlunya penyesuaian target di Renstra perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon dan juga berkoordinasi dengan Bagian ORB agar peta proses bisnis DPK dibuat dan diformalkan, dan juga melakukan perbaikan atau penyediaan dokumen pendukung untuk komponen penilaian Lakip yang nilainya masih kurang.	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait kebutuhan Pembangunan Perpustakaan Daerah yang representatif sebagai Pusat studi dan pengembangan literasi masyarakat. (2022 terdapat pembelian lahan untuk perpustakaan daerah)
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	72,0 Poin	71,1 Poin	98,75			
	Indeks Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	27,0 Poin	70,5 Poin	261,11			
Arah Kebijakan : Peningkatan layanan perpustakaan serta peningkatan inovasi dan kemitraan dalam gerakan gemar membaca							
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		827.369.691	802.896.037	97,04	Gedung perpustakaan belum sesuai standar nasional perpustakaan, Indikator IPLM target capaian yang digunakan	Rencana 2023 : DED gedung perpustakaan dan sertifikat tanah, penganggaran	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait kebutuhan Pembangunan Perpustakaan Daerah yang

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					adalah merujuk Renstra Perpusnas RI, perlunya peran serta masyarakat dalam Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca	pengukuran IPLM secara mandiri, optimalisasi gerakan unggah konten lokal (Gagah Total), penambahan koleksi ebook di aplikasi iCilegon, pemberian penghargaan lomba bercerita, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	representatif sebagai Pusat studi dan pengembangan literasi masyarakat, serta penambahan buku buku elektronik dan buku bacaan secara berkala untuk koleksi Pustaka.
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,0 Poin	18,63 Poin	143,31			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		240.632.566	239.417.487	99,5	belum terpublikasikannya karya tulis masyarakat terutama karya siswa dan guru di sekolah , kurangnya koleksi perpustakaan dari hasil karya putra putri daerah	melakukan inovasi Gerakan Unggah Konten Lokal (GAGAH TOTAL) yang bertujuan untuk mengembangkan koleksi perpustakaan digital (iCilegon) sehingga isinya bukan hanya ebook hasil pembelian melainkan karya putra dan putri daerah yang diunggah secara mandiri	a. Tindak lanjut (TL) 2022 : Pengadaan lahan perpustakaan b. 2022 : pendataan IPLM sesuai pedoman Perpusnas c. 2022 : pelatihan gerakan unggah konten lokal (GAGAH TOTAL) d. 2022 : penambahan koleksi ebook di iCilegon e. 2022 : lomba bercerita, pemilihan duta baca dan literasi berbasis inklusi sosial
	Terlaksananya peningkatan layanan perpustakaan dan kerjasama perpustakaan	100 peserta	100 peserta	100			
	Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi i-Cilegon	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah pengunjung perpustakaan	90000 orang	90000 orang	100			
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah		66.554.814	64.271.300	96,57	masih banyaknya perpustakaan binaan yaitu perpustakaan sekolah, umum kecamatan dan	melakukan pembinaan ke perpustakaan binaan yaitu perpustakaan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait kebutuhan Perpustakaan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					kelurahan, khusus dan perguruan tinggi yang belum dibina sesuai standar nasional perpustakaan	sekolah, umum kecamatan dan kelurahan, khusus dan perguruan tinggi yang belum dibina sesuai pedoman standar nasional perpustakaan	Daerah yang representatif sebagai Pusat studi dan pengembangan literasi masyarakat, serta penambahan buku buku elektronik dan buku bacaan secara berkala untuk koleksi Pustaka.
	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Kelurahan yang Telah Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	56 Perpustakaan	56 Perpustakaan	100			
Pengembangan Bahan Pustaka		50.000.000	48.853.000	97,71	perlunya mencocokkan ketersediaan koleksi yang ada dengan database sistem perpustakaan terotomasi INLISLite yang ada di perpustakaan	melakukan pencacahan ulang koleksi perpustakaan, menghubungi pemustaka yang telat mengembalikan koleksi	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait penambahan buku buku elektronik dan buku bacaan secara berkala untuk koleksi Pustaka.
	Terpeliharanya dan Tersedianya Data Bahan Pustaka dalam kondisi baik, rusak, dan hilang	30000 Eksemplar	30000 Eksemplar	100			
	Bertambahnya sarana layanan Perpustakaan	3 Jenis	3 Jenis	100			
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		99.998.838	96.371.000	96,37	perlunya memenuhi kebutuhan pemustaka, perlunya pemutakhiran koleksi sesuai dengan pedoman sehingga perlu pengadaan koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.	penambahan koleksi buku perpustakaan melalui pengadaan buku tercetak dan elektronik	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait penambahan buku buku elektronik dan buku bacaan secara berkala untuk koleksi Pustaka, dengan penambahan koleksi ebook di iCilegon
	Bertambahnya Koleksi bahan pustaka	750 Eksemplar	750 Eksemplar	100			
	Terolahnya bahan Pustaka	30 Hari	30 Hari	100			
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		140.188.568	131.758.750	93,99	perlunya Meningkatkan minat baca dan partisipasi masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca kepada seluruh lapisan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Bercerita	90 Orang	90 Orang	100	dalam Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB)	masyarakat dengan mengadakan lomba bercerita anak sekolah dan guru serta orangtua	Sosialisasi Budaya Baca kepada seluruh lapisan masyarakat. 2022 : lomba bercerita, pemilihan duta baca dan literasi berbasis inklusi sosial
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		79.994.905	78.942.000	98,68	masyarakat perlu meningkatkan perannya untuk meningkatkan minat baca dan partisipasi masyarakat dalam Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB) dan perpustakaan selama ini masih dilihat eksklusif, belum dianggap sebagai tempat bagi seluruh masyarakat tanpa mengandung status sosial	mengadakan pelatihan bagi masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat bertransformasi berbasis inklusi sosial	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait upaya meningkatkan indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Cilegon
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemasarakatan minat baca	550 peserta	550 peserta	100	perlunya peran serta masyarakat sebagai penggerak literasi di masyarakat	mencari kader duta baca masyarakat yang diharapkan dapat menjadi contoh dan public figure di masyarakat untuk menggerakkan literasi	a. Tindak lanjut (TL) 2022 : Pengadaan lahan perpustakaan b. 2022 : pendataan IPLM sesuai pedoman Perpustnas c. 2022 : pelatihan gerakan unggah konten lokal (GAGAH TOTAL) d. 2022 : penambahan koleksi ebook di iCilegon e. 2022 : lomba bercerita, pemilihan duta baca dan literasi berbasis inklusi sosial
	Jumlah Peserta Pemilihan Duta Baca	20 Orang	20 Orang	100			

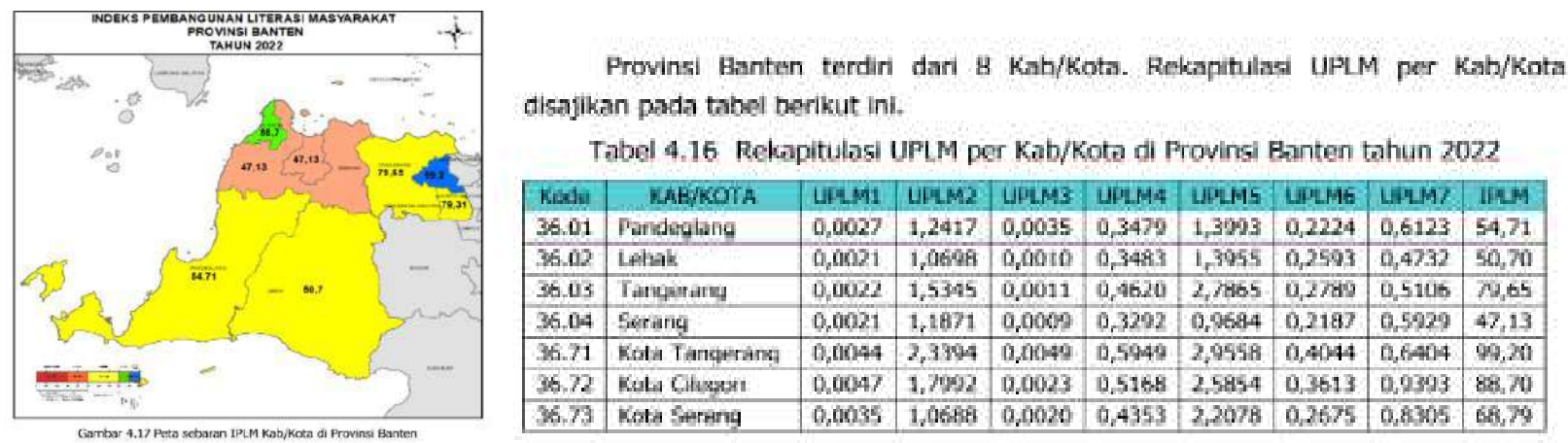
B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 2 urusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Urusan Perpustakaan untuk tahun anggaran 2022 melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pembinaan Perpustakaan yang menjadi urusan Teknis Urusan Perpustakaan. Urusan Perpustakaan memiliki 1 program teknis yang dilaksanakan pada tahun 2022. Program teknis itu adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikatornya dengan target adalah 14. Target yang ingin dicapai merujuk pada Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI.

Indikator Teknis	Uraian Data	Kinerja
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif atas unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan budaya literasi masyarakat	18,63 (143,34%)

Dalam penilaian IPLM, ada 7 (tujuh) variable penilaian yang disebut dengan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang menjadi penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat oleh Perpustakaan Nasional RI yaitu Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1), Ketercukupan koleksi (UPLM2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Kemasyarakatan (UPLM4), Perpustakaan ber-SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6) dan Anggora Perpustakaan (UPLM7). Dan hasil capaian kinerja ini sebesar 143,34% dari yang ditetapkan. Kinerja ini dikatakan “Baik Sekali” karena capaian melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut data yang dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk indikator IPLM:

Gambar 1 Rekapitulasi IPLM per Kab/Kota Prov Banten Tahun 2022



Sumber data: : Laporan Kajian IPLM Indonesia 2021 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Dari gambar diatas kita dapat memperoleh gambaran bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Cilegon pada Tahun 2022 adalah 88,70 yang kemudian dikonversi dengan 4,76 menjadi 18,63 poin dimana hasil capaiannya menjadi 143,34% dari target yang ditetapkan yaitu 13.

Berikut data dukung atas tercapainya indikator Program Pembinaan Perpustakaan – IPLM tahun 2022:

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Umum	52
	a. Perpustakaan Umum Kab/Kota	1
	b. Perpustakaan Umum Kecamatan	8
	c. Perpustakaan umum desa/kelurahan	43
2	Perpustakaan khusus	2
	a. Perpustakaan pemerintah	1
	b. Perpustakaan swasta	1
3	Perpustakaan sekolah/madrasah	401
	a. SD/MI	195
	b. SMP/MTS	90
	c. SMA/SMK/MA	71
	d. Pondok Pesantren	45
4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	3
Total:		458

Sumber: bidang perpustakaan DPK Kota Cilegon

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah SDM
1	Perpustakaan Umum (DPK Kota Cilegon)	19
2	Perpustakaan Khusus	5
3	Perpustakaan Sekolah	165
4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	5
Total		194

Sumber: bidang perpustakaan DPK Kota Cilegon

Kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 indikator subkegiatan juga capaiannya sebagai berikut:
 - Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik, dengan indikator: a) jumlah pengunjung perpustakaan yang tercapai kinerjanya 100% dimana pengunjung perpustakaan ditargetkan 90.000orang baik ke perpustakaan daerah, pusling dan juga kegiatan sosialisasi yang diadakan oleg Perpustakaan

daerah; b) Pelaksanaan pengembangan aplikasi iCilegon juga tercapainya 100%; c) terlaksananya peningkatan layanan perpustakaan dan Kerjasama perpustakaan pun terlaksana 100% dengan target 100 orang.

- Pengembangan perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan, dengan indikator Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Kelurahan yang Telah Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan target 56 perpustakaan, tercapai kinerjanya 100%.
- Pengembangan bahan Pustaka, memiliki 2 indikator yaitu terpeliharanya dan Tersedianya Data Bahan Pustaka dalam kondisi baik, rusak, dan hilang tercapai 100% dengan target 30.000 eksemplar, dan indikator Bertambahnya sarana layanan Perpustakaan tercapai 100% dengan bertambahnya 3 jenis sarana layanan perpustakaan yaitu: sarana buku cetak, sarana buku elektronik dan sarana komputer.
- Pengelolaan dan pengembangan bahan Pustaka dengan 2 indikator bertambahnya Koleksi bahan Pustaka tercapai 100% dengan target 750 eksemplar, dan terolahnya bahan Pustaka tercapai 100% dengan target 30 hari melakukan pengolahan bahan Pustaka.

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 indikator subkegiatan berikut capaiannya adalah:

- Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Bercerita, kinerjanya tercapai 100% dengan target 90 orang peserta lomba bercerita.
- Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemasyarakatan minat baca, kinerjanya tercapai 100% dengan target 550 pemasyarakatan minat baca.
- Jumlah Peserta Pemilihan Duta Baca, kinerja tercapai 100% dengan target 20 orang yang mengikuti pemilihan duta baca.

Sasaran	Indikator 19 Prioritas Daerah	Uraian Data	Kinerja
Meningkatnya Kompetensi Literasi Masyarakat	Peningkatan Literasi informasi berbasis perpustakaan	Inovasi layanan perpustakaan untuk literasi informasi	100%

Pada 19 Prioritas daerah ini , Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon masuk dalam Prioritas yang didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik. Pada Sub kegiatan merupakan kegiatan pelayanan perpustakaan secara konvensional dan digital. Perpustakaan digital melalui aplikasi iCilegon sebagai salah satu pendukung *Smart City* pada *Dimensi Smart Society*. Layanan iCilegon yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan mengunduh aplikasi perpustakaan digital tersebut melalui Hp Android, maka masyarakat dapat menikmati fitur-fitur yang ditawarkan yaitu membaca buku digital secara gratis dan dapat pula mengunggah hasil karya tulis nya dalam aplikasi iCilegon sehingga karya nya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, serta memberikan kesempatan untuk dapat dipasarkan secara nasional.

Pada Sub kegiatan ini memiliki indikator Peningkatan Literasi informasi berbasis mencapai 100% yaitu dengan mengukur jumlah pengunjung perpustakaan (baik ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Keliling, dan juga pengunjung melalui aplikasi eCilegon dan juga inisilite); terlaksananya pengembangan aplikasi iCilegon dan terlaksananya peningkatan layanan perpustakaan dan Kerjasama perpustakaan dengan serapan anggaran pada sub kegiatan ini mencapai 99,50%.

3.1.2.18 Kearsipan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.2.18a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		770.615.180	737.176.525	95,66			
Arah kebijakan : Peningkatan manajemen SDM, asset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		497.490.396	482.739.825	97,04	-pengelolaan arsip OPD belum maksimal karena arsip belum di anggap sebagai ahah yang penting -ketersediaan sarana pengelolaan arsip dan SDM pengelola arsip belum utamakan	- pembinaan secara berkesinambungan dan terus menerus - pengawasan terhadap pengelolaan arsip OPD - peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip -himbauan kepada OPD untuk menyediakan Record center sebagai tempat arsip	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan tata kelola arsip di seluruh OPD
	Indeks Kearsipan	92,0 Poin	80,3 Poin	87,28			
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		340.080.623	327.250.925	96,23	- arsip belum di anggap penting oleh OPD sehingga pengelolaan arsip belum sesuai prosedur, belum teredainya sarana-prasarana pengelolaan arsip	melakukan pembinaan dan pengawasan kearsipan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan tata kelola arsip di seluruh OPD. Melalui Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan, Bimtek pengelola arsip. - memberikan
	Bertambahnya Profesionalisme Kerja Arsiparis dan tersedianya penetapan angka Kredit Kumulatif arsiparis	17 Arsiparis	17 Arsiparis	100			
	Meningkatnya Pengetahuan SDM Pengelola Arsip	120 Orang	120 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Pembinaan Arsip dinamis dan Pengelolaan Arsip OPD	10 OPD	10 OPD	100			arahan/himbauan kepada OPD untuk menyediakan record center sebagai tempat arsip
	Pelaksanaan Pembinaan Arsip Statis Kejadian Luar Biasa (corona Virus Disease 2019/COVID - 19) Pada OPD yang Terkait	15 OPD	15 OPD	100			
	Pelaksanaan Supervisi/ Pengawasan Kearsipan	10 Laporan Audit	10 Laporan Audit	100			
	Terciptanya jadwal Rentensi Arsip sebagai Pedoman Penyusutan	2 Perwal	2 Perwal	100			
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		157.409.773	155.488.900	98,78	-srikandi merupakan aplikasi baru sehingga opd masih perlu waktu untuk beradaptasi dalam penggunaannya - infrastruktur yang belum memadai	- melakukan pembinaan dan pelatihan penggunaan aplikasi srikandi ke seluruh opd - berkordinasi dengan dinas kominfo sebagai	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait peningkatan tata kelola arsip di seluruh OPD
	Pengembangan jaringan dan aplikasi kearsipan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan manajemen SDM, asset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah							
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		273.124.784	254.436.700	93,16	- kesadaran terhadap pengelolaan, perlindungan dan pengamanan arsip OPD masih kurang - kesadaran masyarakat terhadap nilai guna arsip sejarah masih kurang.	- melakukan pendataan, penataan, dan akuisisi arsip OPD - Perlunya sosialisasi yang lebih intensif oleh DPK kepada masyarakat tentang arsip bernilai guna sejarah - Membuka layanan restorasi arsip vital (enkapsulasi, alih media) di	- pelaksanaan pendataan, penataan dan akuisisi arsip OPD, - belum terakomodirnya kegiatan penelusuran arsip sejarah

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						tempat2 umum dan langsung jemput bola ke lingkungan warga.	
	Presentase perangkat daerah yang melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur	29,41%	29,41%	100			
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		74.300.428	68.823.200	92,63	tahapan penilaian arsip kurang maksimal	-mengidentifikasi arsip- arsip yang akan dimusnahkan dengan lebih teliti	- pelaksanaan pendataan, penataan dan akuisisi arsip OPD, - belum terakomodirnya kegiatan penelusuran arsip sejarah
	Pendampingan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Tersedianya Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	100			
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		148.051.462	143.269.000	96,77	- minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip pribadi sehingga tidak menyimpan dengan baik	melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya arsip pribadi dan tata cara perlindungan arsip pribadi	- pelaksanaan pendataan, penataan dan akuisisi arsip OPD, - belum terakomodirnya kegiatan penelusuran arsip sejarah

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Restorasi Arsip Vital Warga Pra dan Paska Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100%	100,0%	100			
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		50.772.894	42.344.500	83,4	arsip dinamis opd masih belum tertata sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan	Tertatanya arsip OPD sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan	- pelaksanaan pendataan, penataan dan akuisisi arsip OPD, - belum terakomodirnya kegiatan penelusuran arsip sejarah
	Tersedianya data Arsip inaktif OPD	1 OPD	1 OPD	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks Kearsipan	Nilai yang diperoleh dari hasil audit kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Arsip Pusat (ANRI) melalui lembaga Kearsipan Daerah Provinsi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	80,30 poin (87,28%)
Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penyelamatan Arsip Sesuai Prosedur	membandingkan jumlah perangkat daerah yang telah melakukan penyelamatan arsip sesuai prosedur (10 OPD) dibandingkan dengan 34 OPD yang dibina	29,41%

Untuk Urusan Kearsipan memiliki 2 program yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu Program Pengelolaan Arsip, dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program pengelolaan arsip dengan indikator Indeks Kearsipan hanya tercapai 87.28% dari target yang ditetapkan 92 poin namun capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan 3.34 poin. Aspek yang menjadi penilaian berikut capaian yang diperoleh oleh Bidang Kearsipan Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN 2022**

NO.	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI PEROLEHAN	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN	BOBOT ASPEK	NILAI ASPEK
I.	ASPEK KEBIJAKAN	2100	1790	0	85,64	0,3	25,69
A.	PEMENUHAN	1400	1250	0,7	62,50	0	0
B.	REFORM	700	540	0,3	23,14	0	0
II.	ASPEK PEMBINAAN	1300	1040	0	84,80	0,2	16,96
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN	800	720	0,8	72,00	0	0
B.	REFORM	500	320	0,2	12,80	0	0
III.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN	1900	1480	0	74,00	0,1	7,4
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN	1800	1480	0,9	74,00	0	0
B.	REFORM	100	0	0,1	0,00	0	0
IV.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	3100	2310	0	73,25	0,2	14,65
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2200	1550	0,8	56,36	0	0
B.	REFORM	900	760	0,2	16,89	0	0
V.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	3100	2440	0	78,00	0,2	15,60
A.	KEWAJIBAN PEMENUHAN SDK	2900	2320	0,9	72,00	0	0
B.	REFORM	200	120	0,1	6,00	0	0
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ SKOR		11500	9060	80,30			
KATEGORI		A (MEMUASKAN)					

Sumber: rekapitulasi hasil pengawasan kearsipan eksternal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 oleh Lembaga Arsip Nasional RI

Tercapainya target indikator dari Program Pengelolaan Arsip, didukung dengan 2 kegiatan dengan pejabaran sebagai berikut:

- a. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota dengan indikator subkegiatan juga targetnya 1) Bertambahnya Profesionalisme Kerja Arsiparis dan tersedianya penetapan angka Kredit Kumulatif arsiparis (17 arsiparis) , 2) Meningkatnya Pengetahuan SDM Pengelola Arsip (120 orang), 3) Pelaksanaan Pembinaan Arsip dinamis dan Pengelolaan Arsip OPD (10 OPD), 4) Pelaksanaan Pembinaan Arsip Statis Kejadian Luar Biasa (corona Virus Disease 2019/COVID - 19) Pada OPD yang Terkait (15 OPD), 5) Pelaksanaan Supervisi / Pengawasan Kearsipan (10 laporan audit), 6) Terciptanya jadwal Rentensi Arsip sebagai Pedoman Penyusutan (2 perwal), 7) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Arsip (100 orang). Tiap capaian indikator subkegiatan tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

- b. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota dengan 1 indikator subkegiatan yaitu Pengembangan jaringan dan aplikasi kearsipan tercapai 100% dengan target 1 kegiatan yaitu pengembangan jaringan dan aplikasi Srikandi.
- Sedangkan untuk indikator dari program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah Presentase perangkat daerah yang melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur tercapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 29.41% dimana tahun 2022 ada penambahan 3 opd yang melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur dari 7 opd yang melakukan di tahun 2021. Kegiatan dan indikator subkegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan indikator subkegiatan berikut capaiannya 1) Pendampingan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun tercapai 100% dengan target 1 kegiatan, dan tersedianya Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor pun tercapai 100% dengan tersedianya 1 unit alat penyimpanan perlengkapan kantor.
 - b. Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota dengan indikator subkegiatan berikut capaiannya yaitu Terlaksananya Restorasi Arsip Vital Warga Pra dan Paska Bencana terlaksana 1 kegiatan dengan capaian 100%.
 - c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan dengan indikator subkegiatan Tersedianya data Arsip inaktif OPD tercapai 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Program	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	72*	71,10	98,75	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	19.511.775.030	18.090.453.685	92,72
	Indeks RB Perangkat Daerah	27*	70,50	261,11				
	Indeks Kearsipan	92	80,30	87,28	Program pengelolaan arsip	497.490.396	482.739.825	97,04
					Program perlindungan dan penyelamatan arsip	273.124.784	254.436.700	93,16
Meningkatnya Kompetensi Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	18,63	143,34	Program pembinaan perpustakaan	827.369.691	802.896.037	97,04
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL:						21.109.759.901	19.630.526.247	92,99

**masih memakai hasil capaian tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa empat program yang dilaksanakan memiliki realisasi di atas 90% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

3.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (UPTD BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU)

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.3.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		320.295.500	307.935.710	96,14			
UPTD Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Payau		320.295.500	307.935.710	96,14			
Arah kebijakan : Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		96.332.500	94.888.250	98,5			
	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan Pertahun	220,0 Ton	241,49 Ton	109,77			
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	100%	100,0%	100			
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		43.200.000	43.200.000	100			
	Tesedianya data dan informasi statistik	12 dokumen	12 dokumen	100			
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		53.132.500	51.688.250	97,28			
	Terlaksananya Pelatihan Keselamatan Dasar	25 orang	25 orang	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		193.844.000	183.598.460	94,71			
	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila	244,0 Ton	367,92 Ton	150,79			
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100%	100,0%	100			
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		150.644.000	140.398.460	93,2			
	Terlaksanya Monitoring Perikanan Budidaya	3 kali	3 kali	100			
	Tersedianya Sarana Prasarana Budidaya	1 paket	1 paket	100			
	Jumlah Pembudidaya dan Aparatur yang mengikuti Budidaya Ikan Air Tawar Bioflok dan Pemanfaatan Limbah Sampah Organik untuk Pakan Ikan dengan Proses Budidaya Lalat BSF	30 orang	30 orang	100			
	Terlaksananya Pelatihan Pembudidaya Ikan Air Tawar	30 orang	30 orang	100			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	100,0%	100			
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		43.200.000	43.200.000	100			
	Tesedianya Data dan Informasi Statistik	12 dokumen	12 dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan nilai tambah produk perikanan							
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		30.119.000	29.449.000	97,78			
	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil Perikanan	10,00%	11,00%	110			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan		30.119.000	29.449.000	97,78			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
	Terlaksananya Pelatihan Penerapan Persyaratan/Standar Pada Usaha Pengolahan Ikan	30 orang	30 orang	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

Pada program Pengelolaan Perikanan Tangkap, indikator program yang harus dicapai adalah Jumlah Produksi Penangkapan Ikan per Tahun (target 220 ton). Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengukurannya dilakukan dengan menghitung Jumlah Produksi Penangkapan Ikan Per tahun hasil survei statistik perikanan tangkap pada pangkalan nelayan, di Cilegon terdapat 7 yaitu : Ciwandan (Tanjung leneng), Pulomerak (Medaksa, Kaltek, Lebakgede, Suralaya), Grogol (Lelean), Citangkil (Tanjung Peni). Semakin besar jumlah produksi penangkapan ikan, menunjukkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang lebih baik. Jumlah Produksi Penangkapan Ikan pada tahun 2022 sebesar 241,49 ton, target pencapaian Jumlah Produksi Penangkapan Ikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 220 ton. Maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar **109,77 %**.

Perlu diketahui bahwa meskipun sepanjang tahun 2022 realisasi produksi perikanan tangkap melebihi target namun fokus pemerintah tetap ada pada upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan agar tingkat kesejahteraan tercapai. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perikanan tangkap meliputi pemenuhan peralatan, penerapan teknologi (termasuk sistem informasi), peningkatan ketrampilan dan keahlian nelayan, penyediaan lahan, pembiayaan serta upaya pendukung dalam hal fasilitas perizinan usaha perikanan tangkap.

Wilayah pesisir di kota Cilegon sesuai Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020 – 2040 bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan industri. Kemudian di dalam Raperda RZWP3K di Provinsi Banten merupakan kawasan pelabuhan. Hal ini menyebabkan ruang gerak nelayan sangat terbatas baik dalam akses melaut maupun tempat sandar perahu. Jumlah nelayan hingga tahun 2022 tercatat sejumlah 696 yang mana 90% adalah nelayan kecil dengan ukuran kapal > 5 GT berjumlah 452. Hingga saat ini Pemerintah Kota Cilegon belum mempunyai pelabuhan perikanan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan dan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan melalui PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pada pasal 187 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dibutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah Kota Cilegon yang berpihak kepada nelayan agar nelayan mempunyai daya ekonomi yang tinggi, sejalan dengan tujuan indikator sasaran seperti yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemerintah kota Cilegon harus segera membangun tempat Sentra Nelayan, karena didalamnya akan tersedia fungsi pengusahaan dan fungsi pemerintahan. Karena dengan fungsi inilah bisa menjawab salah satu dari semua persoalan input proses produktifitas bagi nelayan yang ada di Kota Cilegon. Dan pembangunan Sentra Nelayan yang dipilih berlokasi di Medaksa. Upaya inilah yang mendorong pembangunan sentra nelayan menjadi Prioritas Daerah agar pemerintah lebih focus dalam menyelesaikan persoalan usaha perikanan tangkap melalui kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Hingga akhir tahun 2022 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi existing medaksa sebagai lokasi Sentra Nelayan masih terdapat pemukiman penduduk sehingga harus ditertibkan atau direlokasi agar dapat dilakukan pembangunan sentra nelayan disamping itu juga karena alur pelayaran belum ditentukan secara lengkap oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten yang mana lembaga ini memiliki kewenangan tertinggi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Meskipun begitu pembangunan Sentra Nelayan tetap dilanjutkan pada tahun 2023 hingga tahun 2026 sesuai tahapan yang telah tertuang didalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Adapun kegiatan lain yang mendukung indikator ini adalah Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota, dan Pengembangan kapasitas nelayan kecil.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada program Pengelolaan Perikanan Budidaya, indikator program yang harus dicapai adalah Jumlah hasil Produksi Perikanan Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila per Tahun (target 244 ton). Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengukurannya dilakukan dengan menghitung Jumlah Hasil Produksi Budidaya Ikan pertahun yang diperoleh dari hasil survei statistik perikanan budidaya. Semakin besar jumlah produksi perikanan budidaya, menunjukkan keberhasilan pemberdayaan pembudidaya ikan. Jumlah hasil Produksi Perikanan Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila pada tahun 2022 sebesar 367,92 ton, target pencapaian Jumlah hasil Produksi Perikanan Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 234 ton. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar **150,79%**.

Meskipun pada tahun 2022 produksi usaha perikanan budidaya melampaui target, namun belum menjamin dapat meningkatkan pendapatan bagi pembudidaya karena biaya produksi yang tinggi dibandingkan nilai jual yang diperoleh, hal ini disebabkan karena input proses produktifitas yang masih rendah bagi. Ini yang menyebabkan usaha perikanan budidaya masih kurang diminati, meskipun kebutuhan ikan Lele dan ikan Nila masih lebih tinggi daripada *supply* yang tersedia. Oleh karena itu fokus pemerintah kota Cilegon tetap ada pada upaya untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan agar tingkat kesejahteraan tercapai sesuai RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perikanan budidaya meliputi pemenuhan peralatan, penerapan teknologi budidaya perikanan, peningkatan ketrampilan dan keahlian pembudidaya, penyediaan lahan, pembiayaan, penyediaan bibit. Diperlukan inovasi teknologi pangan ikan agar bisa mengurangi biaya produksi usaha perikanan budidaya.

Kota Cilegon adalah wilayah perkotaan yang memiliki sedikit lahan usaha budidaya perikanan sehingga usaha ini diharapkan tidak saja hanya sebatas produksi ikan lele dan ikan nila saja tetapi pemerintah perlu mendorong kepada usaha budidaya ikan yang memiliki ekonomis tinggi seperti misalnya ikan hias, penjualan bibit ikan, dan sebagainya.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, indikator program yang harus dicapai adalah Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil Perikanan (target 10%).

Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan atau pengolahan ikan. Semakin besar kapasitas hasil perikanan menunjukkan adanya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan atau bertambahnya jenis produk yang dihasilkan (diversifikasi) hasil perikanan yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Cara perhitungan indikator ini adalah :

Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil Perikanan	=	$\frac{\text{pendapatan pengolahan hasil perikanan tahun } n - \text{pendapatan pengolahan hasil perikanan tahun } (n-1)}{\text{pendapatan pengolahan hasil perikanan tahun } (n-1)}$	X 100 %
	=	$\frac{424.700.000 - 382.250.000}{328.250.000}$	X 100 %
	=	11 %	

Persentase peningkatan kapasitas produksi hasil perikanan. Indikator ini untuk menggambarkan peningkatan kapasitas produksi selama satu tahun. Pengukurannya adalah dengan cara pendataan statistik secara berkala setiap bulan maka diperoleh peningkatan kapasitas produksi hasil perikanan sebesar 11% pada tahun 2022. Target peningkatan kapasitas produksi sebagaimana RPJMD adalah sebesar 10%. Maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 110% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program masih menemui kendala seperti : 1. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan; 2. Terkendala dalam ketersediaan bahan baku ikan; 3. Terkendala permodalan dan teknik pengemasan yang masih bersifat tradisional; 4. Belum adanya analisis pasar hasil perikanan sehingga perhitungan nilai hasil perikanan belum mencapai validitas yang baik. Selanjutnya upaya Pemecahan Masalah dengan melakukan : 1. Pembinaan dan penyuluhan pengolahan hasil perikanan agar dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada; 2. Membangun mitra dengan distributor atau pengepul ikan agar ketersediaan bahan baku ikan tetap ada; 3. Adanya pelatihan pengolahan hasil perikanan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.

3.1.3.2 Pariwisata

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.3.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		200.000.000	192.349.500	96,17			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif							
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		200.000.000	192.349.500	96,17			
	Persentase realisasi destinasi wisata	0,00%	200,00%	100			
	Jumlah kunjungan wisatawan	214335,0 Orang	1393511,0 Orang	650,16			
	Persentase SDM Kepariwisataan ekonomi kreatif yang Bersertifikat	0,00%	0,00%	0			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	100,0%	100			
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		200.000.000	192.349.500	96,17			
	Jumlah Peserta Pembinaan Usaha Pariwisata Jumlah Peserta Pemilihan dan Pembinaan Paduan Suara Kota Cilegon	200 Orang	200 Orang	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada Tahun 2022 , Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon memiliki target anggaran Rp. 200.000.000,- dan terealisasi Rp. 192.349.500,- dengan capaian Kinerja Keuangan sebesar 96,17%.

Pada program ini terdapat 3 (Tiga) indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu Persentase realisasi destinasi wisata, Jumlah kunjungan wisatan, Persentase SDM kepariwisataan ekonomi kreatif yang bersertifikat. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon pada Tahun 2022 berkinerja baik tercermin dari capaian indikator kinerja program terdapat 1 (Satu) indikator melampaui target sebesar 650,16%, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Persentase realisasi destinasi wisata

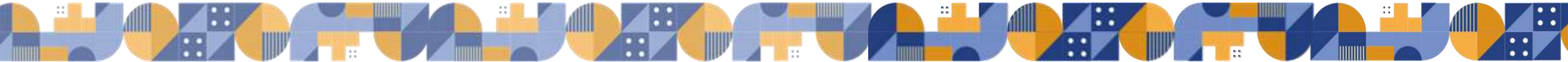
Pada Tahun 2022, Persentase realisasi destinasi wisata semula merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Destinasi Wisata , yang kemudian seiring terjadinya Perubahan SOTK Dinas Pemuda Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata maka Persentase realisasi destinasi wisata menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Cilegon, dengan perubahan target dari semula yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon sebesar 17% menjadi 0,00% dikarenakan sub kegiatan pendukung capaian Indikator tidak memperoleh anggaran karena kebijakan TAPD untuk membekukan seluruh sisa anggaran sub kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon, dan pada periode APBD Perubahan usulan penambahan anggaran sub kegiatan pendukung Indikator Persentase realisasi destinasi wisata tidak disetujui.

2. Jumlah kunjungan wisatawan

Pada Tahun 2022, dalam hal kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal, nusantara maupun wisatawan mancanegara telah melebihi target yang telah direncanakan yaitu kenaikan jumlah kunjungan sebesar 5% pertahun. Target jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2022 sebanyak 214.335 orang dan terealisasi 1.393.511 orang. Pendataan kunjungan wisatawan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)
1.	Wisata Hotel	279.311
2.	Wisata Tirta	427.012
3.	Wisata Bahari	7.966
4.	Wisata Bioskop	659.285
5.	Taman Bermain	19.937
Total		1.393.511

3. Persentase SDM Kepariwisataan ekonomi kreatif



Pada Tahun 2022, Persentase SDM kepariwisataan ekonomi kreatif yang bersertifikat semula merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Destinasi Wisata , yang kemudian seiring terjadinya Perubahan SOTK Dinas Pemuda Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata maka Persentase SDM kepariwisataan ekonomi kreatif yang bersertifikat menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Cilegon, dengan perubahan target dari semula yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon sebesar 19,3% menjadi 0,00% dikarenakan sub kegiatan pendukung capaian Indikator tidak memperoleh anggaran karena kebijakan TAPD untuk membekukan seluruh sisa anggaran sub kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon.

4. PP 12- Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah

KP 12.3 Penataan destinasi wisata

Pencapaian pelaksanaan Program Prioritas Penataan destinasi wisata berkonsep operasional berupa pembangunan destinasi wisata melalui pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output sub kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan indikator program Persentase realisasi destinasi wisata. Namun pada Tahun 2022, Persentase realisasi destinasi wisata semula merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Destinasi Wisata , yang kemudian seiring terjadinya Perubahan SOTK Dinas Pemuda Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata maka Persentase realisasi destinasi wisata menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Cilegon, dengan perubahan target dari semula yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon sebesar 17% menjadi 0,00% dikarenakan sub kegiatan pendukung capaian Indikator tidak memperoleh anggaran karena kebijakan TAPD untuk membekukan seluruh sisa anggaran sub kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Cilegon, dan pada periode APBD Perubahan usulan penambahan anggaran sub kegiatan pendukung Indikator Persentase realisasi destinasi wisata tidak disetujui.

3.1.3.3 Pertanian

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN, DAN UPT KAWASAN PERTANIAN TERPADU

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.3.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		4.729.688.464	3.616.267.748	76,46			
Arah kebijakan : Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		2.280.923.192	2.116.555.580	92,79	- ada nya Wabah PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) Pada Ruminansia Besar dan Kecil	- Pembatasan Layanan IB dan PKB sehingga Mengurangi Potensi Penyebaran Penyakit PMK	
	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia	10903,0 ekor	10911,0 ekor	100,07			
	Persentase Ketercapaian Produktivitas Rata-Rata 4 Komoditas Pertanian (Padi, Jagung Pulut, Melon, Kacang Tanah)	100,00%	114,09%	114,09			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	100,0%	100			
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1.356.880.026	1.253.625.697	92,39	- Adanya perbedaan harga di DPA dengan harga di pasar - Adanya himbauan pemakaian TKDN - Anjuran pengadaan belanja secara e-purchasing	- untuk mengatasi perbedaan harga, perlu adanya penyesuaian harga dengan membuat nota dinas - berupaya mencari nilai TKDN tiap-tiap barang yang diadakan - merubah dokumen perencanaan pengadaan barang (DPP)	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						untuk merubah metode pengadaan barang.	
	Jumlah Luasan Budidaya Komoditas Padi	25 Hektar	25 Hektar	100			
	Jumlah Luasan Budidaya Komoditas Melon	5 Hektar	5 Hektar	100			
	Jumlah Luasan Budidaya Komoditas Cabe	1 Hektar	1 Hektar	100			
	Jumlah Bibit	1700 Batang	1700 Batang	100			
	Jumlah Luasan Budidaya Komoditas Jagung Pulut	10 Hektar	10 Hektar	100			
	Jumlah Luasan Budidaya Komoditas Kacang Tanah	10 Hektar	10 Hektar	100			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		439.999.921	415.580.564	94,45	- Ada kenaikan harga - Ada Himbauan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 %	- Membuat perubahan harga dan volume barang dengan membuat nota dinas - Mencari nilai TKDN untuk setiap barang serta melampirkan surat persetujuan dari PA jika nilai TKDN 25%	
	Luas Lahan Inovasi/Teknologi Rekayasa Bentuk Buah Melon	5 Hektar	5 Hektar	100			
	Luas Lahan Inovasi/Teknologi Budidaya Jagung Pulut	10 Hektar	10 Hektar	100			
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		134.004.000	126.331.545	94,27	- Adanya himbauan pemakaian TKDN - Anjuran pengadaan belanja secara e-purchasing - Perubahan Organisasi, hilang nya bidang peternakan dan kesehatan hewan	- berupaya mencari nilai TKDN tiap-tiap barang yang diadakan - merubah dokumen perencanaan pengadaan barang (DPP) untuk merubah metode pengadaan barang. - berupaya opimalkan dan menyelesaikan kegiatan dengan personil yang tersisa	
	jumlah straw IB (Inseminasi Buatan)	100 Buah	100 Buah	100			
	jumlah ternak yang dilayani	60 Ekor	60 Ekor	100			
	Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan	13 Orang	13 Orang	100			
	Prasarana dan sarana penunjang IB dan PKB	1 Jenis	1 Jenis	100			
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%	100,0%	100			
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		200.037.685	185.432.274	92,7	- ada nya Wabah PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) Pada Ruminansia Besar dan Kecil - Adanya himbauan pemakaian TKDN - Anjuran pengadaan belanja secara e-purchasing - Perubahan Organisasi, hilang nya bidang peternakan dan kesehatan hewan	- Mengadakan bibit dan indukan pada daerah bebas PMK disertakan surat-surat pendukung - berupaya mencari nilai TKDN tiap-tiap barang yang diadakan - merubah dokumen perencanaan pengadaan barang (DPP) untuk merubah metode pengadaan barang. - berupaya opimalkan dan menyelesaikan kegiatan dengan personil yang tersisa	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penyediaan Bibit Ternak Pemacek dan Indukan Penganti	5 Ekor	5 Ekor	100			
	Jumlah Prasarana yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		150.001.560	135.585.500	90,39	- kondisi pandemi covid masih memengaruhi jadwal distribusi pakan	- menrencanakan dan berkoordinasi dengan pihak penyedia	
	penyediaan pakan konsentrat	7872 Kg	7872 Kg	100			
	penyediaan Bahan pakan	54800 Kg	54800 Kg	100			
Arah kebijakan : Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		1.541.097.397	693.737.628	45,02	- Pembangunan Pagar pada Kawasan Pertanian Terpadu tidak bisa direalisasikan pada ABT 2022 dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan. - 2 Bidang Tanah KPT belum bisa tersertifikasi karna proses pensertifikasian yang masih berlangsung, untuk satu bidang tanah menunggu hasil cek lokasi dan satu bidang lainnya dalam tahap pengecekan dokumen di BPN.	- Pembangunan Pagar pada Kawasan Pertanian Terpadu dianggarkan kembali pada APBD tahun 2023. - Sertifikasi Tanah KPT dianggarkan kembali pada ABT 2023.	
	Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun	7,0 Jenis	4,0 Jenis	57,14			
	Luasan Lahan LP2B yang Dikelola	25,00%	68,80%	275,2			
Pengembangan Prasarana Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	50,0%	50			
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan		49.980.000	0	0	Untuk kegiatan sosialisasi LP2B belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum terperinci data	Melaksanakan identifikasi tambahan terkait kepemilikan lahan/tanah	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B					kepemilikan lahan/tanah sampai nama pemilik atas lahan - lahan yang termasuk kedalam LP2B berdasarkan hasil kajian pemetaan LP2B.	tersebut dengan dinas/badan yang terkait.	
	Jumlah Sosialisasi Lahan LP2B yang Dilakukan	4 Kali	0 Kali	0			
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		99.370.800	96.771.800	97,38	Adanya Surat Keputusan Kementerian ATR/BPN mengenai Lahan Sawah yang Dilindungi yang dimana data tersebut berbeda dengan data Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon Tahun 2020-2040 setelah adanya kesepakatan pimpinan dengan dinas terkait	Menggunakan data Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon Tahun 2020-2040	
	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Prasarana Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	66,7%	66,67			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		1.391.746.597	596.965.828	42,89	- Pembangunan Pagar pada Kawasan Pertanian Terpadu tidak bisa direalisasikan pada ABT 2022 dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan. - 2 Bidang Tanah KPT belum bisa tersertifikasi karna proses pensertifikasian yang masih berlangsung, untuk satu bidang tanah	- Pembangunan Pagar pada Kawasan Pertanian Terpadu dianggarkan kembali pada APBD tahun 2023. - Sertifikasi Tanah KPT dianggarkan kembali pada ABT 2023.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					menunggu hasil cek lokasi dan satu bidang lainnya dalam tahap pengecekan dokumen di BPN.		
	Terbangunnya Pagar Kawasan Pertanian Terpadu	1972 m	0 m	0			
	Tersedianya Dokumen Reviu DED Irigasi Air Tanah Dalam KPT	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Tersedianya Dokumen Reviu DED Pemasangan Listrik KPT	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Tersedianya Site Plan Samandaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Tersedianya Stake Out Badan Jalan KPT	1500 m	1500 m	100			
	Tersertifikasinya Tanah KPT	2 Dokumen	0 Dokumen	0			
Arah kebijakan : Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner							
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		609.507.207	514.800.746	84,46	- Ada nya Wabah PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) Pada Ruminansia Besar dan Kecil	- Melakukan Vaksinasi, Pengobatan suportif, dan sosialisasi PMK	
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	31400,0 ekor	78965,0 ekor	251,48			
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	70,0 unit	135,0 unit	192,86			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		374.591.799	300.569.120	80,24			
	Jumlah Surveillance Penyakit Hewan dan Zoonosis	200 Ekor	200 Ekor	100			
	Penyediaan Alkes Hewan	1 Paket	1 Paket	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penyediaan Obat-obat Hewan	1 Paket	1 Paket	100			
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		29.915.174	26.660.000	89,12			
	jumlah orang teredukasi	30 orang	30 orang	100			
	jumlah sarana dan prasarana veteriner yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100			
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		155.000.015	139.342.303	89,9			
	Jumlah Pengujian Sampel BAH (Bahan Asal Hewan)	80 sampel	80 sampel	100			
	Jumlah Pelayanan Medik Veteriner	1000 ekor	1000 ekor	100			
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100,0%	100			
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		50.000.219	48.229.323	96,46			
	Jumlah Orang Yang Teredukasi	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Total Unit yang Mendapat pendampingan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Unit	2 Unit	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pencegahan dan penanggulangan bencana pangan dan pertanian							
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		268.164.718	263.387.794	98,22			
	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman	100,00%	100,00%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		268.164.718	263.387.794	98,22	Adanya penyesuaian peraturan pengadaan barang/jasa harus menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 25% dan pengadaan barang/jasa harus menggunakan metode e purchasing atau toko daring online (M biz Market)	Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan tersebut	
	Jumlah Peserta Kegiatan	420 Orang	420 Orang	100			
	Jumlah Pestisida, PPC dan ZPT yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Satuan Barang	10 Unit	10 Unit	100			
Arah kebijakan : Peningkatan pengelolaan usaha peternakan							
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		29.995.950	27.786.000	92,63	- ada nya Wabah PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) Pada Ruminansia Besar dan Kecil	- KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) Pelaku Usaha Peternakan	
	Jumlah Pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1,0 Unit	5,0 Unit	500			
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan		29.995.950	27.786.000	92,63	- Perubahan Organisasi, hilang nya bidang peternakan dan kesehatan hewan	- berupaya opimalkan dan menyelesaikan kegiatan dengan personil yang tersisa	
	Jumlah Total Unit yang mendapat pengawasan Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 Unit	3 Unit	100			
UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan		209.975.000	205.906.817	98,06			
Arah kebijakan : Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		209.975.000	205.906.817	98,06			
	Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun	7,0 Jenis	4,0 Jenis	57,14			
Pembangunan Prasarana Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100,0%	100			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		209.975.000	205.906.817	98,06			
	Terlaksananya Rehabilitasi Sanitasi di Gedung Abatoar (Ruang Bersih, Ruang Kotor)	1 Unit	1 Unit	100			
	Terlaksananya Dokumen Jasa Konsultasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
UPTD Kawasan Pertanian Terpadu		60.999.758	57.907.528	94,93			
Arah kebijakan : Peningkatan penyuluhan dan pengembangan iklim inovasi teknologi pertanian yang berkelanjutan							
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		60.999.758	57.907.528	94,93			
	Jumlah Penyuluh/ Kelompok Tani/Petani/Masyarakat yang Berpartisipasi	9,0 Petani/Orang	9,0 Petani/Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	100,0%	100			
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		60.999.758	57.907.528	94,93			
	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyuluh	9 orang	9 orang	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Kelompok	8 kecamatan	8 kecamatan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Pada urusan pertanian terdapat 6 (enam) program yakni: 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; 5. Program Perizinan Usaha Pertanian dan 6. Program Penyuluhan Pertanian.

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Pada program ini ada 2 (dua) indikator program yang harus dicapai, yakni: Jumlah Populasi Ternak Ruminansia (target 10.903 ekor) dan Persentase Ketercapaian Produktivitas Rata-Rata 4 Komoditas Pertanian (Padi, Jagung Pulut, Melon, Kacang Tanah) (target 100%)

a. Jumlah Populasi Ternak Ruminansia (target 10.903 ekor)

Indikator ini untuk menggambarkan jumlah populasi ternak ruminansia di kota Cilegon. Hewan ruminansia atau hewan memamah biak merupakan kelompok hewan mamalia yang mencerna makanannya dalam dua langkah meliputi: sapi, kerbau, kambing, domba. Pengukurannya dilakukan dengan mencatat jumlah populasi pada bulan Desember di tahun n. Semakin besar Jumlah Populasi Ternak Ruminansia maka semakin besar kontribusi pemenuhan ketersediaan protein hewani yang dilakukan oleh daerah sendiri.

Realisasi jumlah populasi ternak ruminansia tahun 2022 sejumlah 10.911 ekor dengan target jumlah populasi ternak ruminansia sebagaimana RPJMD adalah sebesar 10.903 ekor. Maka capaian kinerja jumlah populasi ternak ruminansia tahun 2022 adalah sebesar **100,07 %**. Perlu diketahui bahwa ketersediaan protein hewani yang berasal dari hewan lokal masih rendah untuk memenuhi seluruh kebutuhan bagi masyarakat kota Cilegon.

Hal ini berarti walaupun telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam mencapai target seperti: pada tahun 2022 masih adanya pandemi covid-19 sehingga menghambat upaya penyuluhan kepada peternak untuk inseminasi buatan (IB) sehingga tingkat kehamilan ternak ruminansia tidak dapat ditingkatkan. Dan secara umum permasalahan yang terjadi pada usaha budidaya peternakan adalah adanya keterbatasan lahan karena mencari pakan hijau sulit untuk pakan sedangkan 70% pakan adalah hijauan, keterbatasan pemahaman teknologi

budidaya peternakan, keterbatasan ketrampilan dan keahlian (SDM) peternak, dukungan kelembagaan peternak yang sedikit, masih lemahnya akses permodalan yakni KUR, serta masih kurangnya sarana dan prasarana. Hal-hal ini yang menyebabkan biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan nilai jual yang didapat sehingga usaha budidaya peternakan masih kurang diminati. Untuk itu ke depan pemerintah perlu fokus mendorong peningkatan usaha budidaya peternakan pada jenis ternak yang tidak memerlukan input proses produksi yang banyak misalnya pengembangan budidaya ternak domba dan kambing, penyediaan bibit ternak unggul dan sebagainya. Begitu pentingnya maka upaya ini masuk ke dalam prioritas daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil peternakan (pertanian).

b. Persentase Ketercapaian Produktivitas Rata-Rata 4 Komoditas Pertanian (Padi, Jagung Pulut, Melon, Kacang Tanah) (target 100%)

Indikator ini menggambarkan produktivitas pertanian meliputi komoditas padi, jagung pulut, melon dan kacang tanah. Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung rata-rata pencapaian produktivitas padi, produktifitas jagung pulut, produktivitas melon dan produktivitas kacang tanah. Semakin besar ketercapaian produktivitas pertanian, menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, dengan demikian juga turut meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Perhitungan Persentase Produktivitas Padi :

Persentase Produktivitas padi	=	$\frac{\text{Produktivitas padi}}{\text{Target Produktivitas padi}} \times 100 \%$
	=	$\frac{5,92}{5,8} \times 100 \%$
	=	102,07 %

Target produktivitas padi tahun 2022 Sesuai RPJMD adalah sebesar 5,8 ton GKG/hektar, dan Pada tahun 2022 produktivitas padi yang dihasilkan sebesar 5,92 ton GKG/hektar maka Persentase Produktivitas padi = 102,07 %

Perhitungan Persentase Produktivitas Jagung Pulut :

Persentase Produktivitas Jagung Pulut	=	$\frac{\text{Produktivitas Jagung Pulut}}{\text{Target Produktivitas Jagung Pulut}} \times 100 \%$
	=	$\frac{5,33}{5} \times 100 \%$

$$= 106,60 \%$$

Target produktivitas jagung pulut tahun 2022 Sesuai RPJMD adalah sebesar 5 ton tongkol segar/hektar, dan Pada tahun 2022 produktivitas jagung pulut yang dihasilkan sebesar 5,33 ton tongkol segar/hektar maka Persentase Produktivitas jagung pulut sebesar 106,60%

Perhitungan Persentase Produktivitas Melon :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Produktivitas Melon} &= \frac{\text{Produktivitas Melon}}{\text{Target Produktivitas Melon}} \times 100 \% \\ &= \frac{12,15}{8} \times 100 \% \\ &= 151,88\% \end{aligned}$$

Target produktivitas melon tahun 2022 Sesuai RPJMD adalah sebesar 8 ton buah segar/hektar, dan Pada tahun 2022 produktivitas melon yang dihasilkan sebesar 12,15 ton buah segar/hektar maka Persentase Produktivitas melon = 151,88%

Perhitungan Persentase Produktivitas Kacang Tanah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Produktivitas Kacang Tanah} &= \frac{\text{Produktivitas Kacang Tanah}}{\text{Target Produktivitas Kacang Tanah}} \times 100 \% \\ &= \frac{1,15}{1,2} \times 100 \% \\ &= 95,83\% \end{aligned}$$

Target produktivitas kacang tanah tahun 2022 Sesuai RPJMD adalah sebesar 1,2 ton polong kering/hektar, dan Pada tahun 2022 produktivitas kacang tanah yang dihasilkan sebesar 1,15 ton polong kering/hektar maka Persentase Produktivitas kacang tanah sebesar 95,83%.

Persentase Ketercapaian Produktivitas Rata-Rata 4 Komoditas Pertanian (Padi, Jagung Pulut, Melon, Kacang Tanah) dapat dihitung = $(102,07\% + 106,60\% + 151,88\% + 95,83\%) / 4 = 114,09\%$.

Persentase Ketercapaian Produktivitas Rata-Rata 4 Komoditas Pertanian (Padi, Jagung Pulut, Melon, Kacang Tanah) tahun 2022 sebesar 114,09%, target pencapaian Persentase Ketercapaian Produktivitas Rata-Rata 4 Komoditas Pertanian (Padi, Jagung Pulut, Melon, Kacang Tanah) yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. Maka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 114,09%.

Walaupun realisasi melampaui target namun usaha budidaya pertanian belum mencukupi kebutuhan pangan lokal. Kebutuhan energi dan protein masih banyak disupply dari luar daerah Kota Cilegon. Hal ini disebabkan karena input proses produktivitas yang masih rendah meliputi : peralatan pertanian yang belum lengkap, ketrampilan dan keahlian petani (SDM) masih rendah, harga pupuk yang tinggi sehingga tidak terjangkau, teknologi budidaya pertanian yang belum berkembang terutama pada kondisi di Cilegon yang mempunyai keterbatasan sumber daya air untuk pertanian, keterbatasan lahan pertanian yang mana tiap tahun alih fungsi lahan pertanian cenderung terjadi, lahan yang dikuasai seorang petani sebagian besar kurang dari 2 Ha, status buruh tani mendominasi, bibit pertanian yang mahal, kurang memiliki akses pembiayaan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan biaya produksi usaha budidaya pertanian menjadi tinggi dibandingkan dengan perolehan nilai jualnya, sehingga usaha ini sangat kurang diminati oleh masyarakat kota Cilegon.

Upaya kedepan pemerintah kota Cilegon harus fokus kepada peningkatan pendapatan para pembudidaya pertanian meliputi : kebijakan pemanfaatan lahan-lahan terbiar agar sebagian petani tidak menjadi petani buruh dan menciptakan kesempatan kerja baru, pembuatan dan penerapan teknologi budidaya pertanian melalui kerjasama penelitian, pemanfaatan pupuk organik dan subsidi. Perlu juga mendorong upaya peningkatan nilai tambah pertanian terutama pada upaya pasca panen (*on farm*) berupa pengolahan primer *processing* agar hasil pertanian dalam kondisi baik dan sesuai untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahan, serta upaya pemasaran dan distribusi hasil pertanian. Jika ini bisa dilakukan maka akan dapat menggerakkan ekonomi daerah. Begitu pentingnya maka upaya ini masuk ke dalam prioritas daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdapat 2 (dua) indikator yakni : Luasan Lahan LP2B yang Dikelola (target 25%) dan Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun (target 7 jenis).

- a. Luasan Lahan LP2B yang Dikelola (target 25%), Indikator ini dihitung dengan cara membagi Luasan Lahan LP2B yang sudah MoU dgn masyarakat dibagi dengan luas lahan LP2B dalam RTRW x 100%. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Semakin besar Luasan Lahan LP2B yang sudah MoU dgn masyarakat maka semakin jelas penetapan lahan LP2B dalam RTRW dan semakin terkelolanya lahan LP2B. Pada tahun 2022 data LP2B yang dikelola sebesar 205,42 Ha dari luas LP2B sebesar 298,59 Ha sehingga persentase Luasan Lahan LP2B yang Dikelola = $205,42/298,59 \times 100\% = 68,80\%$

- b. Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun (target 7 jenis). Indikator ini untuk menggambarkan Penyediaan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Peternakan. Prasarana Pertanian dan peternakan adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian dan peternakan. Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung jumlah Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun. Semakin banyak jenis prasarana pertanian dan peternakan yang terbangun menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha pertanian dan peternakan.

Program ini difokuskan untuk pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) yang terdapat di Kelurahan Bulakan. Diharapkan pembangunan KPT ini dapat menjawab persoalan mengenai belum sempurnanya inovasi teknologi rekayasa budidaya pertanian, peternakan, perikanan; inovasi teknologi pengolahan pasca panen (*on farm*) sehingga pembangunan KPT menjadi prioritas daerah yang mana akan difungsikan sebagai :

- a. Penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi.
- b. Tempat pelatihan, pemagangan, diseminasi teknologi, serta pengembangan kemitraan agribisnis dengan swasta.

Bilamana fungsi KPT dapat berjalan diharapkan dapat meningkatkan usaha budidaya pertanian. Kebutuhan dan tahapan pembangunan KPT telah tertuang didalam RPJMD kota Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu : akses jalan, pemagaran, pematangan lahan area pertanian, peternakan dan perikanan, prasarana(jaringan listrik, air dan jalan), sarana (kantor KPT, Gudang peralatan (pertanian, peternakan , perikanan), kandang dan sebagainya.

Adapun sarana dan prasarana lainnya yang menunjang wisata untuk pelaksanaannya dibutuhkan skenario kerjasama dengan beberapa pelaku usaha, seperti : *foodcourt*, tempat pemancingan, area *family gathering*, *play ground*, *amphiteater*, gedung serbaguna, area olahan makanan segar, dll

Realisasi Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun tahun 2022 adalah sejumlah 4 (empat) jenis, meliputi: 1. Site Plan Samandaran; 2. Stake Out Badan Jalan KPT; 3. Dokumen Reviu DED Pemasangan Listrik KPT; dan 4. Dokumen Reviu DED Irigasi Air Tanah Dalam KPT. Target Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun sebagaimana RPJMD ada 7 (tujuh) jenis, sehingga realisasi capaian Jenis Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Terbangun sebesar $4/7 * 100\% = 57,14\%$. Pembangunan Pagar pada Kawasan Pertanian Terpadu tidak bisa direalisasikan pada ABT 2022 dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, 2 Bidang Tanah KPT belum bisa tersertifikasi karna proses pensertifikasian yang masih berlangsung, untuk satu bidang tanah menunggu hasil cek lokasi dan satu bidang lainnya dalam tahap pengecekan dokumen di BPN.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdapat 2 (dua) indikator program yaitu : Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan (target 31.400 ekor) dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (target 70 unit)

- a. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan (target 31.400 ekor)

Indikator ini untuk menggambarkan jumlah pelayanan kesehatan hewan di kota Cilegon. Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengawasan, pengobatan dan pencatatan penyakit hewan. Target sasaran pelayanan kesehatan hewan adalah ternak masyarakat, kelompok ternak, kemitraan dan hewan kesayangan. Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung jumlah hewan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi penanganan terhadap penyakit ND,

Rabies serta penyakit hewan dan zoonosis pada tahun n. Semakin banyak jumlah pelayanan kesehatan hewan maka menunjukkan semakin terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis.

Realisasi jumlah pelayanan kesehatan hewan tahun 2022 sejumlah 78.965 ekor dengan target jumlah pelayanan kesehatan hewan sebagaimana RPJMD adalah sebesar 31.400 ekor. Maka capaian kinerja jumlah pelayanan kesehatan hewan tahun 2022 adalah sebesar 251,48%. Capaian kinerja jumlah pelayanan Kesehatan hewan mengalami kenaikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Terjadinya kenaikan persentase tersebut karena adanya bantuan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat, sehingga pelayanan kesehatan hewan juga meningkat. Penyediaan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan, pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan, pengawasan obat hewan, surveillance penyakit menular strategis, pemeriksaan hewan kurban, serta pelayanan Kesehatan hewan meliputi vaksinasi rabies, vaksinasi ND (Newcastle Disease), pemeriksaan dan pengobatan helminthiasis (kecacingan), surveilans penyakit hewan menular strategis (PHMS), pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pengobatan Kesehatan hewan baik pelayanan pasif di puskesmas, atau pelayanan aktif di lapangan dengan mobil puskesmas keliling, sosialisasi kesehatan hewan, dan media massa lokal, serta peran serta masyarakat didalam pengendalian penyakit zoonosis, yaitu adanya kader Kesehatan hewan yang dilibatkan dari 8 kecamatan.

Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam mencapai target seperti : masih adanya pandemi covid-19 sehingga menghambat upaya pelayanan kesehatan hewan, Pelayanan puskesmas masih terbatas sebab belum terbentuk UPT Puskesmas sehingga untuk pembiayaan di puskesmas banyak anggaran yang tidak tercover, karena belum UPT maka pelayanannya masih terbatas, SDM masih banyak yang honorer, kelembagaan Puskesmas, adanya faktor resiko tertular penyakit, sementara petugas tidak terlindungi, berupa APD, vaksin, insentif petugas untuk pendukung kesehatan.

b. Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (target 70 unit)

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kesmavet meliputi penjaminan higienis dan sanitasi serta penjaminan produk hewan. Pengukurannya dilakukan dengan cara menghitung jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (pelayanan usaha/kegiatan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pembinaan serta pelayanan kesmavet) pada tahun n. Semakin banyak jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner menunjukkan semakin terjamin pangan asal hewan sebagaimana prinsip ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

Realisasi jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2022 sejumlah 135 unit usaha meliputi pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, pembinaan, dan pendampingan. Unit usaha yang dilayani berupa tempat produksi pangan asal hewan (penggilingan daging, pengolahan daging, pengolahan telur, pengolahan susu), produksi produk hewan non pangan (penyamakan kulit), Rumah Potong Hewan (Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Tempat Pemotongan Unggas), Tempat Pengumpulan dan Penjualan (pasar tradisional, pasar modern/ swalayan, retail, restoran, Gudang berpendingin/*cold storage*) dengan target jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana RPJMD adalah sebesar 70 unit. Maka capaian kinerja jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2022 adalah sebesar **192,86%**.

Hal ini berarti telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang diperoleh melalui berbagai upaya seperti : pemantauan unit usaha produk asal hewan; pengambilan dan pengujian sampel produk asal hewan; Sosialisasi higienis dan sanitasi kepada pedagang pasar; sosialisasi penyembelihan hewan kurban; Pemantauan Penyembelihan Hewan Qurban; dan pendampingan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Namun demikian sebenarnya di Kota Cilegon masih terdapat 786 unit usaha/kegiatan kesehatan masyarakat veteriner yang belum mendapatkan pelayanan meliputi pembinaan serta pelayanan kesmavet.

Terdapat permasalahan-permasalahan dalam mencapai target indikator ini seperti: masih rendahnya pemahaman pelaku usaha / pedagang dalam penanganan daging beku, yakni pentingnya rantai dingin (*cold chain*) dalam menjaga kualitas daging. Abainya rantai dingin ini menyebabkan daging cepat rusak atau busuk yang tentu saja beresiko tinggi menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Masalah selanjutnya adalah Pasar tradisional belum mengelompokkan/ memusatkan lokasi berdasarkan jenis komoditas serta pedagang yang tidak mempunyai kios tetap menyulitkan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengujian. Masalah terakhir adalah menyangkut Perizinan dan lokasi bahwa rata-rata pelaku usaha Tempat Pemotongan Unggas (TPU) tidak mempunyai perizinan serta masih berada di lokasi pemukiman padat. Kedepan pemerintah kota harus focus kepada upaya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner seperti tersebut di atas, mengingat pasokan pangan yang berasal dari luar kota Cilegon mencapai 88,8% termasuk didalamnya bahan pangan asal hewan. Dibutuhkan penjaminan higienis dan sanitasi serta penjaminan produk hewan.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman dengan target 100%.

Pengukurannya dilakukan dengan cara :

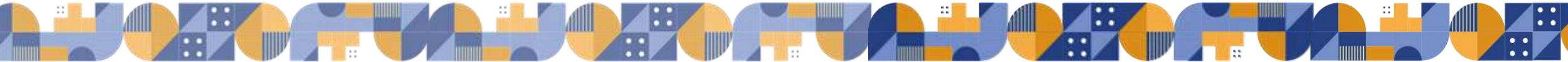
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman	=	$\frac{\text{Jumlah tindakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian}}{\text{Jumlah bencana pertanian}} \times 100 \%$
	=	$\frac{18}{18} \times 100 \%$
	=	100 %

Dampak bencana pada masyarakat pertanian berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usaha tani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan. Semakin besar persentase penanggulangan bencana menunjukkan semakin baiknya kemampuan pemerintah dalam menanggulangi bencana pertanian.

Realisasi Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman sejumlah 100%, dimana terdapat 18 (delapan belas) laporan serangan hama dan penyakit dari Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) meliputi: pengendalian serangan hama ulat, patek, keong, dan kutu kebul pada tanaman padi, melon, dan jagung, pencegahan penyakit blast, penyemprotan Zat Pengatur Tumbuh, serta penyemprotan pupuk pelengkap cair buah dan daun untuk perkembangan tanaman. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat laporan serangan hama dan penyakit yang menimbulkan gagal panen. Target Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dari Serangan Hama Penyakit Tanaman sebagaimana RPJMD adalah sebesar 100%. Maka capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 100%.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Pada program Perizinan Usaha Pertanian terdapat indikator Jumlah Pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Target = 1 unit). Semakin banyak Pelaku Usaha yang didampingi dan dibina sampai diterbitkannya NKV maka



semakin terjaminnya mutu produk pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Dihitung dengan cara menghitung Jumlah Pelaku Usaha yang didampingi dan dibina sampai diterbitkannya NKV (nomor kontrol veteriner).

Realisasi Jumlah Pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan pada tahun 2022 sejumlah 5 unit yakni 1. Hypermart Cilegon, NKV ritel unit usaha produk hewan; 2. Hero Cilegon, NKV ritel unit usaha produk hewan; 3. Transmart Cilegon, NKV ritel unit usaha produk hewan; 4. CV. Grace, NKV pencucian sarang burung walet; 5. Kedai Fresh Mamah Imah, NKV ritel unit usaha produk hewan. Dengan target Jumlah Pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan sebagaimana RPJMD adalah sebesar 1 Unit. Maka capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar **500%**.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Pada Program Penyuluhan Pertanian terdapat indikator program yaitu jumlah penyuluh/ kelompok tani/petani/masyarakat yang berpartisipasi (target 109 orang penyuluh). Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang budidaya pertanian. Pengukurannya dilakukan dengan menghitung jumlah penyuluh/kelompok tani/petani/masyarakat yang berpartisipasi. Semakin banyak jumlah Penyuluh/Kelompok Tani/Petani/ Masyarakat yang berpartisipasi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap budidaya pertanian. Realisasi jumlah penyuluh/kelompok tani/petani/masyarakat yang berpartisipasi sejumlah 109 orang penyuluh dengan target jumlah penyuluh/kelompok tani/petani/masyarakat yang berpartisipasi sebagaimana RPJMD adalah sebesar 109 orang penyuluh. Maka capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar **100%**.

Perlu peningkatan kapasitas para penyuluh terhadap penerapan inovasi teknologi pertanian (kerjasama penelitian bersama) dan penggunaan metode edukasi serta sosialisasi kepada para petani agar mau menerapkan inovasi teknologi pertanian tersebut agar diperoleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian.

3.1.3.4 Perdagangan

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.3.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		23.248.971.067	18.995.582.998	81,71			
Sasaran : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.824.388.593	13.813.845.427	87,29			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	82,3 Nilai	82,11 Nilai	99,77			
	Indeks RB Perangkat Daerah	54,0 Poin	82,01 Poin	151,87			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	6,00%	24,31%	405,17			
Arah kebijakan : Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sistem informasi, pola insentif disinsentif/sanksi, kapasitas dan kualitas PPPNS penataan Ruang serta peran masyarakat dalam penataan ruang							
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		309.949.477	252.632.460	81,51			
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	57,00%	86,00%	150,88			
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		149.965.998	137.558.744	91,73			
	Jumlah sosialisasi regulasi tanda daftar gudang melalui media massa	2 Media	2 Media	100			
	Tersedianya database gudang	1 Laporan	1 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersediannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait sanksi administratif kepada pemilik atau pengelola gudang	1 Regulasi	1 Regulasi	100			
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	73,3%	73,33			
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		49.995.627	49.625.704	99,26	Penyedia tidak memiliki persyaratan sertifikat standar	Melakukan pemilihan penyedia ulang karena keterbatasan penyedia yang memiliki sertifikat standar	
	Pemeriksaan barang berbahaya	50 Sampel	30 Sampel	60			
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		59.992.884	59.858.612	99,78	Terbatasnya penyedia/CV yang memiliki sertifikat standar/sudah terverifikasi di Kota Cilegon	Sosialisasi bagi pengusaha/pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikat standar/terverifikasi	
	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan barang berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	30 Pengawasan	26 Pengawasan	86,67			
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)						
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		49.994.968	5.589.400	11,18	Kerjasama perdagangan antara RCEP dan IK-CEPA disetujui untuk diimplementasikan pada akhir tahun 2022, sehingga tidak cukup waktu untuk mensosialisasikan kepada eksportir	Akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	440 SKA	440 SKA	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas sarana perdagangan							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		5.301.565.644	3.333.110.650	62,87			
	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	20,00%	37,00%	185			
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	18,8%	18,75			
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		1.418.233.232	106.943.532	7,54	Status lahan belum di miliki oleh pemkot, tidak bisa dilakukan pemasangan paving blok jalan masuk Pasar Kecamatan Grogol	Melakukan proses serah terima lahan dari pengembang ataupun dari masyarakat	Percepatan tindak lanjut program revitalisasi Pasar mengarah pada pasar tradisional Modern.
	Normalisasi Saluran Pasar Baru Cilegon	480 Org/hr	480 Org/hr	100			
	Pemasangan Paving Blok Jalan Masuk Pasar Kecamatan Grogol	2000 m2	0 m2	0			
	Pembangunan Gudang Penyimpanan Pasar Blok F	30 m2	0 m2	0			
	Pemeliharaan Los Basah Pasar	40 m2	0 m2	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penyediaan Perlengkapan Kemanan Pasar Baru Kota Cilegon	120 pcs	120 pcs	100			
	Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan	40 pcs	40 pcs	100			
	Pembuatan Sumur Dalam dan Jaringan	1 Paket	0 Paket	0			
	Pemeliharaan Drainase Kios Basah	1 Paket	0 Paket	0			
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		445.943.500	156.934.206	35,19	Pada proses pengadaan KBLI penyedia tidak sesuai	Memilih penyedia yang sesuai dengan KBLI yang dibutuhkan	
	Jumlah kebijakan retribusi/e-retribusi pasar rakyat	2 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah fasilitasi terkait retribusi/e-retribusi pasar rakyat dan pedagang kaki lima	32 Unit	0 Unit	0			
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	90,0%	90			
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2.817.888.916	2.797.045.516	99,26			
	Penertiban Pedagang Pasar Baru (Emprakan) (Pasar Baru Kota Cilegon)	1 Paket/Pekerjaan	1 Paket/Pekerjaan	100			
	Tertatanya PKL di Pasar Baru Kota Cilegon (Kranggot)	1 Lokasi	1 Lokasi	100			
	Jumlah Petugas Keamanan pasar Baru Kota Cilegon	41 Orang	41 Orang	100			
	Jumlah Petugs Kebersihan Pasar Baru Merak	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Petugas Kebersihan Pasar Blok F	10 Orang	10 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Penertiban Pedagang Pasar Baru Cilegon	1 Lokasi	1 Lokasi	100			
	Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan Cilegon Night Market (CNM)	3 Jenis	3 Jenis	100			
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		619.499.996	272.187.396	43,94	Butuh proses yang sangat panjang dalam melakukan Kerjasama Pasar (KSP) sampai tahapan pemilihan calon investor	Akan di tindaklanjuti di tahun berikutnya	1. Tindak lanjut program peningkatan pendapatan melalui retribusi dan penagihan terkait tunggakan dalam proses perdagangan. 2. Melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Pasar secara Intensif
	Jumlah Pasar Rakyat yang dikerjasamakan Pengelolaannya	1 Pasar Rakyat	0 Pasar Rakyat	0			
	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	2 Pasar	100			
	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Sarana Distribusi	40 Peserta	40 Peserta	100			
	Terlaksananya Pendampingan Hukum Terhadap Para Pedagang Tentang Angsuran Kios, Los	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Tersosialisasinya Kewajiban Pedagang Formal (Pasar blok F 327 Pedagang, Kranggol 1805 Pedagang, Pasar Merak 500 Pedagang, Cikerei 14 Pedagang, Cigading 74 Pedagang terkait Retribusi, Sewa Lahan, dan Angsuran Kios	5 Pasar	5 Pasar	100			
Arah kebijakan : Menjamin stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		564.358.767	471.237.393	83,5			
	Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok	6,00%	9,80%	163,33			
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		24.986.760	15.010.520	60,07	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor pemerintah	Melakukan perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan dan tempat kegiatan dengan maksimal	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan agen dan pasar rakyat	2 Rapat	2 Rapat	100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		24.986.760	17.035.520	68,18	Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor pemerintah	melakukan perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan dan tempat kegiatan dengan maksimal	
	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk peningkatan aksesibilitas dengan agen dan pasar rakyat	2 Rapat	2 Rapat	100			
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		49.960.384	47.472.324	95,02			
	Jumlah rencana dalam pemenuhan kebutuhan barang pokok (Prognosa kebutuhan barang pokok)	2 Dokumen	2 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		59.992.230	47.345.428	78,92	Honor-honor kegiatan ada yang tidak terserap	akan dilakukan pengoptimalan dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai cash budget	
	Jumlah barang pokok yang di pantau harga dan stok barang pada distributor	24 Pemantauan	24 Pemantauan	100			
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		139.955.740	107.719.520	76,97	Honor-honor kegiatan ada yang tidak terserap	akan dilakukan pengoptimalan dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai cash budget	
	Jumlah barang pokok yang di pantau harga dan stok barang pada pasar rakyat	40 Varian	40 Varian	100			
	Pemukhtahiran Sistem Informasi Harga (SHAGON)	1 System	1 System	100			
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		251.339.501	227.216.689	90,4			Peningkatan Pengendalian Ketersediaan Bahan Pokok
	Jumlah Pelaksanaan Bazar Murah	3 Pelaksanaan	3 Pelaksanaan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	4 Pelaksanaan	4 Pelaksanaan	100			
	Jumlah Kegiatan Bazar Kejujuran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Pupuk dan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		13.137.392	9.437.392	71,84	Pelaksanaan kegiatan rapat dilakukan di kantor pemerintah	melakukan perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan dan tempat kegiatan dengan maksimal	
	Jumlah pengawasan distribusi penyalur pupuk dan pestisida bersubsidi	3 pengawasan	3 pengawasan	100			
Sasaran : Menjamin stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting							
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		456.043.097	385.965.828	84,63			
	Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor	29,00%	26,00%	89,66			
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		196.126.784	173.457.184	88,44			
	Jumlah peserta bimtek untuk pelaku usaha berorientasi ekspor	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	100			
Pameran Dagang Lokal		149.994.124	123.203.644	82,14			1. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Pelatihan dan fasilitasi Pemasaran Produk dalam Negeri.

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah penyertaan pameran dagang lokal TK Provinsi	1 Event	1 Event	100			
Peningkatan Citra Produk Ekspor		49.969.909	41.635.320	83,32			
	Tersosialisasinya produk unggulan ekspor melalui media informasi	5 Produk	5 Produk	100			
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		59.952.280	47.669.680	79,51	Efisiensi anggaran dari biaya sewa gedung	Tidak dianggarkan pada tahun berikutnya untuk sewa gedung	
	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi pelaku ekspor	30 Peserta	30 Peserta	100			
Arah kebijakan : Menjamin stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting							
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		792.665.489	738.791.240	93,2			
	Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	91,00%	100,00%	109,89			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	96,7%	96,67			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		554.986.985	534.769.968	96,36			
	Jumlah alat UTTP yang di tera/ tera ulang dalam tahun berjalan di pasar rakyat	650 UTTP	650 UTTP	100			
	Jumlah jenis alat standar kemetrologian ke direktorat metrologi yang terverifikasi (UPT Metrologi)	28 Jenis Alat	28 Jenis Alat	100			
	Jumlah jenis alat standar kemetrologian yang terverifikasi (UPT Metrologi)	23 Jenis Alat	23 Jenis Alat	100			
	Jumlah UTTP yang wajib di tera atau tera ulang bagi	1000 UTTP	1000 UTTP	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	pelaku usaha di kota Cilegon (UPT Metrologi)						
	Pendataan/ Pemetaan dan pemukhtahiran data potensi UTPP dan wajib tera/ tera ulang (UPT Metrologi)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Tera Tera Ulang dan Timbangan Kejujuran	1 Pelaksanaan	1 Pelaksanaan	100			
	Jumlah Sistem Informasi Aplikasi Tera, Tera Ulang/ Metrologi Legal	1 Sistem	1 Sistem	100			
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		237.678.504	204.021.272	85,84	Terbatasnya penyedia/CV yang mempunyai sertifikat standar/sudah terverifikasi di Kota Cilegon	Sosialisasi bagi pengusaha/pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikat standar/sudah terverifikasi	
	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	50 Sample	40 Sample	80			
	Jumlah UTPP wajib tera atau tera ulang dalam pengawasan metrologi legal	225 UTPP	225 UTPP	100			
	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Metrologi Legal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
UPTD Pasar Baru Merak		709.970.032	657.582.064	92,62			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		709.970.032	657.582.064	92,62			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	82,3 Nilai	82,11 Nilai	99,77			
	Indeks RB Perangkat Daerah	54,0 Poin	82,01 Poin	151,87			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	6,00%	24,31%	405,17			
UPTD Pasar Baru Cilegon		1.667.570.352	1.543.681.286	92,57			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.667.570.352	1.543.681.286	92,57			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	82,3 Nilai	82,11 Nilai	99,77			
	Indeks RB Perangkat Daerah	54,0 Poin	82,01 Poin	151,87			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	6,00%	24,31%	405,17			
UPTD Pasar Blok F Cilegon		1.278.604.578	1.228.657.937	96,09			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.278.604.578	1.228.657.937	96,09			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	82,3 Nilai	82,11 Nilai	99,77			
	Indeks RB Perangkat Daerah	54,0 Poin	28,01 Poin	51,87			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	6,00%	24,31%	405,17			
UPTD Pelayanan Metrologi Legal		468.272.651	358.131.809	76,48			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		468.272.651	358.131.809	76,48			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	82,3 Nilai	82,11 Nilai	99,77			
	Indeks RB Perangkat Daerah	54,0 Poin	82,01 Poin	151,87			
	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	6,00%	24,31%	405,17			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Bidang Urusan Perdagangan memiliki 5 (Lima) Indikator Program Teknis yang harus dicapai yaitu :

1. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** -- Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (target : 57%)

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** -- Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar (target : 20%)
3. **Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** -- Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok (target : <6%)
4. **Program Pengembangan Ekspor** -- Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor (target : 29%)
5. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** -- Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku (target : 91%)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian Indikator dimaksud, sebagai berikut :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Setiap pelaku usaha harus memiliki izin berusaha sesuai dengan sektornya dan melakukan pendaftaran izinnya melalui perizinan online SIPECI sampai dengan bulan Juli 2022 dan mulai bulan Agustus 2022 diberlakukan perizinan online berbasis resiko (OSS RBA). Adapun dari hasil metadata, Pelaku Usaha dalam hal ini meliputi pelaku usaha disektor perdagangan yaitu toko swalayan dan yang memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten/Kota, serta melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wajib daftar perusahaan skala Kabupaten/Kota. Pada program ini terdapat 1 (satu) indikator program yaitu Realisasi indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan, yang dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh legalitas sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang ada di kota cilegon}} \times 100\%$$

Pelaku Usaha disektor perdagangan yang memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan, sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	SEKTOR PERDAGANGAN	JUMLAH SEKTOR PERDAGANGAN	PELAKU USAHA YANG MEMILIKI IZIN	PELAKU USAHA YANG BELUM MEMILIKI IZIN
1	Pusat Perbelanjaan	5	5	0
2	Supermarket	10	6	4
3	Department Store	5	3	2
4	Minimarket	163	163	0
5	Tanda Daftar Gudang	70	40	30
	Jumlah	253	217	36

Sumber Data : Disperindag Kota Cilegon

Maka didapat realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pembilang : Jumlah pelaku usaha yang memperoleh legalitas sesuai dengan ketentuan sampai dengan tahun 2022: 217 Pelaku Usaha Penyebut : Jumlah pelaku usaha yang ada di kota cilegon: 253 Pelaku Usaha *pelaku usaha disektor perdagangan (toko swalayan dan TDG)	86,00%

Sehingga capaian realisasi dari indikator program ini sebesar 86,00% atau mencapai 150,48% dari yang ditargetkan. Capaian indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan kegiatan berikut:

- a. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan pemenuhan output pada sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan pemenuhan output pada sub kegiatan :
 - a. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - b. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- c. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal), dengan pemenuhan output pada sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Menurut regulasi yang ada pasar rakyat menjadi salah satu sarana distribusi perdagangan yang menjadi fokus pemerintah baik pusat maupun di daerah. Adapun yang dimaksud Pasar Rakyat menurut Permendag Nomor 21 tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang di tata, di bangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Kota Cilegon telah memiliki 8 pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan, akan tetapi kondisi untuk setiap pasar di masing-masing kecamatan tersebut masih harus dipenuhi terkait kebutuhan dengan sarana/prasarananya yang sesuai dengan standar. Adapun yang dimaksud standar menurut Permendag Nomor 21 tahun 2022 adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta pengembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya. Persyaratan standar untuk pasar rakyat terdapat pada SNI 8152:2015 (SNI pasar rakyat) yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Dalam SNI Pasar Rakyat tersebut telah ditetapkan tiga persyaratan yang harus dimiliki oleh pasar rakyat, yaitu a) persyaratan umum meliputi syarat kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; b) persyaratan teknis meliputi pengaturan tentang zonasi, ruang dagang, koridor, pos ukur ulang dan sidang tera; c) persyaratan pengelolaan terkait dengan manajemen pengelolaan pasar secara profesional. Persyaratan SNI pasar rakyat terbagi ke dalam 4 tipe pasar sesuai dengan jumlah pedagang terdaftar yaitu Tipe I (>750 pedagang), Tipe II (501-750 pedagang), Tipe III (250-500 pedagang) dan Tipe IV (<250 pedagang). Dari 8 pasar rakyat yang ada di Kota Cilegon masih belum memenuhi kriteria SNI secara keseluruhan sesuai dengan tipe pasar, sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

NO	KRITERIA
1	Jumlah Pedagang
2	Luas Kios
3	Jumlah Pos Ukur Ulang
4	Zonasi
5	Area Parkir
6	Area Bongkar Muat
7	Akses Keluar Masuk Kendaraan Terpisah
8	Lebar koridor/ gangway
9	Kantor Pengelola
10	Lokasi Toilet & Kamar Mandi (terpisah antara pria dan wanita)
11	Jumlah toilet pada satu lokasi
12	Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah / lemari pendingin
13	Tempat cuci
14	Ruang Menyusui
15	CCTV
16	Ruang peribadatan
17	Ruang bersama
18	Pos kesehatan
19	Pos keamanan
20	Area merokok
21	Ruang
22	Area
23	Tinggi anak tangga (untuk pasar dengan 2 lantai)
24	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan

NO	KRITERIA
25	Akses untuk kursi roda
26	Jalur evakuasi
27	Tabung pemadam kebakaran
28	Hidran air
29	Pengujian kualitas air bersih
30	Pengujian limbah cair
31	Ketersediaan tempat sampah
32	Alat angkut sampah
33	Tempat pembuangan sampah sementara
34	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
35	Sarana telekomunikasi
36	Informasi identitas pedagang
37	Informasi kisaran harga
38	Informasi zonasi pasar
39	Prosedur Kerja
40	Struktur Pengelola
41	Jumlah pengelola
42	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang
43	Program pengembangan dan aktivasi pasar
44	Program pemberdayaan komunitas pasar

Sumber Data : SNI 8152:2015 (SNI Pasar Rakyat)

Pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat 1 (satu) indikator program yaitu **Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar** dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah presentase capaian terpenuhi SNI pasar rakyat}}{\text{Jumlah pasar rakyat yang ada}}$$

Pada tahun 2022, terkait sarana prasarana pasar rakyat dalam rangka memenuhi 44 persyaratan SNI pasar rakyat untuk setiap pasar di Kota Cilegon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon melaksanakan penyediaan sarana prasana untuk pasar rakyat yang ada sehingga didapatkan hasil indikator untuk pasar rakyat sebagaimana tabel di bawah ini :

NAMA PASAR	TIPE PASAR	STANDAR SNI	TERPENUNI	PERSENTASE CAPAIAN
Pasar Blok F	I	44	21	47,73%
Pasar Baru Merak	III	44	24	54,55%
Pasar Baru Cilegon	I	44	22	50%
Pasar Wisata Cigading	IV	44	22	50%
Pasar kecamatan Cibeber	IV	44	13	29,55%
Pasar Kecamatan Citangkil	IV	44	12	27,27%
Pasar Kecamatan Grogol	IV	44	8	18,18%
Pasar Tegal Bunder	IV	44	8	18,18%
Jumlah Persentase Capaian SNI				295,45%

Sumber Data : Disperindag Kota Cilegon

Maka didapat realisasi pada tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi
Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	<u>Pembilang :</u> Jumlah persentase capaian terpenuhinya SNI pasar rakyat : 295,45% <u>Penyebut :</u> Jumlah pasar rakyat yang ada : 8 Pasar	37%

Capaian realisasi indikator ini sebesar 37% dari yang ditargetkan, didukung melalui pelaksanaan kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan pemenuhan output pada sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya, dengan pemenuhan output pada sub kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam mendukung Program Prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD, maka terdapat 1 (satu) Program Prioritas yaitu Peningkatan inovasi pendapatan daerah dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yang ada di DISPERINDAG Kota Cilegon pada program ini, yaitu :

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Pencapaian Tahun 2022
PP-9 : Peningkatan inovasi pendapatan daerah	KP-2 : Perluasan elektronifikasi layanan pajak dan retribusi	- Penyusunan kebijakan retribusi/e-retribusi pasar rakyat baru dianggarkan pada tahun 2022 (tidak terealisasi)
	KP-3 : Kerjasama pemerintah swasta dalam pengelolaan pasar rakyat	- Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan pasar rakyat baru dianggarkan pada tahun 2022 (tidak terealisasi)

3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang termasuk dalam kategori bahan pokok adalah beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.

Dalam rangka mengendalikan dan mengatur ketersediaan pangan dan bahan pokok, Disperindag Kota Cilegon fokus melakukan pengawasan terhadap harga 11 barang kebutuhan pokok tersebut di atas baik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko modern dan sarana perdagangan lainnya. Hal ini untuk menghindari kenaikan harga dan menjaga ketersediaan 11 barang kebutuhan pokok di tingkat pedagang.

Pada Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdapat 1 (satu) indikator program yaitu **Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok** dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah koefisien variasi antar waktu 11 komoditas}}{\text{Jumlah komoditas}}$$

Dimana

$$\text{Koefisien variasi antar waktu} = \frac{\text{standar deviasi harga komoditas}}{\text{rata - rata harga komoditas}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Disperindag Kota Cilegon telah melakukan pengawasan terhadap 11 kebutuhan barang pokok sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	KOMODITI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH	RATA-RATA	STANDAR DEVIASI	KOEF.VARIASI ANTAR WAKTU
1	- Cabe	Rp 54.524	Rp 47.444	Rp 59.524	Rp 37.900	Rp 46.250	Rp 99.286	Rp 86.190	Rp 52.571	Rp 61.143	Rp 46.800	Rp 36.591	Rp 49.100	Rp 677.323	Rp 56.444	Rp 18.684,936	33,104
2	- Bawang Merah	Rp 24.952	Rp 34.889	Rp 31.476	Rp 32.300	Rp 42.063	Rp 52.254	Rp 54.000	Rp 32.190	Rp 31.476	Rp 33.350	Rp 31.455	Rp 32.550	Rp 432.955	Rp 36.080	Rp 8.826,048	24,463
3	- Minyak Goreng	Rp 19.095	Rp 17.167	Rp 19.905	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 22.476	Rp 19.524	Rp 16.286	Rp 15.857	Rp 13.950	Rp 14.182	Rp 15.000	Rp 221.442	Rp 18.454	Rp 3.629,688	19,669
4	- Telur Ayam Ras	Rp 23.476	Rp 19.944	Rp 23.857	Rp 24.350	Rp 26.625	Rp 28.619	Rp 27.714	Rp 28.762	Rp 26.714	Rp 25.750	Rp 27.409	Rp 29.550	Rp 312.770	Rp 26.064	Rp 2.751,653	10,557

NO	KOMODITI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH	RATA-RATA	STANDAR DEVIASI	KOEF.VARIASI ANTAR WAKTU
5	- Daging Ayam Ras	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 38.381	Rp 38.350	Rp 38.000	Rp 39.905	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 39.900	Rp 39.818	Rp 38.200	Rp 468.554	Rp 39.046	Rp 939,934	2,407
6	- Kacang Kedelai Impor	Rp 12.000	Rp 12.111	Rp 13.429	Rp 15.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.333	Rp 15.000	Rp 15.864	Rp 16.000	Rp 169.737	Rp 14.145	Rp 1.251,483	8,848
7	- Ikan Segar	Rp 28.000	Rp 30.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 28.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 350.000	Rp 29.167	Rp 1.029,857	3,531
8	- Daging Sapi murni	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 130.000	Rp 145.000	Rp 141.563	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 135.238	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.500	Rp 1.602.301	Rp 133.525	Rp 8.186,880	6,131
9	- Tepung Terigu	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.190	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 11.429	Rp 11.950	Rp 12.045	Rp 12.050	Rp 135.664	Rp 11.305	Rp 447,053	3,954
10	- Gula Pasir	Rp 13.310	Rp 14.556	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 13.476	Rp 13.643	Rp 13.325	Rp 13.568	Rp 14.000	Rp 165.878	Rp 13.823	Rp 363,602	2,630
11	- Beras	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 12.275	Rp 12.500	Rp 12.905	Rp 13.000	Rp 12.786	Rp 12.000	Rp 12.175	Rp 12.614	Rp 12.800	Rp 150.555	Rp 12.546	Rp 298,389	2,378
Jumlah koefisien variasi antar waktu																	117,673
Rata-rata																	10,698

Sumber Data : Disperindag Kota Cilegon (2022)

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa ada 6 komoditas yang koefisien antar waktunya melebihi dari 6% yaitu cabe, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, kacang kedelai impor dan daging sapi murni.

Maka didapat realisasi indikator program ini pada tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi
Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok	Pembilang : Jumlah Koefisien variasi antar waktu 11 komoditas Realisasi 2022 : 117,673 % Penyebut : Jumlah komoditas : 11	10,69%

Sehingga realisasi indikator Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok melebihi dari yang ditargetkan sebesar <6%. Capaian tersebut menunjukkan masih tingginya fluktuasi harga pada 11 komoditi barang kebutuhan pokok karena kenaikan bahan bakar minyak di tahun 2022. Indikator Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok melalui pelaksanaan dan pemenuhan pada kegiatan berikut :

- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output pada sub kegiatan :
 - a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat
 - c. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan ouput pada sub kegiatan :
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan ouput pada sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi

4. Program Pengembangan Ekspor

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor, pembinaan diberikan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor dengan mengutamakan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Pada tahun 2022 Dinas perindustrian dan perdagangan sudah melakukan pelatihan/ bimtek ekspor bagi 40 pelaku usaha yang memiliki produk unggulan berpotensi ekspor.

Pada Program Pengembangan Ekspor terdapat 1 (satu) indikator program yaitu **Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor**, yang dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi ekspor}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor}} \times 100\%$$

Maka didapat realisasi indikator program ini pada tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi
Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor	Pembilang : Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi ekspor sebanyak 40 pelaku usaha Penyebut : Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor sebanyak 155 pelaku usaha	26%

Capaian realisasi indikator ini sebesar 26% dari yang ditargetkan, didukung melalui pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan output pada sub kegiatan berikut :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - b. Pameran Dagang Lokal

- c. Peningkatan Citra Produk Ekspor
- d. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Dalam mendukung Program Prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD, maka terdapat 1 (satu) Program Prioritas yaitu Fasilitasi Perekonomian Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan 1 (satu) Kegiatan Prioritas yang ada di DISPERINDAG Kota Cilegon pada program ini, yaitu :

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Pencapaian Tahun 2022
PP-7 : Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mikro kecil	KP-2 : Fasilitasi ekspor produk unggulan	- Pelatihan/ bimtek ekspor bagi 40 pelaku usaha yang memiliki produk unggulan berpotensi ekspor

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Permendag No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya mengemukakan bahwa :

- 1) Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- 2) Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- 3) Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 4) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- 5) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- 6) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdapat 1 (satu) indikator program yaitu **Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku**, yang dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah objek UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kota Cilegon}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon telah melakukan alat UTTP sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	JENIS UTTP	JUMLAH KESELURUHAN ALAT UTTP
1	Industri	Timbangan Elektronik	820
		Timbangan Mekanik	6
		Mass Flow	62
		Perlengkapannya	853
2	SPBU	Pompa Ukur BBM	228
3	Pasar	Timbangan Elektronik	303
		Timbangan Mekanik	660
		Perlengkapannya	1.523
4	Pelaku Usaha	Timbangan Elektronik	283
		Timbangan Mekanik	295
		Perlengkapannya	213
	Jumlah		5.246

Sumber Data : Disperindag Kota Cilegon

maka didapat realisasi indikator program ini pada tahun 2022 :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi
Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Pembilang : Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku Realisasi 2022 : 5.246 alat UTTP Penyebut : Jumlah objek UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kota Cilegon : 5.246 alat UTTP	100%

Sehingga capaian indikator Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku sebesar 100% dari yang ditargetkan. Capaian indikator Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku didukung melalui pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan output pada sub kegiatan berikut:

- 1) Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang
 - b. Pengawasan/ penyuluhan metrologi legal

3.1.3.5 Perindustrian

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.3.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perindustrian

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		2.817.281.442	2.112.777.275	74,99			
Arah kebijakan : Peningkatan perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi industri nasional							
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		2.469.194.289	1.845.680.988	74,75			
	Persentase terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	100,00%	85,00%	85			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	103,4%	103,43			
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		185.654.504	84.159.000	45,33	Perubahan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang awalnya ke Jawa Timur menjadi ke Jawa Barat	Penyesuaian kembali uraian belanja sesuai kebutuhan pada kegiatan selanjutnya/berikutnya	
	Jumlah RAPERDA RPIK	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		479.327.159	394.835.175	82,37			Menambah kuota dan Memberikan pelatihan tentang produk pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang di kenakan SNI wajib
	Jumlah Peserta Pelatihan Batik	25 Peserta	25 Peserta	100			
	Jumlah Peserta RAKOR ISAK	30 Peserta	60 Peserta	200			
	jumlah peserta pelatihan sertifikasi Halal	20 IKM	20 IKM	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	jumlah sertifikasi SNI logam	1 Paket	1 Paket	100			
	jumlah peserta rakor logam	50 Peserta	50 Peserta	100			
	jumlah sertifikat halal	26 Sertifikat	26 Sertifikat	100			
	jumlah peserta pelatihan kimia	25 Peserta	25 Peserta	100			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1.184.212.626	949.676.513	80,19	perubahan rincian anggaran belanja	penambahan anggaran	Memberikan bantuan peralatan penunjang produksi bagi IKM sesuai dengan regulasi.
	Jumlah pengrajin yang memperoleh penyediaan IPTEK pembuatan alat berbahan LOGAM sebagai pendorong penunjang pemasaran	20 Pengrajin	20 Pengrajin	100			
	Jumlah fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Logam, Kimia dan elektronika dan alat angkut (Sosialisasi pentaan kawasan Lio Bata dan Genteng	40 Peserta	40 Peserta	100			
	Pembangunan DED	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah fasilitasi Mesin/Peralatan berteknologi bagi Industri Kecil Menengah	36 unit	35 unit	97,22			
	Jumlah Fasilitasi Sentra/Kelompok ISAK	2 sentra/kelompok	2 sentra/kelompok	100			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		620.000.000	417.010.300	67,26	satu kegiatan tidak terlaksana karena perencanaan kegiatan tidak maksimal	membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan lebih matang	Memberikan fasilitasi sertifikasi SNI.
	Terlaksananya Sosialisasi Kemitraan Industri Besar dengan IKM	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Legalisasi Merek Industri Kecil Kerajinan	20 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	200			
	jumlah sertifikasi SNI bagi IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture	2 Sertifikat	2 Sertifikat	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah peserta Sosialisasi Kemitraan Industri dengan IKM	100 Peserta	100 Peserta	100			
	jumlah peserta pelatihan SNI bagi IKM pangan, barang dari kayu dan furniture	20 IKM	20 IKM	100			
	Legalisasi hak cipta bagi pelaku usaha industri logam	20 Hak Cipta	20 Hak Cipta	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi industri nasional							
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		216.490.187	147.980.267	68,35			
	Presentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah	50,00%	42,60%	85,2			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	75,0%	75			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		115.864.779	60.390.059	52,12	kendala teknis administrasi	menyeleksi pihak ke 3 dengan syarat sesuai ketentuan yang berlaku	
	jumlah IKM yang mendaftarkan SIINAS terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha OSS	50 IKM	50 IKM	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Peserta Sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian	40 Peserta	40 Peserta	100			
	jumlah juknis tentang perijinan berusaha sesuai tingkat risiko sektor perindustrian	1 dokumen	0 dokumen	0			
	jumlah standar operasional prosedur (sop) tentang perijinan berusaha sesuai tingkat resiko usaha	4 SOP	0 SOP	0			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		100.625.408	87.590.208	87,05			
	jumlah pengawasan industri dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian sesuai kewenangan berdasarkan Permenperin No. 25 Tahun 2021	20 Pengawasan	20 Pengawasan	100			
	jumlah peserta sosialisasi	20 Peserta	20 Peserta	100			
	jumlah sosialisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi industri nasional							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		131.596.966	119.116.020	90,52			
	Persentase IKM yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	5,00%	10,10%	202			
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		131.596.966	119.116.020	90,52			
	jumlah sistem informasi data industri cilegon (SIDIC)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
	Pameran Penyelenggaraan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) Industri Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Bidang urusan Perindustrian memiliki 1 (satu) indikator program teknis yang harus dicapai yaitu :

- 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
Persentase terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri (target : 100%)
- 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**
Presentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah (target : 50%)
- 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**
Persentase industri kecil menengah yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (target : 5%)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (RPIK), yang sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), dengan memperhatikan :

- 1) Potensi sumber daya industri daerah
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pada sektor industri, pembagian urusan pemerintahan memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah.

Pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdapat 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase Terelesaiannya Perencanaan dan Pembangunan Industri, yang dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi perencanaan dan pembangunan industri pada tahun } n}{\text{Target perencanaan dan pembangunan industri pada tahun } n} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, target perencanaan dan pembangunan industri telah terealisasi, yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota : 1 dokumen
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri : 7 kegiatan
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri : 5 kegiatan
- 4) Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat : 5 kegiatan

Didapat realisasi indikator di atas sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi
Persentase Terelesaiannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembilang : Realisasi perencanaan dan pembangunan industri pada tahun n Realisasi 2022 : 1 dokumen dan 17 kegiatan Penyebut : Target perencanaan dan pembangunan industri pada tahun n Target 2022 : 1 dokumen dan 19 kegiatan	90%

Sehingga capaian indikator program Persentase Terelesaiannya Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar 90% dari yang ditargetkan. Capaian indikator Persentase terelesaiannya Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung melalui pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kegiatan output pada sub kegiatan berikut :

- 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dalam mendukung Program Prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD, maka terdapat 1 (satu) Program Prioritas yaitu Fasilitas Perekonomian Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan 1 (satu) Kegiatan Prioritas yang ada di Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon yaitu :



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Pencapaian Tahun 2022
PP-7 : Fasilitasi perekonomian pelaku usaha mikro kecil	KP-2 : Fasilitasi ekspor produk unggulan	- Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri - Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri, pelibatan Dinas Perindustrian untuk melakukan pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam
- 2) Manajemen air
- 3) Data industri dan data kawasan industri
- 4) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri
- 5) Keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan

Sedangkan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemantauan
- 2) Audit
- 3) Inspeksi
- 4) Surveilans dan/atau
- 5) Verifikasi teknis

Pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah, yang dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan}}{\text{Jumlah industri yang terdata dalam database industri kewenangan kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, target Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota telah terealisasi, yaitu :

Didapat realisasi indikator di atas sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi

Persentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah	Pembilang : Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan sebanyak 72 industri Penyebut : Jumlah industri yang terdata dalam database industri kewenangan Kabupaten/ Kota sebanyak 169 industri	42,60%

Sehingga capaian indikator program Persentase hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah sebesar 42,60% dari yang ditargetkan. Capaian indikator Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Industri Kecil Menengah didukung melalui pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan output pada sub kegiatan berikut :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri

Pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdapat 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase Persentase industri kecil menengah yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), yang dihitung dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah yang terdata dalam SIINAS}}{\text{Jumlah industri yang terdata dalam database industri kewenangan kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Adapun Industri Kecil dan Menengah yang terdata dalam SIINAS sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NAMA PERUSAHAAN	SKALA USAHA	BIDANG USAHA
1	PR Toni Firmansah Setia Budi	Kecil	32903 (Furniture dari Limbah Drum)
2	PT Ikat Erat Berkah	Kecil	14301 (Pakaian jadi rajutan dan boneka untuk properti fotografi newborn dan kostum harian bayi usia 0-1 tahun)
3	PT Mahes Jaya Steel	Kecil	46631 (Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas,
4	CV Wan Kreasi	Kecil	14111 (Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil)
5	CV Naher Alfatih	Kecil	14120 (Penjahitan dan pembuatan pakaian)

NO	NAMA PERUSAHAAN	SKALA USAHA	BIDANG USAHA
6	CV Bintang Pasundan	Kecil	14120 (Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan)
7	PT Albaba Inti Group	Kecil	
8	CV Kamila Mandiri	Kecil	14111 (Konveksi),14120 (Konveksi)
9	PT Vugu Teknik Group	Kecil	14111 (INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL)
10	CV Berkah Sinergi Utama	Kecil	14120 (penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan)
11	CV Azri Jaya	Kecil	14120 (konveksi),14111 (konveksi)
12	CV Rahmatullah	Kecil	14111 (INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL)
13	CV Sinar Gemilang	Kecil	14111 (Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil),14131 (industri perlengkapan pakaian dari tekstil),14120 (penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan)
14	PR Setia Usaha Mandiri	Kecil	14131 (industri perlengkapan pakaian dari tekstil)
15	PT Sinar Jaya Alqarni	Kecil	14120 (penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan),14111 (Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil),14131 (industri perlengkapan pakaian dari tekstil)
16	CV Bintang Mas	Kecil	14120 (konveksi)
17	PT Nefta Pompa Betonindo	Menengah	46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang),28240 (Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi),33122 (Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus),46599 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya),33200 (Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri),46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak),29200 (Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer),43905 (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator),29101 (Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih)
18	CV Adhwa Swara Abadi	Kecil	14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan)
19	PR Syifa Oxy Gen Water	Kecil	11052 (air minum isi ulang)
20	PT Delapan Intan Mutiara	Kecil	33122 (reparasi mesin untuk keperluan khusus),33200 (instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri),22299 (industri barang plastik lainnya ytdl)
21	CV Al-anshor	Kecil	14111 (industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil),14120 (penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan)
22	CV Wisesa Buana	Kecil	14111 (industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil)
23	PT Fadhil Damar Putra	Menengah	46339 (perdagangan besar makanan dan minuman lainnya),46693 (perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran),46691 (perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar),46599 (perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya),46326 (perdagangan besar

NO	NAMA PERUSAHAAN	SKALA USAHA	BIDANG USAHA
			susu dan produk susu),46100 (perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak),71205 (jasa kalibrasi/metrologi),78200 (aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu)
24	PR Penuh Berkah Mulia	Kecil	16230 (perdagangan)
25	PT Vila Ternak Indonesia	Kecil	01411 (pembibitan dan budidaya sapi potong),01412 (Pembibitan dan budidaya sapi perah),93231 (wisata agro),93232 (taman rekreasi/taman wisata)
26	PT Permata Food Indonesia	Menengah	10729 (industri pengolahan gula lainnya bukan sirop),82920 (aktivitas pengepakan)

Sumber Data : SIINAS

Sedangkan jumlah industri yang terdata dalam database industri kewenangan Kota Cilegon di tahun 2022 sebagaimana rekapitan pada tabel di bawah ini :

KLASIFIKASI IKM	KEC. PURWAKARTA	KEC. CIBEBER	KEC. CITANGKIL	KEC. CIWANDAN	KEC. CILEGON	KEC. GROGOL	KEC. JOMBANG	KEC. PULOMERAK	JUMLAH
PANGAN	181	320	2	29	84	59	57	29	761
BARANG DARI KAYU	148	57	2	17	18	13	42	11	308
FURNITURE	2	30	2	0	0	0	4	0	38
SANDANG	24	19	6	12	55	16	17	5	154
ANEKA	2	0	0	0	0	18	1	1	22
KERAJINAN	14	9	9	1	9	5	12	3	62
LOGAM	9	13	15	9	17	5	34	6	108
MESIN	12	3	0	0	6	2	24	0	47
KIMIA	1	105	18	7	29	0	5	9	174
ELEKTRONIKA									
ALAT ANGKUT									
JUMLAH	393	556	54	75	218	118	196	64	1674

Sumber Data : DISPERINDAG KOTA CILEGON

Didapat realisasi indikator di atas sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian data	Realisasi

Persentase industri kecil menengah yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	<u>Pembilang :</u> Jumlah industri kecil dah menengah yang terdata dalam SIINAS sebanyak 26 IKM <u>Penyebut :</u> Jumlah industri yang terdata dalam database industri kewenangan kabupaten/ kota sebanyak 1.674 IKM	2%

Sehingga capaian Indikator Program Persentase industri kecil menengah yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 2% dari yang ditargetkan. Capaian indikator Persentase industri kecil menengah yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional didukung melalui pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan output pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

3.1.4.1 Sekretariat Daerah

1. Bagian Pemerintahan

1.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Pemerintahan		1.180.871.600	1.084.473.200	91,84			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.180.871.600	1.084.473.200	91,84			
	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Administrasi Tata Pemerintahan	100,00%	0,00%	0			
Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	95,8%	95,83			
Penataan Administrasi Pemerintahan		616.122.600	530.088.000	86,04	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang FORKOPIMDA dalam ketentuannya agar dilakukan penyesuaian Kegiatan Fasilitasi FORKOPIMDA beralih ke Badan Kesbangpol	Menyusun dan merevisi agenda Sub Kegiatan Fasilitasi FORKOPIMDA dalam DPA Perubahan	
	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi	12 Laporan	9 Laporan	75			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Unsur FORKOPIMDA Kota Cilegon						
	Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Lingkup Administrasi Tata Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	100			
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		322.436.000	320.717.200	99,47			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100			
	Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Laporan Pembakuan Unsur Rupabumi dan Toponimi Kota Cilegon	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Kelurahan di Kota Cilegon untuk Evaluasi Perkembangan Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	100			
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		73.053.000	71.308.000	97,61			
	Penyusunan LPPD	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Pemberitaan LPPD	1 tayangan	1 tayangan	100			
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Fasilitasi Kerjasama Daerah						
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		169.260.000	162.360.000	95,92			
	APEKSI	2 Agenda	2 Agenda	100			
	Naskah Kerja Sama	19 Dokumen	19 Dokumen	100			

1.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Pemerintahan, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang

No.	URAIAN	NILAI
1	Aspek Pemenuhan	10.95
	Manajemen Perubahan	1.40
	Deregulasi Kebijakan	0.50
	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.70
	Penataan Tata Laksana	0.60
	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.20
	Penguatan Akuntabilitas	2.50
	Penguatan Pengawasan	0.94
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.11
2	Aspek Reform	18.04
	Manajemen Perubahan	2.75
	Deregulasi Kebijakan	1.00
	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50
	Penataan Tata Laksana	1.75
	Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00
	Penguatan Akuntabilitas	2.81
	Penguatan Pengawasan	1.95
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75

Hasil evaluasi sekretariat Daerah Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 28.456 (nilai hasil konversi sebesar 78.391 dengan kategori BB yaitu baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi evaluasi dari penilaian mandiri yang telah dilaksanakan asesor Sekretariat Daerah Kota Cilegon terhadap seluruh komponen area perubahan, terlihat bahwa pelaksanaan program reformasi birokrasi secara instansional mampu mewujudkan sebagian besaran sasaran reformasi birokrasi. Pada indikator sasaran indeks RB perangkat daerah memiliki target 53 poin, dengan nilai realisasi 78,38 , maka nilai capaian pada indikator ini sebesar 147.88 %.

- 1) Nilai Lakip Perangkat Daerah
- Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Cilegon meliputi 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Sasaran/Kinerja. Berikut rincian hasil evaluasinya:

NO	URAIAN	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	22.73
2	Pengukuran Kinerja	15.31
3	Pelaporan Kinerja	9.35
4	Evaluasi Internal	6.06
5	Capaian Sasaran/Kinerja	10.14
TOTAL		63.59

Hasil evaluasi pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 63.59 dengan kategori B (Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Pada indikator nilai lakip perangkat daerah memiliki target 70 poin, dengan nilai realisasi 63.59, maka nilai capaian pada indikator ini adalah 90.84 %.

tepat dan baik, yaitu Persentase tindak lanjut hasil moneyv permasalahan lingkup Administrasi Tata Pemerintahan. Pada lingkup administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan) Sekretariat Daerah Kota Cilegon, memiliki beberapa temuan permasalahan yang sudah ditindaklanjuti pada moneyv tahun 2022. Berikut uraian penjelasannya:

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Terbit regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Melakukan Kordinasi Dengan Pihak Terkait
2	Pelaksanaan kegiatan harus menunggu terbitnya juklak dari Kemendagri	PP 12/2022 diundangkan 25 Feb 22, 6 Bulan menyesuaikan PP
3	Perlu Dukungan Kegiatan Mandatori di Kelurahan (Dpwekel) Dalam Bentuk Kegiatan Pengumpulan/Survey Data Rupa Bumi	Telah Diterbitkannya Perwal 73/2022 Tentang LKK Sebagai Tindak Lanjut Permendagri 18/2018
4	Perlu Di Revisinya Kepwal Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Ke Camat(Menyesuaikan Dengan Perda Perangkat Daerah Terbaru)	Telah melakukan Pembahasan Beberapa Kali Sejak 2021, Namun Sempat Terkendala
5	Proses Pengumpulan Data Dari OPD	Melakukan Kordinasi Dengan Pihak Terkait
6	Frekuensi Kegiatan Apeksi Tidak Sebanding Dengan Anggaran Yang Ada	Melakukan Kordinasi Dengan Pihak Terkait

Dilihat dari tabel di atas, maka nilai capaian pada indikator ini yaitu 133.66 %. Nilai capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

2. Bagian Organisasi

2.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan RB)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Organisasi		2.082.213.994	453.520.610	21,78			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		2.082.213.994	453.520.610	21,78	Data Penilaian SAKIP dan RB belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB, namun secara predikat telah diketahui (sakip B, RB naik dari C ke CC) sedangkan nilai SPBE juga belum dirilis. Sehingga perhitungan kinerja outcome belum dapat diketahui secara pasti		
	Persentase Progress Capaian Roadmap RB	50,00%	45,00%	90			
Penataan Organisasi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi	100%	103,9%	103,89			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		607.149.664	38.711.820	6,38	secara umum, output dalam kegiatan penataan organisasi tercapai, sisa anggaran merupakan gagal realisasi belanja penunjang output seperti honor narasumber, belanja SPPD luar daerah yang mengirimkan peserta pemenang lomba kompetisi pelayanan publik dan belanja fullboard meeting yang tidak dapat dilaksanakan dalam upaya penyusunan DPR 2023 sehubungan database SIPD 2023 belum dapat diperoleh		
	Jumlah Perangkat Daerah yang di Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya	36 PD	36 PD	100			
	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi Jabatannya	36 PD	36 PD	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	36 PD	36 PD	100			
	Jumlah Perangkat Daerah yang distandarkan kompetensi jabatannya	36 PD	36 PD	100			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		837.164.230	37.455.790	4,47	secara umum, output dalam kegiatan penataan organisasi tercapai, sisa anggaran merupakan gagal realisasi belanja penunjang output seperti honor narasumber, belanja SPPD luar daerah yang mengirimkan peserta pemenang lomba kompetisi pelayanan publik dan belanja fullboard meeting yang tidak dapat dilaksanakan dalam upaya penyusunan DPR 2023 sehubungan database SIPD 2023 belum dapat diperoleh		
	Jumlah OPD yang di Monev	36 OPD	36 OPD	100			
	Jumlah UPP yang Mengikuti Kompetisi	38 UPP	38 UPP	100			
	Jumlah UPP yang di Survey	38 UPP	38 UPP	100			
	Jumlah Tanda Pengenal yang di Buat	4000 Buah	4000 Buah	100			
	Jumlah Stempel Dinas yang di Buat	110 Buah	110 Buah	100			
	Jumlah OPD yang memiliki Dokumen Peta Proses Bisnis	20 OPD	20 OPD	100			
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		637.900.100	377.353.000	59,16	secara umum, output dalam kegiatan penataan organisasi tercapai, sisa anggaran merupakan gagal realisasi belanja penunjang output seperti honor narasumber, belanja SPPD luar daerah yang mengirimkan peserta pemenang lomba kompetisi pelayanan publik dan belanja fullboard meeting yang tidak dapat dilaksanakan dalam upaya penyusunan DPR 2023 sehubungan database SIPD 2023 belum dapat diperoleh		
	Jumlah Data LKiP yang disampaikan lengkap dan tepat waktu	36 Indikator	36 Indikator	100			
	Jumlah Monev Penilaian Resiko yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah monev RB yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah monev SAKIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	100			
	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PMPRB	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100			
	Jumlah Responden Survey Kapasitas Organisasi	1000 Responden	1700 Responden	170			

2.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Organisasi, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Persentase Progress Capaian Roadmap Reformasi Birokrasi. Bagian Organisasi sudah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 guna mencapai nilai yang baik pada indikator persentase progress capaian roadmap reformasi birokrasi. Namun sampai saat ini, laporan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum keluar, sehingga nilai pada indikator ini belum dapat diketahui.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Kesejahteraan Rakyat		42.975.674.248	38.254.392.180	89,01			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		42.975.674.248	38.254.392.180	89,01			
	Persentase tindak lanjut hasil money permasalahan lingkup Kesos dan Kesra	100,00%	0,00%	0			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	87,9%	87,93			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		42.102.036.685	37.991.445.980	90,24	Peningkatan Kapasitas SDM Fardu Kifayah hanya dapat dilaksanakan 1 kegiatan dikarenakan keterbatasan waktu pada bagian kesra terkait dengan Out Put Kegiatan yang lain.	Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan pada bagian kesra ditahun yang akan datang	
	Jumlah Kegiatan Survey dan Monitoring hibah bansos pada lembaga Keagamaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Lembaga yang menerima Bantuan Hibah	103 Lembaga	103 Lembaga	100			
	Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) dan Istighosah	57 Kegiatan	57 Kegiatan	100			
	Sertifikasi Dewan Hakim	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Peningkatan Kapasitas SDM Fardu Kifayah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Sosialisasi e-hibah bansos lembaga keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Penguatan Kapasitas Remaja Masjid (RISMA)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Kegiatan Menejemen DKM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pengajian Majelis Taklim dan Pengajian Ulama Umaro	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100			
	Jumlah Jemaah Haji yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan MTQ	3 Event	3 Event	100			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		620.211.363	227.876.000	36,74	Kegiatan Transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada landasan hukum	Berkoordinasi dengan Bagian/OPD Terkait	
	Terlaksananya Program Transmigrasi dan UKS	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67			
	Terlaksananya Fasilitasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
	Terlaksananya Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 Laporan	6 Laporan	100			
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 Laporan	6 Laporan	100			
	Terlaksananya Pendampingan Inspektorat Monitoring dan Evaluasi pada OPD Pengelola dan Penerima Hibah	34 OPD	34 OPD	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		253.426.200	35.070.200	13,84	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat hanya terlaksana 50% dikarenakan pengampu kegiatan beralih tugas ke OPD lain tapi belum ada pengganti.	Berkoordinasi dengan Pimpinan dan penyesuaian program kegiatan kesejahteraan Masyarakat pada bagian Kesra	
	Terlaksananya Koordinasi Kinerja Program dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kerasipan, Komunikasi dan Informatika, Sandi Statistik, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata	4 Laporan	3 Laporan	75			
	Terlaksananya Monitoring Kinerja Program dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kerasipan, Komunikasi dan Informatika, Sandi Statistik, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata	4 Laporan	3 Laporan	75			

3.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Kesra. Pada lingkup kesra juga, melakukan tindak lanjut hasil monev pada permasalahan yang terkait pada bidang tersebut. Saat monitoring ditemukan beberapa permasalahan, yang harus diperbaiki agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikut uraiannya:

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Acara Pelaksanaan Hari Besar Islam dan Istighosah terhambat terkait dengan waktu Pelaksanaan	Meningkatkan kembali Efisiensi waktu
2	Jumlah Jemaah Haji yang terfasilitasi disesuaikan kembali dengan Keputusan Mentri Agama KMA No. 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M	Berkoordinasi dengan pihak terkait

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3	Pelaksanaan Kegiatan MTQ disesuaikan kembali dengan Surat dari Gubernur Banten No. 451.15/3221-PEMKESRA/2022 Tentang Tanggapan Perubahan Waktu Pelaksanaan MTQ XIX Tingkat Provinsi Banten	Melakukan Koordinasi, dan Evaluasi
4	Kegiatan Pembinaan Manajemen DKM, Pengajian Majelis Taklim dan Ulama Umaro, Penguatan Kapasitas Remaja Masjid, Sosialisasi e-hibah Bansos Lembaga Keagamaan, terhambat dalam pelaksanaan waktu, sarana dan prasarana	Melakukan Koordinasi, dan Evaluasi
5	Program Transmigrasi dan UKS; Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terhambat dalam pelaksanaan waktu, sarana dan prasarana	Melakukan Koordinasi, dan Evaluasi
6	Koordinasi Kinerja serta monitoring Program dukungan Pelayanan Pemerintahan pada OPD dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kerasipan, Komunikasi dan Informatika, Sandi Statistik, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata, terhambat dalam pelaksanaan waktu, sarana dan prasarana	Melakukan Koordinasi, dan Evaluasi

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

4.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Pembangunan)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		638.555.720	503.067.700	78,78			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		638.555.720	503.067.700	78,78			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup eksda (eksda)	100,00%	100%	100			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	50,0%	50			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		259.299.500	192.163.900	74,11			
	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang BUMD dan BLUD	36 Laporan	0 Laporan	0			
	Jumlah kegiatan pembinaan kepada BUMD dan BLUD (pelatihan, sosialisas, bimtek, FGD dan lain-lain)	4 Laporan	0 Laporan	0			
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dibidang BUMD dan BLUD	30 Laporan	0 Laporan	0			
	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dibidang BUMD dan BLUD	8 Dokumen	0 Dokumen	0			
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		131.808.740	124.744.240	94,64			
	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan monev pengendalian dan distribusi perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	2 Laporan	2 Laporan	100			
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		69.031.260	60.181.260	87,18			
	Jumlah fasilitasi, koordinasi , Monev perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah rapat koordinasi/sosialisasi kebijakan bidang perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		49.490.000	25.490.000	51,51			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Hasil penilaian atas usulan pembentukan BLUD	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Kajian analisa kelayakan pembentukan BLUD	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100,0%	100			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		8.634.757	6.779.760	78,52			
	Jumlah fasilitas, koordinasi dan monev pertanian	1 Laporan	1 Laporan	100			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		89.293.923	64.350.240	72,07			
	Jumlah fasilitas, koordinasi dan monev Lingkungan Hidup	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah rapat koordinasi/sosialisasi bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		30.997.540	29.358.300	94,71			
	Jumlah fasilitas, koordinasi dan monev kebijakan PU dan Perkim	4 Laporan	4 Laporan	100			

4.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Eksda). Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Eksda). Dalam melaksanakan indikator ini, terdapat beberapa faktor penghambat dan tindak lanjut, yaitu:

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Kurangnya inisiatif mitra BUMD dan BLUD mengusulkan kebutuhan regulasi	Menyusun list kebutuhan regulasi BUMD dan BLUD

2	Belum tersedianya modul / pedoman money BLUD khususnya BLUD Kesehatan	Menyusun alternatif instrument Money BLUD Kesehatan
3	Kurangnya inisiatif mitra BUMD dan BLUD dalam mempelajari regulasi tentang BUMD dan BLUD	Melakukan Sosialisasi PP dan Permendagri Tentang Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	OPD pemilik UPT BLUD belum mengenal Bagian Eksda sebagai Pembina BLUD sesuai dengan Perwal UTJ terbaru	Melakukan Sosialisasi Perwal UTJ Setda Terbaru
5	Rencana fokus kegiatan dan pelaporan pengendalian inflasi TPID belum optimal	Meningkatkan koordinasi dengan Bappeda dan TIM TPID baik pusat maupun daerah
6	Ada keterlambatan penyampaian usulan dan penetapan Tim Penilai saat Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Melakukan percepatan pada Time Schedule Pembentukan BLUD
7	Adanya perubahan tusi ditubuh struktur organisasi khususnya di Bagian Eksda sehingga perlu adanya penyesuaian program dan kegiatan terhadap OPD yang dikoordinasikan	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait

5. Bagian Administrasi Pembangunan

5.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Sosial Kemasyarakatan)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Administrasi Pembangunan		378.630.500	304.196.550	80,34			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		378.630.500	304.196.550	80,34			
	Presentase tindak lanjut hasil money permasalahan program (Adpem)	100,0 persen	100,0 persen	100			
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		172.951.000	123.104.250	71,18			
	Jumlah Dokumen Rancangan Pelaksanaan Program Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah rapat kegiatan sosialisasi program pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		126.191.000	104.163.800	82,54			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 dokumen	12 dokumen	100			
	Jumlah rapat koordinasi Evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		79.488.500	76.928.500	96,78			
	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

5.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Administrasi Pembangunan, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Persentase tindak lanjut hasil money review permasalahan program (Adpem). Pada lingkup bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Kota Cilegon, telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap program/kegiatan yang ada. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Jika ditemukan penyimpangan, maka akan segera diperbaiki sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Sedangkan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari program/kegiatan. Hasil evaluasi akan bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Di lingkup bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Kota Cilegon, memiliki beberapa temuan permasalahan yang sudah ditindaklanjuti pada money review tahun 2022. Berikut uraian penjelasannya:

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Kurangnya sarana dalam melaksanakan pada kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan; pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Mengusulkan kebutuhan sarana kepada pihak terkait
2	Kompetensi SDM belum optimal sehubungan adanya perubahan nomenklatur	Mengusulkan kebutuhan diklat terkait Administrasi Pembangunan

6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

6.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1f Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Program dan Keuangan)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.870.864.056	1.700.968.080	90,92			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		1.870.864.056	1.700.968.080	90,92			
	Tingkat Kepuasan layanan Keprotokolan (Bagian Protokol)	73,0 Poin	73 Poin	100			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Keprotokolan		650.056.785	541.467.080	83,3			
	Jumlah Kegiatan Pendampingan KDH	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan dalam Kegiatan PHBN dan Hari Jadi Kota Cilegon	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100			
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		598.023.504	584.349.500	97,71			
	Jumlah Press Release Kegiatan KDH	200 Kegiatan	200 Kegiatan	100			
	Jumlah Penyediaan Bahan Materi Rapat Dinas	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Naskah Pidato/ Sambutan Walikota	200 Dokumen	200 Dokumen	100			
Pendokumentasian Tugas Pimpinan		622.783.767	575.151.500	92,35			
	Jumlah Event KDH yang Didokumentasikan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Media Release/Iklan Ucapan Promosi dan Propaganda KDH	60 Tayang	60 Tayang	100			
	Jumlah Foto/Poster Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600 Lembar	600 Lembar	100			

6.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Tingkat Kepuasan layanan Keprotokolan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah melaksanakan kegiatan guna mencapai nilai kinerja yang sesuai dengan target yang telah direncanakan. Berikut tabel realisasi kegiatannya :

No	Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Fasilitasi Keprotokolan	650.056.785	541.467.080	83,3	100	100	100
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	598.023.504	584.349.500	97,71	100	100	100
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	622.783.767	575.151.500	92,35	100	100	100

7. Bagian Hukum dan HAM

7.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1g Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Hukum		1.246.034.071	1.084.351.710	87,02			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.246.034.071	1.084.351.710	87,02			
	Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum (Bagian Hukum dan HAM)	100,00%	123,44%	123,44			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	121,9%	121,85			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		735.745.648	594.890.600	80,86	Tidak ada permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan		
	Jumlah dokumen Naskah Akademik yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota	6 tayang	6 tayang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	yang disosialisasikan melalui media						
	Proporsi Rancangan Perda/Perwal/Keputusan Wali Kota yang difasilitasi	100 persen	100 persen	100			
Fasilitasi Bantuan Hukum		324.497.266	322.017.500	99,24			
	Bantuan Hukum kepada Unsur Pemerintah Kota Cilegon	2 Perkara	5 Perkara	250			
	Bantuan Hukum kepada Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Cilegon	30 Perkara	44 Perkara	146,67			
	Penyelenggaraan HAM	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		185.791.157	167.443.610	90,12			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Cetak Pendokumentasian Produk Hukum	215 Cetak	215 Cetak	100			
	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, (Penyuluhan Hukum/Sosialisasi perda/perwal di media cetak/online	4 tayang	4 tayang	100			

7.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Hukum, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum (Bagian Hukum dan HAM).

Kinerja pelayanan Bagian Hukum merupakan suatu permasalahan yang harus dikaji untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan, karena dapat memberikan kejelasan tentang faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Pada bagian hukum, telah menunjukan kinerja pelayanan dengan melaksanakan program/kegiatan yang ada untuk mencapai nilai target yang telah ditentukan. Realisasi nilai target indikator ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rata-rata dari persentase capaian kinerja pelayanan bantuan hukum ditambah persentase capaian kinerja produk hukum ditambah persentase capaian kinerja dokumentasi produk hukum, sehingga mencapai nilai capaian kinerja sebesar 124.44%.

Dalam prosesnya, indikator ini memiliki beberapa permasalahan yang telah ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mencapai nilai target yang telah ditentukan. Berikut uraiannya :

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Penyampaian usulan fasilitasi penyusunan naskah akademisi dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan target waktu penyampaian yang telah ditentukan, sehingga proses pengadaan mengalami keterlambatan serta mengurangi alokasi waktu kerja tenaga ahli dalam melakukan penyusunan naskah akademisi	Melakukan koordinasi langsung dengan perangkat Daerah dan Menyusun Analisa kebutuhan secara mandiri terkait kebutuhan naskah akademisi sesuai dengan target penyampaian ke DPRD
2	Kurang lengkapnya persyaratan permohonan pengajuan anggaran bantuan hukum dari LBH (fakir miskin dan orang tak mampu)	Berkoordinasi secara langsung dengan aparaturnya yang bersangkutan dan Perangkat Daerahnya
3	Keterlambatan dan tidak lengkapnya penyampaian data capaian laporan RANHAM dari Kota peduli HAM dan dari Perangkat Daerah	Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bidang yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan capaian RANHAM dan Kota peduli HAM
4	Kurangnya dukungan dokumen dan informasi (terlapor/saksi) dari aparaturnya/perangkat daerah yang menghadapi permasalahan hukum	Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Lembaga bantuan hukum (LBH) agar dapat melengkapi semua persyaratan penerima bantuan hukum
5	Penyampaian usulan fasilitasi rancangan Perda/Perwal/Keputusan Wali kota dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Melakukan koordinasi dan fasilitasi langsung dengan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyampaikan rancangan Perda/Perwal dan sesuai kebutuhan masyarakat
6	Sosialisasi rancangan Perda/Perwal tidak dapat memenuhi kebutuhan	Melakukan pemilihan bahan materi sosialisasi berdasarkan prioritas Perda/Perwal dan kebutuhan masyarakat
7	Terbatasnya anggaran sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Memaksimalkan sosialisasi melalui media cetak/online berdasarkan prioritas penyusunan Perda/Perwal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

8.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1h Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		2.427.401.324	2.076.057.309	85,53			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.427.401.324	2.076.057.309	85,53			
	Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa (Bagian Barjas)	40,0 Poin	40 Poin	100			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	19,4%	19,44			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		426.442.719	374.932.549	87,92			
	Tersedianya Hasil Pelaksanaan Riset Dan Analis Pasar Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Barang/ Jasa Yang Dimonitoring Dan Evaluasi	4 Dokumen	1 Dokumen	25			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Direviu	38 Dokumen	0 Dokumen	0			
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1.430.943.605	1.287.003.260	89,94			
	Capaian Dukungan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Aplikasi Pelayanan Tamu Yang Tersedia	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
	Penyediaan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
	Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang di Reviu	2 Dokumen	2 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Audit Surveillance Sertifikasi ISO 1900 : 2015	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Dokumen ISO 27001 : 2015 yang Tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Dokumen Standarisasi LPSE Yang Didampingi dan Dinilai	17 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Terlaksananya Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kota Jogjakarta	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		570.015.000	414.121.500	72,65			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	38 OPD	0 OPD	0			
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyedia barang/jasa	12 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	0 Bulan	0			
	Penilaian Angka Kredit Bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2 Dokumen	0 Dokumen	0			

8.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa.

Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa

LKPP sebagai lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu leading sector dalam tingkat meso, khususnya indeks tata kelola pengadaan minimal baik.

Pada indikator indeks tata kelola barang dan jasa, Sekretariat Daerah Kota Cilegon khususnya pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, memiliki nilai indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa sebesar 40 poin dari target sebesar 40 poin, sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 100 %. Berikut tabel penilaian indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2022 yang dikeluarkan LKPP :

NO	BENTUK	NAMA INSTANSI	NILAI PER INDIKATOR							TOTAL NILAI	PREDIKAT
			SiRUP	E-PURCHASING	E-TENDERING	SDM PBJ	TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ	NON TENDER/ NON PURCHASING	E-KONTRAK		
1	Kota	Kota Cilegon	10.0	0	4.4	16.0	0	5.0	4.7	40.0	Kurang

Sumber :LKPP

Dalam melaksanakan indikator ini tentunya ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi prosesnya. Berikut faktor – faktornya :

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Anggaran tidak jadi diserap, dikarenakan proses dokumentasi standarisasi LPSE masih di proses oleh LKPP	Sudah mengirimkan dokumen tindak lanjut mengenai standarisasi melalui Provinsi Banten
2	Anggaran tidak jadi diserap, dikarenakan Adanya Rotasi dan Mutasi Pegawai	Dukungan anggaran
3	Anggaran tidak jadi diserap, dikarenakan Waktu Pelaksanaan adanya di ABT dan Waktunya yang tidak Terlalu Panjang	

9. Bagian Umum

9.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1i Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Bagian Umum		93.035.242.144	77.151.808.832	82,93			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		93.035.242.144	77.151.808.832	82,93			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	70,0 Poin	63,17 Poin	90,24			
	Indeks RB Perangkat Daerah	53,0 Poin	78,38 Poin	147,89			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,0%	100			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		98.452.190	89.831.200	91,24			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.238.290	41.379.800	82,37			
	Jumlah dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan setda	4 dokumen	4 dokumen	100			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100,0%	100			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		35.438.822.900	30.403.590.231	85,79			
	Jumlah Orang yang menerima Gaji ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100			
	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100			
	Jumlah Honorarium TAPD yang terpenuhi	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		133.678.137	119.396.614	89,32			
	Jumlah Dokumen SPM Penatausahaan Keuangan Setda	1500 dokumen	1500 dokumen	100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.194.447	3.988.000	95,08			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.542.947	11.676.800	93,09			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	12 dokumen	100			
	Jumlah Laporan Keuangan Prognosis	2 dokumen	2 dokumen	100			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100,0%	100			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		85.200.000	85.200.000	100			
	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tertatausahakan Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	100			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66,7%	66,67			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0	0	0	sub kegiatan tidak terserap dikarenakan anggaran tidak cukup untuk pengadaan 4 mesin fingerprint, kemudian dialihkan ke sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA dan BPKPAD untuk pengalihan anggarannya	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		599.943.024	527.427.929	87,91			
	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut di Lingkungan Setda Kota Cilegon	598 Stell	598 Stell	100			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		63.338.950	61.041.065	96,37			
	Jumlah Data Pegawai yang Teradministrasikan Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100,0%	100			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		268.787.080	260.699.928	96,99			
	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		577.628.439	489.931.140	84,82			
	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		774.095.609	715.430.000	92,42			
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		933.936.000	789.402.100	84,52			
	Tersedianya Jamuan Makan dan Minuman Rapat Biasa	12 orang/kali	12 orang/kali	100			
	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Dinas	12 orang/kali	12 orang/kali	100			
	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Forkopimda	12 orang/kali	12 orang/kali	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Petugas Piket Pengamanan	12 orang/kali	12 orang/kali	100			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		526.641.283	372.367.125	70,71	sistem tender menyebabkan adanya proses negosiasi harga dan menyebabkan harga barang cetakan rendah sehingga serapan anggaran menjadi rendah	berkoordinasi dengan P2BJ dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengatasi masalah tersebut	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		167.683.062	150.822.835	89,95	Harga satuan koran lebih dari DPA, penyerapan pada triwulan I dilakukan secara GU	Perubahan anggaran untuk menyesuaikan harga koran dipasaran	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	100			
Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.259.725.000	1.953.117.700	86,43			
	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Kegiatan PHBN, PHBI dan HUT Kota Cilegon	12 bulan	12 bulan	100			
	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Tamu Lainnya	12 bulan	12 bulan	100			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.661.768.160	3.539.999.972	96,67			
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		28.550.000	25.680.000	89,95			
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100,0%	100			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		8.432.630.000	5.762.000.000	68,33	Kendaraan untuk Sekretaris Daerah tidak diserap karena harga kendaraan tersebut melebihi Perpres 33		
	Terlaksananya dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Unit	7 Unit	100			
Pengadaan Mebel		1.220.597.533	585.503.282	47,97	Gagal lelang karena waktu sudah tidak memungkinkan minggu ke dua di akhir tahun dan yang terserap hanya dengan metode pengadaan langsung		
	Terpenuhinya kebutuhan mebel di lingkungan setda kota cilegon	51 Unit	51 Unit	100			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.906.836.022	4.315.549.497	87,95			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	103 Unit/Buah/Set/Roll	103 Unit/Buah/Set/Roll	100			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		250.000.000	194.078.187	77,63	setelah pengajuan bantuan teknis ke dinas PU hanya menghabiskan 198.000.000		
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	1 Paket	1 Paket	100			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,0%	100			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.000.000	15.000.000	100			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4.796.279.408	3.354.867.929	69,95			
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	12 bulan	12 bulan	100			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.905.280.240	3.842.298.760	78,33			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk Pengharum Ruangan	12 bulan	12 bulan	100			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk rumah dinas pimpinan	12 bulan	12 bulan	100			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk gedung tempat pertemuan dan penginapan	12 bulan	12 bulan	100			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk Tanaman Hias	12 bulan	12 bulan	100			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk Mobilitas Darat	6 unit	6 unit	100			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan acara PHBN, PHBI dan acara lainnya	12 bulan	12 bulan	100			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		13.895.479.664	11.854.533.775	85,31			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,0%	100			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.062.250.980	877.576.160	82,61			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.026.804.177	838.093.217	81,62			
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pemeliharaan Mebel		29.040.000	21.100.000	72,66	Jumlah Item yang dipelihara sesuai dengan kondisi di lapangan		
	Terpeliharanya Pemeliharaan Mebel.	2 Jenis	2 Jenis	100			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.264.230.542	1.066.937.960	84,39			
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin di Lingkungan Setda	10 Jenis	10 Jenis	100			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.898.660.017	1.709.047.800	90,01			
	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	5000 M2	5000 M2	100			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		210.158.564	202.964.695	96,58			
	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	87,5%	87,5			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		255.364.744	216.666.140	84,85			
	Jumlah Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH yang terpenuhi	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terpenuhi	11 orang/bulan	11 orang/bulan	100			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		115.010.000	91.310.000	79,39			
	Tersedianya Pakaian Dinas KDH dan WKDH beserta perlengkapannya	30 stel	30 stel	100			
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		111.826.500	0	0	belum terbitnya Peraturan Walikota tentang Medikal Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Berkoordinasi dengan bagian Hukum agar Peraturan Walikota tersebut dapat segera ditetapkan	
	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	2 kegiatan	1 kegiatan	50			
	Tersedianya Jamuan Makan Minum Medical Check Up KDH dan WKDH	2 kegiatan	1 kegiatan	50			
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.213.215.120	1.112.491.287	91,7			
	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH sesuai realisasi PAD	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			
	Jumlah Dana Penunjang Operasional Wakil KDH sesuai realisasi PAD	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100,0%	100			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		598.430.000	494.702.000	82,67			
	Tersedianya Makan dan Minum Rumah Tangga Kepala Daerah	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		481.844.000	411.642.000	85,43			
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		661.079.115	544.463.704	82,36			
	Tersedianya Makanan dan Minuman di Ruangan Pimpinan Sekretariat Daerah	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			
	Tersedianya Minuman Harian Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100			
	Tersedianya Extra Fooding Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	11 orang/bulan	11 orang/bulan	100			

9.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Dalam pelaksanaan tupoksi di Bagian Umum, terdapat 2 (Dua) indikator yang akan dilihat guna untuk mendapatkan pencapaian sasaran yang tepat dan baik, yaitu :

- 1) Indeks RB Perangkat Daerah
- Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Cilegon meliputi 2 (dua) aspek yakni aspek pemenuhan dan aspek reform. Pada aspek tersebut masing-masing memiliki 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang telah dinilai. Berikut rincian hasil evaluasinya :

No.	URAIAN	NILAI
1	Aspek Pemenuhan	10.95
	Manajemen Perubahan	1.40
	Deregulasi Kebijakan	0.50
	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.70
	Penataan Tata Laksana	0.60
	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.20
	Penguatan Akuntabilitas	2.50
	Penguatan Pengawasan	0.94
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.11
2	Aspek Reform	18.04
	Manajemen Perubahan	2.75
	Deregulasi Kebijakan	1.00

No.	URAIAN	NILAI
	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50
	Penataan Tata Laksana	1.75
	Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00
	Penguatan Akuntabilitas	2.81
	Penguatan Pengawasan	1.95
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75

Hasil evaluasi sekretariat Daerah Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 28.456 (nilai hasil konversi sebesar 78.391 dengan kategori BB yaitu baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi evaluasi dari penilaian mandiri yang telah dilaksanakan asesor Sekretariat Daerah Kota Cilegon terhadap seluruh komponen area perubahan, terlihat bahwa pelaksanaan program reformasi birokrasi secara instansional mampu mewujudkan sebagian besaran sasaran reformasi birokrasi. Pada indikator sasaran indeks RB perangkat daerah memiliki target 53 poin, dengan nilai realisasi 78,38 , maka nilai capaian pada indikator ini sebesar 147.88 %.

2) Nilai Lakip Perangkat Daerah

Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Cilegon meliputi 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Sasaran/Kinerja. Berikut rincian hasil evaluasinya:

NO	URAIAN	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	22.73
2	Pengukuran Kinerja	15.31
3	Pelaporan Kinerja	9.35
4	Evaluasi Internal	6.06
5	Capaian Sasaran/Kinerja	10.14
TOTAL		63.59

Hasil evaluasi pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar 63.59 dengan kategori B (Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Pada indikator nilai lakip perangkat daerah memiliki target 70 poin, dengan nilai realisasi 63.59, maka nilai capaian pada indikator ini adalah 90.84 %.

3.1.4.2 Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.4.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sekretariat DPRD

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
SEKRETARIAT DPRD		107.393.453.223	91.972.262.844	85,64			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA		69.529.333.513	62.230.846.093	89,5	rendahnya nilai sapip pada komponen evaluasi internal sebesar 4,38 dan Pelaporan Kinerja sebesar 9,75 penerapan Reformasi Birokrasi belum mampu mendorong perbaikan Kinerja Organisasi	meningkatkan peran aktif seluruh pegawai sekretariat DPRD dan Mengaktifkan kembali website DPRD	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	65,57 Poin	62,3 Poin	95,01			
	Indeks RB Perangkat Daerah	22,04 Poin	63,33 Poin	287,34			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	66,7%	66,67			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		91.288.852	70.594.100	77,33	Adanya pergantian Pejabat Pengadaan (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Tahun Anggaran Berjalan sehingga mengakibatkan perubahan Surat Keputusan (SK) PPK	Segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pejabat pembuat Komitmen (SK)	-
	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen DPA Reguler	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen RKA Reguler	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen RENSTRA	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		219.304.502	168.799.250	76,97			-
	Jumlah Tersedianya Dokumen SAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Tersedianya Dokumen LPPD OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Tersedianya Dokumen SPIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	65,0%	65			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.665.238.018	7.490.230.749	86,44			-
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		47.466.000	45.840.000	96,57			-
	Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		28.209.196	28.065.000	99,49			-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		102.515.300	83.859.100	81,8			-
	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	3 Dokumen	25			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	66,7%	66,67			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2.525.462.400	2.470.912.273	97,84			-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	35 Unit	35 Unit	100			
	Jumlah Tenaga Pengamanan	14 Bulan	14 Bulan	100			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		124.150.000	106.176.000	85,52			-
	Jumlah personil Penatausahaan Barang	2 orang	2 orang	100			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100,0%	100			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		345.000.000	335.803.250	97,33			-
	Jumlah Pakaian Dinas	110 set	110 set	100			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		196.762.000	192.362.000	97,76			-
	Jumlah Terlaksananya ASDEKSI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	37,5%	37,5			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		142.047.582	141.000.000	99,26			-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 tahun	1 tahun	100			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		693.551.874	504.450.000	72,73	Terkendala proses lelang karena hanya 1 penawar-an dan harga tidak masuk standar, setelah dilakukan lelang ulang ada peraturan baru mengenai TKDN		-
	Prosentase Pameran Hari Jadi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Prosentase Pelaksanaan PHBI dan Hari Jadi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Prosentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	35 Barang	35 Barang	100			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		972.445.043	65.500.000	6,74			-
	Jumlah Prosentase Peralatan Rumah Tangga	100 persentase	6 persentase	6,0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.948.575.581	1.240.280.500	63,65			-
	Jumlah Prosentase tersedianya bahan logistik kantor	100 %	100 %	100			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		653.563.170	548.931.991	83,99			-
	Prosentase Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20 Barang	20 Barang	100			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		245.949.000	189.658.000	77,11			-
	Prosentase Penyediaan Surat Kabar/ Majalah.	7 Eksemplar	7 Eksemplar	1000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.425.416.000	951.688.854	39,24			-
	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat).	3 Wilayah	2 Wilayah	50			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75,0%	75			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.962.534.000	1.915.310.000	97,59			-
	Jumlah Prosentase tersedianya kendaraan operasional	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
Pengadaan Mebel		482.151.786	470.410.500	97,56			-
	Jumlah Prosentase Tersedianya Mabel	100 %	100 %	100			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.628.667.760	4.484.338.370	96,88			-
	Jumlah Prosentase tersedianya barang	100 %	100 %	100			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,0%	100			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		30.000.000	29.970.000	99,9			-
	Prosentase komponen jasa surat menyurat yang di sediakan (Materai).	3000 lembar	3000 lembar	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		939.810.000	589.529.513	62,73			-
	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.857.603.008	2.708.050.816	94,77			-
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60,0%	60			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		912.077.600	588.480.450	64,52			-
	Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas	12 Paket	12 Paket	100			
	Terlaksananya service kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	100			
	Terwujudnya pengadaan suku cadang kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	100			
	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	100			
Pemeliharaan Mebel		20.000.000	19.960.000	99,8			-
	Jumlah Prosentase pelaksanaan pemeliharaan mebel	100 %	100 %	100			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		472.687.420	408.895.500	86,5			-
	Jumlah Prosentase tersedianya barang	100 %	100 %	100			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6.642.372.279	5.794.528.453	87,24			-
	Jumlah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0			-
	Jumlah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 %	0 %	0			
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	33,3%	33,33			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		29.939.505.142	29.631.532.236	98,97			-
	Tersedianya Administrasi Keuangan DPRD	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		760.000.000	696.182.000	91,6			-
	Jumlah Prosentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 %	100 %	100			
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		200.000.000	79.060.188	39,53			-
	Jumlah Anggota DPRD	40 orang	40 orang	100			
Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		254.980.000	180.447.000	70,77			-
	Jumlah Terlaksananya Rapat Paripurna	10 kegiatan	10 kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan fasilitas DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, penganggaran dan pengawasan pembangunan serta tugas DPRD lainnya							
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		37.864.119.710	29.741.416.751	78,55			
	Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	73,0 Poin	78,81 Poin	107,96			
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	106,1%	106,07			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		6.474.652.832	3.737.325.915	57,72	Adanya keterlambatan penyampaian Raperda dari Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan PROLEGDA yang telah di tetapkan	Menyampaikan surat teguran kepada Pemerintah Daerah	
	Kunjungan Kerja BAPEMPERDA	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100			
	Penyusunan dan Evaluari Prolegda	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300			
	Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Raperda Oleh Bapemperda	3 Kegiatan	10 Kegiatan	333,33			
	Kajian Raperda Inisiatif DPRD	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133,33			
	Pembahasan Rencana Kerja/ Program Kerja DPRD	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400			
	Kunjungan Kerja Pansus DPRD	14 Kegiatan	17 Kegiatan	121,43			
	Konsultasi Pansus DPRD	14 Kegiatan	10 Kegiatan	71,43			
	Koordinasi Pansus DPRD	14 Kegiatan	17 Kegiatan	121,43			
	Pembahasan Rancangan-Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022	14 Raperda	14 Raperda	100			
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		450.847.144	304.680.243	67,58	Pemerintah Daerah Kota Cilegon Lambat atau kurang segera menindaklanjuti apa yang menjadi PROLEGDA sehingga kegiatan yang telah di rencanakan khususnya Kajian raperda tidak efektif berjalan lambat	DPRD menyampaikn surat pemberitahuan agar Pemerintah Daerah segera menyampaikn Raperda yang telah di tetapkan dalam PROLEGDA	
	Pembahasan dan Kajian terhadap Perda Yang Tidak Efektif	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50			
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		395.390.880	240.170.000	60,74	Raperda Inisiatif DPRD mmebutuhkan pembahasan yang cukup mendalam dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan sehingga bappemperda membutuhkan kajian terlebih dahulu	menggunakan pihak ketiga bekerja sama dengan kampus/akademisi	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terselenggaranya Kajian Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75			
	Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Penyusunan Tata Tertib DPRD		200.000.000	153.017.500	76,51	penyusunan drat perubahan Tata tertib DPRD terlambat akibat padatnya agenda DPRD	draft perubahan Tata tertib DPRD seharusnya dibahas lebih awal	
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	99,4%	99,38			
Pembahasan KUA dan PPAS		585.754.000	523.743.625	89,41	1). Belum disampaikan Rancangan KUA/PPAS Reguler 2023 Oleh Eksekutif	1). Memberi-tahukan Kepada Pimpinan tentang Jadwal Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Penetapan KUA/PPAS Reguler sesuai ketentuan perundang-undangan	
	Terlaksananya Rapat Kajian Rancangan KUA PPAS TA. 2023 dan Rapat Gabungan Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		555.925.000	526.884.000	94,78			
	Terlaksananya Rapat Kajian Rancangan KUPA PPASP TA. 2022 dan Rapat Gabungan Pembahasan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2023	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pembahasan APBD		882.866.000	753.338.489	85,33			
	Terlaksananya Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Pembahasan APBD Perubahan		862.778.000	714.061.620	82,76			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Penetapan APBD Perubahan TA 2022	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Pembahasan Laporan Semester		2.247.570.668	1.985.142.770	88,32	1). Pengambilan Akomodasi Penginapan 30 % Peserta Pelaksana SPD ; 2). Perubahan Waktu Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Yang Harus disesuaikan dengan Hasil Penetapan Agenda Kegiatan oleh Badan Musyawarah.	1). Melakukan Perubahan Alokasi Anggaran pada Perubahan APBD terhadap SILPA Efisiensi Anggaran ; 2). Memberikan masukan kepada Pimpinan pada saat Penyusunan Rancangan Agenda Kegiatan DPRD 3) Perubahan Lokasi Tujuan Berdasarkan Usulan Badan Anggaran	
	Terlaksananya Rapat Gabungan Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Tahun Anggaran 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AKD Badan Anggaran	9 Kegiatan	8 Kegiatan	88,89			
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AKD Badan Anggaran (ABT)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		400.000.000	358.300.000	89,58	1) Penyampaian Rancangan Perda Yang terlalu dekat dengan Batas Waktu Pelaksanaan R.Paripurna Penyampaian ; 2) Perubahan Lokasi Penyeleng-garaan Sesuai Arahan Pimpinan	1). Memberitahukan Kepada Eksekutif Berkenaan Batas Waktu Penyampaian Rancangan Perda PPA 2). Melakukan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Rapat Gabungan Pembahasan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Rapat Gabungan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100,0%	100			
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		1.082.852.400	910.710.402	84,1	penentuan kas budget tidak sejalan dengan realisasi fisik di karenakan pada tahap pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan agenda dewan yang tertuang dalam hasil rapim banmus (yang seringkali berubah ubah)	membuat perencanaan kembali dalam kegiatan dan menyesuaikan dengan rapim banmus setiap bulan	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AKD Komisi 1	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			
	Kunjungan Kerja Komisi I ABT Perubahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	PELAKSANAAN SUSULAN KUNKER KOMISI I	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		1.186.124.700	999.121.456	84,23	penentuan kas budget tidak sejalan dengan realisasi fisik di karenakan pada tahap pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan agenda dewan yang tertuang dalam hasil rapim banmus (yang seringkali berubah ubah)	membuat perencanaan kembali dalam kegiatan dan menyesuaikan dengan rapim banmus setiap bulan	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AKD Kom IV	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			
	Melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV ABT Perubahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1.184.064.700	893.456.974	75,46	penentuan kas budget tidak sejalan dengan realisasi fisik di karenakan pada tahap pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan agenda dewan yang tertuang dalam	membuat perencanaan kembali dalam kegiatan dan menyesuaikan dengan rapim	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					hasil rapim banmus (yang seringkali berubah ubah)	banmus setiap bulan	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AKD Komisi II	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			
	Melaksanakan Kunjungan Kerja ABT Perubahan Komisi II	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SUSULAN KOMISI II	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		1.204.448.300	952.884.762	79,11	penentuan kas budget tidak sejalan dengan realisasi fisik di karenakan pada tahap pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan agenda dewan yang ter-tuang dalam hasil rapim banmus (yang seringkali berubah ubah)	membuat perencanaan kembali dalam kegiatan dan menyesuaikan dengan rapim banmus setiap bulan	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AKD Komisi III	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			
	Melaksanakan Kunjungan Kerja ABT Perubahan Komisi III	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SUSULAN KOMISI III	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pengawasan Penggunaan Anggaran		928.323.000	818.872.080	88,21			
	Terlaksananya Rapat Kerja Komisi Pembahasan RKA Perubahan APBD T.A 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Pembahasan RKA APBD T.A 2023	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		700.000.000	637.605.327	91,09	Tidak ada permasalahan	penyampaian LKPJ sesuai agenda	
	Terlaksannya Pembahasana Kajian tyerhadap LKPJ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksannnya Rapat Gabungan pembahasan LKPJ Walikota antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100,0%	100			
Bimbingan Teknis DPRD		3.770.250.118	3.031.968.345	80,42			
	Jumlah Terlaksananya ADEKSI	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
	Jumlah Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
	Jumlah Terlaksananya Lokakarya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Publikasi dan Dokumentasi Dewan		3.829.353.530	3.368.881.001	87,98			
	terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD kota cilegon	4 kegiatan	4 kegiatan	100			
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		300.000.000	300.000.000	100			
	Prosentase Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	6 Orang	100			
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		600.000.000	600.000.000	100			
	Prosentase Tenaga Ahli Fraksi	10 Fraksi	10 Fraksi	100			
Penyusunan Program Kerja DPRD		226.300.000	149.968.000	66,27	Terlambatnya pembahasa Rencana Kerja DPRD, dikarenakan padatnya anggada DPRD	menyesuaikan sesuai peraturan DPRD bahwa pembahasan renja dilaksanakan bulan September	
	Tersusnya Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100,0%	100			
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		215.000.100	199.069.126	92,59			
	Terhimpunya Data Pokok Pokok Pikiran DPRD Kota Cilegon	100 Buku	100 Buku	100			
Pelaksanaan Reses		4.035.549.800	3.656.713.000	90,61			
	Pelaksanaan Reses DPRD Kota Cilegon	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	50,0%	50			
Penyusunan Kode Etik DPRD		0	0	0			
	terealisasi kode etik DPRD	1 Berkas	0 Berkas	0			
Pengawasan Kode Etik DPRD		1.090.336.320	781.234.516	71,65			
	pelaksanaan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	9 Kunjungan	9 Kunjungan	100			
	Pelaksanaan Evaluasi BK	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Melaksanakan Kunjungan Kerja BK ABT Perubahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Fasilitasi Tugas DPRD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	50,0%	50			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0	0	0			
	terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		15.683.418	9.534.000	60,79			
	Tersedianya Dokuemen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		3.042.585.700	2.311.962.000	75,99			
	TERLAKSANANYA KUNJUNGAN KERJA AKD BADAN MUSYAWARAH	12 kegiatan	12 kegiatan	100			
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1.397.463.100	822.771.600	58,88			
	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD	9 kegiatan	9 kegiatan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Sekretariat DPRD terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Realisasi kinerja pada indikator nilai LAKIP perangkat daerah Sekretariat DPRD Tahun 2021 sebesar 62,30 poin dengan target sebesar 65,57 poin (95,01%) dengan kategori B. Adapun capaian nilai LAKIP tersebut berdasarkan dari beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja sebesar 18,79%
- b. Pengukuran kinerja sebesar 15,00%
- c. Pelaporan kinerja sebesar 9,75%
- d. Evaluasi internal sebesar 4,38%
- e. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 14,38%

2. Indeks RB Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD Kota Cilegon pada tahun 2021 tercapai 93,33% dari target sebesar 22,04 poin. Capaian kinerja didapatkan dari 2 (dua) aspek, yaitu :

A. Aspek Pemenuhan

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi Kebijakan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tata Laksana
- Penataan sistem manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. Aspek Reform

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi Kebijakan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tata Laksana
- Penataan sistem manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan hasil evaluasinya adalah Penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Indikator pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah Survey kepuasan layanan Sekretariat DPRD, dengan target sebesar 75,00 poin, berdasarkan hasil pelaksanaan survey layanan Sekretariat DPRD bahwa realisasi indikator ini sebesar 78,81 poin, hal ini capaian kinerjanya tercapai sebesar 107,96%.

Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan dan capaian keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

PROGRAM	Rata-rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian Indikator Program	Capaian Keuangan Program
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	101,36 %	107,96 %	78,55 %

Pada Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, untuk capaian indikator program sebesar 107,96%, sedangkan capaian output sub kegiatan (101,36%) sedangkan capaian keuangan (78,55%), hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa capaian keuangan perlu ditelaah kembali apakah belanja menunjukkan hal yang kurang selaras sehingga nilai capaian keuangan menunjukkan nilai yang kurang bagus. Hal ini perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Permasalahan ini dikarenakan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda / penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD, dan adanya peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1.5.1 Perencanaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.5.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		28.903.249.990	26.230.484.608	90,75			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		20.507.777.464	18.534.888.748	90,38			
	Nilai Lakip Perangkat daerah	80,0 Poin	80,0 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	70,0 Point	76,0 Point	108,57			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan, kualitas data dan informasi pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah							
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		4.880.553.640	4.566.379.918	93,56	tidak selarasnya program kegiatan mulai dari RKPD KUA PPAS RAPBD dan APBD dikarenakan sangat dinamisnya kebutuhan dan kebijakan Pimpinan dan DPRD	melengkapi administrasi Berita Acara setiap tahapan RKPD KUA PPAS RAPBD dan APBD	
	Indeks Perencanaan	92,00%	94,13%	102,32			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100,0%	100			
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		57.876.770	57.876.770	100			
	Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis	2 Dokumen	2 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun						
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		49.910.950	45.112.000	90,38			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pusat, Povinsi dan Daerah Perubahan dan Reguler yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Pelaksanaan Konsultasi Publik		149.989.000	145.573.450	97,06			
	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	200 Orang	200 Orang	100			
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		54.524.730	51.867.276	95,13			
	Jumlah Dokumen Forum OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah OPD Pelaksana Forum OPD	11 OPD	11 OPD	100			
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		149.972.750	131.724.750	87,83			
	Jumlah Peserta Musrenbang - Jumlah Stakeholder yang hadir dalam MusrenbangRKPD	300 Undangan	300 Undangan	100			
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		210.224.130	189.731.130	90,25			
	Jumlah Pembekalan Panitia dan Fasilitator Musrenbangcam/kel	200 Orang	200 Orang	100			
	Jumlah Kecamatan yang dimonitor melak-sanakan Musrenbang Kelurahan	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100			
	Jumlah Kecamatan yang dimonitor melak-sanakan Musrenbang Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100			
	Jumlah Bahan Musren-bang Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	100			
	Jumlah Bahan Musren-bang Kelurahan	43 Dokumen	43 Dokumen	100			
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		199.940.450	133.301.450	66,67			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun N	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen RKPD Tahun N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Peserta Koordinasi Penyusunan Dokumen RKPD Kota Cilegon Tahun N+1	50 Orang	50 Orang	100			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100,0%	100			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1.538.114.970	1.519.642.050	98,8			
	Jumlah Dokumen Analisis Data perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Dokumen Data Prioritas Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Dokumen Data Sektoral Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Dokumen Data Sektoral Perencanaan	1 Dok	1 Dok	100			
	Penyusunan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	1 Dok	1 Dok	100			
	Operasional Sekretariat Satu Data Kota Cilegon	12 Keg	12 Keg	100			
	Rakor Forum data Pembangunan daerah	4 Keg	4 Keg	100			
	Operasional TKPK	12 Keg	12 Keg	100			
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		99.999.890	95.111.600	95,11			
	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100,0%	100			
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		1.425.000.000	1.299.681.592	91,21			
	Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 orang	100 orang	100			
	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan	4 kali	4 kali	100			
	Jumlah dokumen hasil pengendalian perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan tahunan	2 dokumen	2 dokumen	100			
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		75.000.000	73.448.000	97,93			
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 kali	1 kali	100			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		870.000.000	823.309.850	94,63			
	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ walikota tahun n-1)	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah dokumen monev kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, TP, dsb	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPd Kota Cilegon	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan, kualitas data dan informasi pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		3.514.918.886	3.129.215.942	89,03			
	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan	92,00%	99,20%	107,83			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100,0%	100			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		268.670.000	267.635.000	99,61	-	-	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		149.690.000	148.979.880	99,53			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		422.452.280	393.420.290	93,13			
	Penyediaan dukungan Operasional Sekretariat Bersama pelaksanaan program DPWkel se-Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	DPWKel Award	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Publikasi DPKWel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pengendalian dan Pendampingan Pelaksanaan Program DPWKel di 43 kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100.000.000	98.656.250	98,66	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN belum sesuai dengan surat Edaran BAPPEDA - Pagu kegiatan Prioritas Daerah banyak yang di geser untuk sub kegiatan lain - Ada beberapa sub kegiatan yang belum dirinci - Masih ada beberapa sub kegiatan yang mengalokasi sewa tempat ruang pertemuan atau hotel	- Mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyesuaikan sub kegiatan yang belum dirinci - Menyesuaikan kembali pagu anggaran sub kegiatan Prioritas Daerah dan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Menyisir rincian belanja pada setiap sub kegiatan yang masih ada belanja sewa ruang rapat pertemuan	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang di Asistensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100.000.000	97.470.000	97,47			
	Jumlah Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		718.451.136	582.824.280	81,12	GERMAS : 1. Pada kegiatan Gernas pengumpulan data dari OPD tidak sesuai dengan tenggat waktu	GERMAS : 1. Penyampaian urgensi pengumpulan data Gernas kepada OPD yang bersangkutan dan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					STUNTING : 1. Masih kurangnya sinergitas peran tim TPPS Kota Cilegon dalam Penurunan percepatan penurunan stunting 2. Masih kurang maksimalnya peran pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting RAKORTEK PENDIDIKAN : 1. Perencanaan Pemerintah Daerah untuk Indikator Urusan Pendidikan yang mendukung Standar Pelayanan Minimum yang tertuang pada aplikasi e-Rakortek masing-masing Kabupaten/Kota	menjadikan kegiatan Germas sebagai program prioritas STUNTING : 1. Tim TPPS Berkomitmen Memastikan Program Dan Kegiatan Yang Disertai lndikator Target Kinerja Dalam Rencana Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota Cilegon 2. Pemberdayaan masyarakat menggalang komitmen semua sektor dan seluruh lapisan masyarakat serta menggerakkan tokoh masyarakat, ulama. Akademisi, aktivis, dunia usaha	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi sub bidang pembangunan manusia	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100			
	Jumlah Rakor Perencanaan Kegiatan Bersumber dana APBD : Kota, APBD Prov/APBN Sub. bidang sosial	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100			
	Jumlah Fasilitas Program Lintas sektor Sub. bidang sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100,0%	100			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		38.113.372	37.415.572	98,17			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah OPD dalam pembahasan perencanaan pembangunan	4 OPD	4 OPD	100			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		53.880.827	47.092.730	87,4			
	Jumlah OPD yang diasistensi bidang perekonomian	4 OPD	4 OPD	100			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		93.841.791	92.863.591	98,96	1) Pada pelaksanaan pembahasan LKPJ masih adanya OPD yang tidak hadir sesuai jadwal undangan sehingga harus di-reschedule 2) Pada pelaksanaan analisa capaian Kinerja Draf final bahan penyusunan LKPJ Walikota Th 2021 waktu pelaksanaan masih membutuhkan waktu tambahan sehingga adanya OPD yang menunggu lama.	1) Perlunya ketegasan pimpinan OPD dalam memberi tugas kehadiran undangan 2) Menambah waktu pembahasan analisa capaian	
	Jumlah OPD yang di monitoring dan evaluasi	8 OPD	8 OPD	100			
	Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan bahan penyusunan LKPJ	12 OPD	12 OPD	100			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		117.529.138	98.586.700	83,88	Realisasi target kinerja sebanyak 5 rakor dari target 6 rakor, dikarenakan waktu pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya	mengubah waktu palaksanaan/koordinasi dengan lintas sektor	
	Rapat koordinasi pembangunan	6 rakor	6 rakor	100			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		100.000.000	90.553.747	90,55	belum menemukan tenaga ahli yang	koordinasi dengan lembaga profesi	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					dibutuhkan dalam penyusunan ini		
	Jumlah dokumen analisa perencanaan sub bidang LH SDA dan Kebencanaan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		36.670.200	34.590.200	94,33	tidak ada permasalahan, semua sesuai timeline		
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diasistensi	8 dokumen	8 dokumen	100			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		150.000.000	111.641.200	74,43	Pelaksanaan evaluasi RPJMD kepada Perangkat Daerah sudah dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi sehingga sebagian anggaran tidak dapat terserap.	Berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya.	
	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	20 dokumen	20 dokumen	100			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		163.329.800	147.868.161	90,53	tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule		
	Jumlah dokumen perencanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	100			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100,0%	100			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		78.485.000	74.827.000	95,34			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 DOK	8 DOK	100			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		361.981.192	319.498.140	88,26			
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 DOK	1 DOK	100			
	Dokumen Monev Implementasi Kebijakan SPAM dan SANITASI Kota Cilegon	1 Dok	1 Dok	100			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		561.824.150	485.293.201	86,38			
	Pelaksanaan Pasca Musrembang	1 DOK	1 DOK	100			
	Dokumen Updating Data Prasarana	1 DOK	1 DOK	100			
	Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	8 Rapat	8 Rapat	100			
	Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4 DOK	4 DOK	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengampu unsur penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang mendukung Misi ke 1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel.

Tujuan dari misi ke 1 yaitu Peningkatan layanan Pemerintahan dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD dalam mendukung pelaksanaan Urusan Perencanaan yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Indeks Perencanaan, Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan.

Unsur penunjang bidang urusan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) memiliki 3 (tiga) program dengan 4 (empat) indikator program yang harus dicapai yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator program :
 - a. Nilai LAKIP perangkat daerah dengan target 80 poin
 - b. Indeks RB perangkat daerah dengan target 70 poin
2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator program :
 - a. Indeks perencanaan dengan target 92%.
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator program :
 - a. Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan target 92%.

Sedangkan capaian kinerja anggaran urusan Perencanaan Bappedalitbang sebesar 90,75% atau terealisasi sebesar Rp. 26.230.484.608,00 dari target anggaran sebesar Rp. 28.903.249.990,00.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Bappedalitbang terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Hasil pengukuran kinerja indikator ke-1 yaitu Nilai Lakip Perangkat Daerah pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Artinya Dokumen Penilaian Lakip Bappedalitbang Kota Cilegon pada tahun 2021 mendapat Predikat BB. Hal ini dapat dilihat dari Surat Inspektorat Kota Cilegon Nomor 700/1446/Sekret Perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021 Tanggal 11 Oktober 2022. dimana evaluator memberikan nilai 79,84 poin atau dibulatkan menjadi 80 poin yang artinya bahwa Lakip Bappedalitbang Kota Cilegon mendapat predikat BB (Sangat Baik). Adapun capaian nilai LAKIP tersebut dengan beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Perencanaan sebesar 27.24%
- b. Pengukuran kinerja sebesar 20.63%
- c. Pelaporan kinerja sebesar 4.26%
- d. Evaluasi internal sebesar 7,06%
- e. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 15.59%

2. Indeks RB Perangkat Daerah

Hasil pengukuran kinerja indikator ke-2 yaitu Indeks RB Perangkat Daerah pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Artinya Dokumen PMPRB Bappedalitbang Kota Cilegon pada tahun 2021 mendapat Predikat B. Hal ini dapat dilihat dari Surat Inspektorat Kota Cilegon Nomor 700/1850/SEKRET Perihal Penyampaian hasil evaluasi penilaian mandiri program reformasi birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2022. Evaluator memberikan nilai 75,85 yang artinya bahwa Indeks RB Bappedalitbang Kota Cilegon mendapat predikat BB (Baik).

Kesesuaian pencapaian kinerja program ini telah selaras/sesuai dengan dukungan kegiatannya yaitu :

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%)

- b. Administrasi keuangan perangkat daerah (100%)
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (100%)
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)
- e. Administrasi umum perangkat daerah (96,51%)
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah (100%)
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (94,50%)
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)

Sedangkan capaian kinerja anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada Bappedalitbang sebesar 90,38% dengan target anggaran sebesar Rp 20.507.777.464,- dan realisasi sebesar Rp 18.534.888.748,-.

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Indeks perencanaan bertujuan untuk mengukur kualitas perencanaan yang diukur dari aspek integrasi/keselarasan, konsistensi dan sinkronisasi. Secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks perencanaan	$(\text{tingkat integrasi} + \text{tingkat konsistensi} + \text{tingkat sinkronisasi})/3$ - Tingkat integrasi dokumen perencanaan diukur dari keselarasan program dan kegiatan antara RKPD dan RPJMD - Tingkat konsistensi dokumen perencanaan diukur dari keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan antara RKPD dan APBD - Tingkat sinkronisasi dokumen perencanaan diukur dari keselarasan prioritas pembangunan pada RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP	102,32%

Dari data diatas target terhadap indikator tersebut sebesar 92% maka capaian indeks perencanaan adalah sebesar 94,13%, sedangkan realisasi kinerja program dari indikator tersebut terhadap target kinerjanya adalah 102,32%, sehingga capaiannya bisa dikategorikan “**Sangat tinggi**”.

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan target 91,00%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase keselarasan dokumen perencanaan	$(\text{tingkat integrasi dokren PD} + \text{tingkat konsistensi dokren PD} + \text{tingkat sinkronisasi dokren PD})/3$ - Persentase integrasi, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah menunjukan rata-rata kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	107,83%

Dari data diatas capaian persentase keselarasan dokumen perencanaan adalah sebesar 99,20%, dan realisasi kinerja program dari indikator tersebut terhadap target kinerjanya adalah : 107,83%, sehingga capaiannya bisa dikategorikan “**Sangat tinggi**”.

Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja progam, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program dan Indikator Output Sub Kegiatan, maka perbandingannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.29%	98.44%	90,38%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	102.32%	100,00%	93,56%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	107.83%	100%	89,03%

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (104.29%) dengan capaian indikator output (98.44%), maupun antara kedua indikator tersebut terhadap capaian keuangan (90,38%). Hal yang dapat diperhatikan lebih lanjut adalah capaian keuangan yang memiliki gap realisasi paling kecil, namun gap ini menunjukkan hal yang baik, yaitu anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terdapat kesesuaian yang baik pada seluruh komponen analisa, baik itu antara capaian indikator program (102.32%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100 %), maupun antara kedua indikator tersebut terhadap capaian keuangan (93,56%). Hal yang dapat diperhatikan lebih lanjut adalah capaian keuangan yang memiliki gap realisasi paling kecil, namun gap ini menunjukkan hal yang baik, yaitu anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terdapat kesesuaian yang baik antara capaian indikator program (107.83%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100%), kedua komponen tersebut memiliki angka capaian yang sangat dekat nilainya, yang menunjukkan output sub kegiatan yang dirumuskan sangat mendukung ketercapaian indikator program. Pada capaian keuangan (89,03%) memiliki nilai capaian yang rendah daripada capaian indikator program dan indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang direalisasikan sudah mencapai target output sub kegiatan dan juga indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dibuktikan dengan kota Cilegon menjadi nominator 10 besar Anugerah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Piagam nomor : 54/M.PPN/HK/04/2022 dari Menteri PPN.

3.1.5.2 Keuangan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, UPTD PAJAK WILAYAH I-IV

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.5.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Keuangan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		136.816.436.301	86.103.289.803	62,93			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		102.877.749.654	57.963.070.701	56,34			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	73,0 Poin	75,31 Poin	103,16			
	Indeks RB Perangkat Daerah	63,0 Poin	79,61 Poin	126,37			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	89,0 Poin	89,06 Poin	100,07			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas perencanaan, pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan retribusi daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		13.835.501.971	10.102.886.563	73,02	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan indikator komposit, yaitu indikator yang diampu oleh beberapa OPD serta IPKD dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga mempunyai kompleksitas permasalahan diantaranya 1. Kurangnya Koordinasi antar Pengampu dimensi IPKD sehingga adanya OPD yang tidak menyampaikan data. 2. Berdasarkan evaluasi selama 2 tahun, nilai yang didapat BPKPAD masih jauh dibawah target. 3. Kurangnya informasi atas pelimpahan	1. Lebih meningkatkan koordinasi antar pemangku dimensi IPKD guna memastikan keterisian data dalam laman http://ipkd.bpp-kemendagri.go.id 2. Koordinasi minimal dilaksanakan 3 (tiga) kali yaitu sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan saat keputusan Gubernur Banten tentang penilaian IPKD telah diterima. 3. Berdasarkan hasil	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					tugas pokok antar pejabat karena adanya mutasi.	evaluasi selama 2 Tahun jauh dibawah target, perlu dilakukan penyesuaian atas target agar lebih rasional pada saat perubahan Renstra.	
	Indeks Pengelolaan Keuangan	86,0 Poin	45,16 Poin	52,51			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	90,9%	90,91			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		106.545.062	65.972.500	61,92	Ada belanja yang tidak dapat direalisasikan karena sudah tidak relevan. Selain itu, sulitnya penyesuaian waktu dikarenakan padatnya kegiatan di TW IV	Kedepan belanja yang sudah tidak relevan akan dialo-kasikan ke rekening belanja yang lain. Selain itu akan diupayakan untuk dapat melakukan penyerapan semaksimal mungkin	
	Cetak Dokumen rancangan KUA Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Dokumen Rancangan PPAS Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak KUA Reguler Final Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		103.437.736	68.179.600	65,91	Ada belanja yang tidak dapat direalisasikan karena sudah tidak relevan. Selain itu, sulitnya penyesuaian waktu dikarenakan padatnya kegiatan di TW IV	Kedepan belanja yang sudah tidak relevan akan dialo-kasikan ke rekening belanja yang lain. Selain itu akan diupayakan untuk dapat melakukan penyerapan semaksimal mungkin.	
	Jumlah Dokumen Final PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang tersusun	100 Dokumen	100 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Rancangan KUA Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang tersusun	100 Dokumen	100 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang tersusun	100 Dokumen	100 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Final KUA Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang tersusun	100 Dokumen	100 Dokumen	100			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		294.546.158	279.424.536	94,87			
	Verifikasi Penelitian RKA - SKPD TA 2023	100 Verifikasi	100 Verifikasi	100			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		294.342.189	266.456.920	90,53			
	Melaksanakan Kegiatan Verifikasi RKAP APBD TA 2022	100 Verifikasi	100 Verifikasi	100			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		326.751.931	211.450.000	64,71	Ada belanja yang tidak dapat direalisasikan karena sudah tidak relevan.	Kedepan tupoksi sudah jelas, maka diupayakan untuk diserap semaksimal mungkin.	
	Melaksanakan kegiatan Verifikasi DPA-SKPD APBD 2023 dan Penyusunan RAK 2023	100 Verifikasi	100 Verifikasi	100			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		339.086.463	237.938.000	70,17	Ada belanja yang tidak dapat direalisasikan karena sudah tidak relevan	Kedepannya Tupoksi sudah jelas, maka diupayakan untuk diserap semaksimal mungkin.	
	Cetak Buku Pengesahan DPPA	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak DPPA Verifikasi	100 Buku	100 Buku	100			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		383.137.623	285.175.300	74,43	Realisasi cetak buku lebih sedikit dibandingkan dengan spesifikasi di DPA sehingga mempengaruhi harga satuan. Selain itu, terdapat honor kegiatan yang melekat dan	Lembar atau halaman pada cetak buku Perda/Perwal bersifat kondisional, tidak dapat diprediksi. Untuk kedepannya	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					sudah tidak relevan. Kode rekening makan dan minum rapat tidak dapat diserap dikarenakan jadwal penyusunan anggaran yang padat.	rekening belanja honor kegiatan akan diganti dengan kode rekening belanja yang lain yg lebih relevan. Serta ke depannya akan diupayakan penye--rapan anggaran yang maksimal.	
	Cetak Dokumen Raperda Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Dokumen Draft Rancangan Perwal Reguler Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Dokumen Nota Keuangan Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Peraturan Walikota TA 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Dokumen Raperwal Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Dokumen Perda Tahun 2023	100 Buku	100 Buku	100			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		385.437.915	251.034.300	65,13	Realisasi cetak buku lebih sedikit dibandingkan dengan spesifikasi di DPA sehingga mempengaruhi harga satuan. Selain itu, terdapat honor kegiatan yang melekat dan sudah tidak relevan. Kode rekening makan dan minum rapat tidak dapat diserap dikarenakan jadwal penyusunan anggaran yang padat.	Lembar atau halama pada cetak buku Perda/Perwal bersifat kondisional, tidak dapat diprediksi. Untuk kedepannya rekening belanja honor kegiatan akan diganti dengan kode rekening belanja yang lain yg lebih relevan. Serta kedepannya akan diupayakan penyerapan anggaran yang maksimal.	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Nota Keuangan APBD Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Raperwal Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Raperda Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Perwal Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Perda Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Materi Rapat Pembahasan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Draft Raperda Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
	Cetak Draft Raperda Perubahan	100 Buku	100 Buku	100			
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		489.859.523	453.542.000	92,59	penyusunan dokumen tidak dilaksanakan mengingat pedoman penyusunan RKA terbit setelah tahapan penyusunan RKA	pada APBD perubahan tahun 2022 alokasi penyusunan dokumen RKA dialihkan kedalam pelaksanaan penyusunan juknis anggaran	
	Penyusunan Dokumen dan Juknis Penyusunan Dokumen Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Dokumen Standar Biaya Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Dokumen Pedoman ASB	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		107.819.462	96.711.462	89,7	- Indikator penyusunan data base dan RPJMD masih tertampil pada E Sakip di tahun 2022 - Revisi RPJMD dilakukan di tahun ketiga kepala daerah menjabat	- Perlu dianggarkannya alokasi untuk penyusunan database pada masing2 OPD dan bidang teknis - perlu menggangkannya penambahan pagu anggaran di tahun ketiga untuk indikator tersebut.	
	Terlaksananya rapat penyusunan proyeksi pendapatan APBD Reguler 2022 dan APBD Perubahan 2021	2 Rapat Kegiatan	2 Rapat Kegiatan	100			
	Tersedianya Dokumen Musrenbang terkiat Pendapatan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya Dokumen LKPJ terkait Pendapatan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		296.085.086	0	0	Kegiatan Bintek bertepatan dengan tahapan pelaksanaan anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.	Upaya telah dilakukan, namun peraturan yang akan disosialisasikan terlambat terbit. Kegiatan Bintek berkaitan dengan terbitnya Peraturan dari Pemerintah Pusat.	
	Kegiatan Bintek Penganggaran	100 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Kegiatan Bintek Kebijakan Penganggaran TAPD	100 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100,0%	100			
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		80.859.068	71.371.600	88,27			
	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	100			
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		142.570.653	85.318.750	59,84	dikarenakan ada 2 sub kegiatan didalamnya yaitu Anggaran Kas dan Uang Persediaan	Agar sub. keg ini bisa di pisah menjadi kegiatan masing-masing sehingga bisa lebih paham berapa anggaran yang sudah terserap maupun tidak terserap	
	Jumlah Dokumen SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		35.860.984	30.166.000	84,12			
	Jumlah laporan penyaluran dana perimbangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		30.466.316	25.303.000	83,05			
	Jumlah Dokumen Transaksi non tunai terpenuhi	12 dokumen	12 dokumen	100			
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		432.678.947	420.701.600	97,23			
	terlaksananya Rekon Gaji Pemerintah kota cilegon	576 OPD	576 OPD	100			
	terlaksananya SIM Gaji Pemerintah kota cilegon	576 OPD	576 OPD	100			
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		56.409.000	50.885.000	90,21			
	Terlaksananya penyusunan dokumen pedoman DPA APBD	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		340.922.000	302.340.880	88,68			
	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	38 OPD	38 OPD	100			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	86,4%	86,38			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		240.470.285	189.805.835	78,93	- Keterlambatan tersedianya output Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran) dalam FMIS, output laporan baru ada saat bulan september - Di FMIS belum tersedia Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan (SPJ Fungsional Bendahara penerimaan (SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan) sehingga untuk kegiatan evaluasi bendahara penerimaan belum dilaksanakan	Berkoordinasi dengan BPKP	
	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan	11 SKPD/Unit	10 SKPD/Unit	90,91			
	Berita Acara Rekonsiliasi Belanja	50 SKPD/Unit	50 SKPD/Unit	100			
	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	132 Dokumen	96 Dokumen	72,73			
	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	600 Dokumen	600 Dokumen	100			
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		88.373.154	82.728.370	93,61			
	Berita Acara Rekonsiliasi Semester I	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Berita Acara Rekonsiliasi Semester II	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		241.045.625	227.201.685	94,26			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pendampingan Sistem FMIS oleh BPKP	12 Bulan	12 Bulan	100			
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		85.993.950	83.420.330	97,01			
	LKPD Unaudited	1 dokumen	1 dokumen	100			
	LKPD Audited	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Laporan Semester Pertama dan Prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		95.990.881	78.901.900	82,2			
	Perwal Pertanggung-jawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Perda Pertanggung-jawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Raperwal Pertanggung-- jawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Raperda Pertanggung- jawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		98.831.600	59.068.295	59,77	DPA disusun dengan asumsi bahwa BPKP akan memerlukan akomodasi hotel, namun pada saat kegiatan berlangsung akomodasi tersebut sudah disediakan oleh BPKP	Koordinasi lebih intens dalam hal penyediaan akomodasi agar sesuai dengan yang direncanakan	
	Regulasi Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Regulasi	2 Regulasi	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		133.742.720	116.668.000	87,23			
	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100			
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		70.598.000	66.465.600	94,15			
	Peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	200 Orang	173 Orang	86,5			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100,0%	100			
Analisis Investasi Pemerintah Daerah		354.580.000	93.487.500	26,37	dikarenakan waktu yang pelaksanaannya terlalu sedikit	kegiatan di upayakan di awal tahun	
	Tersusunnya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		7.871.026.160	5.743.640.000	72,97	Karena sesuai dengan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) dari OPD Terkait	Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	50,0%	50			
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		308.033.480	159.527.600	51,79	Kegiatan Bintek Penganggaran OPD tidak dilaksanakan karena Peraturan penganggaran keuangan daerah Tahun 2023	Upaya telah dilakukan, namun peraturan yang akan disosialisasikan terlambat terbit. Kegiatan Bintek berkaitan dengan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					belum terbit, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.	terbitnya Peraturan dari Pemerintah Pusat.	
	Bintek Kebijakan Anggaran (TAPD)	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100			
	Bintek Penganggaran OPD	100 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
Arah kebijakan : Pendayagunaan asset daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		6.423.772.442	5.665.310.960	88,19			
	Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset	100,00%	100,00%	100			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	90,4%	90,43			
Penyusunan Standar Harga		150.546.200	140.604.500	93,4	Keterlambatan penyampaian usulan SSH dari tiap OPD	Rapat Koordinasi	
	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		48.998.834	47.900.000	97,76	Keterlambatan RKBMD dan RKPBMMD dari tiap OPD	Surat Edaran	
	Jumlah Dokumen Updating Standar Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		243.217.200	239.887.500	98,63		Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan pada Bidang aset BPKPAD melakukan verifikasi RKBMD, RKPBMMD dan Rencana Penghapusan BMD tiap Tahun Anggaran n-1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		155.199.925	147.609.250	95,11	Kurangnya Informasi dalam Kebijakan Pengelolaan BMD	Bidang Aset BPKPAD akan melakukan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					pada Pengguna dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon	Monitoring dan Evaluasi dan menginformasikan terkait Kebijakan Pengelolaan BMD Pada OPD/UPB dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Penatausahaan Barang Milik Daerah		1.304.833.562	1.299.944.400	99,63			
	Jumlah laporan daftar barang aset BMD	6 Daftar Barang	6 Daftar Barang	100			
	Jumlah Updating data dan Modul Sistem Manajemen aset untuk setiap OPD	2 Kali	2 Kali	100			
Inventarisasi Barang Milik Daerah		54.079.343	37.808.500	69,91	Belanja Makanan dan minuman Inventariasi BMD tidak terserap 100% karena target pelaksanaan kegiatan sudah terpenuhi, dan hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran	Melakukan proses perencanaan yang lebih efektif dan efisien	
	Jumlah laporan inventarisasi BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengamanan Barang Milik Daerah		2.932.276.175	2.627.993.710	89,62	Terkendala kelengkapan administrasi kelengkapan tanda tangan tanda batas tanah milik pihak lain dengan pemkot	koordinasi pihak terkait	
	Jumlah Dokumen Validasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Gedung Pemerintah Kota Cilegon	1 Jenis	1 Jenis	100			
	Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Roda Dua	1 Jenis	1 Jenis	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Roda Empat	1 Jenis	1 Jenis	100			
	Jumlah Sertifikat Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon	100 Sertifikat	1 Sertifikat	1			
Penilaian Barang Milik Daerah		179.143.930	57.421.300	32,05	Anggaran dialokasikan bagi OPD yang akan melaksanakan Penilaian BMD pada OPD, di tahun 2022 ada OPD yang tidak jadi melaksanakan Penilaian BMD sehingga berpengaruh terhadap tidak terserapnya anggaran dan tidak tercapainya target indikator keluarannya	Mempertimbangkan kegiatan dan anggaran Penilaian BMD dilaksanakan pada OPD terkait	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	4 Dokumen	1 Dokumen	25			
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		733.574.810	453.691.900	61,85	Kajian Pemanfaatan Gedung Ex Matahari tidak dapat di realisasikan karena Objek yang dituju masih dalam proses pengadilan, progress peradilan terakhir setelah kalah banding Para penggugat mengajukan Kasasi, sampai dengan saat ini belum ada putusan yang dianggap sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).	Pemerintah Kota Cilegon tetap akan melaksanakan upaya Pengamanan Hukum terhadap asetnya, jika syarat/aspek legal sudah terpenuhi maka akan melanjutkan proses optimalisasi BMD dalam hal ini Pengembangan Gedung Ex Matahari.	
	Jumlah Kajian Pemanfaatan Gedung ex Matahari	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Surat Keputusan Walikota Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	50 Dokumen Perjanjian	50 Dokumen Perjanjian	100			
	Jumlah Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		154.521.547	150.895.400	97,65			
	Laporan rekonsiliasi BMD Semester II Th 2021	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Laporan rekonsiliasi BMD Semester I Th 2021	1 Laporan	1 Laporan	100			
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		161.856.147	157.313.700	97,19			
	Jumlah penyusunan laporan BMD dari OPD	1 Laporan	1 Laporan	100			
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		305.524.769	304.240.800	99,58			
	Jumlah peserta bimtek penatausahaan persediaan	250 orang	250 orang	100			
	Jumlah UPB yang dimonitoring tentang penerapan penatausahaan aset yang sesuai dengan aturan yang berlaku	125 UPB	125 UPB	100			
Arah kebijakan : Pengoptimalisasikan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		13.679.412.234	12.372.021.579	90,44			
	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	5,40%	27,23%	504,26			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	102,6%	102,59			
Perencanaan pengelolaan pajak daerah		158.247.950	148.948.000	94,12			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Kajian Potensi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100			
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		358.220.010	329.920.000	92,1	Belum ditetapkan Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga penyusunan RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah turunan Undang - Undang HKPD terhambat.	Tetap melakukan persiapan penyusunan RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah turunan UU HKPD meskipun Peraturan Pemerintah belum ditetapkan namun Naskah Akademik tetap kami buat dan akan dilakukan pembahasan bersama dengan OPD Pengelola Retribusi, Bagian Hukum, Bagian Eksda dan UNTIRTA selaku pembuat Naskah Akademis	1. Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon. 2. Lebih kreatif dalam menggali potensi PAD dengan memperluas para wajib pajak.
	Jumlah Regulasi tentang Pajak Daerah	2 regulasi	2 regulasi	100			
	Jumlah sertifikat ISO	1 sertifikat	1 sertifikat	100			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		601.191.000	582.116.176	96,83			
	Jumlah Jenis Media Sosialisasi / Penyuluhan Pajak Daerah	4 Jenis Media	4 Jenis Media	100			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1.442.945.425	1.418.766.807	98,32			Membuat system pembayaran pajak berbasis IT.
	Jumlah Penyediaan Server	6 Unit	6 Unit	100			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		45.648.000	45.640.487	99,98			Optimalisasi Pajak Parkir, Reklame dan Hiburan.
	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang Termutakhirkan Data Subjek dan Objeknya	7 Jenis Pajak	7 Jenis Pajak	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		519.073.500	417.442.306	80,42			Memperbanyak pemasangan tapping box di hotel dan restoran.
	Jumlah Alat Perekam Data Transaksi yang dipelihara	142 Unit	142 Unit	100			
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		125.640.000	113.215.000	90,11			Meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
	Jumlah Penilaian Objek Pajak PBB Potensial	12 Objek Pajak	12 Objek Pajak	100			
Penetapan Wajib Pajak Daerah		181.387.500	164.581.950	90,74			
	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	162000 Objek Pajak	179562 Objek Pajak	110,84			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		40.000.000	33.007.750	82,52			
	Jumlah Wajib Pajak yang Terlayani	471 Wajib Pajak	480 Wajib Pajak	101,91			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		28.813.380	25.283.370	87,75			
	Jumlah Data Rekonsiliasi BPHTB dan PBB yang tersedia	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
Penagihan Pajak Daerah		8.967.479.161	7.954.134.557	88,7			Memberikan relaksasi pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik berupa kenaikan maupun bunga bagi wajib pajak yang mengajukan.
	Jumlah Rapat Koordinasi Terkait Pendapat Pertimbangan hukum dari Kejari	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100			
	Prosentase Realisasi Piutang yang Tertagih	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tercapainya Target Pajak Daerah Per Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		10.000.000	10.000.000	100			
	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100			
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		998.515.100	956.411.196	95,78			Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan lebih optimal.
	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	166 Wajib Pajak	244 Wajib Pajak	146,99			
	Jumlah Wajib Pajak yang diberi Penghargaan untuk masa pajak Tahun N-1	250 Wajib Pajak	250 Wajib Pajak	100			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		202.251.208	172.553.980	85,32			Melibatkan Unsur Masyarakat untuk sosialisasi dan pemungutan Retribusi
	Terlaksananya Evaluasi atas Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Daerah	2 triwulan	2 triwulan	100			
	Terlaksananya Monotoring Penerimaan Harian atas Objek/Subjek sektor Pajak Dan Retribusi	4 objek/subjek	4 objek/subjek	100			
	Terlaksananya Penyusunan Daftar Resiko Permasalahan Pemungutan PAD	2 triwulan	2 triwulan	100			
	Terlaksananya Pengawasan atas peredaran benda berharga yang dikelola OPD	4 triwulan	4 triwulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Bimbingan/pendampingan dan pemecahan permasalahan pemungutan PAD	2 rapat kegiatan	2 rapat kegiatan	100			
	Pemeliharaan Sistem Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I		1.410.308.425	1.319.895.244	93,59			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.032.838.425	960.194.604	92,97			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	73,0 Poin	75,31 Poin	103,16			
	Indeks RB Perangkat Daerah	63,0 Poin	79,61 Poin	126,37			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	89,0 Poin	89,06 Poin	100,07			
Arah kebijakan : Pengoptimalisasikan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		377.470.000	359.700.640	95,29			
	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	5,40%	26,93%	498,7			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	94,8%	94,79			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		193.720.000	179.375.640	92,6			
	Jumlah Media Sosialisasi/Penyuluhan PBB-P2 UPTD PPD Wilayah I	1 Jenis/Media	1 Jenis/Media	100			
	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah UPTD PPD Wilayah I	120 orang	120 orang	100			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		183.750.000	180.325.000	98,14			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Pemohon yang Melakukan Konsultasi dan dilakukan Verifikasi PBB P2 oleh Petugas UPTD PPD Wilayah I	330 Dokumen	330 Dokumen	100			
	Jumlah Lembar SPPT yang Disampaikan UPTD PPD Wilayah I	35321 Lembar	27962 Lembar	79,17			
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II		1.460.574.946	1.432.184.488	98,06			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.049.132.647	1.027.766.988	97,96			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	73,0 Poin	75,31 Poin	103,16			
	Indeks RB Perangkat Daerah	63,0 Poin	79,61 Poin	126,37			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	89,0 Poin	89,06 Poin	100,07			
Arah kebijakan : Pengoptimalisasikan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		411.442.299	404.417.500	98,29			
	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	5,40%	26,93%	498,7			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100,0%	100			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		243.856.299	236.842.500	97,12			
	Jumlah Media Sosialisasi/Penyuluhan PBB-P2 (UPTD Pajak 2)	1 Media	1 Media	100			
	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (UPTD Pajak 2)	120 Orang	120 Orang	100			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		167.586.000	167.575.000	99,99			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Lembar SPPT yang Disampaikan (UPTD Pajak 2)	31397 Lembar	31397 Lembar	100			
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III		1.500.152.324	1.472.432.821	98,15			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.132.243.775	1.106.365.221	97,71			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	73,0 Poin	75,31 Poin	103,16			
	Indeks RB Perangkat Daerah	63,0 Poin	79,61 Poin	126,37			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	89,0 Poin	89,06 Poin	100,07			
Arah kebijakan : Pengoptimalisasikan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		367.908.549	366.067.600	99,5			
	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	5,40%	26,93%	498,7			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100,0%	100			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		182.018.749	182.017.800	100			
	Penyediaan Pemberitaan Media Elektronik	1 Item	1 Item	100			
	Peserta Penyuluhan Pajak Daerah	110 Orang	110 Orang	100			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		185.889.800	184.049.800	99,01			
	Dokumen Permohonan Konsultasi dan Verifikasi PBB-P2	150 Dokumen	150 Dokumen	100			
	Lembar SPPT	20367 Lembar	20367 Lembar	100			
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV		1.416.811.991	1.336.618.284	94,34			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.126.588.991	1.062.272.884	94,29			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	73,0 Poin	75,31 Poin	103,16			
	Indeks RB Perangkat Daerah	63,0 Poin	79,61 Poin	126,37			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	89,0 Poin	89,06 Poin	100,07			
Arah kebijakan : Pengoptimalisasikan kualitas layanan pendapatan daerah serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		290.223.000	274.345.400	94,53			
	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	5,40%	26,93%	498,7			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100,0%	100			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		115.600.000	99.722.400	86,27			
	jumlah media sosial penyuluhan pajak PBB-P2 (Pariwara Radio)	1 jenis/media	1 jenis/media	100			
	jumlah peserta penyuluhan pajak PBB-P2	80 orang/wajib pajak	80 orang/wajib pajak	100			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		174.623.000	174.623.000	100			
	Jumlah lembar SPPT PBB yang di disampaikan (Kecamatan Jombang dan Kecamatan Purwakarta)	28085 lembar	28085 lembar	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon memiliki 3 (tiga) indikator program generik yang harus dicapai yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah (target: 73,00 point)
- b. Indeks RB Perangkat Daerah (target 63,00 point)
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) (target: 89,00 point)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud:

- a. Sesuai amanat PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka instansi pemerintah harus mengimplementasikan SAKIP untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Surat Inspektorat No. 700/1604/Sekret pada tanggal 04 November 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKAD Kota Cilegon Tahun 2021, laporan hasil evaluasi LAKIP BPKAD Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar **75,31 Point (BB = Sangat Baik)**, sehingga mencapai 103,16% dari Nilai Lakip yang ditargetkan. Nilai tersebut terdiri atas 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, meliputi:
 - 1) Perencanaan Kinerja : 27,80
 - 2) Pengukuran Kinerja : 16,88
 - 3) Pelaporan Kinerja : 11,78
 - 4) Evaluasi Internal : 6,85
 - 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : 12,00
- b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) bisa menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan program Reformasi Birokrasi. Indeks RB diambil dari hasil evaluasi yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi pelaksanaan RB perangkat daerah di Pemerintah Kota Cilegon dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon. Berdasarkan Surat Inspektorat No. 700/1725.5/Sekret pada tanggal 22 November 2022 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Tahun 2021, laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri program Reformasi Birokrasi pada BPKAD Kota Cilegon memperoleh nilai sebesar **28,900 yang dikonversikan menjadi 79,61 Point (BB = Baik)**, sehingga mencapai 126,37% dari nilai Indeks RB yang ditargetkan. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) aspek, yaitu aspek Pemenuhan dan aspek Reform, yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: I

Aspek 1	Nilai	Aspek 2	Nilai
1) Pemenuhan:	10,463	2) Reform:	18,437
- Manajemen Perubahan	1,577	- Manajemen Perubahan	2,335
- Deregulasi Kebijakan	1,000	- Deregulasi Kebijakan	2,000
- Penataan dan dan Penguatan Organisasi	2,000	- Penataan dan dan Penguatan Organisasi	1,500
- Penataan Tata Laksana	0,306	- Penataan Tata Laksana	2,625

Aspek 1	Nilai	Aspek 2	Nilai
- Penataan Sistem Manajemen SDM	1,134	- Penataan Sistem Manajemen SDM	1,750
- Penguatan Akuntabilitas	2,198	- Penguatan Akuntabilitas	2,592
- Penguatan Pengawasan	0,733	- Penguatan Pengawasan	1,885
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,516	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,750

Sumber Dari Berdasarkan Surat Inspektorat No. 700/1725.5/Sekret pada tanggal 22 November 2022

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bisa diartikan sebagai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada bulan Desember tahun 2022, BPKAD telah melakukan survei terhadap 100 responden yang memperoleh pelayanan pajak dari aparaturnya BPKAD, yang dipilih secara acak. Dari hasil survei didapat nilai IKM sebesar **89,06 Point** yang bisa diartikan **Sangat Baik**, sehingga mencapai 100,07% dari nilai IKM yang ditargetkan. Namun peningkatan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama peningkatan sarana dan prasarana pada pelayanan publik.

Tabel Indeks Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Unsur Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI	KATEGORI MUTU PELAYANAN
1	Persvaratan pelayanan	90.50	Sangat Baik
2	Sistem, mekanisme, prosedur	86.82	Baik
3	Waktu penyelesaian pelayanan	88.70	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	94.06	Sangat Baik
5	Produk/hasil layanan	87.79	Baik
6	Kompetensi pelaksana	86.05	Baik
7	Perilaku pelaksana	88.79	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan	89.02	Sangat Baik
9	Sarana Dan Prasarana	89.81	Sangat Baik
NILAI IKM		89,06	Sangat Baik

Sedangkan capaian kinerja anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada BPKPAD sebesar 56,34% dengan target anggaran sebesar Rp 102.877.749.654,- dan realisasi sebesar Rp 57.963.070.701,-.

Bidang urusan Keuangan memiliki 3 (tiga) indikator program teknis yang harus dicapai yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (target: 86 poin)
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset (target: 100%)
- 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah (target: 5,4%)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud

- a. Indikator Program Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD dihitung berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Provinsi, terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelumnya. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 059/Kep.304-Huk/2022 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, diketahui hasil Pengukuran IPKD Kota Cilegon Tahun 2021 menurut 6 (enam) dimensi pengukuran sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan

No	DIMENSI	2020	2021
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,6340	10,6740
2	Pengalokasian Belanja dalam APBD	18,9655	19,4828
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,0000	0,0000
4	Penyerapan Anggaran	15,0000	0,0000
5	Kondisi Keuangan Daerah	2,1000	0,0000
6	Opini BPK	15,0000	15,0000
Total Indeks		61,6995	45,1568

Sumber : SK Gubernur Banten Nomor: 059/Kep.304-Huk/2022

Terlihat peningkatan IPKD Kota Cilegon setiap tahunnya, walaupun masih dalam kategori yang sama yaitu “**Perlu Perbaikan**”. Pengkategorian hasil IPKD ditentukan sebagai berikut:

Tabel Standar deviasi: standar deviasi IPKD Kab/Kota

Rentang IPKD	Kategori
Lebih besar dari $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$	Baik
Antara $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$ dan $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$	Perlu Perbaikan
Kurang dari $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$	Sangat Perlu Perbaikan

Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2020

*) MEAN : rata-rata IPKD Kab/Kota

Berikut adalah Rincian Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun anggaran 2022:

A. Kabupaten Se-Provinsi Banten Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori
1	Pandeglang	0	12,4138	15,0000	20,0000	2,4500	15,0000	64,8638	Perlu Perbaikan
2	Lebak	3,4110	18,2759	7,2414	20,0000	3,4598	15,0000	67,3880	Perlu Perbaikan
3	Tangerang	0	14,3103	13,9655	15,0000	5,2335	15,0000	63,5094	Perlu Perbaikan
4	Serang	3,7620	18,6207	0	15,0000	3,3131	15,0000	55,6957	Perlu Perbaikan

Sumber : SK Gubernur Banten Nomor: 059/Kep.304-Huk/2022

B. Kota Se-Provinsi Banten Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

No	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori
1	Kota Serang	5,2520	13,6207	9,8276	13,3333	3,0954	15,0000	60,1295	Perlu Perbaikan
2	Kota Tangerang Selatan	7,6740	20,0000	0	20,0000	8,1560	15,0000	70,8300	Perlu Perbaikan

Sumber : SK Gubernur Banten Nomor: 059/Kep.304-Huk/2022

C. Kota Se-Provinsi Banten yang Tanpa Predikat dengan Keterangan Eliminasi Dimensi 5

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori
1	Kota Tangerang	10,6100	19,3103	15,0000	13,3333	0	15,0000	73,2536	Tidak Ada Predikat
2	Kota Cilegon	10,6740	19,4828	0	0	0	15,0000	45,1568	Tidak Ada Predikat

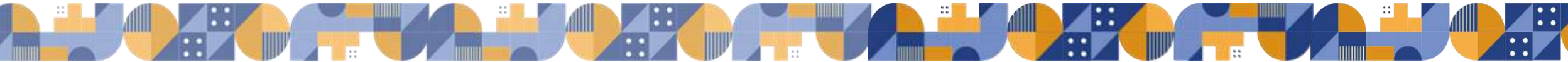
Sumber : SK Gubernur Banten Nomor: 059/Kep.304-Huk/2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kota Cilegon termasuk ke dalam kategori Tidak Ada Predikat Bersama Kota Tangerang. Kota Cilegon memperoleh nilai 0 (nol) pada 3 (tiga) Dimensi, yaitu: Dimensi 3; Transparansi Pengelolaan Keuangan, Dimensi 4; Penyerapan Anggaran, dan Dimensi 5; Kondisi Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan karena Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan indikator komposit, yaitu indikator yang diampu oleh beberapa OPD serta IPKD dinilai oleh Kementrian Dalam Negeri, sehingga mempunyai kompleksitas permasalahan diantaranya:

1. Kurangnya Koordinasi antar Pengampu dimensi IPKD sehingga adanya OPD yang tidak menyampaikan data.
2. Berdasarkan evaluasi selama 2 tahun, nilai yang didapat BPKPAD masih jauh dibawah target
3. Kurangnya informasi atas pelimpahan tugas pokok antar pejabat karena adanya mutasi pegawai.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

- 
- k. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - c. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - d. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - h. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terhadap prioritas daerah, yakni pada **Program Prioritas 9 - Peningkatan Inovasi Pendapatan Daerah**, melalui **KP-1 Perluasan Elektronifikasi layanan pajak dan retribusi**. Adapun untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
1.	PP-9 Peningkatan Inovasi Daerah					
	KP-4 Perluasan Elektronifikasi layanan pajak dan retribusi					
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Transaksi non tunai terpenuhi	12 dokumen	12 dokumen
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen

- b. Indikator program **Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset** dihitung dengan rumus berikut:
- $$= \frac{\text{Jumlah dokumen manajemen aset yang tersedia}}{\text{Target dokumen manajemen aset}} \times 100\%$$

Dimana target dokumen manajemen aset daerah ada 8 dokumen, meliputi:

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), 1 dokumen
2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM), 1 dokumen
3. Penatausahaan, 2 dokumen (per semester)
4. Status Penggunaan, 1 dokumen
5. Laporan Pengamanan BMD, 1 dokumen
6. Penghapusan (termasuk pemindahtanganan), 1 dokumen
7. Laporan BMD, 1 dokumen

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pada pasal 1 ayat (28) disebutkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Untuk itu, diperlukan 8 dokumen manajemen aset tersebut di atas. Dengan pengelolaan BMD yang baik, bisa mengurangi inefisiensi dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Pada tahun 2022, **Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset** adalah sebagaimana berikut = $(8 / 8) \times 100\% = 100\%$

Capaian indikator Persentase Ketersediaan Data Manajemen Aset didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Standar Harga
 - b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - g. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - h. Penilaian Barang Milik Daerah
 - i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - k. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - l. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terhadap prioritas daerah, yaitu **Program Prioritas 2 - Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**, melalui **KP-4 Pengelolaan Manajemen Aset**. Adapun untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realiasi
1.	PP-2 Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					
	KP-4 Pengelolaan Manajemen Aset					

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realiasiasi
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Validasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon	1 dokumen	1 dokumen
				Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Gedung Pemerintah Kota Cilegon	1 Jenis	1 Jenis
				Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Roda Dua	1 Jenis	1 Jenis
				Jumlah Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Roda Empat	1 Jenis	1 Jenis
				Jumlah Sertifikat Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Cilegon	100 sertifikat	1 sertifikat
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	50 dokumen perjanjian	50 dokumen perjanjian
				Jumlah Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen
				Jumlah Dokumen Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen
				Jumlah Surat Keputusan Walikota terkait Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	6 dokumen
				Jumlah Kajian Pemanfaatan Gedung Ex Matahari	1 dokumen	0 dokumen

- c. Indikator Program **Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah** dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{realisasi pajak tahun } n - \text{realisasi pajak tahun } (n-1)}{\text{realisasi pajak tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pendapatan Kota Cilegon dari sektor Pajak pada tahun 2021 dan 2022 sehingga didapat

$$\begin{aligned} &= \frac{617.374.150.763 - 485.249.968.745}{485.249.968.745} \times 100\% \\ &= 27,35\% \end{aligned}$$

Dari data tersebut di atas bahwa pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) jenis pajak daerah yang tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan, yaitu Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB. Sedangkan 8 (delapan) jenis pajak lainnya mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa jenis pajak daerah tersebut dipengaruhi oleh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan. Terlihat pula bahwa pendapatan dari sektor pajak tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Target pajak daerah tahun 2022 sebesar **Rp 485.249.968.745,-**, realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar **Rp 617.374.150.763,-** atau sebesar **95,70%**. Sedangkan target pajak daerah tahun 2021 sebesar **Rp 579.544.000.000,-**, realisasi pajak daerah tahun 2021 sebesar **Rp 485.249.968.745,-** atau sebesar **83,73%**. Sehingga ada peningkatan realisasi pajak daerah sebesar **27,35%**. Capaian peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi oleh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan, berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.

- i. Pelaksanaan Intensifikasi
 - Melakukan Pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah;
 - Melakukan Penagihan Langsung Pajak Daerah.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 - Melakukan Pengendalian dan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah.
 - Cetak Massal SPPT PBB.
 - Rekonsiliasi PBB dan BPHTB
 - Memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk yang Buku I.
 - Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak.
 - Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon selaku pengacara Negara terkait penagihan pajak daerah.
- ii. Pelaksanaan Ekstensifikasi
 - Sosialisasi Pajak daerah yang dilakukan secara terus menerus baik itu secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik
 - Mencari informasi pada pihak lain terkait potensi peralihan hak yang terjadi di Kota Cilegon.
 - Updating data PBB-P2 sehingga apabila terjadi mutasi sebagian atas suatu bidang tanah, maka akan menambah jumlah wajib pajak PBB-P2.
 - MOU dengan KPP. Pratama Kota Cilegon.
 - MOU dengan BPN Kota Cilegon.

Capaian indikator Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - h. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - k. Penagihan Pajak Daerah
 - l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terhadap prioritas daerah, yaitu **Program Prioritas 9 – Peningkatan Inovasi Pendapatan Daerah**, melalui **KP-1 Perluasan elektronifikasi layanan pajak dan retribusi**. Adapun untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
1.	PP-9 Peningkatan Inovasi Daerah					
	KP-1 Perluasan Elektronifikasi Layanan Pajak dan Retribusi					
		Pengelolaan pendapatan daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1. Jumlah Regulasi tentang Pajak Daerah 2. Jumlah sertifikat ISO	2 regulasi 1 sertifikat	2 regulasi 1 sertifikat
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah alat perekam data transaksi yang dipelihara	142 Unit	142 Unit

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Realisasi
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Terlaksananya Evaluasi atas Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Daerah 2. Terlaksananya Monotoring Penerimaan Harian atas Objek/Subjek sektor Pajak Dan Retribusi 3. Terlaksananya Penyusunan Daftar Resiko Permasalahan Pemungutan PAD 4. Terlaksananya Pengawasan atas peredaran benda berharga yang dikelola OPD 5. Terlaksananya Bimbingan/pendampingan dan pemecahan permasalahan pemungutan PAD 6. Pemeliharaan Sistem Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	2 TW 4 objek/ subjek 2 TW 4 TW 2 rapat kegiatan 1 Aplikasi	2 TW 4 objek/ subjek 2 TW 4 TW 2 rapat kegiatan 1 Aplikasi

3.1.5.3 Kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANNUSIA, UPTD DATA DAN INFORMASI PEGAWAI, SEKRETARIAT KORPRI

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.5.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		19.823.206.121	14.460.679.805	72,95			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.196.485.443	12.530.303.862	88,26	1. Perencanaan Kinerja telah memenuhi Kriteria Renstra dan Renja yang baik; 2. Telah menyajikan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal; 3. LKj dan Evaluasi Internal telah memenuhi kriteria pelaporan yang baik; --- Laporan Hasil Evaluasi RB menunjukkan terdapat beberapa aspek yang mendapatkan penilaian 100% yaitu pada Aspek Pemenuhan (Area Penguatan Akuntabilitas) dan Aspek Reform (Area Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi)		
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	71,0 poin	72,42 poin	102			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 poin	76,64 poin	110,7			
Arah kebijakan : Peningkatan penempatan aparatur berbasis kompetensi, budaya kerja aparatur, serta penyelenggaraan reward and punishment berbasis kinerja							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		5.626.720.678	1.930.375.943	34,31	-Belum terlaksananya Pembangunan Assessment Center -Belum terlaksananya Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis Kinerja	-Koordinasi dengan Sekda dan Wali Kota - Koordinasi dan Konsultasi dengan KASN	
	Indeks Merit System	280,0 Poin (Skala 100-400)	276,0 Poin (Skala 100-400)	98,57			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pember-hentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	83,3%	83,33			
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		346.989.999	45.829.280	13,21	Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Teknis yang direncanakan oleh Panselnas pada tahun 2022 ternyata diundur sehingga tahapannya dimulai akhir Desember 2022 sampai tahun 2023. Bimtek yang sedianya direncanakan untuk Peserta Seleksi PPPK yang lolos tahap seleksi administrasi tidak dapat terlaksana di tahun 2022 karena berubahnya jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas	Berkoordinasi dengan Walikota dan Panselnas pusat untuk kembali menyusun rencana kegiatan Seleksi PPPK di Tahun Anggaran 2023	
	Dokumen Kebijakan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		2.622.244.995	293.461.000	11,19	Waktu seleksi diundur sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi berdasarkan surat dari BKN Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan	Berkoordinasi dengan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.		
	Tersedianya ASN	300 Orang	0 Orang	0			
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		26.036.000	8.833.000	33,93	Honorarium untuk Narasumber sedianya dianggarkan untuk Narasumber dari BKN terkait Kegiatan Sosialisasi Adminitrasi Pemberhentian Pegawai. Akan tetapi, dikarenakan pihak BKN sedang fokus pada Kegiatan Anomali Data ASN dan Peralihan dari SAPK ke SI ASN, maka Kegiatan Sosialisasi tidak dilaksanakan pada TA. 2022, sehingga anggaran Honorarium tidak terserap.	Berkoordinasi dengan BKN di awal tahun untuk menyesuaikan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di BKPSDM agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan di BKN	
	Terselesainya Pemberhentian PNS	174 SK	174 SK	100			
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		65.044.192	60.209.000	92,57			
	Terlaksananya Pemeliharaan sistem manajemen ISO	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pengelolaan Data Kepegawaian		135.304.389	127.680.277	94,37			
	Rekonsiliasi Data Absen Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	100			
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		149.900.118	109.447.200	73,01	Tidak Ada Permasalahan	-	
	Terevaluasinya Dokumen evaluasi Data dan Informasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Mutasi dan Promosi ASN	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	68,3%	68,25			
Pengelolaan Mutasi ASN		308.394.550	278.875.400	90,43			
	Jumlah Pelayanan Mutasi ASN	21 ASN	21 ASN	100			
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		128.962.375	126.530.820	98,11			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terkelolanya pelayanan proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tepat waktu	1500 SK	1251 SK	83,4			
	Terkelolanya Proses Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	1350 SK	1365 SK	101,11			
Pengelolaan Promosi ASN		851.458.600	35.377.000	4,15	Pejabat Pembina Kepegawaian belum memberikan keputusan waktu pelaksanaan Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana pada tahun ini	Berkoordinasi dengan Walikota untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya	
	Jumlah Dokumen pedoman pola pengembangan karir	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Promosi ASN	4 ASN	1 ASN	25			
Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	101,8%	101,81			
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		25.504.000	20.067.285	78,68			
	Tersedianya Piagam Bagi Pegawai Berkinerja Terbaik	492 Pegawai	492 Pegawai	100			
Pengelolaan Assessment Center		465.588.380	435.669.616	93,57	-	-	
	Jumlah ASN yang mendapat assessment	86 ASN	86 ASN	100			
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		149.991.679	59.640.100	39,76	Bantuan Belajar sesuai dengan usulan yang masuk, sementara pada Tahun 2022 banyak Pegawai yang tidak mengusulkan bantuan tugas belajar sehingga realisasi anggaran pada Sub Kegiatan		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					ini hanya tercapai 37.04%. Selain itu, pada beberapa usulan yang masuk, terdapat beberapa pegawai yang belum memenuhi persyaratan sehingga tidak mendapatkan beasiswa tugas belajar.		
	Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar/Izin Belajar	27 Peserta	10 Peserta	37,04			
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		188.270.000	186.930.800	99,29	Dikarenakan banyaknya Pejabat Fungsional yang perlu mendapatkan Pembinaan, sehingga kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dilaksanakan sebanyak 2 Angkatan. Hal ini berdampak kepada perubahan jumlah output kegiatan menjadi 2 kali lipat.		
	jumlah Pejabat Fungsional yang mendapat Pembinaan	100 ASN	200 ASN	200			
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		31.759.700	16.730.900	52,68	Pada TA 2022 dianggarkan 3 kali kegiatan Pelantikan JFT, akan tetapi hanya terealisasi 1 kali kegiatan Pelantikan JFT pada bulan Mei 2022. Semula, 2 kali kegiatan lainnya dianggarkan untuk Pelantikan JFT Pengangkatan Pertama dan Pelantikan JFT melalui Penyesuaian Nama Jabatan sesuai SOTK baru. Akan tetapi, sampai akhir Tahun 2022, Rekomendasi untuk Pelantikan JFT belum dikeluarkan oleh		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kemendagri, sehingga kegiatan Pelantikan JFT belum dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2022.		
	Jumlah Pejabat Fungsional yang mendapat fasilitasi pengembangan karir	50 ASN	36 ASN	72			
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100,0%	100			
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		27.550.000	25.384.000	92,14	Tidak Ada Permasalahan	-	
	Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Bagi Pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembinaan Disiplin ASN		94.213.701	92.414.265	98,09	Tidak Ada Permasalahan	-	
	Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	120 ASN	120 ASN	100			
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		9.508.000	7.296.000	76,74	Tidak Ada Permasalahan	-	
	Jumlah keputusan penyelesaian pelanggaran disiplin	10 SK	10 SK	100			
UPTD Data dan Informasi Pegawai		84.859.451	78.002.600	91,92			
Arah kebijakan : Peningkatan penempatan aparatur berbasis kompetensi, budaya kerja aparatur, serta penyelenggaraan reward and punishment berbasis kinerja							
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		84.859.451	78.002.600	91,92			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	110,3%	110,27			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		84.859.451	78.002.600	91,92			
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Kepegawaian	2 Kali	2 Kali	100			
	Jumlah pegawai yang datanya diperbaharui kedalam aplikasi kepegawaian	2000 Pegawai	2616 Pegawai	130,8			
	Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan (Laptop dan Printer)	1 Paket	1 Paket	100			
SEKRETARIAT KORPRI		2.649.156.161	2.238.620.065	84,5			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.004.578.750	802.733.165	79,91			
	Indeks RB Perangkat Daerah	69,23 Point	76,64 Point	110,7			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	71,0 Poin	72,41 Poin	101,99			
Arah kebijakan : Peningkatan penempatan aparatur berbasis kompetensi, budaya kerja aparatur, serta penyelenggaraan reward and punishment berbasis kinerja							
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1.644.577.411	1.435.886.900	87,31			
	Indeks merit system	280,0 poin	276,0 poin	98,57			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		947.218.911	847.690.500	89,49			
	Jumlah rapat kerja yang diselenggarakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kasus yang terselesaikan	3 Kasus/Kegiatan	3 Kasus/Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan HUT Korpri	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi anggota Korpri Pra Purnabhakti yang telah dibina	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kegiatan peringatan hari kesadaran nasional	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100,0%	100			
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		438.711.000	333.534.400	76,03	Terealisasi	-	
	Jumlah Pemberian Penghargaan bagi ASN yang pensiun	172 ASN	172 ASN	100			
Pembinaan Disiplin ASN		258.647.500	254.662.000	98,46			
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korsa	1200 Orang/Peserta	1200 Orang/Peserta	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Bidang urusan Kepegawaian memiliki 1 indikator program teknis yang harus dicapai yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah, dengan 1 (satu) indikator program, yaitu : Indeks Merit Sistem (Target Tahun 2022 : 280 poin)

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator dimaksud:

Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama sub unit di bawahnya, yaitu UPT Data dan Informasi Pegawai serta Sekretariat Korpri.

Pada Tahun 2022, Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebagai berikut :

- a. Program Kepegawaian Daerah pada BKPSDM, capaian kinerja keuangan sebesar 34,31% atau anggaran terealisasi Rp 1.930.375.943,00 dari target anggaran Rp 5.626.720.678,00. Rendahnya capaian kinerja keuangan ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu :
 - Kegiatan Seleksi CASN diundur pelaksanaannya sehingga melewati Tahun 2022 dan berlanjut di Tahun 2023
 - Kegiatan Mutasi/Rotasi/Promosi Jabatan Pengawas/ Administrator/ JPT hanya terlaksana 1 kali pada bulan Agustus 2022
 - Kegiatan Seleksi JPT Pratama belum terlaksana pada TA 2022

- b. Program Kepegawaian Daerah pada UPT Data dan Informasi, capaian kinerja keuangan sebesar 91,92%, atau anggaran terealisasi Rp 78.002.600,00 dari target anggaran Rp 84.859.451,00
- c. Program Kepegawaian Daerah pada Sekretariat Korpri, capaian kinerja keuangan sebesar 87,31%, atau anggaran terealisasi Rp 1.435.886.900,00 dari target anggaran Rp 1.644.577.411,00

Sehingga rata-rata capaian kinerja keuangan pada Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar 71,18%.

Capaian kinerja indikator Indeks Merit Sistem pada Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar 98,57%, dimana dari target 280 poin terealisasi sebesar 276 poin (kategori BAIK). Penilaian terhadap penerapan merit sistem di Pemerintah Kota Cilegon dilakukan oleh KASN melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit). dan diterbitkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nomor 179/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Penilaian terhadap penerapan merit sistem terdiri dari 8 aspek penilaian, yaitu : perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian – penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon ditetapkan pada Kategori III (Baik) dengan Nilai 276 dan Indeks 0.67. Nilai tersebut meningkat 2.5 poin dari tahun 2021, namun tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 yakni sebesar 280 poin.

Ketercapaian indikator Indeks Merit Sistem dilakukan dengan upaya pemenuhan output pada kegiatan berikut ini :

- Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN pada BKPP (rata-rata capaian kinerja output : 83,33%)
- Mutasi dan promosi ASN pada BKPP (rata-rata capaian kinerja output : 68,25%)
- Pengembangan kompetensi ASN pada BKPP (rata-rata capaian kinerja output : 101,81%)
- Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pada BKPP (rata-rata capaian kinerja output: 100%)
- Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN pada UPT Data dan Informasi Pegawai (rata-rata capaian kinerja output : 110,27%)
- Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN pada Sekretariat Korpri (rata-rata capaian kinerja output : 100%)
- Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pada Sekretariat Korpri (rata-rata capaian kinerja output : 100%)

Rata-rata capaian kinerja output pada 7 kegiatan di atas adalah 94,81%

Dengan melihat capaian indikator program “Indeks Merit Sistem” sebesar 98,57% dan rata-rata capaian kinerja output pada kegiatan yang ada di bawah program sebesar 94,81%, maka dapat dikatakan output pada kegiatan di bawah program tersebut sangat relevan dan mendukung pencapaian indikator program.

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks Merit Sistem	Delapan Aspek Penilaian Indeks Merit Sistem : – Perencanaan Kebutuhan : 35 poin – Pengadaan Pegawai : 38 poin	276 poin

	- Pengembangan Karir : 57,5 poin - Promosi dan Mutasi : 27,5 poin - Manajemen Kinerja : 57,5 poin - Penggajian, Penghargaan dan Disiplin : 32,5 poin - Perlindungan dan Pelayanan : 12 poin - Sistem Informasi : 16 poin	

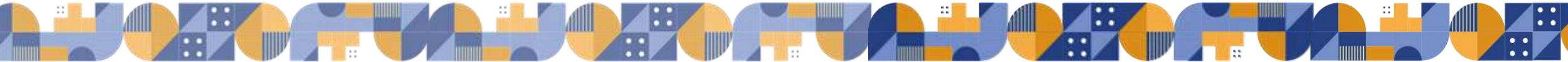
Pencapaian Program/Kegiatan Prioritas RPJMD Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aspek- aspek dalam penilaian merit sistem juga menjadi bagian dari Prioritas daerah sebagaimana yang terdapat dalam PP 1 Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Pada KP 1.1 Proyeksi Kebutuhan Pegawai berdasarkan pencapaian prioritas pembangunan. Pemerintah Kota Cilegon dalam usulan kebutuhan pegawai kepada Kemenpan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan organisasi perangkat daerah yang disusun dalam analisis jabatan dan beban kerja yang diproyeksikan selama 5 tahun kedepan. Hal yang menjadi catatan pada aspek ini adalah Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan Modul Pengembangan Kompetensi dan Sistem Informasi Kinerja serta Akselerasi Penetapan Peta Jabatan dan Rencana Kebutuhan Pegawai untuk Jangka Menengah 5 Tahun berdasarkan Anjab dan ABK yang telah disusun. KP 1.1 ini didukung dengan pencapaian output pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
- Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN,
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian,
- Pengelolaan Data Kepegawaian,
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Aspek promosi dan mutasi sudah terimplementasi secara terbuka dan kompetitif hal ini sejalan dengan KP 1.2 Implementasi sistem mutasi ASN yang terbuka dan kompetitif . Proses mutasi ini sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penilaian penerapan merit system Tahun 2022, pada aspek mutasi terdapat rekomendasi untuk mengoptimalisasi Pelaksanaan Mutasi sesuai dengan peraturan yang tersedia. Selain itu juga perlu meningkatkan konsistensi penerapan Analisis Kesenjangan Kinerja. KP 1.2 ini didukung dengan pencapaian output pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Mutasi ASN,
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.



Selanjutnya aspek yang menunjang KP 1.3 Implementasi HCDP (rencana kebutuhan kompetensi pegawai), pada Tahun 2022 sudah tersedia strategi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Jangka Pendek (1 Tahun) ke depan. BKPSDM perlu melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk seluruh Pegawai. KP 1.3 ini didukung dengan pencapaian output pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sedangkan pada KP 1.4 Pelaksanaan promosi jabatan berbasis prestasi dan kompetensi, Pemerintah Kota Cilegon telah menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karir melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Adapun yang menjadi rekomendasi adalah perlu dilaksanakannya promosi pegawai ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi dan penilaian kinerja. Berdasarkan hasil penilaian KASN pada Tahun 2022, sudah dilakukan Assessmen bagi Pejabat Esselon II, III dan IV, akan tetapi hasilnya belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan promosi pegawai. KP 1.4 ini didukung dengan pencapaian output pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Promosi ASN
- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Assessment Center
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Aspek berikutnya yang menunjang KP 1.5 Penerapan e-kinerja, saat ini sudah diterapkan sistem manajemen kinerja yang berdasarkan PermenPANRB No.6 Tahun 2022, sedangkan dalam hal penilaian kinerja yang dilakukan setiap hari, akan dilaksanakan menggunakan sistem informasi dalam aplikasi KHAS (E-kinerja). KP 1.5 ini didukung dengan pencapaian output pada beberapa sub kegiatan, yaitu :

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.5.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.923.974.698	2.728.097.815	69,52			
Arah kebijakan : Peningkatan penempatan aparatur berbasis kompetensi, budaya kerja aparatur, serta penyelenggaraan reward and punishment berbasis kinerja							
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.923.974.698	2.728.097.815	69,52	-Penyelenggaraan Diklat belum mendongkrak Nilai IP ASN -Ketidaksesuaian antara Diklat yang diikuti dengan Kompetensi Jabatan -Belum adanya Dokumen HCDP	-Koordinasi dengan OPD terkait kebutuhan Diklat -Menyusun dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi / HCDP sebagai dasar untuk fasilitasi diklat sesuai dengan kebutuhan pegawai	
	Indeks Profesionalitas ASN	60,0 Poin (Skala 1-100)	46,84 Poin (Skala 1-100)	78,07			
Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	176,6%	176,56			
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		85.553.450	71.521.140	83,6			
	Tersusunnya dokumen perencanaan pelatihan aparatur	1 dokumen	1 dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1.616.689.406	1.181.654.021	73,09	Dikarenakan adanya penambahan anggaran pada proses Perubahan Anggaran TA. 2022, sehingga terdapat penambahan 3 Kegiatan Diklat;		
	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	128 ASN	324 ASN	253,12			
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	88,7%	88,65			
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		2.221.731.842	1.474.922.654	66,39	1. Diklat untuk Kepala Daerah tergantung pada jumlah Penawaran Diklat yang masuk dari pihak penyelenggara. Selama TA 2022 hanya terdapat 4 kali Penawaran kegiatan Diklat yang masuk dan diikuti oleh Kepala Daerah; 2. Diklat Pembentukan JFT tergantung usulan dari Perangkat Daerah, ataupun kuota dari penyelenggara. Uang saku juga tidak banyak terserap, karena terdapat penyelenggaraan diklat blended learning/ distance learning yang tidak diberi uang saku (uang saku hanya ketika on class)	Memperbanyak kerjasama dengan instansi penyelenggara pengembangan kompetensi yang terakre-ditasi, serta menyusun jadwal pelaksa-naan pelatihan secara lebih komprehensif. Apabila pelatih-an manajerial dan penjenjang-an fungsional tidak dapat terlaksana sesuai target, maka anggaran akan dialihkan untuk pelaksa-naan pelatihan kompetensi teknis	
	Jumlah peserta Pelatihan Kepemim-pinan Administrator (Diklatpim Tk. III)	20 ASN	20 ASN	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah peserta pelatihan pembentuk-an jabatan fungsional tertentu	23 ASN	17 ASN	73,91			
	Jumlah peserta Pelatihan Kepemim-pinan Nasional Tingkat II (Diklatpim Tk. II)	4 ASN	4 ASN	100			
	Jumlah peserta Pelatihan Kepemim-pinan Pengawas (Diklatpim Tk. IV)	9 ASN	9 ASN	100			
	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	69 CPNS	69 CPNS	100			
	Jumlah peserta pelatihan penjenjang-an jabatan fungsional	15 ASN	12 ASN	80			
	Jumlah peserta pelatihan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah	6 Orang	4 Orang	66,67			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Bidang urusan Pendidikan dan Pelatihan memiliki 1 indikator program teknis yang harus dicapai yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan 1 (satu) indikator program, yaitu : Indeks Profesionalitas ASN (Target Tahun 2022 : 60 poin)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2022, memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 69,52%, atau anggaran terealisasi Rp 2.728.097.815,00 dari target anggaran Rp 3.923.974.698,00.

Capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 78,07%, dimana dari target 60 poin terealisasi sebesar 46,84 poin berdasarkan data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kondisi tanggal 29 Desember 2022, dimana ada 4 aspek yang dinilai, yaitu : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Pemerintah Kota Cilegon sebesar 46,84 poin terbilang sangat rendah, walaupun banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mengalami hal yang sama. Ketercapaian indikator Indeks Profesionalisme ASN dilakukan dengan upaya pemenuhan output pada 2 kegiatan berikut ini :

- Pengembangan kompetensi teknis (rata-rata capaian kinerja output : 176,56%)
- Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (rata-rata capaian kinerja output : 88,65%)

Rata-rata capaian kinerja output pada 2 kegiatan di atas adalah 132,61%

Dengan melihat capaian indikator program “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar 78,07% sedangkan rata-rata capaian kinerja output pada kegiatan yang ada di bawah program tersebut mencapai 132,61%, maka dapat dikatakan output pada kegiatan di bawah program tersebut kurang relevan dan mendukung pencapaian indikator program.

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks Profesionalitas ASN	Empat Aspek Penilaian Indeks Profesionalitas ASN : - Kualifikasi : 14,49 poin - Kompetensi : 10,89 poin - Kinerja : 16,49 poin - Disiplin 4,97 poin	46,84 poin

3.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.5.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penelitian dan Pengembangan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		2.374.901.000	2.246.357.700	94,59			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik							
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2.374.901.000	2.246.357.700	94,59	-		
	Indeks Inovasi Daerah	489,0 Point	710,0 Point	145,19			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		25.000.000	24.956.000	99,82	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	jumlah dokumen kajian penelitian dan pengem-bangan bidang aparatur reformasi birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peneliti-an dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100,0%	100			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		25.000.000	24.982.000	99,93	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	jumlah dokumen kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		25.000.000	24.566.900	98,27	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	jumlah dokumen kajian Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000	270.957.500	90,32	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	jumlah dokumen kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		150.000.000	142.196.200	94,8	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	jumlah dokumen kajian Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100,0%	100			
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		25.000.000	25.000.000	100	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	jumlah dokumen penelitian dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		110.000.000	110.000.000	100	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		25.000.000	24.999.800	100	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		225.000.000	222.542.000	98,91	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman erumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	100,0%	100			
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi		333.940.000	325.472.100	97,46	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	Jumlah Policy Brief	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	bimtek pendampingan pemanfaatan TTG dan pengelolaan sumber daya alam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		400.811.000	354.468.000	88,44	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	Gelar TTG tingkat nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	laporan hasil pendampingan TTG	1 Laporan	1 Laporan	100			
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		315.000.000	297.428.000	94,42	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	LABINOV Tahapan Drum-up dan design bagi kelurahan dan kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		415.150.000	398.789.200	96,06	Tidak ada permasalahan, semua sesuai schedule	-	
	dokumentasi video inovasi	4 video	4 video	100			
	Laboratorium Inovasi OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengampu unsur penunjang bidang perencanaan serta penilitan dan pengembangan yang mendukung Misi ke 1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel.

Tujuan dari misi ke 1 yaitu Peningkatan layanan Pemerintahan dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD dalam mendukung pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.

Unsur penunjang bidang urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) memiliki 1 (satu) program dan 1 (indikator) indikator program yang harus dicapai yaitu :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah dinilai setiap tahun oleh Kemendagri yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	145.19%

Berdasarkan Radiogram Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2022 Nomor 000.10/398/BKSDN Tanggal 30 Januari 2023 dimana di dalamnya menerangkan bahwa Kota Cilegon memperoleh skor indeks 37,06 (nilai hasil konversi sebesar 710 poin dengan kategori inovatif) yang berarti pencapaian indeks inovasi daerah secara instansional mampu mewujudkan sasaran strategis organisasi.

Dari data tersebut maka capaian Indeks inovasi daerah adalah sebesar 145,19%, dari target kinerjanya sebesar 489 poin, sehingga capaiannya bisa dikategorikan “Sangat tinggi”.

Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program dan Indikator Output Sub Kegiatan, maka perbandingannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	145.19%	100.00%	94,59%

Program penelitian dan pengembangan daerah antara capaian indikator program (145,19%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100%) terdapat kesesuaian yang sangat baik, hal ini menunjukkan output sub kegiatan yang dirumuskan sangat mendukung ketercapaian indikator program. Pada capaian keuangan (94,59%) memiliki nilai capaian yang tinggi dibandingkan dengan capaian indikator program dan indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang direalisasikan sudah cukup untuk mencapai target output sub kegiatan dan juga indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

3.1.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintah Daerah

3.1.6.1 Pengawasan

INSPEKTORAT DAERAH

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.6.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengawasan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
INSPEKTORAT		20.450.450.953	18.795.387.834	91,91			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		17.048.127.387	15.583.846.049	91,41			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81,0 Poin	85,38 Poin	105,41			
	Indeks RB Perangkat Daerah	70,0 Poin	88,55 Poin	126,5			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.976.179.080	1.844.602.800	93,34			
	Indeks Manajemen Resiko	1,0 Level	3,0 Level	300			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100,0%	100			
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		386.448.000	355.964.000	92,11			
	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		386.776.000	342.860.000	88,65			
	Terselenggaranya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
Reviu Laporan Kinerja		72.982.320	67.472.000	92,45			
	Terlaksananya Reviu laporan Kinerja Kota Cilegon TA 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Reviu Laporan Keuangan		36.491.160	35.752.000	97,97			
	Terlaksananya reviu terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Kerjasama Pengawasan Internal		348.940.000	321.874.000	92,24			
	Terlaksananya kerjasama peningkatan kapabilitas APIP dengan pihak eksternal	2 Jenis	2 Jenis	100			
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		553.291.600	535.422.800	96,77			
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjutan terhadap Temuan BPK RI dan APIP yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	110,0%	110			
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		149.050.000	145.790.000	97,81			
	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		42.200.000	39.468.000	93,53			
	Terlaksananya kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu pada Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	5 Dokumen	6 Dokumen	120			
Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah							
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.426.144.486	1.366.938.985	95,85			
	Indeks Kapabilitas APIP	3,0 Level	3,0 Level	100			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	66,7%	66,67			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		257.290.000	255.010.000	99,11			
	Dokumen Evaluasi terhadap SOP Pengawasan	1 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Dokumen PKPT TA 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100%	100,0%	100			
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		120.000.000	119.484.000	99,57			
	Terlaksananya Pendampingan pada penyusunan pelaporan keuangan pada OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya cash dan stok opname pada OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Monitoring dana BOS pada sekolah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Monitoring pada penggunaan DPW pada Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Monitoring kinerja dan keuangan pada BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		113.725.000	109.190.000	96,01			
	Tersedianya Dokumen Hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		546.038.132	495.082.465	90,67			
	Rencana Aksi Kesepakatan Bersama Kajari dan Inspektorat Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Rencana Aksi Sekretariat Saber Pungli Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Monitoring Capaian MCP KPK RI	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		389.091.354	388.172.520	99,76			
	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Integritas APIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Inspektorat mengampu unsur pengawas yang mendukung Misi ke 1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel.

Tujuan dari misi ke 1 yaitu Peningkatan kualitas layanan Pemerintahan dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu (1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Indeks Manajemen Resiko, dan Indeks Kapaisatas APIP.

Unsur pengawas pada Inspektorat memiliki 3 (tiga) program dan 4 (empat) indikator program yang harus dicapai yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Nilai LAKIP perangkat daerah dengan target 81,00 poin
 - Indeks RB perangkat daerah dengan target 70,00 poin
2. Program penyelenggaraan pengawasan
 - Indeks manajemen risiko dengan target 1 Level.
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - Indeks kapabilitas APIP dengan target 3 Level.

Sedangkan capaian kinerja anggaran pada Inspektorat dengan target anggaran sebesar Rp. 20.450.450.953,- dan realisasi sebesar Rp. 18.749.662.531,- dengan capaian kinerjanya sebesar 91,68%.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Inspektorat Kota Cilegon terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah
Capaian pada indikator nilai LAKIP perangkat daerah Inspektorat Tahun 2022 sebesar 85,38 poin (AA) dengan target 81,00 poin, sedangkan persentase dari kinerja indikator ini sebesar 105,41% dengan kategori sangat tinggi.
2. Indeks RB Perangkat Daerah
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat pada tahun 2021 sebesar 88,55 poin dengan kategori AA (Sangat Baik). Adapun target yang telah ditetapkan yaitu 70 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 126,50% dengan kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja program ini telah selaras/sesuai dengan dukungan kegiatannya yaitu :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%)
- Administrasi keuangan perangkat daerah (100%)
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)
- Administrasi umum perangkat daerah (100%)
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah (100%)
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (100%).

Sedangkan capaian kinerja anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada Inspektorat sebesar 115,955% dengan target anggaran sebesar Rp. 17.048.127.387,- dan realisasi sebesar Rp. 15.555.039.049,- (91,24%).

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Dengan indikator Indeks Manajemen Risiko dengan target Level 1, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2022 nomor: PE.09.03/SP-34/PW30/3/2022, tanggal 30 Desember 2022, bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,200 (Level 3), dengan hasil penilaian baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai berikut :

AREA / KOMPONEN MRI	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,400
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,50	1,400
KAPABILITAS	30,00%		0,900
Kepemimpinan	5,00%	3,00	0,150
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,00	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	3,00	0,150
Kemitraan	2,50%	3,00	0,080
Proses Manajemen Risiko	12,50%	3,00	0,380
HASIL	30,00%		0,900
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	3,00	0,560
Outcomes	11,25%	3,00	0,340
Nilai Manajemen Risiko Indeks			3,200

Secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks Manajemen Risiko	- Perencanaan = 1,400 - Kapabilitas = 0,900 - Hasil = 0,900	300%

Dari data diatas maka capaian indeks manajemen risiko adalah Level 3 dengan targetnya Level 1, sedangkan realisasi kinerja program dari indikator tersebut terhadap target kinerjanya adalah 300%, sehingga capaiannya bisa dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Dengan indikator indeks kapabilitas API; dengan target Level 3, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA

Indeks kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Cilegon sesuai Laporan Nomor : PE.09.03/LHP-624/PW30/6/2022, tanggal 31 Oktober 2022, dengan Pencapaian Level 3 dari Target Level 3.	100%

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pengawasan Inspektorat Kota Cilegon dengan dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Cilegon sesuai Laporan Nomor: PE.09.03/LHP-624/PW30/6/2022, tanggal 31 Oktober 2022 bahwa Inspektorat Kota Cilegon telah berada pada level 3 (*integrated*) untuk semua elemen sebagaimana berikut :

NO.	ELEMEN	LEVEL
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Sehingga realisasi kinerja program dari indikator tersebut terhadap target kinerjanya adalah : 100%, dan capaiannya bisa dikategorikan **“Sangat tinggi”**. Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Pada unsur pengawas pada Inspektorat terdapat 3 Program dengan 4 Indikator yang dibandingkan kepada 11 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan dan 49 indikator sub kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan.

Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program, Indikator Output Sub Kegiatan dan keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	115,95 %	100,00 %	91,24 %

Program PenyelenggaraanPengawasan	300,00 %	100,00 %	93,34 %
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100,00 %	66,67 %	94,66 %

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kotaterdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (115,95%) dengan capaian indikator output (100,00%), namun pada capaian keuangan (91,24%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator outputsub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program penyelenggaraan pengawasan terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program (300%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100%), namun pada capaian keuangan (93,34%) realisasinyalebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi juga terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (66,67%), namun pada capaian keuangan (94,66%) hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurangbaik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasanInspektoratdan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana penunjang.

3.1.7 Unsur Kewilayahan

1. KECAMATAN CILEGON

1.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Cilegon)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN CILEGON		12.750.232.761	11.526.992.338	90,41			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.115.949.761	10.944.437.338	90,33			
	Indeks RB Perangkat Daerah	43,0 Point	60,37 Point	140,4			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	76,0 Point	66,32 Point	87,26			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		163.297.000	158.543.000	97,09			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	77,0 Point	94,22 Point	122,36			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		163.297.000	158.543.000	97,09			
	kegiatan Musrenbangcam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Dialog/audiensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		345.879.000	302.905.000	87,58			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 Persen	15,0 Persen	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		345.879.000	302.905.000	87,58			
	Terfasilitasinya Kegiatan KORWASDAL Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	sarana dan prasarana kantor (Penataan Lingkungan Kecamatan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terfasilitasinya Kegiatan Peranan PKK di Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100			
	Terfasilitasinya kegiatan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Terfasilitasinya Kegiatan Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Peserta seleksi MTQ TK Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Peran serta Lomba Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Partisipasi Peserta yang hadir Pengajian Rutin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Jum'at Bersuh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Monitoring DPWkel (Drainase, Paving block,TPT)	3 Triwulann	3 Triwulann	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		72.171.000	68.171.000	94,46			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	70,0 Persen	70			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		32.435.000	32.435.000	100			
	Jumlah Kegiatan Dialog dengan Toga dan Tomas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		39.736.000	35.736.000	89,93			
	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Jumlah Peserta Sosialisasi Narkoba dan Miras	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah Kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		52.936.000	52.936.000	100			
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,0 Persen	40,0 Persen	66,67			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50,0%	50			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		52.936.000	52.936.000	100	Tidak ada permasalahan	Menunggu arahan dari OPD terkait	
	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KELURAHAN CIWADUK		3.085.308.403	3.085.308.403	100			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		696.271.089	649.281.945	93,25	Tidak ada permasalahan sudah sesuai dengan perencanaan		
	Indeks RB Perangkat Daerah	43,0 Point	60,37 Point	140,4			
	Nilai Lkip Perangkat Daerah	76,0 Point	66,32 Point	87,26			
Arah Kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.579.641.594	1.528.557.720	96,77			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	80,9%	80,9			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		50.264.420	49.781.800	99,04			
	Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Bidang Kesos	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel N+2	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun N+1	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.054.993.729	1.021.945.600	96,87			
	Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Sarpraswil per RW	9 Lokasi	6 Lokasi	66,67			
	Fasilitasi pendampingan bidang infrastruktur	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		464.387.260	446.837.320	96,22			
	Internet UMKM (10 Titik)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Kegiatan PHBI/PHBN/STQ	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100			
	Sosialisasi gerakan masyarakat sehat	1 kegaian	1 kegaian	100			
	Keg. Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan PATBM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pengurus LPM	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Petugas pemandian jenazah	2 Bulan	2 Bulan	100			
	Sosialisasi Kegiatan Karang Taruna	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Risma yang terfasilitasi	9 RISMA	9 RISMA	100			
	Pelatihan Service AC	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terfasilitasinya kegiatan proklamasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Terfasilitasinya kegiatan PKK	12 kegiatan	12 kegiatan	100			
	Jumlah UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		809.395.720	990.793.000	122,41			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	100 Persen	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	98,3%	98,33			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		809.395.720	809.395.720	100			
	Jumlah Babinsa dan Babhinkamtibmas	2 orang	2 orang	100			
	Jumlah bantuan awal bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah kegiatan kampung bersih Narkoba (Bersinar) Tingkat kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah layanan simpul paten	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah linmas	30 Orang	25 Orang	83,33			
	Jumlah monitoring ketentraman dan ketertiban Lingkungan yang di laksanakan	12 kali	12 kali	100			
	Jumlah rapat koordinasi kelembagaan masyarakat	4 kali	4 kali	100			
	Jumlah RT	26 RT	26 RT	100			
	Jumlah RW	9 RW	9 RW	100			
KELURAHAN BENDUNGAN		2.515.886.588	2.444.572.666	97,17			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		616.259.748	563.777.358	91,48			
	Indeks RB Perangkat Daerah	43,0 Point	60,37 Point	140,4			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	76,0 Point	66,32 Point	87,26			
Arah Kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.183.626.840	1.164.795.308	98,41			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	16.420.000	65,68	-	-	
	Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun N+1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial (Updating Data Kemiskinan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel tahun N+2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		725.000.000	725.000.000	100	-	-	
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	3 termin	3 termin	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		428.626.840	418.375.308	97,61			
	jumlah pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10 Orang	10 Orang	100			
	jumlah terfasilitasi program kerja PKK	5 Program	5 Program	100			
	Jumlah terfasilitasi kegiatan proklam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	jumlah petugas pendamping UMKM	12 Bulan	12 Bulan	100			
	jumlah petugas pemandi jenazah	6 Orang	6 Orang	100			
	Jumlah peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	jumlah pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan RISMA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (PHBI/PHBN/STQ)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Dukungan Kelurahan sehat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Internet (10 Titik)	12 Bulan	12 Bulan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100	-	-	
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	6 Lokasi	6 Lokasi	100			
	Jumlah sarsna dan pra sarana yang dibangun	3 Jenis	3 Jenis	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		716.000.000	716.000.000	100			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	0,0 Persen	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		716.000.000	716.000.000	100	Terjadinya pandemi membuat koordinasi dengan RT/RW jadi terkendala,	Koordinasi diefektifkan melalui grup WA dan pendataan melalui online.	
	Anggota Linmas berjumlah 42 orang	12 bulan	12 bulan	100			
	jumlah layanan simpul paten dan penyusunan profil kelurahan	2 dok	2 dok	100			
	jumlah monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100			
	jumlah rapat koordinasi kelembagaan masyarakat	4 kali	4 kali	100			
	Honor RT dan RW berjumlah 26 orang	12 bulan	12 bulan	100			
KELURAHAN BAGENDUNG		2.723.826.150	2.632.192.564	96,64			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		608.517.812	552.871.409	90,86			
	Indeks RB Perangkat Daerah	43,0 Point	60,37 Point	140,4			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	76,0 Point	66,32 Point	87,26			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.381.143.598	1.349.904.415	97,74			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 Persen	0,0 Persen	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.968.070	22.885.800	91,66			
	MUSRENBANGKEL	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	PRA MUSREN	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	UPDATING DATA	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		943.019.813	937.532.855	99,42			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun (Daling RW)	8 RW	8 RW	100			
	TIM PENDUKUNG	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		413.155.715	389.485.760	94,27			
	Jumlah Kegiatan PORKLIM (jumsih)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	POSYANTEK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Internet (10 Titik)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pelaksanaan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	JENTIK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pengajian RISMA (1 RW 2x Keg, dalam 7 RW)	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus LPM (10 Orang X 12 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam PHBI/PHBN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Karang Taruna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Program Kerja PKK	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Pemandian Jenazah	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah UMKM yang didampingi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	PATBM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	PELATIHAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Dukungan Kota Layak Anak (KLA)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		734.164.740	729.416.740	99,35			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	0,0 Persen	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	104,6%	104,55			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		734.164.740	729.416.740	99,35			
	Jumlah Honorarium LINMAS (18 orang)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Honorarium BABinsa dan BABINKAMTIBNAS yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah BANWAL/Dini Bencana Linkungan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Kampung Bersih Narkoba (BERSINAR)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Simpul PATEN yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Monitoring trantibum	2 Kegiatan	5 Kegiatan	250			
	Jumlah Honorarium RT dan RW yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Percepatan Penanganan Covid-19	8 RW	8 RW	100			
KELURAHAN KETILENG		2.124.580.183	2.063.225.035	97,11			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		553.903.433	529.538.342	95,6			
	Indeks RB Perangkat Daerah	43,0 Point	60,37 Point	140,4			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	76,0 Point	66,32 Point	87,26			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		986.382.490	949.430.373	96,25			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 Persen	0,0 Persen	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	94,4%	94,44			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.971.000	22.771.000	91,19			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKEL N+2	2 Dok	2 Dok	100			
	Jumlah Dokumen Kegiatan Musrenbangkel (N+1)	2 Dok	2 Dok	100			
	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial	3 Dok	1 Dok	33,33			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		505.000.000	504.823.988	99,97	Tidak ada masalah sesuai rencana	'-	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun (DALING RW)	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100			
	Musyawarah Persiapan pelaksanaan Kontruksi (MP2K)	1 Keg	1 Keg	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang disusun	3 Dok	3 Dok	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		451.426.860	416.853.785	92,34			
	Jumlah PHBN yang terlaksana	2 Jenis	2 Jenis	100			
	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang terlaksana	1 Jenis	1 Jenis	100			
	Jumlah Kegiatan Risma yang difasilitasi Kleurahan	4 RISMA	4 RISMA	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang menerima Honor	10 orang	10 orang	100			
	Jumlah Petugas Pemandi Jenazah yang mendapat Honorarium 12 org x 4 RW	12 org/RW	12 org/RW	100			
	Jumlah Cabang STQ yang terlaksana	6 Jenis	6 Jenis	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Evaluasi Kelurahan		4.984.630	4.981.600	99,94			
	Jumlah Dokumen DPWKel (Fisik dan Non Fisik) yang telah tersusun	1 Dok	1 Dok	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		584.294.260	584.256.320	99,99			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	0,0 Persen	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		584.294.260	584.256.320	99,99			
	Jumlah Linmas yang menerima honorarium	22 org/bln	22 org/bln	100			
	Jumlah Peserta Rakor Pengelolaan Data Kependudukan	20 org	20 org	100			
	Jumlah Dokumen Hasil Kepuasan Masyarakat Hasil Pelayanan Publik Berbasis Teknologi atau Konvensional	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Lingkungan Bersih Narkoba	20 org	20 org	100			
	Jumlah Posko PPKM Mikro yang terfasilitasi	4 RW	4 RW	100			
	Jumlah peserta rakor/pelatihan kebencanaan	40 org	40 org	100			
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima honorarium	2 org/bln	2 org/bln	100			
	Jumlah RT yang menerima honorarium	16 org/Bln	16 org/Bln	100			
	Jumlah RW yang menerima honorarium	4 org/bln	4 org/bln	100			
	Jumlah Dokumen Rakor Triwulanan RT/RW	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah orang yang menerima respon cepat terdampak bencana	60 org	60 org	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KELURAHAN CIWEDUS		3.011.441.286	2.888.830.068	95,93			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		532.621.399	510.841.408	95,91			
	Indeks RB Perangkat Daerah	43,0 Point	60,37 Point	140,4			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	76,0 Point	66,32 Point	87,26			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.357.420.044	1.329.224.160	97,92			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 Persen	0,0 Persen	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	97,1%	97,07			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.998.658	24.968.500	99,88	Pentingnya Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Dilaksanakannya Forum Musyawarah Masyarakat Kelurahan	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Musyawarah Kelurahan Bidang Kesos	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Kegiatan Musrenbangkel (n + 1)	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Kegiatan Musrenbangkel (n + 2)	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		819.999.973	819.999.700	100	Pembangunan Infrastruktur/ sarana prasaran Kelurahan yang merata	Menampung keperluan Usulan dari Masyarakat di semua bidang	
	Jumlah Sarana dan Prasarana wilayah yang di bangun diserahkan kepada masyarakat 11 Lokasi	11 Lokasi	11 Lokasi	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang di susun	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
	Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola Keuangan : PPK	1 kegiatan	1 kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola Keuangan : KPA	3 bulan	2 bulan	66,67			
	Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola Keuangan : PPTK	12 bulan	12 bulan	100			
	Honorarium Pendamping Kotaku Sarpraswil DPWkel	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		506.338.598	477.192.160	94,24	-	-	
	Jumlah Pemandi Jenazah 6 orang x 14 keg	84 Orang/keg	84 Orang/keg	100			
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan	100			
	Pemantauan Jentik Berkala (12 Kali)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan / Jumlah UMKM yang didampingi	50 UMKM	50 UMKM	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Program Kerja PKK	5 Program	5 Program	100			
	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih (Pelatihan AC)	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Pengurus LPM 10 orang x 12 bulan	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	100			
	Jumlah Pelaksanaan STQ, PBHN, PHBI	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20			
	Jumlah Pelaksanaan Pengajian RISMA	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Internet 10 titik x 12 bulan	120 Titik/Bulan	120 Titik/Bulan	100			
	Dukungan Proklim	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		6.082.815	7.063.800	116,13	Diperlukan Evaluasi dalam pelaksanaan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan untuk bahan Penyempurnaan Tahun Berikut	Pembuatan Laporan di masing-masing Kegiatan Kelurahan	
	Persiapan Kegiatan Evaluasi Kelurahan : Pembentukan Tim, Penyiapan Format, Pengumpulan Data : Rapat	15 orang	15 orang	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kelurahan : Penyusunan Laporan Triwulan dalam bentuk Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaporan : Penginputan Laporan Triwulan ke dalam aplikasi e-monev dan pengadministrasian Kegiatan	4 Data	4 Data	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.121.399.843	1.048.764.500	93,52			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	95,0 Persen	95			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.121.399.843	1.048.764.500	93,52	tidak ada maslah		
	Uang Saku Kegiatan Sosialisasi/Bintek, Kampung Bersih Narkoba	25 Orang/Kegiatan	25 Orang/Kegiatan	100			
	Belanja Perjalanan Dinas/ Penyusunan Data	3 Orang	3 Orang	100			
	Nonorarium Bhabinsa,Bhabinkamtibmas	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Belanja Ketertiban Masyarakat/Honor Linmas	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Honorariu Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,Panitia	5 Orang/Jam/Kegiatan	5 Orang/Jam/Kegiatan	100			
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	3 Stel	3 Stel	100			
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Belanja /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4 Buku	4 Buku	100			
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4 jenis	4 jenis	100			
	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelolaan Keuangan PPTK,KPA	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Pengimputan Data Profil	2 Orang/Hari	4 Orang/Hari	200			
	Honorarium RT/RW Berserta Pengurusnya	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			

1.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Pengukuran kinerja indikator ke-1 yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Cilegon Kota Cilegon untuk tahun 2022 (penilaian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecilegon Cilegon Kota Cilegon tahun 2022) yang dinilai oleh evaluator dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Cilegon. Hasilnya realisasi Nilai E-SAKIP Kecamatan Cilegon dan Kelurahan Poin Sebesar 94,79% dari target yang ditetapkan poin Sebesar 92%, dengan capaian mencapai 94,79%. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 pada indikator 1 tersebut diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Cilegon Kota Cilegon 94,79% mencapai target yang telah ditetapkan.

- 1. Indikator Nilai Lakip SAKIP Kecamatan
Dari hasil Pengukuran Kinerja Pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Cilegon pada Tahun 2022 Capaian Kinerjanya 87% Mengalami Peningkatan pada Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja sebesar 66,32%. Peningkatan capaian Indikator ini dikarenakan yaitu: (1) Penyampaian Dokumen Lakip yang tepat Waktu, (2) adanya Keselarasan antara Perjanjian Kinerja dengan Renstra Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan RPJMD, (3) Semakin Bertambahnya Pemahaman SDM tentang Cara Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan.
- 2. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Dari hasil Pengukuran Kinerja Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Cilegon pada Tahun 2022 Capaian Kinerjanya 140,40% Mengalami Peningkatan pada Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja sebesar 60,37%.
- 3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Dari hasil Pengukuran Kinerja Pada indikator Indeks kepuasan Masyarakat Kecamatan diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Cilegon pada Tahun 2022 Capaian Kinerjanya 122,36%. pada Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja sebesar 94,22 dari target 81. Ketercapaian Target capaian Indikator ini dikarenakan yaitu: Pelayanan yang cepat dan tepat waktu; Komitmen petugas pelayanan (pegawai) Kecamatan Cilegon untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sarana dan Prasana pelayanan yang memadai.

Indeks Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh evaluator dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Cilegon. Hasilnya realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Cilegon sebesar Poin 87,26 dari target yang ditetapkan Poin 42,5, dengan capaian 50%. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 pada indikator 2 tersebut diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sudah melebihi capaian target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi belanja OPD Kecamatan Cilegon untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Unit	Pagu Anggaran	Serapan Anggaran	%
1	Kecamatan Cilegon	12.750.232.761	11.526.992.338	90,41
2	Kelurahan Bagendung	2.723.826.150	2.632.192.564	96,64
3	Kelurahan Ciwaduk	3.085.308.403	3.085.308.403	100
4	Kelurahan Bendungan	2.515.886.588	2.444.572.666	97,17
5	Kelurahan Ciwedus	3.011.441.286	2.888.830.068	95,93
6	Kelurahan Ketileng	2.124.580.183	2.063.225.035	97,11
Total Belanja		26.211.275.371	24.724.445.336	94.33

Pagu anggaran OPD Kecamatan Cilegon beserta seluruh kelurahan di tahun 2022 adalah sebesar Rp. 26.211.275.371 Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 24.724.445.336 atau 94,33%.

Indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan bertujuan untuk memonitor dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya terhadap keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan selain itu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dalam menunjang program-program pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan salah satunya adalah pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel). Pengukuran kinerja indikator pada sasaran yaitu Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani Berdasarkan cara Perhitungan diatas Hasilnya Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani Kecamatan Ciwandan Tahun 2022 sebesar 94,74% dari target yang ditetapkan 100%.

Berikut ini adalah capaian pembangunan sarpraswil DPWKel di Kecamatan Cilegon pada Tahun 2022:

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA	DRAINASE	GAPURA	JAMBAN	PAGAR MAKAM	PAVING BLOCK	PJU	POS RONDA	POSYANDU	REHAB MASJID	REHAB MUSHOLA	RUTILA
CILEGON	4	418,72	5	29	4	2.771,56	40	3	5	2	1	12
BAGENDUNG		44,55		28		680,31	5		3			2
BENDUNGAN		97,38	5		3	312,35		3		1		
CIWADUK	1	61,95				1.090,90	10		2	1	1	10
CIWEDUS	3	88,54		1	1	242,00	5					
KETILENG		126,29				446,00	20					

2. KECAMATAN CIWANDAN

2.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1b. Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Ciwandan)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN CIWANDAN		15.476.954.947	14.374.276.425	92,88			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.572.339.427	13.619.244.855	93,46			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26.081.200	23.757.200	91,09			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	81,0 Poin	84,05 Poin	103,77			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		26.081.200	23.757.200	91,09	-	-	
	Jumlah Terfasilitasinya Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		695.821.620	563.444.870	80,98			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	17,50%	116,67			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		84.329.500	76.429.500	90,63	-	-	
	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		592.549.120	469.941.170	79,31			
	Jumlah terlaksananya kegiatan PKK di wilayah kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	100			
	Jumlah Terlaksananya Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Ciwandan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terfasilitasinya Lomba Kelurahan di kecamatan ciwandan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan pengajian rutin di kecamatan ciwandan	1 Tahun	1 Tahun	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terfasilitasinya kegiatan pendamping ekonomi UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		18.943.000	17.074.200	90,13	-	-	
	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		87.890.000	81.888.800	93,17			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	94,74%	94,74			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		30.000.000	29.998.800	100	-	-	
	Jumlah terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		57.890.000	51.890.000	89,64			
	koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republi	1 paket	1 paket	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		91.792.700	82.910.700	90,32			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,00%	92,41%	154,02			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		32.796.000	32.364.000	98,68	-	-	
	Jumlah Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila		32.284.700	27.884.700	86,37	-	-	
	Jumlah Terlaksananya Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		26.712.000	22.662.000	84,84			
	Jumlah Terlaksananya Tugas Forkopimcam di kecamatan ciwandan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		3.030.000	3.030.000	100			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.030.000	3.030.000	100	-	-	
	Jumlah TerFasilitasinya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100			
KELURAHAN RANDAKARI		2.453.789.191	2.399.117.109	97,77			
Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		560.273.177	519.040.975	92,64	-	-	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.059.989.130	1.048.099.350	98,88			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.065.852	25.065.852	100	-	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		615.000.000	614.910.600	99,99	-	-	
	Jumlah Dokumen pra RAB	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah Kegiatan Sarpraswil terbangun	15 Lokasi	15 Lokasi	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		414.986.278	403.185.898	97,16	-	-	
	Belanja Bahan Bahan /Bibit Tanaman	4 JENIS	4 JENIS	100			
	Terlaksananya dukungan Kelurahan Sehat	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qura'an (STQ)	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Layanan Internet Gratis	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi LPM	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Fasilitas PATBM	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Dukungan Program Iklim	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
Evaluasi Kelurahan		4.937.000	4.937.000	100	-	-	
	Evaluasi Kelurahan	100 %	100 %	100			
Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		833.526.884	831.976.784	99,81	-	-	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		833.526.884	831.976.784	99,81	-	-	-
	Fasilitas Peningkatan Koordinasi Kelembagaan RT/RW	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Kegiatan Kampung Bersinar	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Kegiatan PPKM	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Profil Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Simpul Paten	1 Laporan	1 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Monitoring Ketentraman dan Keteriban Umum	1 Laporan	1 Laporan	100			
KELURAHAN KEPUH		2.399.213.632	2.333.015.742	97,24			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		768.671.252	731.470.212	95,16	-	-	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		942.942.380	932.909.930	98,94			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	17.498.000	69,99			
	Pelaksanaan musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan pramusrenbangkel (n+2)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan musyawarah kelurahan bidang kesos	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		505.000.000	503.014.400	99,61	Tidak ada	-	
	Jumlah dokumen pra RAB yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah wilayah/lingkungan yang dibangun	10 Lokasi	10 Lokasi	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		407.942.380	407.397.530	99,87			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kelurahan	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Dukungan Program Iklim	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Fasilitasi PATBM	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya fasilitasi Koordinasi LPM	10 LAPORAN	10 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Layanan Internet Gratis	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	8 LAPORAN	8 LAPORAN	100			
	Pelaksanaan Selleksi Tilawati Qur'an (STQ)	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Terfasilitasinya evaluasi kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		687.600.000	668.635.600	97,24			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		687.600.000	668.635.600	97,24			
	Peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten)	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Penyusunan dokumen profil	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 LAPORAN	4 LAPORAN	100			
	Kegiatan ppkm mikro	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Kegiatan kampung bersinar	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100			
	Fasilitasi peningkatan koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW)	4 LAPORAN	4 LAPORAN	100			
KELURAHAN GUNUNGSUGIH		2.308.521.679	2.210.374.037	95,75			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		598.215.218	534.043.437	89,27	TIDAK ADA KENDALA	TIDAK ADA TINDAKLANJUT	
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.073.001.461	1.049.795.760	97,84	TIDAK ADA KENDALA	TIDAK ADA TINDAKLANJUT	-
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	24.998.040	99,99	tidak ada kendala	tidak ada tindaklanjut	-
	Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Bidang Kesos	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel Tahun N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		615.000.000	613.600.000	99,77	tidak ada kendala	tidak ada tindaklanjut	-
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	1 Dokuemn	1 Dokuemn	100			
	Jumlah Lokasi Sarpraswil Terbangun	16 Titik	16 Titik	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		428.001.461	406.199.960	94,91	tidak ada kendala	tiak ada tindaklanjut	-
	Jumlah UMKM yang didampingi	20 UMKM	20 UMKM	100			
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kasus kekerasan anak.	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah program kerja PKK yang terfasilitasi	3 Program	3 Program	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus LPM	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Prorklim	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Layanan internet	10 Titik	10 Titik	100			
	Jumlah Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan PHBN;	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	4.997.760	99,96	-	-	-
	Jumlah Kegiatan Evaluasi kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		637.305.000	626.534.840	98,31	Tidak ada kendala	Tidak ada tindak lanjut	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		637.305.000	626.534.840	98,31	tidak ada kendala	tdak ada tindak lanjut	-
	Profil Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Kegiatan Kampung Bersinar	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Kegiatan PPKM MIKRO	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Layanan simpul Paten	1 Laporan	1 Laporan	100			
	monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Fasilitasi Peningkatan Kegiatan RT/RW	4 Laporan	4 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KELURAHAN BANJARNEGARA		2.078.954.493	2.034.899.201	97,88			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		548.012.502	520.988.901	95,07	TIDAK ADA KENDALA	TIDAK ADA TINDAK LANJUT	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		942.941.991	930.663.000	98,7	TIDAK ADA KENDALA	TIDAK ADA TINDAKLANJUT	-
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	302,1%	302,08			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	24.997.000	99,99			-
	Pelaksanaan Musrenbangkel (n+1)	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Pelaksanaan Muskel Kesos	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Pelaksanaan Pramusrenbangkel (n+2)	1 Laporan	1 Laporan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		507.000.000	504.937.400	99,59			-
	Jumlah Wilayah/Lingkungan yang dibangun	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah Dokumen PRA RAB yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		405.941.991	395.728.600	97,48			-
	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Pelaksanaan STQ Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	100			
	Pelaksanaan PHBN	2 Laporan	1 Laporan	50			
	Pelaksanaan Risma Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Pelaksanaan Pemulasaraan/Pemandi Jenazah	2 Laporan	0 Laporan	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Sosialisasi PHBS	1 Laporan	30 Laporan	3,000,00			
	Pelaksanaan Sosialisasi Kelompok Asman Toga	1 Laporan	40 Laporan	4,000,00			
	Jumlah Program PKK yang terfasilitasi	12 Laporan	6 Laporan	50			
	Jumlah Program Kerja Karang Taruna Bidang Pelatihan dan Penyuluhan yang terfasilitasi	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Pelaksanaan Penyuluhan Tentang PATBM	20 Laporan	20 Laporan	100			
	Pelaksanaan data UMKM yang dimutakhirkan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Pelaksanaan Layanan Internet Gratis	10 Laporan	10 Laporan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			-
	Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	15 Laporan	375			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		588.000.000	583.247.300	99,19	TIDAK ADA KENDALA	TIDAK ADA TINDAK LANJUT	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		588.000.000	583.247.300	99,19			-
	Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Kampung Bersinar	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Fasilitasi Peningkatan Kegiatan RT/RW	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Pelaksanaan Monev Trantibum	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Posko PPKM Mikro	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Profil Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Simpul Paten Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
KELURAHAN TEGAL RATU		2.577.037.406	2.515.662.825	97,62			
Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		581.078.794	555.644.085	95,62	Tidak ada Kendala	Tidak ada Tindak lanjut	-
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.244.158.612	1.212.428.480	97,45	Tidak ada kendala	tidak ada tindak lanjut	-
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	24.496.200	97,98	Tidak ada kendala	Tidak ada Tindak lanjut	-
	Musrenbangkel	30 Orang	30 Orang	100			
	Pra Musrenbangkel	45 Orang	45 Orang	100			
	Muskel DTKS	20 Orang	20 Orang	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		780.320.600	763.113.140	97,79	Tidak ada kendala	Tidak ada tindak lanjut	-
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	1 Paket	1 Paket	100			
	Jumlah Lokasi Sarpraswil Terbangun	6 Rw	6 Rw	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		438.838.012	424.819.140	96,81	Tidak ada kendala	Tidak ada Tindak lanjut	-
	Jumlah program kerja PKK yang terfasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	100			
	honorium pendamping UMKM	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	10 Laporan	10 Laporan	100			
	Jumlah sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kasus kekerasan anak	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan PHBN	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah Pengurus LPM	10 Laporan	10 Laporan	100			
	Jumlah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Prorklim	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Layanan internet	10 Laporan	10 Laporan	100			
	Jumlah Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		751.800.000	747.590.260	99,44	Tidak ada kendala	Tidak ada tindak lanjut	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		751.800.000	747.590.260	99,44	Tidak ada kendala	Tidak ada tindak lanjut	-
	kegiatan kampung bersinar	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Kegiatan PPKM	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Profil Kelurahan Tegalratu	1 Laporan	1 Laporan	100			
	SIMPUL PATEN	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Monitoring Ketentraman Dan Keterrtiban	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Peningkatan Rapat Kordinasi Rt/Rw	4 Laporan	4 Laporan	100			
KELURAHAN KUBANGSARI		2.075.950.800	2.044.567.093	98,49			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		562.736.200	544.844.973	96,82			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	55,0 Poin	69,78 Poin	126,87			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	56,94 Poin	133,98			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.012.414.600	999.690.120	98,74			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	25.000.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun N+1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Pra Musrenbangkel Tahun N+2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Bidang Kesos	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Persiapan Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun N+1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Bidang Kesos	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		505.000.000	505.000.000	100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana wilayah yang dibangun	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Pendamping Sarpraswil (SALIRA)	1 Orang	1 Orang	100			
	Jumlah Kegiatan Pendampingan Infrastruktur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	4 Lokasi	4 Lokasi	100			
	Jumlah Sarpraswil (SALIRA)	4 RW	4 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		477.414.600	464.690.120	97,33			
	Jumlah Terfasilitasinya Pemulasaraan Jenazah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Terfasilitasnya Kegiatan Kelurahan Sehat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah terfasilitasinya program kerja PKK	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Terfasilitasinya Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Pendampingan Bidang Infrastruktur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus Pemulasaraan Jenazah	24 Orang	24 Orang	100			
	Jumlah pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan internet	10 Titik	10 Titik	100			
	Jumlah kegiatan PHBI/PHBN	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pendampingan Ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Dukungan Proklamasi (Penghijauan/kebersihan dll)	12 Bulan	12 Bulan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan	1 Kali	1 Kali	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		500.800.000	500.032.000	99,85			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		500.800.000	500.032.000	99,85			
	Jumlah Pengurus Ketua RT/RW	55 Orang	55 Orang	100			
	Honorarium Bhabinkamtibmas & Babinsa	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Banwal/dini (rakor) bencana lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Anggota Linmas	30 Orang	30 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Terfasilitasinya Deklarasi Kampung Bersih Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

2.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Kecamatan Ciwandan mengampu kewilayahan, mendukung Misi ke 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel dan Misi ke 5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan masyarakat berperadaban. Tujuan Misi ke 1 yaitu Peningkatan layanan Pemerintahan, indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan tujuan Misi ke 5 yaitu Peningkatan kualitas hidup masyarakat, indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Kebahagiaan. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu (1) Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai LuhurKeagamaan dengan indikator Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani, Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara; (2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dnegan indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan.

Unsur kewilayahan pada kecamatan ciwandan beserat kelurahan memiliki 5 (lima) program dan 6 (enam) indikator program yang harus dicapai yaitu :
(1)

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator
 - a. Nilai LAKIP perangkat daerah dengan target 55,00 poin dan
 - b. Indeks RB perangkat daerah dengan target 42,5 poin; (2)
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator
3. Indeks kepuasan masyarakat target 81,00 poin; (3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator
4. Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan (target 15%), (4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator
5. Persentase gangguan trantibum yang ditangani dengan target 100%, serta (6) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Bela Negara dengan target 50%. Adapun capaian kinerja anggaran pada kecamatan ciwandan beserta kelurahan dengan target anggaran sebesar Rp 29.493.087.648,00,- dan realisasi sebesar Rp 27.919.741.432,00,- dengan capaian kinerjanya sebesar 94,67%.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15,00%, secara lebih rinci perhitungan realisasipencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	Rumus = $X/Y \times 100\%$ Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) terhadap total anggaran dana lingk. $\frac{(Rp)}{\text{Kelurahan}} \times 100\%$	100%

Dari data diatas maka capaian Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 15,00%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(15,00/15,00) \times 100\% = 100,00\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Persentase gangguan Trantibum yang ditangani; dengan target 100%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Persentase gangguan Trantibum yang ditangani; dengan target 100%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Rumus = $X/Y \times 100\%$ $\frac{x = \text{Jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani (kasus)}}{y = \text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi (kasus)}} \times 100\%$	100%

Dari data diatas maka capaian Persentase gangguan trantibum yang ditangani adalah sebesar 100%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(100/100) \times 100\% = 100\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indikator Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara dengan target 50%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara	Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test ≥ 70 dari nilai maksimal 100 (satunya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang krakater / Jumlah peseta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara $\times 100\%$	0

Indikator yang dibandingkan kepada 53 Kegiatan dengan 151 Sub Kegiatan dan 441 indikator sub kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan.

Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program, Indikator Output Sub Kegiatan dan keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,25%	93,59%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	91,09%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	96,64%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	98,21%	96,15%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	90,32%

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program dengan capaian indikator output, namun pada capaian keuangan realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program (N/A) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100%), hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Sama halnya dengan indikator output yang kurang mendukung capaian program, belanja juga menunjukkan hal yang sama, nilai capaian keuangan menunjukan nilai yang rendah. Yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Inspektorat

dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana penunjang.

Berikut ini adalah capaian pembangunan sarpraswil DPWKel di Kecamatan Ciwandan pada Tahun 2022:

KECAMATAN / KELURAHAN	DRAINASE (m ³)	JAMBAN (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m ²)	PJU (Titik)	REHAB MASJID (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RUTILAHU (Unit)	TPT (m ³)
CIWANDAN	299,79	18	4	5.918,33	65	1	1	2	573,54
BANJARNEGARA	167,22			521,80	5				52,80
GUNUNGSUGIH	74,00		1	1.250,03	5				91,50
KEPUH			1	1.122,47	5				135,56
KUBANGSARI	13,30	2		510,68	20			2	91,41
RANDAKARI		16	1	965,17	5	1	1		154,95
TEGAL RATU	45,27		1	1.548,18	25				47,32

3. KECAMATAN CIBEBER

3.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Cibeber)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN CIBEBER		14.868.757.056	13.684.277.532	92,03			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.161.216.420	13.007.015.032	91,85	Kurangnya Data - data Pendukung dan data sektoral kelurahan	Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	-
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46.979.200	46.979.200	100	Tercapainya Keberhasilan capaian indikator ini yaitu faktor pendorongnya adalah ini didukung nya oleh pelayanan yang cepat dan tepat waktu, komitmen petugas pelayanan (pegawai) untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang cukup memadai.	Perlunya peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	83,5 Persen	98,75 Persen	118,26			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		46.979.200	46.979.200	100	-	-	-
	Terlaksananya kegiatan Simpul PATEN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		591.933.036	561.654.900	94,88	Partisipasi Swadaya masyarakat, yg diberikan kepada masyarakat sangat rendah, sehingga mengakibatkan swadaya masyarakatnya masih sangat rendah	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan di kota Cilegon	-
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 Persen	3,81 Persen	25,4			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		63.696.400	60.686.400	95,27	-	-	-
	Proporsi Realisasi Pelaksanaan dana Pembangunan Wilayah Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		145.329.494	131.904.300	90,76			-
	Jumlah Lokasi Paving blok yang dibangun	325 M2	325 M2	100			
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi DPWKel	4 Kali	4 Kali	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		285.085.000	279.590.000	98,07	-	-	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya kegiatan MTQ TK.Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya Jum'at Bersih	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100			
	Terlaksananya GPATBM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Terlaksananya kegiatan MTQ TK. Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya pengajian rutin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
	Terlaksananya PHBI, PHBN dan PHBD	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		15.619.200	15.109.200	96,73			-
	Terlaksananya kegiatan PKK	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		73.020.000	65.245.000	89,35	-	-	-
	Terlaksananya pendampingan UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pendataan UMKM	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pembayaran internet 5 titik	9 Bulan	9 Bulan	100			
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		9.182.942	9.120.000	99,31			-
	Terlaksananya TTG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		11.070.000	11.070.000	100	Tercapainya Keberhasilan capaian indikator ini Kecamatan Cibeber Kota Cilegon juga berhasil memenuhi targetnya dengan keberhasilan ini didukung dengan penanganan kasus yang ditangani pada	Melakukan Monitoring dan langsung ditindaklanjuti	
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	100,0 Persen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					gangguan trantibum yang terjadi di wilayah OPD Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Tahun 2022 sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11.070.000	11.070.000	100			
	Terlaksananya Kampung bebas narkoba	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		57.558.400	57.558.400	100	Tercapainya Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon juga berhasil memenuhi targetnya dengan keberhasilan ini didukung oleh jumlah peserta sebanyak 30 orang, semua memahami pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara di OPD Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang dilaksanakan pada sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,.		
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,0 Persen	100,0 Persen	166,67			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka		14.298.400	14.298.400	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	JumlahTerlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		43.260.000	43.260.000	100			
	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
KELURAHAN KEDALEMAN		2.887.362.476	2.689.760.402	93,16			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		509.146.572	482.662.882	94,8			
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.342.260.484	1.196.104.040	89,11			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	2,00%	13,33			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	98,6%	98,56			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.025.000	23.733.000	94,84			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terselenggaranya Pra Musrenbangkel	1 Dok	1 Dok	100			
	Terselenggaranya Muskel DTKS	1 Dok	1 Dok	100			
	Terselenggaranya Musrenbangkel	1 Dok	1 Dok	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		802.363.000	792.945.000	98,83			
	Terbangunnya sarpraswil	1 Paket/ 7 RW	1 Paket/ 7 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		504.872.484	369.426.240	73,17			
	Fasilitasi Remaja Islam Masjid	12 Bulan/7RW	12 Bulan/7RW	100			
	Fasilitasi Program Karang Taruna	1 Keg	1 Keg	100			
	Fasilitasi Pemandi Jenazah	7 Keg	7 Keg	100			
	Jumlah Program PKK yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Honorarium Pengurus LPM	12 Bulan	12 Bulan	100			
	PATBM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Internet UMKM	12 Titik	3 Titik	25	Tidak ada Invoice/Tagihan dari pihak provider selama 9 bulan dan pelayanan provider/Wifi publik tidak Aktif	Internet umkm dicairkan 3 bulan dan tidak dicairkan internet UMKM selama 9 bulan	
	Pelaksanaan STQ III	1 Keg	1 Keg	100			
	Proklm (Jumsih)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Rakor Pengurus LPM	4 TW	4 TW	100			
	Terlaksananya kegiatan PHBI (Muharram 1444 H)	2 Keg	2 Keg	100			
	Terlaksananya kegiatan PHBN	1 Keg	1 Keg	100			
	Senam Bersama	12 Bulan	12 Bulan	100			
Evaluasi Kelurahan		10.000.000	9.999.800	100			
	Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan	4 TW	4 TW	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.035.955.420	1.010.993.480	97,59			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.035.955.420	1.010.993.480	97,59			
	Tersalurkannya belanja jasa Babinsa & Bhabinkamtibmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya program kampung bersih narkoba (Bersinar)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Terlaksananya penanganan Covid-19	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya rapat koordinasi RT/ RW	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya monitoring trantibum	10 Bulan	10 Bulan	100			
	Terlaksananya penyusunan profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Tersalurkannya belanja jasa anggota Linmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Tersalurkannya belanja jasa RT/ RW beserta jajarannya	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Tersalurkannya honorarium PPTK	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Tersalurkannya honorarium KPA	3 Bulan	3 Bulan	100			
	Terselenggaranya Banwal/ Rakor bencana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Terselenggaranya rapat Paten	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
KELURAHAN KALITIMBANG		2.193.175.152	2.084.688.029	95,05			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		501.654.722	423.880.409	84,5			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.063.949.300	1.037.838.720	97,55			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.999.000	24.980.000	99,92			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		599.996.000	599.996.000	100			
	Pembangunan Paving Blok	913 M2	913 M2	100			
	Pembangunan Drainase Lingkungan	485 M1	485 M1	100			
	Pembangunan TPT Lingkungan	41 M3	41 M3	100			
	Pembangunan Pagar Makam	48 M3	48 M3	100			
	Pembangunan PJU	5 Unit	5 Unit	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		433.954.300	407.862.720	93,99			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan (KARANG TARUNA)	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Dukungan Kelurahan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Dukungan Program Kampung Iklim	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
	Jumlah Peserta Penyuluhan Tentang PATBM	1 Orang	1 Orang	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Risma yang difasilitasi oleh kelurahan	5 RISMA	5 RISMA	100			
	Jumlah Layanan Internet Gratis	10 Titik	10 Titik	100			
	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	10 Peserta	10 Peserta	100			
	Jumlah Orang Terfasilitasinya Honorarium Pemulasaraan/Pemandi Jenazah	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Dokumen Terfasilitasinya kegiatan PHBI/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Posyantek Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Jumlah Dokumen DPWKel (Fisik dan Non Fisik) yang telah tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		627.571.130	622.968.900	99,27			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		627.571.130	622.968.900	99,27			
	Jumlah Linmas yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Lingkungan Bersih Narkoba	80 Orang	80 Orang	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah laporan hasil kegiatan simpul paten	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah RT yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah dokumen Rakor Bencana Lingkungan / Bantuan Awal Bencana Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah RW yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
KELURAHAN KARANG ASEM		2.765.180.403	2.714.136.392	98,15			
Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		489.602.703	480.969.221	98,24			
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.277.301.000	1.238.941.521	97			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		25.000.000	25.000.000	100			
	Pra Musrenbangkel	1 Keg	1 Keg	100			
	Updating Data Kemiskinan	1 Keg	1 Keg	100			
	Musrenbangkel	1 Keg	1 Keg	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		828.101.000	826.880.901	99,85			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pembangunan Sanpraswil yang ada	3 Termin	3 Termin	100			
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	4 Bulan	4 Bulan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		424.200.000	387.060.620	91,24			
	Jumlah Program Kepemudaan yang terfasilitasi	2 Keg	2 Keg	100			
	Jumlah Laporan Internet	10 titik	10 titik	100			
	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran	1 keg	1 keg	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelatihan AC yang Dilatih	10 orang	10 orang	100			
	Jumlah Pemulasaran Jenazah	20 orang	20 orang	100			
	Jumlah Fasilitasi pendukung Kelurahan Sehat	25 orang	25 orang	100			
	Jumlah Pengurus LPM	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI/PHBN)	3 Keg	3 Keg	100			
	Jumlah Program Kerja PKK yang Terasilitasi	1 Program	1 Program	100			
	Jumlah UMKM Yang didampingi	20 UMKM	20 UMKM	100			
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah RISMA yang terfasilitasi	2 Keg	2 Keg	100			
	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Anak	1 Keg	1 Keg	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		998.276.700	994.225.650	99,59			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		998.276.700	994.225.650	99,59			
	Kampung bersinar	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Sosialisasi PPKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Penegakan Perundang-undangan/Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Layanan Simpul Paten	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Koordinasi RT/RW	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Monitoring Trantibum Lingkungan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
KELURAHAN CIKERAJ		2.998.928.292	2.944.846.527	98,2			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		744.486.342	718.665.057	96,53			
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.555.181.950	1.532.262.270	98,53			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 Persen	0,0 Persen	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	22.522.800	90,09	-	-	
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel Tahun N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Bidang Kesos	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.002.727.750	999.496.050	99,68	-	-	
	Jumlah sarana dan prasarana wilayah yang dibangun	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		527.454.200	510.243.420	96,74	-	-	
	Jumlah Pendampinagn Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pendampinagn UMKM	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Pendampingan Pasien TB Penyuluhan GERMAS dan Aktifitas Fisik Bersama Masyarakat (Senam Bersama)	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan PHBN	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
	Jumlah Petugas Pemandi Jenazah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pengurus LPM	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah RISMA yang Terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah program kerja PKK yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Layanan internet	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		699.260.000	693.919.200	99,24			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	0,0 Persen	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		699.260.000	693.919.200	99,24	-	-	
	Jumlah Anggota Linmas	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Bhabinkamtibmas dan Babinsa	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Kampung BERSINAR	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Monitoring	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Profil	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah RT dan RW	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
KELURAHAN BULAKAN		2.129.031.530	2.095.857.969	98,44			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		650.342.602	641.146.129	98,59			
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		891.195.300	881.719.220	98,94			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		39.959.600	39.959.600	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		483.110.000	483.110.000	100			
	Rehabilitasi Mushola	3 Unit	3 Unit	100			
	Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pembangunan TPT Lingkungan	250 M3	250 M3	100			
	Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Penerangan Lingkungan Permukiman (CAANG)	10 Titik	10 Titik	100			
	Pembangunan Drainase Lingkungan	50 M1	50 M1	100			
	Pembangunan Paving Blok	139 M2	139 M2	100			
	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		368.125.700	358.649.620	97,43			
	Jumlah Cabang Lomba STQ Kelurahan yang terlaksana	4 Jenis	4 Jenis	100			
	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Hari Besar Nasional (PHBN)	3 Jenis	3 Jenis	100			
	Jumlah Risma yang difasilitasi oleh kelurahan	4 Risma	4 Risma	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang menerima honorarium	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Program PKK yang terfasilitasi	10 Program	10 Program	100			
	Kegiatan Perlindungan anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	13 Dokumen	13 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen data UMKM yang dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikasi (Pelatihan AC)	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah titik Internet Gratis	10 Titik	10 Titik	100			
	Fasilitasi kegiatan Kepemudaan Jumlah Program Kerja Karang Taruna yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Dukungan Proklamasi	11 Dokumen	11 Dokumen	100			
	Dukungan Kelurahan Sehat	11 Dokumen	11 Dokumen	100			
	Jumlah Orang yang menerima Honorarium Pemulasaraan/Pemandi Jenazah	22 Orang	22 Orang	100			
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		587.493.628	572.992.620	97,53			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		587.493.628	572.992.620	97,53			
	Jumlah RT yang menerima honorarium	648 Orang/Bulan	648 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Posko PPKM Mikro yang terfasilitasi	4 RW	4 RW	100			
	Jumlah RW yang menerima honorarium	144 Orang/Bulan	144 Orang/Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Lingkungan Bersih Narkoba	136 Orang	136 Orang	100			
	Jumlah Peserta Rakor Pengelolaan Data	21 Orang	21 Orang	100			
	Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima honorarium	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Linmas yang menerima honorarium	216 Orang/Bulan	216 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Dokumen Rakor Triwulanan RT/RW	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
KELURAHAN CIBEBER		4.444.541.397	4.329.994.366	97,42			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		660.018.689	575.238.438	87,15			
	Nilai LAKIP Kecamatan	75,31 Poin	75,31 Poin	100			
	Indeks RB Perangkat Daerah	42,5 Poin	38,88 Poin	91,48			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.033.488.708	2.009.166.328	98,8			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	99,4%	99,38			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		50.000.000	50.000.000	100			
	Musyawarah Kelurahan Bidang sosial tentang updating Data Kemiskinan (DTKS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan (Tahun 2023)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Pra musrenbang kelurahan (untuk menyusun rencana pembangunan Tahun 2024)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.490.289.000	1.488.289.000	99,87			
	DALING RW	12 RW	12 RW	100			
	Dokumen RAB dan PRA RAB	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		486.200.000	463.877.620	95,41			
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Masyarakat kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya PHBI/ PHBN/STQ	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75			
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya Layanan Internet Gratis	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya Dukungan Kampung Iklim	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Evaluasi Kelurahan		6.999.708	6.999.708	100			
	Laporan triwulanan seluruh kegiatan DPWKel	10 buku	10 buku	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.751.034.000	1.745.589.600	99,69			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.751.034.000	1.745.589.600	99,69			
	Jumlah laporan hasil kegiatan simpul paten	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah RW yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Lingkungan Bersih Narkoba	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah RT yang menerima honorarium	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Linmas yang menerima honorarium	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima honorarium	12 Dokumen	12 Dokumen	100			

3.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Tujuan Misi ke 1 yaitu Peningkatan kualitas layanan Pemerintahan, indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat .

Sedangkan tujuan Misi ke 5 yaitu Peningkatan kualitas hidup masyarakat, indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Kebahagiaan. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu (1) Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan dengan indikator Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani, Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara; (2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dnegan indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan.

Unsur kewilayahan pada kecamatan cibeber beserat kelurahan memiliki 5 (lima) program dan 6 (enam) indikator program yang harus dicapai yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Nilai LAKIP perangkat daerah dengan target 75,31 poin
 - b. Indeks RB perangkat daerah dengan target 42,50 poin
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Indeks kepuasan masyarakat dengan target 83,50 persen
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a. Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15.00 persen
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Persentase gangguan trantibum yang ditangani dengan target 100 persen
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - a. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Bela Negara dengan target 60 persen

Sedangkan capaian kinerja anggaran pada kecamatan cibeber beserta kelurahan dengan target anggaran sebesar Rp. 32.286.976.306,- dan realisasi sebesar Rp. 30.549.054.506,- dengan capaian kinerjanya sebesar 94.62%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan dareah kabupaten/kota di Kecamatan cibeber beserta kelurahan terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Capaian pada indikator nilai LAKIP perangkat dareah kecamatan cibeber beserta kelurahan sebesar 75.31 poin dari target sebesar 75,31 poin, sedangkan persentase dari kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori tinggi.

3. Indeks RB Perangkat Daerah

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kecamatan cibeber beserta kelurahan sebesar 38.88 poin dengan target yang telah ditetapkan yaitu 42.50 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 91.48 % dengan kategori Baik. Capaian kinerja didapatkan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform.

Selanjutnya capaian kinerja indikator pada program teknis, penjelasan teknisnya sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Evaluasi atas Survey Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeber beserta kelurahan Kota Cilegon dengan target sebesar 83.50 poin, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks kepuasan masyarakat	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) (yang dilakukan oleh surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	118.26%

Dari data diatas maka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar : 98.75%, dan realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(98.75\%/83.50\%)*100\% = 118.26\%$, sehingga capaiannya bisa dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15.00%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	Rumus = $X/Y \times 100\%$ Jumlah swadaya masyarakat di kel baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) terhadap total anggaran dana lingk. (Rp) Kelurahan $\times 100\%$	25.40%

Dari data diatas maka capaian Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar $(Rp\ 141.697.407 : 3.716.297.750) \times 100\% = 3.81\%$, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(3.81\%/15.00\%) \times 100\% = 25.40\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan

“Cukup”.

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Persentase gangguan Trantibum yang ditangani; dengan target 100%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	$\frac{x = \text{Jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani (kasus)}}{y = \text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi (kasus)}} \times 100\%$	100%

Kasus yang ditangani pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kecamatan Cibeber yaitu :

1. Penertiban PKL
2. Monitoring Cafe/resto/Karaoke
3. Penerbitan Spanduk

Dari data diatas maka capaian Persentase gangguan trantibum yang ditangani adalah sebesar $(3/3) \times 100\% = 100\%$, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(100/100) \times 100\% = 100\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan “**Sangat tinggi**”.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indikator Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara dengan target 50%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan belanegara	Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test ≥ 70 dari nilai maksimal 100 (satunya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang krakater / Jumlah peseta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara $\times 100\%$	-

Data Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman ideologi dan Wawasan kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Tahun 2022 :

Perolehan data ini diambil pada kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian

Persentase gangguan transtibum yang ditangani adalah sebesar $(30 \text{ orang} / 30 \text{ orang}) \times 100\% = 100\%$, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(100/100) \times 100\% = 100\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan “**Sangat tinggi**”.

Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja progam, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Pada unsur kewilayahan pada kecamatan cibeer beserta kelurahan terdapat 5 Program dengan 6 Indikator yang dibandingkan kepada 53 Kegiatan dengan 166 Sub Kegiatan dan 348 indikator sub kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan.

Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program, Indikator Output Sub Kegiatan dan keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,26%	95,72%	89,30%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	125,00%	75,00%	29,78%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	136,72%	93,23%	91,00%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00%	99,03%	96,33%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50,00%	47,08%

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program dengan capaian indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Sama halnya dengan indikator output yang kurang mendukung capaian program, belanja juga menunjukkan hal yang sama, nilai capaian keuangan menunjukan nilai yang tinggi, sedangkan capaian program cukup terpaut jauh dibawahnya.

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (136,72%) dengan capaian

indikator output (93,23%), namun pada capaian keuangan (91,00%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output (99,03%), namun pada capaian keuangan (96,33%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program dengan capaian indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Sama halnya dengan indikator output yang kurang mendukung capaian program, belanja juga menunjukkan hal yang sama, nilai capaian keuangan menunjukkan nilai yang tinggi, sedangkan capaian program cukup terpaut jauh dibawahnya.

Rekapitulasi Capaian pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 di Kecamatan Cibeber :

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA (Unit)	DRAINASE (m³)	GAPURA (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m²)	PJU (Titik)	POS RONDA (Unit)	POSYANDU (Unit)	REHAB MASJID (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RTLH (Unit)	TAMAN PUBLIK (Unit)	TPT (m³)
CIBEBER	1	512,25	7	5	5.686,11	40	3	7	3	5	2	2	694,44
BULAKAN		14,48			161,80	10				3			277,03
CIBEBER	1	15,52	3	1	767,13	10	1	7	1	1		1	
CIKERAI		174,43	2	1		5	2			1	2		154,45
KALITIMBANG		181,55		1	916,80	5							52,72
KARANGASEM		74,47		1	1.673,78	5							186,35
KEDALEMAN		51,80	2	1	2.166,60	5			2			1	23,88

4. KECAMATAN GROGOL

4.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Grogol)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN GROGOL		9.967.362.901	8.885.427.668	89,15			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokras							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.268.330.281	8.250.551.078	89,02	1. Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja 2. Evaluasi Internal belum dilakukan secara maksimal 3. Pencapaian sasaran/kinerja belum sesuai dengan target	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh kepada OPD dan unit kerja 2. Melakukan evaluasi internal hingga level unit kerja secara rutin 3. Melakukan evaluasi terkait sasaran/kinerja OPD dan unit sehingga sasaran bisa tercapai maksimal	-
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	68,14 Poin	66,18 Poin	97,12			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,61 Poin	52,62 Poin	89,78			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		145.252.000	124.086.800	85,43	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (kecamatan)	74,00%	84,76%	114,54			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		60.000.000	39.422.300	65,7	Kurangnya kontrol dan koordinasi terhadap kegiatan yang seharusnya dilaksanakan	Melakukan kontrol dan koordinasi yang lebih baik	-
	Lomba Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Penyusunan Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pembinaan Linmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pembinaan RT/RW	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		15.255.000	14.667.500	96,15	-	-	-
	Publikasi Pencapaian Hasil Kepuasan Pelayanan Kecamatan dari Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Peningkatan Kapabilitas SDM (Simpul PATEN)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		69.997.000	69.997.000	100	-	-	-
	Monitoring DPWKel	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
	Musyawarah Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		440.914.454	413.920.390	93,88	Belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi aktif	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						masyarakat dalam pembangunan	
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	97,6%	97,62			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		217.545.454	210.701.770	96,85	-	-	-
	Peningkatan Peranan PKK	12 Bulan	11 Bulan	91,67			
	Pelaksana MTQ Tingkat Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pengajian Rutin	12 Bulan	11 Bulan	91,67			
	Makanan Tambahan Untuk Penanganan Gizi Buruk Dan Angka Stunting Serta ODF	1 Paket	1 Paket	100			
	Kegiatan Sosialisasi GPATBM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Sosialisasi Proklamasi - Bank Sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		19.695.000	10.765.000	54,66	Tidak ada usulan kegiatan dari lembaga kemasyarakatan	Melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dalam hal pelaksanaan kegiatan	-
	Jumlah Dukungan Kegiatan Kepemudaan di Lingkungan Masyarakat	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peran/kontribusi Pemuda Terhadap Pembangunan Kewilayahan dan Potensi Kearifan Lokal	25 Orang	25 Orang	100			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		193.858.000	182.637.620	94,21	-	-	-
	Jumlah Bulan Honorarium Pendamping UMKM yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Titik Wifi untuk Pelaku UMKM	5 Titik	5 Titik	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Gerai UMKM Kecamatan yang berdiri	1 Unit	1 Unit	100			
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ekonomi kerakyatan dan UMKM Kecamatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		9.816.000	9.816.000	100	-	-	-
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		84.123.830	83.412.200	99,15	Belum maksimalnya penanganan trantibum yang dihadapi	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait penanganan gangguan trantibum agar lebih maksimal	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		84.123.830	83.412.200	99,15	-	-	-
	Bantuan Awal Kebencanaan	100 Banwal	100 Banwal	100			
	Kampung bersih Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Korwasdal Penanggulangan Bencana Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		28.742.336	13.457.200	46,82	Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan harus ditambah agar lebih maksimal	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara		
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,00%	60,00%	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		10.172.336	10.172.200	100	-	-	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		18.570.000	3.285.000	17,69	Tidak adanya rincian belanja untuk honorarium muspika yaitu, kapolsek dan danramil sehingga honorarium tidak dapat direalisasikan	Mengusulkan kepada pihak terkait untuk bisa memunculkan rincian belanja honorarium kapolsek dan danramil	
	FORKOIMCAM	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
KELURAHAN KOTASARI		2.810.103.483	2.782.264.756	99,01			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		572.257.314	554.906.476	96,97	1. Penerapan Reformasi Birokrasi secara Formal terbatas di tingkat instasi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja 2. Evaluasi Internal	1. melaksanakan reformasi birokrasi yang menyeluruh kepada OPD dan Unit Kerja 2. Melakukan evaluasi Internal	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					belum dilakukan seccara maksimal 3. pencapaian sasaran kinerja belum sesuai dengan target	Hingga Unit Kerja Secara Rutin. 3. Melakukan Evaluasi Terkait Sasaran Kinerja OPD dan Unit Sehingga sasaran Bissa tercapai Maksimal.	
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	68,14 Poin	66,18 Poin	97,12			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,61 Poin	52,62 Poin	89,78			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.356.366.560	1.346.999.780	99,31	Belum Maksimalnya Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Pembangunan	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	-
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	14,89%	99,27			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.999.100	24.999.100	100			-
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		834.999.700	834.999.400	100			-
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana wilayah yang dibangun	7 lokasi RW	7 lokasi RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		491.367.960	482.001.480	98,09			-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah pendampingan Kelurahan sehat	11 Bulan	11 Bulan	100			
	Jumlah pelaksanaan seleksi tilawati Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih	30 orang	30 orang	100			
	Jumlah Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Program Kerja Karang Taruna/Kepemudaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Program Kerja PKK yang terfasilitasi	11 Bulan	11 Bulan	100			
	Jumlah UMKM yang didampingi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah RISMA	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah yang memandikan jenazah	84 orang	84 orang	100			
	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan dan Pendampingan Kasus Kekerasan anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Honorarium Pengurus LPM	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan PHBN	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Internet	12 Bulan	12 Bulan	100			
Evaluasi Kelurahan		4.999.800	4.999.800	100			-
	Evaluasi Kegiatan DPWKel. Kotasari 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		881.479.609	880.358.500	99,87	Belum Maksimalnya Penanganan Trantibum yang di hadapi	Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait Penanganan Gangguan Trantibum agar lebih maksimal	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	4,00%	4,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		881.479.609	880.358.500	99,87			-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	Jumlah honorarium pptk	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Posko PPKM	7 Lokasi	7 Lokasi	100			
	Jumlah Honorarium Anggota Linmas	360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	100			
	Jumlah layanan simpul paten	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Koordinasi RT/RW	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah Kampung Bersih Narkoba	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan yang terlaksana	4 TW	4 TW	100			
	Jumlah Honorarium RT/RW	1347 Orang/bulan	1347 Orang/bulan	100			
KELURAHAN RAWA ARUM		2.780.126.816	2.653.596.409	95,45			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		518.499.160	462.651.349	89,23	1. Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas ditingkat instansi dan belum berjalan secara merata diseluruh unit kerja 2. Evaluasi Internal belum dilakukan secara maksimal 3. Pencapaian sasaran/kinerja belum sesuai dengan target	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh kepada OPD dan unit kerja 2. Melakukan evaluasi internal hingga level unit kerja secara rutin 3. Melakukan evaluasi terkait sasaran/kinerja OPD dan unit sehingga sasaran bisa tercapai maksimal	-
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	68,14 Poin	66,18 Poin	97,12			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,61 Poin	52,62 Poin	89,78			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.305.027.656	1.235.534.020	94,67	Belum Maksimalnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pembangunan	Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Partisipasi Aktif	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Masyarakat dalam Pembangunan	
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	91,1%	91,11			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.999.900	24.999.900	100	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan Musrenbangkel (n+1)	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah pelaksanaan Updating Data Kemiskinan (Bidang Kesos)	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		820.000.000	814.000.000	99,27	-	-	-
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana wilayah yang dibangun	7 Lokasi RW	7 Lokasi RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		460.027.756	396.534.120	86,2	-	-	-
	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (PHBI/PHBN/STQ)	3 kegiatan	2 kegiatan	66,67			
	Jumlah LPM	10 orang	10 orang	100			
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Gerakan PATBM yang terfasilitasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100			
	Jumlah pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang terfasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20 orang	0 orang	0			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		956.600.000	955.411.040	99,88	Belum Maksimalnya Penanganan Trantibum yang dihadapi	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait penanganan gangguan	-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						trantibum agar lebih maksimal	
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		956.600.000	955.411.040	99,88	-	-	-
	Jumlah Honor ketua RT dan Ketua RW	37 orang	37 orang	100			
	Jumlah Honor LINMAS	58 orang	58 orang	100			
	Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	100			
KELURAHAN GEREM		3.594.337.484	3.515.010.607	97,79			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		493.903.822	443.997.197	89,9	1. Penerapan Reformasi Birokrasi Secara Formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja 2. Evaluasi Internal belum dilakukan secara maksimal 3. Pencapaian Sasaran atau kinerja belum sesuai dengan target	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh kepada OPD dan Unit Kerja 2. Melakukan Evaluasi internal hingga level unit kerja secara rutin 3. Melakukan Evaluasi terkait sasaran atau kinerja OPD dan Unit sehingga sasaran tercapai maksimal	
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	68,14 Poin	66,18 Poin	97,12			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,61 Poin	52,62 Poin	89,78			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.827.088.502	1.804.320.410	98,75	Belum Maksimalnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pembangunan	Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan	
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	101,7%	101,67			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.960.000	24.960.000	100			
	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pelaksanaan Pra Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Musyawarah bidang Kesos	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.278.357.000	1.278.356.000	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pembangunan Sarpraswil (SALIRA)	11 RW	11 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		523.771.502	501.004.410	95,65			
	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan (STQ)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Internet Gratis (10 Titik)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang Terfasilitasi	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Pengurus PKK yang Terfasilitasi	300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Program Kerja Karang Taruna yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih (Pelatihan LAS)	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Kegiatan Risma	11 RW	11 RW	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Petugas Pemulasaraan Jenazah yang Terfasilitasi	66 Orang/RW	66 Orang/RW	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Kegiatan Sosialisasi (PHBS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Pendampingan Perekonimian Masyarakat Kelurahan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.273.345.160	1.266.693.000	99,48	Belum Maksimalnya Penanganan Trantibum Yang di Hadapi	Berkoordinasi dengan Stakeholder Terkait Penanganan Gangguan Trantibum agar Lebih Maksimal	
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.273.345.160	1.266.693.000	99,48			
	Jumlah Posko PPKM Tk.Kelurahan	11 RW	11 RW	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Layanan Simpul Paten	100 %	100 %	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Rakor Kebencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Terbentuknya Kampung Bersinar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Dokumen Profile Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring	12 Kali/Bulan	12 Kali/Bulan	100			
	Jumlah Honor Babinsa/Babhinkamtibmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Honor Linmas yang Terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Honor RT/RW dan Perangkatnya	12 Bulan	12 Bulan	100			
KELURAHAN GROGOL		1.886.421.387	1.740.423.946	92,26			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		450.032.251	392.089.998	87,12	1. Penerapan Reformasi Birokrasi Secara Formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja 2. Evaluasi Internal belum dilakukan secara maksimal 3. Pencapaian Sasaran atau kinerja belum sesuai dengan target	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh kepada OPD dan Unit Kerja 2. Melakukan Evaluasi internal hingga level unit kerja secara rutin 3. Melakukan Evaluasi terkait sasaran atau kinerja OPD dan Unit sehingga sasaran tercapai maksimal	
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	68,14 Poin	66,18 Poin	97,12			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,61 Poin	52,62 Poin	89,78			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		957.331.646	911.378.528	95,2	Belum maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	-
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.945.330	24.942.220	99,99			-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Musrenbangkel N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial Tentang Updating Data Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		505.000.000	493.760.688	97,77			-
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
	Jumlah Lokasi sarana dan Prasarana wilayah yang dibangun	4 Lokasi RW	4 Lokasi RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		422.825.316	388.122.620	91,79			-
	Jumlah Pelaksanaan STQ yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Risma yang terfasilitasi	4 RW	4 RW	100			
	Jumlah Petugas Pemulasaran Jenazah yang terfasilitasi	4 RW	4 RW	100			
	Jumlah Peran dan Fungsi PKK Kelurahan yang Terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Penyelenggaraan PHBI/PHBN yang terfasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang Terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pendamping UMKM yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pemantauan Jentik yang terfasilitasi	48 Orang	48 Orang	100			
	Jumlah Layanan Internet Gratis yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Kualitas Tenaga Kerja yang Terfasilitasi	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Kegiatan Posyantek yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Penghijauan Lingkungan yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Karang Taruna yang Terfasilitasi	2 Kali	2 Kali	100			
	Jumlah Kader Ketuk Pintu yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Fasilitas Gerakan Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Declarasi Open Defecation Free yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		4.561.000	4.553.000	99,82			-
	Jumlah Penyusunan Laporan DPWKel yang dilaporkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		479.057.490	436.955.420	91,21	Belum maksimalnya penanganan trantibum yang dihadapi	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait penanganan gangguan trantibum agar lebih maksimal	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		479.057.490	436.955.420	91,21			-
	Jumlah Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang Terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Dokumen Data kewilayahan (Profil Kelurahan)	8 Dokumen	8 Dokumen	100			
	Jumlah Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PPKM yang Terfasilitasi	4 RW	4 RW	100			
	Jumlah Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan yang Terfasilitasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus RT/RW yang Terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terfasilitasinya Deklarasi Kampung Bersih Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terfasilitasinya makan/minum lapangan kebencanaan atau rakor kebencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah dokumen hasil kepuasan masyarakat layanan publik berbasis teknologi/konvensional	1 Tahun	1 Tahun	100			
	Jumlah LINMAS yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pakaian PDL RT/RW yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100			

4.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Penjelasan Teknis mengenai ketercapaian Indikator adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Kecamatan Jombang beserta kelurahan terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Nilai LAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap LKIP Kecamatan Grogol. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Kecamatan Grogol Tahun 2022 capaian nilai LAKIP Kecamatan Grogol dengan 5 (lima) komponen yaitu Perencanaan Kinerja (23,02), Pengukuran Kinerja (17,19), Pelaporan Kinerja (10,61), Evaluasi Internal (6,27), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (9,09) dengan nilai keseluruhan 66,18 (kategori B).

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai LAKIP yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi internal 10% dan capaian kinerja 20%.	97,12 %

Capaian Realisasi pada indikator nilai LAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Tahun 2022 sebesar 66,18 poin dari target sebesar 68,14 poin sehingga persentase dari Kinerja Indikator adalah 97,12 % dengan kategori **Tinggi**. Capaian realisasi pencapaian Nilai LAKIP Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah SKPD; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Indeks RB Perangkat Daerah

Indeks RB Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh APIP terhadap pemenuhan 2 aspek PMPRB Kecamatan Grogol. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Grogol Tahun 2022 berdasarkan 2 (Dua) Aspek yaitu Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform. Pada aspek pemenuhan capaian komponene RB adalah Manajemen Perubahan (1,44), Deregulasi Kebijakan (0,50), Penataan dan Penguatan Organisasi (1,84), Penataan Tata Laksana (0,32), Penataan Sistem Manajemen SDM (0,98), Penguatan Akuntabilitas (1,26), Penguatan Pengawasan (0,03), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,31). Sedangkan pada aspek Reform capaiannya adalah Manajemen Perubahan (1,17), Deregulasi kebijakan (0,00), Penataan dan Penguatan Organisasi (0,00), Penataan Tata Laksana (2,08), Penataan Sistem Manajemen SDM (0,00), Penguatan Akuntabilitas (2,42), Pengawasan (0,00), serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75).

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks ReformasiBirokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai olehAPIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60% dan hasil 40%	89,76 %

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Grogol sebesar 52,61 poin dengan target yang telah ditetapkan yaitu 58,61 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 89,76 % dengan kategori **Tinggi**. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah SKPD; administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Evaluasi atas Survey Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KecamatanGrogol Kota Cilegon Tahun 2022 sebesar 84,76 poin dengan target yang telah ditetapkan yaitu74,00 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 114,54% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks kepuasanmasyarakat	Berdasarkan hasil penilaian (IKM yang dilakukan oleh surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	114,54 %

Capaian realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, serta Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15% secara lebih rinci perhitunga realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik dan non fisik di tahun ybs terhadap total anggaran dana lingkungan	114,54 %

Pengukuran capaian kinerja indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam pembangunan diperoleh dari data jumlah swadaya masyarakat di kelurahan. Setelah dilakukan pengolahan dan analisa data maka diperoleh :

Kelurahan	Anggaran Dana Lingkungan (SALIRA)	Anggaran Swadaya Masyarakat
SWADAYA FISIK :		
Kelurahan Gerem	1.100.000.000	48.271.887
Kelurahan Rawa Arum	700.000.000	28.497.680
Kelurahan Kotasari	700.000.000	34.002.627
Kelurahan Grogol	400.000.000	19.575.000
Jumlah	3.900.000.000	130.347.195
Persentase Swadaya Fisik	$(130.347.195 / 3.190.000.000) \times 100$	4.09 %

Kecamatan / Kelurahan	Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
SWADAYA NON FISIK :		
Kecamatan Gerogol	93,88	
Kelurahan Gerem	98,75	
Kelurahan Rawa Arum	94,67	
Kelurahan Kotasari	99,31	
Kelurahan Grogol	95,20	
Jumlah	481,81	9
Persentase Swadaya Non Fisik	$(481,81 / 5) \times 8 / 100$	8,67 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh hasil :

Swadaya Fisik + Swadaya Non Fisik = 4,09 % + 8,67 % = 12,76 %

Berdasarkan hasil pengolahan data fisik dan non fisik pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Grogol memperoleh realisasi sebesar 12,76% dari target 15%. Dapat dsimpulkan capaiannya 85,06% dapat dikategorikan Tinggi.

Capaian realisasi pencapaian Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan; Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani diperoleh dari data kejadian (kasus) pelanggaran perda yang terjadi di wilayah kelurahan- kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Grogol. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data diperoleh :

Kelurahan	Jumlah kasus terjadi tahun 2022	Jumlah kasus yang dapat ditangani	Capaian
Kelurahan Gerem		2	100%
Kelurahan Rawa Arum	-	-	-
Kelurahan Kotasari	-	-	-
Kelurahan Grogol	-	-	-
Jumlah	2	2	100%

Kelurahan	Jumlah Kasus Terjadi Tahun 2022	Jumlah Kasus yang Dapat Ditangani	Capaian
Kelurahan Gerem	2	2	100%
Kelurahan Rawa Arum	-	-	-
Kelurahan Kotasari	-	-	-
Kelurahan Grogol	-	-	-
Jumlah	2	2	100%

Berdasarkan rumus perhitungan yang tertera dalam IKU dan Definisi Operasional diperoleh hasil :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Gangguan} &= \frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Dapat Ditangani}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Terjadi}} \times 100 \% \\
 &= (2/2) \times 100\% \\
 &= \mathbf{100 \%}
 \end{aligned}$$

Dari data diatas maka capaian Persentase gangguan trantibum yang ditangani adalah sebesar $(2/2) \times 100\% = 100\%$, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(100/100) \times 100\% = 100\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**. Capaian realisasi pencapaian Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indikator Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara dengan target 60%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara	Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test ≥ 70 dari nilai maksimal 100 (satunya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang krakter / Jumlah peseta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara $\times 100\%$	114,54 %

Dari data diatas maka capaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara adalah sebesar 93,33%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(27/50) \times 100\% = 56\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Tinggi”**. Capaian realisasi pencapaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara didukung melalui

berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Capaian serapan anggaran belanja Kecamatan Grogol Kota Cilegon pada tahun 2022 sebesar 89,15% dari total anggaran Rp.21.038.352.071,00 terserap sebesar Rp.19.576.723.386,00.

Capaian realisasi pencapaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Capaian serapan anggaran belanja Kecamatan Grogol Kota Cilegon pada tahun 2022 sebesar 89,15% dari total anggaran Rp.21.038.352.071,00 terserap sebesar Rp.19.576.723.386,00.

Rekapitulasi Capaian pelaksanaan Dana Pembangunana Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 di Kecamatan Gerogol :

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA (Unit)	DRAINASE (m³)	GAPURA (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m²)	PJU (Titik)	POS RONDA (Unit)	POSYANDU (Unit)	REHAB MASJID (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RTLH (Unit)	TAMAN PUBLIK (Unit)	TPT (m³)
GROGOL	1	445,16	3	4	5.265,67	20	4	1	9	8	7	1	262,07
GEREM		113,42			3.533,42	5			2	5	3		178,84
GROGOL		86,64		2	168,65	5			3				55,71
KOTASARI	1	33,67	3		868,68	5	4	1	4		3		27,52
RAWA ARUM		211,42		2	694,93	5				3	1	1	

5. KECAMATAN PULOMERAK

5.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Pulomerak)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN PULOMERAK		10.305.591.067	9.338.445.119	90,62			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.785.560.973	8.837.414.771	90,31			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	63,28 Poin	68,62 Poin	108,44			
	Indeks RB Perangkat Daerah	26,19 Poin	56,96 Poin	217,49			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49.999.912	49.999.820	100	Sarana dan Prasarana Pelayanan serta petugas pelayanan mendukung kegiatan pelayanan umum di Kecamatan Pulomerak sehingga tahun 2022 mendapat Predikat Pelayanan Terbaik Sekota Cilegon https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f99YS65d0dfKgKOxKKYfFuC90LAcmeXP		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	79,0 Poin	98,75 Poin	125			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		49.999.912	49.999.820	100	Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan		

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas/Kapabilitas SDM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Terlaksananya Publikasi Hasil Kepuasan Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		336.693.972	329.790.040	97,95	(Presentase swadaya masyarakat melebihi target yang telah ditentukan. Namun ada beberapa permasalahan yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/165IA3L0gwbUVuhRQfSJXJAf9V7T0f1_Z	Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat ikut serta dalam peningkatan persentase swadaya masyarakat	
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	29,30%	195,33			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100,0%	100			
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		36.879.747	36.348.200	98,56	Kegiatan terhambat dikarenakan adanya penggantian PPTK, sehingga pelaksanaan dan pencairan anggaran tidak sesuai perencanaan	Kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya	
	Jumlah Pelaksanaan KORWASDAL Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		53.548.215	52.807.000	98,62	Kegiatan berjalan lancar, namun perlu adanya peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	perlu penambahan anggaran ditahun berikutnya guna peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						pembangunan di kelurahan	
	Jumlah Monev Dana Lingkungan (Daling RW) yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Musrenbangcam yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		167.274.250	163.516.135	97,75	Banyak kegiatan diluar anggaran yang ada. beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena pagu yang sangat minim.	perlunya evaluasi dan pengkajian ulang mengenai anggaran ditahun berikutnya agar tidak terjadi pengeluaran diluar anggaran dan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilaksanakan	
	Jumlah Kegiatan Jumsih	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Terlaksananya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Pengajian Rutin yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		29.999.760	28.629.500	95,43	Proses kegiatan berjalan lancar sesuai rencana		
	Jumlah Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Peningkatan Peranan PKK Kecamatan yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		38.992.000	38.489.205	98,71	Pelaksanaan kegiatan lancar sesuai perencanaan		
	Jumlah Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM Kecamatan yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		10.000.000	10.000.000	100	kegiatan berjalan lancar sesuai perencanaan		
	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		33.908.356	32.158.680	94,84	(Kurangnya masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah lainnya) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VmDyO62_kb3KK7PwoHbsWe9HufKRmGow	Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah lainnya	
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		33.908.356	32.158.680	94,84	Kegiatan terhambat dikarenakan adanya penggantian PPTK, sehingga pelaksanaan dan pencairan anggaran tidak sesuai perencanaan	Kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya	
	Jumlah Dukungan Kegiatan Kampung BERSINAR yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		99.427.854	89.081.808	89,59	(Masyarakat kurang terhadap pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19lUgq6-QQ4HgffWDGyMc0jz7dEajhsQI	Perlu adanya sosialisasi tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,00%	60,00%	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		70.297.654	60.277.368	85,75	ada beberapa belanja yang tidak sesuai, sehingga perlu perubahan belanja di APBDP	melakukan perubahan rincian belanja dalam APBDP	
	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		29.130.200	28.804.440	98,88	Kegiatan terhambat dikarenakan adanya penggantian PPTK, sehingga pelaksanaan dan pencairan anggaran tidak sesuai perencanaan	kegiatan dilaksanakan dibulan berikutnya	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
KELURAHAN LEBAK GEDE		3.412.102.875	3.334.459.359	97,72			
Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		631.235.865	607.013.880	96,16	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	63,28 Poin	68,62 Poin	108,44			
	Indeks RB Perangkat Daerah	26,19 Poin	56,96 Poin	217,49			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.472.788.260	1.421.457.479	96,51			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	29,30%	195,33			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	75,0%	75			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.466.000	24.234.500	99,05	Tidak Ada	Tidak Ada	
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel (n+2)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah musyawarah kelurahan bidang sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.054.880.000	1.051.465.000	99,68	Tidak Ada	Tidak Ada	
	Jumlah Dokumen Pra RAB	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Kegiatan Sarpraswil terbangun	9 Lokasi	9 Lokasi	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		388.442.260	340.757.979	87,72	Tidak Ada	Tidak Ada	
	Terlaksananya dukungan Kelurahan Sehat	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Layanan Internet Gratis	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi LPM	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Fasilitasi PATBM	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Dukungan Program Iklim	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qura'an (STQ)	1 Laporan	0 Laporan	0			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Jumlah penyusunan laporan pelaksanaan DPWKel yang dilaporkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.308.078.750	1.305.988.000	99,84			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.308.078.750	1.305.988.000	99,84	Tidak Ada	Tidak Ada	
	Peningkatan Rapat Kordinasi Rt/Rw	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Kegiatan Kampung bersinar	1 laporan	1 laporan	100			
	Kegiatan PPKM	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Profil Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Simpul Paten	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Monitoring Ketentraman dan Ketertiban umum	4 Laporan	4 Laporan	100			
KELURAHAN TAMAN SARI		2.771.179.015	2.725.643.719	98,36			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		544.721.911	510.130.799	93,65			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	63,28 Poin	68,62 Poin	108,44			
	Indeks RB Perangkat Daerah	26,19 Poin	56,96 Poin	217,49			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.230.857.104	1.223.113.420	99,37			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	29,30%	195,33			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97,7%	97,73			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		475.808.664	469.064.980	98,58	Terdapat kesalahan dalam memasukan Kode Rekening Sub Kegiatan,		
	Jumlah Layanan Internet	10 Titik	10 Titik	100			
	Jumlah kegiatan 10 program PKK	3 Program	3 Program	100			
	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang difasilitasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah LPM	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah terfasilitasinya kegiatan proklamasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah UMKM yang didampingi	50 UMKM	50 UMKM	100			
	Penyuluhan dan pendampingan anak terpadu dan edukasi perlindungan anak terpadu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan Yang Terfasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pelatihan LAS (Ekbang)	20 Orang	20 Orang	100			
	Jumlah Pelaksanaan Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah RISMA yang terbina	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Program Karang taruna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Penyuluhan GERMAS	11 Bulan	7 Bulan	63,64			
	Pendampingan Balita Kurang Gizi Dan Ibu Hamil	30 Orang	30 Orang	100			
	Pelatihan Pemandian Jenazah	6 RW	6 RW	100			
	Dukungan Program Kampung Iklim (Proklamasi)	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum		24.999.462	24.999.462	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel Kelurahan (Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahun 2024)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Musrenbangkel Kelurahan (Tahun 2023)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial Tentang Updating Data Kemiskinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		724.999.620	723.999.620	99,86			
	Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pembangunan Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun	6 RW	6 RW	100			
Evaluasi Kelurahan		5.049.358	5.049.358	100			
	Jumlah dokumen laporan DPWkel	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		995.600.000	992.399.500	99,68			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		995.600.000	992.399.500	99,68			
	Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8 Kali	8 Kali	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Tersedianya kegiatan PPKM Mikro	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Tersedianya Kegiatan Kampung Bersinar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah RT/RW dan Perangkatnya yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Tersedianya Banwal / Bencana Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Babinsa dan Babinkamtibmas yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Linmas yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Monev & Trantibum yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
KELURAHAN MEKAR SARI		2.844.158.755	2.812.409.459	98,88			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		565.904.529	548.011.339	96,84			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	63,28 Poin	68,62 Poin	108,44			
	Indeks RB Perangkat Daerah	26,19 Poin	56,96 Poin	217,49			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.288.254.226	1.274.398.120	98,92			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	29,30%	195,33			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	24.976.000	99,9	Kurangnya Peserta dari OPD lain dalam kegiatan Musrenbang	Tambahan Anggaran untuk Mamin Peserta dan Transportasinya	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rencana Pembangunan Tahun 2024)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial Tentang Updating Data Kemiskinan (DTKS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan (Tahun 2023)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		820.000.000	817.450.000	99,69			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	7 RW	7 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		438.254.226	426.972.120	97,43			
	Dukungan Kelurahan Sehat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Remaja Islam Masjid (RISMA)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Honorarium Pemandi Jenazah	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
	Jaringan Internet Fasilitas Pendampingan UMKM / WIFI	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja (EKBANG)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pelaksanaan STQ dan PHBI/PHBN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan (KARANG TARUNA)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Fasilitas Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Fasilitas Pendampingan Bidang Infrastruktur (EKBANG)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Dukungan Program Kampung Iklim (Proklam)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Jumlah Dokumen yang Disiapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		990.000.000	990.000.000	100			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		990.000.000	990.000.000	100			
	Jumlah Babinsa dan Babinkamtibmas yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Linmas yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Monev & Trantibum yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah RT/RW dan Perangkatnya yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Tersedianya Banwal / Bencana Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Tersedianya Kegiatan Kampung Bersinar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Tersedianya kegiatan PPKM Mikro	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Tersedianya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KELURAHAN SURALAYA		2.275.904.087	2.224.135.965	97,73			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		552.547.740	518.342.145	93,81			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	63,28 Poin	68,62 Poin	108,44			
	Indeks RB Perangkat Daerah	26,19 Poin	56,96 Poin	217,49			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.027.878.482	1.014.712.820	98,72			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	29,30%	195,33			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	81,0%	81,03			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		600.000.000	600.000.000	100			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	5 RW	5 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		427.878.482	414.712.820	96,92			
	Jumlah Kegiatan Peringatan Peringatan Hari Besar yang di Fasilitas (PHBI/PHBN/STQ)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang terfasilitasi (PATBM)	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan yang terfasilitasi (RISMA DAN KAMPUNG BERSIH NARKOBA)	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	10 Orang	7 Orang	70			
	Fasilitasi Peran dan fungsi Kerja PKK	3 Program	2 Program	66,67			
	Jumlah UMKM yang didampingi	25 Umkm	19 Umkm	76			
	Tersedianya Layanan Internet	10 Lokasi	8 Lokasi	80			
	Dukungan Proklamasi (Penghijauan/Kebersihan)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Dukungan Kelurahan Sehat	5 Kegiatan	2 Kegiatan	40			
	Belanja Jasa Petugas Pemandian Jenazah	6 orang	2 orang	33,33			
	Pelatihan Rias Pengantin	10 Orang	10 Orang	100			
Arah Kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		695.477.865	691.081.000	99,37			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		695.477.865	691.081.000	99,37	proses pencairan lancar	pencairan dan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang ada	
	Tersedianya Honorarium Linmas, Honorarium Babinsa dan Honorarium Bhabinkamtibmas	44 orang	44 orang	100			
	Kegiatan Banwal/Bencana Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Tersedianya Honorarium RT/RW	12 bulan	12 bulan	100			
	Penyusunan Profil Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Layanan Simpul Paten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100			

5.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Analisa pencapaian kinerja Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dibuat berdasarkan atas dokumen penetapan kinerja serta rencana kerja tahunan Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya . Dokumen ini dibuat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon yang dijabarkan dalam program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon selama tahun 2022. Selain tabel pencapaian kinerja tahun 2022, kami juga melampirkan tabel perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 pada OPD Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar adalah Rp. 21.608.935.799,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan terealisasi sebesar Rp. 20.386.489.512,00 (Dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) total pagu anggaran yang tersedia di Tahun anggaran 2022, sehingga capaian persentase realisasi anggaran sebesar atau 94,34% dari total pagu anggaran yang tersedia di tahun anggaran 2022.

Indeks Lakip Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator pencapaian nilai pada Nilai LAKIP Perangkat Daerah untuk tahun 2022 yaitu penilaian di tahun 2022 mendapat kategori B, atau pada point 63,28 dari target point sebesar 68,62 sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,43%, melebihi dari target yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Indeks RB Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator pencapaian nilai pada Indeks RB Perangkat Daerah untuk tahun 2022 yaitu 56,96 mendapat kategori CC , atau pada point 56,96 dari target point sebesar 26,19 sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 217,41%, melebihi dari target yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja indikator pencapaian nilai pada Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan) untuk tahun 2022 pada point 98,75 dari target point sebesar 79 sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125%, melebihi dari target yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Capaian kinerja indikator pencapaian nilai Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani, untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, sesuai target yang diperjanjikan pada tahun 2022. Tercapainya Keberhasilan

capaian indikator ini Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon juga berhasil memenuhi targetnya dengan keberhasilan ini didukung dengan penanganan kasus yang ditangani pada gangguan trantibum yang terjadi di wilayah OPD Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon tahun 2022. Data pada capaian indikator Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani, adalah :

$$\frac{Jumlah\ swadaya\ masyarakat\ dikeluarkan\ terkait\ fisik\ atau\ non\ fisik\ di\ tahun\ tersebut}{Jumlah\ kelurahan} \times 100\% = \frac{40}{40} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator pencapaian nilai Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan, untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 29,30% dari target sebesar 15,00% sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 195,33%, target tercapai yang sudah diperjanjikan pada tahun 2022.

$$\frac{Jumlah\ gangguan\ trantibum\ yang\ dapat\ ditangani/kasus}{Jumlah\ gangguan\ Trantibum\ yang\ terjadi/kasus} \times 100\% = \frac{233.677.000}{4} \times 100\% = 3.199.876.620$$

Rekapitulasi Capaian pelaksanaan Dana Pembangunana Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 di Kecamatan Pulomerak :

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA (Unit)	DRAINASE (m³)	GAPURA (Unit)	JAMBAN (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m²)	POSYANDU (Unit)	REHAB MASJID (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RUTILAHU (Unit)	SUMUR RESAPAN (Unit)	TPT (m³)
PULOMERAK	1	368,31	1	20	3	4.134,86	2	5	8	3	9	608,25
LEBAK GEDE	1	148,13	1		1	1.461,64	1	1	1			113,94
MEKARSARI		109,11		20		436,29	1	2	3			236,02
SURALAYA		74,65			2	228,71		2	2			189,39
TAMANSARI		36,42				2.008,22			2	3	9	68,90

6. KECAMATAN JOMBANG

6.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1f Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Jombang)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN JOMBANG		12.942.123.466	12.094.799.280	93,45			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.505.956.024	10.768.444.768	93,59			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64,32 Poin	69,93 Poin	108,72			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,46 Poin	79,87 Poin	134,33			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		178.831.327	168.812.200	94,4			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (kecamatan)	80,0 poin	90,0 poin	112,5			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		19.473.600	17.471.000	89,72			
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. (Monitoring Ketentraman dan Ketertiban)	1 Laporan	1 Laporan	100			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		31.386.825	28.302.100	90,17			
	Jumlah Laporan Lomba Kelurahan Se-Kecamatan Jombang	1 Laporan	1 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Jombang	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Jombang Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		62.259.800	60.865.000	97,76			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		34.405.150	31.386.100	91,23			
	Jumlah Laporan Musrenbangcam Kecamatan Jombang	1 Laporan	1 Laporan	100			
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		31.305.952	30.788.000	98,35			
	Jumlah Laporan Kegiatan Penataan Lingkungan Kecamatan Jombang	1 Laporan	1 Laporan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		910.913.250	847.073.912	92,99			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,0 persen	12,8 persen	85,33			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		474.640.000	467.101.600	98,41			
	Jumlah Laporan Kegiatan Dukungan PHBI/PHBN Kecamatan Jombang	6 Laporan	6 Laporan	100			
	Jumlah Laporan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Program Kelurahan Sehat	2 Laporan	2 Laporan	100			
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah Kecamatan Jombang	1 Orang	1 Orang	100			
	Jumlah Laporan Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Peserta Kegiatan Jumat Bersih Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100			
	Jumlah Laporan Kegiatan MTQ Tk Kota Cilegon Yang Diikuti Kecamatan Jombang	1 Laporan	1 Laporan	100			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		251.627.950	241.291.700	95,89			
	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Lembaga Kepemudaan Kecamatan Jombang	4 Laporan	4 Laporan	100			
	Jumlah Bulan Kegiatan Peningkatan Peran TP PKK Kecamatan Jombang	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Laporan Kegiatan Dukungan Usaha Pemuda Berbasis Industri 4.0 E-Commerce, Sosial Keagamaan, Kesehatan, Kesenian, Komunitas dan Hobby	4 Laporan	4 Laporan	100			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		172.595.550	128.919.412	74,69	Tagihan internet (WIFI) tidak dilakukan pembayaran untuk beberapa waktu (3bulan sesuai kesepakatan	Pendataan yang lebih spesifik dan berkoordinasi dengan pihak terkait .	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dengan pihak TELKOM) dikarenakan jaringan internet rusak/tidak dapat dipergunakan.		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100			
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		12.049.750	9.761.200	81,01			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		312.674.715	279.513.100	89,39			
	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100,0 persen	100,0 persen	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		256.246.615	224.885.200	87,76			
	Jumlah Pokja Kampung Bersih Narkoba (Bersinar) Tingkat Kecamatan Jombang	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100			
	Jumlah Peserta Banwal Dini/Rakortek Kebencanaan Kecamatan Jombang	100 Orang	100 Orang	100			
	Jumlah Peserta Korwasdal Penanggulangan Bencana Kecamatan Jombang	50 Orang	50 Orang	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Kegiatan Penindakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Jombang	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100			
	Jumlah RT RW yang mengikuti kegiatan	875 Orang Kegiatan	875 Orang Kegiatan	100			
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		56.428.100	54.627.900	96,81			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		33.748.150	30.955.300	91,72			
	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	60,0 persen	64,0 persen	106,67			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		15.418.150	15.405.300	99,92			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	50 Orang	50 Orang	100			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		18.330.000	15.550.000	84,83			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	100			
KELURAHAN JOMBANG WETAN		4.666.508.615	4.507.300.049	96,59			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		719.749.110	700.320.861	97,3			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64,32 Poin	69,93 Poin	108,72			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,46 Poin	79,87 Poin	134,33			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.255.066.617	2.124.838.700	94,23			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		49.999.940	48.829.940	97,66			
	Pelaksanaan Musrenbangkel N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.616.970.000	1.565.680.000	96,83			
	Jumlah Sarana Prasarana Wilayah yang dibangun	47 lokasi	47 lokasi	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		584.098.877	506.330.960	86,69			
	Jumlah Honorarium LPM	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Orang Tefasilitasinya Honorarium Pemulasaran/Pemandi Jenazah	14 RW	14 RW	100			
	Jumlah terfasilitasi kegiatan dukungan RISMA	14 RISMA	14 RISMA	100			
	Jumlah Layanan Internet	10 Titik	10 Titik	100			
	Tersedianya Dukungan Program Kampung Iklim	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Peningkatan sosialisasi gerakan masyarakat sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah UMKM yang didampingi	6 UMKM	6 UMKM	100			
	Jumlah terfasilitasinya Program Kerja PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan PATBM yang terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang difasilitasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		3.997.800	3.997.800	100			
	Jumlah Kegiatan DPWKel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.691.692.888	1.682.140.488	99,44			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.691.692.888	1.682.140.488	99,44			
	Jumlah Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan yang dilaksanakan	5 Lokasi	5 Lokasi	100			
	Jumlah Layanan Menggunakan Aplikasi Simpul Paten & Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Honor RT dan RW	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Anggota Linmas	75 Orang	75 Orang	100			
	Jumlah Kampung Bersih Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
KELURAHAN MASIGIT		3.536.847.378	3.396.067.419	96,02			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		669.628.299	625.120.566	93,35			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64,32 Poin	69,93 Poin	108,72			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,46 Poin	79,87 Poin	134,33			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.700.232.839	1.606.378.453	94,48			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	98,6%	98,61			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		31.538.600	30.498.600	96,7			
	Jumlah Peserta Pra Musrenbangkel	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Peserta Updating Data Kemiskinan	30 Orang	30 Orang	100			
	Jumlah Pejumlah Peserta Musrenbangkel	38 Orang	38 Orang	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.166.766.190	1.141.099.480	97,8			
	Jumlah Lokasi Sarpras yang dibangun	10 RW	10 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		501.928.049	434.780.373	86,62			
	Jumlah Pelaksanaan PHBI/PHBN	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100			
	Pemusalaran Jenazah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Risma	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pelaksanaan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kualitas tenaga kerja	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Pelaksanaan TTG	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200			
	Jumlah Pelaksanaan PATBM	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0			
	Jumlah Pelaksanaan Kepemudaan	8 Bulan	7 Bulan	87,5			
	Jumlah Honor LPM	12 Bulan	9 Bulan	75			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK	12 Bulan	9 Bulan	75			
	Jumlah Fasilitas Pendampingan Perekonomian Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Dukungan Program Kampung Iklim	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Kelurahan Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.166.986.240	1.164.568.400	99,79			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.166.986.240	1.164.568.400	99,79			
	Jumlah Monitoring Trantibum	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Linmas yang tersedia	78 Orang	78 Orang	100			
	Jumlah RT/RW yang tersedia	48 Orang	48 Orang	100			
	honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kampung Bersih Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Banwal Rakor Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan PPKM Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Penyusunan Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Simpul Paten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
KELURAHAN SUKMAJAYA		2.761.210.089	2.685.841.246	97,27			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		556.723.899	527.727.956	94,79			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64,32 Poin	69,93 Poin	108,72			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,46 Poin	79,87 Poin	134,33			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.314.130.190	1.269.817.290	96,63			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	4,22%	28,13			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	96,5%	96,53			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	24.999.900	100	-	-	
	Jumlah musyawarah kelurahan bidang sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbangkel (n+2)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		831.000.000	831.000.000	100	-	-	
	Jumlah Sarana Prasarana Wilayah Yang dibangun	11 Titilk/Lokasi	11 Titilk/Lokasi	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB Yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		453.130.190	408.821.390	90,22	-	-	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemandian Jenazah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus LPM (10 Orang)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah UMKM Yang Di Dampingi (50 UMKM)	12 Bulan/Orang	12 Bulan/Orang	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PHBI Dan PHBN	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Internet	9 Bulan	3 Bulan	33,33			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	10 Orang	0 Orang	0			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan RISMA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kegiatan Perekonomian TTG)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	4.996.000	99,92			
	Jumlah Laporan DPWKel	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		890.356.000	888.296.000	99,77			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	85,7%	85,71			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		890.356.000	888.296.000	99,77	-	-	
	Pelayanan Aplikasi Simpul Paten	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Banwal Dini (Rakor) Bencana Lingkungan	1 Keg	1 Keg	100			
	Kampung Bersih Narkoba	1 Keg	1 Keg	100			
	Monitoring PPKM-Covid19	1 Keg	0 Keg	0			
	Honorarium RT/RW	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Honorarium Petugas Linmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
KELURAHAN PANGGUNG RAWI		3.175.810.014	3.080.521.699	97			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		661.861.736	612.296.104	92,51			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64,32 Poin	69,93 Poin	0			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,46 Poin	79,87 Poin	0			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.420.830.278	1.385.039.595	97,48			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		47.630.278	42.425.500	89,07			
	Jumlah Keg. Partisipasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Musrenbangkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Pramusrenbangkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Updating Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		935.000.000	933.493.600	99,84			
	Jumlah RW yang Melaksanakan SALIRA	19 lokasi	19 lokasi	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		433.200.000	404.125.895	93,29			
	RISMA	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan TTG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan PHBI/PHBN	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan PATBM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kepemudaan	8 Bulan	8 Bulan	100			
	Jumlah Honor LPM	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Dukungan Program Kampung Iklim	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pendampingan Ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Kelurahan Sehat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
	Pemulasan Jenazah	3 Bulan	3 Bulan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	4.994.600	99,89			
	Jumlah Laporan DPWkel	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.093.118.000	1.083.186.000	99,09			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.093.118.000	1.083.186.000	99,09			
	Honor RT/RW	134 orang	134 orang	100			
	Honor Linmas dan Bhabinsa dan bhabinkamtibmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kampung Bersih Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan PPKM Mikro	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Penyusunan Profil Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
KELURAHAN GEDONG DALEM		2.649.459.472	2.572.290.966	97,09			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		606.031.487	574.497.654	94,8			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64,32 Poin	69,93 Poin	0			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,46 Poin	79,87 Poin	0			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.246.227.882	1.202.274.012	96,47			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	97,6%	97,64			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.002.500	24.892.000	99,56			
	Jumlah Musyawarah Pelaksanaan Musrenbangkel	1 dok	1 dok	100			
	Jumlah Pelaksanaan Keg PraMusrenbang	1 dok	1 dok	100			
	Jumlah Pelaksanaan Padeting Kemiskinan	1 dok	1 dok	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		750.000.910	746.241.000	99,5			
	JUmlah Dokumnet Pra Rab Keg SALIRA	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Lokasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah (SALIRA)	9 Lokasi	9 Lokasi	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		466.365.257	426.688.012	91,49			
	Jumlah Tenaga kerja Yang di Latih	2 keg	2 keg	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Posyantek	1 Keg	1 Keg	100			
	Rapat Kordinasi Keg Pemandian Jenzah	2 Keg	2 Keg	100			
	Pelaksanaan Kegiatan STQ tingkat Kelurahan	1 Keg	1 Keg	100			
	Jumlah UMKM Yang Dampingi	120 UMKM	120 UMKM	100			
	Jumlah Keg PKK	12 Bulan	10 Bulan	83,33			
	Jumlah Pelaksanan Keg Proklam	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah kegiatan GERMAS & Senam Sehat	12 Keg	9 Keg	75			
	Jumlah Peningkatan kegiatan RISMA	12 Keg	9 Keg	75			
	Dukungan kelurahan Sehat Pemantau Jentik, Pendampingan TBC, Pasien	4 Keg	4 Keg	100			
	JUmlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	6 Bulan	6 Bulan	100			
	Jumlah Kegiatan Gerakan perlindungan Anak	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Pelayanan Internet Gratis Masyarakat	12 Bulan	9 Bulan	75			
	Jumlah Pengurus LPM	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah peningkatan Prayaan PHBI/PHBN	4 keg	2 keg	50			
Evaluasi Kelurahan		4.859.215	4.453.000	91,64			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	4 Dok	4 Dok	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		797.200.103	795.519.300	99,79			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		797.200.103	795.519.300	99,79			
	Jumlah Sisosialisasi Banwal (Rakor) Kampung Bencana Lingkungan	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Honorarium RT/RW	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Pelayanan Simpul Paten	12 Dok	12 Dok	100			
	Jumlah Kampung Tangguh Bersinar	1 Dok	1 Dok	100			
	Jumlah Moniroting dan Ketertiban Lingkungan	6 Lokasi	6 Lokasi	100			
	Jumlah Honorarium Linmas & baninsa babinmas	4 tw	4 tw	100			
	Jumlah Penangulangan POSKO PPKM Tingkat kelurahan	6 Lokasi	6 Lokasi	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Profil Kelurahan	1 dok	1 dok	100			

6.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Kecamatan Jombang mengampu kewilayahan, mendukung Misi ke-1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Misi ke-5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Masyarakat Berperadaban. Unsur kewilayahan pada Kecamatan Jombang berserta kelurahan memiliki 5 (lima) program dan 6 (enam) indikator program yang harus dicapai yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah dengan target 64,32 poin dan
 - b. Indeks RB Perangkat Daerah dengan target 59,46 poin
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 80%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - a. Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan dengan target 15%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Persentase Gangguan Trantibum ysng Ditangani dengan target 100%
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum.
 - b. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara dengan target 60%

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketercapaian indikator tersebut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Kecamatan Jombang beserta kelurahan terdapat 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Nilai LAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang dilakukan oleh APIP terhadap LKIP Kecamatan Jombang. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2022 Nomor 700/1567.5/Sekret capaian nilai LAKIP Kecamatan Jombang dengan beberapa komponen yaitu : Perencanaan Kinerja 23,91; Pengukuran Kinerja 16,56; Pelaporan Kinerja 10,34; Evaluasi Internal 6,27; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,85 sehingga nilai Lakip secara keseluruhan adalah 69,93 (KATEGORI B)

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai LAKIP yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporankinerja 15%, evaluasi internal 10% dan capaian kinerja 20%	108,72%

Indeks RB Perangkat Daerah

Indeks RB Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh APIP terhadap pemenuhan 2 aspek PMPRB Kecamatan Jombang.

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60% dan hasil 40%	134,33%

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kecamatan Jombang beserta kelurahan sebesar 79,87 poin dengan target yang telah ditetapkan yaitu 59,46 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 134,33% dengan kategori sangat tinggi. Capaian kinerja didapatkan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek pemenuhan (10,955) dan aspek reform (18,038). Capaian realisasi pencapaian Nilai LAKIP Perangkat Daerah didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah SKPD,

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Evaluasi atas Survey Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2022 sebesar 90 poin dengan target yang telah ditetapkan yaitu 80 poin sehingga persentasenya sebesar 112,50% dengan kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks kepuasan masyarakat	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	112,50%

Capaian realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Kecamatan, serta Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15% secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik dan non fisik di tahun ybs terhadap total anggaran dana lingkungan	85,33%

Pengukuran capaian kinerja indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam pembangunan diperoleh dari data jumlah swadaya masyarakat di kelurahan. Setelah dilakukan pengolahan dan analisa data maka diperoleh :

Kelurahan	Anggaran Dana Lingkungan (SALIRA)	Swadaya
SWADAYA FISIK :		
Jombang Wetan	1.400.000.000	687.273
Masigit	1.000.000.000	120.130.943
Sukmajaya	700.000.000	0
Panggung Rawi	800.000.000	20.550.167
Gedong Dalem	600.000.000	48.649.428
Jumlah	4.500.000.000	190.017.811
Persentase Swadaya Fisik	(190.017.811/4.500.000.000) x 100	4,22 %

Kelurahan	Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
SWADAYA NON FISIK :		
Kecamatan	92,99	
Jombang Wetan	94,23	
Jombang Wetan	94,23	
Masigit	94,48	
Sukmajaya	96,63	
Panggung Rawi	97,48	
Gedong Dalem	96,47	
Jumlah	572,28	9
Persentase Swadaya Fisik	(572,28/6) x 9 / 100	8,58 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh hasil :

Swadaya Fisik + Swadaya Non Fisik = 4,22 % + 8,58 % = 12,80 %

Dan berdasarkan hasil pengolahan data fisik dan non fisik pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Jombang memperoleh realisasi sebesar 12,80 persen dari target 15%. Dapat disimpulkan capaiannya **85,33%** dapat dikategorikan **tinggi**.

Capaian realisasi pencapaian Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan & Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani diperoleh dari data kejadian (kasus) pelanggaran perda yang terjadi di wilayah kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Jombang. Setelah dilakukan pengolahan dan analisa data diperoleh :

Kelurahan	Jumlah Kasus Tahun 2022	Jumlah Kasus yang Dapat Ditangani	Capaian
Jombang Wetan	4 kasus	4 kasus	100%
Masigit	3 kasus	3 kasus	100%
Sukmajaya	-	-	-
Panggung Rawi	-	-	-
Gedong Dalem	4 kasus	4 kasus	100%
Jumlah	11 kasus	11 kasus	100%

Berdasarkan rumus perhitungan yang tertera dalam IKU dan Definisi Operasional diperoleh hasil :

Presentase Gangguan Trantibum yang ditangani = $\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Terjadi}} \times 100\% = \left(\frac{11}{11}\right) \times 100\% = 100\%$

Dari data diatas maka capaian Persentase gangguan trantibum yang ditangani adalah sebesar (40/40) x 100% = 100%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : (100/100) x 100% = 100%, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan “Sangat tinggi”.

- Capaian realisasi pencapaian Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan indikator tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara dengan target 60%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara	Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test >=70 dari nilai maksimal 100 (satunya : orang)	106,67%

	Pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wawasan kebangsaan karakter / Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara x 100%	

Dari data diatas maka capaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara adalah sebesar 106,67%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(32/50) \times 100\% = 64\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan “Sangat Tinggi”. Adapun Capaian realisasi pencapaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara didukung melalui berbagai pendekatan dan intervensi melalui pelaksanaan dan pemenuhan output pada sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Capaian serapan anggaran belanja Kecamatan Jombang Kota Cilegon pada tahun 2022 sebesar 93,51% dari total anggaran Rp 29.731.959.034,00 terserap sebesar Rp 28.336.820.659,00.

Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja progam, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Pada unsur kewilayahan pada kecamatan jombang beserta kelurahan terdapat 5 Program dengan 6 Indikator yang dibandingkan kepada 55 Kegiatan dengan 138 Sub Kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan. Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program, Indikator Output Sub Kegiatan dan keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut:

Program	Rata-Rata Capaian Indikator Program	Rata-Rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Capaian Keuangan Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	121,52%	95,76%	93,81%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	112,50%	100,00%	94,40%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85,33%	96,43%	95,34%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	97,62%	99,01%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106,67%	100,00%	91,72%

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (121,52%) dengan capaian indikator output (95,67%), namun pada capaian keuangan (93,81%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdapat kesesuaian yang baik antara capaian indikator program (112,50%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100%), kedua komponen tersebut memiliki angka capaian yang sangat dekat nilainya, yang menunjukkan output sub kegiatan yang dirumuskan sangat mendukung ketercapaian indikator program. Pada capaian keuangan (94,40%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program dengan capaian indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Sama halnya dengan indikator output yang kurang mendukung capaian program, belanja juga menunjukkan hal yang sama, nilai capaian keuangan menunjukan nilai yang tinggi, sedangkan capaian program cukup terpaut jauh dibawahnya.

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat kesesuaian yang baik antara capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (97,62%), kedua komponen tersebut memiliki angka capaian yang sangat dekat nilainya, yang menunjukkan output sub kegiatan yang dirumuskan sangat mendukung ketercapaian indikator program. Pada capaian keuangan (98,68%) realisasinya sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik. Pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (106,67%) dengan capaian indikator output (100%), namun pada capaian keuangan (91,72%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Rekapitulasi Capaian pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 di Kecamatan Jombang :

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA (Unit)	DRAINASE (m ³)	GAPURA (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m ²)	PJU (Titik)	POS RONDA (Unit)	POSYANDU (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RTLH (Unit)	SUMUR RESAPAN (Unit)	TAMAN PUBLIK (Unit)	TPT (m ³)
JOMBANG	2	737,30	5	3	9.407,89	21	3	6	8	2	40	1	15,17
GEDONG DALEM				2	1.692,50	5		1	1			1	
JOMBANG WETAN		232,63			3.771,57	5		1	4	2	20		
MASIGIT	1	159,55	4	1	1.807,30	5	2		3		20		15,17
PANGGUNRAWI	1	149,65	1		1.239,85	5	1	2					
SUKMAJAYA		195,47			896,67	1		2					

7. KECAMATAN CITANGKIL

7.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1g Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Citangkil)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN CITANGKIL		15.648.730.262	14.638.538.145	93,54			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.884.992.166	13.886.825.698	93,29			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		47.900.646	47.899.146	100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,0 Poin	70,0 Poin	100			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		15.000.000	15.000.000	100			
	Jumlah Peserta/orang sosialisai SIMPUL PATEN (7 Kelurahan)	7 Org/Keg	7 Org/Keg	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		32.900.646	32.899.146	100			
	Jumlah PENATAAN ARSIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		0	0	0			
	Jumlah Pameran yang digelar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		486.678.617	474.657.043	97,53			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	15,00%	100			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		72.899.302	72.897.740	100			
	Jumlah Peserta Musrenbangcam	60 Orang	60 Orang	100			
	Jumlah Monitoring DPW Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		214.475.103	202.475.103	94,4			
	Jumlah Peserta MTQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Peserta PHBI/PHBN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Peserta STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		199.304.212	199.284.200	99,99			
	Jumlah Peserta PKK	12 Bulan	12 Bulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		131.633.833	131.631.258	100			
	Presentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		11.291.458	11.291.458	100			
	Jumlah Lembaga Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		103.877.375	103.874.800	100			
	Jumlah Penindakan Pelanggaran	12 Bulan	12 Bulan	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		16.465.000	16.465.000	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	Jumlah Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		97.525.000	97.525.000	100			
	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	60,00%	60,00%	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila		47.150.000	47.150.000	100			
	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		50.375.000	50.375.000	100			
	Jumlah Forum yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100			
KELURAHAN CITANGKIL		3.700.826.908	3.630.666.583	98,1			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		570.309.755	534.989.063	93,81			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.838.317.153	1.823.889.520	99,22			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.999.800	24.999.600	100	-	-	
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+2	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.274.999.603	1.274.998.700	100	-	-	
	Jumlah dokumen Pra RAB yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibangun	35 Lokasi	35 Lokasi	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		533.317.850	518.891.420	97,29	-	-	
	Jumlah Program PKK yang terfasilitasi	12 Program	12 Program	100			
	Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikasi	1 Orang	1 Orang	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang menerima honorarium	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Orang yang menerima Honorarium Pemulasaraan/Pemandi Jenazah	11 Orang/RW	11 Orang/RW	100			
	Jumlah titik Internet Gratis	120 Titik/Bulan	120 Titik/Bulan	100			
	Jumlah Cabang Lomba STQ Kelurahan yang terlaksana	4 Jenis	4 Jenis	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Dokumen data UMKM yang dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Fasilitasi Pendampingan Bidang Infrastruktur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Program Kerja Karang Taruna yang terfasilitasi	1 Program	1 Program	100			
	Dukungan Kelurahan Sehat	1 Bulan	1 Bulan	100			
	Dukungan Program Iklim	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100			
	Jumlah Risma yang difasilitasi oleh kelurahan	11 Risma	11 Risma	100			
	Jumlah Peserta Penyuluhan Tentang PATBM	1 Orang	1 Orang	100			
Evaluasi Kelurahan		4.999.900	4.999.800	100	-	-	
	Jumlah Dokumen DPWkel (Fisik dan Non Fisik) yang telah tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.292.200.000	1.271.788.000	98,42			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.292.200.000	1.271.788.000	98,42	-	-	
	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan covid-19	550 Orang	550 Orang	100			
	Jumlah RT yang menerima honorarium	492 Orang/Bulan	492 Orang/Bulan	100			
	Jumlah RW yang menerima honorarium	132 Orang/Bulan	132 Orang/Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Babinkamtibmas yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah peserta rakor kebencanaan	20 Orang	20 Orang	100			
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
	Jumlah Babinsa yang menerima honorarium	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah laporan hasil kegiatan simpul paten	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Linmas yang menerima honorarium	588 Orang/Bulan	588 Orang/Bulan	100			
KELURAHAN KEBONSARI		2.903.157.815	2.762.787.985	95,16			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		515.473.314	501.000.077	97,19			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.425.554.933	1.321.240.108	92,68			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	0,0%	0			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.848.854	31.019.140	120			
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Pelaksanaan Musyawarah Bidang Kesos	1 kegiatan	0 kegiatan	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pelaksanaan Pra musrenbang kelurahan (untuk menyurur rencana pembangunan tahun 2024)	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		945.000.000	941.650.000	99,65			
	Jumlah PraRAB yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0			
	Jumlah Sarana dan Prasara yang dibangun	11 Lokasi	0 Lokasi	0			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		444.727.671	338.592.560	76,13			
	Fasilitasi Peningkatan dan FunGSI PKK	8 bulan	0 bulan	0			
	Fasilitasi Keg. Risma	8 RW	0 RW	0			
	Posyantek Kelurahan	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Pelatihan Las	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Pelaksanaan STQ	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Layanan Internet Gratis	12 bulan	0 bulan	0			
	Jumlah Petugas Pemandi Jenazah yang diberi upah	24 orang	0 orang	0			
	Jumlah Pengurus Lembaga Pemberdayaan LPM	10 orang	0 orang	0			
	Honorarium Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	12 bulan	0 bulan	0			
	Fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaan (karang taruna)	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	Dukungan Kelurahan Sehat (Senam Sehat	11 bulan	0 bulan	0			
Evaluasi Kelurahan		9.978.408	9.978.408	100			
	Laporan Kegiatan DPWKel	2 dokumen	0 dokumen	0			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		962.129.568	940.547.800	97,76			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0,0%	0			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		962.129.568	940.547.800	97,76			
	jumlah rw yang diberikan honor	8 orang	0 orang	0			
	jumlah posko PPKM lingkup RW	8 rw	0 rw	0			
	Jumlah rt yang diberikan honor	28 orang	0 orang	0			
	pelaksanaan banwal/dini (rakor) bencana lingkungan	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	pelaksanaan kegiatan monev trantibun	1 kegiatan	0 kegiatan	0			
	jumlah bhabinkamtibmas yang diberikan honor	1 orang	0 orang	0			
	jumlah petugas linmas yang diberikan honor	56 orang	0 orang	0			
	jumlah babinsa yang diberikan honor	1 orang	0 orang	0			
KELURAHAN WARNASARI		3.034.149.473	2.984.455.209	98,36			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		618.210.752	588.439.388	95,18			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.313.739.480	1.297.379.580	98,75			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	25.000.000	100			
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan (Tahun 2023)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (untuk Menyusun rencana Pembangunan Tahun 2024)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Musyawarah Kelurahan bidang sosial tentang updating data Kemiskinan (DTKS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		835.000.000	831.399.960	99,57			
	JUMLAH PRA RAB YANG DISUSUN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	100			
	JUMLAH SARANA PRASARANA YANG DIBANGUN	28 LOKASI	28 LOKASI	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		448.739.480	435.979.620	97,16			
	FASILITASI PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYRAKAT	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100			
	POSYANTEK KELURAHAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100			
	LAYANAN INTERNET GRATIS	12 BULAN	12 BULAN	100			
	JUMLAH PENGURUS PEMANDIAN JENAZAH YANG DIBERIKAN UPAH	6 ORANG	6 ORANG	100			
	JUMLAH PENERIMA KUALITAS TENAGA KERJA	10 ORANG	10 ORANG	100			
	JUMLAH KEGIATAN STQ	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100			
	JUMLAH PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIBERIKAN HONOR	120 ORANG/BULAN	120 ORANG/BULAN	100			
	FASILITASI PENINGKATAN KEGIATAN KEPEMUDAAN	2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	FASILITASI PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PKK	12 BULAN	12 BULAN	100			
	FASILITASI PENDAMPINGAN PEREKONOMIAN KELURAHAN	12 BULAN	12 BULAN	100			
	FASILITASI KEGIATAN RISMA	7 RW	7 RW	100			
	DUKUNGAN PROGRAM IKLIM	1 KEGIATN	1 KEGIATN	100			
	DUKUNGAN KELURAHAN SEHAT	12 BULAN	12 BULAN	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	LAPORAN KEGIATAN DPW KEL DISUSUN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.102.199.241	1.098.636.241	99,68			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	141,7%	141,67			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.102.199.241	1.098.636.241	99,68			
	JUMLAH PETUGAS LINMAS YANG DIBERIKAN HONOR	59 ORANG	59 ORANG	100			
	JUMLAH BABINSA DAN BABINKABTIBMAS YANG DIBERIKAN HONOR	12 BULAN	12 BULAN	100			
	PELAKSANAAN BANWAL/DINI (RAKOR) BENCANA LINGKUNGAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100			
	JUMLAH KEGIATAN MONEV TRANTIBUM	6 KEGIATAN	6 KEGIATAN	100			
	JUMLAH POSKO PPKM LINGKUP RW	7 RW	7 RW	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	JUMLAH RT YANG DIBERIKAN HONOR	12 BULAN	43 BULAN	358,33			
	JUMLAH RW YANG DIBERIKAN HONOR	12 BULAN	16 BULAN	133,33			
KELURAHAN SAMANGRAYA		2.556.330.417	2.518.040.706	98,5			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		417.016.746	390.570.266	93,66			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.221.546.071	1.211.473.500	99,18			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.979.600	24.979.340	100	-	-	
	Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		690.670.000	688.219.120	99,65	-	-	
	Dukungan Layanan BOP POKMAS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	6 RW	6 RW	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		501.071.061	493.450.560	98,48	-	-	
	Jumlah Peningkatan Hari Besar Islam (PHBI)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Falitisasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Pendampingan Perekonomian Kelurahan (UMKM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kegiatan Risma	6 RW	6 RW	100			
	Posyantek Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Petugas Pemandi Jenazah	6 RW	6 RW	100			
	Fasilitasi Pendampingan Bidang Infrastruktur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih (LAS)	10 Orang	10 Orang	100			
	Dukungan Proklam Penghijauan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pemantauan Jentik Berkala	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pendamping Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Resiko Tinggi	12 Kali	12 Kali	100			
	Layanan Internet Gratis	10 Titik	10 Titik	100			
	Honor Fasilitasi Perekonomian Pendampingan (UMKM)	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diibayarkan Honoranya	10 Orang	10 Orang	100			
	Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Toga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		4.825.410	4.824.480	99,98			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		917.767.600	915.996.940	99,81			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		917.767.600	915.996.940	99,81	-	-	
	Jumlah Linmas	49 Orang	49 Orang	100			
	Honorarium Babinsa & Babinkamtibmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Kampung Bersinar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Layanan Simpul Paten	4 Layanan	4 Layanan	100			
	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Sosialisasi Pencegahan Covid - 19	1 Kali	1 Kali	100			
	Honorarium RT/RW	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Pelaksanaan Banwal/Dini (Rakor Bencana Lingkungan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
KELURAHAN LEBAK DENOK		2.357.878.207	2.297.551.916	97,44			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		428.625.115	393.945.974	91,91			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.195.193.092	1.185.117.942	99,16			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	66,6%	66,58			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		23.740.000	23.740.000	100			
	Musyawarah Kelurahan Bidang sosial tentang updating Data Kemiskinan (DTKS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+2	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+1	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		721.875.184	721.875.184	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB Yang di Susun	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Sarana dan Pra Saranan Yang Akan dibangun	16 Lokasi	8 Lokasi	50			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		444.441.884	434.366.734	97,73			
	Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	12 Bulan	3 Bulan	25			
	Dukungan Kelurahan Sehat	10 Bulan	2 Bulan	20			
	Dukungan Program Kampung Iklim	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	12 Bulan	3 Bulan	25			
	Fasilitasi Kegiatan Risma	6 RW	2 RW	33,33			
	Fasilitasi Pendampingan Bidang Infrastruktur	12 Bulan	3 Bulan	25			
	Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan (KARANG TARUNA)	12 Bulan	3 Bulan	25			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 Bulan	3 Bulan	25			
	Jumlah penerima program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	12 Bulan	3 Bulan	25			
	Jumlah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibayarkan honorarnya	120 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	25			
	Jumlah PETUGAS PEMANDI JENAZAH yang diberikan upah	36 Orang	9 Orang	25			
	Layanan Internet Gratis	12 Bulan	3 Bulan	25			
	Pelaksanaan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Posyantek Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.136.024	5.136.024	100			
	Laporan kegiatan DPWKel disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50			

Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		734.060.000	718.488.000	97,88			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	71,9%	71,88			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		734.060.000	718.488.000	97,88			
	Jumlah RW yang diberikan honor	6 RW	6 RW	100			
	Jumlah Babinkamtibmas yang diberikan honor	12 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	25			
	Jumlah Babinsa yang diberikan honor	12 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	25			
	Jumlah Petugas Linmas Yang diberikan honor	336 Orang/Bulan	84 Orang/Bulan	25			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Posko PPKM Lingkup RW	6 RW	6 RW	100			
	Jumlah RT yang diberikan honor	22 RT	22 RT	100			
	Pelaksanaan Banwal/dini (rakor) bencana lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan kegiatan Monev Trantibum	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
KELURAHAN TAMAN BARU		3.273.921.657	3.156.347.740	96,41			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		488.380.471	428.091.650	87,66			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.735.551.270	1.691.292.840	97,45			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	0,00%	0			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	91,7%	91,67			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	22.926.960	91,71	-	-	
	Pelaksanaan Musrenbangkel (n+1)	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)	1 dokumen	0 dokumen	0			
	Musyawarah Bidang Sosial Tentang Updating Kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.169.134.430	1.168.459.880	99,94	-	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Sarana Prasarana yang akan dibangun	23 Lokasi	23 Lokasi	100			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		537.417.840	498.020.000	92,67	-	-	
	Jumlah Risma yang difasilitasi oleh kelurahan	12 bulan	12 bulan	100			
	Dukungan Program Iklim	11 bulan	11 bulan	100			
	Dukungan Kelurahan Sehat	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Pelaksanaan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah titik Internet Gratis	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang diberikan Honor	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Penerima Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Petugas Pemandi Jenazah yang diberikan honor	2 Semester	2 Semester	100			
Evaluasi Kelurahan		3.999.000	1.886.000	47,16	-	-	
	Jumlah Dokumen Laporan DPWkel	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.049.989.916	1.036.963.250	98,76			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	0,00%	0			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		1.049.989.916	1.036.963.250	98,76	-	-	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	Jumlah Profil Kelurahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah Babinsa dan Babinkamtibmas yang diberikan Honor	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah Anggota Linmas yang diberi Honor	12 bulan	12 bulan	100			
	Pelaksanaan Kegiatan Kampung Bersinar	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Posko PPKM Tingkat RW	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Simpul Paten	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus RT/RW yang diberikan Honor	12 bulan	12 bulan	100			
KELURAHAN DRINGO		2.342.098.169	2.333.785.561	97,14			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		427.299.650	415.078.498	66,01			
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	66,3 Poin	66,3 Poin	100			
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43,0 Poin	43,0 Poin	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.190.704.450	1.175.285.463	98,7			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		750.918.869	743.421.600	99			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi	100%	100%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		750.918.869	743.421.600	99	-	-	
	Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0			
	Pelaksanaan Banwal / Dini (Rakor) Bencana Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0			
	Jumlah RT/RW yang diberikan Honor	12 Bulan	1 Bulan	0			
	Jumlah LINMAS yang diberikan Honor	12 Bulan	1 Bulan	0			
	Jumlah Bhabinsa/ Bhabinkamtibmas yang diberikan Honor	12 Bulan	1 Bulan	0			
	Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12 Bulan	1 Bulan	0			
	Pelaksanaan Kegiatan Posko Covid-19	6 Dokumen	1 Dokumen	0			
	Deklarasi Kampung Bersih Narkoba (BERSINAR)	1 Dokumen	1 Dokumen	0			
	Layanan Simpul Paten	12 Bulan	1 Bulan	0			
	Pelaksanaan Kegiatan Monev Trantibum	12 Bulan	1 Bulan	0			

7.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Unsur kewilayahan pada kecamatan citangkil beserat kelurahan memiliki 6 (enam) indikator program yang harus dicapai yaitu 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator :

1. Nilai LAKIP perangkat daerah dengan target 63,01 poin dan
2. Indeks RB perangkat daerah dengan target 43,00 poin; 2)
3. Indeks kepuasan masyarakat dengan target 75,00 poin;
4. Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15,00%;
5. Persentase gangguan trantibum yang ditangani dengan target 100%, serta Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator
6. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Bela Negara dengan target 60%.

Sedangkan capaian kinerja anggaran pada kecamatan citangkil beserta kelurahan dengan target anggaran sebesar Rp. 36.138.814.708,- dan realisasi sebesar Rp. 34.789.667.522,- dengan capaian kinerjanya sebesar 96,27%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Kecamatan cilegon beserta kelurahan terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah
Capaian pada indikator nilai LAKIP perangkat daerah kecamatan citangkil beserta kelurahan sebesar 63,01 poin dari target sebesar 63,43 poin, sehingga persentase dari kinerja indikator ini sebesar 100,00% dengan kategori sangat tinggi.
- b. Indeks RB Perangkat Daerah
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kecamatan citangkil beserta kelurahan sebesar 43,00 poin dari target yang telah ditetapkan yaitu 47,91 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi. Capaian kinerja didapatkan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform.

Selanjutnya capaian kinerja indikator pada program teknis, penjelasan teknisnya sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Evaluasi atas Survey Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan citangkil Kota Cilegon Tahun 2022 dengan target sebesar 75,00 poin, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks kepuasan masyarakat	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	110,53%

Dari data diatas maka capaian Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan citangkil Kota Cilegon Tahun 2022 menunjukkan hasil realisasi sebesar 75,00 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00 poin, maka persentase capaiannya sebesar 100%. sehingga capaiannya bisa dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15,00%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA

Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	Rumus = $X/Y \times 100\%$ Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) terhadap total anggaran dana lingk. $\frac{(Rp)}{\text{Kelurahan}} \times 100\%$	100%

Dari data diatas maka capaian Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 15,00%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(15,00/15,00) \times 100\%$ dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Persentase gangguan Trantibum yang ditangani; dengan target 100%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Rumus = $X/Y \times 100\%$ $\frac{x = \text{Jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani (kasus)}}{y = \text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi (kasus)}} \times 100\%$	100%

Dari data diatas maka capaian Persentase gangguan trantibum yang ditangani adalah sebesar 100% sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah 100% dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indikator Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara dengan target 50%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara	Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test ≥ 70 dari nilai maksimal 100 (satuan : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang karakter / Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara $\times 100\%$	100%

Dari data diatas maka capaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara adalah sebesar 100%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : 100% dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Pada unsur kewilayahan pada kecamatan citangkil beserta kelurahan terdapat 5 Program dengan 6 indikator yang dibandingkan kepada 60 Kegiatan dengan 174 Sub Kegiatan dan 397 indikator sub kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan. Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program, Indikator Output Sub Kegiatan dan keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

Program	Rata-Rata Capaian Indikator Program	Rata-Rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Capaian Keuangan Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	90,02%	94,02%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50,00%	94,40%	97,53%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	86,70%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	100,00%	100,00%

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output (90,02%), namun pada capaian keuangan (94,02%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output (100%), namun pada capaian keuangan (100,00%) realisasinya sama dengan sesuai dengan capaian, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program dengan capaian indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Sama halnya dengan indikator output yang

kurang mendukung capaian program, belanja juga menunjukkan hal yang sama, nilai capaian keuangan menunjukan nilai yang tinggi, sedangkan capaian program cukup terpaut jauh dibawahnya. Sedangkan pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat kesesuaian yang baik antara capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output sub kegiatan (100,00%), kedua komponen tersebut memiliki angka capaian yang sangat tinggi, yang menunjukkan output sub kegiatan yang dirumuskan sangat mendukung ketercapaian indikator program. Pada capaian keuangan (86,70%) memiliki nilai capaian yang baik daripada capaian indikator sub kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan anggaran yang lebih besar dari perkiraan awal untuk mencapai target output sub kegiatan, atau dimungkinkan juga ada belanja yang kurang mendukung kepada capaian output sub kegiatan.

Pada Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdapat kesesuaian yang baik pada capaian indikator program (100%) dengan capaian indikator output (100%), namun pada capaian keuangan (100,00%) realisasinya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik.

Rekapitulasi Capaian pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 di Kecamatan Citangkil :

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA (Unit)	DRAINASE (m ³)	GAPURA (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m ²)	PJU (Titik)	POS RONDA (Unit)	POSYANDU (Unit)	REHAB MASJID (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RTLH (Unit)	SUMUR RESAPAN (Unit)	TPT (m ³)
CITANGKIL	1	626,00	4	8	8.439,60	40	9	4	11	11	20	5	950,92
CITANGKIL	1	132,19	2	1	1.180,08	10	6	1	4	5	1		81,34
DERINGO		99,02	1		910,82	5	3		4	2			131,30
KEBONSARI		28,34		2	1.467,90	5				1	13	5	42,87
LEBAK DENOK		92,41			1.154,34	5		1					147,37
SAMANGRAYA		37,26		3	830,19	5					2		163,62
TAMANBARU		170,50			1.386,96	5		1	1	1	3		384,42
WARNASARI		66,28	1	2	1.509,31	5		1	2	2	1		

8. KECAMATAN PURWAKARTA

8.1 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.7.1h Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kecamatan (Kecamatan Purwakarta)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
KECAMATAN PURWAKARTA		14.948.404.616	13.920.443.014	93,12			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.739.512.831	12.746.185.390	92,77			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Poin	81,79 Poin	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Poin	62,06 Poin	139,43			
Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		221.944.800	210.861.800	95,01	Minimnya tingkat profesionalisme Pelayanan Publik	Profesionalisme Pelayanan Publik lebih dtingkatkan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	65,0 Poin	88,21 Poin	135,71			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		67.120.000	58.770.000	87,56			-
	Terfasilitasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100,0%	100			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		129.825.000	127.992.000	98,59			-

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100,0%	100			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		24.999.800	24.099.800	96,4			-
	Terpenuhinya kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		795.338.354	775.387.204	97,49			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		456.417.100	446.062.000	97,73			-
	Jumlah terfasilitasinya Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (GPATBM)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Terfasilitasinya kegiatan PHBI/PHBN	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan Jum'at Bersih	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terfasilitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terfasilitasinya kegiatan Pengajian rutin	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah terfasilitasinya kegiatan Pelaksanaan iklim bank sampah 3 R, Penghijauan	6 Bulan	6 Bulan	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan Pembinaan MTQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terlaksananya kegiatan penanganan gizi buruk, angka stunting serta DFO	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		129.910.000	129.534.400	99,71			-
	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		159.000.000	152.479.620	95,9			-
	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		40.011.254	38.211.184	95,5			-
	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100			
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		10.000.000	9.100.000	91			-
	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		70.001.431	70.001.420	100	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya K3	Adanya sosialisasi/penyuluhan yang lebih intens ke masyarakat	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		70.001.431	70.001.420	100			-
	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		121.607.200	118.007.200	97,04	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah lainnya (https://drive.google.com/drive/folders/1sbLiOAcc045Eh2nvkiIn5LNYihNO3uak?usp=share_link)	Adanya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intens ke masyarakat	-
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,00%	100,00%	166,67			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,0%	100			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		74.999.900	73.199.900	97,6			-
	Jumlah terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		46.607.300	44.807.300	96,14			-
	Terlaksananya pelaksanaan tugas FORKOPINCAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
KELURAHAN RAMANUJU		1.813.022.286	1.764.850.763	97,34			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		498.621.096	475.503.843	95,36			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Poin	81,79 Poin	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Poin	62,06 Poin	139,43			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		878.600.100	854.247.320	97,23			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	22.999.900	92			
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel (n+2)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		490.000.100	489.989.000	100			
	Jumlah Pembangunan Lingkungan yang terbangun	4 RW	4 RW	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		358.600.000	336.258.620	93,77			
	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Infrastruktur (RAB)	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Edukasi teknis tentang pengelolaan sampah (Proklam)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Honor Pengurus LPM yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kegiatan Risma yang Terfasilitasi (jumlah Risma)	4 RW /Risma	4 RW /Risma	100			
	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'ân	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Peringatan Hari Besar (PHBi & PHBN)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikasi	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah Petugas Pemulasaraan Jenazah yang terfasilitasi	6 Org/Rw	6 Org/Rw	100			
	Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi,	1 Program	1 Program	100			
	Jumlah program kerja PKK yang terfasilitasi	5 Prog/PKK	5 Prog/PKK	100			
	Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan, Monitoring, Evaluasi Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Anak	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah Terpasangnya Layanan Internet Gratis	10 Titik	10 Titik	100			
	Jumlah Pelatihan TTG (Posyantek)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	4.999.800	100			
	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan DPWkel	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		435.801.090	435.099.600	99,84			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		435.801.090	435.099.600	99,84			
	Jumlah Deklarasi Kampung Bersih Narkoba yg Terfasilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Data kewilayahan (Profil Kkelurahan)	5 Dokumen	5 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen hasil kepuasan masyarakat layanan publik berbasis teknologi/konvensional	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Honorarium RT/RW yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Hoorarium Anggota Linmas yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah laporan/data hasil pelaksanaan monitoring yg tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi	11 Dokumen	11 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Pokja Kampung Bersinar (yang terbentuk	1 Lokasi	1 Lokasi	100			
	Jumlah makan/minum lapangan kebencanaan atau rakor kebencanaan yg Terasilitasi	100 Box	100 Box	100			
KELURAHAN KEBONDALEM		3.856.605.077	3.454.997.609	89,59			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		624.511.828	509.624.700	81,6			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Poin	81,79 Poin	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Poin	62,06 Poin	139,43			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.789.680.261	1.636.754.994	91,46			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	23.749.900	95			
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen PraMusrenbangkel	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah Kegiatan Updating Kemiskinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.304.673.451	1.298.792.200	99,55			
	Jumlah Dokumen Pra RAB dan RAB yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Termin	3 Termin	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		460.006.810	314.212.894	68,31	Kegiatan internet 10 titik tidak diserap dikarenakan anggaran pada DPA tidak sesuai	Melakukan koordinasi dengan pihak telkom dan melakukan penganggaran sesuai dengan kebutuhan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					dengan dilapangan		
	Jumlah Pembinaan Marawis RISMA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Honorarium pemulasaran pemandian jenazah	11 RW	11 RW	100			
	Jumlah Kegiatan Pelatihan Service AC	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan PATBM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Edukasi Pengelolaan Sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan PHBS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah PHBI PHBN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Anggota LPM	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Dukungan Kelurahan Sehat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan PKK Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Posyantek Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan STQ Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.442.412.988	1.308.617.915	90,72			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.442.412.988	1.308.617.915	90,72			
	Jumlah kegiatan pelaksaaan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah honorarium Anggota Linmas	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah Kegiatan Banwal Dini	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Bersinar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Simpul Paten	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100			
	Jumlah honorarium RT dan RW	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Jumlah Kegiatan PPKM Mikro	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
KELURAHAN KOTABUMI		3.205.161.095	3.127.140.146	97,57			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		503.261.470	462.827.526	91,97			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Poin	81,79 Poin	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Poin	62,06 Poin	139,43			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.610.299.707	1.574.159.520	97,76			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	25.000.000	100			
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Honorarium FAS KEL dan Narasumber kegiatan Musrenbangkel	1 dokumen	1 dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.055.000.000	1.027.412.000	97,39			
	Jumlah Dokumen Pra RAB yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
	Sarpraswil Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		525.299.707	516.747.520	98,37			
	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Pembinaan Grup Marawis RISMA Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pengajian Majelis Taklim (FKMT) Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Hiriyah (Isro Mi'raj)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Peran Dan Fungsi PKK Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Air Conditioner (AC)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pemulasaran Jenazah pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Bulan	2 Bulan	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pegajian Remaja Islam Masjid (RISMA) Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Narkoba dan Kesadaran Hukum Terhadap Remaja	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Olahraga (Karang Taruna)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan Industri Rumah Tangga Bagi UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengurus LPM Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Edukasi Tentang Pengelolaan Sampah Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Jum'at Bersih	6 Dokumen	6 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Balita Kurang Gizi	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Buka Puasa Ramadhan Bersama	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.091.599.918	1.090.153.100	99,87			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1.091.599.918	1.090.153.100	99,87			
	Terlaksananya Kegiatan Deklarasi Lingkungan Bersinar	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pembayaran Honorarium RT/RW Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Terlaksananya Kegiatan BANWAL/Dini Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Kelembagaan RT/RW	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Trantibum Lingkungan	10 Dokumen	10 Dokumen	100			
	Honorarium LINMAS Kelurahan Kotabumi	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
KELURAHAN PABEAN		2.245.100.721	2.221.053.754	98,93			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		739.071.021	725.147.482	98,12			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Poin	81,79 Poin	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Poin	62,06 Poin	139,43			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		973.984.618	968.890.472	99,48			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	24.999.800	100			
	Kegiatan Updating DTKS	1 keg	1 keg	100			
	Kegiatan Pra musrenbangkel (n+2)	1 keg	1 keg	100			
	Kegiatan Musrenbangkel (n+1)	1 keg	1 keg	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		489.999.904	489.997.900	100			
	Jumlah pembangunan yang terrealisasi	10 lokasi	10 lokasi	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		458.984.714	453.892.772	98,89			
	Jumlah Sosialisasi bank sampah yang terlaksana	1 dok	1 dok	100			
	jumlah kegiatan pemetaan potensi wisata	4 dok	4 dok	100			
	Jumlah kegiatan Identifikasi pemetaan potensi budaya	4 dok	4 dok	100			
	Jumlah kegiatan sosialisasi asman toga yang terlaksana	1 dok	1 dok	100			
	Jumlah Pembinaan UMKM yang terlaksana	1 dok	1 dok	100			
	Jumlah Penyuluhan kelompok tani yang terlaksana	1 dok	1 dok	100			
	Jumlah kegiatan risma yang terlaksana	2 keg	2 keg	100			
	Jumlah kegiatan karang taruna yang terlaksana	2 keg	2 keg	100			
	Jumlah wifi lingkungan yang terbayar	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah honor yang diberikan kepada petugas pemulasar jenazah	4 triwulan	4 triwulan	100			
	Jumlah sosialisasi dan pendampingan PATBM yang terlaksana	2 keg	2 keg	100			
	Jumlah pendampingan UMKM yang di lakukan	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah keg dukungan program iklim yang terlaksana	11 keg	11 keg	100			
	Jumlah Keg PHBI yang terlaksana	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah keg STQ yang terlaksana	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah deklarasi ODF yang terlaksana	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah keg. PKK yang terlaksana	12 keg	12 keg	100			
	Jumlah honor yang diberikan kepada pengurus LPM	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		532.045.082	527.015.800	99,05			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		532.045.082	527.015.800	99,05			
	Jumlah deklarasi kampung bersinar yang terlaksana	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah kegiatan monitoring lingkungan yang terlaksana	12 kegiatan	12 kegiatan	100			
	Jumlah pelayanan terpadu administrasi yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	100			
	Jumlah forum koordinasi RT/RW yang terlaksana	5 keg	5 keg	100			
	jumlah profil kelrahanan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah PPKM yang di laksanakan	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah rapat koordinasi penanggulangan awal bencana	1 keg	1 keg	100			
	Jumlah honor LINMAS yang terbayar	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
	Jumlah honor RT/RW yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah honor POLMAS dan BHABINSA yang terbayar	4 Triwulan	4 Triwulan	100			
KELURAHAN TEGAL BUNDER		2.454.080.707	2.417.860.226	98,52			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		637.854.227	609.954.126	95,63			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Point	81,79 Point	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Point	62,06 Point	139,43			
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.183.626.480	1.177.106.100	99,45			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		25.000.000	25.000.000	100			
	Jumlah Musyawarah Kelurahan Bidang Sosial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		725.000.000	725.000.000	100			
	Sarana dan Prasarana Wilayah yang dibangunKelurahan (Sarpraswil) dana Salira	6 Lingkungan	6 Lingkungan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		428.626.480	422.106.100	98,48			
	Jumlah Kegiatan RISMA yang Difasilitasi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Asmantoga (Dukungan Kelurahan Sehat)	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Kader Pendamping Pasien TB dan Kader Merujuk Pasien TB (Dukungan Kelurahan Sehat)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Ketuk Pintu dan Kader Pemantau Jentik (Dukungan Kelurahan Sehat)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Layanan Internet Gratis untuk Masyarakat yang Difasilitasi	120 Titik	120 Titik	100			
	Jumlah UMKM yang Didampingi	20 UMKM	20 UMKM	100			
	Jumlah Kegiatan Posyantek yang Difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Gerakan PATBM yang Difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan kunjungan Pendampingan Balita Kurang Gizi dan Bumil Resiko Tinggi (Dukungan Kelurahan Sehat)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang Difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Terfasilitasinya 10 Program PKK	5 program	5 program	100			
	Jumlah Terfasilitasinya Kegiatan Program Kampung Iklim	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Jumlah Pengurus LPM yang disediakan	120 Orang	120 Orang	100			
	Jumlah Kegiatan Pemandian Jenazah yang Difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar yang Difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		632.600.000	630.800.000	99,72			
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,0 Persen	100,0 Persen	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		632.600.000	630.800.000	99,72			
	Tersalurkannya Honorarium RT dan RW	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Profil kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Monitoring Trantib	12 lingkungan	12 lingkungan	100			
	Posko PPKM Covid-19	6 lingkungan	6 lingkungan	100			
	kampung bersih narkoba	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
	Simpul Paten	2 kegiatan	2 kegiatan	100			
	Sosialisasi bencana lingkungan	1 kegiatan	1 kegiatan	100			
KELURAHAN PURWAKARTA		2.444.816.642	2.408.418.937	98,51			
Arah kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		542.173.450	514.318.383	94,86			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	66,3 Poin	81,79 Poin	123,36			
	Indeks RB Perangkat Daerah	44,51 Poin	62,06 Poin	139,43			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana lokal							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.215.048.017	1.207.258.620	99,36			
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15,00%	5,25%	35			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,0%	100			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.999.800	24.999.640	100	-	-	
	Jumlah musyawarah kelurahan bidang sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pra Musrenbangkel (n+2)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Musrenbangkel (n+1)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		709.999.800	709.999.800	100	-	-	
	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		475.048.517	467.259.280	98,36	-	-	
	jumlah kegiatan penyuluhan gerakan masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah program kerja PKK	10 Program	10 Program	100			
	Pelaksanaan Pengajian Risma	12 Dokumen	12 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Kegiatan STQ	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Pelaksanaan Kegiatan PATBM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah terpasangnya layanan internet gratis	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	10 Orang	10 Orang	100			
	Jumlah RISMA yang terfasilitasi	6 RISMA	6 RISMA	100			
	Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi	6 Program	6 Program	100			
	Peringatan hari hari besar islam yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100			
	Pelaksanaan kegiatan kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100			
	Jumlah kegiatan posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
Evaluasi Kelurahan		4.999.900	4.999.900	100	-	-	
	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan data yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Arah kebijakan : Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		687.595.175	686.841.934	99,89	-	-	-
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100,00%	100,00%	100			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100,0%	100			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		687.595.175	686.841.934	99,89	-	-	-
	Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan dan Simpul Paten	12 Bulan	12 Bulan	100			
	Banwal/ Dini (Rakor) Bencana Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Kampung Bersinar Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
	Jumlah Honor RT/RW	12 bulan	12 bulan	100			

8.2 Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan dareah kabupaten/kota di Kecamatan purwakarta beserta kelurahan terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Capaian pada indikator nilai LAKIP perangkat dareah kecamatan purwakarta beserta kelurahan sebesar 81,79 poin dari target sebesar 66,30 poin, sedangkan persentase dari kinerja indikator ini sebesar 123,36% dengan kategori sangat tinggi. Adapun capaian nilai LAKIP tersebut dengan beberapa komponen sebagai berikut : a) Perencanaan kinerja sebesar 28,50 poin; b) Pengukuran kinerja sebesar 19,07 poin; c) Pelaporan kinerja sebesar 12,12 poin ; d) Evaluasi internal sebesar 7,65 poin ; dan e) Pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 14,10 poin.
2. Indeks RB Perangkat Daerah

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kecamatan purwakarta beserta kelurahan sebesar 62,059 poin dengan target yang telah ditetapkan yaitu 44,51 poin sehingga persentase kinerjanya sebesar 139,43% dengan kategori sangat tiggi. Capaian kinerja didapatkan dari 2 (dua) aspek yaitu aspek pemenuhan dan

aspek reform. Keberhasilan pencapaian kinerja pogram ini telah selaras/sesuai dengan dukungan kegiatannya yaitu : a) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%); b) Administrasi keuangan perangkat daerah (100%); c) Administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%); d) Administrasi umum perangkat daerah (100%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan purwakarta Tahun 2022 dengan target sebesar 65,00 poin, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Indeks kepuasan masyarakat	Berdasarkan hasil penilaian (IKM(yang dilakukan oleh surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	135,71%

Dari data diatas maka capaian Hasil pengukuran atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan purwakarta Tahun 2022 menunjukkan hasil realisasi sebesar 88,21 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 65 poin, maka persentase capaiannya sebesar 135,71%. sehingga capaiannya bisa dikategorikan “Sangat tinggi”.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan target 15,0%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	Rumus = $X/Y \times 100\%$ Jumlah swadaya masyarakat di kelureahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) terhadap total anggaran dana lingk. $\frac{(Rp)}{\text{Kelurahan}} \times 100\%$	35,00%

Dari data diatas maka capaian Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 5,25%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(5,25/15,00) \times 100\% = 35,00\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan “Sangat rendah”.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Persentase gangguan Trantibum yang ditangani; dengan target 100%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA

Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Rumus = $X/Y \times 100\%$ $\frac{x = \text{Jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani (kasus)}}{y = \text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi (kasus)}} \times 100\%$	100%

Dari data diatas maka capaian Persentase gangguan trantibum yang ditangani adalah sebesar 100%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(100/100) \times 100\% = 100\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indikator Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara dengan target 60%, secara lebih rinci perhitungan realisasi pencapaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

INDIKATOR TEKNIS	URAIAN DATA	KINERJA
Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara	Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test ≥ 70 dari nilai maksimal 100 (satunya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang krakater / Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara x 100%	166,67%

Dari data diatas maka capaian Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara adalah sebesar 100%, sehingga realisasi kinerja terhadap target kinerja adalah : $(100/60) \times 100\% = 166,67\%$, dan dapat disimpulkan capaiannya dapat dikategorikan **“Sangat tinggi”**.

Untuk analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja progam, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Pada unsur kewilayahan pada kecamatan purwakarta beserta kelurahan terdapat 5 Program dengan 6 Indikator yang dibandingkan kepada 52 Kegiatan dengan 145 Sub Kegiatan dan 384 indikator sub kegiatan. Selain itu dapat juga dibandingkan dengan capaian keuangan. Apabila dibandingkan rata-rata capaian pada Indikator Program, Indikator Output Sub Kegiatan dan keuangan program, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

Program	Rata-Rata Capaian Indikator Program	Rata-Rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Capaian Keuangan Program
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	135,71%	100,00%	95,01%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35%	100,00%	97,01%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	97,07%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	166,67%	97,04%

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdapat kesesuaian yang baik pada seluruh komponen analisa, baik itu antara capaian indikator program (135,71%) dengan capaian indikator output (100%), maupun antara kedua indikator tersebut terhadap capaian keuangan (95,01%). Hal yang dapat diperhatikan lebih lanjut adalah capaian program yang memiliki gap realisasi paling besar, namun gap ini menunjukkan hal yang baik, yaitu anggaran yang dialokasikan pada program ini memang digunakan untuk mendukung capaian indikator output sub kegiatan dan indikator program dengan tingkat efisiensi yang baik. ::

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdapat perbedaan nilai yang sangat tinggi antara capaian indikator program (35%) dengan capaian indikator sub kegiatan (100%), hal ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik, beberapa indikator output perlu ditelaah kembali apakah output tersebut mendukung target indikator program atau tidak, perlu dirumuskan kembali output-output yang sesuai guna pencapaian indikator program. Sama halnya dengan indikator output yang kurang mendukung capaian program, belanja juga menunjukkan hal yang sama, nilai capaian keuangan (97,01%) menunjukkan nilai yang tinggi, sedangkan capaian program cukup terpaut jauh dibawahnya.

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat kesesuaian yang baik antara indikator output sub kegiatan (166,67%) dengan indikator program (100%), dikarenakan rata-rata capaian kedua indikator tersebut sudah masuk kategori tinggi. Sama dengan ketika kita membandingkan capaian indikator program dengan capaian keuangan, maka kesesuaiannya cukup tinggi. Untuk perbandingan capaian output sub kegiatan dengan capaian keuangan dengan capaian keuangan sebesar 97,04% dapat menghasilkan capaian output sub kegiatan hal ini menunjukkan terdapat penguangan belanja yang sangat baik, sehingga dapat mendukung output dengan maksimal.

Rekapitulasi Capaian pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Tahun 2022 di Kecamatan purwakarta :

KECAMATAN / KELURAHAN	BALAI WARGA (Unit)	DRAINASE (m ³)	GAPURA (Unit)	PAGAR MAKAM (Unit)	PAVING BLOCK (m ²)	PJU (Titik)	POS RONDA (Unit)	POSYANDU (Unit)	REHAB MASJID (Unit)	REHAB MUSHOLA (Unit)	RTLH (Unit)	SUMUR RESAPAN (Unit)	TAMAN PUBLIK (Unit)	TPT (m ³)
PURWAKARTA	1	609,68	4	9	2.106,72	20	5	3	11	4	22	5	1	571,28
KEBON DALEM		73,96	3	3	739,54	5	5	1	3	2	12		1	
KOTA BUMI		254,73	1	1	136,53	5			7	2	1			
PABEAN				2				1			5			82,27
PURWAKARTA		146,23			576,72									346,82
RAMANUJU	1	4,76		1	77,89	10		1				5		
TEGALBUNDER		130,00		2	576,04				1		4			142,20

3.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

3.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.1.8.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		23.203.647.64₂	16.416.054.14₇	70,75			
Arah Kebijakan : Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.555.857.503	6.572.098.770	86,98	Beberapa unsur eviden dalam penilaian LAKIP dan RB belum dapat terpenuhi Salah satunya Capaian Kinerja yang belum mencapai target	Meningkatkan kinerja untuk mencapai target nilai LAKIP	-
	Indeks RB Perangkat Daerah	52,95 Point	73,69 Point	139,17			
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	72,5 Point	72,36 Point	99,81			
Arah kebijakan : Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya							
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		753.799.864	561.786.999	74,53	# Faktor Pendorong : Antusias masyarakat dalam penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan # Faktor Penghambat : Masih perlunya kegiatan yang berkesinambungan dalam hal penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Membuat kegiatan yang berkesinambungan dan memberi apresiasi kepada peserta yang memiliki nilai yang bagus	
	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	60,00%	60,00%	100			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan	100%	75,0%	75			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		420.866.385	285.787.978	67,9	Dikarenakan adanya perubahan uraian belanja yang berpengaruh pada Kode Rekening pada Output GNRM.	Konsistensi Perencanaan berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	Pembinaan Kader-kader dan Dukungan HUT Bela Negara Kota Cilegon (Permendagri 38/2011)	40 Orang	40 Orang	100			
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR BELA NEGARA (Permendagri 38/2011)	40 Orang	40 Orang	100			
	GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) (Inpres 12 Tahun 2016)	2 Laporan	0 Laporan	0			
	Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Pelajar dan Mahasiswa (Inpres Nomor 12/2016)	40 Orang	40 Orang	100			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		332.933.479	275.999.021	82,9			
	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan POKJA PPWK Kota Cilegon	8 Laporan	8 Laporan	100			
	Jumlah Masyarakat/Pelajar Kegiatan Pembinaan Karakter Bangsa	40 Orang	40 Orang	100			
	Jumlah Orang Dalam Kegiatan Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan	50 Orang	50 Orang	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih	0 Laporan	0 Laporan	0			
Arah Kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan Pemantuan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas partai politik, pemilu/pemilihan umum serta situasi politik							
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		9.035.211.776	5.883.151.516	65,11	Masih kurang kedisiplinan sebagian Parpol dalam ketepatan waktu pemberkasan	Meningkatkan koordinasi dengan Parpol	
	Tingkat Kepatuhan Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan	80,00%	100,00%	125			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	85,9%	85,94			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2.386.240.000	1.103.397.376	46,24	Standar Harga Per Suara pada saat penganggaran Rp. 10.000,-, tetapi pada saat realisasi masih menggunakan harga Rp. 4.624,- dikarenakan regulasinya belum ditetapkan dengan nilai yang baru	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait	
	Jumlah Presentase Penerimaan Hibah Bansos	100 Persen	100 Persen	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		247.885.601	221.050.640	89,17			
	Jumlah Kegiatan Desiminasi Tata Cara Penganggaran ,Pengelolaan , dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Kegiatan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	10 Laporan	10 Laporan	100			
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1.500.000.372	1.095.961.022	73,06	Kurangnya Koordinasi Tim antar stakeholder	Menginkatkan koordinasi Tim antar stakeholder	
	Sosialisasi Pemilu Serentak Untuk Pemilih Pemula	5 Laporan	5 Laporan	100			
	Iklan Layanan Publik	12 Laporan	1 Laporan	8,33			
	Pengelola Website	12 Laporan	11 Laporan	91,67			
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Hasil Pemilu Kota Cilegon	1 Laporan	1 Laporan	100			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Penguatan Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100			
	Forum komunikasi sosial politik Kota Cilegon	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Pendidikan Etika & Budaya Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan	2 Laporan	2 Laporan	100			
	Pendidikan Etika & Budaya Politik Bagi Pemuda	2 Laporan	2 Laporan	100			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4.901.085.803	3.462.742.478	70,65	Adanya surat edaran Bawaslu nomor 0485/Bawaslu Perihal Persetujuan Penerimaan Hibah Non Pilkada (harus berupa barang)	Meningkatkan Koordinasi pada saat proses verifikasi proposal pengajuan hibah	
	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan , Pelaporan , Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	2 Laporan	0 Laporan	0			
	Studi komparasi perkembangan politik di daerah	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Persentase Penerimaan Hibah KPU Dan Bawaslu	100 Persen	50 Persen	50			
	Jumlah kegiatan penunjang keamanan wilayah dan Pengamanan Pemilu di Kota Cilegon	100 Persen	75 Persen	75			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan Pemantuan kebijakan terkait dengan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		3.454.591.773	1.785.866.959	51,7	# Faktor Pendorong : Keaktifan Ormas dalam pemenuhan Legalitas (SKT) # Faktor Penghambat : Masih kurangnya	# Upaya Mengatasi Permasalahan : Memfasilitasi Ormas untuk melengkapi	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					kesadaran Ormas dalam pemenuhan Legalitas (SKT)	pemenuhan Legalitas (SKT)	
	Tingkat Kepatuhan Ormas terhadap Peraturan Perundang-undangan	70,00%	45,54%	65,06			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	66,7%	66,67			
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		438.300.320	334.807.680	76,39	Aplikasi Ormas, terkendala oleh adanya perbedaan versi aplikasi siormas tidak dapat terintegritasi dengan server pada kominfo kota cilegon	Melakukan koordinasi proses Integrasi Server Sistem dengan Dinas Kominfo Kota Cilegon	
	Jumlah Pembinaan/Pemberdayaan Ormas di Kota Cilegon	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi SIORMAS	1 Laporan	0 Laporan	0			
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		2.698.421.000	1.258.421.000	46,64	Adanya proses verifikasi ulang besaran Dana Bantuan Hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan hibah	Peningkatan koordinasi dengan Stakeholder terkait	
	Persentase Penerima Hibah	100 Persen	100 Persen	100			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		317.870.453	192.638.279	60,6	Pemberdayaan Potensi ormas belum bisa dilaksanakan karena kesbangpol masih dalam proses inventarisir dan identifikasi ormas di Kota Cilegon	Melakukan Inventarisir dan Identifikasi Pendataan Ormas di Kota Cilegon	
	Jumlah Pendayagunaan Potensi Ormas di Kota Cilegon	1 Laporan	0 Laporan	0			

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	1 Laporan	100			
Arah kebijakan : Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1.599.058.547	1.165.677.968	72,9	# Faktor Pendorong : Masih solidnya kordinasi dan komunikasi antar unsur intelijen dan Trantibum di Kota Cilegon # Faktor Penghambat : Masih membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti setiap isu yang terdata	# Upaya Mengatasi : Meningkatkan koordinasi dengan tim	
	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama	70,00%	70,00%	100			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100,0%	100			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		48.000.000	34.443.300	71,76	Belanja honorarium pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dikarenakan belum terbentuknya TIM Pakem	Mebuat Regulasi terkait pembentukan TIM Pakem dengan SK Walikota	
	jumlah koordinasi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1 kali	1 kali	100			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan		1.446.881.419	1.047.635.130	72,41	Adanya proses verifikasi ulang besaran Dana Bantuan Hibah yang diberikan kepada FKUB Kota Cilegon	Peningkatan koordinasi dengan Stakeholder terkait	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan	2 kali	2 kali	100			
	Jumlah Pelaksanaan HANI	1 Kali	1 Kali	100			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Koordinasi Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat	1 Kali	1 Kali	100			
	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Dini Narkoba	2 Kali	2 Kali	100			
	Pembentukan dan Penguatan Satgas Pencegahan Dini Narkoba	2 kali	2 kali	100			
	Persentase Penerima Hibah	100 Persen	100 Persen	100			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		104.177.128	83.599.538	80,25			
	Jumlah Koordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama (TOMALIGA) Kota Cilegon	2 Kali	2 Kali	100			
	Jumlah Forum Pemuda Lintas Agama (FORDALIGA) Kota Cilegon	2 Kali	2 Kali	100			
Arah kebijakan : Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial							
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN		805.128.179	447.471.935	55,58	# Faktor Pendorong : : Masih solidnya kordinasi dan komunikasi antar unsur intelijen dan Trantibum di Kota Cilegon #	# Upaya Mengatasi Faktor Penghambat : Meningkatkan	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					Faktor Penghambat : Masih membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti setiap isu yang terdata (Eviden: https://drive.google.com/drive/folders/1i1ri5bHDcdLIKoEhoJPl8MWfO14rYJlj?usp=share_link)	koordinasi dengan tim	
	Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	70,00%	70,00%	100			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	79,2%	79,17			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		461.175.354	202.875.110	43,99	Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota dan Kecamatan di Kota Cilegon	Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota dan Kecamatan di Kota Cilegon	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota	6 Laporan	3 Laporan	50			
	Pelatihan Dasar Intelijen	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Penguatan Kelembagaan FKDM	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan		343.952.825	244.596.825	71,11	Sourcecode Aplikasi Wilayah Rawan Konflik existing milik pengembang sehingga tidak dapat diupdate dan diupgrade apabila tidak menggunakan pengembang existing.	Melakukan Koordinasi dengan pihak pengembang untuk melakukan update dan upgrade sistem aplikasi	

Arah Kebijakan/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja (Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja Fisik (% Keuangan)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
	Bimtek Sistem Informasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kota Cilegon	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Jumlah Pemetaan dan Pemeliharaan Database Wil Rawan Konflik	1 Laporan	0 Laporan	0			
	Jumlah Monitoring Penanganan Konflik	10 Laporan	10 Laporan	100			

B. Analisis kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengampu urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, mendukung Misi ke 1 dan 5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD yaitu Mewujudkan kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Bidang urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik pada perangkat daerah Badan Kesbangpol memiliki 6 (indikator) program dan 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai yaitu :

- Program Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota;
 - Nilai LAKIP Perangkat Daerah dengan target (72,50 Point)
 - Indeks RB Perangkat Daerah dengan target (52,95 Point)
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan --- Indikator : Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara (60%)
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik --- Indikator : Tingkat Kepatuhan Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan (80%)
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan – Indikator : Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-undangan (70%)

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; -- Persentase tindak lanjut hasil money permasalahan terkait Isu Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama (70%)
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; -- Persentase tindak lanjut hasil money permasalahan terkait Isu Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (70%)

Berikut ini hasil capaian kinerja Program pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon sepanjang tahun 2022.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pada program ini memiliki dua indikator target kinerja yang dicapai selama satu tahun. Berikut ini capaian dua indikator target kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

a. Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Capaian pada indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah merupakan nilai yang didapat dari nilai LAKIP Tahun 2021 Badan Kesbangpol Kota Cilegon yang mencapai 72,36 point dengan capaian persentase sebesar 99,81% dari target 72,50 point yang masuk ke dalam kategori “Tinggi”. Capaian ini dinilai berdasarkan komponen sebagai berikut Perencanaan Kinerja dengan nilai 24,32, Pengukuran Kinerja dengan nilai 17,50, Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,22, Evaluasi Internal dengan nilai 7,37; dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi dengan nilai 11,95.

b. Indeks RB Perangkat Daerah

Capaian pada indikator Indeks RB Perangkat Daerah merupakan nilai yang didapat dari nilai Indeks RB Tahun 2021 Badan Kesbangpol Kota Cilegon yang mencapai 73,69 point dengan capaian persentase sebesar 139,17% dari target 52,95 point yang masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”. Capaian ini dinilai berdasarkan aspek sebagai berikut :

A. Aspek Pemenuhan

Manajemen Perubahan dengan nilai 1,624; Deregulasi Kebijakan dengan nilai 1,00; Penataan dan Penguatan Organisasi dengan nilai 2,00; Penataan Tata Laksana dengan nilai 0,195; Penataan Sistem dan Manajemen SDM dengan nilai 1,233; Penguatan Akuntabilitas dengan nilai 1,845; Penguatan Pengawasan 1,404; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1,344.

B. Aspek Reform

Manajemen Perubahan dengan nilai 2,50; Deregulasi Kebijakan dengan nilai 2,00; Penataan dan Penguatan Organisasi dengan nilai 0,75; Penataan Tatalaksana dengan nilai 1,585; Penataan Sistem Manajemen SDM dengan nilai 1,50; Penguatan Akuntabilitas dengan nilai 2,071; Penguatan Pengawasan dengan nilai 1,95; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 3,75.

Selain capaian kinerja yang telah dicapai, capaian kinerja anggaran pada program ini mencapai Rp6.572.098.770,- dengan capaian persentase sebesar 86,98% dari capaian target Rp7.555.857.503,-.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini memiliki satu indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2022, berikut capaian indikator kinerja pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian Data	Kinerja
Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	Pembilang : Jumlah peserta pemahaman ideologi dan wasbang kategori paham : 30 Penyebut : Jumlah peserta pemahaman ideologi dan wasbang : 50	60%

Dari data di atas maka capaian Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara mencapai $(30/50) \times 100\% = 60\%$ dengan persentase capaian sebesar 100% dari target 60% yang masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

Program ini memiliki satu indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2022, berikut capaian indikator kinerja pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian Data	Kinerja
Tingkat Kepatuhan Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan	Pembilang : Jumlah Parpol yang mematuhi peraturan perundang-undangan : 10 Penyebut : Jumlah Parpol penerima bankeu : 10	100%

Dari data di atas maka capaian Tingkat Kepatuhan Partai Politik terhadap Peraturan Perundang-undangan mencapai $(10/10) \times 100\% = 100\%$ dengan persentase capaian sebesar 125% dari target 80% yang masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Program ini memiliki satu indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2022, berikut capaian indikator kinerja pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian Data	Kinerja
Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Pembilang : Jumlah Ormas yang mematuhi peraturan perundang-undangan : 97 Penyebut : Jumlah Ormas di Kota Cilegon : 213	45,54%

Dari data di atas maka capaian Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-undangan mencapai $(97/213) \times 100\% = 45,54\%$ dengan persentase capaian sebesar 65,06% dari target 70% yang masuk ke dalam kategori “Sedang”.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

Program ini memiliki satu indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2022, berikut capaian indikator kinerja pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian Data	Kinerja
Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama	Pembilang : Jumlah data yang ditindaklanjuti : 3,5 Penyebut : Jumlah data yang tersedia : 5	70%

Dari data di atas maka capaian Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-undangan mencapai $(3,5/5) \times 100\% = 70\%$ dengan persentase capaian sebesar 100% dari target 70% yang masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;

Program ini memiliki satu indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2022, berikut capaian indikator kinerja pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sebagai berikut :

Indikator Teknis	Uraian Data	Kinerja
Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pembilang : Jumlah data yang ditindaklanjuti : 2,4 Penyebut : Jumlah data yang tersedia : 3	70%

Dari data di atas maka capaian Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan terkait Isu Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mencapai $(2,4/3) \times 100\% = 70\%$ dengan persentase capaian sebesar 100% dari target 70% yang masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Analisa kesesuaian kegiatan dengan target kinerja program dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator program dengan capaian indikator output sub kegiatan. Badan Kesbangpol Kota Cilegon memiliki 6 program dengan 7 indikator yang dibandingkan dengan kegiatan dan sub kegiatan serta dibandingkan dengan capaian anggaran yang telah direalisasi. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada indikator Program dan indikator output Sub Kegiatan, maka perbandingannya adalah sebagai berikut :

Program	Rata-rata Capaian Indikator Program	Rata-rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Capaian Realisasi Anggaran Per-Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116,42%	99,81%	86,98%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	87,50%	74,53%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	125%	85,80%	65,11%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45,54%	98,08%	65,06%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	96,46%	72,90%

Program	Rata-rata Capaian Indikator Program	Rata-rata Capaian Indikator Output Sub Kegiatan	Capaian Realisasi Anggaran Per-Program
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	67,86%	55,58%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota menjadi program yang memiliki capaian yang lebih baik dari program lainnya. Capaian rata-rata Indikator Program pada program ini melebihi target yang telah direncanakan dengan persentase 116,42%. Rata-rata capaian indikator output sub kegiatan pada program ini pun menjadi program yang paling baik disbanding program lainnya. Dalam capaian realisasi anggaran, hanya program ini yang mencapai capaian persentase di atas 75% yaitu mencapai 86,98%. Capaian rata-rata indikator program pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai persentase capaian sebesar 100%. Rata-rata capaian indikator output sub kegiatan pada program ini mencapai 87,50%. Namun, pada capaian realisasi anggaran, program ini tidak mencapai di atas persentase 75% yaitu mencapai 74,53%.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik menjadi program yang persentase rata-rata capaian indikator programnya tertinggi dibanding program lainnya, yaitu mencapai 125%. Pada rata-rata capaian indikator output Sub kegiatan, program ini mencapai 85,80%. Namun, pada capaian realisasi anggaran per-program, program ini hanya mencapai 65,11%, karena terkendala dengan realisasi hibah parpol yang dalam realisasi target Bantuan Keuangan Parpol (standar harga per-suara pada saat penganggaran Rp. 10.000,-, tetapi pada saat realisasi masih menggunakan harga Rp. 4.624,-) karena regulasi yang belum ditetapkan nilai baru. Selain itu, pada realisasi anggaran Hibah Bawaslu pun mengalami kendala karena Surat Edaran Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu perihal Persetujuan Penerimaan Hibah Non Pilkada (harus berupa barang) sehingga Hibah Bawaslu tidak dapat terealisasi.

Pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, program ini menjadi program yang paling kecil dalam persentase rata-rata capaian indikator programnya, yaitu mencapai 45,54%, hal itu dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban Ormas untuk menyampaikan Laporan Kegiatan minimal 6 bulan sekali serta masih kurangnya kesadaran Ormas dalam pemenuhan Legalitas SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Rata-rata capaian indikator output sub kegiatan mencapai 98,08%. Namun, dalam capaian realisasi anggaran program, program ini hanya mencapai angka 65,06%, hal itu dikarenakan adanya proses verifikasi ulang besaran dana hibah yang diberikan kepada Ormas. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjadi program yang rata-rata capaian indikator programnya mencapai 100%. Selain itu, rata-rata capaian indikator output sub kegiatannya pun termasuk baik karena mencapai 96,46%. Namun, dalam capaian realisasi anggaran programnya, program ini hanya mencapai 72,90%, hal itu dikarenakan adanya proses verifikasi ulang besaran dana hibah yang diberikan kepada Ormas.

Rata-rata capaian indikator Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mencapai 100%. Namun, dalam rata-rata capaian indikator output sub kegiatan mencapai 67,86%. Dalam Capaian Realisasi Anggaran program ini hanya mencapai 55,58%, hal itu dikarenakan terdapat output yang tidak dapat direalisasi karena terkendala regulasi.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Selama kurun waktu 2022 Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta yang bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota maupun Keputusan Wali Kota. Secara total diterbitkan **13 (tiga belas) Peraturan Daerah, 89 (delapan puluh sembilan) Peraturan Wali Kota, 308 (tiga ratus delapan) Keputusan Wali Kota** diantaranya sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembatasan produk rokok	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari bahaya paparan zat adiktif dalam produk rokok dan mengurangi jumlah perokok serta mencegah perokok pemula.
2.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Pembangunan Kepemudaan	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	Mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.	Peningkatan Penerimaan Asli Daerah dan pengendalian Tenaga Kerja Asing	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah dan mengoptimalkan penggunaan penerimaan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), penatausahaan, pembinaan dan pengendalian TKA di lapangan, penegakan hukum, biaya dampak negatif dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan; dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Peningkatan Penerimaan Asli Daerah dan Percepatan	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah dan meningkatkan indikator perizinan bangunan gedung pada penilaian <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB) dari Bank

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pelayanan Perizinan Berusaha		Dunia, sekaligus mendorong perbaikan ekosistem investasi dan transformasi ekonomi daerah yang merupakan bagian terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional.
6.	Penanggulangan Kemiskinan	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat	Menunjang pemenuhan kebutuhan dasar individu dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu dalam bentuk Bantuan Sosial berupa uang dan mendukung program Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam program perlindungan dan jaminan sosial.
7.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang mampu melakukan pengelolaan risiko serta akuntabel dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.
8.	Jaminan dan perlindungan sosial	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Berisiko Sosial di Wilayah Kota Cilegon	Melindungi keluarga atau ahli waris dari masyarakat berisiko sosial untuk meringankan beban dalam pengurusan Jenazah.
9.	Penggunaan Satu Data dalam Pembangunan Daerah	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Cilegon	Memberikan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Pembangunan Mal Pelayanan Publik	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2022 tentang	Mengintegrasikan dan memberikan kemudahan berbagai layanan yang disediakan Perangkat Daerah dan instansi dalam satu lokasi gedung yang sama; menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem; meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon	publik; mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan non Perizinan Berusaha dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.
11.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan efisien.
12.	Pemberian Bantuan Sosial melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon	Mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
13.	Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang dibiayai Pemerintah Kota Cilegon	Menjamin terselenggaranya Universal health coverage (UHC) di Kota Cilegon dan meningkatkan tata kelola pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja di Kota Cilegon sehingga memberikan jaminan kepastian hukum.
14.	Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 62 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif untuk Penanganan Fakir Miskin yang Bersumber dari Anggaran	Melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon	
15.	Penanganan Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Langsung Tunai Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	Menjadi pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Langsung Tunai; dan Bantalan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi atau terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak.
16.	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Cilegon	Memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan; dan mencukupi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan Negeri.
17.	Pelayanan Informasi Publik	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	Menjadi pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik, pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik yang di dalamnya meliputi kegiatan mengumpulkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan bahan serta produk Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas; dan menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
18.	Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 73 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan dalam proses Pembangunan Kelurahan; dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
19.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	Meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon, diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
20.	Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cilegon	Mewujudkan komitmen Pemerintah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah serta mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan berkualitas; dan Mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan lintas sektor atau Pemangku Kepentingan.
21.	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kota Cilegon	Meningkatkan upaya penyelamatan ibu hamil, persalinan, pasca persalinan dan bayi baru lahir menjadi prioritas pelayanan kesehatan di Kota Cilegon serta untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi baru lahir.
22.	Penghargaan kepada Veteran	Keputusan Wali Kota Nomor:973/Kep.21-BPKAD/2022 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Veteran Republik Indonesia di Kota Cilegon	Memberikan penghargaan kepada Veteran Republik Indonesia di Kota Cilegon dalam bentuk pemberian pengurangan atau pembebasan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
23.	Bantuan Pendidikan bagi Guru dan Tenaga Pendidikan	Keputusan Wali Kota Nomor:900/Kep.23-Dindik/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Daerah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Masa Kerja Lebih Dari Sepuluh Tahun Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	Memberikan apresiasi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Masa Kerja Lebih Dari Sepuluh Tahun Pada Sekolah Dasar Negeri
24.	Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Pendidikan	Keputusan Wali Kota Nomor:900/Kep.24-Dindik/2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Bagi Sekolah yang Berlokasi di Wilayah Perbatasan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	Memberikan apresiasi terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Bagi Sekolah yang Berlokasi di Wilayah Perbatasan Kota Cilegon
25.	Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial	Keputusan Wali Kota Nomor:900/Kep.67-Dinsos/2022 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Optimalisasi dan pengendalian pelaksanaan belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
26.	Pemberian Bantuan Sosial	Keputusan Wali Kota Nomor:900/Kep.70-Dinsos/2022 Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran	Optimalisasi dan pengendalian pelaksanaan belanja Bantuan sosial kepada masyarakat beresiko sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	
27.	Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Keputusan Wali Kota Nomor:900/Kep.134-BPKAD/2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2022-2025	Untuk penyusunan dan evaluasi implementasi elektronifikasi transaksi pendapatan dan belanja daerah diperlukan peta jalan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
28.	Transportasi publik yang terjangkau	Keputusan Wali Kota Nomor:551/Kep.208-Dishub/2022 tentang Tarif Angkutan Perkotaan di Wilayah Kota Cilegon	Untuk mengantisipasi dampak adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan komponen kendaraan bermotor lainnya serta untuk menjaga kelangsungan usaha angkutan umum di wilayah Kota Cilegon.
29.	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Keputusan Wali Kota Nomor:060/Kep.236-DP3AKB/2022 Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Cilegon	Upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
30.	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Keputusan Wali Kota Nomor:060/Kep.275-DP3AKB/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kota Cilegon	Untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, perlu dikembangkan Kota Layak Anak di Kota Cilegon secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
I	DATA UMUM DAERAH		
	A. Realisasi Pendapatan		
	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 733.874.839.674,- adapun realisasi sebesar Rp. 630.935.874.672,- atau mencapai 85,97%, sehingga tidak mencapai target sebesar (Rp. 102.938.965.002). Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk:		
	a. Memberikan relaksasi pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik berupa kenaikan maupun bunga bagi wajib pajak yang mengajukan.	Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2022 telah memberikan relaksasi Pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik berupa kenaikan maupun bunga bagi wajib pajak yang mengajukan. Penghapusan maupun pengurangan sanksi administrasi berupa kenaikan maupun bunga telah tercantum pada Peraturan Daerah masing – masing jenis Pajak Daerah. Tahun 2023 Pemerintah Kota Cilegon akan kembali memberikan relaksasi tersebut bagi wajib pajak yang mengajukan.	Peningkatan Pajak Daerah
	b. Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon.	Tahun 2022 Pemerintah Kota Cilegon memberikan stimulus berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2022. Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon tahun 2022 tertuang pada Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 973/Kep.214-BPKAD/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022. Tahun 2023 Pemerintah Kota Cilegon akan kembali memberikan stimulus dimaksud.	Peningkatan stimulus pembayar pajak bagi wajib pajak daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	c. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan lebih optimal.	Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi daerah terus Kami lakukan secara berkesinambungan baik melalui pendataan wajib pajak dan objek pajak baru maupun melalui pengendalian terhadap wajib pajak maupun dengan berbagai metode lainnya seperti sosialisasi, pemberian penghargaan, pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah maupun pemeriksaan dan penagihan. Di tahun 2023 Kami tetap akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.	Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah
	d. Memperbanyak pemasangan tapping box di hotel dan restoran.	Tahun 2022 terdapat beberapa wajib pajak yang semula dilakukan pemasangan pada mesin cash register beralih pemasangannya pada server dari wajib pajak tersebut, sehingga terdapat pengembalian tapping box dan kami alihkan alat perekam data transaksi tersebut pada wajib pajak lainnya. Pada tahun 2023, akan dilakukan pengajuan kepada Bank BJB cabang Cilegon untuk memperbanyak alat perekam data transaksi yang telah Pemkot miliki.	Peningkatan Pajak Daerah
	e. Meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Tahun 2022 telah dilakukan studi komparasi kepada beberapa daerah terkait penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang tentunya akan berimplikasi pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peningkatan BPHTB dilakukan dengan melalui verifikasi lapangan untuk mendapatkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang wajar. Tahun 2023, akan di lakukan kajian terkait penerapan Zona Nilai tanah di Kota Cilegon dan bekerjasama dengan BPN Kota Cilegon terkait penerapan ZNT tersebut.	Memutakhirkan NJOP agar mendekati harga yang sewajarnya dan meningkatkan pendapatan dari sektor BPHTB dan PBB-P2
	f. Optimalisasi Pajak Parkir, Reklame dan Hiburan.	Untuk mengoptimalkan pendapatan khususnya pajak parkir, reklame dan hiburan telah dilakukan pendataan wajib pajak serta pengendalian kepada wajib pajak daerah. Pada tahun 2022 terdapat penambahan wajib pajak,	Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		untuk parkir terdapat penambahan sebanyak 2 wajib pajak, hiburan 6 wajib pajak dan 79 Objek Pajak Reklame. Tahun 2023, kami bekerja sama dengan KEJARI Kota Cilegon, DPMPTSP Kota Cilegon, OPD penerbit rekomendasi teknis dan Satpol PP dalam penggalan potensi pajak daerah di Kota Cilegon.	Pajak parkir, Reklame dan Pajak Hiburan
	g. Membuat system pembayaran pajak berbasis IT.	Dalam hal sistem pembayaran pajak daerah, BPKPAD telah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah berbasis aplikasi SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan) Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BJB maupun e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, traveloka, Link Aja, kantor Pos, Indomaret dan Alfamart. Untuk Pajak Daerah selain PBB-P2 pembayaran baru dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile Banking dan ATM Bank BJB. Pada tahun 2023, untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak daerah akan diluncurkan aplikasi baru yang merupakan gabungan dari seluruh aplikasi pajak daerah yang telah tersedia.	Untuk memudahkan wajib pajak daerah dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak yang akan berimplikasi pada kenaikan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.
	h. Melibatkan Unsur Masyarakat untuk sosialisasi dan pemungutan Retribusi.	Dalam hal retribusi, BPKPAD merupakan OPD pengendali Pendapatan Asli Daerah sehingga untuk Sosialisasi dan pemungutan retribusi dilakukan langsung oleh OPD pengelola retribusi.	Peningkatan Retribusi Daerah
	i. Lebih kreatif dalam menggali potensi PAD dengan memperluas para wajib pajak.	Dalam penggalan potensi PAD dengan memperluas wajib pajak, dilakukan penggalan potensi melalui pendataan wajib pajak maupun objek pajak baru, memberitahukan kepada seluruh bendahara pengeluaran pada masing-masing OPD untuk melakukan pemotongan langsung terhadap jenis pajak catering serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Pada tahun 2023 pendataan wajib pajak baru akan dilakukan melalui informasi dari media sosial	Peningkatan Pajak Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	j. Merubah Struktur BPKAD menjadi 2 (dua) Badan yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Dalam hal merubah struktur OPD, Kota Cilegon belum ada perubahan sturktur BPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan tetapi terdapat perubahan nomenklatur dari semula BPKAD menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).	Dukungan Kelembagaan Pengelola Pendapatan Daerah
	B. Realisasi Belanja		
	Anggaran Belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2021 sebelum dilakukan audit oleh BPK RI adalah sebesar Rp 2.201.070.407.729,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.653.638.211.789,- atau persentase pencapaian sebesar 75,13%. Terdapat penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah di tahun sebelumnya yang mencapai 87,45%. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	3. Meningkatkan kinerja serapan belanja operasi khususnya terkait belanja hibah dan bantuan sosial, melalui peningkatan kualitas verifikasi dan validasi data penerima program serta peningkatan pemahaman terkait mekanisme dan alokasi hibah dan bantuan sosial bagi pengusul dan penerima program.	Untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan serapan belanja hibah bansos di tahun 2023, upaya yang dilakukan antara lain : a. menyusun Perwal No. 33 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja hibah dan bansos yang antara lain mengatur hibah untuk bantuan fisik maksimal sebesar Rp 100 juta, sedangkan non fisik sebesar Rp 50 juta. Sedangkan untuk pemberian pertama kali diberikan sebesar 50% dari nilai tersebut, dengan besaran menyesuaikan b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman terkait mekanisme pengusulan hibah bansos, dan pendampingan teknis baik terkait sistem maupun penyusunan proposal usulan; c. Meningkatkan kualitas verifikasi terhadap usulan baik terkait keselarasan ouput usulan hibah bansos terhadap pencapaian program pembangunan ataupun keselarasan usulan uraian belanja sesuai dengan asas kepatutan kewajaran	Peningkatan Kinerja belanja hibah/bansos

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	4. Meningkatkan kinerja serapan belanja modal melalui pengendalian dan evaluasi yang konsisten dimulai dari perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pemantauan proses pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi. Serta agar dipersiapkan terlebih dahulu persyaratan administrasi untuk proses pengadaan yang memerlukan waktu lama pada awal tahun anggaran atau sebelum tahun anggaran.	Untuk meningkatkan kinerja serapan belanja modal, upaya yang dilakukan antara lain : a. Menyusun rencana umum pengadaan segera setelah penetapan dokumen anggaran, dalam upaya mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa; b. Meningkatkan monitoring penyerapan anggaran belanja oleh Tim pengendali anggaran melalui sistem informasi e-sakip; c. Meningkatkan evaluasi secara rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dengan seluruh jajaran Perangkat Daerah; d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan BPN terkait dengan pengadaan lahan untuk kepentingan publik	Peningkatan Kinerja belanja modal
	5. Lebih matang dalam membuat perencanaan belanja pada masing-masing program kegiatan di setiap Perangkat Daerah.	Peningkatan kualitas perencanaan belanja di masing-masing perangkat daerah dilakukan melalui upaya : a. Menyusun prioritas belanja berdasarkan permasalahan pembangunan berbasis data yang akurat; b. Menyusun dokumen teknis yang berkualitas dan tepat waktu sebagai prasyarat pengadaan dan serapan belanja publik yang berkualitas; c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja melalui kepatutan dan kewajaran belanja terhadap output yang ingin dicapai.	Peningkatan kualitas rencana belanja Perangkat Daerah
II	CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH		
	c. Indeks Pembangunan Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu parameter capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Cilegon secara konsisten terus mengalami kemajuan/ peningkatan. Pada tahun 2021 IPM Kota Cilegon adalah sebesar 73.35, jika dibandingkan dengan tahun 2020, IPM Kota Cilegon telah meningkat sebesar 0,30 poin. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	a. Peningkatan IPM ditempuh melalui peningkatan pelayanan kesehatan, penjaminan stock obat yang cukup.	RSUD : - Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan Perjanjian Kerjasama dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon. Dinkes : - Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan obat-obatan pada layanan kesehatan dasar (puskesmas). Penjaminan stok dilakukan melalui <i>stock opname</i> secara berkala, melakukan survei lebih intensif kepada penyedia obat, serta melakukan proses pengadaan obat secara tepat waktu;	Penjaminan stok obat untuk menjamin peningkatan layanan kesehatan
	b. Peningkatan Standar/ Tipe Puskesmas.	Peningkatan standar puskesmas dilakukan melalui pemenuhan SDM, fasilitas dan utilitas di seluruh puskesmas, dalam upaya mendorong seluruh puskesmas terakreditasi paripurna. Dari 9 puskesmas, sebanyak 7 puskesmas telah mencapai akreditasi utama, 1 puskesmas akreditasi madya dan 1 puskesmas belum dilakukan penilaian akreditasi. Upaya peningkatan layanan puskesmas dilakukan melalui layanan kedaruratan 119, pendaftaran online melalui mobile JKN dan penambahan jam kerja pelayanan IGD di 3 puskesmas. Cakupan JKN saat ini telah mencapai 96,81% sehingga mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC). Pelaksanaan ini didukung dengan kebijakan alokasi anggaran kesehatan yang terus meningkat, dengan alokasi di tahun 2022 sebesar 13% dari APBD di luar belanja pegawai.	Peningkatan kualitas dan standar pelayanan Puskesmas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	c. Peningkatan pelayanan pendidikan dengan mengalokasikan dana anggaran tambahan untuk pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.	Alokasi anggaran pendidikan dari APBD Kota Cilegon terus meningkat, dalam upaya mendorong pembangunan pendidikan di Kota Cilegon, yang mana di tahun 2023 mencapai 24,5% dari APBD. Dalam upaya mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah Pemerintah menggulirkan program Besasiswa Sarjana yang terus bertambah cakupannya, pemberian Bantuan Operasional Sekolah dari APBD (BOSDA), pemberian beasiswa miskin, peningkatan sarana prasarana sekolah khususnya di SMPN baru, peningkatan honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta perluasan besasiswa bagi siswa tidak mampu. Upaya ini berhasil mendorong percepatan Indeks Pendidikan dengan sumbangsih terbesar dari komponen RLS, yang mana pada tahun 2022 Indeks pendidikan bertambah sebesar 0,6 poin dari sebesar 73,35 di tahun 2021 menjadi sebesar 73,95 Di tahun 2022, dengan RLS bertambah sebesar 0,33 poin dari sebesar 66,69 di tahun 2021 menjadi sebesar 67,02 di tahun 2022	Mengurangi pengeluaran biaya pendidikan untuk masyarakat
	d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di industri.	Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui upaya pendampingan dan fasilitasi kepada seluruh usaha mikro kecil, baik terkait peningkatan kualitas produk, pemasaran, perijinan, manajemen usaha, serta akses permodalan. Dalam upaya menaikan usaha mikro kecil, Pemerintah Kota Cilegon melakukan inkubasi usaha bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, sebagai salah satu inkubator usaha dari Perguruan Tinggi yang kompeten. Pada tahun 2022, sebanyak 842 mitra binaan telah mendapatkan pinjaman usaha tanpa bunga, 400 orang mendapatkan pendampingan di rumah siap kerja, 120 orang mengikuti inkubasi usaha dan ratusan orang mengikuti pelatihan UMKM baik terkait perizinan, pemasaran, dan kualitas produk. Sedangkan terkait dengan penyerapan tenaga kerja di Industri, Pemerintah melakukan upaya pelatihan tenaga kerja secara lebih massive, dengan	Pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		kurikulum berbasis balai latihan kerja dan bersertifikasi, sehingga memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh Industri. Pemerintah juga mendorong perluasan pemagangan, dengan menggandeng keterlibatan industri, sehingga tenaga kerja yang telah dilatih ataupun yang memenuhi kualifikasi siap untuk bekerja. Pada tahun 2022 sebanyak 1.072 orang mengikuti pelatihan kompetensi meliputi 33 jenis pelatihan kompetensi. Penempatan dan pemagangan tenaga kerja sebanyak 3.393 orang meliputi 2.942 orang di dalam negeri, 22 orang di luar negeri dan pemagangan 429 orang. Pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu prioritas Pemerintah, sebagai bagian dari implementasi 10 program janji politis.	
	e. Memprioritaskan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan.	Pemerataan sarana prasarana pendidikan merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas sarana pendidikan di tahun 2022 dan 2023 adalah pemenuhan sarpras di SDN dan SMPN, sekolah-sekolah yang terkena bencana serta sekolah-sekolah yang prioritas sarprasnya masih kurang.	Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	f. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara peningkatan anggaran di bidang ekonomi untuk membantu Usaha Kecil Menengah.	Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah melakukan intervensi melalui : - peningkatan daya saing ekonomi melalui peningkatan usaha mikro kecil, industri kecil, usaha pertanian dsb; - peningkatan kualitas sdm melalui pemerataan layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja; - peningkatan kualitas fisik, terkait dengan pemenuhan sarana prasarana publik yang memadai, baik sarpras prasarana lokal ataupun di tingkat kota.	Peningkatan daya beli masyarakat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pada tahun 2022 Dinkop telah memberikan pinjaman dana bergulir sebanyak 842 pelaku UMKM dan di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1440 pelaku UMKM mendapatkan pinjaman dana bergulir	
	d. Tingkat Kemiskinan		
	Tingkat kemiskinan atau angka kemiskinan atau P0 dengan satuan persen (%) merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kondisi kesejahteraan masyarakat secara makro, yaitu proporsi masyarakat yang kemampuan pengeluarannya masih berada di bawah standar pengeluaran minimum (untuk memenuhi kebutuhan pokok) yang dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK). tingkat kemiskinan Kota Cilegon menempati peringkat kedua terendah setelah Kota Tangerang Selatan, dan masih di bawah angka kemiskinan nasional dan angka kemiskinan Banten. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Melonggarkan target penerima PKH.	PKH merupakan program perlindungan sosial yang bersumber dana dari APBN dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memperluas cakupan penerima program PKH, Pemerintah Daerah melakukan program serupa dengan sumber dana dari APBD Provinsi Banten melalui program jaminan sosial Banten bersatu (Jamsosratu) serta APBD Kota Cilegon melalui program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM). Namun dengan semakin meluasnya cakupan penerima PKH, program JSCM dialihkan sasaranny menjadi untuk lansia dan anak cacat melalui program JSCB. Realisasi PKH (Program Keluarga Harapan) Kota Cilegon TA 2022 Tahap 4 : 8.987 KPM. Untuk kuota PKH Kota Cilegon terus mendapatkan tambahan dari Kementerian Sosial RI selama Tahun 2022. Dinas sosial melalui para pendamping PKH terus berupaya melakukan resertifikasi bagi penerima PKH, agar para KPM yang dianggap sudah mandiri dapat digraduasi dan diganti oleh keluarga lainnya yang masuk kategori miskin dan tidak mampu sehingga bantuan PKH dapat tepat sasaran.	Optimalisasi penerima Program Keluarga Harapan
	b. Pemberian Bantuan Langsung Baik dalam bentuk tunai atau barang.	Dalam upaya perlindungan sosial, Pemerintah memberikan bantuan langsung baik tunai ataupun barang melalui program bantuan sembako,	Peningkatan perlindungan sosial melalui bantuan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		JSCB (bantuan uang tunai untuk lansia dan disabilitas), bantuan anak terlantar serta RTLH (bantuan uang tunai untuk pembangunan rumah tidak layak huni). telah mengakomodir bantuan langsung berupa uang tunai atau barang diantaranya : a) Bansos yang bersumber dari APBN : • Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nilai Rp. 200.000/bulan dengan target 16676 KPM. • Bantuan Sosial Minyak Goreng 16.667 KPM. • PKH sebanyak 8.987 KPM • BLT BBM APBN. Sebanyak 19.830 KK b) Bansos yang bersumber dari APBD Provinsi : • Jamsosratu (Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu) yaitu sebanyak 1.413 Keluarga Sasaran • BLT BBM APBD Provinsi 3.902 KPM c) Bansos yang bersumber dari APBD • Bantuan Sembako Lansia 150 Paket. • JSCB (Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat) dengan kriteria Lansia dan Disabilitas dan besaran sebanyak 636 KPM • RTLH sebanyak 138 KK.	langsung tunai atau barang
	c. Menambah anggaran untuk bansos dan memperluas jumlah penerima.	Anggaran untuk bantuan sosial di tahun 2022 sebesar 9,3 milyar, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 6,9 milyar. Tahun 2023 ada bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan penambahan anggaran untuk bantuan RTLH semula Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 20.000.000 per rumah	Perluasan penerima bantuan sosial

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	d. Penyederhanaan administrasi dan penyaluran bansos.	Secara administrasi, pemberian bantuan sosial harus berpedoman pada Permendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa penerima bantuan sosial harus tercantum by name by address nya pada APBD yang secara administrasi dilakukan melalui e-hibah bansos yang juga diatur Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran hibah dan bantuan sosial.	Administrasi dan penyaluran bantuan sosial
	e. Menciptakan lapangan kerja baru.	Selain melalui sektor informal melalui pemberdayaan usaha mikro kecil, upaya penciptaan lapangan kerja baru dilakukan dengan mendorong investasi daerah. Hal ini dilakukan kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur serta pengendalian investasi daerah. Terkait kemudahan perizinan, pada bulan Desember 2022 lalu Pemeritah Daerah telah meresmikan Mall Pelayanan Publik , sebagai pelayanan perizinan satu pintu yang dikemas dengan pelayanan yang lebih terintegrasi dan sarpras pelayanan yang sangat memadai, sehingga proses perizinan lebih mudah, transparan dan cepat.	Penciptaan lapangan kerja baru
	e. Ketenagakerjaan		
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cilegon sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018, namun kembali mengalami fluktuasi/kenaikan di tahun 2019 dikarenakan berbagai dinamika di beberapa sektor perekonomian strategis, dan meningkat di 2020 yang dipengaruhi kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 merupakan fenomena yang terjadi di hampir di seluruh Indonesia, bahkan dunia dimana baik secara langsung maupun atau tidak langsung disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19. Adanya pandemi Covid-19 tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Mulai pertengahan tahun 2020 dan sepanjang tahun 2021, berbagai upaya di lakukan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk mereduksi dampak covid 19 yang dilakukan beriringan dengan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Hal tersebut berimbas pada kondisi ketenagakerjaan Kota Cilegon di 2021 yang jauh membaik dibandingkan tahun 2020. Di 2021, tingkat pengangguran menurun seiring aktivitas faktor produksi yang sudah kembali meningkat. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	a. Diimplementasikan perda tentang tenaga kerja lokal disemua industri yang berada di Kota Cilegon dengan mengakomodasi rekrutmen tenaga kerja 70 % wajib penduduk lokal kota cilegon.	Raperda (inisiatif) tentang tenaga kerja lokal telah kami sampaikan kepada DPRD di tahun 2021. Namun hasil evaluasi Pemerintah Provinsi, raperda ini tidak dapat ditindaklanjuti terkait dengan aspek diskriminatif terkait hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rencana di 2023 : dikoordinasikan kembali dengan DPRD Kota Cilegon dan Bagian Hukum untuk menelaah kembali substansi Raperda yang dimaksud.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon dengan meningkatkan peluang rekrutmen tenaga kerja lokal
	b. Terbangunnya sinergitas antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Stakeholders dalam rangka perekrutan tenaga kerja lokal.	Sinergitas antara Pemerintah dengan Dunia Usaha dalam perekrutan tenaga kerja telah terbangun dengan adanya kewajiban dunia usaha untuk melaporkan info terkait perekrutan tersebut pada info loker pada media sosial milik Pemerintah Daerah, yang mana hal ini berjalan dengan baik hingga saat ini. Prioritas terhadap penggunaan tenaga kerja lokal, dilakukan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi pendidikan ataupun keahlian yang dipersyaratkan. Tindak lanjut 2022 : Melalui sub kegiatan pelayanan antar kerja dan informasi pasar kerja sudah dilakukan sinergi antara pemkot cilegon dengan stakeholders dalam bentuk kegiatan sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja. Rencana 2023 : Akan dilaksanakan kembali dengan tindak lanjut yang ada di 2022	Memberikan kesempatan calon tenaga kerja lokal untuk dapat dimagangkan dan ditempatkan di perusahaan
	c. Peningkatan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.	Program 25 ribu tenaga kerja sebagai salah satu dari implementasi 10 program janji politis, diiringi dengan peningkatan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, baik untuk pelatihan tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja dan pemagangan tenaga kerja. Upaya ini juga dibarengi dengan pemenuhan sarana prasarana Balai Latihan Kerja. Tindak Lanjut 2022 : Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi	Pelatihan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Rencana 2023 : melaksanakan TNA (Training Need Analysis)	
	d. Penciptaan lapangan kerja baru dengan pelatihan UMKM dan yang lainnya.	Upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor informal dilakukan dengan mendorong peningkatan skala usaha mikro kecil sehingga dapat bertambah tenaga kerja dan omzetnya. Salah satu upayanya adalah dengan memfasilitasi UMKM melalui pelatihan-pelatihan baik terkait pelatihan peningkatan kualitas produk, pemasaran, manajemen usaha, perizinan produk dan proposal pengembangan usaha. Pada tahun 2022 juga telah dilakukan pelatihan Calon Wirausaha Baru sebanyak 600 UMKM dan pelatihan Calon Wirausaha Milenial sebanyak 400 UMK oleh Dinkop-UKM.	Peningkatan pelatihan UMKM
	e. Membuka jalur informasi lowongan pekerjaan secara transparan pada masyarakat sampai tingkat Rukun Tetangga (RT).	Informasi lowongan kerja diinformasikan secara luas dan transparan melalui info loker melalui media sosial Pemerintah Daerah. Tindak lanjut 2022 : penyampaian informasi lowongan pekerjaan sudah dilaksanakan secara masif dan terstruktur melalui akun media sosial resmi OPD (FB, IG dan Youtube) Rencana 2023 : menambah jalur informasi lowongan pekerjaan SIBUKER dengan berbasis Website.	Peningkatan informasi lowongan kerja
	f. Modernisasi peningkatan Usaha rumah tangga dan UMKM.	Modernisasi peningkatan usaha rumah tangga antara lain dilakukan melalui pemasaran secara digital, dibarengi dengan peningkatan kualitas daya saing produk. Pada tahun 2022 sebanyak 400 pelaku usaha mengikuti pelatihan pemasaran, 50 UMK mengikuti digital marketing dan 200 UMK mengikuti pembuatan marketplace.	Modernisasi usaha rumah tangga
	g. Mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang adaptif terhadap kebutuhan industri, perdagangan dan jasa.	Modernisasi peningkatan usaha rumah tangga antara lain dilakukan melalui pemasaran secara digital, dibarengi dengan pelatihan-pelatihan diantaranya adalah pelatihan makanan dan minuman milenial sebanyak 50 orang serta pelatihan pembuatan homecare/sabun rumahan sebanyak 75 orang.	Keahlian tenaga kerja adaptif dengan kebutuhan industri

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	f. Perekonomian		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan salah satu alat ukur bagi Pemerintah Daerah untuk melihat karakteristik dan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Pada PDRB pendekatan produksi, struktur PDRB Cilegon sebagai kota industri didominasi aktivitas produksi industri pengolahan. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada diatas 55 persen dari total PDRB Kota Cilegon di tahun 2021. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Pengembangan sektor pariwisata dengan membuat dan mengembangkan destinasi wisata serta pusat perbelanjaan kuliner Khas Daerah Kota Cilegon.	Pengembangan sektor jasa dan perdagangan merupakan strategi Pemerintah untuk mengurangi kebergantungan perekonomian daerah pada sektor industri. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong investasi sektor perdagangan dan jasa, serta mengembangkan destinasi wisata lokal dan pusat-pusat kuliner. Salah satu destinasi yang fokus akan dikembangkan adalah situ rawa arum, kampung wisata Kedurung di Kelurahan Pabean dan Desa Budaya Kubangsari. Terkait wisata kuliner, Pemerintah juga memfasilitasi pusat-pusat wisata kuliner, antara lain pada kegiatan car free day serta di taman taman kota dan kecamatan.	Pengembangan destinasi wisata dan pusat kuliner
	b. Pengembangan ekonomi kreatif.	Pengembangan ekonomi kreatif merupakan bagian dari program pengembangan daya saing usaha mikro kecil secara keseluruhan, dengan sektor usaha yang fokus didorong adalah terkait sektor industri kuliner dan kerajinan tangan. Pada tahun 2022, upaya pengembangan terhadap ekonomi kreatif dilakukan melalui bimtek dan fasilitasi meliputi fasilitasi legalisasi hak cipta sebanyak 95 hak cipta, sertifikasi SNI sebanyak 2 sertifikat dan legalisasi merk IKM kepada 40 pelaku usaha.	Pengembangan Industri Kreatif
	c. Penguatan ekosistem digital disektor keuangan terutama para pelaku usaha	Penguatan ekosistem digital dilakukan melalui penguatan infrastruktur, SDM, regulasi dan literasi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pemasaran secara online (digital marketing), yang	Penguatan Ekosistem digital

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		secara infrastruktur didukung dengan perluasan akses internet di ruang-ruang publik, literasi kepada pelaku usaha melalui pelatihan digital marketing, serta menjadikan gerai-gerai UKM di Kecamatan tidak hanya sebagai pusat pemasaran offline tetapi juga pusat literasi digital literasi keuangan bagi pelaku usaha.	
	d. Restrukturisasi kredit dan kemudahan pembiayaan untuk program usaha kecil dan menengah.	Kewenangan Pemerintah Kota dalam urusan usaha mikro kecil, dalam hal ini dibatasi pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil, sedangkan usaha kecil dan menengah dalam hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dalam upaya meningkatkan kemudahan pembiayaan usaha mikro kecil, Pemerintah menggulirkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga untuk program perintisan dan pengembangan usaha melalui UPT Pinjaman Dana Bergulir. Pemerintah juga bermitra dengan berbagai lembaga keuangan, untuk memfasilitasi pelaku usaha yang kredibel untuk bisa mendapatkan pinjaman modal usaha yang lebih besar melalui program Kredit Usaha Rakyat	Kemudahan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro
	e. Memaksimalkan dana stimulan lingkungan.	Optimalisasi dana stimulan lingkungan atau program DPWKel dilakukan dengan : - Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program DPWKel, baik sektor kesehatan, lingkungan hidup, sosial, pendidikan, pembangunan sarpras dsb sehingga DPWKel menjadi akselerator pelaksanaan program pembangunan. - Meningkatkan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal dan kinerja program tercapai optimal. - Meningkatkan keselarasan output program DPWKel dengan sasaran program, sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi anggaran program pembangunan.	Optimalisasi dana stimulan lingkungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	f. Peningkatan kualitas jalan diberbagai wilayah secara merata	Peningkatan kualitas jalan secara merata sudah diupayakan oleh Dinas PUPR, dimana pada tahun 2022 sudah dilaksanakan rekonstruksi jalan sebanyak 35 ruas, sedangkan yang dipelihara secara berkala sebanyak 43 ruas, dan pemeliharaan rutin sebanyak 48 ruas. Sedangkan pada tahun 2023 rencana rekonstruksi jalan sebanyak 39 ruas, pemeliharaan berkala jalan sebanyak 13 ruas dan pemeliharaan rutin sebanyak 17 ruas.	Peningkatan kualitas jalan
	g. Meningkatkan nilai investasi untuk pembangunan industri di Kota Cilegon.	Peningkatan investasi daerah dilakukan melalui kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur serta pengendalian investasi daerah. Terkait kemudahan perizinan, pada bulan desember lalu Pemeritah Daerah telah meresmikan Mall Pelayanan Publik , sebagai pelayanan perizinan satu pintu, sehingga proses perizinan lebih mudah, transparan dan cepat.	Peningkatan investasi daerah
III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		
A	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
	Urusan Pendidikan : Program Pengelolaan Pendidikan Pada Tahun 2021, Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 43,15% atau anggaran terealisasi Rp. 43.775.662.549,00,- dari target anggaran Rp. 101.443.651.968,00,-. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Diperlukannya peraturan daerah dan peraturan walikota terkait dengan peningkatan pendanaan pendidikan dalam bentuk BOS Daerah untuk seluruh jenjang dan jenis.	Upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan dalam tatanan pelaksanaan BOS Daerah dikarenakan telah tersedianya Juklak dan Juknis pada Akhir tahun 2022, dan dilaksanakan di 2023 dalam bentuk BOSDA untuk sekolah dasar.	Penguatan BOS Daerah untuk dukungan operasional pendidikan dasar
	b. Diperlukannya alokasi pendanaan untuk buku dan buku kerja siswa (LKS) supaya meringankan	Penyediaan Buku dan Buku kerja siswa agar dapat meringankan masyarakat dapat di alokasikan penyediaannya Melalui pengadaan berbasis e-catalogue yang saat ini belum ada ketersediaan barangnya, maka dari itu Buku dan	Penguatan BOS Daerah untuk dukungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	beban masyarakat.	Buku kerja siswa akan disediakan menyesuaikan spesifikasi dengan ketersediaan produk yang terseida pada e-catalogue	operasional pendidikan dasar
	c. Optimalisasi serapan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.	Pelaksanaan penyerapan anggaran dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan Calon Kepala Sekolah (CAKEP) dan Calon Pengawas Sekolah (CAWAS). Di 2022, pola kegiatan tersebut dialihkan menjadi program "Sekolah Penggerak" yang secara holistik dapat meningkatkan kualitas guru dan mutu kualitas pendidikan.	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan
	d. Diberlakukannya pembatasan jabatan kepala sekolah atau perodesasi kepala sekolah.	Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai kepala sekolah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa guru yang diberi penugasan kepala sekolah wajib memiliki sertifikat guru penggerak, apabila tidak memiliki sertifikat guru penggerak maka guru tersebut dibatasi untuk menjabat sebagai kepala sekolah sehingga Calon Kepala Sekolah perlu ditingkatkan kompetensinya untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak.	Optimalisasi tata kelola penyelenggaraan unit layanan pendidikan
	e. Diperlukannya survey kepuasan pelayanan Masyarakat pada bidang Pendidikan.	Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah melaksanakan Survey IKM dengan melibatkan jumlah responden 826 dari penghitungan hasil responden tersebut nilai yang didapatkan adalah 83,86 yang hasilnya Baik, namun dengan hasil tersebut peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada sekolah dan pelayanan Guru kepada Murid agar dapat ditingkatkan kembali guna meningkatkan mutu pendidikan.	Evaluasi tingkat keppuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kota Cilegon
	Urusan Kesehatan : Capaian realisasi anggaran (Keuangan) pada seluruh unit dan sub unit pada Dinas Kesehatan, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki realisasi sebesar 80,28%, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki realisasi sebesar 97,45%, pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman memiliki realisasi sebesar 96,44% dan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memiliki realisasi sebesar 98,16%. Secara keseluruhan capaian keuangan pada Urusan Kesehatan pada seluruh unit dan sub		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	unit di Dinas Kesehatan, dengan pagu sebesar Rp. 372.347.469.614,- terserap sebesar Rp. 318.201.056.830, sehingga memiliki capaian sebesar 85,5%. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan Pelayanan Berbasis posyandu dengan menyiapkan satu posyandu dan satu dokter umum.	Posyandu merupakan upaya kesehatan masyarakat berdasarkan Perwal 73 Tahun 2022 tentang Lembaga kemasyarakatan yakni dalam pelayanannya menitikberatkan pada kegiatan promotif dan preventif sehingga pelaksana utamanya adalah kader-kader posyandu dimana kader posyandu ini secara pembinaan dilakukan oleh DP3AP2KB. Tenaga Kesehatan dapat dilibatkan dalam usaha Promotif dan Preventif sesuai dengan kebutuhan pelayanan sehingga hal tersebut tidak harus melibatkan tenaga Dokter.	Peningkatan Pelayanan Posyandu
	b. Meningkatkan Tempat pelayanan posyandu berupa beberapa fasilitas yang dibutuhkan.	Pelaksanaan penyediaan fasilitas posyandu akan diupayakan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait komponen TKDN sehingga pemenuhan fasilitas dapat sesuai dengan kualifikasi TKDN	Peningkatan Fasilitas pelayanan posyandu
	c. Penanganan Pengaduan Pelayanan kesehatan melalui IT terhadap masyarakat yang membutuhkan dan bersifat urgent.	Pengaduan pelayanan kesehatan, masyarakat dapat menggunakan pilihan kanal pengaduan Dinas Kesehatan yakni diantaranya menggunakan SP4N-LAPOR, melalui media sosial Facebook, Instragram, dan melalui nomor pengaduan 087783799360 dan untuk layanan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat menghubungi ke nomor 119.	Kemudahan akses penanganan pengaduan pelayanan kesehatan berbasis IT
	d. Merubah cara pengambilan nomor antrian melalui online yang ditentukan dengan jam Pemberlakuan.	Pengambilan nomor antrian sudah disediakan fitur pendaftaran online yang sudah tersedia pada aplikasi Mobile JKN dan hal ini perlu diinformasikan kepada masyarakat secara luas agar dapat memudahkan pelayanan pemberian nomor antrian kepada masyarakat.	Peningkatan pelayanan Kesehatan
	e. Memberikan Pembiayaan gratis pada masyarakat yang memiliki BPJS kelas 2.	Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	Perluasan pemberian manfaat kesehatan kepada masyarakat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	f. Memperluas Jaminan kesehatan masyarakat secara luas.	Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Kota Cilegon telah mencapai Universal Health Coverage pada Bulan Oktober 2022 sebesar 96,81% yang dimana tahun depan akan dimaksimalkan pencapaiannya. Selain itu, sudah 3 (tiga) Puskesmas penambahan jam kerja Pelayanan IGD.	Perluasan pemberian manfaat kesehatan kepada masyarakat
	g. Peningkatan kualitas informasi Kesehatan.	Informasi kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan telah dilakukan melalui media sosial Facebook dan Instagram yang dimana masyarakat semakin memudahkan untuk mengakses informasi kesehatan.	Akses informasi secara cepat dan tepat
	h. Diperlukannya survey kepuasan pelayanan Masyarakat di bidang Kesehatan untuk evaluasi kinerja.	Pelaksanaan Survey di bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD yang dimana hasil IKMnya untuk Dinas Kesehatan 83,94 kategori Baik dan RSUD sebesar 80,99 kategori Baik.	Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
	i. Menambah jam kerja pelayanan kesehatan di hari sabtu dan minggu dengan system Shift dilevel rumah sakit dan puskesmas.	Pelayanan Rawat Inap dan Gawat Darurat sudah melayani 24 jam sehari 7 hari seminggu. Untuk pelayanan Rawat jalan saat ini melayani senin-sabtu dan akan dibuka Poliklinik Mandiri yang rencananya mulai beroperasi setelah ada gedung Medical Centre (Gedung RSUD 5 Lantai)	Perluasan waktu pelayanan kesehatan kepada masyarakat
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Pembangunan JLU merupakan salah satu kegiatan prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kota Cilegon. Pembangunan JLU dimulai dari tahun 2017 yaitu pembangunan jembatan dengan bentang 20 m2. Kemudian dilanjutkan dengan pematangan lahan pada tahun 2019 dan 2020, Pada tahun anggaran 2021, Pembangunan Jalan Lingkar Utara masih pada upaya penyelesaian pengadaan tanah. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 54.275.863.880,- yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 24.549.727.288,- untuk pembebasan bidang tanah sebanyak 90 bidang dengan luas 16.829,00 m2. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	a. Menjadikan Proyek pembangunan JLU menjadi program prioritas.	Proyek pembangunan JLU sudah dijadikan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, namun dalam pelaksanaannya anggaran yang dialokasikan tidak dapat diserap secara optimal dikarenakan terkendala dengan proses pengadaan lahan.	Percepatan penyelesaian JLU untuk Peningkatan kapasitas dan jaringan jalan/infrastruktur perkotaan
	b. Memaksimalkan serapan Anggaran pengadaan atau pembebasan bidang tanah JLU.	Pada tahun 2022, penyerapan anggaran untuk pembebasan lahan JLU sudah dioptimalkan, namun dikarenakan Penetapan Lokasi berakhir di bulan April Tahun 2022, bidang tanah yang bisa terbayarkan hanya sebanyak 26 bidang. Pada tahun 2023 pengadaan lahan JLU tidak dianggarkan karena dengan habisnya penetapan lokasi, maka proses pengadaan lahan harus dimulai dari awal tahap Perencanaan.	Percepatan penyelesaian JLU untuk Peningkatan kapasitas dan jaringan jalan/infrastruktur perkotaan
	c. Peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan BPN.	Koordinasi untuk percepatan penyediaan lahan diantaranya dengan BPN sudah dilakukan secara intensif, namun banyaknya permasalahan, seperti penolakan masyarakat terhadap harga appraisal dan sengketa lahan memperlambat proses pengadaan lahan JLU.	
	d. Meningkatkan koordinasi untuk percepatan penyediaan lahan JLU.		Peningkatan kapasitas dan jaringan jalan/ infrastruktur perkotaan
	e. Pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Kota Cilegon secara bertahap.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan diupayakan dapat dilaksanakan secara merata, pada tahun 2022 ruas jalan yang ditingkatkan/direkonstruksi sebanyak 35 ruas, sedangkan yang dipelihara secara berkala sebanyak 43 ruas, dan pemeliharaan rutin sebanyak 48 ruas. Sedangkan pada tahun 2023 rencana rekonstruksi jalan sebanyak 39 ruas, pemeliharaan berkala jalan sebanyak 13 ruas dan pemeliharaan rutin sebanyak 17 ruas.	Peningkatan kualitas jalan
	f. Pengendalian banjir dengan mempercepat pembuatan tandon-tandon di wilayah rawan banjir.	Penyelesaian tandon membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022, diprioritaskan untuk penanganan tandon sukrajaya II, Tahun 2023 juga masih memprioritaskan	Pembangunan tandon untuk pengendalian banjir

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		penanganan tandon Sukmajaya II, dengan pembangunan TPT, dan saluran outlet. Penyelesaian tandon Sukmajaya ini masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan rumah pompa dan penyediaan pompa sebanyak 4 unit.	
	g. Sinergitas Pemerintah Kota Cilegon dengan Stakeholders dalam rangka penanganan banjir.	Sinergi Pemkot Cilegon dengan stakeholders dalam rangka penanganan banjir sudah dilakukan, diantaranya adalah dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan perbaikan gorong-gorong di Jalan Nasional. Saat ini juga sedang diupayakan kerjasama dengan Pemerintah Korea untuk mengolah air di tandon metro untuk air baku, sehingga volume airnya bisa berkurang dan bermanfaat. Kerjasama ini baru dalam tahap koordinasi dengan Kemenpuir dan Bappenas. Selain itu, pada tahun 2023 Dinas PUPR berencana mengeruk 1 ha x 5 m Sungai Ciberung sehingga bisa jadi tandon tampungan air yang akan diolah oleh pdam sebagai air baku. Ada wacana dalam Sinergitas penanganan banjir ini dengan pelimpahan kewenangan penanganan drainase selain primer dan sekunder untuk ditangani oleh kecamatan/kelurahan.	Penanganan Banjir
	h. Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan serta pengaturan beban/tonase kendaraan yang melintas di JLS.	Rencana pemeliharaan JLS yang diupayakan oleh Pemkot Cilegon dengan menggandeng CSR industri, belum berhasil menemukan kesepakatan. Untuk pemeliharaan JLS tahun 2022, baru sebatas pemeliharaan rutin dengan menggunakan slag baja bantuan dari Krakatau Posko. Upaya Pemkot Cilegon untuk penanganan JLS melalui anggaran pusat juga terus dilakukan. Rencana tahun 2023 akan dilakukan rekonstruksi JLS dengan anggaran sebesar 7 milyar, dari total kebutuhan anggaran peningkatan JLS berdasarkan DED 167 milyar. Upaya yang telah dilakukan oleh Dishub dalam pengaturan beban/tonase kendaraan yang melintas JLS baru sebatas patroli secara intensif/setiap hari untuk menghalau truk-truk pasir dan angkutan berat yang parkir di sepanjang JLS.	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan Pengurusan kawasan kumuh.	Penanganan kawasan kumuh akan disinergikan dengan program pembangunan Salira. Pada tahun 2023, target penanganan kawasan kumuh di Dinas Perkim sebesar 46,36%. Pada tahun 2023 juga direncanakan akan disusun Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh)	Penanganan Kawasan Kumuh
	b. Peningkatan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase di kawasan kumuh.	Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan dan drainase di kawasan kumuh diintervensi melalui pembangunan Salira program DPWkel. Pada Tahun 2022 melalui Program DPW Kel telah mengintervensi penanganan Kawasan Kumuh seluas 21.14 Ha. Namun dengan anggaran 10jt per RW belum dapat mengentaskan kawasan kumuh. Diharapkan, usulan pokir dewan juga memprioritaskan penanganan kawasan kumuh.	Peningkatan dan pembangunan jalan dan drainase lingkungan
	c. Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum diseluruh pemukiman.	Penambahan Lampu penerangan jalan umum diseluruh permukiman telah dilaksanakan melalui program Salira, dimana pada tahun 2022 pemasangan PJU lingkungan yang sudah dilaksanakan sebanyak 246 unit dan program ini juga masih dilanjutkan di tahun 2023.	PJU Lingkungan
	d. Pembangunan ruang terbuka Publik diseluruh kecamatan dan kelurahan.	Pembangunan ruang terbuka publik di seluruh kecamatan dan kelurahan telah menjadi program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon. Sampai dengan tahun 2022 RTP 5 (lima) Ruang Terbuka Publik Kecamatan, yaitu Kec. Jombang, Kec. Cilegon, Kec. Ciwandan, Kec. Purwakarta dan Kec. Cibeber dan 5 (lima) Ruang Terbuka Publik Kelurahan, yaitu : Kel. Kedaleman, Kel. Cibeber, Kel. Kalitimbang, Kel. Sukmajaya dan Kel. Tegol Bunder	Penyediaan Ruang Terbuka Publik di seluruh kecamatan dan kelurahan
	e. Menertibkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.	Langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Perkim untuk menertibkan PSU dari pengembang adalah dengan mendorong pengembang agar segera	Pemanfaatan PSU untuk kepentingan masyarakat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		menyerahtherimakan PSU kepada Pemanfaatan PSU untuk kepentingan masyarakat Tahun 2022 pengembang yang sudah menyerahtherimakan PSU kepada Pemkot adalah perumahan Bonakarta, Metro dan Perumnas, berupa jalan, drainase dan fasos fasum. Tahun 2023 akan didorong perumahan Grand Sutra, TCI, Curug Asri, dan Bumi Rakata Asri untuk menyerahtherimakan fasos fasumnya kepada Pemkot.	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Melakukan upaya peningkatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan PPNS berjumlah 4 Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas PPNS secara berkala selama 12 kali berjumlah 50 pegawai dengan sasaran yang diharapkan terbentuk PPNS yang handal dan cekatan dalam melaksanakan Tupoksi	Peningkatan Pembinaan PPNS
	b. Meningkatkan penegakan perda di lingkungan pasar.	Peningkatan penegakan perda dilakukan dengan peningkatan upaya penertiban terhadap pedagang melalui kolaborasi antara Satpol PP dengan UPT Pasar. Penertiban ini dibarengi dengan berbagai upaya untuk merelokasi pedagang ke tempat yang disediakan Pemerintah, sebagai solusi untuk mengatasi kesemrawutan lingkungan pasar. Rencana 2023 : Melaksanakan kegiatan Penegakan perda dan penindakan pelanggaran perda di lingkungan pasar dengan mempersiapkan alternatif solusi dari permasalahan yang ditindak (relokasi)	Penegakan Perda di Lingkungan Pasar
	c. Meningkatkan komposisi jumlah tenaga keamanan sesuai dengan luas wilayah dan penduduk.	Penambahan tenaga keamanan sesuai Permendagri No 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja belum dapat dilaksanakan dikarenakan terbentur dengan temuan Inspektorat Kota Cilegon sesuai dengan LHP No 780.04/175/LHP/IrbanIV tanggal 22 September 2022 sehingga pada tahun 2023 perlu menyampaikan usulan	Komposisi jumlah tenaga keamanan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		kebutuhan kouta tenaga keamanan Satpol PP kepada instansi terkait sesuai dengan Permendagri no 60 Tahun 2012	
	d. Meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan pelayanan.	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP dan di tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan Diklat maupun pelatihan-pelatihan antara lain Diklat Dasar Pol PP bagi Pegawai Non PNS, Pelatihan Keterampilan, dan public Speaking	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan
	Urusan Sosial. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan.	Dinas Sosial dalam pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi LKPJ tahun 2022 telah melaksanakan: - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan rujukan terhadap penanganan keluhan PPKS terkait bidang kesejahteraan sosial, khususnya untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan melalui peningkatan fungsi Puskesmas-SLRT. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.064 keluhan tercatat dan ditangani pada Layanan Sekretariat Puskesmas SLRT tingkat Kota Cilegon. - Menyampaikan usulan dan melaksanakan koordinasi ke Pusdiklatbangprof Kemensos RI untuk peningkatan kapasitas dan persentase jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang bersertifikat kompetensi. Pada tahun 2022 telah dilakukan Bimtek dan Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM Kesos di Kota Cilegon oleh Pusdiklatbangprof Kemensos RI dengan rincian : 5 orang TKSK, 25 orang Tagana, 18 orang PSM, 5 Relawan Sosial LK3, 9 orang Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial. - Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas PSKS baik perorangan, kelembagaan dan masyarakat, diantaranya : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang	Pemberdayaan PSKS

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Taruna se-Kota Cilegon, Pemberian Hibah kepada lembaga pengurus Karang Taruna Kota Cilegon, Bimtek Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Family Care Unit (FCU), Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Adapun rencana yang akan dilaksanakan di tahun 2023 adalah sebagai berikut : - Menyelenggarakan Bimtek dan Uji Kompetensi/sertifikasi SDM Penyelenggara Kesos dari unsur masyarakat dan lembaga yang dibiayai dari APBD melalui kerjasama dengan LSP Pusdiklatbangprof Kemensos RI / BBPPKS Kemensos RI untuk meningkatkan persentase SDM Kesos yang tersertifikasi kompetensi. - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi pembentukan Forum PSKS Kota Cilegon yang akan menjadi jembatan optimalisasi koordinasi lintas PSKS untuk sama-sama terjun dan berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon. - Peningkatan cakupan layanan Puskesmas pada Kelurahan selain Puskesmas Kelurahan yang merupakan <i>Pilot Project</i> Kemensos RI yaitu Kel. Bendungan dan Suralaya untuk pelaksanaan layanan penanganan keluhan PPKS di tingkat kelurahan dengan beban pembiayaannya diusulkan masuk dalam mandatory pada DPW-Kel.	
	b. Perluasan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar gelandangan dan pengemis.	Pada Tahun 2022 Perluasan pelayanan dilakukan dengan meningkatkan kecepatan dan respon dalam pengaduan, assesmen dan menindaklanjuti sesuai hasil Assesmen. Pada Tahun 2023 memperluas assesmen dan pemetaan kebutuhan PPKS	Perluasan pelayanan PPKS

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	c. Perluasan jaminan sosial untuk fakir miskin.	Dinas Sosial tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut dalam rangka perluasan Jaminan sosial untuk fakir miskin. Bansos yang bersumber dari APBN : • Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nilai Rp. 200.000/bulan dengan target 16676 KPM. • Bantuan Sosial Minyak Goreng 16.667 KPM. • PKH sebanyak 8.987 KPM • BLT BBM APBN. Sebanyak 19.830 KK Bansos yang bersumber dari APBD Provinsi : • Jamsosratu (Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu) yaitu sebanyak 1.413 Keluarga Sasaran • BLT BBM APBD Provinsi 3.902 KPM • Bansos Reguler JSODK : 55 KPM • Bansos reguler anak : 68 KPM • Bansos reguler lansia : 42 KPM Bansos yang bersumber dari APBD • Bantuan Sembako Lansia 150 Paket. • JSCB (Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat) dengan kriteria Lansia dan Disabilitas dan besaran sebanyak 636 KPM • RTLH sebanyak 138 KK. • pemberian santunan kematian kepada 73 KPM Adapun rencana tahun 2023 penambahan bantuan program sosial yakni akan menambah bantuan sosial yakni kepada anak Yatim/terlantar	Perluasan jaminan sosial untuk fakir miskin
	d. Perlunya perda disabilitas terhadap pemenuhan hak hak disabilitas.	Sudah dilakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah diantara eksekutif dan legislatif.	Perda disabilitas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	e. Pengadaan Gedung Baru Dinas Sosial yang representatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rencana pembangunan gedung Dinas Sosial sudah dialokasikan tahun anggaran 2023	Pengadaan Gedung Dinas Sosial
	f. Menempatkan SDM yang kompeten sesuai bidang tugas yang diperlukan untuk pembinaan secara berkelanjutan.	- Telah menyampaikan usulan diklat-diklat bidang sosial ke BKPSDM - Mengikuti program bimbingan teknis yang diselenggarakan intansi pembina - Tahun 2023 menyelenggarakan diklat/bimtek untuk sertifikasi atau uji kompetensi SDM.	Penempatan SDM sesuai kompetensi
B	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
B.1	Tenaga Kerja. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.	Penyelesaian perselisihan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 45% dari 20 kasus yang tercatat telah diselesaikan 9 kasus melalui perjanjian bersama dan pada tahun 2022 ini dari 39 Kasus yang dapat diselesaikan adalah berjumlah 30 kasus dengan Perjanjian bersama. Adapun rencana pada tahun 2023 direncanakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Konsultasi dan Mediasi: yakni melakukan konsultasi dan mediasi masalah dengan ahli hukum, pengacara, atau mediator yang berpengalaman dalam menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Mediator dapat membantu menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari konflik yang lebih besar. 2. Melakukan Perundingan: Adalah untuk mencari kesepakatan dengan pihak yang terlibat dalam perselisihan sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak dengan tidak mencari kemenangan mutlak pada satu pihak.	Meningkatnya kondusifitas investasi dan keamanan kondisi ketenagakerjaan di Kota Cilegon

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		3. Membangun Komunikasi yang Baik: Komunikasi yang baik dan terbuka dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik yang lebih besar. Dengan membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan pihak yang terlibat dalam perselisihan. 4. Penerapan Hukum: langkah hukum adalah alternative yang terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Hal ini dapat melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. 5. Pencegahan: untuk mencegah terjadinya perselisihan, mogok kerja, atau penutupan perusahaan dengan membangun hubungan yang baik dengan karyawan, membayar upah yang adil, memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta menjaga kepercayaan karyawan. 6. Pengembangan Kemampuan: Peningkatan kemampuan manajemen dan karyawan dapat membantu mengurangi perselisihan, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Pelatihan yang berkaitan dengan manajemen, hubungan industrial, dan hukum dapat membantu mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan mengelola konflik.	
	b. penyediaan informasi pasar kerja online.	Pada tahun 2022 telah dilakukan penyampaian informasi lowongan pekerjaan melalui media online yang dilaksanakan secara masif dan terstruktur melalui akun media sosial resmi Dinas. Rencana Di Tahun 2023 ini penyediaan pasar kerja online dapat dilakukan perluasan dan perbaikan dengan beberapa upaya-upaya sebagai berikut: 1. Menyediakan portal informasi pekerjaan: Portal informasi pekerjaan merupakan salah satu cara terbaik untuk menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, persyaratan kualifikasi, tawaran gaji, dan informasi penting lainnya. Portal ini dapat diakses secara online dan dapat	Tersampaiannya Informasi terkait lowongan pekerjaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mereka. 2. Menggunakan media sosial: Media sosial seperti LinkedIn, Twitter, Facebook, dan Instagram digunakan untuk membagikan informasi tentang lowongan pekerjaan dan perkembangan terbaru dalam pasar kerja. Media sosial dapat memperluas jangkauan informasi dan memudahkan pencari kerja untuk mengakses informasi pekerjaan. 3. Menggunakan algoritma pencocokan pekerjaan: Beberapa platform online menggunakan algoritma pencocokan pekerjaan untuk membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman mereka. Algoritma ini mempertimbangkan faktor seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan untuk menemukan pekerjaan yang cocok. 4. Menyediakan informasi tentang tren industri dan gaji: Informasi tentang tren industri dan gaji dapat membantu pencari kerja untuk memahami pasar kerja dan membuat keputusan yang tepat tentang pekerjaan. Informasi ini dapat disajikan dalam bentuk laporan dan infografis. 5. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan: Teknologi kecerdasan buatan seperti chatbot dan asisten virtual dapat membantu pencari kerja dalam pencarian pekerjaan. Chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan pencari kerja tentang lowongan pekerjaan, persyaratan kualifikasi, dan tawaran gaji, sementara asisten virtual dapat membantu pencari kerja membuat resume yang efektif. 6. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan: Program pelatihan dan pengembangan keterampilan online dapat membantu pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Program	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		ini dapat disediakan dalam berbagai format, seperti kursus online, webinar, dan video tutorial	
	c. Penyiapan dan pelatihan tenaga kerja pemula sesuai dengan tuntutan pasar kerja/kebutuhan industri.	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pelatihan dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 1072 orang dengan mempertimbangkan jenis pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga peserta yang mengikuti dapat langsung terserap kebutuhannya. Adapun rencana yang dapat dilakukan di Tahun 2023 dalam proses penyiapan dan pelatihan tenaga kerja pemula antara lain: 1. Kerja sama antara pihak industri dan pendidikan: Pihak industri dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menentukan kebutuhan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di industri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei kebutuhan tenaga kerja dan memberikan masukan tentang keterampilan yang dibutuhkan. 2. Program pelatihan dan sertifikasi: Program pelatihan dan sertifikasi dapat disediakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja. Program ini harus dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri. 3. Pengembangan kurikulum pendidikan: Kurikulum pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri. Kurikulum tersebut harus mengintegrasikan keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan di industri. 4. Program magang dan kerja sama dengan industri: Program magang dan kerja sama dengan industri dapat membantu tenaga kerja pemula memperoleh pengalaman kerja yang dibutuhkan. Hal ini dapat	Peningkatan SDM angkatan kerja dan peningkatan penempatan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		mempersiapkan tenaga kerja pemula untuk bekerja di industri dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari para profesional. 5. Pelatihan keterampilan teknologi: Tenaga kerja pemula harus dilatih dalam penggunaan teknologi terbaru yang digunakan di industri. Pelatihan keterampilan teknologi dapat dilakukan melalui kursus online, pelatihan langsung, atau program sertifikasi. 6. Pelatihan keterampilan soft skills: Keterampilan soft skills seperti komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal juga penting untuk sukses di pasar kerja. Pelatihan keterampilan soft skills dapat membantu tenaga kerja pemula memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja dan klien. 7. Evaluasi dan penyesuaian program: Program pelatihan dan pengembangan keterampilan harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri. Hal ini akan memastikan bahwa tenaga kerja pemula dilengkapi dengan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan di industri.	
	d. Dilaksanakannya job fair/bursa kerja.	Pada tahun 2022 Disnaker telah melaksanakan fasilitasi penempatan tenaga kerja (Job Fair mini) untuk perusahaan yang akan melaksanakan proses rekrutmen yang dilaksanakan di Disnaker dan rencana di tahun 2023 ini sebanyak 10 perusahaan telah mengikuti fasilitasi penempatan tenaga kerja (Job Fair mini)	Peningkatan potensi penempatan tenaga kerja
	e. Perluasan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja.	Pada tahun 2022 Disnaker telah melakukan perluasan pelaksanaan program penempatan kerja dengan melakukan program pemagangan, melaksanakan MOU dengan BNP2PMI terkait penempatan penempatan kerja luar negeri. Adapun rencana pada tahun 2023 adalah dengan melaksanakan kegiatan perlindungan pekerja migran (Pra dan Purna penempatan) pada aggaran	Optimalisasi program penempatan tenaga kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		perubahan 2023. Perluasan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja dilakukan dengan cara: 1. Melakukan Identifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja: 2. Kerja sama dengan perusahaan: 3. Peningkatan jaringan dengan pihak-pihak terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan asosiasi pekerja. 4. Pelatihan keterampilan 5. Pemasaran program penempatan tenaga kerja secara aktif melalui media sosial, website, iklan, brosur, atau even-even promosi lainnya.	
	f. Pemberdayaan melalui kegiatan wirausaha mandiri dan menyiapkan sarana prasarana pendukungnya.	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pelatihan berbasis masyarakat wirausaha mandiri melalui UPTD latihan kerja. Rencana tahun 2023 pelaksanaan pemberdayaan melalui wirausaha akan dilakukan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMK untuk diberikan bantuan dan pendampingan.	
B.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak.	Pencegahan Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak berfokus terhadap program perlindungan perempuan, dengan Mengadakan Sosialisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan Industri PT. KIEC / KSP, yang di tahun 2023 Akan membentuk Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebanyak 12 kelurahan.	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	b. Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan diorganisasi, instansi dan kelembagaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pemenuhan hak-hak perempuan yang bekerja di dalam suatu organisasi maupun instansi yakni dengan didirikannya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) pada tanggal 10 Desember 2019 yang berlokasi di	Pemenuhan hak perempuan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		kawasan Industri PT.KIEC yang sekarang berubah menjadi PT.KSP, masih berdiri dan masih berlanjut kegiatannya pada BINTEK RP3 di tahun 2023.	
	c. Advokasi perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan anak dari tindakan kekerasan fisik, seksual dan perdagangan orang.	Advokasi perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dan anak telah dilaksanakan koordinasi lintas sektor untuk pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menghasilkan rekomendasi dari setiap OPD untuk berkomitmen mendukung kegiatan pencegahan, penanganan dan melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rencana 2023 mengadakan rapat Koordinasi lintas sektor untuk pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rapat koordinasi perlindungan khusus anak dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perlindungan hukum terhadap perempuan
	d. Perlunya optimalisasi layanan rujukan lanjutan dan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota, menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PPA	Optimalisasi layanan rujukan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
	e. Perlunya pembinaan SDM bagi petugas yang melayani kasus kekerasan.	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota Tindak lanjut 2022 : • Pelatihan manajemen kasus 26 orang • Pelatihan mediator 2 orang	Peningkatan kapasitas petugas layanan korban kekerasan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Rencana 2023 - Akan memberikan pelatihan tentang sistem peradilan anak (SPA) kepada para OPD, Lembaga atau Instansi terkait yang menangani perlindungan anak - Pelatihan konselor 10 orang - Pelatihan mediator 2 orang	
	f. Penyediaan sarana prasarana untuk membentuk kota layak anak dengan penyediaan fasilitas kegiatan anak di setiap kecamatan.	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Koordinasi dan sosialisasi ke OPD-OPD terkait pengadaan sarana prasarana penunjang fasilitas kegiatan	Penyediaan sarpras kota layak anak
	g. Peningkatan penyediaan layanan yang menyangkut kualitas hidup anak.	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakannya pembinaan pada pihak-pihak pemerhati anak (OPD, Lembaga dan Instansi)	Penyediaan layanan kualitas hidup anak
	h. Perlunya sosialisasi hukum terkait perlindungan anak untuk mencegah kekerasan.	Pada Tahun 2022 kegiatan berfokus pada program-program dalam meningkatkan volume kualitas pembinaan dan sosialisasi dalam perlindungan khusus anak serta melakukan koordinasi dan kerjasama pada dunia usaha dan media massa dalam kegiatan perlindungan khusus anak.	Perlindungan anak
	i. Meningkatkan sosialisasi Program Keluarga Berencana.	Tahun 2022 Pada Program Pengendalian Penduduk: Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK sebanyak 43 kader PPKBD dan 286 Kader Sub PPKBD melakukan KIE tentang Program Bangga Kencana salah satunya tentang KB (DAK) Tahun 2022 Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):	Optimalisasi program keluarga berencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		1) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebanyak 15 Orang meikuti Pelatihan CTU (APBD) 3) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB sebanyak 352 Orang mengikuti Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung KB dan sebanyak 704 Orang Mengikuti Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN). Tahun 2023 : 1) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB terlaksananya KIE kepada kader PPKBD sebanyak 43 Orang 2) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB terlaksananya KIE kepada kader Sub PPKBD sebanyak 43 Orang 3) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebanyak 15 Orang meikuti Pelatihan CTU (APBD)	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		4) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya melakukan Pembinaan Pelayanan KB di 30 Faskes. 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB sebanyak 440 Orang akan mengikuti Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung KB dan sebanyak 660 Orang akan Mengikuti Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN).	
	j. Pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga.	Tahun 2022 Pelaksanaan Sub Kegiatan: Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dengan output : - Pembinaan anggota kelompok UPPKS/UPPKS sebanyak 40 peserta (menjahit) Tahun 2023 Pelaksanaan Sub Kegiatan: Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output : - Pembinaan anggota kelompok UPPKS/UPPKA sebanyak 32 orang	Peningkatan kesejahteraan keluarga
B.3	Pangan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan volume cadangan pangan yang cukup, sesuai yang dibutuhkan masyarakat.	Pada tahun 2022 telah dilakukan pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) kota cilegon sebesar 19,3 ton sementara stok CPPD Berdasarkan Hasil Berita Acara Rekon Bulog Per	Optimalisasi cadangan pangan Kota Cilegon

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Tanggal 31 Desember 2022 sebesar 94,167 ton sehingga total CPPD tahun 2022 sejumlah 113,48 ton dari target pencapaian CPPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 111 ton. Maka capaian kinerja Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar 102,23 %. Rencana tahun 2023 akan dilaksanakan pengadaan beras untuk CPPD sebesar 20, 695 ton. Dengan melaksanakan pengadaan CPPD maka pemerintah kota Cilegon telah menjalankan amanat Permentan No 11 Tahun 2018 tentang penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah Namun berdasarkan standar CPPD yang ditetapkan dalam Permentan sebesar 182 ton, sehingga masih ada kekurangan CPPD yang akan dipenuhi secara bertahap hingga akhir RPJMD.	
	b. Pengadaan gudang penampung cadangan pangan masyarakat sehingga waktu dibutuhkan penyaluran tidak membutuhkan waktu yang lama.	- Pada tahun 2022 dalam pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian CPPD dilakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Bulog. Meskipun pelaksanaannya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Bulog namun sampai saat ini belum menemui kendala dalam hal pengadaan penyimpanan maupun pendistribusian mengingat pengalaman Bulog yang sudah banyak berpengalaman menangani perberasan. - Pada tahun 2023 akan dilaksanakan kerjasama lanjutan dengan Bulog - Gudang penyimpanan pangan dan penyaluran cadangan pangan. Hal ini dilakukan mengingat untuk pengadaan / pembangunan gudang penampungan sendiri memerlukan lahan dan biaya yang besar maka sampai saat ini pelaksanaannya	dilakukan melalui kerjasama dengan Bulog

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	c. Melakukan optimalisasi penyediaan pangan lokal melalui pembinaan kepada petani lokal supaya mampu menyerap produk pangan masyarakat.	- Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan kepada KWT agar dapat memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong di sekitar rumah agar ditanami produk pangan segar, sehingga dapat menyerap produk pangan masyarakat. Dilakukan pembinaan sebanyak 64 KWT dengan perincian : KWT kecamatan Citangkil sebanyak 10 KWT, kecamatan Ciwandan sebanyak 23 KWT, kecamatan Gerem sebanyak 4 KWT, Kecamatan Pulomerak sebanyak 3 KWT, Kecamatan Cilegon sebanyak 5 KWT, Kecamatan Jombang sebanyak 7 KWT, Kecamatan Cibeber sebanyak 6 KWT, Kecamatan Purwakarta sebanyak 6 KWT. - Pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 70 KWT	Meningkatkan produksi pangan lokal dalam pemanfaatan pekarangan
B.4	Pertanahan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Penyelesaian urusan tanah perkantoran Pemerintah Daerah di aset milik PT. Krakatau Steel.	Pemkot masih berupaya untuk menyelesaikan urusan tanah perkantoran Pemerintah Daerah yang merupakan aset milik PT. Krakatau Steel, tetapi belum mencapai kesepakatan, sehingga selama proses tersebut, statusnya masih pinjam pakai.	Penyelesaian aset tanah
	b. Lebih optimal dalam menginventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.	Tanah kosong yang diinventarisasi pada tahun 2022 seluas 7.035 m ² , Sedangkan untuk pemanfaatan tanah kosong/lahan tidur akan diupayakan untuk bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk peningkatan produksi dan nilai tambah usaha sektor pertanian.	Inventarisasi asset daerah
B.5	Lingkungan Hidup. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Melakukan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.	Pada tahun 2022 penyusunan KLHS sudah dilakukan oleh DLH yakni KLHS RDTR Kecamatan Purwakarta Jombang	Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Selanjutnya pada tahun 2023 direncanakan penyusunan KLHS RDTR Kec. Cibeber Cilegon, KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan KLHS KRP Berisiko	
	b. Membuat survey indeks kepuasan Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup.	Pada tahun 2022 sudah dilaksanakan survey indeks kepuasan Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup oleh DLH untuk mengevaluasi sebaik mana pelayanan DLH kepada masyarakat dengan hasil survey Baik. Selanjutnya kegiatan survey indeks kepuasan Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup akan dilanjutkan di tahun 2023 karena merupakan indikator pelayanan DLH	Indeks kepuasan masyarakat
	c. Teknik pengangkutan sampah dilakukan pada malam hari.	Pada tahun 2022 DLH telah melakukan pengangkutan sampah dilakukan pada malam hari yakni dengan pembagian shift jam 14.00 sampai 22.00 yang baru dilakukan pada sebagian rute dan wilayah. Pada tahun 2023 direncanakan pengangkutan sampah dilakukan pada malam hari akan diperluas rute dan wilayahnya.	Pelayanan persampahan
B.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Melakukan pendataan penduduk secara tatap muka, karena pendataan secara online tidak terakomodasi secara menyeluruh.	Pada tahun 2022 disdukcapil melakukan mendekatkan objek layanan di tingkat kelurahan dan pada tahun 2023 bidang pendaftaran penduduk selain melakukan layanan secara online dan offline di dinas juga tetap melakukan pelayanan langsung di kelurahan dan di landmark kota cilegon.	Pemutakhiran data penduduk
	b. Melakukan upaya agar seluruh penduduk ber KTP elektronik.	Disdukcapil telah Melakukan layanan terintegrasi dari mulai online sd offline dan layanan langsung di beberapa titik layanan adapun untuk tahun 2023 tetap akan di laksanakan layanan online dan offline serta layanan di	Optimalisasi program KTP elektronik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		beberapa titik layanan untuk mempercepat penerapan penduduk ber KTP elektronik	
B.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan lembaga hukum adat.	Pelaksanaan program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan melaksanakan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kapasitas dan fungsi lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
	b. Pelayanan kelurahan berbasis informasi.	Kelurahan merupakan representasi Pemerintah Kota sebagai lini pelayanan terdepan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mengingat saat ini semakin cepatnya arus informasi dan teknologi sehingga kelurahan harus mampu beradaptasi memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Dukungan tersebut hal pertama adalah perlu ditunjang dengan Sumber daya manusia aparatur yakni pada tahun 2023 ini BKPSDM telah mengusulkan jabatan pranata komputer untuk mengisi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Cilegon.	Peningkatan kualitas layanan kelurahan berbasis digital
B.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan Jumlah keluarga produktif mengikuti program keluarga berencana.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota cilegon sampai dengan bulan desember 2022 sebanyak 71.833 dan yang menjadi peserta KB sebanyak 50.411 dengan persentase sebesar 70.18 %. Dan berdasarkan Perkiraan	Optimalisasi program keluarga berencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Permintaan Masyarakat (PPM) dari BKKBN sebanyak 46.073 akseptor DP3AP2KB telah mencapai target sebesar 109,42 %. Tahun 2023 akan terus dilakukan pelayanan KB pada : - sub kegiatan Pengendalian Program KKBPK sebanyak 310 akseptor - sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak Terlaksananya Pelayanan Cabut Implan 4 Akseptor, Pemasangan Implan 636 Akseptor, Pemasangan IUD 383 Akseptor, MOP 3 Akseptor dan MOW 23 Akseptor.	
	b. Meningkatkan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.	Tahun 2022 Pada Program Pengendalian Penduduk: • Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. • Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Keluarga berencana selalu dilaporkan setiap bulannya. Tahun 2023 : • Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 35 faskes • sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 2 balai selama 12 bulan akan terus dilaporkan setiap bulannya.	Optimalisasi program keluarga berencana
	c. Peningkatan program pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, dan pusat konseling remaja.	Dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Tahun 2022 • Pembinaan kader BKB, BKR, BKL masing-masing 35 orang, • Pembinaan anggota kelompok PIK-R 80 orang;	Optimalisasi program keluarga berencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Tahun 2023 - Pembinaan kader BKB, BKR, BKL masing-masing 32 orang - Pembinaan anggota kelompok Pik-R 110 orang	
B.9	Perhubungan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan penyediaan pelengkapan jalan diantaranya Pemasangan PJU.	Penyediaan PJU telah dilaksanakan melalui usulan reses dewan sebanyak 105 titik, pemasangan di jalan sultan sebanyak 24 titik di JLS 45 titik serta pemasangan PJU Lingkungan dari anggaran DPWkel sebanyak 246 titik tersebar diseluruh kelurahan.	Penerangan Jalan Umum
	b. Meningkatkan penyusunan anggaran dan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana jalan.	Pada tahun 2022 telah dianggarkan Pemeliharaan rambu lalu lintas sebanyak 16 unit, dan pemeliharaan PJU.	Pemeliharaan sarpras jalan
	c. Peningkatan pada program pengujian berkala kendaraan bermotor jenis pic up, truk barang, angkot dan bus.	Upaya untuk peningkatan pengujian kendaraan bermotor jenis pick-up, truk barang, angkot dan bus telah dilakukan melalui kartu uji smart card sebanyak 9500.	Pengujian kendaraan bermotor
	d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan ujian berkala kendaraan bermotor.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada tahun 2022, sebanyak 200 kendaraan.	Pengujian kendaraan bermotor
	e. Pemasangan dan Penambahan Rambu Jalan di Sepanjang Jalan Lingkar Selatan yang rawan kecelakaan.	Pada tahun 2022, pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan di JLS adalah PJU sebanyak 45 unit.	Peningkatan sarpras jalan
B.10	Komunikasi dan Informatika. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	a. Melakukan evaluasi secara berkala kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kota Cilegon.	Evaluasi berkala kemajuan SPBE sudah dilakukan, diantaranya adalah terkait pemanfaatan: (1) Esakip Kota Cilegon yang diinisiasi oleh Bappedalitbang Kota Cilegon untuk evaluasi kinerja OPD secara berkala, (2) KHAS Cilegon untuk penilaian kinerja individu pegawai, (3) Srikandi untuk administrasi surat menyurat secara digital, dan lain sebagainya	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	b. Meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi antar perangkat daerah, juga kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).	Koordinasi sudah dilakukan diantaranya adalah dengan bersurat kepada asisten deputy perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE pada Kemenpan RB RI di Jakarta, menambah SDM yang menguasai IT, serta menambah sarana dan prasarana untuk mendukung infokom diantaranya adalah dengan peningkatan jaringan wifi dan jaringan <i>fiber optic</i> .	Peningkatan kapasitas SDM TIK
B.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Ditingkatkan Program Pengembangan UMKM dari usaha mikro menjadi usaha kecil.	Dalam rangka meningkatkan Program Pengembangan UMKM dari usaha mikro menjadi usaha kecil, pada tahun 2022 Dinkop telah melakukan Pelatihan pembuatan Toko Online / Marketplace Digital	Pengembangan UMKM
	b. Dipermudah dan Pelonggaran Permodalan Koperasi dan UMK.	Pada tahun 2022 telah diberikan dana bergulir sebanyak 842 pelaku UMKM, dan rencana di tahun 2023 akan diberikan dana bergulir kepada 1.440 pelaku UMKM	Kemudahan pinjaman modal
	c. Diperlukan Gudang Penyimpanan Produk Bahan Baku.	Pada tahun 2022 Produk Input (kedelai) tidak bisa terlalu lama disimpan di dalam gudang karena akan busuk Rencana pada tahun 2023, akan terus diupayakan untuk menambah kerjasama dengan pengrajin tahu, tempe dan emping dalam rangka peningkatan pendapatan UPTD PDB	Pembangunan gudang bahan baku produk

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
B.12	Penanaman Modal. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Perlu Peningkatan Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.	Pada tahun 2022, telah disusun kajian akademis tentang RUPM Naskah akademis Perda Penanaman Modal, Naskah Akademis tentang Insentif dan berusaha Pada tahun 2023 akan dilaksanakan Pembahasan dan penetapan RUPM, Raperda Penanaman Modal, Raperda tentang Insentif dan berusaha	Peningkatan iklim penanaman modal
	b. Diperlukan penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha	Pada tahun 2022 telah dilakukan Penyusunan peta potensi investasi berbasis Digital. Pada tahun 2023 akan dilaksanakan Pemutahiran/update data Potensi Investasi	Peta potensi dan peluang usaha
	c. Perlu Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sudah dilakukan sehingga capaian target Pemantauan terhadap pelaku usaha pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target, yaitu sebanyak 100 pelaku usaha	Pemantauan Penanaman Modal
B.13	Kepemudaan dan Olahraga. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	1. Pemanfaatan Stadion Geger Cilegon sebagai Pusat kegiatan keolahragaan seluruh cabang.	1. Stadion Geger Cilegon secara fisik belum sepenuhnya selesai dan siap digunakan sesuai dengan standar dana ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lanjutan Diantaranya pembenahan saluran air, toilet, listrik, pengolahan air limbah, pagar, plafon, tempat parkir, dll) 2. Perlu dilakukan Revisi Masterplan dan DED Stadion 3. Penerangan akses jalan masuk stadion 4. Standarisasi Assesment Stadion	Pemanfaatan Stadion Geger Cilegon

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	1. Diperlukan even setingkat Kota untuk semua jenis cabang olah raga agar tumbuh atlit atlit berbakat	Pelaksanaan event olahraga di tingkat Kota memerlukan persiapan secara menyeluruh dengan melakukan Pembinaan atlit pelajar (SD/MI, SMP/MTS dan SKH) untuk mencari bibit-bibit potensial Olahraga. Yang akan dilakukan yakni adalah meningkatkan peran PLCOB untuk pembinaan dan seleksi atlit berprestasi serta Pemberian reward kepada atlit berprestasi yang membawa nama baik kota cilegon	Penjaringan bakat atlit olahraga tingkat kota
	2. Perlu ditingkatkannya Pelatihan Kepemudaan yang meliputi unsur Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelaan	Penambahan output pada subkegiatan pada subkegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelaan pemuda Perlu ada sinkronisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait Perlu dilaksanakan kegiatan kembali BPAP (bakti Pemuda Antar Provinsi), PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) dan KPN (Kapal Pemuda Nusantara)	Peningkatan kompetensi pemuda
	3. Menggiatkan kembali Kepramukaan sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda	Perlu dilaksanakan kembali kegiatan LTUB (Lomba Tata Upacara Bendera) tingkat SD, SMP dan SMA pada subkegiatan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Peran kader pramuka
B.14	Statistik. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang lebih baik.	Untuk meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, pada tahun 2022 telah ditetapkan regulasi Perwal No. 36 Tahun 2022 tentang Satu Data Cilegon dan Kepwal tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Kota Cilegon. Pada tahun 2023 akan disusun Juknis dan SOP Penyelenggaraan Satu Data	Peningkatan data statistik sektoral
	b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah, belum optimal karena masih terbatasnya SDM statisi	Peningkatan kapasitas SDM Statistik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		disemua OPD, upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah melalui bimtek metadata dan coaching klinik aplikasi satu data.	
B.15	Persandian. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, adalah Melakukan Pelatihan CISRT (Computer Incident Security Response Team) kepada Internal Kominfo agent CISRT seluruh OPD -Berkoordinasi dengan BSrE(Balai Sertifikat Elektronik) sebagai penerbit sertifikasi elektronik untuk pemerintah. Selain itu juga dilaksanakan melalui bintek, pelatihan, kursus seminar terkait dengan keamanan informasi.	Keamanan informasi pemerintah daerah
	b. Mengoptimalkan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	Optimalisasi Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sudah dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya keamanan informasi, penyusunan regulasi, SOP, sumberdaya infrastruktur dan sumber daya lainnya.	Pengamanan persandian dan informasi
B.16	Kebudayaan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Daerah Cilegon dalam bentuk Lomba Silat dan Golok Day.	Pada tahun 2023 akan diselenggarakan lomba silat dengan 2 kategori umur yaitu umur 9 – 13 th dan umur 14 – 18 th. Kegiatan Golok Day akan dilaksanakan pada HUT Kota Cilegon atau awal bulan Mei tahun 2023	Pengembangan kebudayaan daerah
	b. Penambahan Cagar Budaya di Cilegon.	Pada tahun 2023 akan dilakukan proses penambahan cagar budaya, dimana objek yang diduga cagar budaya yang akan di kaji antara lain : 1. SD Negeri 2 Cilegon 2. Makam Ki Arya Sintok	Penambahan cagar budaya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		3. Makam Ki Buyut Somad 4. Makam Syech Jamaludin 5. Makam Ibrahim Bin Fulan 6. Makam Tumenggung Jayalana	
	c. Pengembangan Cagar Budaya sebagai tempat belajar juga kegiatan Pariwisata.	Pengembangan Cagar budaya dimanfaatkan sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan bagi pelajar. Salah satu cara memperkenalkan pelajar tentang keberadaan cagar budaya di Cilegon adalah dengan kegiatan outing class.	Pengembangan cagar budaya
	d. Mengembangkan Kurikulum Budaya Cilegon ke dalam Pendidikan Formal.	Pada Tahun 2022 kurikulum budaya sudah masuk kedalam pendidikan formal di tingkat SD dan SMP yaitu mulok bahasa jawa nalek dan ditahun 2023 akan diselenggarakan mulok pencak silat	Pengembangan kurikulum budaya
	e. Penambahan anggaran untuk Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya dan Balai Budaya.	Terdapat penambahan anggaran di tahun 2023 pada kegiatan : Pengelolaan cagar budaya dari pagu Rp 49.997.722,- menjadi Rp 52.500.000,- Serta Pelestarian kesenian tradisional UPTD Balai Budaya dari pagu Rp 50.000.000,- menjadi Rp 154.549.750,-	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan balai budaya
	f. Pelestarian dan pengembangan sejarah Kota Cilegon.	Pada Tahun 2023 akan Melanjutkan proses pengusulan pahlawan nasional KH. Wasyid dan KH Arsyad Thowil	Pelestarian sejarah Kota Cilegon
B.17	Perpustakaan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Dibutuhkan Pembangunan Perpustakaan Daerah yang representatif sebagai Pusat studi dan pengembangan literasi masyarakat.	Kondisi saat ini kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan dijadikan perpustakaan daerah sehingga gedung perpustakaan yang dimiliki belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan sehingga tindak lanjut di tahun 2022 adalah pengadaan lahan perpustakaan sehingga rencana di	Pembangunan perpustakaan daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		tahun 2023 adalah Pembuatan DED Gedung perpustakaan dan pembuatan sertifikat tanah.	
	b. Terus mengupayakan kenaikan indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Pada Tahun 2022 telah dimulai proses pendataan IPLM sesuai dengan pedoman perpustnas sehingga pada tahun 2023 ini direncanakan penganggaran pengukuran IPLM secara mandiri	Peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat
	c. Peningkatan Pengembangan Program Perpustakaan Elektronik	Tindak lanjut 2022 : pelatihan gerakan unggah konten lokal (Gagah Total) Rencana 2023 : optimalisasi gerakan unggah konten lokal (Gagah Total)	Peningkatan layanan perpustakaan secara elektronik
	d. Perlu penambahan buku buku elektronik dan buku bacaan secara berkala untuk koleksi Pustaka.	Tindak lanjut 2022 : penambahan koleksi ebook di aplikasi iCilegon Rencana 2023 : penambahan koleksi ebook di aplikasi iCilegon	Penambahan buku elektronik
	e. Sosialisasi Budaya Baca kepada seluruh lapisan masyarakat.	Tindak lanjut 2022 : pemberian penghargaan lomba bercerita, pemilihan duta baca dan literasi berbasis inklusi sosial Rencana 2023 : pemberian penghargaan lomba bercerita, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	Pemasyarakatan budaya baca
B.18	Kearsipan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	a. Dilaksanakan secara maksimal penciptaan dan penggunaan Arsip di setiap Instansi.	Tindak lanjut 2022 : pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan Rencana 2023 : peningkatan pengawasan dan pembinaan kearsipan OPD dengan cara : 1. Membuat kebijakan arsip yang jelas dan teratur. Setiap instansi harus memiliki kebijakan arsip yang jelas dan teratur, yang mencakup klasifikasi dan kriteria penyimpanan, rentang waktu penyimpanan, jenis dokumen yang perlu diarsipkan, dan cara mengatur dan memelihara arsip. 2. Menerapkan sistem manajemen arsip yang efektif. Setiap instansi harus memiliki sistem manajemen arsip yang efektif dan terus menerus ditingkatkan. Sistem ini harus mencakup teknologi yang sesuai, seperti software arsip, serta prosedur yang jelas untuk pengarsipan, pengecekan, penyimpanan, pemindahan dan penghapusan arsip. 3. Melakukan pelatihan dan pengawasan pada staf yang bertanggung jawab untuk pengarsipan. Setiap instansi harus melakukan pelatihan dan pengawasan pada staf yang bertanggung jawab untuk pengarsipan, agar memahami betul tentang kebijakan dan sistem manajemen arsip yang telah dibuat. 4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip. Setiap instansi harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen dalam arsip. Selain itu, akses ke arsip harus dibatasi hanya kepada pihak yang memiliki kepentingan, dan dokumen penting harus dilindungi dengan cara membatasi akses dan menggunakan sistem pengamanan fisik atau teknologi. 5. Melakukan audit secara berkala. Setiap instansi harus melakukan audit berkala pada sistem manajemen arsip yang telah dibuat, termasuk pengecekan kelengkapan arsip, ketepatan prosedur	Optimalisasi pemanfaatan arsip

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		pengarsipan, pemeliharaan arsip, serta keamanan dan kerahasiaan dokumen.	
	b. Memaksimalkan pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.	Tindak lanjut 2022 : pelaksanaan pendataan, penataan dan akuisisi arsip OPD Rencana 2023 : peningkatan pendataan, penataan dan akuisisi arsip OPD dengan cara : 1. Akuisisi arsip statis yang cermat. 2. Pengolahan arsip statis yang teratur. 3. Preservasi arsip statis yang tepat 4. Akses arsip statis yang mudah. 5. Melakukan pengawasan dan audit secara berkala.	Akuisisi arsip
	c. Dilakukan Kegiatan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang.	Tindak lanjut 2022 : belum terakomodirnya kegiatan Rencana 2023 : belum terakomodirnya kegiatan	Autentisitas arsip statis
	d. Seluruh Perangkat Daerah Memiliki Ruang Arsip Khusus yang terawat dan terpelihara untuk	Tindak lanjut 2022 : memberikan arahan/himbauan kepada OPD untuk menyediakan record center sebagai tempat arsip	Peningkatan sarana prasarana kearsipan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	mencegah arsip dari kerusakan akibat rayap maupun kebocoran.	Rencana 2023 : memberikan arahan/himbauan kepada OPD untuk menyediakan record center sebagai tempat arsip	
	e. Mengoptimalkan Sosialisasi ataupun bimbingan tentang tata Kelola arsip.	Tindak lanjut 2022 : Bintek pengelola arsip Rencana 2023 : Bintek pengelola arsip	Peningkatan tata kelola arsip
C	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN		
C.1	Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Perlu fasilitasi program Pengelolaan Perikanan Tangkap secara maksimal.	Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pengadaan buffer stock sarana budidaya tanaman - Pada tahun 2023 direncanakan dilaksanakan Pengadaan buffer stock sarana budidaya tanaman dan pengadaan alsintan berupa mesin pompa air dan handtraktor. Fasilitasi Pemberian rekomendasi untuk nelayan adalah untuk membantu nelayan dalam hal memperoleh syarat perijinan yang mana dengan dilakukannya fasilitasi ini maka akan memudahkan nelayan dalam pembelian BBM jenis tertentu yang akan digunakan nelayan untuk operasional penangkapan ikan Monitoring spot ikan dilakukan untuk mengetahui sumber daya perikanan tangkap yg ada di Perairan Kota Cilegon sebanyak 2 titik.	Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Peningkatan Pengembangan Budi daya perikanan air tawar dan laut yang sangat dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha seperti: ikan Lele, lobster, kakap dll.	Pada tahun 2022 telah terlaksana Pelatihan Budidaya ikan, Pembinaan dan penyuluhan serta penanganan penyakit pada ikan sebanyak 300 Pembudidaya. Kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan pembuatan pakan, pemberian obat-obatan ikan serta memberikan informasi cara budidaya ikan yang baik dan benar juga pembinaan kelembagaan kelompok dimana dari	Pengembangan budi daya perikanan air tawar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		kegiatan yang dilakukan maka terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 15 kelompok dan t Pada tahun 2023 Adanya Pelatihan budidaya Ikan air tawar, Sekolah Lapang Perikanan, pembinaan dan penyuluhan serta penanganan penyakit ikanerdata ada 350 Orang pembudidaya. Kegiatan Pelatihan Budidaya ikan, Pembinaan dan penyuluhan serta penanganan penyakit pada ikan dilakukan untuk menjawab persoalan masih rendah nya SDM pembudidaya ikan. Oleh karena itu diharapkan tumbuh pembudidaya baru dan ada pengkatan produksi budidaya ikan air tawar yaitu ikan lele dan nila. Pelatihan dilakukan untuk dapat memberikan informasi teknologi cara budidaya ikan yang baikagar dapat meningkatkan produksi ikan air tawar	
	c. Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dengan program pelatihan dan bantuan alat.	Pada tahun 2022 dilaksanakannya pelatihan keselamatan dasar nelayan sebanyak 30 nelayan Tanjung Leneng Ciwandan. Sedangkan di tahun 2023 dilakukan pelatihan Perbaikan / Perawatan kapal/perahu, adanya pelatihan Keselamatan Dasar. Pelatihan keselamatan dilakukan karena rendahnya kesadaran nelayan dalam hal antisipasi resiko kerja sehingga perlu diberikan pemahanan akan keselamatan dasar dalam menangkap ikan dilaut serta memberikan beberapa peralatan keselamatan dasar agar tersedia di kapal nelayan.	Pemberdayaan nelayanan kecil
	d. Peningkatan Fasilitas Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.	Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi existing medaksa sebagai lokasi Sentra Nelayan masih terdapat pemukiman penduduk sehingga harus ditertibkan atau direlokasi agar dapat dilakukan pembangunan sentra nelayan disamping itu juga karena alur pelayaran belum ditentukan secara lengkap oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten yang mana lembaga ini memiliki kewenangan tertinggi dalam hal pengawasan	Pembangunan tempat pelelangan ikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. - Pada tahun 2023 Studi kelayakan TPI dan sosialisasi tentang pelayanan dan pengelolaan TPI	
C.2	Pariwisata. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Pengembangan cagar Budaya sebagai Objek Wisata	Secara umum pelaksanaan kegiatan urusan pariwisata di tahun 2022 tidak optimal, yang terkendala dengan adanya perubahan pelaksana kegiatan, sebagai akibat dari adanya perpindahan pelaksanaan kewenangan urusan pariwisata dari Disbudpar kepada Dispora yang dibarengi dengan mutasi/promosi SDM pelaksana. Rencana pengembangan ODTW di tahun 2022 adalah pada pengembangan ODTW situ rawa arum dan wisata kuliner. Namun secara anggaran hal ini belum dapat terealisasi di tahun 2022	Pengembangan cagar budaya
	b. Pengembangan Objek Wisata Pantai, Pulau, Gunung, Industri, Cagar Budaya, Kesenian Daerah, Kuliner dan Religi.		Pengembangan objek daya tarik wisata daerah
	c. Peningkatan Kapasitas SDM yang terlibat dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf, dilakukan melalui kolaborasi dengan PHRI, namun upaya ini belum dapat terlaksana di tahun 2022.	Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	d. Penyediaan Data Objek wisata dan sarana pendukung lainnya secara digital.	Pengembangan data objek wisata secara digital dilakukan melalui media-media elektronik milik Pemda, khususnya website dan IG Pemerintah Daerah.	Data digital obyek wisata daerah
	e. Peningkatan dan Pengembangan akses Wisata.	Fokus pengembangan akses wisata adalah kepada akses situ rawa arum, dengan prioritas awal kepada pembangunan akses jalan ke situ rawa arum.	Peningkatan akses ke tempat wisata
C.3	Pertanian. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	a. Peningkatan Pendampingan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian.	Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pengadaan buffer stock sarana budidaya tanaman - Pada tahun 2023 direncanakan dilaksanakan Pengadaan buffer stock sarana budidaya tanaman dan pengadaan alsintan berupa mesin pompa air dan handtraktor	Peningkatan Sarana Pendukung Pertanian
	b. Pemanfaatan lahan tidur untuk Perluasan lahan Pertanian.	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan analisa awal jumlah sebaran lahan tidur di kota Cilegon. Untuk melakukan Pemanfaatan lahan tidur untuk Perluasan lahan Pertanian perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu sebab lahan tidur yang ada sebagian besar adalah milik pengembang permukiman dan milik industri yang belum dimanfaatkan sehingga perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik lahan. Pada tahun 2023 direncanakan dilakukan analisa bentuk kerjasama dan koordinasi dengan pemilik lahan	Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur
	c. Fasilitas Bibit, Pupuk dan Obat Hama Tanaman untuk peningkatan Produksi Pertanian.	Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pengadaan / fasilitas bibit tanaman buah tahunan dan perkebunan, pupuk dan obat hama penyakit tanaman. Direncanakan pada tahun 2023 Pengadaan bibit tanaman buah tahunan, pupuk dan obat hama penyakit tanaman	Fasilitas peningkatan produksi pertanian
	d. Optimalisasi Program Kegiatan Pembuatan Kawasan Pertanian Terpadu.	Pada tahun 2022 dilaksanakan : - Kegiatan penanaman Bambu disepanjang area yang akan dilakukan pemagaran kawat berduri untuk penghijauan dan menambah nilai estetika. - Reviu DED Pemasangan Listrik KPT - Reviu DED Instalasi Air Tanah Dalam KPT - Perencanaan Stake Out Badan Jalan KPT, dan - Pengadaan Patok untuk menunjang kegiatan stake out badan jalan KPT	Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Seharusnya ada Pembangunan Pagar pada Kawasan Pertanian Terpadu namun tidak bisa direalisasikan pada ABT 2022 dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, 2 Bidang Tanah KPT belum bisa tersertifikasi karena proses pensertifikasian yang masih berlangsung, untuk satu bidang tanah menunggu hasil cek lokasi dan satu bidang lainnya dalam tahap pengecekan dokumen di BPN. Rencana TA. 2023 : - Pembangunan Pagar Kawat Berduri pada Kawasan Pertanian Terpadu. - Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Pertanian Terpadu. - Pemasangan Instalasi Sumur Air Tanah Dalam Kawasan Pertanian Terpadu.	
C.4	Perdagangan. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Diperlukan program peningkatan pendapatan melalui retribusi dan penagihan terkait tunggakan dalam proses perdagangan.	Telah melaksanakan MOU Kerjasama atau Pendampingan Hukum bersama dengan Kejari (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Retribusi Pasar), dan pada Tahun 2023 Pendampingan Hukum masih akan dilaksanakan;	Peningkatan retribusi pasar
	b. Percepatan tindak lanjut program revitalisasi Pasar mengarah pada pasar tradisional Modern.	Pada Tahun 2022 sudah ada rencana Pembangunan Gudang/ Cold Storage dalam rangka memenuhi target Pasar Ber-SNI, namun terkendala waktu pelaksanaan. Pada Tahun 2023 masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bertujuan memenuhi standar Pasar Ber-SNI seperti Landscape Taman; Manajemen Mutu ISO 9001:2015; Penyebaran Media Informasi di Sekitar Pasar; Handy Talkie (Atribut Keamanan); dan Plang Zonasi dan CCTV.	Pembangunan Pasar ber SNI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	c. Melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Pasar secara Intensif.	Pada Tahun 2022 sudah melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, pelatihan Tenaga Keamanan Pasar, serta Penyediaan Tenaga Keamanan dan Kebersihan Pasar. Dan pada tahun 2023 akan tetap melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan dan penyediaan tenaga keamanan dan kebersihan pasar. Memberikan pelayanan dan menambah pengetahuan bagi pengelola sarana distribusi perdagangan dalam mengelola sarana distribusi perdagangan (pasar) sesuai dengan standar pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) agar lebih baik.	Peningkatan pengelolaan Pasar
	d. Peningkatan Pengendalian Ketersediaan Bahan Pokok	Beberapa hal yang telah dilakukan dan selalu dilakukan setiap tahun anggaran diantaranya pelaksanaan kegiatan Prognosa Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok serta Pemantauan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Pasar; Bazar Murah; dan Operasi Pasar;	Pengendalian Bahan Pokok
	e. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kemitraan Pelaku Usaha UMK dengan Toko Swalayan (Mini Market) dalam bentuk pemasaran dan keikutsertaan pelaku usaha UMK dalam pameran perdagangan Pada tahun 2023 akan melanjutkan kemitraan pelaku usaha dan keikutsertaan dalam pameran perdagangan	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
	f. Pelatihan dan fasilitasi Pemasaran Produk dalam Negeri.	Pada Tahun 2022 telah ikut serta dalam Kegiatan Trade Expo Indonesia skala Nasional dengan membawa sejumlah produk unggulan seperti: • Batik Krakatoa; • OCE Indonesia (Eco Print Design); • Craft 3D (Kerajinan Tangan); • Art Jewelry (Terumbu Karang);	Pemasaran produk dalam negeri

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Cangkul.	
C.5	Perindustrian. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk :		
	a. Memberikan bantuan peralatan penunjang produksi bagi IKM sesuai dengan regulasi.	Disektor Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture pada Tahun 2022 memberikan fasilitasi/ bantuan pendukung produksi IKM untuk olahan pangan berupa : Dandang perebusan kedelai, Dandang perendaman kedelai, Denggiling daging, Panci presto, Alat pelembut daging, Alat pemotong kentang, Mixer, Mesin Retort vertical, Mesin blending sabun, Sedangkan di tahun 2023 akan ada penambahan alat berupa Alat Hand Sealer dan Mesin Spinner/Peniris Pada sektor Industri Logam, Mesin, Kimia, Elektronika dan Alat Angkut, di tahun 2022 Disnaker Kota Cilegon memberikan fasilitasi mesin pencacah plastik, dan ditahun 2023 akan memberikan alat straping clamp dan mesin CNC Cutting.	Fasilitasi Industri Kecil Menengah
	b. Menambah kuota dan Memberikan pelatihan tentang produk pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang di kenakan SNI wajib	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi wajib SNI bagi IKM dan Rencana tahun 2023 sudah ada kuota 2 IKM yang akan di sertifikasi SNI	Pemenuhan produk IKM yang ber-SNI
	c. Memberikan fasilitasi sertifikasi SNI.	Pada tahun 2022 telah difasilitasi 2 IKM yang terserifikasi SNI untuk jenis minyak sawit dan mainan anak	Pemenuhan produk IKM yang ber-SNI
D	PENCAPAIAN 19 PROGRAM PRIORITAS & JANJI POLITIS		
	Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon, Untuk: Diperlukannya pembentukan Lembaga atau Tim yang mengkoordinasikan seluruh manfaat dari Program Kartu KCS, yang melibatkan	Secara program, pelaksanaan 4 program utama KCS yaitu beasiswa sarjana, kepesertaan JKN, pinjaman modal usaha, dan pelatihan tenaga kerja, menjadi prioritas pada RKPD dan secara konsisten telah terlaksana. Evaluasi terhadap KCS saat ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap	Evaluasi Program Kartu Cilegon Sejahtera

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Perangkat - Perangkat Daerah Teknis, sehingga ada kejelasan informasi dan arah kebijakan kepala daerah terkait Manfaat Kartu Tersebut.	pelaksanaan APBD, dan tidak dibentuk tim khusus untuk mengevaluasi program ini.	
E	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN & PENUGASAN		
	Sepanjang Tahun Anggaran 2021, Kota Cilegon tidak memperoleh Tugas Pembantuan & Penugasan dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi Banten. Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon : Mengintensifkan Koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian.	Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan koordinasi yang intensif untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan daerah dari anggaran non APBD baik berupa APBN (TP) maupun anggaran swasta (CSR). Meskipun secara nominal, Pemerintah Kota Cilegon tidak memperoleh anggaran TP di tahun 2022, namun upaya ini membuahkan hasil di tahun 2023, antara lain dengan mendapatkan alokasi untuk pembangunan jalan lingkaran selatan sekitar 200 milyar bertahap di tahun 2023 dan 2024 serta anggaran untuk <i>scale up</i> pengolahan sampah menjadi BBJP dari Kementerian PU PR dengan sekitar 100 milyar yang bersumber dana dari APBN.	Koordinasi yang intensif ke Provinsi Banten dan Kementerian
D	CATATAN STRATEGIS LAINNYA		
	Sebagai upaya untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan kami sampaikan Catatan-catatan strategis yang menjadi Rekomendasi DPRD Kepada Pemerintah Kota Cilegon adalah sebagai berikut :		
	a. Silpa yang cukup besar, diperlukan optimalisasi pengawasan internal, yang dikoordinasikan oleh Wakil Walikota Cilegon sebagai salah satu tupoksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Upaya peningkatan penyerapan anggaran serta perencanaan anggaran yang terukur merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong penurunan SILPA. Peningkatan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dilkakukan sejak dari tahap perencanaan kegiatan hingga ke pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi berkala terhadap progress penyerapan secara berkala secara berjenjang serta monitoring lapangan secara intensif, sehingga SILPA di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.	Silpa yang cukup besar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	b. Penambahan Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran DPRD.	APBD tahun 2022 telah mengakomodir pelaksanaan pokok pokok pikiran DPRD. Peningkatan kualitas sinkronisasi antara pokok pikiran dalam RKPD terus ditingkatkan melalui kepatuhan terhadap <i>timeline</i> perencanaan serta pelaksanaan survey terhadap usulan sejak tahap penyusunan rancangan RKPD. Adapun penambahan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.	Dukungan pelaksanaan pokok pokok pikiran DPRD
	c. Uraian Silpa dapat dijelaskan secara rinci seperti efisiensi hasil lelang, sisa kegiatan, gagal lelang dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena salah kode rekening ataupun tahapan pelaksanaannya dikarenakan ada regulasi baru.	SILPA tahun 2021 sebesar 269,5 milyar, meliputi sisa dari anggaran belanja pegawai sebesar 232 milyar, hasil efisiensi dan belanja yang tidak terserap sebesar 315 milyar serta pendapatan daerah yang tidak tercapai sebesar 78 milyar.	Rincian SILPA
	d. Pembuatan SOP dalam setiap kegiatan, agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tahapan, terutama pada kegiatan fisik dan pengadaan tanah.	Penyusunan SOP di seluruh perangkat daerah merupakan bagian dari rencana aksi pencapaian reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah.	SOP kegiatan
	e. Kepada PT. PCM, perlu dilakukan percepatan pembangunan Pelabuhan sesuai tahapan yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dan Direksi.	Pemerintah Daerah saat ini tengah gencar melakukan penjajangan dengan pihak investor dalam upaya percepatan pembangunan pelabuhan. Upaya ini telah mengerucut terhadap beberapa calon investor prioritas.	Percepatan pembangunan pelabuhan
	f. Kepada PT. BPRS-CM, perlu dilakukan percepatan pemulihan kondisi keuangan dengan melakukan inovasi sehingga NPF bisa di tekan, dan kepada Komisaris dan Dewan Pengawas lebih aktif dalam pengawasan dan berkoordinasi dengan Pemegang Saham (Walikota) untuk meminimalisir hal-hal yang berdampak negative pada kinerja BPRS-CM.	Pasca persoalan hukum dengan indikasi kejahatan perbankan yg menyebabkan PT. BPR Syariah Cilegon Mandiri kembali masuk pada kriteria Bank Dalam Pengawasan Intensif di tahun lalu dengan Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Finance/NPF) mencapai angka 54% yg berdampak pada kerugian mencapai angka 21,6 Milyar Rupiah berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2021. PT. BPR Syariah Cilegon, pada tahun 2022 Mandiri telah melakukan beberapa langkah strategis diantaranya;	Percepatan pemulihan kondisi keuangan PT BPRS

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		1. Melakukan Write Off atau Hapus Buku atas pembiayaan bermasalah dengan kriteria Kolektabilitas 5; 2. Melakukan restrukturisasi pembiayaan dan perikatan ulang dengan nasabah debitur yg dinilai berpotensi bermasalah; 3. Melakukan penambahan direksi melalui proses seleksi terbuka; 4. Melakukan pembenahan Standard Operasional Prosedur dan Tata Kelola Perusahaan; 5. Pembenahan pembiayaan lending melalui mekanisme yang aman dan sesuai prosedur perbankan khususnya pada segmen2 konsumtif; 6. Melakukan penagihan intensif; 7. Melakukan koordinasi/komunikasi intensif dengan stakeholders khususnya dewan komisaris, pemegang saham pengendali (walikota) dan pembina BUMD (Sekda, Asda II & kabag ekonomi) Hasil dari upaya-upaya tersebut adalah; pada Bulan November 2021 PT. BPR Syariah Cilegon Mandiri dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sudah dinyatakan Sehat dan keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Kabar baik lainnya, berdasarkan informasi dari Direksi PT. BPR Syariah Cilegon Mandiri, pada bulan maret posisi Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Finance sudah berada di angka 9,7%	
	g. Kepada PDAM, perlu peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Cilegon dan inovasi yang baik dan mencari sumber air baku dengan bekerjasama dengan BPPT melalui Teknologi Reverse Osmosis Arsinum dalam pengolahan air laut menjadi air siap minum dalam upaya meningkatkan kinerja PDAM dalam melayani masyarakat.	Peningkatan pelayanan PDAM didorong melalui perluasan jaringan perpipaan, berbagai upaya penurunan angka kebocoran serta pencarian sumber air baku dengan prioritas pada penyiapan resevoir dan penyiapan jaringan perpipaan dari kuota air bendungan sindangheula serta renegosiasi dengan PT KTI untuk mendapatkan tambahan kuota air bersih.	Inovasi pelayanan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (N-1)	Tindak Lanjut di 2022 & Rencana di 2023	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	h. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon, agar dapat mengejar target RPJMD dan Visi Misi Walikota, dengan penerapan Reward dan Punishment.	Melalui Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai, yang mensyaratkan pencapaian kinerja individu dan lembaga dalam pemberian TPP. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam penerapan reward dan punishment bagi seluruh Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi upaya strategis dalam menindaklanjuti MCP KPK dan peningkatan Indeks RB.	Penerapan reward and punishment untuk mendorong kinerja
	i. Kepada Pemerintah Kota Cilegon, Terkait Jenjang Karir Aparatur Sipil Negara, Agar Ada Jenjang Kepangkatan Dan Kepastian Kompetensi Setiap Pegawai ASN Untuk Bisa Berkarir Secara Dinamis Yang Diatur Oleh Perda Maupun Perkada Dengan Mengacu Kepada Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.	Pada Tahun 2022, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), BKPSDM Kota Cilegon telah melakukan pembahasan dan penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Cilegon sebagai bentuk penyempurnaan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Pembahasan dan penyusunan Draft Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Cilegon akan dilanjutkan kembali dan akan disahkan sesegera mungkin pada Tahun 2023. Dalam hal pengembangan kompetensi, pada Tahun 2022 BKPSDM Kota Cilegon telah melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai untuk Jabatan Esselon II, III dan IV. Hasil dari Penilaian Kompetensi ini dapat menjadi dasar dalam penempatan pegawai agar tidak ada lagi kesenjangan kompetensi pada jabatan yang ditempati. Selanjutnya pada Tahun 2023, BKPSDM Kota Cilegon akan membangun UPT Assessment Center untuk memenuhi kebutuhan Penilaian Kompetensi bagi seluruh PNS di Pemerintah Kota Cilegon. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi, BKPSDM telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai yang nantinya akan menjadi sebuah Dokumen yang menjadi acuan dalam Proses Pengembangan Kompetensi masing-masing Pegawai.	Peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN Pemerintah Kota Cilegon.

3.4 Pencapaian 19 Program Prioritas & Janji Politik

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
PP 1 - Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN			
KP 1.1	Proyeksi Kebutuhan Pegawai berdasarkan pencapaian prioritas pembangunan	Proyeksi kebutuhan pegawai sebagai dasar pengajuan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk penerimaan CPNS di tahun 2021. Di tahun 2021 telah dilaksanakan Seleksi CASN berdasarkan Keputusan Menpan No 797 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemkot Cilegon TA. 2021, dengan kuota sebanyak 576 orang meliputi 30 orang CPNS teknis, 35 orang CPNS tenaga kesehatan, 494 P3K Tenaga guru, 4 orang P3K tenaga kesehatan dan 13 orang P3K tenaga teknis.	Usulan kebutuhan pegawai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan organisasi perangkat daerah melalui Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan Modul Pengembangan Kompetensi dan Sistem Informasi Kinerja serta Akselerasi Penetapan Peta Jabatan dan Rencana Kebutuhan Pegawai untuk Jangka Menengah 5 Tahun berdasarkan Anjab dan ABK yang telah disusun.
KP 1.2	Implementasi sistem mutasi ASN yang terbuka dan kompetitif	Pelaksanaan mutasi antar instansi telah mempedomani Perka BKN No 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	Implementasi sistem mutasi ASN yang terbuka dan kompetitif sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
KP 1.3	Implementasi HCDP	Dokumen Human Capital Development Plan atau rencana pengembangan sumber daya manusia telah disusun di tahun 2021 melalui kajian di Bidang Litbang Bapeda. Dokumen ini disusun sebagai panduan bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan pengembangan kompetensi ASN. Di tahun 2021, HCDP yang disusun meliputi Pejabat Esselon 2 dan 3.	Implementasi HCDP (rencana kebutuhan kompetensi pegawai), pada Tahun 2022 sudah tersedia strategi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Jangka Pendek (1 Tahun) ke depan. BKPSDM perlu melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk seluruh Pegawai.
KP 1.4	Pelaksanaan promosi jabatan berbasis prestasi dan kompetensi	Pada tahun 2021 telah dilakukan pelantikan pejabat pratama pada Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bappeda, serta dilaksanakan open bidding pejabat pratama di 7 jabatan yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda, Staf Ahli Bidang Sosial, SDM dan Kemasyarakatan Setda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,	Pelaksanaan promosi jabatan berbasis prestasi dan kompetensi, Pemerintah Kota Cilegon telah menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karir melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dan

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Sandi dan Statistik, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelematan dan Direktur RSUD.	Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penilaian KASN pada Tahun 2022, sudah dilakukan Assesmen bagi Pejabat Esselon II, III dan IV, akan tetapi hasilnya belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan promosi pegawai.
KP 1.5	Penerapan e-kinerja	Telah dilakukan pengisian progress kinerja organisasi dan kinerja pegawai melalui aplikasi e-SAKIP dan e-KHAS (Kinerja Harian Aparatur Sipil) meskipun di tahun 2021 masih fokus pada proses pembiasaan, yang dalam hal ini reward punishment baru didasarkan pada kedisiplinan/kehadiran.	Penerapan e-kinerja, saat ini sudah diterapkan sistem manajemen kinerja yang berdasarkan PermenPANRB No.6 Tahun 2022, sedangkan dalam hal penilaian kinerja yang dilakukan setiap hari, akan dilaksanakan menggunakan sistem informasi dalam aplikasi KHAS (E-kinerja).
KP 1.6	25% kenaikan tunjangan kinerja ASN	Konsep kenaikan TPP ASN pada RPJMD adalah kenaikan sebesar 5% per tahun dari TPP tahun 2020. Kenaikan TPP sebesar 5% telah dimulai di Anggaran Perubahan Tahun 2021. Rumusan TPP dibuat berbasis kelas jabatan sebagai dasar pengalokasian TPP di tahun 2022, sebagaimana diatur pada PP no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemda.	Kenaikan TPP sebesar 10% dari TPP yang diterima di tahun 2020. Diterbitkan Perwal No 58 Tahun 2022 Tentang TPP yang menjadi dasar besaran TPP berbasis kelas jabatan dengan pemberian berdasarkan disiplin kerja dan kinerja baik individu maupun organisasi
PP 2 - Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			
KP 2.1	Satu Data Pembangunan Cilegon	Sebagai payung hukum pelaksanaan Satu Data Pembangunan Cilegon, telah disusun Raperwal Satu Data yang saat ini sedang dalam pembahasan akhir oleh pihak-pihak terkait; Sebagai bagian dari komponen pembangun satu data pembangunan, telah tersusun Meta Data Indikator kinerja RPJMD dan Renstra PD;	Pelaksanaan Forum Data Pembangunan, Pemutakhiran Data Pembangunan, Pengembangan Meta Data Pembangunan, Evaluasi Kinerja Pembangunan

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
KP 2.2	Peningkatan Kualitas Penerapan SAKIP	Menindaklanjuti hasil LHE Kemenpan atas AKIP Tahun 2021, beberapa upaya peningkatan kualitas penerapan SAKIP yang telah dilakukan meliputi: a) Menyusun dokumen RPJMD dan Renstra mengacu kepada pohon kinerja yang disusun sampai dengan level output, beserta indikator kinerja yang SMART disertai dengan penyusunan metadata indikator; b) Melakukan verifikasi renstra secara berkelanjutan dengan mengalokasikan anggaran berbasis pencapaian kinerja; c) Meningkatkan keterisian e-sakip dan melakukan evaluasi secara berkala melalui rapat dinas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Walikota; d) Mendorong pelaksanaan dialog kinerja untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai yang cascade dengan sasaran organisasi; e) Meningkatkan kualitas LAKIP Perangkat Daerah yang disertai analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja melalui pendampingan secara berkelanjutan; f) Meningkatkan kapasitas evaluator LAKIP PD melalui bintek secara berkala.	Nilai AKIP Kota Cilegon tahun 2022 mencapai 68.86 dengan predikat “B”, yang menunjukkan predikat “baik”, yaitu akip sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Upaya yang telah dilakukan : a. melakukan reviu dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah untuk memastikan kualitas sasaran, indikator dan keterpaduan perencanaan; b. menyempurnakan tujuan, sasaran dan indikator pada tingkat pemda menjadi lebih berorientasi outcome; c. menyusun logical framework, penjenjangan/cascading kinerja dan rencana aksi kinerja sampai dengan perangkat daerah; d. menyempurnakan sistem pengelolaan kinerja perangkat daerah menggunakan aplikasi e-sakip
KP 2.3	Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Di tahun 2021 telah dilakukan penancangan WBK/WBBM di seluruh perangkat daerah. Untuk pengajuan penilaian ZI di tahun 2021, Pemerintah mengajukan dua perangkat daerah yaitu DKCS dan Puskesmas Pulomerak, yang telah berprogress memenuhi seluruh aspek pemenuhan WBK/WBM baik terkait manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan	Penambahan Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
KP 2.4	Pengelolaan Manajemen Aset	Peningkatan manajemen asset daerah dilakukan dengan : • Menyusun pedoman pengelolaan BMD baik SSH, Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD serta SOP; • Menyusun rencana kebutuhan BMD; • Penatausahaan BMD dengan menyusun laporan daftar barang asset BMD dan updating data dan modul sisem manajemen asset OPD; • Menyusun laporan inventarisasi BMD; • Pengamanan BMD meliputi penyediaan jasa jaminan asuransi gedung, kendaraan roda dua, roda empat, pengamanan BMD, dan validasi tanah milik Pemda; Di tahun 2021 dari 1.104 asset milik Pemda, sebanyak 614 (55,62%) telah bersertifikat; • Penerbitan SK Walikota terkait pemindahtanganan BMD dan penghapusan BMD, serta menyusun dokumen perjanjian pemanfaatan BMD dan usulan pemusnahan BMD; • rekonsiliasi BMD dan penyusunan laporan BMD, serta bintek penatausahaan BMD serta monitoring penerapannya secara berkelanjutan	Peningkatan manajemen asset daerah, dengan fokus pada pengamanan barang milik daerah dan validasi tanah milik Pemda dan optimalisasi pemanfaatan BMD.
PP 3	Peningkatan Kualitas Layanan Publik		
KP 3.1	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Hasil evaluasi SPBE tahun 2021 oleh kementerian PAN RB menyatakan bahwa Kota Cilegon memperoleh predikat “CUKUP” dengan nilai 2,03. Dinilai bahwa penerapan SPBE masih dalam tahap rintisan yang mana proses tata kelola	Mengoptimalkan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aspek audit TIK, khususnya terkait kegiatan pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra dan sistem penghubung layanan.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		dilaksanakan sewaktu-waktu, belum terorganisir dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Terdapat beberapa keunggulan dalam penerapan SPBE antara lain pada aspek : Adanya kebijakan internal tata kelola SPBE melalui Perwal No 106 tahun 2016 sebagai dasar hukum yang mengatur norma pengaturan tugas dan fungsi tim koordinasi SPBE serta SK Tim No. 060.05/Kep.129-Diskominfo/2020 tentang pembentukan Komite Kota Cerdas dan Tim Optimalisasi SPBE Tahun 2020; Layanan administrasi pemerintahan, pada bidang penganggaran, pengadaan barjas dan kepegawaian; Layanan publik berbasis elektronik portal perizinan online terintegrasi dengan data dari layanan kependudukan.	Beberapa hal yang masih perlu dioptimalkan adalah integrasi data dan aplikasi, koordinasi antar perangkat daerah dan kapasitas SDM TIK.
KP 3.2	Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Pelayanan Publik)	Sesuai dengan Perpres 89 tahun 2021, pembentukan mall pelayanan publik didahului dengan penyampaian usulan dari Pemerintah Daerah kepada Kemenpan disertai dengan kajian urgensi pembentukan mall pelayanan publik, yang mana saat ini kajian sedang dalam pembahasan final oleh tim kecil.	Mall pelayanan publik telah diresmikan oleh Kementrian PAN di akhir tahun 2022, dan saat ini sudah melayani 102 jenis layanan di 22 gerai, melingkupi layanan dari 4 Perangkat Daerah dan 18 instansi vertikal
KP 3.3	Pembangunan gedung kantor PD dan rumah dinas yang representatif	Jumlah gedung kantor yang dibangun di tahun 2021 meliputi : • DED pembangunan rumah jabatan Wakil Walikota, seluas 1.500 m2 sesuai dengan permendagri no 7/2006; • DED pembangunan rumah dinas Sekda seluas 750 m2 sesuai dengan Permendagri 7 tahun 2006 • Perencanaan Interior Gedung Kantor Walikota	Pada Tahun 2022 akan dilaksanakan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan SETDA Tahap I yang akan dilanjutkan pada tahun 2023, serta Rehab Interior Kantor Walikota.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor meliputi pembangunan aula kel kepuh, interior command centre, rehab gedung arsip, rehab gedung lama dan lanscape gedung DPUTR, pemeliharaan gedung ex kejar JLS, pembangunan gudang lingk. Tegal wangi dan link. Cidandang dan pemeliharaan gedung dinas pariwisata (eks kejar)	
KP 3.4	Pembangunan Gedung Serbaguna	-	-
PP 4 - Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan yang berkualitas dan merata			
KP 4.1	Pembangunan SMP Negeri	Di tahun 2021, telah beroperasi 4 SMP Negeri baru yang telah menerima siswa utk tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 346 siswa meliputi SMP 12 sebanyak 97 orang, SMP 13 sebanyak 131 orang, SMP 14 sebanyak 105 orang dan SMP 15 sebanyak 13 orang	Pembangunan lab IPA, perpustakaan dan mushola SMP 12 Revitalisasi bangunan SMP 13 Pembangunan lab IPA, perpustakaan, dan mushola SMP 14 Pembangunan ruang kelas, lab ipa, toilet dan meubelair SMP 15
KP 4.2	Pemenuhan sarpras sekolah sesuai standar	Sarpras SD yang diadakan di tahun 2021 meliputi : - Jumlah SD yang dibangun sebanyak 2 sekolah (SDN taman sari V dan SDN Kalitimbang 1) - Ruang kelas SD yang dibangun sebanyak 4 ruang kelas - Jumlah pemagaran SD sebanyak 7 sekolah - Jumlah sekolah yang dibangun toilet sebanyak 2 sekolah - Jumlah SD yang direvitalisasi sebanyak 2 sekolah - Ruang kelas SD yang direhabilitasi sebanyak 8 sekolah - Perpustakaan SD yang direhabilitasi sebanyak 2 sekolah - Perpustakaan SD yang dibangun sebanyak 4 sekolah - Meubelair ruang kelas SD sebanyak 28 ruang kelas	- Penyediaan sarpras PAUD meliputi pembangunan ruang kelas baru, dan 1 ruang guru - Penyediaan sarpras SD meliputi RKB, perpustakaan, Lab IPA, toilet, ruang UKS, meubelair dan komputer sekolah dasar; - Penyediaan sarpras SMP meliputi pembangunan ruang kelas baru, toilet, aula terbuka dan ruang pertemuan, renovasi ruang kantor dan ruang guru

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		- Unit alat lab SD sebanyak 8 unit - Jumlah jenis alat peraga/praktek SD sebanyak 3 jenis - Ruang guru/kepsek SD yang dibangun sebanyak 2 sekolah - Ruang guru SD yang direhabilitasi sebanyak 1 ruang - Ruang kepsek SD yang direhabilitasi sebanyak 1 sekolah - Sarpras SMP yang diadakan di tahun 2021 meliputi : - Pengadaan lab komputer sebanyak 3 SMP - Pemagaran SMP sebanyak 2 SMP - SMP yang mendapat rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3 sekolah - Pengadaan meubelair di 2 sekolah - Pengadaan studio visual sebanyak 4 sekolah - SMP yang menapatkan bantuan laptop sebanyak 2 sekolah - Perlengkapan olahraga sebanyak 11 sekolah - Pengadaan alat peraga sebanyak 3 SMP - Rehabilitasi perpustakaan sebanyak 2 sekolah - Sarpras PAUD yang diadakan di tahun 2021 meliputi - Sarpras PAUD yang diadakan di tahun 2021 meliputi - Rehabilitasi gedung PAUD sebanyak 2 lembaga - PAUD yang mendapatkan meubelair sebanyak 2 lembaga - Jumlah PAUD yang mendapatkan peralatan kantor sebanyak 8 lembaga - PAUD yang mendapatkan APE sebanyak 29 lembaga - PAUD yang mendapatkan alat didik PAUD holistik integratif sebanyak 2 lembaga - Alat didik TK Holistik integratif sebanyak 3 TK - Ruang guru PAUD yang dibangun sebanyak 1 ruang - Ruang kelas PAUD yang dibangun sebanyak 2 ruang - Jumlah area bermain outdoor PAUD yang dibangun sebanyak 1 unit	

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		- Jumlah toilet siswa beserta sanitasi PAUD yang dibangun sebanyak 1 unit	
KP 4.3	50% kenaikan honor guru honorer dan madrasah	Peningkatan honor daerah bagi 1.500 orang guru honorer TK/SD/SMP Swasta, 922 orang GTK PAUD Non formal, insentif untuk 450 orang guru honor SDN masa kerja 10 tahun ke atas sebesar Rp 1 juta/bulan dari sebelumnya Rp 450 ribu/bulan, 350 orang guru honor SDN masa kerja di bawah 10 tahun sebesar Rp 675 ribu/bulan dari sebelumnya Rp 450 ribu/bulan. Pemberian insentif untuk kepala sekolah/guru/tenaga kependidikan di 6 Sekolah Negeri dan 1 SMP Satu Atap yang berada di wilayah perbatasan sebesar Rp 1 juta/bulan untuk Kepala Sekolah dan Rp 500 ribu/bulan untuk guru dan tenaga kependidikan Kenaikan honor guru madrasah mulai dilaksanakan tahun 2022 karena harus melalui proses e-hibah	Peningkatan honor daerah bagi 3.984 guru honorer tingkat TK/SD/SMP, Pemberian insentif untuk kepala sekolah/guru/tenaga kependidikan di 6 Sekolah Negeri dan 1 SMP Satu Atap yang berada di wilayah perbatasan sebesar Rp 1 juta/bulan untuk Kepala Sekolah dan Rp 500 ribu/bulan untuk guru dan tenaga kependidikan; Kenaikan 50% honor guru madrasah diberikan kepada 5.189 orang guru
KP 4.4	Sertifikasi pendidik, kepala sekolah dan kualifikasi pendidikan tenaga penunjang	Jumlah satuan lembaga PNFI yang terakreditasi Proporsi pendidik yang telah bersertifikasi sebanyak 39%, terdiri dari 38% pendidik PAUD (283 orang bersertifikat dari 754 orang), 41% pendidik SD (1.184 orang bersertifikat dari 2.906 orang), 36% pendidik SMP (481 orang bersertifikat dari 1.348 orang). Lomba lomba prestasi bagi Guru SD yang diadakan di tahun 2021 meliputi : Jumlah peserta lomba dan apresiasi Alat Peraga Edukatif Murah jenjang SD sebanyak 50 orang	Jumlah pendidik jenjang PAUD yang menerima sertifikasi sebanyak 289 orang dari total 1588 pendidik PAUD, pada jenjang Dikdas yang menerima sertifikasi sebanyak 1520 orang dari total 2780 Pendidik SD dan 1213 Pendidik SMP.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		- Jumlah peserta lomba karya inovasi pembelajaran guru SD sebanyak 50 orang - Jumlah peserta seleksi GTK jenjang SD sebanyak 100 orang - Jumlah peserta seleksi dan apresiasi KTI Guru SD sebanyak 50 orang - Jumlah peserta kegiatan pelatihan pengembangan kurikulum SD sebanyak 50 orang - Jumlah peserta pembinaan manajemen sekolah mantap sebanyak 56 guru SD Mantap Lomba-lomba prestasi bagi guru SMP yang diadakan di tahun 2021 meliputi : - Lomba karya inovasi pembelajaran guru SMP sebanyak 84 orang - Jumlah peserta seleksi dan apresiasi KTI bagi guru SMP - Jumlah peserta seleksi GTK jenjang SMP Lomba-lomba prestasi bagi guru PAUD yang diadakan di tahun 2021 meliputi : - Lomba APEM jenjang TK - Apresiasi PTK PNFI berprestasi	
KP 4.5	Pemenuhan perlengkapan dasar dan perlengkapan siswa	- Jumlah SD yang mendapat BOSDA sebanyak 37 sekolah - Jumlah sekolah yang mendapat penyaluran PIP sebanyak 190 sekolah - Jumlah SMPN yang menerima BOS sebanyak 11 sekolah - Jumlah PAUD yang mendapatkan pendampingan operasional DAK sebanyak 200 lembaga	Diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Cilegon

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Jumlah TK Negeri penerima pendampingan BOP sebanyak 5 sekolah	
KP 4.6	Beasiswa pendidikan	Di tahun 2021 telah dialokasikan beasiswa untuk siswa tidak mampu melalui alokasi anggaran bantuan sosial APBD kepada 344 siswa SD/ sederajat meliputi 96 siswa MDTA, 190 orang siswa MI dan 58 orang siswa SD; serta kepada 1.234 siswa SMP/ sederajat meliputi 410 orang SMP Swasta dan 824 siswa MTs. Jumlah peserta didik kesetaraan yang mendapatkan BOP pendidikan sebanyak 774 siswa	Jumlah peserta didik SD yang mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sebanyak 37.755 orang Jumlah peserta didik miskin SD yang menerima beasiswa sebanyak 473 orang
KP 4.7	5.000 Beasiswa Full Sarjana	Pemberian beasiswa sarjana kepada 523 siswa di 4 universitas yang telah melakukan perikatan dengan Pemerintah, baik melalui beasiswa utk siswa tidak mampu ataupun beasiswa prestasi untuk tahun ajaran 2021/2022. Siswa tidak mampu merupakan siswa yang penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.	Pemberian beasiswa sarjana kepada 1.701 siswa di 8 universitas yang telah melakukan perikatan dengan Pemerintah, baik melalui beasiswa utk siswa tidak mampu ataupun beasiswa prestasi.
KP 4.8	Penyelenggaraan lomba-lomba prestasi	Lomba-lomba prestasi bagi siswa SMP/ sederajat yang diadakan di tahun 2021 meliputi : - Lomba gebyar festival FLS2N - Lomba gebyar PAI - Lomba literasi sekolah - Lomba OSN Tingkat Kota Cilegon - Pelatihan LDKS - Lomba Sekolah Sehat	Prestasi Juara 3 Lomba Gitar Duet FLS2N SMP Tingkat Nasional Tahun 2022 , Juara 10 Lomba Musik Tradisional FLS2N SMP Tingkat Nasional Tahun 2022, dan Juara 2 Lomba Matematika KSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2022.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		- Lomba kesiswaan paket B - Workshop kewirausahaan bagi warga belajar non formal dan LKP Lomba-lomba prestasi bagi siswa PAUD yang diadakan di tahun 2021 meliputi : - Gebyar kreatifitas peserta didik PAUD/TK - Pelatihan membangun karakter peserta didik - Workshop pengelolaan adm peserta didik PAUD - Gebyar pramuka prasiaga PAUD saka widya budaya bakti	
KP 4.9	Kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan sebanyak 230 dokumen meliputi 180 dokumen pada jenjang SD dan 50 dokumen pada jenjang SMP	Pemutakhiran kurikulum muatan lokal
KP 4.10	Peningkatan Literasi Informasi Berbasis Perpustakaan	- Pengelolaan layanan perpustakaan elektronik; - Penambahan daftar pustaka elektronik (e-book) - Peningkatan layanan perpustakaan kelurahan	- Pengelolaan layanan perpustakaan elektronik; - Penambahan daftar pustaka elektronik (e-book) - Peningkatan layanan perpustakaan kelurahan
PP 5 - Peningkatan kualitas layanan dan perluasan akses kesehatan			
KP 5.1	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan RSUD di tahun 2021 sebesar 81,25. Upaya prioritas yang dilakukan di tahun 2021 al : a)peningkatan penyediaan alat kesehatan dan bahan medis : alat kedokteran jantung, radiologi, alat kedokteran umum, urologi, penunjang medik, alkes kebidanan dan penyakit kandungan, alat lab hematologi serta obat-obatan b)peningkatan sarpras kesehatan : pembangunan instalasi pipa gas medis, ruang central gas medis, renovasi gedung VIP;	Penyusunan DED Pembangunan gedung RSUD 5 lantai

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		c)peningkatan tenaga layanan covid : insentif tenaga kesehatan penanganan covid (pns, non pns, tenaga umum dan relawan).	
KP 5.2	9 Puskesmas dengan fasilitas, utilitas, dan SDM yang handal	Sebanyak 7 puskesmas telah mencapai akreditasi utama, 1 puskesmas akreditasi madya dan 1 puskesmas belum diakreditasi (baru). Ketersediaan SDM kesehatan sudah mencukupi dan terdistribusi merata di seluruh puskesmas. Telah terdapat layanan online puskesmas terhadap layanan pasien JKN.	Ketersediaan SDM kesehatan sudah mencukupi dan terdistribusi merata di seluruh puskesmas. Terdapat layanan kedaruratan melalui no 119 Pendaftaran online melalui mobile JKN Cakupan kepesertaan JKN tahun 2022 mencapai 96,81% Penambahan jam kerja pelayanan IGD di 3 puskesmas
KP 5.3	Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin	Sebanyak 27.977 jiwa masyarakat kurang mampu telah mendapatkan jaminan kesehatan dari APBD Kota Cilegon. Sedangkan secara keseluruhan (dari APBN, APBD Prov dan APBD Kota Cilegon, cakupan kepesertaan JKN tahun 2021 mencapai 87,37% (389.646 jiwa dari 445.961 jiwa)	Sebanyak 27.977 jiwa masyarakat kurang mampu telah mendapatkan jaminan kesehatan dari APBD Kota Cilegon. Sedangkan secara keseluruhan (dari APBN, APBD Prov dan APBD Kota Cilegon, cakupan kepesertaan JKN tahun 2021 mencapai 87,37% (389.646 jiwa dari 445.961 jiwa)
KP 5.4	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan	Pencapaian SPM bidang kesehatan di tahun 2021 sebesar 85,71% meliputi rata-rata layanan terhadap ibu hamil (90%), layanan terhadap ibu bersalin (101%), layanan bayi baru lahir (104%), layanan kesehatan balita sesuai standar (91%), layanan anak usia dasar (34%), layanan usia produktif (92%), layanan usia lanjut (60%), layanan kesehatan orang terduga TBC (86%), layanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV (109%), layanan kesehatan penderita hipertensi (61%), layanan kesehatan penderita DM (100%), layanan kesehatan ODGJ berat (99%). Pencapaian ini dilakukan dengan melalui kegiatan preventif dan promotif kesehatan, melalui penerapan standar teknis	Pencapaian SPM bidang kesehatan di tahun 2022 sebesar 103% meliputi rata-rata layanan terhadap : - ibu hamil 99,84% (8.535 orang), - ibu bersalin 101,65% (8.239 orang) - bayi baru lahir 105,24% (8.179 orang), - kesehatan balita 95,45% (28.865 orang) - anak usia dasar 88,16% (58.711 orang) - usia produktif 94,50% (287.066 orang) - usia lanjut 90,08% (33.514) - layanan kesehatan orang terduga TBC 118,93% (8.947 orang) - orang beresiko terinfeksi HIV 137,32% (17.089 orang) - penderita hipertensi 89,65% (92.924 orang)

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		pemenuhan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Permenkes No 4. Tahun 2019.	- penderita DM 106,72% (9.461 orang) - ODGJ berat 108,50% (638 orang). Pencapaian ini dilakukan dengan melalui kegiatan preventif dan promotif kesehatan, melalui penerapan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Permenkes No 4. Tahun 2019.
KP 5.5	Pemenuhan layanan kesehatan lainnya	Pemenuhan layanan kesehatan lainnya meliputi : a)penyediaan data dan informasi kesehatan (99%); b)Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (83%); c)penyediaan farmasi, alat kesehatan dan penyediaan pangan industri rumah tangga yang memenuhi syarat; d)pengawasan sarana distribusi obat yang memenuhi syarat; e)pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan keluarga sehat (indeks keluarga sehat saat ini sebesar 84%)	Pemenuhan layanan kesehatan lainnya meliputi : - penyediaan data dan informasi kesehatan (99%); - Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sebanyak 2.121 orang dari 3.510 orang (60%); - pengawasan terhadap produksi pangan industri rumah tangga yang memenuhi syarat sebanyak 157 irt dari 182 irt yang didampingi; - pengawasan sarana distribusi pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar sebanyak 103 dari 116 lokasi yang diperiksa - pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan keluarga sehat (indeks keluarga sehat saat ini sebesar 83,33%)
PP 6 - Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial			
KP 6.1	Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar di DTKS/Non DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 46.846 orang (85%), melalui upaya : a)pemeliharaan anak terlantar; b)penjangkauan anak-anak terlantar; c)rujukan anak-anak terlantar; d)pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar; e)fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga f)fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat aldan penyediaan makanan. Penerima program bantuan sosial ekonomi di tahun 2021 antara lain : PKH sebanyak 5.159 KK, JSCM sebanyak 2.258 KK,	Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu (yang terdaftar di DTKS ataupun non DTKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebesar 83,79% (44.341 orang). Upaya yang dilakukan meliputi : a)pemeliharaan anak terlantar; b)penjangkauan anak-anak terlantar; c)rujukan anak-anak terlantar; d)pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar; e)fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga f)fasilitasi bantuan ekonomi masyarakat aldan penyediaan makanan.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		RTLH sebanyak 152 KK, BPNT sebanyak 20 e warong, Peserta bintek KUBE sebanyak 20 orang dan Calon penerima UEP sebanyak 40 orang	
KP 6.2	Rehabilitasi sosial dasar terhadap pemerlu pelayanan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di tahun 2021 sebanyak 343 orang (100%). Upaya yang dilakukan meliputi : a) penyediaan permakanaan dan sandang; b) pelayanan reunifikasi keluarga; c)bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; d)pemberian akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; e)pelayanan kedaruratan dan layanan rujukan;	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti di tahun 2022 sebanyak 1.930 orang (100%). Upaya yang dilakukan meliputi : a)penyediaan permakanaan dan sandang; b) pelayanan reunifikasi keluarga; c)bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial; d)pemberian akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; e)pelayanan kedaruratan dan layanan rujukan;
KP 6.3	Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di tahun 2021 sebanyak 2.744 jiwa (100%). Upaya ini dilakukan melalui penyediaan buffer stock, dapur umum serta operasional tagana dan pembinaan kelompok siaga bencana	Prosentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial sebesar 100% (1.476 orang). Upaya ini dilakukan melalui penyediaan buffer stock, dapur umum serta operasional tagana dan pembinaan kelompok siaga bencana
PP 7 - Fasilitas perekonomian pelaku usaha mikro kecil (bagian dari program “25 ribu penyerapan tenaga kerja”)			
KP 7.1	Pembangunan rumah siap kerja (Pusat layanan usaha terpadu untuk UMK)	Tahapan yang dilakukan dalam pembangunan rumah siap kerja di tahun 2021 adalah mematangkan konsep tentang rumah siap kerja, melalui kunjungan ke PLUT Jogja dan Rumah Kreatif Bandung, untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bentuk kelembagaan, layanan, pembiayaan, regulasi serta tahapan pembentukan.	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pendampingan kepada 400 UMK pada klinik UMK yang akan dijadikan sebagai rumah siap kerja bagi para pelaku UMK dengan konsep Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), berdasarkan hasil kunjungan pada tahun sebelumnya. Sedangkan pembentukannya akan ditindaklanjuti pada tahun 2023.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Sebelum terbentuknya rumah siap kerja, telah dilakukan fasilitasi kepada pelaku usaha mikro berupa : Pasar/Expo UMK berskala kota dan nasional dan fasilitasi pada pameran APEKSI @1 kegiatan, Fasilitasi perizinan kepada 15 UMK, Pendampingan usaha kepada 400 UMK, Bintek kepada 600 CWUB, dan Pelatihan label/kemasan dan desain IT kepada 75 UMK	Selain itu, telah dilaksanakan inkubasi pelaku UMK sebanyak 100 orang/pelaku UMK melalui kerjasama dengan Lembaga Inkubator dari Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui lembaga Incubee.
KP 7.2	Fasilitasi ekspor produk unggulan	Dilakukan sosialisasi kepada 40 pelaku usaha yang memiliki produk unggulan berpotensi ekspor, dengan produk unggulan berupa produk batik, kerajinan, sandang, dan olahan limbah.	Pada tahun 2022 kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah: 1). Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri melalui fasilitasi mesin/peralatan berteknologi bagi IKM sebanyak 35 unit 2). Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui legalisasi hak cipta sebanyak 20 hak cipta, sertifikasi SNI bagi IKM sebanyak 2 sertifikat dan legalisasi merek IKM sebanyak 40 pelaku usaha 3). Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui bimtek untuk pelaku usaha berorientasi ekspor sebanyak 40 pelaku usaha dan pelaksanaan pembinaan pelaku usaha ekspor melalui bimtek ekspor bagi pelaku usaha ekspor sebanyak 30 peserta.
KP 7.3	Pengembangan kampung batik dan kuliner	Tahapan pengembangan kampung batik dan bandeng mulai dilakukan di tahun 2022. Target kampung batik yang akan dikembangkan adalah berupa sentra yaitu sentra batik Cibeber, Citangkil dan Cilegon. Sedangkan sentra kuliner yang akan dikembangkan adalah sentra bandeng meliputi sentra bandeng citangkil, cilegon, purwakarta dan grogol.	Pelaksanaan di tahun 2022 untuk pengembangan kampung batik dan kuliner antara lain adalah Pelatihan dan fasilitasi perizinan HAKI 75 UMK, Pelatihan dan fasilitasi MDBPOM 140 orang, Pelatihan dan fasilitasi perizinan dan non perizinan NIB dan IUMK 90 orang, Pelatihan dan fasilitasi perizinan PKP 340 UMK, Pelatihan dan fasilitasi perizinan SP PIRT 240 UMK, Pelatihan dan fasilitasi uji umur simpan 140 UMK, Pelatihan sertifikasi halal 90 orang, Bimtek dan pendampingan digital marketing 50 orang, Pelatihan kemasan

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
			(packaging) label dan desain kemasan produk umk 100 orang, Pelatihan pembuatan toko online/marketplace digital 200 UMK dan Pelatihan inovasi produksi gipang sebanyak 50 UMK
KP 7.4	Peningkatan akses permodalan	Bantuan pinjaman modal usaha telah diberikan kepada 725 pelaku usaha mikro meliputi 251 yang sudah pada tahap penguatan, 474 pada tahap perintisan dan pengembangan usaha	Pinjaman modal usaha diberikan kepada pelaku usaha sebanyak 842 mitra binaan
KP 7.5	Pengembangan koperasi syariah berbasis pesantren dan lembaga keagamaan	Telah dilaksanakan sosialisasi dan verifikasi koperasi terhadap 40 koperasi pengurus, meliputi pondok pesantren, Koperasi sekolah MTs, MA dan Koperasi DKM, yang mana ditetapkan calon koperasi syariah sebanyak 25 koperasi.	Pelaksanaan verifikasi dan validasi calon koperasi syariah 25 koperasi, Pelatihan calon koperasi syariah 25 koperasi, pelatihan dewan pengawas syariah 15 orang dan Pendampingan calon koperasi syariah 25 koperasi
PP 8 - Peningkatan daya saing tenaga kerja (bagian dari program “25 ribu penyerapan tenaga kerja”)			
KP 8.1	Pelatihan, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi	Sebanyak 363 orang diberikan pelatihan kompetensi meliputi 13 jenis pelatihan; • Sebanyak 140 orang diberikan pelatihan berbasis sertifikasi; • Sebanyak 40 orang mengikuti diklat teknisi Kimia D1 AMC/CMA Pemagangan tenaga kerja sebanyak 111 orang (sebanyak 45 orang dari lulusan pelatihan BLK); Terkait hal ini telah terjalin MoU antara Pemerintah dengan industri, antara lain PT CCSI, PT Asahimas, PT Indorama, PT KNSS, PT Honda Kemakmuran, dan PT Dwiteknik. Juga terdapat program kolaborasi antara Pemerintah dengan Swasta yang secara langsung berkontribusi terhadap upaya penyerapan tenaga kerja sebagai berikut :	Sebanyak 1.072 orang diberikan pelatihan kompetensi meliputi 33 jenis pelatihan kompetensi; Penempatan dan pemagangan tenaga kerja sebanyak 3.393 orang meliputi penempatan 2.942 orang di dalam negeri, 22 orang di luar negeri dan pemagangan sebanyak 429 orang; Program kolaborasi Pemerintah dalam pengolahan sampah menjadi BBJP telah memasuki tahap operasional, dengan volume sampah terolah sebesar 30 ton per hari dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 10 orang;

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		a. Program pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat/BBJP atau SRF (Solid Refused Fuel) sebagai cofiring (campuran bahan bakar batu bara di PLTU Suralaya. Pada tahap pilot project, sampah yang diolah sebesar 5 ton per hari yang menghasilkan SRF sebanyak 600 kg per hari, dan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 7 orang. Dengan teknologi sederhana, program ini bersifat padat karya, sehingga pada tahap scale up (120 ton per hari), program ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 30 orang. b. “Program Opang” yang merupakan inovasi jasa layanan angkutan ojek pangkalan di Kota Cilegon berbasis teknologi informasi. Saat ini tercatat program opang telah memiliki keanggotaan sebanyak 5.000 orang pelaku usaha ojek pangkalan.	
KP 8.2	Pengembangan BLK		Pengadaan sarana prasarana BLK
PP 9 - Peningkatan inovasi pendapatan daerah			
KP 9.1	Perluasan elektronifikasi layanan pajak dan retribusi	Perluasan elektronifikasi yang dilakukan adalah terkait retribusi pasar, dengan metoda QRIS yang dalam hal ini bekerjasama dengan BJB. Namun pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya pemahaman, komitmen pembanfaatan, serta keterbatasan alat yang dimiliki oleh pedagang sebagai objek retribusi pasar.	Perluasan elektronifikasi layanan pajak dan retribusi dilakukan melalui pelaksanaan kerjasama terkait transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebanyak 12 dokumen, Penyediaan sistem pengelolaan pajak daerah 3 sistem, pemeliharaan sistem web register retribusi 1 sistem. Sedangkan untuk regulasi tentang pajak dan retribusi baru pada tahapan penyusunan naskah akademis, analisis investasi, penyusunan kebijakan retribusi/e-retribusi pasar rakyat dan fasilitasnya belum dilaksanakan.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
KP 9.2	Pembentukan BUMD pengelolaan limbah industri	Telah disusun kajian tentang Studi Pendahuluan Pembentukan BUMD Limbah Industri	Hasil konsultasi dan koordinasi intensif dengan kementerian dalam negeri, bahwa pembentukan BUMD baru mensyaratkan BUMD yang ada saat ini harus dalam kondisi sehat, agar tidak membebani keuangan daerah. Di sisi lain, kajian kelayakan ekonomi dan kelembagaan pembentukan BUMD industri membutuhkan biaya yang besar, sehingga penyusunan kajian tidak ditindaklanjuti.
KP 9.3	Kerjasama pemerintah swasta dalam pengelolaan pasar rakyat	Telah disusun kajian tentang studi pendahuluan pembentukan BUMD Pasar Tradisional di Kota Cilegon, dengan hasil kajian menyatakan bahwa BUMD pasar Tradisional sangat layak untuk didirikan oleh Pemerintah Kota Cilegon, baik dari dilihat dari sisi ekonomi, keuangan, pasar, regulasi, teknis, dukungan infrastruktur maupun analisis dampaknya terhadap lingkungan, yang mana pembentukan BUMD ini harus ditetapkan dengan Perda.	Kajian Kerjasama dan studi banding terkait pengelolaan pasar rakyat melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga Saat ini sedang dibentuk tim pemilihan pihak ke-3 yang akan menjalin kerjasama dalam pengelolaan pasar kraggot
KP 9.4	Pembentukan unit usaha air mineral di bawah PDAM	Telah dilakukan komunikasi intensif dengan pihak ketiga penyedia air kemasan dan dilakukan pembahasan intensif dengan kuasa pemilik modal perumda CM. Saat ini tengah dikaji terkait bentuk kelembagaan pengelolanya.	
KP 9.5	Pembangunan pelabuhan warnasari	Terkait dengan penyiapan lahan, saat ini tengah dilakukan pematangan lahan dengan pasir hasil pengerukan/dredging PT Lotte. Sedangkan terkait kerjasama pendanaan, ditargetkan di tahun 2022 PT PCM telah mendapatkan investor untuk pembangunan pelabuhan warnasari.	Sedang dilakukan penjajakan investor.
PP 10 - Penyediaan Ruang Publik yang Representatif dan Ramah Difabel			
KP 10.1	43 Ruang Terbuka Publik	Pada Tahun 2021 RTP yang dibangun adalah Taman Kecamatan Cibeber dan Lanjutan Taman Kecamatan Purwakarta, serta	RTP yang sudah terbangun di Kota Cilegon sampai dengan tahun 2022 sebanyak 11, yaitu :

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Taman Kelurahan Cibeber (Praja Mandiri). Progres pembangunan Taman Kecamatan Cibeber sampai dengan tahun 2021 baru terbangun infrastrukturnya yaitu pematangan lahan, TPT, pagar, kolam resapan dan kantor pengelola. Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun 15 ruang terbuka publik kelurahan di 9 Kelurahan meliputi Jombang wetan (2 RTP), Bendungan (1 RTP), Cibeber, Kalitimbang, Kedaleman (3 RTP), Citangkil, Kubangsari, Purwakarta, Ramanuju (4 RTP).	• RTP Kel. Jombang Wetan (Taman Kecamatan Jombang, RTP Nurul Ikhlas) • RTP Kelurahan Bendungan (Taman Kecamatan Cilegon) • RTP Kelurahan Kubangsari (RTP Kecamatan Ciwandan) • RTP Kelurahan Purwakarta (RTP Kecamatan Purwakarta) • RTP Kelurahan Cibeber (Praja Mandiri) • RTP Kelurahan Kedaleman (RTP Segitiga PCI, RTP Akses Tol Cilegon Timur, RTP Gerbang Selamat Datang) • RTP Kelurahan Citangkil (RTP Depan Bappeda) • RTP Kelurahan Ramanuju (RTP Simpang, RTP Layak Anak, RTP Al-Hadid, RTP landmark) • RTP Kelurahan Tegal Bunder • RTP Kelurahan Sukmajaya • RTP Kelurahan Kalitimbang (RTP Kecamatan Cibeber)
KP 10.2	8 Fasilitas Hobby dan Komunitas	Sampai dengan tahun 2021 telah terbangun 2 fasilitas hobby yaitu Climbing wall di alun-alun dan arena Skateboard di Taman Layak Anak	Fasilitas hobby dan komunitas yang sudah terbangun hingga tahun 2022 adalah di tiga lokasi, yaitu di Alun-alun Kota Cilegon (Kec Purwakarta), Taman Kec Jombang, dan Taman Kec Cilegon
KP 10.3	Perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi	Tahun 2021 tidak ada kegiatan pemasangan wifi di area public. Namun data eksisting wifi di area public yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Cilegon sampai dengan tahun 2020 ada di 8 (delapan) titik area public yaitu di Ruang Aula BKPP; Ruang Pers Room; Taman Layak Anak; Rumah Dinas Walikota; Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Jombang ; Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Cilegon; Terminal Seruni dan Sanggar Seni Budaya Kota Cilegon. Sedangkan yang dipasang melalui program DPWkel sebanyak 481 titik, dimana 40 titik tersebar di 8 kecamatan dan 441 titik yang tersebar 43 kelurahan di Kota Cilegon.	Direncanakan pemasangan Wifi sebanyak 22 titik di area publik dengan alokasi anggaran sebesar 198jt.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
PP 11 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Visual Kota			
KP 11.1	Peningkatan Sarpras Utilitas Permukiman dan Perdagangan		
KP 11.2	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Pada tahun 2021 telah dibangun 2 unit sumur air dalam (deep well) di Cipaot dan Gerem serta pembangunan sodetan dari sumber KTI di Indonesia Power yang dialirkan ke Kelurahan Lebakgede sampai ke groundtank 4 (total groundtank ada 6 unit), pembelian pompa 3 unit serta pemasangan jaringan listrik. Instalasi jaringan perpipaan ini belum difungsikan karena belum ada perjanjian kerjasama antara Pemkot Cilegon dengan KTI dan Indonesia Power terkait dengan volume air, besaran tarif, serta pihak yang harus bertanggungjawab dalam pendistribusian air.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak dan aman sebesar 30,29%; Upaya yang dilakukan melalui : penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM, pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan, operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan permukiman. Tahun 2022 telah dibuat perjanjian kerjasama dan pembagian kewenangan antara KTI dan PDAM dengan alokasi 20liter/detik/hari untuk melayani air bersih masyarakat di Lebak Gede sedangkan penyusunan DED bangunan take off di Lebakgede baru akan dilaksanakan tahun 2023.
KP 11.3	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sampai dengan tahun 2021 belum pernah dilaksanakan karena belum jelasnya kelembagaan pengelola limbah domestik. Tahun 2021 ada fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Banten terkait dengan kajian kelembagaan pengelola limbah domestik di Kota Cilegon. Kajian ini direncanakan akan ditindaklanjuti menjadi naskah akademis, namun pada tahun 2021, proses ini baru sampai dalam tahap pembahasan dan belum ada hasil tindaklanjutnya.	Tahun 2022 perlu menindaklanjuti hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Banten menjadi naskah akademis penyusunan regulasi untuk pembentukan Lembaga pengelola limbah domestik, namun sampai saat ini UPT Limbah Domestik belum terbentuk, sehingga kegiatan terkait pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik belum dapat dilaksanakan.
KP 11.4	Pembangunan landmark "markah" CILEGON	Pada tahun 2021 APBDP baru disusun DED Pembangunan Markah di Kecamatan Pulomerak	Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 5,6Milyar, namun ternyata lokasi di kelurahan Tamansari yang akan dibangun markah tersebut sudah dikuasai oleh advertising, sehingga membutuhkan tambahan biaya untuk sewa lahan yang belum disepakati

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
			dengan pihak ke-3, sehingga pembangunan landmark “markah” Cilegon tidak dilaksanakan.
KP 11.5	Pembangunan TPU Cikerei menjadi TPU modern	-	Tahun 2022 dilakukan Review DED TPU Modern Cikerei, rencana penataan fisik TPU Cikerei akan dilaksanakan tahun 2023.
KP 11.6	Pemasangan PJU Lingkungan	-	Pemasangan PJU lingkungan dilaksanakan melalui program DPWkel (daling) sebanyak 246 titik
KP 11.7	Pembangunan JLU	Pada tahun 2021 bidang tanah yang dibebaskan sebanyak 90 bidang tanah dengan luas 16.829,00 m2. Sehingga total bidang tanah yang sudah dibebaskan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 659 bidang dari total bidang tanah yang harus dibebaskan sebanyak 852 bidang. Sedangkan pematangan lahan yang telah terlaksana sampai dengan tahun 2021 adalah sepanjang 2,295km	Pada tahun 2022 jumlah bidang tanah yang dibayra(an sebanyak 26 bidang yaitu di kelurahan kedaleman (1 bidang), kelurahan Panggungrawi (8 bidang), Kelurahan Gedong Dalem (3 bidang), Kelurahan Purwakarta (6 bidang), Kelurahan Kotabumi (1 bidang), Kelurahan Grogol (1 bidang) dan Kelurahan rawa Arum (6 Bidang).
KP 11.8	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kota	Pada tahun 2021 dilaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan yaitu jalan Ciporong (tembulun), Jl Apollo, Jl. Cut Nya Dien, Jl. H. agus Salim, Jl. Kepuh Denok Akil-Kepuh Denok Masjid, Jl. KH. Ishak, Jl. Kp. Larangan, dan Jl. P. Antasari	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rekonstruksi jalan sebanyak 34 ruas, diantaranya adalah peningkatan Jl Achmad Dahlan peningkatan jalan Jalan H. Asnawi, Pengaspalan Jl. Link. Pintu Air RT/RW/ 01/04, Kel. Kubangsari, Kec. Ciwandan serta peningkatan Jembatan Ciberko serta pembangunan TPT jalan (8 ruas), pembangunan/pemeliharaan drainase jalan (11 ruas), pemeliharaan berkala jalan (42 ruas) serta pemeliharaan rutin sebanyak 51 ruas.
KP 11.9	Peningkatan jalan-jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan	Pada tahun 2021 dilaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan sebagai berikut : - Jl. KH. Mudzakir (032) (Akses Menuju Kel. Tegal Ratu) - Jl. Wilulang (145) (Akses Menuju Kel. Lebak Gede) - Leman (207) (Akses Menuju Kel. Gerem)	Pada tahun 2022 telah dilakukan lanjutan peningkatan Jl. Ahmad Dahlan (akses menuju Kel. Ciwedus)

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		- JLS - Penakodan (451) (Akses Menuju Kel. Bulakan dan Kel. Cikerei) - Serta Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan - Kubang Kepuh - Pringori (127) (Akses Menuju Kel. Suralaya)"	
KP 11.10	Peningkatan Jalan penghubung tempat wisata	Pada tahun 2021 disusun dokumen lingkungan dan dokumen pengadaan tanah akses jalan Situ Rawa Arum	Rencana pengadaan lahan untuk akses jalan Situ Rawa Arum baru akan dilaksanakan pada tahun 2023.
KP 11.11	Peningkatan Jalan penghubung ke tempat pendidikan (SMP 12, SMP 13, SMP 14, dan SMP 15)	Pada tahun 2021, dilakukan pemeliharaan rutin terhadap akses jalan penghubung ke tempat pendidikan yaitu Kelelet - Samiregau (067) (Akses Menuju SMPN 11 Kota Cilegon) (Akses Kel. Warnasari), Jl. Ki Kahal (131) (Akses Menuju SMPN 10 Kota Cilegon), serta jalan Tekukur dan Jalan Bima (akses jalan SMPN 7 Kota Cilegon).	Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeliharaan rutin jalan Jl. Perum Warnasari - SMP N 11 Cilegon (069) (Akses Menuju SMPN 11 Kota Cilegon) (Akses Kel. Warnasari)
KP 11.12	Peningkatan Jalan penghubung ke Kawasan Pertanian Terpadu	-	-
KP 11.13	Pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Progres penyediaan SAUM sampai dengan tahun 2021 adalah, telah terbangunnya 4 buah shelter dari kebutuhan 16 shelter. Armada Bus Medium SAUM, sampai dengan tahun 2021 tersedia 4 unit armada bus. Sedangkan rambu untuk SAUM dari kebutuhan 32 unit, belum tersedia. Pada tahun 2021 dibangun 1 unit halte dan 2 pos dishub di Kec. Cibeber dan Kec. Citangkil. Adapun rencana koridor yang akan dilayani SAUM adalah:	Tahun 2022 dianggarkan untuk modifikasi kendaraan SAUM tetapi tidak terserap karena belum ada kesepakatan dengan DAMRI terkait persyaratan yang harus terpenuhi.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Koridor 1 : Seruni-JLS-Ciwandan , dengan kebutuhan shelter sebanyak 12 unit dan armada bus sebanyak 7 unit. Koridor 2 : Seruni-JLU-TransMart, Koridor 3 : Ciwandan-TransMart	
PP 12 - Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian budaya daerah			
KP 12.1	Pengukuhan pahlawan nasional Banten	Belum ada progres	Kajian tentang KH. Asyathowil, sebagai bahan untuk pengusulan sebagai pahlawan nasional (observasi dan penelitian penggalian penulisan biography, penyusunan buku biography dan launching biographi KH Asyathowil). Proses pengusulannya akan dilakukan tahun 2023.
KP 12.2	Pembangunan Monumen Geger Cilegon dan Museum Cilegon	-	Belum ada tindak lanjut, antara lain karena adanya perubahan lembaga pengampu, yang berdampak terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan
KP 12.3	Penataan destinasi wisata	-	Belum ada tindak lanjut, antara lain karena adanya perubahan lembaga pengampu, yang berdampak terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan
PP 13 - Pemasyarakatan nilai-nilai luhur keagamaan			
KP 13.1	10 juta per tahun dan stimulan operasional DKM	Program ini mulai dilaksanakan di tahun 2022 karena harus melalui proses e-hibah.	Pada anggaran 2022 telah teralokasi untuk 80 masjid melalui anggaran hibah sebesar Rp 20 juta/masji, melalui anggaran hibah.
KP 13.2	50% kenaikan honor guru madrasah	Peningkatan honor daerah bagi 1.500 orang guru honorer TK/SD/SMP Swasta, 450 orang guru honor SDN masa kerja 10 tahun ke atas sebesar Rp 1 juta/bulan dari sebelumnya Rp 450 ribu/bulan, 350 orang guru honor SDN masa kerja di bawah 10 tahun sebesar Rp 675 ribu/bulan dari sebelumnya Rp 450 ribu/bulan.	Peningkatan honor daerah bagi 3.984 guru honorer tingkat TK/SD/SMP, Pemberian insentif untuk kepala sekolah/guru/tenaga kependidikan di 6 Sekolah Negeri dan 1 SMP Satu Atap yang berada di wilayah perbatasan sebesar Rp 1 juta/bulan untuk Kepala Sekolah dan Rp 500 ribu/bulan untuk guru dan tenaga kependidikan;

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Pemberian insentif untuk kepala sekolah/guru/tenaga kependidikan di 6 Sekolah Negeri dan 1 SMP Satu Atap yang berada di wilayah perbatasan sebesar Rp 1 juta/bulan untuk Kepala Sekolah dan Rp 500 ribu/bulan untuk guru dan tenaga kependidikan Kenaikan honor guru madrasah mulai dilaksanakan tahun 2022 karena harus melalui proses e-hibah	Kenaikan 50% honor guru madrasah diberikan kepada 5.189 orang guru
KP 13.3	Pemberdayaan remaja masjid melalui program kepemudaan	-	Dialokasikan sebesar Rp.2.980.000.000, untuk pemberdayaan 298 remaja masjid
KP 13.4	Peningkatan honor kader pemandi jenazah	-	Dialokasikan sebesar Rp.1.072.800.000, untuk peningkatan honor kader pemandi jenazah sebanyak 1788.
PP14 - Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup			
KP 14.1	Pendataan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota	Pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota, namun tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada kejadian bencana	Pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota, namun tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada kejadian bencana
KP 14.2	Pembangunan tandon	Sampai dengan tahun 2021 tandon yang telah selesai dibangun adalah tandon metro dan tandon Sukmajaya I. Capaian kinerja pada TA 2021 tidak sesuai dengan target rencana, dimana anggaran yang disediakan untuk lanjutan pembangunan tandon Sukmajaya 2 tidak terserap. Hal ini disebabkan:	Pembangunan tandon dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi yang difokuskan pada lokasi Tandon Sukmajaya II. Target pada tahun 2022 Tandon Sukmajaya II membuat Tembok Penahan Tanah Tandon, Pengecoran Jalan Akses, Pemagaran, Paving Blok Area Tandon dan Pembangunan Saluran Outlet namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang dilaksanakan baru pemagaran BRC, Batas Lahan, Pembangunan Saluran

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Adanya kesulitan proses penyusunan dokumen tender terkait dengan item pekerjaan pompa untuk tandon yang memerlukan kajian teknis cukup lama (Januari s.d. Agustus 2021); Penyerahan dokumen tender ke ULP dilakukan pada awal bulan September 2021 (Perkiraan SPK bulan Oktober); Ada perubahan jadwal tender, sehingga berpengaruh pada sisa waktu pelaksanaan pekerjaan (perkiraan SPK menjadi 10 Desember 2021); Diwaktu yang bersamaan, ada pekerjaan rekonstruksi jl KH. Ishak yg merupakan akses satu-satunya menuju lokasi tandon.	Outlet dan Pembersihan Gulma di sekitar tandon sehingga serapan anggaran tidak optimal.
KP 14.3	Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penyelamatan dan evakuasi bencana.	Indeks Risiko Bencana Kota Cilegon tahun 2021 adalah sebesar 128,15 artinya Sedang. Pada tahun 2021 capaian SPM Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan tercapai 100% dengan asumsi bahwa pemberian informasi melalui sosialisasi dan media cetak telah mencakup kesemua warga Cilegon sebanyak 445.961 jiwa. Capaian Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dari Jumlah penduduk di Kota Cilegon tahun 2021 sebanyak 445.961 jiwa yang telah mengikuti drill/pelatihan kurang lebih sebanyak 4.000 orang. Data ini belum akurat karena belum ada pendataan terkait dengan pelaksanaan drill/gladi yang dilaksanakan oleh perusahaan/industry serta kelurahan. Sedangkan capaian Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2021 di Kota Cilegon tercapai 100%. Kejadian Bencana di Kota	Indeks resiko bencana tahun 2022 sebesar 115 atau pada kategori “sedang”, dengan melalui upaya : Kegiatan Layanan Informasi Bencana melalui kebutuhan dokumen pokok berupa penyusunan review Kajian Resiko Bencana (KRB) belum terealisasi, sedangkan sosialisasi dan informasi bencana dengan tatap muka melalui media cetak, elektronik ataupun media informasi lainnya telah dilaksanakan walaupun belum berdasarkan NIK khusus pada daerah rawan bencana. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sebanyak 40 orang aparaturnya, 144 orang yang rentan bencana kegagalan teknologi, dan masyarakat melalui gladi dan drill kesiapan terhadap bencana sebanyak 250 orang. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana berupa perahu karet sebanyak 3 unit dan peningkatan kapasitas tim reaksi cepat, sertifikasi petugas penganggulangan bencana (4 orang).

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Cilegon selama Tahun 2021 yang berjumlah 80 (delapan puluh) kejadian dengan rincian sebagai berikut : • Bencana banjir sebanyak 16 kejadian; • Bencana Longsor (rumah roboh) sebanyak 7 kejadian; • Bencana Cuaca Ekstrem (puting beliung, pohon tumbang) sebanyak 33 kejadian; • Bencana kekeringan sebanyak 1 kejadian; • Kebakaran Lahan sebanyak 22 kejadian; dan • Penyelamatan Orang sebanyak 1 kejadian	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, melalui respon cepat KLB dan darurat bencana, penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
KP 14.4	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Capaian Indikator SPM Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Damkar yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time), pada tahun 2021 tercapai sebesar 93,59% dimana jumlah kebakaran sebanyak 77 kejadian dan yang terlayani sesuai respon time sebanyak 72. Sedangkan indikator jumlah layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran (balakar, satlakar, dan/atau komunitas lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Perangkat Daerah) dalam tingkat waktu tanggap masih 0%. Adapun capaian layanan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang terlayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercapai 100%. Pengadaan hydran (4 unit) dan tandon pada tahun 2021 tidak terserap dikarenakan perubahan PPTk dari eselon IV ke eselon III sehingga proses pengadaan terlambat dan sampai akhir tahun anggaran tidak terlaksana.	Pada tahun 2022 untuk meningkatkan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, maka dilakukan: 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan Dokumen RISPCK yang belum terlaksana. Penyediaan APD bahan B3 (10 buah), drill penanganan B3 (25 orang), Penyediaan hydran kota (18 titik), penyediaan tandon air (1 unit), penyusunan DED Pos Damkar, penyediaan tenda pleton (5 unit) dan oksigen portable (3 unit), dikalt pemadam tingkat dasar (70 orang). 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran melalui penyediaan alat inspeksi proteksi kebakaran, dan inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan Gedung sebanyak 100 unit, serta inventarisasi sarana proteksi kebakaran. 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui penyuluhan barisan relawan kebakaran/Balakar (40 orang), Sosialisasi Perda serta publikasi cara pencegahan kebakaran dan emergency call, pembentukan Satlakar (50 orang), penyuluhan kepada masyarakat (60 orang) dan penyuluhan terhadap Satlakar (50 orang), serta penyediaan sarpras untuk satlakar.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
			4. Penyelenggaraan operasi, pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.
KP 14.5	Peningkatan TPS3R, bank sampah, TPST dan TPA sanitary landfill	Pada tahun 2021 jumlah TPS3R di Kota Cilegon sebanyak 4 unit dari standar Jakstrada sebanyak 64 unit. Sepanjang tahun 2021 pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pengurangan sampah melalui pembentukan bank sampah (30 unit), lapak (12 unit), 23 (sekolah) sehingga capaiannya sebesar 3,27%. Capaian pengurangan sampah ini masih jauh dari target Jakstrada sebesar 15,46%. Dan upaya penanganan sampah diperoleh dari hasil kerjasama antara pemerintah kota Cilegon dengan PT. Indonesia Power yaitu mengubah sampah di TPA Bagendung menjadi sumber energy melalui Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) co-firing bahan bakar batu bara sebesar 5 ton/hari sampah segar. Jika dilihat dari target Jakstrada sebesar 27.35% ini masih sangat jauh dari realisasi sebesar 2,38%. Penanganan sampah yang dilakukan baru mencakupi penanganan sampah di TPA Bagendung yang masuk kurang lebih sebesar 136,2 ton/hari.	Pada tahun 2022 direncanakan untuk mendukung kerjasama scale up pengolahan sampah menjadi BBJP antara pemerintah kota Cilegon dan PT. Indonesia Power dari 5 ton/hari menjadi direncanakan hingga 100 ton/hari sampah segar secara bertahap, dan rencana kerjasama pengolahan sampah plastic dengan PT. Chandra Asri di TPA Bagendung maka terdapat perubahan output penyusunan dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah untuk jangka menengah dan jangka pendek pada TPA Bagendung meliputi : Pengukuran Kembali Batas Lahan dan Topografi TPSA Bagendung dan Penyusunan Re-Desain TPA Bagendung, Penyusunan DED Jalan Akses dan TPT (belum terlaksana), DED Jaringan Air Lindi dan Gas Methane (belum terlaksana). Output yang belum terlaksanan karena membutuhkan urutan pelaksanaan dan waktu yang panjang. Pembentukan bank sampah disinergikan dengan program DPWkel, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terealisasi karena banyaknya kendala diantaranya adalah lahan. Untuk meningkatkan pelayanan pengolahan sampah di TPSA Bagendung, melalui perluasan lahan TPSA seluas 7474 meter² akan dianalisis ulang dan diupayakan mengoptimalkan pemanfaatan secara maksimal lahan TPA Bagendung yang sudah ada serta pemasangan PJU di TPSA Bagendung.
PP 15 - Peningkatan nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan			
KP 15.1	Pembangunan Sentra Nelayan	Pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan TPI dari DID sebesar Rp.863.899.824,-, dan dialokasikan untuk pembangunan TPT. Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan pembangunan TPT tanpa disertai pembangunan bangunan pemecah gelombang (Breakwater)	Tahun 2022 direncanakan penyusunan DED sentra nelayan sebesar Rp.150jt. Namun belum dilaksanakan, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2023 melalui penyusunan <i>Feasibility Strudy</i> terhadap lokasi alternatif lain selain di Medaksa.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		dikhawatirkan akan merusak bangunan TPT sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan	
KP 15.2	Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	Tahun 2021 membuat TPT sepanjang 772 meter	Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.300jt untuk pembangunan pagar kawat duri keliling 742 meter (231 juta) serta instalasi gardu listrik induk 1,362 milyar.
KP 15.3	Gerakan masyarakat "urban farming"	Tahun 2021 dalam rangka mendukung kegiatan urban farming, telah dilaksanakan kegiatan: 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, telah dilakukan Pembentukan Pekarangan Pangan Lestari sebanyak 7 kelompok (DAK non fisik) dilaksanakan dalam rangka penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal memakai konsep pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT). pemberdayaan 1 KWT Cahaya Mandiri (cabe, jagung), dan Pelatihan Hydroponik 1 lingkungan (50 orang). 2) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, dilakukan melalui temu teknis pembudidaya ikan air tawar (30 orang), pelatihan budidaya ikan air tawar (30 orang), pelatihan pengolahan perikanan (30 orang) dan penyediaan sarpras perikanan budidaya. 3) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, pada demplot pemurnian varietas kacang tanah seluas 1 ha, demplot pengembangan jagung pulut seluas 2.000 m2, demplot penggunaan varietas unggul baru padi dengan jajar legowo (4:1) seluas 4 ha, sekolah lapang metode hazton padi sawah bagi kelompok tani di 8 kecamatan, Sekolah Lapang Peningkatan Produksi Padi dengan Metode Jajar	Tahun 2022 mendapat DAK non fisik untuk pemberdayaan 4 KWT, pengembangan dukungan P2L 10 lokasi. Pelatihan optimalisasi pekarangan sumber pangan 100 peserta, Lomba KWT untuk memotivasi KWT, pelatihan Hydroponik sebanyak 50 orang. Tahun 2022 dilakukan pendataan jumlah produksi untuk masing-masing KWT (84 KWT). Promosi dan pemasaran olahan pangan lokal dari KWT dan Kelompok Tani (sewa tempat untuk 1 tahun). Sudah ada KWT yang mandiri "Cahaya Mandiri" di Kel. Gerem.

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Legowo (4:1) bagi Kelompok Tani di 8 kecamatan, serta Workshop Penetapan Sasaran Indikatif Tanaman Pangan. 4) Penyediaan bibit tanaman buah tahunan dan perkebunan sebanyak 950 batang, inovasi teknologi rekayasa bentuk buah melon sebanyak 500 m2, budidaya penggunaan varietas unggul komoditas cabe bagi penyuluh 4.500 m2, workshop penetapan sasaran indikatif tanaman hortikultura dan perkebunan, terlaksananya SL GAP budidaya penggunaan varietas unggul komoditas cabe bagi kelompok tani sebanyak 8 kecamatan, SL GAP budidaya melon sebanyak 8 kecamatan. 5) Fasilitasi kinerja penyuluh, melalui Kegiatan Pertemuan Kelompok sebanyak 1 kegiatan)	
PP 16 - Penegakan hukum, trantibum dan linmas			
KP1	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang trantibum : Penanganan dan penegakan gangguan trantibum	Pada tahun 2021 dalam upaya pemenuhan SPM telah dilaksanakan : • Penegakan perda sesuai SOP sebesar 46,15%, dari 13 Perda baru 6 yang terlayani. • Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar sebesar 100% • Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar sebesar 100% • Adapun Pencapaian indikator kinerja program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum ini didukung dengan kinerja kegiatan sebagai berikut :	Capaian SPM bidang trantibum di tahun 2022 sebesar 98,67%, yang dihitung dari persentase penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar. Upaya ini dilakukan melalui : pemenuhan SOP (100%), sarpras saarpol PP (88,89%), peningkatan kompetensi anggota (84,51%), pelayanan yang terkena dampak akibat penegakan (pelayanan kerugian dan pengobatan)

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		- Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota sebesar 99,33% - Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebesar 100% - Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota sebesar 33,33%	
PP 17 - Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan			
KP 17.1	100 juta/tahun dana lingkungan RW	Program ini mulai dilaksanakan di tahun 2022.	Pada anggaran 2022 telah terealisasi untuk 80 masjid melalui anggaran hibah sebesar Rp 20 juta/masjid, melalui anggaran hibah.
KP 17.2	1 juta/bulan honor RT-RW	Peningkatan honor Ketua RT dan Ketua RW dari sebesar Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta rupiah	Selain ketua RT/RW dialokasikan kenaikan honor untuk perangkat RT/RW (wakil RW dan sekretaris/Bendahara RW dan RT) sebesar Rp 300 ribu (dari sebelumnya Rp 150 ribu).
PP 18 - Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan			
KP 18.1	Peningkatan Keluarga Berencana	Dilakukan melalui pembinaan kampung KB tahun 2021 sebanyak 9 kampung yaitu Cikerei, Bagendung, Panggung Rawi, Tegal Bunder, Deringo, Taman sari, Kepuh, Rawa arum dan Karang asem. Jumlah akseptor KB baru tahun 2021 sebanyak 9.915 sedangkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 61.292.	Dilakukan melalui kegiatan KIE melalui lomba harganas (11 kategori), pelayanan KB langsung (4keg), pembinaan kampung KB (9 kampung) serta kegiatan pengelolaan data (2 dok)
KP 18.2	Peningkatan kesejahteraan kader Cilegon Mandiri	Jumlah Kader yang diberdayakan dalam penyelenggaraan program sebanyak 2550 orang	Jumlah Kader yang diberdayakan dalam penyelenggaraan program sebanyak 2550 orang
KP 18.3	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Dilaksanakan melalui pembinaan P2WKSS (2 kelurahan), Jumlah Keluarga Binaan P2WKSS yang meningkat kualitasnya	Dilaksanakan melalui fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebanyak 184 orang, pembinaan P2WKSS (2 kelurahan), dan Peningkatan

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		sebanyak 146 KK dari 200 KK yang dibina. Serta pembinaan pelaku usaha perempuan (UMKM) sebanyak 390 dari 2090 pelaku usaha perempuan yang ada.	Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (PKK dan DWP)
KP 18.4	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan UPTD PPA berupa Pelayanan terhadap pengaduan terkait perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran di Kota Cilegon. Tahun 2021 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Kota Cilegon sebesar 76 dari 100.000 penduduk perempuan atau 162 orang dari 214.007 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah anak yang mengalami kekerasan sebanyak 53 kasus dapat dilayani 100%.	Dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan UPTD PPA berupa Pelayanan terhadap pengaduan terkait perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran di Kota Cilegon. Serta bintek kepada PATBM tentang pencegahan KDRT dan TPPO di dalam keluarga (130 orang) dan pencegahan kekerasan terhadap anak (30 orang)
PP 19 - Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga			
KP 19.1	Pembangunan arena olahraga pemuda	-	-
KP 19.2	Optimalisasi fungsi sport centre	Pada tahun 2021 dilaksanakan penyusunan DED revitalisasi lapangan tenis, perencanaan lampu lapangan sepakbola, drainase sport center, gedung pemuda, sedangkan pekerjaan fisiknya adalah tribun barat, kursi tribun vip, keramik, plafond, listrik instalasi hydran, pemasangan plafond tribun timur, utara dan selatan, ruangan cabor, perbaikan screeding dan epoxy dan sanitary dan pengecatan serta landscape	Pencapaian pelaksanaan Program Prioritas Optimalisasi Fungsi Sport Center berkonsep operasional berupa penyelesaian pembangunan Sport Center. Penambahan progress fisik stadion di tahun 2022 sebesar 15%, meliputi : pemasangan gardu lisrik dan pemasangan daya listrik stadion, pemasangan pompa air summersible dan instansi jaringan air serta pengadaan dan pemasangan lampu FOP



Bab 4 : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan & Penugasan

Beberapa bentuk dari Tugas Pembantuan dan Penugasan adalah pelimpahan tugas dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan di daerah. Di sisi lain, Tugas Pembantuan juga diharapkan akan menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, serta dipandang apabila sebagian tugas-tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah tersebut akan lebih efektif dan efisien.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Kota Cilegon tidak memperoleh Tugas Pembantuan & Penugasan dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi Banten, sehingga pada Sub Bab ini tidak akan dijabarkan lebih jauh terkait dengan Tugas Pembantuan dan Penugasan.

Bab 5 : Penutup

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam teknis pelaksanaan RPJMD 2021-2026 setelah tahun transisi di 2021 lalu. Berbagai kebijakan prioritas tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tertuang dalam wujud program prioritas pembangunan daerah sebagai turunan dari janji politis kepala daerah terpilih periode 2021-2024. Esensi pembangunan Kota Cilegon dalam RPJMD 2021-2026 tentunya masih mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan beberapa diantaranya merupakan keberlanjutan dari RPJMD periode sebelumnya.

Fokus dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD 2022 yang merupakan turunan dari RPJMD 2021-2026 adalah terkait dengan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Layanan Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat yang beberapa diantaranya diintervensi melalui pemenuhan sarana dan prasarana publik yang memadai demi menunjang aktivitas sosio-ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Cilegon di sepanjang tahun 2022.

Implementasi dokumen perencanaan tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen RKPD 2022 dan dilaksanakan melalui APBD Kota Cilegon Tahun 2022 direpresentasikan ke dalam **131 nomenklatur program, 271 nomenklatur kegiatan, dan 780 nomenklatur sub kegiatan** yang dilaksanakan oleh **35 OPD/ unit Perangkat Daerah** dan **105 sub unit perangkat daerah**. Sepanjang tahun 2022, tidak dipungkiri bahwa terdapat cukup banyak kendala teknis dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan dokumen perencanaan dalam lingkup penyelenggaraan APBD 2022 (beserta APBD 2022 perubahan) beberapa diantaranya terkait perubahan struktur dan organisasi tata kerja (SOTK), penyederhanaan birokrasi, penerapan kebijakan baru dalam pemenuhan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) dalam proses barang dan jasa, serta berbagai hal-hal teknis lainnya yang sedikit banyaknya mempengaruhi dinamika pelaksanaan pembangunan di sepanjang tahun anggaran 2022.

Capaian realisasi total belanja pada APBD Tahun 2022 sudah cukup membaik, yaitu 83,43% setelah pada tahun sebelumnya (2021) hanya sebesar 75,13 %. Di 2022, secara pencapaian kinerja *outcome* maupun *output*, capaiannya cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 86,71 % dan rata-rata capaian indikator program di angka 100 %. Walaupun secara rata-rata capaian indikator program di atas 100 %, namun tidak kami pungkiri ada sejumlah indikator program yang masih diperlukan pendekatan penanganan yang lebih intensif ke depannya. Dalam hal optimalisasi belanja daerah, Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya meningkatkan instrumen pengendalian kinerja pembangunan secara integratif, *realtime* dan komprehensif dari tahapan perencanaan program/kegiatan, perencanaan pengadaan barang dan jasa, pengendalian proses, hingga evaluasi capaian kinerja yang dipadukan dengan sistem penilaian kinerja pegawai secara individu dan organisasi.

Pada aspek indikator makro pembangunan, ekonomi Kota Cilegon bertumbuh secara positif dengan **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** sebesar **4,37 %** di sepanjang Tahun



2022. Kondisi pertumbuhan ekonomi ini tentunya diharapkan akan makin meningkat lagi di tahun 2023 dan seterusnya, terlebih dengan kondisi realisasi investasi di sepanjang 2022 yang sangat luar biasa dengan nilai investasi sebesar 32,9 trilyun. Sebagai informasi, nilai investasi 2022 ini adalah yang tertinggi di Provinsi Banten, jauh diatas kabupaten kota lainnya di provinsi Banten. Kondisi ini mengindikasikan dalam sektor perekonomian, Kota Cilegon mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di 2022. Tingginya nilai investasi dan geliat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Cilegon.

Beralih pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cilegon pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,03 %, yaitu dari 10,13 % di tahun 2021, **membaik menjadi 8,10 %** di tahun 2022. Lonjakan pengangguran akibat pandemi covid-19 di 2020-2021 lalu sudah jauh berkurang dan membaik di tahun 2022 dimana sektor-sektor produksi sudah mulai beroperasi secara normal. Penurunan tingkat pengangguran tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan aktivitas pembangunan di sepanjang tahun 2022 antara lain penciptaan iklim dan layanan investasi sehingga terwujud realisasi investasi di Kota Cilegon yang membuka tambahan lapangan pekerjaan, pelaksanaan “Salira” DPWKel yang melibatkan peran dan tenaga kerja dari masyarakat setempat di tiap kelurahan, pelatihan dan fasilitasi peningkatan kualitas tenaga kerja di BLK Disnaker Kota Cilegon, pendampingan dan penguatan usaha mikro dan kecil, dan berbagai program lainnya yang dilaksanakan secara sinergi oleh berbagai stakeholder (instansi vertikal, pemerintah maupun pelaku usaha/industri) di Kota Cilegon.

Pada aspek pembangunan manusia, aspek pendidikan pada parameter rata-rata lama sekolah (RLS) berhasil meningkat secara signifikan, yaitu dari 10,08 tahun menjadi 10,34 tahun. Kenaikan RLS ini berkontribusi besar terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon dari 73,35 menjadi 73,95 di tahun 2022. Peningkatan IPM Kota Cilegon adalah yg tertinggi diantara 4 Kota lainnya di provinsi Banten. Secara runtun waktu, nilai **pertumbuhan IPM Kota Cilegon di 2022** juga merupakan **yg tertinggi dalam 9 tahun terakhir**.

Seluruh rangkaian aktivitas pembangunan sebagai manifestasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun anggaran 2022 juga merupakan wujud tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon tahun sebelumnya (2021). Berbagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut sebagian besar sudah terimplementasi dalam tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pencapaian kinerja program dan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2022, dan juga dijadikan salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Berikut adalah beberapa implementasi kebijakan dan terobosan dalam pelaksanaan program pembangunan di sepanjang 2021 dan 2022, terutama yang berkaitan dengan janji politik walikota dan prioritas daerah di berbagai aspek pembangunan:

1. Honor RT RW naik menjadi Rp1 juta per bulan.
2. Program Salira, dana lingkungan Rp100 juta per RW per tahun.
3. Kenaikan TPP untuk ASN sebesar 5 persen per tahun
4. Kenaikan honorer sebesar Rp450 ribu menjadi Rp650 ribu. Bagi yang bekerja di atas 10 tahun Rp1 juta rupiah. Kenaikan insentive guru yang mengajar di sekolah

- terpencil seperti di atas pegunungan Rp500 ribu, kepala sekolah Rp1 juta, penilik naik Rp3 juta dan pengawas Rp1 juta.
5. Kenaikan honor guru-guru madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dari hibah Rp22 M menjadi Rp33 M atau naik 50 persen.
 6. Penambahan 4 SMP negeri, yakni SMPN 12 Purwakarta, SMPN 13 Jombang, SMPN 14 Citangkil dan SMPN 15 Grogol.
 7. Pembangunan ruang terbuka hijau di Cibeber, Purwakarta dan Pulomerak.
 8. Program untuk UMKM dengan pelatihan dan pemberian 300 sertifikat halal dan pemberian pinjaman perintisan Rp1 sampai dengan Rp3 juta, kemudian pengutan Rp3 sampai dengan Rp5 juta dengan bunga 0 persen.
 9. Bantuan kursi roda untuk masyarakat melibatkan semua stakeholder sebanyak 500 kursi roda.
 10. Pembuatan sarana hobi dan komunitas untuk gendre dan panjat tebing.
 11. Pengangguran menurun dari peringkat ke-7 kenperingkat ke-4 sejak menjabat 12,69 persen turun ke 10,13 persen. Saat ini bahkan sudah menjadi 8,10 persen.
 12. Program Beasiswa full sarjana pada tahun 2021 sebanyak 523 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.208 orang.
 13. Program BPJS selama 21 tahun baru diangka UHC 82 persen, sekarang UHC 97,71 persen. Dampaknya bisa mempermudah masyarakat yang masuk rumah sakit hanya pakai KTP terutama masyarakat tidak mampu 3x24 jam BPJS jadi dan masyarakat yang tidak bisa bayar karena tertunggak.
 14. Program hibah masjid Rp20 juta per 2 tahun.
 15. Pembuatan 8 palang pintu kereta api & tahun 2023 akan dibuat 4 palang pintu lagi.
 16. Pembuatan jamban untuk Kelurahan Grogol sebanyak 250 toilet.
 17. Pembangunan sarana air bersih di Cipala dan Watulawang.
 18. Pemberian penghargaan setiap ASN pensiun dan tambahan uang kadeudeuh dari Korpri.
 19. Penggunaan mobil dinas Wali Kota untuk pernikahan di wilayah Kota Cilegon.
 20. Pembuatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 108 pelayanan.
 21. Pemasangan internet untuk wilayah yang belum ada jaringan seperti di Gunung Batur dan Pabean.
 22. Penurunan angka stunting dengan meraih prestasi terbaik se-Provinsi Banten.
 23. Program Cilegon Caang untuk wilayah setiap kelurahan.
 24. Pembuatan *command center* untuk Smart City Kota Cilegon.
 25. Pembuatan pabrik sampah pertama kali dan terbesar dalam bentuk Co-Firing dengan harga satu ton sampah sama dgn harga 1 ton batu bara bantuan PLN hampir Rp10 M dengan kapasitas 30 ton per hari dan Rp100 M dari Bank Dunia dengan kapasitas 200 ton per hari.
 26. Kenaikan honor kader dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan.
 27. Pembangunan jalan yang sudah lama rusak seperti jalan BBS dan Jalan Kubang Laban dekat Pasar Kranggot.
 28. Pemberian honor pemandi jenazah.
 29. Bantuan mudik gratis tahun 2022.
 30. Realisasi investasi terbaik peringkat ke- 9 secara Nasional.
 31. Pembuatan taman makam pahlawan.
 32. Kerjasama dengan PT Krakatau Steel dalam hal pembuatan Cangkul Merah Putih karya Wong Cilegon.
 33. Dana parpol naik semula 4.600 rupiah menjadi 7.000 rupiah per suara.

- 
34. PBB gratis untuk para pejuang.
 35. Peresmian Stadion Geger Cilegon dan pembangunan akan segera dilanjutkan.
 36. Merangkul industri dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang kerjasama pemagangan dengan industri sehingga banyak menyerap tenaga kerja.
 37. Tambahan untuk bantuan rutilahu semula Rp7,5 juta menjadi Rp15 juta rupiah.
 38. Kebijakan Menibus ijazah SMK 200 siswa yang tidak tertebus melalui dana Baznas.
 39. Penggratisan biaya LKS SD dan SMP agar tidak memberatkan orang tua.
 40. Bantuan anak-anak kurang mampu di sekolah setaraf SD dan SMP swasta di berikan beasiswa SPP gratis.
 41. Pemberian bonus Prestasi atlet berprestasi di bawah KONI untuk juara I Rp30 juta, juara II Rp20 juta dan juara III Rp10 juta.

Di sepanjang 2021 hingga 2022, beberapa upaya dan inovasi yang dilakukan serta capaian yang diraih oleh Pemerintah Kota Cilegon turut menghasilkan penilaian atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cilegon dan mendapatkan apresiasi atau pengakuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah pusat. Berikut adalah beberapa penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Cilegon terhadap pencapaian pembangunan dari 2021 sampai dengan awal tahun 2023:

1) Anugerah Meritokrasi (penerapan sistem merit ASN) (2021)

Pemerintah Kota Cilegon memperoleh penghargaan atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Keputusan KASN Nomor 51/KEP.KASN/C/XI/2021 tanggal 30 November 2021 nilai akhir penerapan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada angka 273,5 (kategori baik)

2) Penghargaan Smart City (kategori “Smart Environment”) (2021)

Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan Penghargaan dari Kemenkominfo RI atas implementasi program smart city kategori Smart Environment Gerakan Menuju Smart City 2021. Penghargaan ini masuk dalam dimensi smart environment yang diusung dengan program GEMPIL (Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan) yang merupakan pengembangan dari program kampung iklim yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon tengah mengoptimalkan BBJP (Bahan Bakar Jemputan Padat) yang digunakan untuk bahan bakar Industri yang akan dimanfaatkan untuk industri-industri melalui metode-metode biodrying yang dapat menghasilkan kalori hasil biodegradasi sampah.

3) Penghargaan Pencapaian Target Eradikasi Frambusia (2021)

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas pencapaian target Eradikasi Frambusia. Eradikasi Frambusia sendiri adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan Frambusia (infeksi bakteri jangka panjang pada kulit, tulang, dan sendi secara permanen) sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

4) Penghargaan kapabilitas APIP Level 3 (2021)

Pemerintah Kota Cilegon memperoleh penghargaan atas kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten.

5) Penghargaan OPINI BPK WTP (2021)

Kota Cilegon mendapatkan Penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dimana Kota Cilegon meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya secara berturut-turut.

6) Penghargaan Apresiasi percepatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas (2021)

Staf Khusus Presiden RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Cilegon atas keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan terkena dampak Covid-19 baik secara langsung karena infeksi, maupun tidak langsung.

7) Penghargaan PPM Mikro Terbaik dari Kapolri (2021)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Cilegon atas Keberhasilan Pemkot Cilegon dalam mendukung pelaksanaan PPKM Mikro pada masa pandemic covid-19 di bulan Februari – Maret 2021 dengan predikat terbaik.

8) Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha Utama (2021)

Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) memberikan Piagam Penghargaan dan Tanda Kehormatan Wredatama Nugraha Utama yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas jasa dalam mendukung dan membina Organisasi Pensiunan Sipil / Aparatur Sipil Negara yang sangat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan PWRI.

9) Penghargaan Kota Layak Anak (2021)

Kota Cilegon kembali meraih penghargaan untuk kedua kalinya sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Madya Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

10) Penghargaan Nutrisionis Terbaik Nasional (2021)

Pemerintah Kota Cilegon memperoleh penghargaan peringkat pertama Tenaga Kesehatan Teladan kategori Nutrisionis terbaik Tingkat Nasional pada kategori Nutrisionis Terbaik Tingkat Nasional dari Kementrian Kesehatan.

11) Peringkat 10 Besar Penghargaan Pembangunan Daerah (2022)

Kota Cilegon berhasil melanjutkan tahapan ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (23/03/2022)

12) Penghargaan OPINI BPK WTP 9 Tahun Berturut-turut (2022)

Kota Cilegon mendapatkan Penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dimana Kota Cilegon meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. (tanggal 17 Oktober 2022)

13) Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan Kategori “Baik” (2022)

Pemerintah Kota Kota Cilegon kembali menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Pemerintah daerah dalam penerapan sistem Merit dalam manajemen ASN dengan



kategori "Baik", penghargaan ini diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam ajang Anugerah Meritokrasi yang diadakan di Jakarta, Kamis (8/12/2022)

14) Penghargaan Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (2022)

Pemerintah Kota Cilegon meraih Penghargaan Tingkat Nasional yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) RI pada acara puncak Peringatan Hari HAM Se – Dunia ke – 74 Tahun 2022 yang bertema “Pemajuan HAM untuk Setiap Orang Menuju Indonesiaiaia Maju.” (12/12/2022)

15) Penghargaan Realisasi Investasi (2022)

Pemerintah Kota Cilegon menerima penghargaan atas Pencapaian Realisasi investasi 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kota Cilegon merupakan salah satu dari 10 daerah terbaik yang dapat memberikan kontribusi investasi kepada negara. (16/02/2022)

16) Penghargaan Kota “Stop BABS”, Pelayanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2022 dari Kementerian Kesehatan (2022)

Kota Cilegon meraih Penghargaan pada kategori Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) pada rangkaian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Dante Saksono Harbuwono kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di di Hotel Discovery Ancol Taman Impian Jaya Ancol – Jakarta, tanggal 23 November 2022

17) Penghargaan Sanitarian Terbaik STBM Award Kementerian Kesehatan (2022)

Kota Cilegon meraih Penghargaan pada kategori “Sanitarian Terbaik” pada rangkaian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Dante Saksono Harbuwono kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di di Hotel Discovery Ancol Taman Impian Jaya Ancol – Jakarta, tanggal 23 November 2022

18) Penghargaan Lurah Terbaik STBM Award Kemenkes-RI (2022)

Kota Cilegon meraih Penghargaan pada kategori “Lurah Terbaik” pada rangkaian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Dante Saksono Harbuwono kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di Jakarta, tanggal 23 November 2022.

19) Penghargaan Natural Leader Terbaik STBM Award (2022)

Kota Cilegon meraih Penghargaan pada kategori “Natural Leader” pada rangkaian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Dante Saksono Harbuwono kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian pada tanggal 23 November 2022.

20) Penghargaan *Best Leadership in Human Resource Empowerment* (2022)

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meraih apresiasi Best Leadership in Human Resource Empowerment dalam ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) 2022 (23 September 2022).

21) Penghargaan Kepala Daerah Paling Inspiratif (2022)

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meraih penghargaan Wali Kota Inspiratif dengan kategori “Phenomenal Figure” sebagai Pejabat Daerah Paling Inspiratif dalam penataan kota pada Indonesia Property & Bank Award XVI dan My Home Award V (24 Februari 2022).

22) Tim Percepatan Penurunan Stunting Terinovatif Tahun 2022

Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan penghargaan dari BKKBN bekerja sama dengan Tribun Banten, sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting Terinovatif Tahun 2022 pada acara **Stunting Heroes Award BKKBN Banten 2022** pada Tanggal 1 Oktober 2022.

23) Pelaporan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) RS Terbaik se-Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI (2022)

Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan penghargaan atas Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), yaitu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu dan memberikan sinyal peringatan (*alert*) kepada pengelola program untuk segera melakukan respon/pelayanan.

24) Penghargaan atas Pembina “Genre” Berencana Terbaik (2022)

Kota Cilegon meraih penghargaan Pembina “Genre” (Generasi Berencana) Terbaik Tingkat Provinsi Banten dari BKKBN Provinsi Banten yang diterima pada Acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang ke - 29 Tingkat Provinsi Banten.

25) Kota Paling Kontributif ke Pendidikan Tinggi di Banten (2023)

Kota Cilegon meraih penghargaan “*silver winner*” dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (RI). Kota Cilegon menerima penghargaan untuk kategori kabupaten/kota paling tinggi berkontribusi pada pendidikan tinggi berdasarkan Laporan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV. Kota Cilegon sebagai Terbaik se-Provinsi Banten. Adapun di wilayah IV yakni Provinsi Jawa Barat dan Banten, Kota Cilegon menempati terbaik kedua dari 33 kabupaten/kota. Berdasarkan Laporan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV tahun 2022. (Kamis 16 Februari 2023).

26) Penghargaan *Universal Health Coverage* (2023)

Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan penghargaan pencapaian Universal HealthCoverage sebesar 98,09 % sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. (14 Maret 2023)

27) Penghargaan Pelayanan KB terbaik dari BKKBN (2023)

Pemerintah Kota Cilegon mendapat Penghargaan dari Kepala BKKBN Pusat sebagai Kab/Kota Tertinggi ke-2 utk Pelayanan KB Peserta Baru MKJP Tahun 2022 dan Kab/Kota Terbaik ke-4 untuk kegiatan Gerakan Bersama Brimob dan Bidan Dalam Melayani KB Implant pada tgl 8-11 Maret 2023 KB Implant pada Gerakan Bersama Brimob dan Bidan tanggal 8-11 Maret 2023.

28) Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (2023)

Kota Cilegon meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Dari Ombudsman Ri (27 Januari 2023)

29) Penghargaan Pelayanan KB terbaik dari BKKBN (2023)

Pemerintah Kota Cilegon mendapat Penghargaan dari Kepala BKKBN Pusat sebagai Kab/Kota Tertinggi ke-2 utk Pelayanan KB Peserta Baru MKJP Tahun 2022 dan Kab/Kota Terbaik ke-4 untuk kegiatan Gerakan Bersama Brimob dan Bidan Dalam Melayani KB Implant pada tgl 8-11 Maret 2023 KB Implant pada Gerakan Bersama Brimob dan Bidan tanggal 8-11 Maret 2023.

30) Penghargaan BP2MI atas Kepedulian Pekerja Migran Indonesia (2023)

Penghargaan dari BP2MI sebagai wali kota pertama se-Provinsi Banten yang peduli terhadap Pekerja Migran Indonesia, yaitu dengan melakukan pelepasan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri (Kamis, 16 Maret 2023)

Tidak kurang dari 30 penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Cilegon sepanjang tahun 2021, 2022 hingga awal 2023. Selain itu, Kota Cilegon dalam beberapa sektor pembangunan juga menjadi rujukan bagi banyak pemerintah daerah lain untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Di tahun 2022, Kota Cilegon menjadi rujukan bagi banyak pemerintah daerah lain terkait inovasi pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) atau *co-firing*. Metode pengolahan sampah hasil kerjasama PLN – Pemerintah Kota Cilegon ini menjadi inovasi pengelolaan sampah yang diakui secara nasional dan menjadi percontohan bagi banyak kabupaten/kota di Indonesia sebagai solusi untuk mereduksi timbunan sampah sekaligus solusi energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.

Pengakuan dan penghargaan yang diperoleh Kota Cilegon tentunya merupakan implikasi positif dari keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon dan seluruh stakeholder pendukung baik dari unsur DPRD, masyarakat, institusi pendidikan, instansi vertikal, dan pelaku usaha dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di Kota Cilegon di sepanjang Tahun Anggaran 2022.

Sebagai penutup, dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2022 ini diharapkan dapat merepresentasikan gambaran hasil pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon sepanjang Tahun Anggaran 2022 secara komprehensif, sebagai rujukan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon ke depannya. Pemerintah Kota Cilegon secara terbuka menerima masukan dan rekomendasi terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang dalam dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2022 ini, semata-mata untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

Cilegon, 17 Maret 2023

WALI KOTA CILEGON

ttd

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.



LAMPIRAN

- 1. Ringkasan Neraca & Laporan Laba-Rugi **BPRS Cilegon Mandiri**
- 2. Ringkasan Neraca & Laporan Laba-Rugi **PDAM Cilegon Mandiri**
- 3. Ringkasan Neraca & Laporan Laba-Rugi **PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri**



NERACA
PT BPRS CILEGON MANDIRI
UN AUDITED
Periode 31 Desember 2022

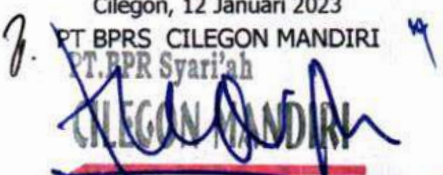
POS - POS	JUMLAH
1 KAS	893,439,700
2 PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	-
3 GIRO PADA BANK LAIN	2,085,237,781
4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN	72,447,706,397
5 SURAT-SURAT BERHARGA	-
6 PIUTANG MURABAHAH	53,606,212,262
7 PIUTANG ISTISHNA	5,328,543
8 PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	11,429,435,825
9 PEMBIAYAAN MUDHARABAH	-
10 PINJAMAN QARDH	22,982,608
11 PIUTANG TRANSAKSI MULTIJASA	2,611,456,035
- Penyisihan & Penghapusan Aktiva Produktif	(2,284,843,538)
12 PERSEDIAAN	-
13 TAGIHAN & KEWAJIBAN AKSEPTASI	-
14 AKTIVA UNTUK IJARAH	3,675,000,000
- Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah	(253,344,255)
15 AKTIVA ISTISHNA DLM PENYELESAIAN	-
16 PENYERTAAN PADA ENTITAS LAIN	-
17 AKTIVA TETAP	-
a. TANAH & BANGUNAN	5,795,348,679
b. Akumulasi Penyusutan Tanah & Gedung -/-	(2,463,944,553)
c. INVENTARIS	4,119,395,713
d. Akumulasi Penyusutan Inventaris -/-	(3,990,814,455)
18 PIUTANG PENDAPATAN BAGI HASIL	-
19 PIUTANG PENDAPATAN IJARAH	-
20 AKTIVA LAIN-LAIN	1,046,096,048
Total Aktiva	148,744,692,790
1 KEWAJIBAN SEGERA	403,571,966
2 BAGI HASIL YG BELUM DIBAGIKAN	206,122,501
3 SIMPANAN	5,132,418,388
4 SIMPANAN DARI BANK LAIN	-
5 H U T A N G	-
6 KEWAJIBAN DANA INV. TERIKAT	-
7 HUTANG PAJAK	-
8 KEWAJIBAN LAIN-LAIN	267,974,399
9 EST. KERUGIAN KOM. & KONT.	-
10 PINJAMAN YANG DITERIMA	-
11 PINJAMAN SUBORDINASI	-
12 INV.TDK.TERIKAT- BUKAN BANK	-
- Tabungan Mudharabah	18,224,523,132
- Deposito Mudharabah	69,071,400,000
13 INV.TDK.TERIKAT - DARI BANK	-
- Tabungan Mudharabah	-
- Deposito Mudharabah	5,600,000,000
14 REKENING ANTAR KANTOR	-
15 CADANGAN DANA	459,519,749
16 MODAL DISETOR	59,600,000,000
17 DANA SETORAN MODAL	-
18 MODAL SUMBANGAN	355,800,000
19 CADANGAN	8,012,735,903
20 LABA/RUGI TAHUN LALU	(22,044,436,218)
21 LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	3,455,062,970
Total Pasiva	148,744,692,790

Cilegon, 12 Januari 2023
PT BPRS CILEGON MANDIRI

Novran Erniatman Syarifuddin, SE. MM.
Direktur Utama

LAPORAN LABA / RUGI
PT BPRS CILEGON MANDIRI
UN AUDITED
 Periode 31 Desember 2022

POS POS	KUMULATIF
I. PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA	
1. PENDAPATAN MARGIN DARI JUAL BELI	
1.1 Murabahah	4,795,116,739
1.2 S a l a m	-
1.3 Keuntungan Bersih Istishna	-
1.4 Istishna	35,698,137
2. PENDAPATAN DARI SEWA	107,275,853
3. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL	-
3.1 Mudharabah	-
3.2 Musyarakah	640,473,987
3.3 Mudharabah Muqayyadah	-
4. PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA LAINNYA	2,554,719,903
5. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	-
5.1 Pendapatan Administrasi	298,022,611
5.2 Pendapatan Jasa Layanan	1,414,525
5.3 Pendapatan Lainnya	9,751,439,848
Total Pendapatan Operasional	18,184,161,603
II. HAK PIHAK III ATAS BAGI HASIL	
1. Hak Bagi Hasil ITT - bukan dari Bank	-
1.1 Tabungan Mudharabah	252,078,863
1.2 Deposito Mudharabah	2,551,756,755
2. Hak Bagi Hasil ITT - dari Bank	-
2.1 Tabungan Mudharabah	-
2.2 Deposito Mudharabah	345,239,718
Total Hak Pihak III	3,149,075,336
III. BIAYA OPERASIONAL LAINNYA	
1. Biaya Umum dan Administrasi	3,043,089,717
2. Biaya Tenaga Kerja	7,493,501,088
3. Biaya Penyusutan & Amortisasi	9,487,915,662
4. Biaya Lainnya	633,985,391
Total Biaya Operasional Lainnya	20,658,491,858
Total Pendapatan / Beban Operasional	(5,623,405,592)
IV. Pendapatan Non Operasional	9,404,805,973
V. Biaya Non Operasional	326,337,412
Total Pendapatan / Beban Non Operasional	9,078,468,562
VI. Zakat	-
VII. Pajak	-
LABA/RUGI Tahun Berjalan	3,455,062,970

Cilegon, 12 Januari 2023
 PT BPRS CILEGON MANDIRI

Novran Ervianman Syarifuddin, SE, MM.
 Direktur Utama

PT BPRS CILEGON MANDIRI
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UN AUDITED
 PERIODE : 31 DESEMBER 2022

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Cadangan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
EKUITAS TANGGAL 1 JANUARI 2021	56,600,000,000	355,800,000	8,012,735,903	(430,996,793)	64,537,539,110
Pembagian Laba Tahun lalu	-	-	-	-	-
Cadangan	-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	(21,613,439,417)	(21,613,439,417)
Ekuitas tanggal 31 Desember 2021	56,600,000,000	355,800,000	8,012,735,903	(22,044,436,210)	42,924,099,693
Tambahan Modal Saham	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	3,455,062,970	3,455,062,970
Ekuitas tanggal 31 Desember 2022	59,600,000,000	355,800,000	8,012,735,903	(18,589,373,240)	49,379,162,663

Cilegon, 12 Januari 2023

PT BPRS CILEGON MANDIRI

PT. BPRS Syari'ah

CILEGON MANDIRI

Novran Erviatman Syarifuddin, SE. MM.
 Direktur Utama



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM CILEGON MANDIRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Catatan.	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
ASET			
I. ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1)	16,680,559,542	22,704,984,500
Investasi Jangka Pendek	2)	13,500,000,000	12,000,000,000
Piutang Usaha	3)	8,368,071,912	7,536,917,112
Penyisihan Piutang		(4,422,073,408)	(3,925,876,056)
Piutang Usaha Bersih		3,945,998,504	3,611,041,056
Persediaan	4)	2,751,843,319	2,873,771,191
Pembayaran Dimuka	5)	97,781,592	97,781,592
Jumlah Aset Lancar		36,976,182,957	41,287,578,339
II. ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	6)	95,066,710,959	84,676,232,768
Akumulasi Penyusutan		(52,482,314,473)	(46,843,070,283)
Nilai Buku Aset Tetap		42,584,396,486	37,833,162,486
Aset Lain-Lain	7)	-	-
Aset Tidak Berwujud	8)	1,890,935,058	1,890,935,058
Amortisasi		(1,812,777,870)	(1,785,981,120)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud		78,157,188	104,953,938
Jumlah Aset Tidak Lancar		42,662,553,673	37,938,116,423
TOTAL ASET		79,638,736,630	79,225,694,762
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
III. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Biaya yang Masih Harus Dibayar	9)	2,124,775,492	2,418,501,897
Utang Pajak	10)	823,329,197	1,399,483,482
Utang Iuran Pensiun	11)	8,214,977	361,834,252
Bantuan Pendidikan pegawai	12)	140,269,232	-
Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	13)	168,323,079	-
Jumlah Kewajiban Lancar		3,264,911,977	4,179,819,631
IV. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Imbalan Kerja	14)	2,523,333,251	2,531,765,427
Jumlah Kewajiban Lain-lain		2,523,333,251	2,531,765,427
V. EKUITAS			
Penyertaan Pemerintah Kota Cilegon	15)	42,853,000,000	42,853,000,000
Penyertaan Pemerintah Yang Belum di Tetapkan Statusnya	16)	16,180,820,000	16,180,820,000
Modal Hibah	17)	691,128,000	691,128,000
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	18)	(2,850,646,623)	(2,850,646,623)
Dana Cadangan	19)	8,570,600,000	-
Laba Ditahan/(Akumulasi Rugi) Tahun Lalu		2,389,183,134	10,029,039,031
Laba /Rugi Tahun Berjalan		6,016,406,890	5,610,769,295
Saldo Laba/Rugi Ditahan	20)	8,405,590,024	15,639,808,326
Jumlah Ekuitas		73,850,491,401	72,514,109,704
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		79,638,736,630	79,225,694,762

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Mengetahui
Direktur

Drs. Taufiqurrohman HS, M.P

Di Periksa Oleh
Kabag Adm & Keuangan

Ikhwan Kurniawan

Cilegon, Januari 2023
Dibuat Oleh
Kasubag Pembukuan & Anggaran

Fahru Raziki



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM CILEGON MANDIRI
LAPORAN LABA/(RUGI)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Catatan.	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	21)	30,484,652,250	29,368,954,900
Pendapatan Non Air	22)	3,796,116,977	3,302,902,216
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		34,280,769,227	32,671,857,116
BEBAN LANGSUNG USAHA			
Beban Sumber Air	23)	6,837	7,805
Beban Pengolahan Air	24)	4,234,833,389	4,612,786,113
Beban Transmisi dan Distribusi	25)	9,975,235,225	9,514,324,230
JUMLAH BEBAN LANGSUNG USAHA		14,210,075,451	14,127,118,147
LABA KOTOR		20,070,693,777	18,544,738,969
BEBAN USAHA			
Beban Administrasi dan Umum	26)	13,168,315,940	12,662,097,053
JUMLAH BEBAN USAHA		13,168,315,940	12,662,097,053
LABA / (RUGI) USAHA		6,902,377,837	5,882,641,915
PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Lain-Lain	27)	1,011,699,306	1,437,997,629
Beban Lain-Lain	28)	200,734,974	270,180,097
Jml Pend/(Beban) Non Operasional		810,964,332	1,167,817,532
LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK		7,713,342,168	7,050,459,447
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Penghasilan	29)	(1,696,935,277)	(1,439,690,151)
LABA / (RUGI) BERSIH		6,016,406,890	5,610,769,296

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mengetahui
Direktur

Drs. Taufiqurrohman HS, M.Pd

Di Periksa Oleh
Kabag Adm & Keuangan

Ikhwan Kurniawan

Cilegon, Januari 2023
Dibuat Oleh
Kasubag Pembukuan & Anggaran

Fahru Raziki



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM CILEGON MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Uraian	Penyertaan Pemda Kota Cilegon		Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya		Modal Hibah		Saldo Laba/Rugi Ditahan		Pengukuran Kembali Imbalan Kerja		Dana Cadangan		Jumlah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I.	SALDO PER 1 JANUARI 2020	42,853,000,000		16,180,820,000		691,128,000		10,029,039,032		(2,850,646,623)		-		66,903,340,409	
-	Laba Tahun Berjalan	-		-		-		5,610,769,295		-		-		5,610,769,295	
II.	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	42,853,000,000		16,180,820,000		691,128,000		15,639,808,327		(2,850,646,623)		-		72,514,109,704	
III.	MUTASI PADA TAHUN BERJALAN														
	Penyetoran PAD	-		-		-		(4,180,023,126)		-		-		(4,180,023,126)	
	Bantuan Pendidikan pegawai	-		-		-		(140,269,232)		-		-		(140,269,232)	
	Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	-		-		-		(168,323,079)		-		-		(168,323,079)	
	CSR Tahun 2021	-		-		-		(191,409,755)		-		-		(191,409,755)	
	Dana Cadangan	-		-		-		(8,570,600,000)		-		8,570,600,000		-	
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-		-		-		6,016,406,890		-		-		6,016,406,890	
IV.	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	42,853,000,000		16,180,820,000		691,128,000		8,405,590,025		(2,850,646,623)		8,570,600,000		73,850,491,401	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Diperiksa Oleh
Kabag Adm & Keuangan

Ikhwani Kurniawan

Cilegon, Januari 2023
Dibuat Oleh
Kasubag Pembukuan & Anggaran

Fahru Raziki

PT PELABUHAN CILEGON MANDIRI
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2021 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah , kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	1	125.120.575.575	157.496.827.557
Piutang Usaha -	2	20.364.558.429	8.838.445.593
setelah dikurangi cadangan piutang ragu ragu			
Pajak dibayar dimuka	15.a	0	92.694.167
Uang muka	3	3.079.683.116	773.841.552
Biaya dibayar dimuka	4	3.060.267.600	83.567.307
Total aset lancar		151.625.084.720	167.285.376.176
Aset tidak lancar			
Aset tetap -	5	37.782.833.001	42.318.098.043
setelah dikurangi akumulasi penyusutan			
Aset tak berwujud	6	1.515.731.604	1.187.500.000
Piutang lain-lain	7	24.233.254.358	24.534.258.807
Aset kepelabuhanan	8	1.084.475.033.377	1.084.309.922.812
Aset hak guna	9	16.974.120.228	17.080.601.068
Aset tidak lancar lainnya	10	6.605.230.909	6.605.230.909
Total aset tidak lancar		1.171.586.203.477	1.176.035.611.639
TOTAL ASET		1.323.211.288.196	1.343.320.987.815

Cilegon, 2 Februari 2022
 Direview dan Disetujui Oleh

MUHAMMAD WILLY
 Direktur Utama

EKO DIDIK HARNOKO
 Direktur Operasional

PT PELABUHAN CILEGON MANDIRI
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah , kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN USAHA	18	116.884.044.073	106.546.204.166
BEBAN POKOK PENJUALAN	19	(84.833.200.885)	(64.317.020.879)
LABA BRUTO		32.050.843.188	42.229.183.287
BEBAN USAHA			
Beban pemasaran	20.a	(3.041.473.990)	(2.255.098.982)
Beban umum dan administrasi	20.b	(26.413.964.270)	(26.747.677.482)
Pendapatan lain-lain - bersih	21	4.077.059.363	2.710.843.583
Jumlah beban usaha		(25.378.378.897)	(26.291.932.881)
LABA SEBELUM PAJAK		6.672.464.291	15.937.250.405
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		-	-
Pajak kini	15.c	(1.467.942.144)	(4.817.483.660)
Pajak tangguhan		-	1.409.852.304
Beban pajak penghasilan		(1.467.942.144)	(3.407.631.356)
LABA BERSIH		5.204.522.147	12.529.619.049
(Kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain:			
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya			
Keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja			(50.235.860)
Manfaat (beban) pajak terkait			11.051.889
Jumlah penghasilan/ (beban) komprehensif lain		-	(39.183.971)
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5.204.522.147	12.490.435.085

PT PELABUHAN CILEGON MANDIRI
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2021 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah , kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	11	199.126.371	1.518.274.583
Pendapatan diterima dimuka	12	931.207.459	-
Liabilitas sewa	13	17.821.677.521	17.821.677.521
Utang pajak	15.b	40.095.485.922	52.339.207.448
Beban akrual	14	542.488.781	2.682.712.175
Total Liabilitas Jangka Pendek		59.589.986.054	74.361.871.727
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pasca kerja	16	339.841.788	339.841.788
Liabilitas sewa	13	2.005.469.352	2.005.469.352
Liabilitas pajak tangguhan		721.363.431	721.363.431
Total Liabilitas Jangka Panjang		3.066.674.571	3.066.674.571
Jumlah Liabilitas		62.656.660.625	77.428.546.298
EKUITAS			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000 per saham			
Modal Dasar - 1.138.794.380.000 saham untuk tahun 2022 dan 2021			
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh -			
1.138.794.380.000 saham pada tahun 2022 dan 2021	17	1.138.794.380.000	1.138.794.380.000
Penghasilan komprehensif lain		294.417.164	255.233.193
Saldo laba		121.465.830.407	126.842.828.325
Laba tahun berjalan			
Jumlah Ekuitas		1.260.554.627.571	1.265.892.441.518
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.323.211.288.196	1.343.320.987.815